



LKPJ 2019

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
KEPADA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui LKPJ Gubernur Jawa Timur diharapkan DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Gubernur Jawa Timur selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur,


menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun-tahun selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amiiin.

Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surabaya, Maret 2020

Gubernur Jawa Timur



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. DASAR HUKUM	I – 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH	I – 3
C. KONDISI EKONOMI.....	I – 42
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
A. VISI DAN MISI	II – 1
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	II – 10
C. PRIORITAS DAERAH	II – 16
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	III – 2
1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	III – 2
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III – 5
3. Permasalahan dan Solusi	III – 8
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	III – 11
1. Kebijakan Belanja Daerah	III – 11
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah	III – 16
3. Permasalahan dan Solusi	III – 25
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	III – 27
1. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III – 27
2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah.....	III – 29
3. Permasalahan dan Solusi	III – 30
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019	
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	IV – 1
2. Indeks Theil	IV – 2
3. Persentase Penduduk Miskin.....	IV – 3
4. Indeks Gini	IV – 4
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IV – 5

6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IV – 6
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IV – 8
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	IV – 9
9.	Indeks Kesalehan Sosial	IV – 9
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IV – 10
11.	Indeks Risiko Bencana	IV – 11
B. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN		
1)	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR.....	IV – 13
1.	URUSAN PENDIDIKAN	IV – 13
1.1	Dinas Pendidikan	IV – 13
2.	URUSAN KESEHATAN.....	IV – 62
2.1	Dinas Kesehatan	IV – 62
2.2	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	IV – 91
2.3	RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang.....	IV – 100
2.4	RSUD Dr. Soedono Madiun.....	IV – 107
2.5	RSUD Haji Surabaya.....	IV – 114
2.6	RS Jiwa Menur Surabaya	IV – 124
2.7	RS Karsa Husada Batu	IV – 136
2.8	RS Paru Jember	IV – 143
2.9	RS Paru Dungus Madiun	IV – 150
2.10	RS Kusta Kediri	IV – 157
2.11	RS Kusta Sumberglagah Mojokerto	IV – 163
2.12	RS Mata Masyarakat Jawa Timur	IV – 169
2.13	RS Paru Surabaya	IV – 174
2.14	RS Moh. Noer Pamekasan	IV – 179
2.15	RS Paru Manguharjo Madiun.....	IV – 184
2.16	Akademi Keperawatan Madiun	IV – 189
2.17	Akademi Gizi Surabaya	IV – 196
2.18	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang	IV – 202
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	IV – 207
3.1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	IV – 207
3.2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	IV – 237
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	IV – 263
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Ciptakarya	IV – 263

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	IV – 273
5.1. Satuan Polisi Pamong Praja	IV – 273
6. URUSAN SOSIAL	IV – 280
6.1 Dinas Sosial	IV – 280
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	IV – 305
1. URUSAN KETENAGAKERJAAN	IV – 305
1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IV – 305
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IV – 351
2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan	IV – 351
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	IV – 364
3.1 Dinas Lingkungan Hidup	IV – 364
4. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV – 384
4.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV – 384
5. URUSAN PERHUBUNGAN	IV – 395
5.1 Dinas Perhubungan	IV – 395
6. URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	IV – 418
6.1 Dinas Komunikasi dan Informatika	IV – 418
7. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	IV – 432
7.1 Dinas Koperasi dan UKM	IV – 432
8. URUSAN PENANAMAN MODAL	IV – 445
8.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	IV – 445
9. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	IV – 456
9.1 Dinas Kepemudaan dan olahraga	IV – 456
10. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	IV – 466
10.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	IV – 466
11. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	IV – 486
11.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IV – 486
2) URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN	IV – 502
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	IV – 502
1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan	IV – 502
2. URUSAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	IV – 539
2.1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	IV – 539
2.2 Dinas Perkebunan	IV – 565

2.3	Dinas Peternakan	IV – 577
3.	URUSAN KEHUTANAN	IV – 602
3.1	Dinas Kehutanan	IV – 602
4.	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	IV – 617
4.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	IV – 617
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	IV – 628
5.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IV – 628
3)	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	IV – 650
3.1	Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	IV – 650
3.2	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial.....	IV – 658
3.3	Biro Hukum	IV – 670
3.4	Biro Administrasi Perekonomian	IV – 679
3.5	Biro Administrasi Sumber Daya Alam	IV – 688
3.6	Biro Administrasi Pembangunan	IV – 694
3.7	Biro Organisasi	IV – 702
3.8	Biro Umum	IV – 717
3.9	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	IV – 722
3.10	Sekretariat DPRD	IV – 730
4)	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	IV – 738
4.1	Inspektorat Provinsi	IV – 738
4.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	IV – 747
4.3	Badan Pendapatan Daerah.....	IV – 761
4.4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	IV – 799
4.5	Badan Kepegawaian Daerah.....	IV – 811
4.6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV – 823
4.7	Badan Penelitian dan Pengembangan	IV – 833
4.8	Badan Penghubung	IV – 841
4.9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	IV – 849
4.10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV – 860
4.11	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan I Madiun	IV – 868
4.12	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro	IV – 876
4.13	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang.....	IV – 882

4.14	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	IV – 891
4.15	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember.....	IV – 899
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
A.	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN.....	V – 1
B.	INSTANSI PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	V – 2
C.	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA.....	V – 3
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	V – 3
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR.....	V – 5
3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	V – 7
4.	DINAS PERKEBUNAN.....	V – 10
5.	DINAS PERTENAKAN	V – 12
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
A.	KERJASAMA ANTAR DAERAH	VI – 1
1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	VI – 1
2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI – 2
3.	Permasalahan dan Solusi	VI – 5
B.	KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	VI – 6
1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	VI – 6
2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI – 7
3.	Permasalahan dan Solusi	VI – 8
C.	KERJASAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI	VI – 9
a.	Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri.....	VI – 9
1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	VI – 9
2.	Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	VI – 9
3.	Permasalahan dan Solusi	VI – 10
b.	Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	VI – 16
1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	VI – 16
2.	Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	VI – 16
3.	Permasalahan dan Solusi	VI – 20

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH	VI – 20
1. Kebijakan dan Kegiatan.....	VI – 20
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	VI – 21
3. Permasalahan dan Solusi	VI – 22
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	VI – 23
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.....	VI – 23
2. Status Bencana (Nasional, Regional/ Provinsi, Lokal/ Kabupaten, Kota).....	VI – 29
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	VI – 29
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.....	VI – 30
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi.....	VI – 30
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.....	VI – 34
1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah.....	VI – 34
2. Sumber Anggaran	VI – 40
3. Permasalahan dan Solusi	VI – 40
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	VI – 41
1. Gangguan yang Terjadi	VI – 41
2. Perangkat Daerah yang Menangani	VI – 48
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani	VI – 48
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	VI – 49
5. Keikutsertaan Aparat dalam Penanggulangan.....	VI – 49
6. Permasalahan dan Solusi	VI – 50

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se Jawa Timur	I – 4
Tabel 1.2	Luas Catcment Area (Km2) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur	I – 14
Tabel 1.3	Kedadaan Cuaca Bulanan Tahun 2019.....	I – 15
Tabel 1.4	Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur	I – 16
Tabel 1.5	Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur	I – 17
Tabel 1.6	Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur	I – 30
Tabel 1.7	Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Timur	I – 37
Tabel 1.9	Perkembangan Pesebaran Penduduk Jawa Timur 2014-2019	I – 39
Tabel 1.10	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Timur	I – 41
Tabel 1.11	Neraca Perdagangan Jawa Timur, Januari-Desember 2019	I – 49

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 2.1	Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	II – 41
-----------	---	---------

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Target, realisasi dan tingkat Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2018 dan 2019	III–5
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan 2019	III–17
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III–18
Tabel 3.4	Target, Realisasi, Tingkat dan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Perangkat Daerah Tahun 2019	III–23

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019**

Tabel 4.1	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur dan Nasional	IV – 1
Tabel 4.2	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur.....	IV – 3
Tabel 4.3	Indeks Gini Jawa Timur	IV – 5

Tabel 4.4	Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur	IV - 6
Tabel 4.5	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur	IV - 7
Tabel 4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur	IV - 8
Tabel 4.7	Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur	IV - 9
Tabel 4.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur	IV - 10
Tabel 4.9	Indeks Risiko Bencana Jawa Timur	IV - 12

TABEL BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tabel 5.1	Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	V-2
Tabel 5.2	Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP) di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.....	V-3
Tabel 5.3	Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP) di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.....	V-5
Tabel 5.4	Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.....	V-17
Tabel 5.5	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan (TP) di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2019	V-10
Tabel 5.6	Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP) di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.....	V-14

TABEL BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tabel 6.1	Kejadian Bencana Angin Kencang Tahun 2019	VI-25
Tabel 6.2	Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2019.....	VI-26
Tabel 6.3	Kejadian Bencana Gempa Bumi Tahun 2019.....	VI-27
Tabel 6.4	Kejadian Bencana Banjir Tahun 2019	VI-27
Tabel 6.5	Kejadian Bencana Banjir Bandang Tahun 2019	VI-29
Tabel 6.6	Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2019.....	VI-29
Tabel 6.7	Kejadian Bencana Gelombang Pasang Tahun 2019	VI-29
Tabel 6.8	Kejadian Bencana Gerakan Tanah Tahun 2019	VI-30
Tabel 6.9	Kejadian Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2019	VI-30

Tabel 6.10	Kejadian Bencana Kebakaran Hutan Tahun 2019	VI-30
Tabel 6.11	Kejadian Bencana Tanah Longsor Tahun 2019	VI-31
Tabel 6.12	Rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah	VI-39
Tabel 6.13	Desa Penyangga dan KTT	VI-42
Tabel 6.14	Patroli Wilayah Trantibum	VI-46
Tabel 6.15	Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah	VI-47
Tabel 6.16	Pengamanan Unjuk Rasa	VI-48
Tabel 6.17	Patroli Wilayah Trantibum	VI-48
Tabel 6.18	Penyelenggaraan Tibum dan Tramas	VI-48
Tabel 6.19	Pelatihan dan Koordinasi Anggota Linmas	VI-49
Tabel 6.20	Pemberdayaan Masyarakat dalam Swakara.....	VI-50
Tabel 6.21	Pemberdayaan satlinmas.....	VI-50
Tabel 6.22	Kegiatan Penyuluhan Perda	VI-51
Tabel 6.23	Kegiatan Penegakan Perda	VI-52

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur	I – 4
Gambar 1.2	Peta Kemiringan Lereng	I – 9
Gambar 1.3	Peta Ketinggian Lahan	I – 10
Gambar 1.4	Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur	I – 11
Gambar 1.5	Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur	I – 12
Gambar 1.6	Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Jawa Timur.....	I – 13
Gambar 1.7	Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur	I – 14
Gambar 1.8	Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Provinsi Jatim.....	I – 18
Gambar 1.9	Peta Potensi Perkebunan Provinsi Jawa Timur	I – 19
Gambar 1.10	Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur	I – 20
Gambar 1.11	Peta Potensi Kawasan Kehutanan Provinsi Jawa Timur	I – 21
Gambar 1.12	Peta Klasifikasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur.....	I – 22
Gambar 1.13	Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur	I – 23
Gambar 1.14	Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Provinsi Jawa Timur ..	I – 24
Gambar 1.15	Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur	I – 25
Gambar 1.16	Peta Potensi Panas Bumi Provinsi Jawa Timur.....	I – 25
Gambar 1.17	Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur.....	I – 26
Gambar 1.18	Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur	I – 27
Gambar 1.19	Peta Wilayah Rawan Tanah Longsor	I – 28
Gambar 1.20	Peta Wilayah Lokasi Potensi Banjir Provinsi Jawa Timur.....	I – 31
Gambar 1.21	Peta Wilayah Rawan Bencana Gunung Berapi.....	I – 32
Gambar 1.22	Peta Wilayah Rawan Gempa Bumi	I – 33
Gambar 1.23	Peta Wilayah Rawan Tsunami	I – 34
Gambar 1.24	Angka Ketergantungan Penduduk Jawa Timur 2012-2019.....	I – 37
Gambar 1.25	Jumlah Penduduk Jawa Timur 2014-2019	I – 38
Gambar 1.26	Tingkat Inflasi Jawa Timur Tahun 2010-2019.....	I – 44
Gambar 1.27	Ekspor Impor Neraca Non Migas 2019	I – 50
Gambar 1.28	Ekspor Impor 2019.....	I – 50
Gambar 1.29	Realisasi Investasi Jawa Timur 2019	I – 50
Gambar 1.30	Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2014-2019.....	I – 51
Gambar 1.31	Peringkat Realisasi Investasi Jawa Timur 2018 dan 2019.....	I – 51
Gambar 1.32	Realisasi Investasi Jawa Timur 2019 berdasarkan bidang usaha	I – 52
Gambar 1.33	Realisasi PMA Jawa Timur 2019 berdasarkan bidang usaha	I – 52
Gambar 1.34	Realisasi PMDN Jawa Timur 2019 berdasarkan bidang usaha.....	I – 53
Gambar 1.35	Realisasi Investasi Jawa Timur 2019 berdasarkan lokasi.....	I – 54

Gambar 1.36	Realisasi PMA Jawa Timur 2019 berdasarkan bidang lokasi.....	I – 54
Gambar 1.37	Realisasi PMDN Jawa Timur 2019 berdasarkan lokasi.....	I – 55
Gambar 1.38	Realisasi PMA Jawa Timur 2019 berdasarkan Negara Asal	I – 55

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 6
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 6
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Komponen Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 7
Gambar 3.4	Target dan Realisasi Komponen lain-lain Pendapatan yang sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 8
Gambar 3.5	Target dan Realisasi Komponen Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 17
Gambar 3.6	Target dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 19
Gambar 3.7	Komposisi Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur Berdasarkan kelompok urusan penyelenggara pemerintahan.....	III – 20
Gambar 3.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.....	III – 20
Gambar 3.9	Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	III – 21
Gambar 3.10	Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Pilihan.....	III – 21
Gambar 3.11	Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Penunjang.....	III – 22
Gambar 3.12	Target dan Realisasi Komponen Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 29
Gambar 3.13	Target dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	III – 30

BAB VI

Gambar 6.1	Peta Situasi Tahura R. Soerjo	VI–38
Gambar 6.2	Diagram Realisasi Anggaran Satpol PP Tahun 2019	VI–54



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1950, Jawa Timur merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaya, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 Januari 2020 Nomor 700/479/OTDA tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa luas wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 47.803,49 Km², Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa.

Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia-Badan Informasi Geospasial

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas kepulauan madura sekitar 10 persen. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kabupaten Pacitan	12	5	166	171	1.389,92
2	Kabupaten Ponorogo	21	26	281	307	1.305,70
3	Kabupaten Trenggalek	14	5	152	157	1.147,22

4	KabupatenTulungagung	19	14	257	271	1.055,65
5	KabupatenBlitar	22	28	220	248	1.336,48
6	KabupatenKediri	26	1	343	344	1.386,05
7	Kabupaten Malang	33	12	378	390	3.530,65
8	Kabupaten Lumajang	21	7	198	205	1.790,90
9	Kabupaten Jember	31	22	226	248	3.092,34
10	KabupatenBanyuwangi	25	28	189	217	5.782,40
11	KabupatenBondowoso	23	10	209	219	1.525,97
12	Kabupaten Situbondo	17	4	132	136	1.669,87
13	Kabupaten Probolinggo	24	5	325	330	1.696,21
14	Kabupaten Pasuruan	24	24	341	365	1.474,02
15	Kabupaten Sidoarjo	18	31	322	353	634,38
16	Kabupaten Mojokerto	18	5	299	304	717,83
17	Kabupaten Jombang	21	4	302	306	1.115,09
18	KabupatenNganjuk	20	20	264	284	1.224,25
19	Kabupaten Madiun	15	8	198	206	1.037,58
20	Kabupaten Magetan	18	28	207	235	688,84
21	KabupatenNgawi	19	4	213	217	1.295,98
22	KabupatenBojonegoro	28	11	419	430	2.198,79
23	KabupatenTuban	20	17	311	328	1.834,15
24	Kabupaten Lamongan	27	12	462	474	1.782,05
25	Kabupaten Gresik	18	26	330	356	1.191,25
26	Kabupaten Sampang	14	6	180	186	1.233,08
27	Kabupaten Pamekasan	13	11	178	189	792,24
28	Kabupaten Sumenep	27	4	330	334	1.998,54
29	KabupatenBangkalan	18	8	273	281	1.001,44
30	Kota Kediri	3	46	0	46	63,40
31	Kota Blitar	3	21	0	21	32,57
32	Kota Malang	5	57	0	57	145,28
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29	56,67
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34	35,29
35	Kota Mojokerto	2	18	0	18	20,21
36	Kota Madiun	3	27	0	27	33,92
37	Kota Surabaya	31	15	0	154	350,54
38	Kota Batu	3	5	19	24	136,74
JUMLAH		666	777	7.724	8.501	47.803,49

Sumber : Permendagri No. 72/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km² atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km² setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Sementara itu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kondisi geografi Jawa Timur sangat strategis, hal ini karena Jawa Timur menjadi pintu utama perdagangan di Indonesia bagian timur, secara astronomis terletak antara 111,0^o-114,4^o Bujur Timur dan 7,12^o-8,48^o Lintang Selatan.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 508 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (35 pulau), Kabupaten Trenggalek (51 pulau), Kabupaten Tulungagung (13 pulau), Kabupaten Blitar (30 pulau), Kabupaten Malang (117 pulau), Kabupaten Jember (81 pulau), Kabupaten Banyuwangi (34 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Probolinggo (1 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), dan Kabupaten Sumenep (123 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep (*Sumber: Badan Informasi Geospasial*).

b. Kawasan

Kondisi/kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 aspek, yaitu :

- Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo,

Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.

- Kondisi/Kawasan Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Dari 4 kabupaten tertinggal di Jawa Timur tersebut, untuk Kab. Situbondo tertinggal di SDM, infrastruktur, Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), dan Karakteristik Daerah (KD). Sedangkan Kab. Bondowoso lemah di SDM dan KD, Kab. Sampang tertinggal di aspek SDM, Ekonomi dan KKD, dan Kab. Bangkalan hanya tertinggal di aspek SDM.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun terakhir setidaknya membuahkan hasil yang positif, dengan focus beberapa program pembangunan bersama Pemerintah Pusat, empat kabupaten sebagaimana tersebut di atas telah resmi dinyatakan terbebas dari daerah tertinggal. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI No 79 Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019. Pada keputusan tersebut ditetapkan sebanyak 62 kabupaten tertinggal telah terentaskan pada tahun 2015-2019. Empat kabupaten di Jawa Timur yang ditetapkan lepas dari ketertinggalan yaitu Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso.

- Kondisi/Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat,

seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda-beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

- **Kawasan Pegunungan**

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Holosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartir yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

- **Kawasan Kepulauan**

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten

Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

1.3. Topografi

Kondisi topografi Jawa Timur terbagi menjadi 2(dua) aspek, antara lain :

a. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Jawa Timur Bagian Selatan.

Gambar1.2
Peta Kemiringan Lereng



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

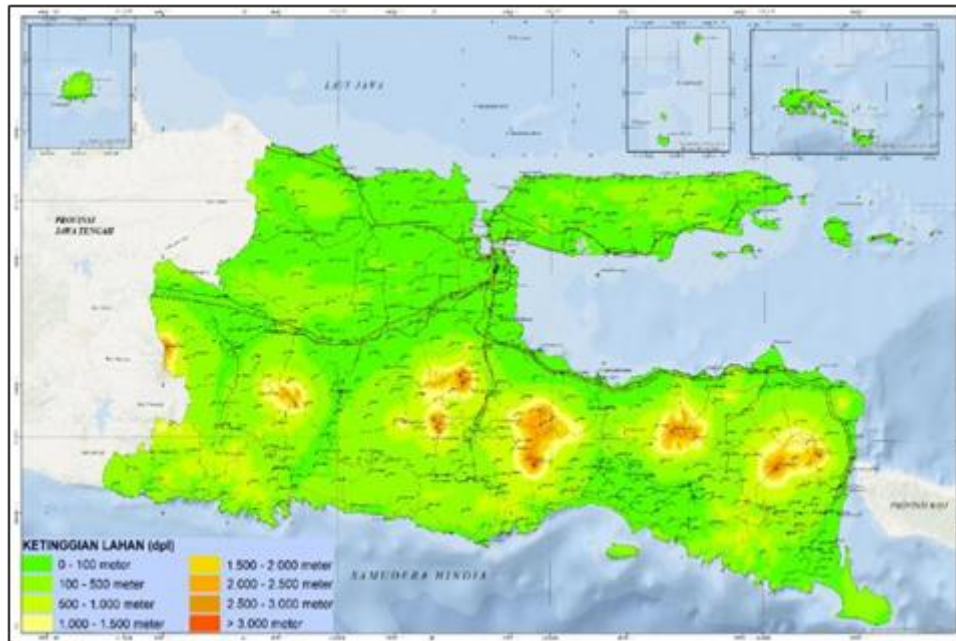
b. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.

- d. Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Gambar 1.3
Peta Ketinggian Lahan



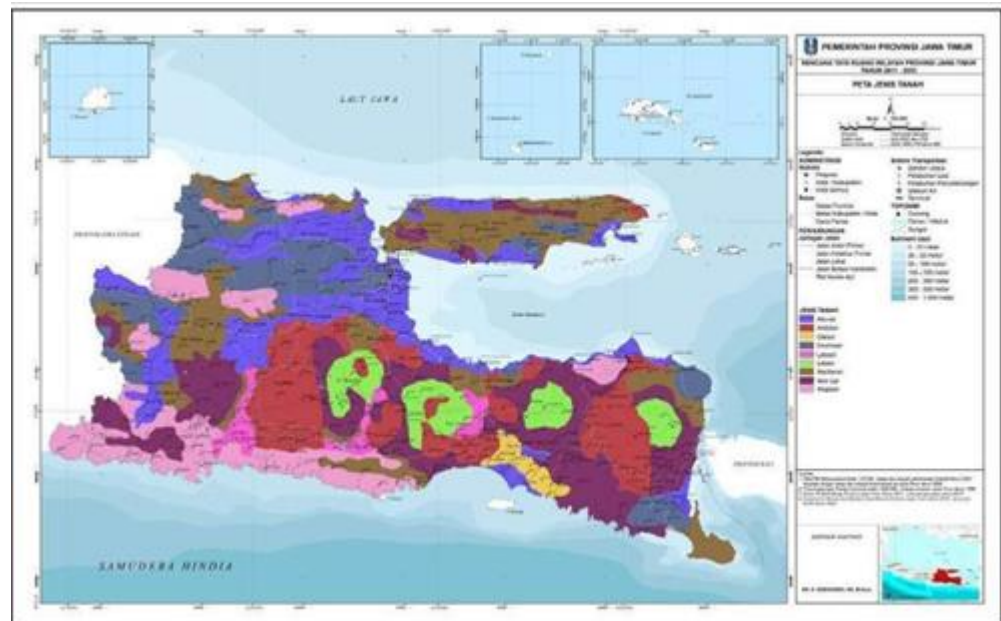
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

1.4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 % dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan.

Gambar 1.4
Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur



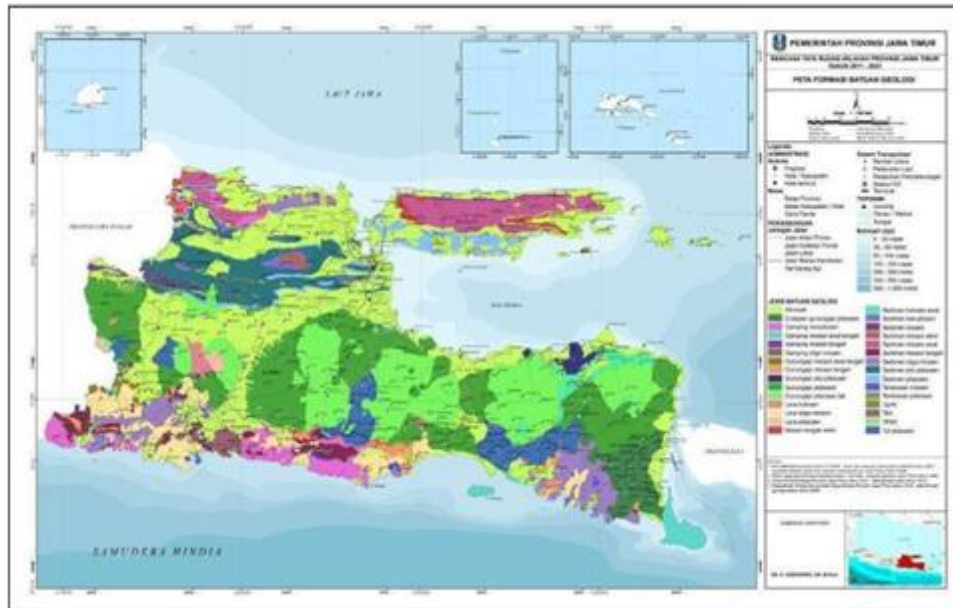
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

b. Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, yang dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartir, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

Gambar 1.5
Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

1.5. Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis nasional, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai/kali terbesar di Jawa Timur dengan panjang ± 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Kelud. Kali Brantas yang bersumber dari lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu membelok ke arah selatan setelah itu pada wilayah Kepanjen, Kali Brantas membelok ke arah barat bertemu dengan Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru dan bertemu Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui Kota Kediri dan pada wilayah Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke Kota Mojokerto dan terbagi menjadi 2 (dua), ke arah Surabaya dan Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Gambar 1.6
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

b. Wilayah Sungai dan Danau/Waduk

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai, dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean.

Gambar 1.7
Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Luas Catchment area tertinggi di provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km² dan terendah di Wilayah Sungai Welang – Rejoso dengan luas 2.601 km². Catchment area ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 1.2
Luas Catchment Area (km²) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Sungai	Luas (Km ²)	JumlahDAS
1	Bengawan Solo	13.070,00	94DAS
2	Brantas	13.880,00	20DAS
3	Welang–Rejoso	2.601,00	36DAS
4	Pekalen–Sampean	3.953,00	56DAS
5	Baru –Bajulmati	3.675,00	60DAS
6	Bondoyudo –Bedadung	5.364,00	47DAS
7	Madura	4.575,00	173 DAS

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

1.6. Klimatologi

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 22,3 derajat celcius dan maksimal 34,6 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (140%) mempunyai iklim tipe E. Kelembaban udara berkisar 30% hingga 99%.

Pada tahun 2019 matahari bersinar lebih terik pada bulan Mei, Juni, hingga November dengan penyinaran rata-rata antara 90,5-99,4 persen. Sedangkan bulan lainnya rata-rata di bawah 47,5-76,7 persen. Penyinaran matahari 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Angin juga bertiup lebih kencang pada tahun 2019, rata-rata kisaran 6,4-8,8 knot. Hanya pada bulan Desember kecepatan angin rata-rata 6,4 knot, diluar bulan itu angin bertiup cukup kencang. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Januari (rata-rata 8,8 knot). Jumlah rata-rata hujan selama tahun 2019 sebesar 1903.5 mm³. Rata-rata curah hujan tertinggi yang terjadi di bulan Januari- Desember, tertinggi mencapai 487,8 mm³ di bulan Januari.

Tabel 1.3
Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2019

Bulan	Rata - Rata Suhu Udara (OC)		Kelembapan Udara (%)		Tekanan Udara (mb)		Rata - Rata Kecepatan Angin (knots)	Sinar Matahari (%)	Curah Hujan (mm)
	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min			
Januari	32,3	24,8	99	55	1013,9	1003,6	8,8	47,5	487,8
Februari	32,4	24,7	97	53	1015,0	1005,3	7,1	47,5	451,1
Maret	32,1	24,8	98	53	1014,0	1004,6	7,4	54,3	330,2
April	32,6	25,5	98	53	1013,1	1005,4	6,8	62,7	332,6
Mei	32,9	24,9	96	47	1013,0	1005,9	6,5	97,5	53,9
Juni	32,1	23,3	94	47	1014,2	1006,2	6,8	90,8	0
Juli	31,4	22,3	93	41	1015,6	1007,4	7,4	99,4	0,8
Agustus	31,4	22,4	90	38	1015,3	1007,8	8,3	96,0	0
September	31,9	22,9	91	34	1016,3	1008,4	8,6	98,8	0
Oktober	34,0	24,1	91	35	1013,8	1005,2	8,1	99,2	0
November	34,6	25,8	90	30	1013,0	1004,9	6,8	90,5	26,4
Desember	34,2	25,6	97	33	1012,4	1004,0	6,4	76,7	220,7

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya

1.7. Penggunaan Lahan**a. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel 1.4
Penggunaan Lahan Eksisting Budidaya Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/KebunCampur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utamamelindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571,30 Ha atau sekitar 12,11 Persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).

Tabel 1.5
Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi
Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka	233.829,30	4,90
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,70
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298,00	0,01

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1. Potensi Pertanian

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk Pertanian tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan petani dan mekanisasi/modernisasi sarana-prasarana Pertanian pada sentra-sentra produksi.

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Untuk meningkatkan daya saing Pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi Pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indek Pertanaman (IP).

Gambar 1.8
Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha.

2.2. Potensi Perkebunan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perkebunan tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, mekanisasi sarana dan prasarana perkebunan serta upaya peningkatan kesejahteraan petani kebun.

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan

komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni :

- Perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen;
- Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.

Gambar 1.9
Peta Potensi Perkebunan Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Untuk meningkatkan daya saing Petani Kebun (Pekebun), akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk pengembangan pasar baik internasional maupun domestik yang dilakukan dengan memperluas promosi komoditas dan produk perkebunan. Strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimum. Potensi perkebunan lainnya dalam mendukung Peningkatan Daya Saing adalah adanya program pengembangan Industri Primer Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupaya untuk Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang fokus kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya ditanami kopi pada lereng Gunung Wilis.

2.3. Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan dan penguatan konektivitas kemaritiman tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perikanan.

Gambar 1.10
Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau
Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari :

- a. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng ;

- b. Sektor perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi;
- c. Sektor perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya.

2.4. Potensi Kehutanan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk hutan tahun 2019, dilaksanakan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan promosi produk hutan.

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Gambar 1.11

Peta Potensi Kawasan Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

2.5. Potensi Peternakan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing komoditi produk peternakan tahun 2019, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, jaminan kemudahan usaha, perlindungan, serta upaya peningkatan kesejahteraan peternak melalui pengolahan produk derivat/pabrikasi serta peningkatan informasi perkembangan dan pemasaran produksi peternakan.

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukan bagi kegiatan peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil dan sentra peternakan unggas dan lainnya. Pengembangan ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan. Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan telur serta susu dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- Sentra peternakan ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda;
- Sentra peternakan ternak kecil meliputi kambing, domba dan babi
- Sentra peternakan unggas meliputi Ayam, Itik, Entok ; dan
- Sentra ternak lainnya meliputi kelinci.

Gambar 1.12
Peta Klasifikasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Strategi pembangunan peternakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bertujuan mencapai Ketahanan Pangan melalui

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur



a. **Pertambangan Mineral** : Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan.

- Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo.

- Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur
- Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

Gambar 1.14

Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Provinsi Jawa Timur

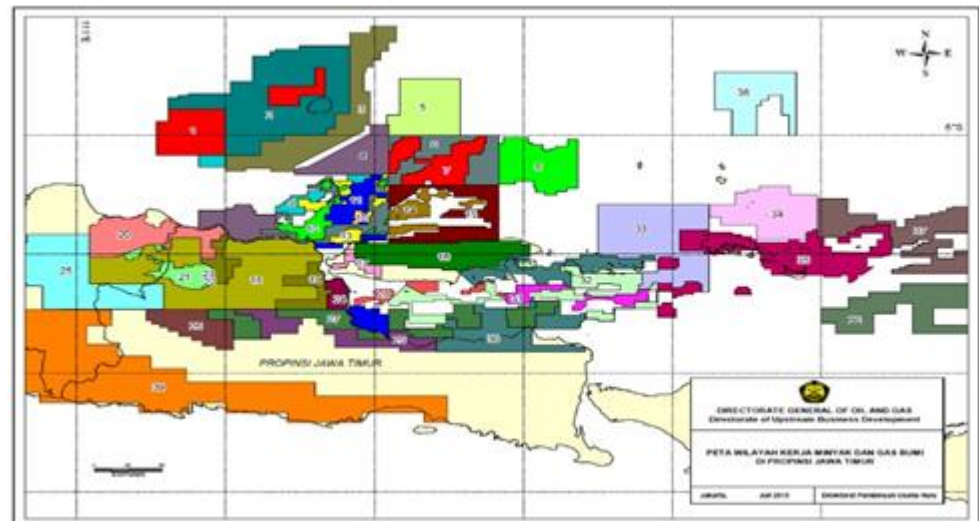


Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- b. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi: Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua

puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Gambar 1.15
Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Provinsi
Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- c. Potensi Panas Bumi dan Geothermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif.

Gambar 1.6
Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

POTENSI PANAS BUMI DI JAWA TIMUR



S

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

2.7. Potensi Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung, Hutan, Telaga, dan Taman Nasional.
- b. Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan Budaya, dan Museum.
- c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari, Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk.

Gambar 1.16
Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.8. Potensi Industri

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi hampir 29 persen, pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara.

Gambar 1.17
Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan diwilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan diwilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan diwilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri

kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

3. Wilayah Rawan Bencana

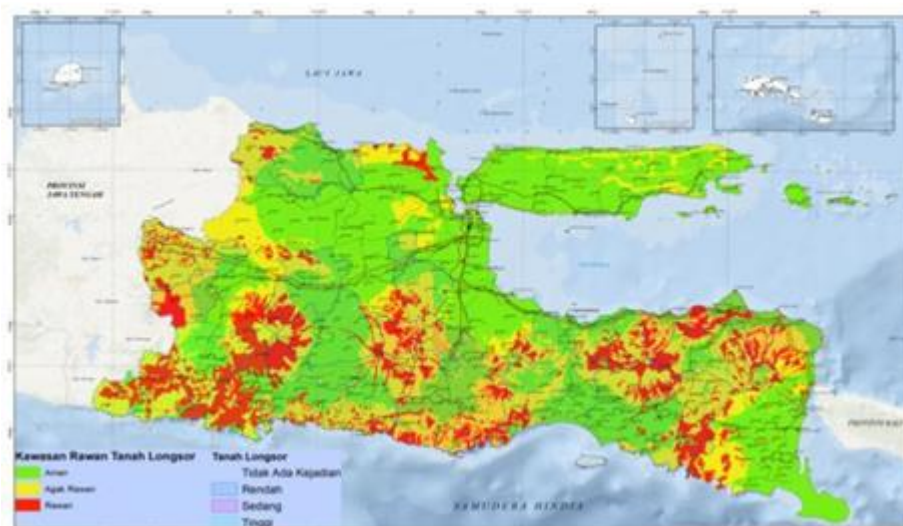
Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung.

3.1. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Gambar 1.18

Peta Wilayah Rawan Tanah Longsor Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelereng menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan.

3.2. Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

3.3. Wilayah Rawan Bencana Banjir

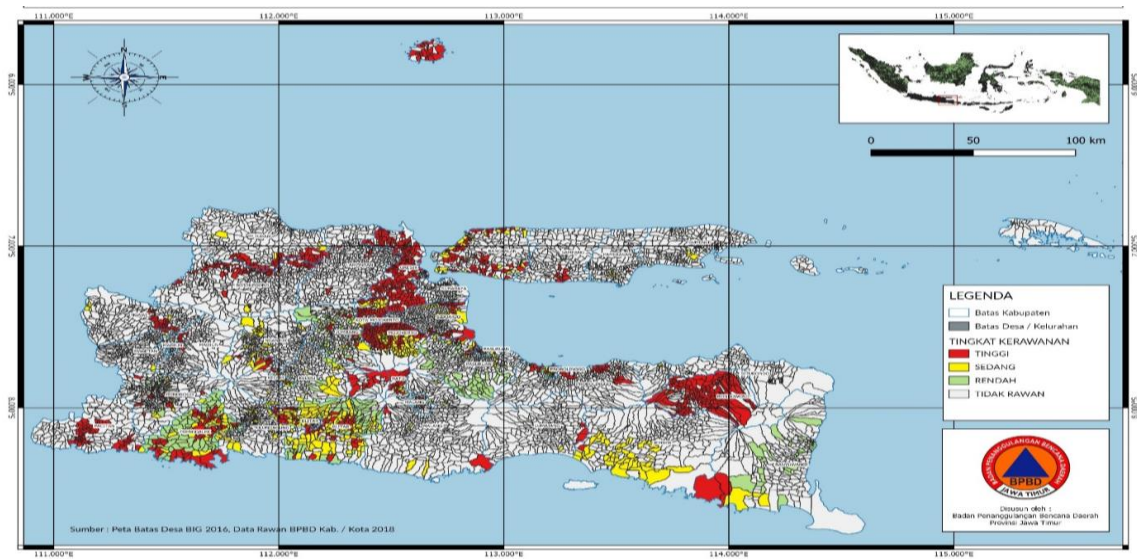
Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Tabel 1.7
Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Menengah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Gambar 1.19
Peta Wilayah Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur



3.4. Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunung berapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.

3.5. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

- Wilayah Rawan Letusan Gunung Api

Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Kawasan rawan letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif. Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan

dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi :

- a. Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi)
- b. Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi)
- c. Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan)
- d. Lamongan (Lumajang dan Probolinggo)
- e. Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto)
- f. Kelud (Kediri, Blitar dan Malang)
- g. Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember)

Gambar 1.19
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- Wilayah Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhannya batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar

melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

Gambar 1.20
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- Wilayah Rawan Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “*ring of fire*” yang melintasi Sumatra – Jawa –

Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Resiko tsunami terbagi menjadi :

- a. Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten umajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, KabupatenBangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan KabupatenSumenep.
- c. Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

Gambar 1.21
Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012

- Wilayah Rawan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahkan pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi:

- a. Penanganan luapan lumpur meliputi:
 - Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital.
 - Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- b. Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
 - Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru;
 - Normalisasi saluran drainase utama
 - Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas
 - Perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.
 - Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang ± 14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong.
 - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya–Gempol, dan
 - Konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya
- c. Pengamanan Kali Porong, meliputi:
 - Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong.
 - Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- d. Penanganan dampak sosial akibat luapan lumpur, meliputi:
 - Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
 - Perlindungan sosial terhadap hak-hak atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan
 - Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.
- e. Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian,

kegiatan ekonomi dan lingkungan. Tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri
- Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep

4. Demografi

4.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014;102).

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai.

Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

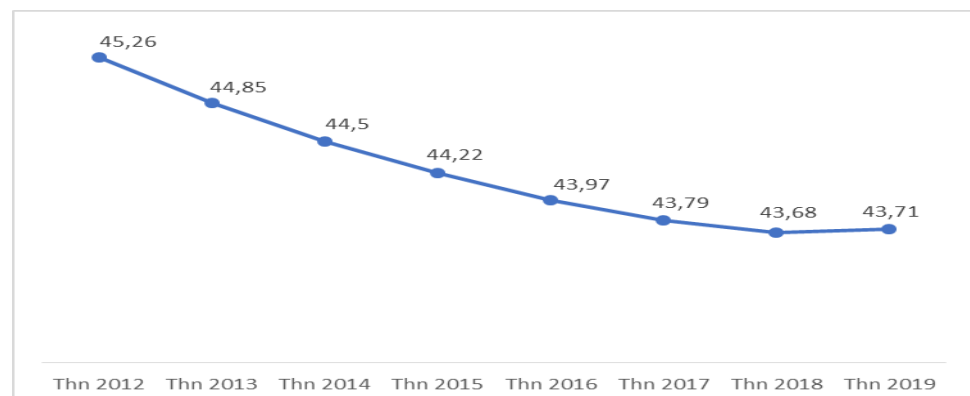
Tabel 1.18
Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk (000Jiwa)	38.610	38.784	39.041	39.287	39.522	39.698
2	KepadatanPenduduk (Jiwa/Km ²)	805	813	818	822	826	830
3	SexRatio(L/P)(%)	97,40	97,44	97,48	97,50	97,52	97,52
5	Jumlah Rumah Tangga	10.775	10.676	10.801	-	10.916	830
6	Rata-Rata ART (jiwa/ruta)	3,6	3,62	3,62	-	3,62	3,6
7	Menurut Kelompok Umur						
	- 0 - 14 thn (%)	23,47	23,19	22,91	22,64	22,51	22,21
	- 15 – 64 thn (%)	69,20	69,34	69,46	69,54	69,57	69,60
	- Di atas 65 thn (%)	7,33	7,47	7,63	7,82	7,93	8,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2014–2019) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada 2014 Jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 38,61 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 39.698 juta jiwa yang terdiri dari 19,57 juta laki-laki dan 20,07 juta jiwa perempuan. Sex ratio penduduk sebesar 97,52, artinya setiap per 100 orang perempuan terdapat laki- laki sebanyak 97,52 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2019 meningkat 3 poin dibanding tahun 2018 mencapai 829 jiwa per km².

Gambar 1.22
Angka Ketergantungan Penduduk Jawa Timur 2012-2019



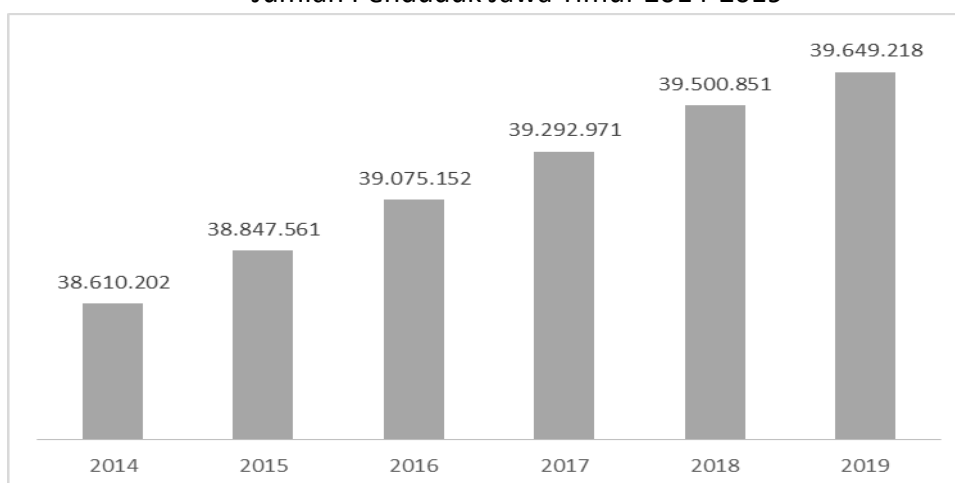
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 22,21 persen, usia produktif sebesar 69,60 persen dan usia tua sebesar 8,28 persen. Selama periode 2012 hingga tahun 2018 angka ketergantungan penduduk menunjukkan penurunan, naik sedikit pada tahun 2019. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,26 dan menurun menjadi 43,68 di tahun 2018. Pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 43,71. Capaian tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 43-44 orang usia tidak produktif. Keberhasilan Program KB di Jawa Timur merupakan salah satu penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.

4.2. Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah faktor kelahiran. Rata rata jumlah anak per keluarga merupakan tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran.

Gambar 1.23
Jumlah Penduduk Jawa Timur 2014-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,610 juta jiwa dan terus meningkat menjadi 39,650 juta jiwa pada tahun 2019. Hal ini juga selaras dengan kepadatan penduduknya yang terus meningkat hingga 829 Jiwa/Km² pada tahun 2019.

4.3. Distribusi/Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang terendah adalah Kota Mojokerto.

Tabel 1.19
Perkembangan Perserbaran Penduduk Jawa Timur Tahun 2014-2019

Wilayah	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Timur	38,610,202	38,847,561	39,075,152	39,292,971	39,500,851	39,698,631
Kab. Pacitan	549,481	550,986	552,307	553,388	554,394	555,304
Kab. Ponorogo	865,809	867,393	868,814	869,894	870,705	871,370
Kab. Trenggalek	686,781	689,200	691,295	693,104	694,902	696,295
Kab. Tulungagung	1,015,974	1,021,190	1,026,101	1,030,790	1,035,290	1,039,284
Kab. Blitar	1,140,793	1,145,396	1,149,710	1,153,803	1,157,500	1,160,677
Kab. Kediri	1,538,929	1,546,883	1,554,385	1,561,392	1,568,113	1,574,272
Kab. Malang	2,527,087	2,544,315	2,560,675	2,576,596	2,591,795	2,606,204
Kab. Lumajang	1,026,378	1,030,193	1,033,698	1,036,823	1,039,794	1,042,395
Kab. Jember	2,394,608	2,407,115	2,419,000	2,430,185	2,440,714	2,450,668
Kab. Banyuwangi	1,588,082	1,594,083	1,599,811	1,604,897	1,609,677	1,613,991
Kab. Bondowoso	756,989	761,205	765,094	768,912	772,297	775,715
Kab. Situbondo	666,013	669,713	673,282	676,703	679,993	682,978
Kab. Probolinggo	1,132,690	1,140,480	1,148,012	1,155,214	1,162,092	1,168,503
Kab. Pasuruan	1,569,507	1,581,787	1,593,683	1,605,307	1,616,578	1,627,396
Kab. Sidoarjo	2,083,924	2,117,279	2,150,482	2,183,682	2,216,804	2,249,476
Kab. Mojokerto	1,070,486	1,080,389	1,090,075	1,099,504	1,108,718	1,117,688
Kab. Jombang	1,234,501	1,240,985	1,247,303	1,253,078	1,258,618	1,263,814
Kab. Nganjuk	1,037,723	1,041,716	1,045,375	1,048,799	1,051,900	1,054,611
Kab. Madiun	673,988	676,087	677,993	679,888	681,394	682,684
Kab. Magetan	626,614	627,413	627,984	628,609	628,924	628,977

Kab. Ngawi	827,829	828,783	829,480	829,899	830,090	830,108
Kab. Bojonegoro	1,232,386	1,236,607	1,240,383	1,243,906	1,246,927	1,249,692
Kab. Tuban	1,147,097	1,152,915	1,158,374	1,163,614	1,168,277	1,172,790
Kab. Lamongan	1,187,084	1,187,795	1,188,193	1,188,478	1,188,913	1,189,106
Kab. Gresik	1,241,613	1,167,313	1,270,702	1,285,018	1,299,024	1,312,881
Kab. Bangkalan	945,821	954,305	962,773	970,894	978,892	986,672
Kab. Sampang	925,911	936,801	947,614	958,082	968,520	978,875
Kab. Pamekasan	836,224	845,314	854,194	863,004	871,497	879,992
Kab. Sumenep	1,067,202	1,072,113	1,076,805	1,081,204	1,085,227	1,088,910
Kota Kediri	278,072	280,004	281,978	284,002	285,582	287,409
Kota Blitar	136,903	137,908	139,117	139,995	140,971	141,876
Kota Malang	845,973	851,298	856,410	861,414	866,118	870,682
Kota Probolinggo	226,777	229,013	231,112	233,123	235,211	237,208
Kota Pasuruan	193,329	194,815	196,202	197,696	199,078	200,422
Kota Mojokerto	124,719	125,706	126,404	127,279	128,282	129,014
Kota Madiun	174,373	174,995	175,607	176,099	176,697	177,007
Kota Surabaya	2,833,924	2,848,583	2,862,406	2,874,699	2,885,555	2,896,195
Kota Batu	198,608	200,485	202,319	203,997	205,788	207,490

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4.4. Komposisi Penduduk

4.4.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2019 menunjukkan keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2018. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2019 sebesar 21,49 juta orang bertambah sebanyak 20 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2018 dan bertambah 55 ribu orang jika dibanding Agustus 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang naik sedikit dari 69,37 persen pada Agustus 2018 menjadi 69,44 persen pada Agustus 2019 atau naik sebesar 0,07 poin persen.

Tabel 1.20
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut
Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur

NO	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja	Juta	20,14	20,27	19,95	20,94	21,30	21,50
	>Berkerja	Juta	19,30	19,36	19,11	20,10	20,45	20,66
	>Pengangguran	Juta	0,84	0,91	0,84	0,84	0,85	0,84
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	%	68,12	67,84	66,14	68,78	69,37	69,45
3	TingkatPengangguran Terbuka(TPT)	%	4,19	4,47	4,21	4,00	3,99	3,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Jawa Timur pada Agustus 2019 sebesar 3,92 persen atau turun sebesar 0,07 poin persen dibandingkan keadaan Agustus 2018 dengan TPT sebesar 3,99 persen.

4.4.2. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2018, telah berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,05 tahun 2014 menjadi 7,39 pada tahun 2018, selanjutnya untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 12,45 tahun (2014); 12,66 tahun (2015); 12,98 tahun (2016); 13,09 tahun (2017); dan 13,10 tahun (2018).

4.4.3. Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa timur mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 39.657.788 orang (94,61%), diikuti Kristen Protestan 3,03 persen, Khatolik 0,93 persen, Hindu 0,94 persen, Budha 0,48 persen dan Konghucu 0,01 persen.

C. KONDISI EKONOMI

1. Pertumbuhan Ekonomi

➤ Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2018

Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 2.189,78 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.5630,76 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2018 tumbuh 5,65 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Industri Pengolahan sebesar 7,94 persen, diikuti Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,82 persen, serta Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 6,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,77 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2018 mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, dan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,93 persen, diikuti Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,16 persen diikuti PMTB sebesar 1,11 persen dan pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,75 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2018 (c-to-c) tumbuh 5,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,61 persen. Sementara disisi pengeluaran didorong oleh

Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08 persen.

➤ **Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019**

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,52 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen. Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019 mencapai Rp 2.352,43 triliun dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 1.650,14 triliun.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara *c-to-c* cukup signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen. Kondisi ini terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Subkategori Penyediaan Akomodasi sebesar 8,86 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,24 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,46 persen; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,43 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,04 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,12 persen; Konstruksi sebesar 0,55; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,43.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2019 berkontraksi 1,68 persen bila dibandingkan triwulan III-2019 (*q-to-q*). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,75 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,58 persen; Konstruksi sebesar 5,17 persen; serta Real Estate sebesar 3,09 persen.

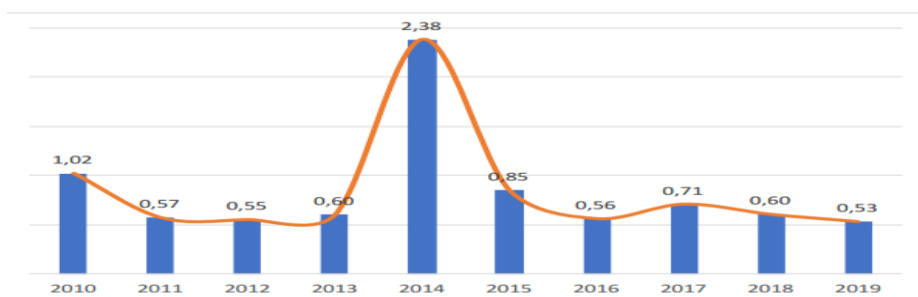
Perekonomian Jawa Timur dari sisi pengeluaran tahun 2019 tumbuh sebesar 5,52 persen sedikit meningkat 0,02 point bila dibandingkan tahun 2018. Sebagian besar komponen PDRB Menurut Pengeluaran mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,97 persen, kemudian PMTB 4,92 persen; disusul Pengeluaran Konsumsi

Rumahtangga 4,81 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,63 persen; sedang Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen. Impor sebagai komponen pengurang terkontraksi sebesar 8,80 persen. Tingginya pertumbuhan komponen LNPRT sepanjang tahun ini dipicu oleh kampanye menjelang pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan kegiatan keagamaan. PMTB didorong oleh pembangunan investasi fisik terutama pada pembangunan sarana prasarana dan kawasan permukiman. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga didorong oleh konsumsi pada hari raya keagamaan, pembayaran masuk sekolah, kuliah dan semester, disamping itu juga pendapatan rumahtangga yang semakin meningkat. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dipicu oleh pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 kepada ASN dan pensiunan, belanja sosial bantuan korban bencana alam di Jawa Timur, antara lain bencana kekeringan, imbas gempa di Bali.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yang mencapai lebih dari separuh PDRB Jawa Timur (59,43 persen), komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB (29,46 persen), Ekspor Luar Negeri (11,61 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,70 persen), lainnya (9,01 persen) dan sebagai pengurang yakni Impor Luar Negeri (16,21 persen). Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 (c-to-c), komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mempunyai sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,85 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,36 persen, dan lainnya sebesar 1,31 persen.

2. Inflasi

Gambar 1.24 : Tingkat Inflasi Jawa Timur Bulan Desember 2010-2019 (persen)



➤ Inflasi Jawa Timur Tahun 2018

Pada bulan Desember 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Seluruh kota IHK Jawa Timur mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Kota Probolinggo yang mencapai 0,72 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Madiun yaitu sebesar 0,25 persen.

Pada bulan Desember 2018 dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi, dan satu kelompok mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 1,91 persen, sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Sandang sebesar 0,10 persen.

Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Jawa Timur bulan Desember 2018 ialah telur ayam ras, tarif angkutan udara, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar deflasi ialah bawang putih, emas perhiasan, dan salak.

Laju inflasi tahun kalender Jawa Timur di bulan Desember 2018 mencapai 2,86 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender di Bulan Desember 2017 sebesar 4,04 persen.

Pada Desember 2018 kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,13 persen, komponen yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,83 persen, sedangkan komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,06 persen.

➤ Inflasi Jawa Timur Tahun 2019

Pada bulan Desember 2019 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,53 persen, Inflasi tertinggi di Kota Surabaya yang mencapai 0,60 persen sedangkan yang terendah di Probolinggo yaitu sebesar 0,28 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 1,57 persen, sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Sandang sebesar 0,19 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Jawa Timur bulan Desember 2019 ialah telur ayam ras, bawang merah, dan tarif kereta api. Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar ialah daging ayam ras, emas perhiasan, dan pir.

Laju inflasi tahun kalender Jawa Timur *Year on Year (y-o-y)* di bulan Desember 2019 mencapai 2,12 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender di Bulan Desember 2018 sebesar 2,86 persen.

Pada Desember 2019 kelompok inti mengalami inflasi sebesar 0,20 persen, komponen yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,53 persen, dan komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,74 persen.

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi selama tahun 2019 adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 1,57 persen, diikuti kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,50 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,40 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,27 persen, kelompok Kesehatan sebesar 0,08 persen, dan kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga sebesar 0,01.

3. Perdagangan (Ekspor-Import)

➤ Ekspor

Nilai ekspor Jawa Timur Desember 2018 mencapai USD 1,53 miliar atau turun sebesar 5,18 persen dibandingkan November 2018. Nilai tersebut apabila dibandingkan Desember 2017 turun sebesar 1,16 persen.

Ekspor nonmigas Desember 2018 mencapai USD 1,49 miliar atau turun 0,80 persen dibandingkan November 2018. Nilai tersebut dibanding Desember 2017 naik sebesar 5,21 persen. Ekspor migas Desember 2018 mencapai USD 40,01 juta atau turun sebesar 64,17 persen dibandingkan November 2018. Nilai tersebut turun 69,64 persen jika dibanding Desember 2017. Komoditas utama ekspor non migas Desember 2018 adalah Perhiasan/Permata sebesar USD 231,03 juta, disusul oleh Kayu, Barang dari Kayu sebesar USD 120,73 juta dan Lemak & minyak hewan/nabati sebesar USD 105,39 juta. Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2018 adalah Jepang sebesar USD 3.327,13 juta atau dengan peranan 17,42 persen, disusul berikutnya ke Amerika Serikat mencapai USD 2.589,27 juta (13,55 persen), dan ke Tiongkok USD 2.082,88 juta (10,90 persen). Ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN mencapai USD 3.697,26 juta atau dengan kontribusi sebesar 19,35 persen, sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa mencapai USD 1.630,42 juta (8,54 persen).

Secara kumulatif ekspor Januari-Desember 2018 yang keluar dari Jawa Timur sebesar USD 20,39 miliar atau naik 4,04 persen dibandingkan Januari-Desember 2017 sebesar USD 19,60 miliar.

Sedangkan Nilai ekspor Jawa Timur Desember 2019 mencapai USD 1,72 miliar atau naik sebesar 1,23 persen dibandingkan November. Nilai tersebut dibandingkan Desember 2018 naik sebesar 12,64 persen.

Nilai Ekspor Jawa Timur Desember 2019 mencapai USD 1,72 miliar atau naik sebesar 1,23 persen dibanding November. Di banding Desember 2018 naik sebesar 12,64 persen.

Secara kumulatif selama Januari-Desember 2019 ekspor Jawa Timur sebesar USD 20,28 miliar atau turun 0,49 persen dibanding Januari-Desember 2018 sebesar USD 20,38 miliar. Ekspor nonmigas Desember 2019 mencapai USD 1,65 miliar atau turun sebesar 4,97 persen dibanding Nopember. Nilai tersebut dibanding Desember 2018 naik sebesar 11,30 persen. Ekspor migas Desember 2019 mencapai USD 64,95 juta atau turun sebesar 46,91 persen dibanding November. Nilai tersebut naik sebesar 62,34 persen jika dibanding Desember 2018. Komoditas utama ekspor nonmigas November 2019 adalah perhiasan/Permata sebesar USD 179,85 juta, disusul oleh Lemak dan Minyak Hewan/Nabat sebesar USD 167,70 juta serta Kayu dan Barang dari Kayu sebesar USD 115,72 juta. Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar pada Januari-November 2019 adalah Jepang mencapai USD 2.959,13 juta (dengan peranan 15,28 persen) disusul berikutnya ekspor ke Amerika Serikat sebesar USD 2.634,43 juta atau dengan peranan 13,60 persen, dan ke Tiongkok USD 2.299,36 juta dengan peranan 11,87 persen. Ekspor nonmigas ke kawasan ASEAN mencapai USD 3.654,17 juta atau dengan kontribusi sebesar 18,87 persen, sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa USD 1.614,49 juta (8,34 persen) Secara kumulati, selama Januari-Desember 2019, ekspor yang keluar Jawa Timur sebesar USD 20,28 miliar atau turun 0,49 persen dibanding Januari-Desember 2018, sebesar USD 20,38 miliar.

➤ **Impor**

Nilai Impor Jawa Timur pada bulan Desember 2018 mencapai USD 2,16 miliar atau turun sebesar 6,61 persen dibandingkan November 2018. Angka ini mengalami kenaikan 7,05 persen dibandingkan Desember 2017. Impor nonmigas Desember 2018 mencapai USD 1,78 miliar atau naik 5,15 persen dibandingkan

November 2018. Nilai impor nonmigas tersebut naik sebesar 13,99 persen dibanding Desember 2017. Impor migas Desember 2018 USD 381,47 juta atau turun 38,61 persen dibanding November 2018. Bila dibandingkan Desember 2017, angka tersebut mengalami turun sebesar 16,61 persen. Komoditas utama impor nonmigas bulan Desember 2018 adalah golongan besi dan baja sebesar USD 210,17 juta, berikutnya disusul golongan barang mesin-mesin pesawat mekanik sebesar USD 189,94 juta dan golongan plastic/barang dari plastic sebesar USD 118,74 Juta. Negara asal barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2018 adalah dari Tiongkok dengan nilai USD 5.844,97 juta (28,23 persen), disusul dari Amerika Serikat sebesar USD 1.454,25 juta (7,02 persen) dan Thailand sebesar USD 1.133,19 juta (5,47 persen). Impor nonmigas dari kelompok negara ASEAN sebesar USD 3.517,55 juta (16,99 persen), sementara impor nonmigas dari Uni Eropa mencapai USD 1.650,00 juta (7,97 persen).

Secara kumulatif impor Januari-Desember 2018 yang masuk ke Jawa Timur sebesar USD 25,73 miliar atau naik sebesar 16,35 persen dibandingkan periode Januari-Desember 2017 sebesar USD 22,12 miliar.

Nilai Impor Jawa Timur pada bulan Desember 2019 mencapai USD 2,05 miliar atau turun sebesar 5,05 persen dibandingkan November. Angka ini mengalami penurunan 5,22 persen dibandingkan Desember 2018. Impor nonmigas Desember 2019 mencapai USD 1,59 miliar atau turun 8,60 persen dibandingkan Nopember. Nilai impor Nonmigas tersebut turun sebesar 10,46 persen dibanding Desember 2018. Impor migas Desember 2019 sebesar USD 454,86 juta atau naik sebesar 9,86 persen dibanding November. Dibandingkan Desember 2018, nilai tersebut naik sebesar 19,24 persen. Komoditas utama impor nonmigas bulan Desember 2019 adalah golongan Buah-buahan (HS 08) sebesar USD 166,55 juta, berikutnya golongan barang Mesin-mesin Pesawat Mekanik (HS 84) senilai USD 165,17 juta dan golongan Besi dan Baja (HS 72) sebesar USD 145,95 Juta. Negara asal barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2019 dari Tiongkok USD 5.872,78 juta (31,02 persen), disusul dari Amerika Serikat sebesar USD 1.306,46 juta (6,90 persen) dan impor dari Thailand sebesar USD 983,08 juta (5,19 persen). Impor nonmigas dari kelompok negara ASEAN sebesar USD 2.907,68 juta (15,36 persen), sementara impor nonmigas dari Uni Eropa mencapai USD 1.606,87 juta (8,49 persen).

Secara kumulatif, selama Januari-Desember 2019, impor yang masuk ke Jawa Timur sebesar USD 23,34 miliar atau turun sebesar 9,32 persen dibandingkan Januari-Desember 2018, sebesar USD 25,73 miliar.

4. Neraca Perdagangan

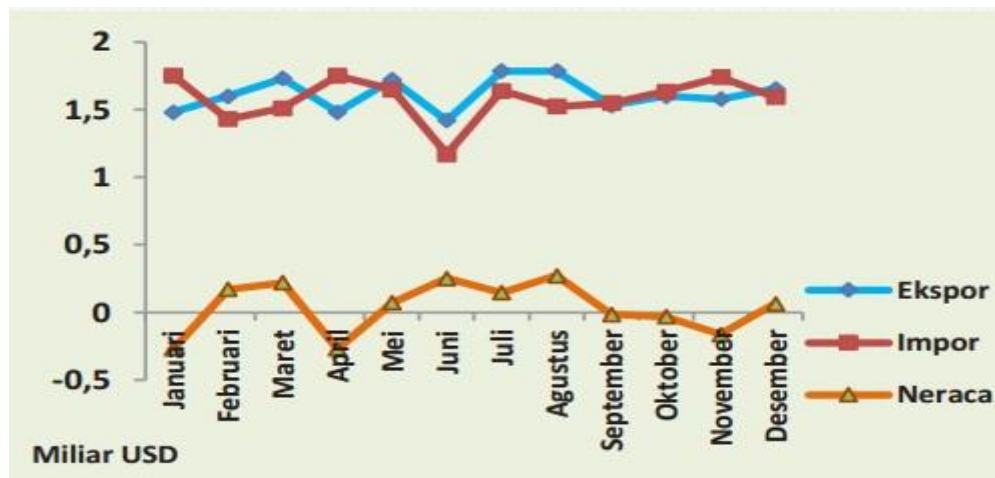
Neraca perdagangan Jawa Timur selama bulan Desember 2019 mengalami defisit sebesar USD 327,29 juta. Defisit disebabkan karena adanya selisih perdagangan yang negatif pada sektor migas yang lebih besar dibanding surplus yang terjadi pada sektor non migas, sehingga secara agregat neraca perdagangan menjadi minus. Sektor nonmigas mengalami surplus sebesar USD 62,63 juta dan sektor migas mengalami defisit sebesar USD 389,91 juta. Secara kumulatif, selama Januari-Desember 2019, neraca perdagangan Jawa Timur masih mengalami defisit sebesar USD 3,05 miliar. Hal ini disumbangkan oleh defisit sektor migas sebesar USD 3,49 miliar, namun demikian sektor nonmigas justru kinerjanya positif dengan surplus sebesar **USD 435,45 juta**. Surplus sektor nonmigas ini perlu lebih ditingkatkan supaya bisa menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas.

Tabel 1.20
Neraca Perdagangan Jawa Timur, Januari – Desember 2019 (Juta USD)

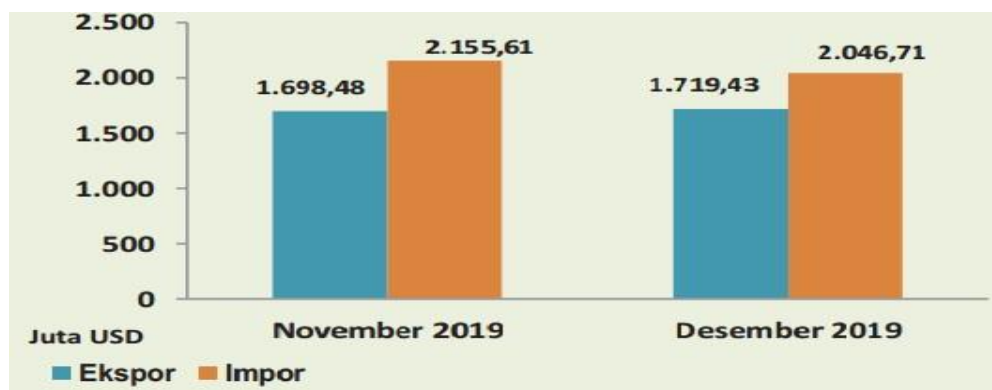
URAIAN	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Desember 2019			
Total Ekspor/Impor	1.719,43	2.046,71	-327,29
• Migas	64,95	454,86	-389,91
• Non Migas	1.654,48	1.591,85	62,63
B. Jan – Des 2019			
Total Ekspor/Impor	20.284,49	23.335,47	-3.050,98
• Migas	918,74	4.405,17	-3486,43
• Non Migas	19.365,75	18.930,31	435,45

Sumber: BPS Jawa Timur

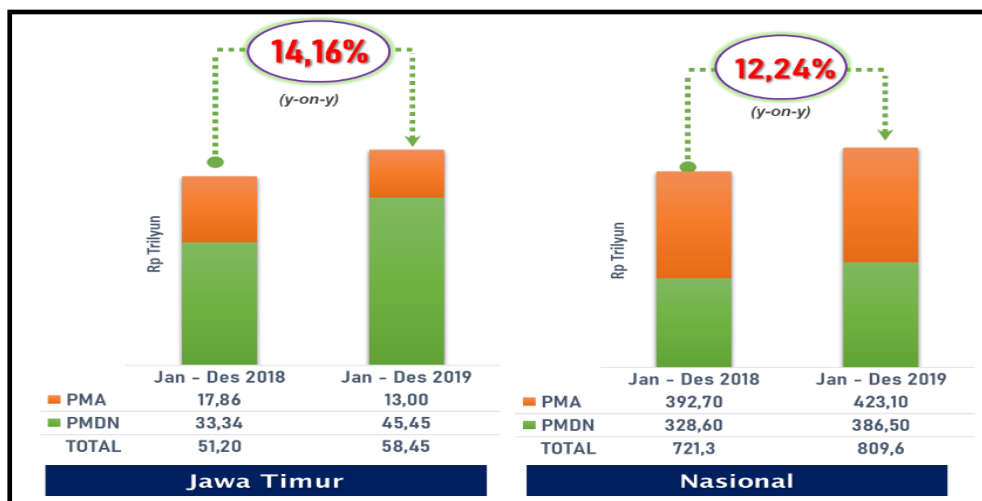
Gambar 1.25
Ekspor Impor Neraca Non Migas 2019



Gambar 1.26
Ekspor Impor 2019



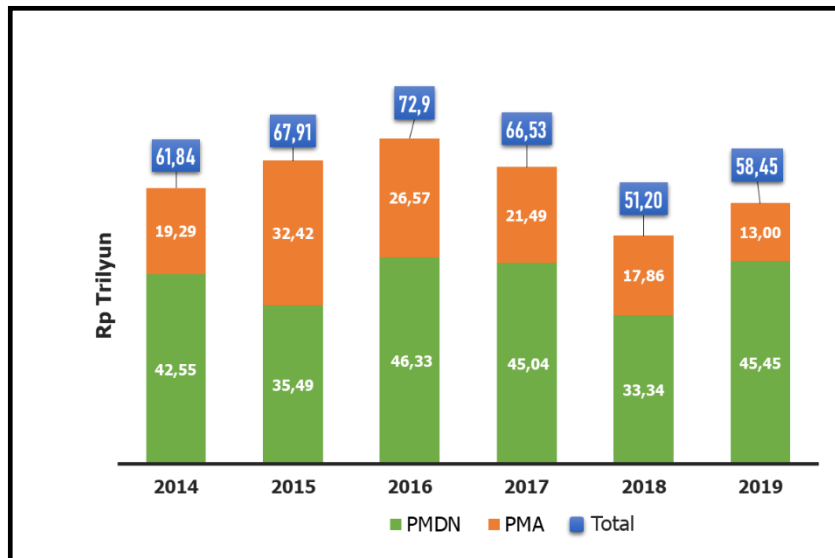
5. Investasi



Gambar 1.27 Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2019

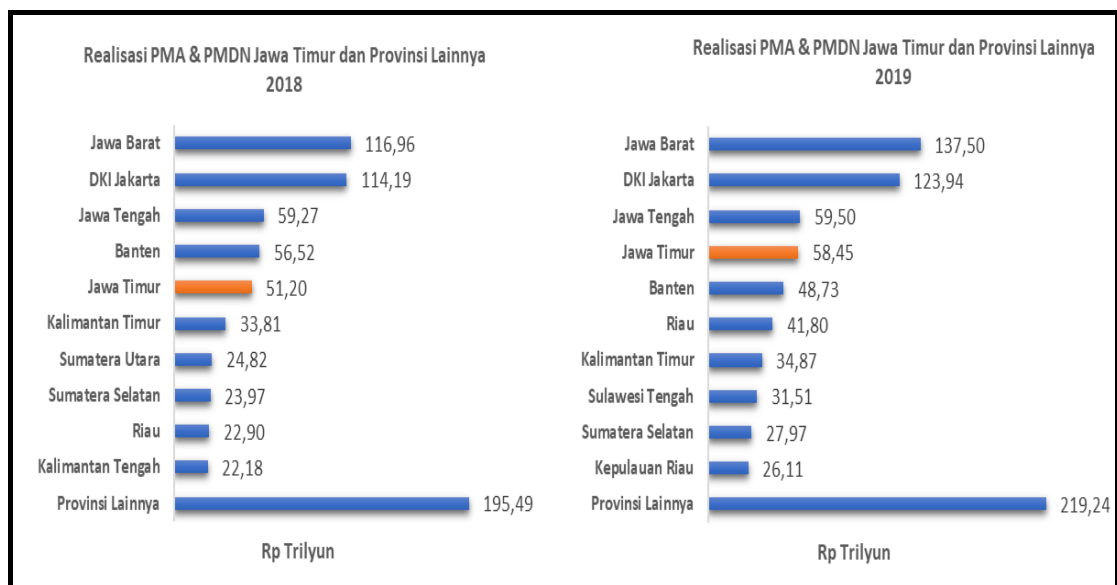
Realisasi Investasi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar Rp 58,45 Trilyun, terdiri dari PMA (Rp 13 Trilyun) dan PMDN (Rp 45,45 Trilyun). Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,16% (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 12,24% (y-o-y).

Gambar 1.28 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2014-2019



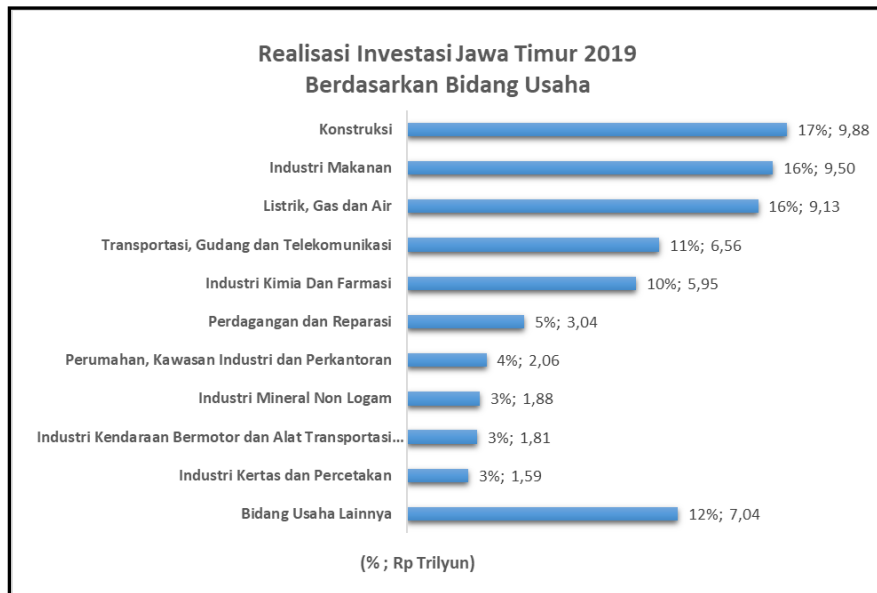
Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Timur pada periode Januari-Desember 2019 sebesar Rp. 58,45 Trilyun, tumbuh 14,2% dibanding tahun 2018. Ini merupakan pertumbuhan terbesar dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 tumbuh 9,8%, tahun 2016 tumbuh 7,3%, tahun 2017 tumbuh -8,7%, dan tahun 2018 tumbuh -23%.

Gambar 1.29 Peringkat Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2018 dan 2019



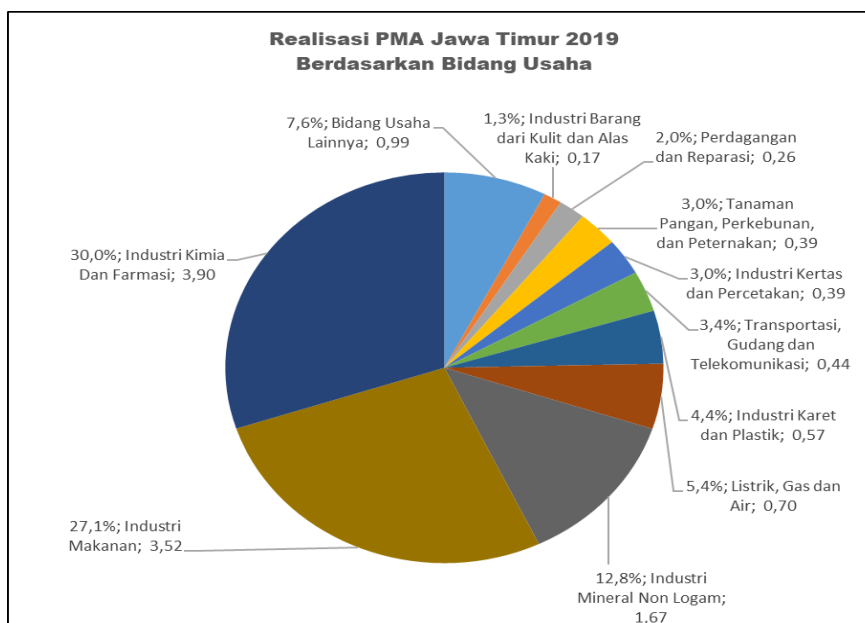
Secara nasional, total investasi Jatim 2019 berkontribusi sebesar 7,22%, menduduki peringkat keempat setelah Jawa Barat (16,98%), DKI Jakarta (15,31%), dan Jawa Tengah 7,35%. Tahun 2019 ini Jawa Timur berhasil menggeser Banten yang pada tahun sebelumnya bertengger di peringkat keempat.

Gambar 1.30 Realisasi Investasi Jawa Timur 2019 Berdasarkan Bidang Usaha



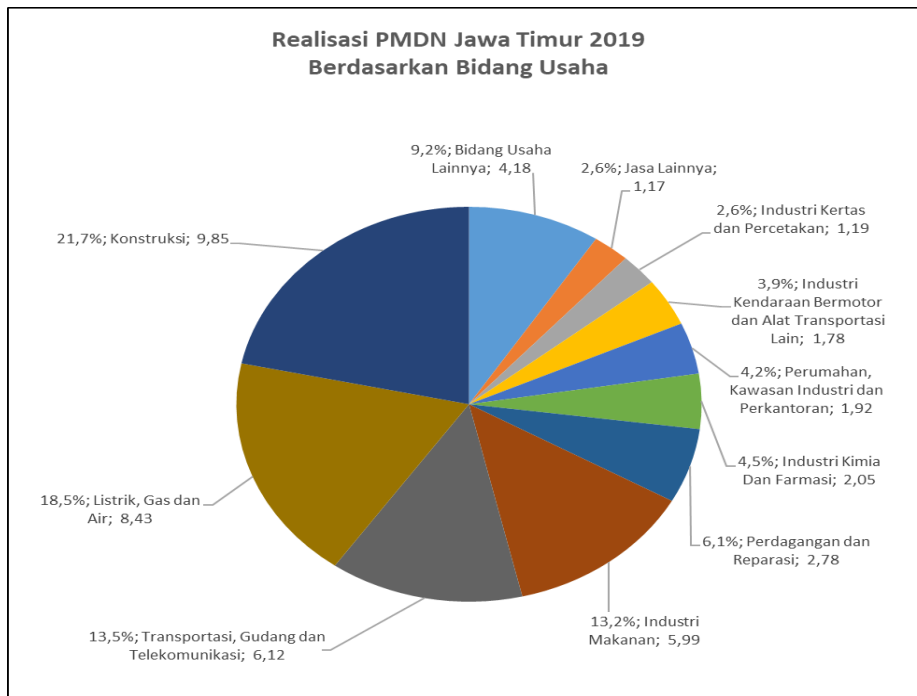
Berdasarkan bidang usaha, investasi Jatim 2019 didominasi oleh sektor Konstruksi (Rp. 9,88 Trilyun, 17%) ; Industri Makanan (Rp. 9,5 Trilyun, 16%) ; Listrik, Gas dan Air (Rp. 9,13 Trilyun, 16%) ; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp. 6,56 Trilyun, 11%) ; dan Industri Kimia & Farmasi (Rp. 5,95 Trilyun, 10%).

Gambar 1.31 Realisasi PMA Jawa Timur 2019 Berdasarkan Bidang Usaha



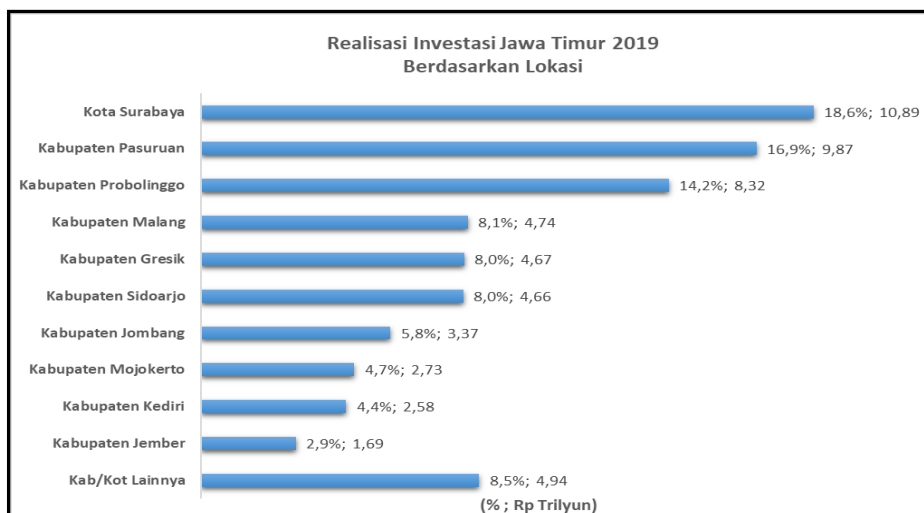
Realisasi PMA di Jatim 2019 didominasi oleh sektor Industri Kimia dan Farmasi (Rp. 3,9 Trilyun, 30%) ; Industri Makanan (Rp. 3,52 Trilyun, 27%) ; Industri Mineral Non Logam (Rp. 1,67 Trilyun, 12,8%) ; Listrik, Gas dan Air (Rp. 0,7 Trilyun, 5,4%) ; dan Industri Karet dan Plastik (Rp. 0,57 Trilyun, 4,4%).

Gambar 1.32 Realisasi PMDN Jawa Timur 2019 Berdasarkan Bidang Usaha



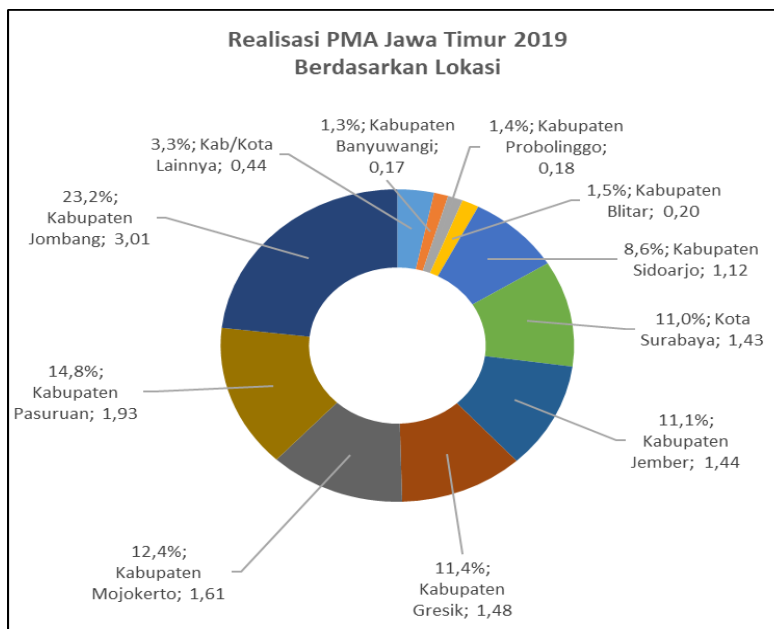
Realisasi PMDN di Jatim 2019 didominasi oleh sektor Konstruksi (Rp. 9,85 Trilyun, 21,7%) ; Listrik, Gas dan Air (Rp. 8,43 Trilyun, 18,5%) ; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp. 6,12 Trilyun, 13,5%); Industri Makanan (Rp. 5,99 Trilyun, 13,2%); serta Perdagangan dan Reparasi (Rp. 2,78 Trilyun, 6,1%).

Gambar 1.33 Realisasi Investasi Jawa Timur 2019 Berdasarkan Lokasi



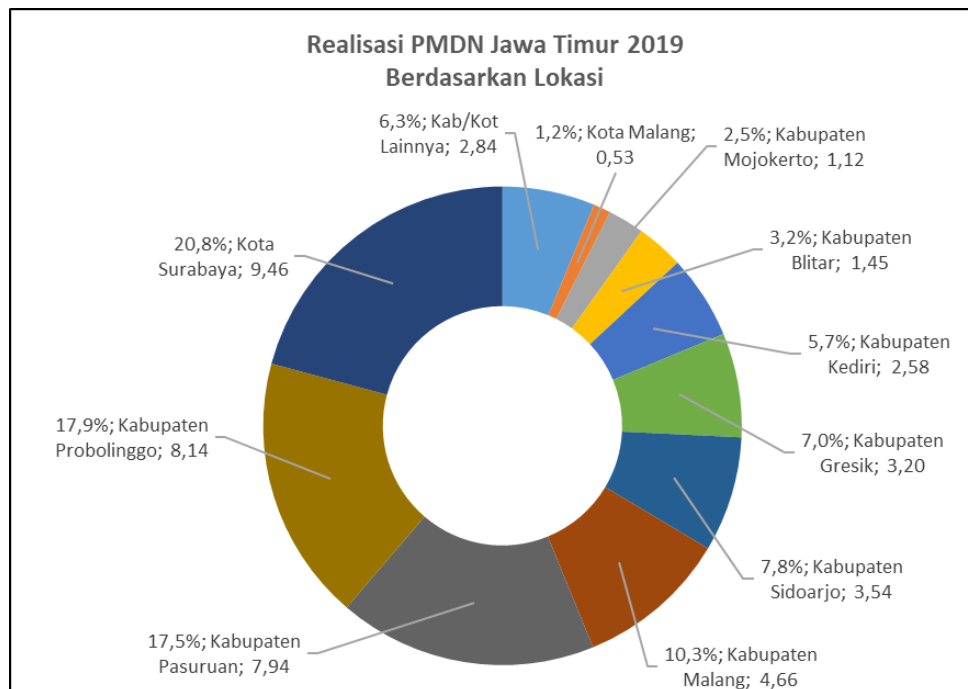
Sedangkan untuk lokasi usaha, investasi Jatim tahun 2019 terutama tersebar di Kota Surabaya (Rp. 10,89 Trilyun, 18,6%); Kab. Pasuruan (Rp. 9,87 Trilyun, 16,9%) ; Kab. Probolinggo (Rp. 8,32 Trilyun, 14,2%) ; Kab. Malang (Rp. 4,74 Trilyun, 8,1%) ; dan Kab. Gresik (Rp. 4,67 Trilyun, 8%).

Gambar 1.34 Realisasi PMA Jawa Timur 2019 Berdasarkan Lokasi



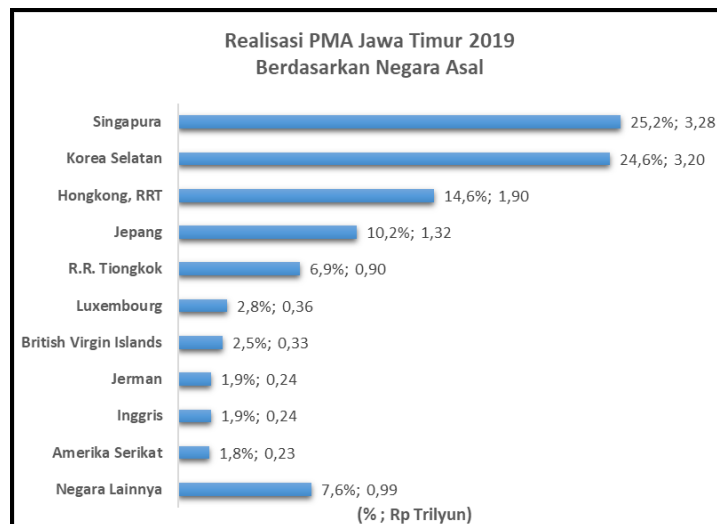
Realisasi PMA Jatim tahun 2019 terutama tersebar di Kab. Jombang (Rp. 3,01 Trilyun, 23,2%); Kab. Pasuruan (Rp. 1,93 Trilyun, 14,8%) ; Kab. Mojokerto (Rp. 1,61 Trilyun, 12,4%) ; Kab. Gresik (Rp. 1,48 Trilyun, 11,4%) ; dan Kab. Jember (Rp. 1,44 Trilyun, 11,1%).

Gambar. Realisasi PMDN Jawa Timur 2019 Berdasarkan Lokasi



Realisasi PMDN Jatim tahun 2019 terutama tersebar di Kota Surabaya (Rp. 9,46 Trilyun, 20,8%); Kab. Probolinggo (Rp. 8,14 Trilyun, 17,9%) ; Kab. Pasuruan (Rp. 7,94 Trilyun, 17,5%) ; Kab. Malang (Rp. 4,66 Trilyun, 10,3%) ; dan Kab. Sidoarjo (Rp. 3,54 Trilyun, 7,8%).

Gambar. Realisasi PMA Jawa Timur 2019 Berdasarkan Negara Asal



Lima besar negara asal PMA pada tahun 2019 di Jawa timur adalah : Singapura (Rp. 3,28 Trilyun, 25,2%) ; Korea Selatan (Rp. 3,2 Trilyun, 24,6%) ; Hongkong RRT (Rp. 1,9 Trilyun, 14,6%) ; Jepang (Rp. 1,32 Trilyun, 10,2%) ; dan RR Tiongkok (Rp. 0,9 Trilyun, 6,9%).



BAB II

KEBIJAKAN

PEMERINTAH

DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Tahun 2019 merupakan tahun transisi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2018. Transisi kepemimpinan tersebut sebuah transisi keberlanjutan dalam mewujudkan impian Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yang mengharmonisasikan antara program Gubernur Dr. H. Soekarwo (2010-2019) dengan Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa (2019-2024).

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menetapkan visi dan misi pembangunan Jawa Timur selama lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2019-2024.

A. VISI DAN MISI

➤ *Visi*

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut :

VISI :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL
DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS
INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”**

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	ADIL	Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antarkelompok sosial, antarwilayah maupun antarsektor. Keadilan sebagai visi pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa seluruh warga akan mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi. Tata kelola pemerintahan yang adil juga berarti bahwa pemerintah menghormati kesetaraan sosial dan gender dalam proses pembangunan. Dimensi keadilan dalam pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa tata kelola pemerintahan juga berpijak pada prinsip inklusi sosial, budaya dan ekonomi yang artinya adalah pemerintah akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga; pembangunan juga memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marjinal; pemerintah memperhatikan dan menghormati identitas budaya baik dari setiap kelompok budaya maupun warga; serta pemerintah menjamin agar setiap warga memperoleh akses yang luas dan berpartisipasi dalam arena ekonomi pasar yang berkeadilan.

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
2	SEJAHTERA	Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap warga Jawa Timur melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Jawa Timur. Untuk merealisasikan visi ini maka tata kelola pemerintahan di Jawa Timur akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Jawa Timur memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Provinsi Jawa Timur.
3	UNGGUL DAN BERAKHLAK	Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian tekad yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi banding dengan masyarakat lainnya. Berakhlak adalah keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Jawa Timur bertanggung jawab untuk membawa masyarakat menjadi unggul dan berakhlak. Kualitas keunggulan tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kematangan sikap

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>politik, serta capaian pembangunan lainnya. Sedangkan berakhlak menegaskan bahwa unggul saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan budi pekerti serta akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Jawa Timur, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum.</p> <p>Unggul dan berakhlak berarti bahwa pembangunan di Jawa Timur tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga Jawa Timur yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan <i>akhlakul karimah</i> sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga dengan visi unggul dan berkualitas maka pembangunan di Jawa Timur berusaha untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.</p>
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS DAN INKLUSIF	<p>Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang partisipatoris dan inklusif selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia yang <i>deliberative</i> dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan, birokrasi yang innovative yang selalu memperbaiki performancinya dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan pendekatan</p>

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		<p>pembangunan yang partisipatoris dan inklusif.</p> <p><i>Deliberative participatory</i> diwujudkan melalui perluasan ruang publik (<i>public sphere</i>) yang memadai bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat diskriminasi pembangunan.</p> <p>Prinsip tata kelola yang partisipatoris dan inklusif artinya bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar <i>good governance</i> yaitu seluruh warga sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, dunia usaha untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang kredibel, <i>responsive</i> dan <i>accountable</i>. Dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, ruang pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka, transparan dan akuntabel bagi keterlibatan setiap warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya.</p> <p>Sementara prinsip inklusif berarti bahwa pemerintah mendorong birokrasi dan sistem pelayanan publik yang terbuka, bertanggung jawab dan menjamin agar mereka yang berada pada kondisi rentan dan marginal mendapatkan perhatian penuh dalam proses pembangunan. Tata kelola pemerintahan partisipatoris dan inklusif juga mendorong pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ruang publik yang bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap pembangunan</p>

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		dalam relasi negara dan masyarakat yang demokratis.
5	KERJASAMA DAN GOTONG ROYONG	<p>Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Jawa Timur merupakan miniatur Nusantara yang sudah pasti mewarisi nilai-nilai hebat tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Jawa Timur, karena mendorong semangat untuk menjalin mitra setara dan saling menguntungkan dengan semua pihak. Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi percepatan pembangunan Jawa Timur ke depan.</p> <p>Kerjasama dan gotong royong adalah <i>social capital</i> paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun masyarakat Jawa Timur. Kerjasama dan gotong royong dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan pemerintah berbasis kolaborasi dan <i>partnership</i>. Kolaborasi artinya bahwa pemerintah akan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor publik dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. <i>Partnership</i> dalam pengertian bahwa pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan mendorong kondisi yang memperkuat peran masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan saling menghargai.</p>

➤ **Misi**

Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1) (Misi 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (*social inequality*) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antarkawasan sehingga masing-masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (*powerless*), terpinggirkan (*marginalized*), tersisih (*excluded*), terbungkam (*voiceless*), terasing (*alienated*), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan dan keseimbangan ekonomi baik antarkelompok, antarsektor maupun antarwilayah. Sejalan dengan amanah yang tertera dalam konstitusi, ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (*Public Private Partnership*), pemerintah Jawa Timur berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*aglomerasi*) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Tujuan dari semua itu proses

pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2) *(Misi 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.*

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, utamanya dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan dan melibatkan seluruh kalangan yang rentan dimasyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktik pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur.

Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia. Sesuai dengan pembangunan yang berpusat pada aktualisasi dan apresiasi secara optimal terhadap kapasitas-kapasitas kemanusiaan dari seluruh warga Jawa Timur, maka perlindungan dan jaminan atas kesehatan, pendidikan maupun kedaulatan pangan menjadi prinsip dasar pembangunan. Pemenuhan atas kebutuhan dasar diatas merupakan standar minimal dari pemenuhan atas hak ekonomi maupun sosial dari seluruh warga agar mereka bisa berpartisipasi dalam tatanan ekonomi yang terbuka (*inclusive economic*

order). Sehingga dengan bekal warga Jawa Timur yang sehat, terdidik dan terpenuhi hajat hidupnya, mereka dapat hidup sebagai warga yang terhormat, mulia dan merdeka.

Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3) *(Misi 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.*

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, *partnership* dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur. Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain. Dalam hubungan antar negara-masyarakat sipil dan dunia usaha, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk membangun pelayanan berprinsip CETTAR melalui inovasi berbasis *complaint handling system* secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi politik warga untuk terlibat dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

4) *(Misi 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.*

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang

menyatukan tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

➤ ***Strategi Umum Pembangunan***

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 6 (enam) strategi umum, sebagai berikut:

- 1) Penegasan Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan;
- 2) Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*);
- 3) Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (pengarusutamaan gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Development as Freedom*);
- 4) Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*);
- 5) Pembangunan berbasis kawasan yang sensitive terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama;
- 6) Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di segala bidang berbasis *Information Communication Technology* (ICT).

Keenam strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan sebelumnya, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, yang dilandasi pemikiran

bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan

Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa Timur, yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.

2. Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupti ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Sebagai salah satu *concern* utama Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 adalah pengentasan kemiskinan. Berpijak pada prinsip dan strategi di atas, maka akan dilakukan skenario pembiayaan terpadu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinergi perencanaan dan pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan program dan kegiatan dari kementerian dan Lembaga. Sehingga dampak (*impact*) dari alokasi dana pusat dapat dikelola secara efisien dalam upaya mendukung penyelesaian persialan daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan antarwilayah dan permasalahan pembangunan lainnya.

Pembangunan pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, hal ini dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan Sumber Daya Alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak

lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Strategi pembangunan melalui konsepsi ini juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*;
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antargenerasi;
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*);
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antargenerasi; dan
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitatnya.

3. Pemenuhan hak dan ruang kepada perempuan (Pengarusutamaan Gender), perlindungan anak dan kelompok rentan dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Right Based Development*)

Pendekatan Pembangunan berbasis hak (*Right based development*) didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak. Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki.

- a. Melibatkan sebuah proses pemberdayaan bagi mereka yang belum menikmati hak yang mereka miliki, untuk menuntut hak tersebut;

- b. Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan amal atau pembangunan ekonomi sederhana. Mengintegrasikan norma, standard, serta prinsip sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program pembangunan, program sosial, serta program lainnya;
- c. Mendukung konsep bahwa setiap orang – tanpa membedakan masalah umur, *gender*, ras, agama, latar belakang etnis, status sosial, atau perbedaan lainnya – memiliki hak dasar untuk hidup secara bermartabat dan terhormat;
- d. Menjamin bahwa setiap program yang dikembangkan menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan manusia (misalnya dengan menjamin keberlangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan psikologis). Keseluruhan aspek tersebut merupakan kesatuan inklusif dan holistik; dan
- e. Menekankan pada prinsip kesetaraan dan kesamaan, akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui pemenuhan hak-hak perempuan, dan perlindungan anak serta perlindungan kelompok rentan (pengarusutamaan gender) untuk meningkatkan keadilan bersama di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat bagi perempuan yang setara dengan laki-laki.

Perlindungan pada kelompok rentan dilakukan dengan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

4. Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*)

Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b) Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Pemahaman model pembangunan ini tetap berpusat pada manusia dengan menegaskan bahwa makna esensial pembangunan ialah *human capabilities* suatu proses memungkinkan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Strategi pembangunan ini menawarkan analisis pembangunan dalam konteks rekayasa sosial budaya, bukan dalam perspektif pertumbuhan ekonomi belaka, yang tercermin pada pendapatan nasional per kapita. Namun juga, isu-isu pembangunan di bidang sosial budaya sudah semestinya masuk agenda pembangunan dan menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Bukti empiris menunjukkan investasi untuk pembangunan sosial bukan saja merupakan medium paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi, ada pertautan erat antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dengan merujuk paradigma baru: *social development is basically economic development*. Karena itu, pembangunan sosial memang semestinya tidak dipisahkan dari pembangunan ekonomi.

5. Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama

Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan pelayanan sosial. ***From Sectoral to Spatial Approach*** ini menerapkan strategi pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan desa kota dan

antardaerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego sektoral di internal pemerintahan.

Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antardaerah di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi dengan langkah yang nyata, sistematis dan sungguh-sungguh. Upaya mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan *"business as usual"*, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman fakta (*evidence-based*) tentang kompleksitas, dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah.

Latar belakang konsepsi pembangunan ini dilandasi atas permasalahan sosial ekonomi yang esensinya sangat berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan wilayah itu sendiri. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Sedangkan pembangunan secara filosofis merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanitis.

Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan, megapolitan, *growth pole*, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi.

6. Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT)*

Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran *Information and Communication Technology (ICT)* sangat mendukung inovasi daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang. Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut, maka

pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfaatan ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

C. PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur.

Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan **Gubernur Khofifah Indar Parawansa** dan **Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak** Jawa Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. **Nawa** berarti Sembilan, kemudian **Bhakti** merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan **Satya** memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan.

Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”**. Kesembilan Bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut:

Bhakti – 1

Jatim Sejahtera.

Mengentaskan Kemiskinan menuju

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

Bhakti ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat Provinsi yaitu kemiskinan dan pemasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari bhakti ini adalah berupa **Program Keluarga Harapan Plus**. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan

penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan prosentase penduduk miskin di Jawa Timur.

Fokus selanjutnya dari Bhakti ini adalah mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur. Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif. Pendekatan ini diharapkan berjalan dengan efektif, mengingat pengentasan kemiskinan merupakan upaya sinergis dan terintegrasi lintas urusan dan bidang. Inklusifitas diharapkan dapat menghapus sekat strata sosial yang menjadikan akses penduduk miskin dalam mengembangkan potensinya terhambat.

Bhakti – 2

Jatim Kerja.

*Memperluas Lapangan Pekerjaan dan
Membangun Keunggulan Ekonomi.*

Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada *Millineal Job Center* dengan cara memberikan *job training*, pendidikan vokasi, membantu *starting-up* usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.

Program *Dream Team Science Techno Park* (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1, membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. Kemudian Belanja Inovasi Daerah (Belanova), memberikan jaminan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak muda melalui informasi super koridor di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bhakti – 3

Jatim Cerdas dan Sehat.

*Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan
Dasar berkualitas.*

Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan

BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu.

KANTITAS (Pendidikan Gratis Berkualitas) banyak kalangan yang meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari jebakan kemiskinan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena pendidikan bisa menjadi pintu awal bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas. Setidaknya, inilah yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Artikel 33 Indonesia, “Studi Kesenjangan Akses Masyarakat Miskin atas Pendidikan Berkualitas”. Dalam riset ditemukan bahwa anak-anak keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah yang berkualitas rendah. Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan mengapa anak-anak keluarga miskin bersekolah di lembaga pendidikan berkualitas rendah. Pertama, tidak meratanya kualitas pendidikan. Kedua, mekanisme seleksi siswa baru yang tidak sensitif terhadap ketimpangan pembangunan. Di samping itu, lingkungan sosial juga menentukan dalam hal pendidikan anak. Proses pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Sebaik apapun lingkungan sekolah terbangun, jika tidak didukung oleh lingkungan sosial di mana anak-anak tumbuh dan berkembang, sangat sulit untuk mengharapkan anak-anak akan bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik. Masalah umum pada keluarga miskin adalah terbengkalainya proses pengasuhan anak di luar jam sekolah. Keluarga-keluarga miskin yang dihadapkan dengan deraan ekonomi cenderung mendayagunakan seluruh tenaga yang ada untuk bekerja mencari uang. Di lingkungan keluarga miskin, sangat mudah ditemukan anak-anak bekerja membantu orang tuanya. Pekerja anak ini menjadi salah satu isu penting tidak hanya dalam bidang perburuhan, tapi juga pendidikan. Tidak jarang seorang anak terpaksa *drop out* dari sekolah karena dipaksa oleh keadaan untuk turut menyangga ekonomi keluarga. Lingkungan kerja orang dewasa yang cenderung kasar dan keras, pada akhirnya juga membentuk karakter anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini. Anak-anak yang terdidik dalam lingkungan sosial yang keras, cenderung mereproduksi kekerasan dalam hidupnya. Anak-anak yang sedang membutuhkan didikan dan asuhan ini tumbuh secara terlantar tanpa asuhan yang tepat. Kondisi semakin menyedihkan jika si ibu menjadi buruh migran di luar negeri. Kondisi ini sangat umum di wilayah desa-desa pesisir pantai selatan Jawa dan Madura. Anak-anak ditinggal ibunya bekerja di luar negeri, ayahnya juga bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya anak-anak ini dititipkan ke nenek atau pamannya. Di sinilah tragedi anak banyak ditemukan. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan asuhan dan pendidikan, namun juga bisa menjadi korban kekerasan. Hasil yang dituai sungguh menyedihkan. Kita kehilangan generasi masa

depan. Anak-anak yang semestinya mendapat pendidikan dan pengasuhan yang baik dan berkualitas, akhirnya terlunta-lunta dan tumbuh menjadi orang dewasa yang tetap berada dalam lingkaran kemiskinan keluarga yang telah turun-temurun. Jika pada akhirnya mereka dewasa dan masuk dalam ke dalam dunia kerja, mereka akan menjadi apa yang disebut dengan *unskilled labour*. Karena mereka sejak kecil berada dalam lingkungan sosial yang keras, bisa jadi mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan perilaku yang penuh kekerasan. Karena itu, perlu dicanangkan Program Kantistas (Pendidikan Gratis – Berkualitas). Program ini menjangkau beberapa aktivitas dan sub-program, antara lain:

1. SPP bagi siswa SMA/SMK dan PK-PLK negeri dan swasta. Program ini berangkat dari banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah dan/atau putus sekolah karena faktor biaya pendidikan. Bagi keluarga petani dan nelayan miskin, biaya pendidikan seringkali menjadi momok dalam menyekolahkan anaknya. Ekonomi keluarga yang sangat terbatas pada akhirnya menghadapkan keluarga-keluarga miskin ini pada dua pilihan: makan atau pendidikan. SPP diharapkan dapat meringankan beban keluarga miskin dalam menyekolahkan anaknya;
2. Pemberian kesejahteraan honorarium dan peningkatan kompetensi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satu problem dalam pendidikan kita adalah rendahnya penghargaan terhadap guru dan pegawai tidak tetap. Sementara mereka dituntut untuk bekerja profesional, namun penghasilan mereka tidak mencerminkan profesionalitas yang mereka berikan. Atau, bisa jadi, mereka tidak berlaku profesional karena mereka tidak diperlakukan secara profesional. Akibatnya adalah kualitas pendidikan yang rendah karena perlakuan yang tidak profesional terhadap para guru dan pegawai tidak tetap; dan
3. Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Program ini merupakan program pengasuhan yang menysasar anak-anak dari keluarga petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas, namun juga tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Program ini mengkolaborasikan antara pendidikan formal dengan pesantren pengasuh di wilayah – wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di Jawa Timur. Pesantren yang ditunjuk sebagai pesantren pengasuh menerapkan program pengasuhan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan kualitas moral keagamaan yang terjaga.

Selanjutnya, komitmen kesehatan berkualitas untuk semua. Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Memperkuat RSUD dan memperkuat RSUD rujukan di 5 koridor. Rumah Sakit terapung untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan

terdepan serta mendorong ketersediaan ruang laktasi. Layanan Kesehatan Gratis Berkualitas TANTISTAS merupakan program yang disiapkan untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Santri Jatim Sehat Berkah dan Bunda Impian. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) Kegiatan Pendampingan Poskestren untuk meningkatkan kualitas Poskestren dan penerapan PHBS oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya. Kegiatan pendampingan Poskestren dilakukan oleh seorang kader mitra yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan suatu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Poskestren dan pembudayaan PHBS dengan cara memantau penyelenggaraan, membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Poskestren. Proses pendampingan dilaksanakan selama 10 bulan pada 10 Poskestren di 38 Kabupaten/Kota. Kegiatan pendampingan berupa : 1. Sosialisasi pendampingan Poskestren 2. Pendampingan Poskestren oleh Mitra 3. Evaluasi pendampingan Poskestren oleh Ormas di Kabupaten/Kota.

BUAIAN (Bunda Anak Impian) Program BUIAN merupakan program yang memiliki kepedulian kesehatan dan keselamatan dari ibu dan bayi. BUIAN terdiri dari: pertama, aktivitas *creative health campaign* untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat luas terkait resiko kematian ibu dan bayi. Peningkatan kesadaran tentang Pengarusutamaan Gender bagi Pasangan sebelum menikah sangat penting bertujuan untuk menekan AKI dan AKB. Kedua, Pengembangan aplikasi konsultasi untuk ibu hamil dan pasca kehamilan. Aplikasi ini menjadi media komunikasi dua arah, antara ibu dengan konsultan kesehatan dan Konseling dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU) di 3.213 wilayah kerja Ponkesdes Aktivitasnya berupa kunjungan langsung kerumah warga yang memiliki risiko terhadap kesakitan dan kematian serta masalah kesehatan. Kegiatan kunjungan konseling dilakukan oleh tim yang terdiri dari bidan dan perawat Ponkesdes, serta dibantu oleh mitra (Ormas).

Pada sisi lain, untuk penanggulangan stunting, dapat melibatkan peran pihak-pihak strategis, antara lain Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pendampingan melalui; pemetaan potensi munculnya *stunting* di kabupaten prioritas; kampanye dan program terpadu dalam pencegahan stunting sebagai sebuah gerakan bersama; program perbaikan status gizi mikro pada ibu hamil, program layanan pra-nikah terpadu, program perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, dapat ditempuh beberapa langkah antara lain; peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, KB, dan kehamilan; pengembangan lingkungan rumah sehat dan bersih.

Bhakti – 4

Jatim Akses.

Membangun Infrastruktur dalam kerangka

pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses

bagi masyarakat pesisir dan desa terluar

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan *short sea shipping* atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali, sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang;

6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan perdesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

Bhakti – 5

Jatim Berkah.

Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis

Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti

Luhur dan Berintegritas.

Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keberintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.

Bhakti – 6

Jatim Agro.

*Memajukan Sektor Pertanian,
Pternakan, Perikanan, Kehutanan,
perkebunan berbasis Kerakyatan.*

Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana didalamnya termasuk perikanan dan peternakan. Kebijakan perikanan mencakup budidaya baik tawar maupun laut (*aquaculture*) serta perikanan tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal usulnya (*traceable*), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya.

Aspek yang penting berikutnya adalah terkait ketersediaan pakan, dimana harga pakan yang relatif meningkatkan biaya produksi dapat ditekan dengan mendorong program pakan mandiri. Program pakan mandiri yang sudah dimulai perlu ditingkatkan dan diperluas melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, sehingga biaya produksi dapat ditekan secara signifikan. Dari segi pemasaran, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah belum tertatanya alokasi pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, sehingga sering dihadapi kelebihan suplai (*over supply*) jenis ikan tertentu semisal lele atau bandeng, dan kekurangan suplai jenis ikan tertentu semisal gurame atau patin.

Mengoptimalkan program zonasi ikan yang telah dirintis saat ini maka ada sistem informasi yang terintegrasi kedalam program *East Java Information Super Corridor* (EJISC) sehingga pembudidaya ikan akan bisa memperoleh informasi jenis ikan apa yang sebaiknya dibudidayakan di saat tersebut. Khusus untuk budidaya laut, perlu dioptimalkan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk memastikan keteraturan penataan dan pembagian lokasi budidaya, jalur pelayaran dan fungsi konservasi. Dengan penerapan zonasi, masih terdapat banyak potensi peningkatan budidaya laut (*marine-aquaculture*). Untuk perikanan tangkap, fokus kebijakan adalah kepada penguatan sistem rantai dingin termasuk dengan optimalisasi ketersediaan *cold storage*, termasuk fasilitas *Air Blast Freezer* (ABF) untuk menurunkan temperatur secara drastis sebelum ditempatkan di ruang penyimpanan dingin.

Inisiatif yang dimulai di Pancer untuk menyediakan pendingin (*freezer*) di lokasi penjualan atau pelelangan ikan bagi pedagang kecil perlu diperluas agar ikan yang belum terjual diatas dapat dijaga kualitasnya dan nilai keekonomiannya. Terkait sarana prasarana, keberlanjutan program palkanisasi perlu didorong dan untuk pelabuhan, dari hampir 100 pelabuhan ikan di Jawa Timur, sejauh ini sekitar 14 pelabuhan telah mendapat penanganan, dan ini perlu diperluas. Mengingat potensi pasar ekspor seperti Uni Eropa menuntut adanya pelabuhan higienis, maka pembenahan pelabuhan seperti kemiringan lantai untuk alur *drainase* serta penggunaan pelapis plastik agar sisik tidak menempel dan mengalami friksi dengan permukaan lantai kasar, dapat meningkatkan kebersihan dan mengurangi ketidaknyamanan akibat bau dan pembusukan.

Adanya Perda yang mendorong perlindungan bagi sektor pertanian, termasuk juga perikanan, perlu diikuti upaya peningkatan akses pembiayaan murah dan asuransi, serta pembinaan produk olahan pangan yang lebih menjawab realita dunia usaha. Dalam kaitan dengan sektor peternakan, sinergi dengan ketersediaan limbah sektor pertanian mendorong potensi *integrated farming* yang bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemanfaatan biomass memungkinkan adanya tambahan pendapatan, atau dalam hal peternakan sapi perah, membantu pemanasan air untuk memungkinkan sapi dilap dengan kain air panas sehingga produktivitas susu meningkat. Dengan adanya pola pembudidayaan skala kecil dan rumahan, maka program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang didorong Kementerian Pertanian perlu ditingkatkan dengan fokus kepada penguatan sistem manajemen kolektif dan akses kepada teknologi pertanian secara komunal. Kebijakan inseminasi buatan dan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB) perlu terus didorong, dan ketersediaan pembiayaan untuk memberi insentif peternak memelihara anak sapi akan membantu meningkatkan produksi peternakan.

Penanganan gangguan reproduksi perlu ditingkatkan dalam menyikapi kendala kegagalan kawin suntik yang terjadi di beberapa kasus. Penerapan *biosecurity* dan optimalisasi penanganan penyakit hewan adalah standard minimum pelayanan yang harus dijaga. Pengembangan *Science Techno Park* (STP) sektor peternakan yang telah dikembangkan di beberapa daerah di Jawa Timur perlu dikawal implementasinya agar menghasilkan kelompok-kelompok usaha rintisan dan teknologi tepat guna yang diiringi peningkatan sumber daya manusia terdidik dan terampil. Dengan adanya *East Java Information Super Corridor* (EJISC), diharapkan akses pemasaran menjadi semakin luas dalam menyikapi dan memitigasi risiko pasar termasuk harga.

Bhakti – 7

Jatim Berdaya.

*Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,
Koperasi, BUMDesa dan Mendorong
Pemberdayaan Pemerintahan Desa.*

Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

Adapun pokok-pokok kegiatan dalam kebijakan restorasi desa, antara lain :

- a. Penataan aparatur Desa yang memadai dan professional;
- b. Diversifikasi usaha seperti pertanian, wisata, kuliner, budaya, kerajinan, dan lain-lain;
- c. Peningkatan Kelembagaan Desa melalui koperasi Rakyat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan BUMDesa yang merawat nilai kekeluargaan dan gotong-royong Rakyat desa;
- d. Memberdayakan Lembaga Keuangan Desa serta BUMDesa dan agar petani dan UKM tidak mengakses kredit usaha dari pengijon dan tengkulak dengan bunga puluhan persen per bulan;
- e. Pembenahan mata-rantai tata niaga produk desa ke pasar / Konsumen;
- f. Pengembangan riset, teknologi dan sains yang melayani kebutuhan desa dan memecahkan masalah perdesaan;
- g. Perawatan ekologi sehat desa-desa; dan
- h. Pengembangan holtikultura yang tidak membutuhkan lahan luas;

Sedangkan pokok – pokok kegiatan dalam peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM antara lain :

- a. Pembentukan jaringan rantai pasok baik produksi maupun pemasaran antar koperasi dan UMKM (*Supply demand channel*);
- b. Penguatan kemitraan Koperasi UMKM dengan BUMDesa;

- c. Pengembangan satu produk unggulan Koperasi atau UMKM di satu wilayah dengan satu merk (communal branding);
- d. Pengembangan koperasi perempuan, petani, dan nelayan;
- e. Penguatan daya saing produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP);
- f. Perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM melalui penguatan perdagangan antar pulau; dan
- g. Mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM

Bhakti – 8

Jatim Amanah.

*Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,
Efektif dan Anti Korupsi.*

Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, akan menciptakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan partisipatif.

Terkait pembelanjaan, penerapan *e-procurement* telah diterapkan, termasuk *e-catalogue*, dan ini perlu disempurnakan untuk mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada sisi perizinan, transparansi dapat terwujud dengan menjalankan komitmen mendukung upaya pemerintah pusat mendorong suksesnya penerapan *Online Single Submission* atau pemasukan berkas melalui satu pintu online, hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Pemerintahan mendatang harus mampu membangun budaya

integritas dengan menciptakan kode etik dan prosedur, termasuk diantaranya sistem pelaporan gratifikasi, konflik kepentingan, pelaporan harta penyelenggara negara dan berbagai aspek yang menekankan meritokrasi (sistem organisasi berbasis kinerja). Sistem aduan masyarakat yang handal (*whistleblower*) juga menjadi penting dalam mendorong pengawasan publik, sembari memperhatikan pengelolaan risiko terkait potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan.

Selain itu untuk membantu akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu di Jawa Timur, pemerintah akan mewujudkan 99 Organisasi Bantuan Hukum, bekerjasama dengan berbagai macam pihak yang konsen pada advokasi bagi masyarakat tidak mampu seperti lembaga bantuan hukum yang ada di jaringan masyarakat sipil maupun kampus-kampus di Jawa Timur (Jatim Pro Bono). Sedangkan untuk menyelesaikan konflik dan peningkatan agrarian di Jawa Timur pemerintah akan membentuk kegiatan rembuk agrarian (Jatim Rembuk Agraria). Selanjutnya untuk memberikan percepatan penghormatan serta pengakuan masyarakat adat pemerintah akan melakukan program Satu Kepedulian untuk Akselerasi Penghormatan dan Pengakuan Masyarakat Adat (Jatim Sepakat).

Bhakti – 9

Jatim Harmoni.

*Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan
Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.*

Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries*, *green city*, *halal tourism*.

Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa.

Memajukan prestasi olahraga, meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlet berprestasi nasional dan internasional.

Pada aspek lingkungan, melalui pelaksanaan Jatim Harmoni diharapkan dapat dilakukan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity). Pada kawasan hutan, khususnya yang berada di kawasan pegunungan Provinsi Jawa Timur, diantaranya seperti pada kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Lingkar Bromo, dan Lingkar Ijen, memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan tangkapan air dalam mendukung keberlanjutan siklus air.

Pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dengan tetap memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat perdesaan di wilayah hutan merupakan titik utama dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi menuju sektor industri, jasa dan perdagangan terutama di daerah dengan keberadaan kawasan hutan yang relatif signifikan, memerlukan keberpihakan anggaran untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi sekunder dan tersier sehingga disaat yang sama akan menjaga peran daerah tersebut sebagai paru-paru Pulau Jawa. Pendekatan ini diharapkan juga bersinergi dengan upaya mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, melalui upaya konservasi daerah aliran sungai yang memiliki peran utama dalam pengendalian banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, kelestarian hutan juga turut berkontribusi kepada terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk ekosistem pesisir.

Salah satu aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang dititikberatkan pada upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan TPS 3R dan bank sampah, serta pemanfaatan gas metan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah akan turut menjaga kelestarian dan kebersihan sungai, serta kawasan pesisir. Program kali bersih dan adipura seyogyanya dapat menggunakan inovasi seperti Adipura Desa dan kompetisi kali bersih desa untuk menggalang peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada intinya, pendekatan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan teknis.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Prioritas Pembangunan RKPD tahun 2019 merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2019 dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD, maka Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini melaporkan penyelenggaraan keuangan daerah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2019. Pengelolaan APBD meliputi perencanaan keuangan (penganggaran) yang harus sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan/realisasi anggaran, dan pelaporannya. Perencanaan keuangan (penganggaran pembangunan) setiap tahunnya dilakukan secara paralel dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang sama. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Salah satu kaidah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. *Money follow program* adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, prioritas pembangunan setiap tahun ditetapkan dan kemudian diturunkan ke dalam sasaran, program, hingga kegiatan prioritas. Selanjutnya, alokasi anggaran diletakkan pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.

Bagaimana pun, dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Arah kebijakan pengelolaan keuangan serta proyeksi/target anggaran untuk mencapai prioritas pembangunan suatu tahun tertuang dalam dokumen RKPD tahun tersebut. Sementara itu, rincian penganggaran berbagai program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam dokumen APBD di tahun yang bersesuaian. RKPD dan APBD suatu tahun disusun dan ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga saat memasuki tahun anggaran, rencana pembangunan dan penganggarnya dapat dilaksanakan. Mengingat kondisi pembangunan dan perekonomian yang dinamis, maka di setiap tahun anggaran berjalan, terdapat

mekanisme perubahan RKPD yang disertai perubahan APBD. Dalam kedua dokumen tersebut tertuang pula perubahan penekanan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta penganggarannya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Laporan ini menjelaskan pengelolaan komponen-komponen keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Di setiap komponen, diuraikan arah kebijakan pengelolaannya, sebagaimana tertuang dalam RKPD serta Perubahan RKPD Tahun 2019, target dan capaian pelaksanaan (realisasi) anggaran, serta hasil identifikasi permasalahan dan penyelesaiannya.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan untuk mendukung upaya – upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan/pendapatan daerah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak (*sustainable compliance*);
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan. Rencana ini dilaksanakan melalui program: pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- c. Mencetak Sumber Daya Aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Rencana ini dilaksanakan melalui program: penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, program Rekrutmen Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi;

- d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya dengan melakukan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kabupaten/Kota terkait;
- e. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via EDC Machine, SMS Bank Jatim dan Internet Banking;
- f. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
- h. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- i. Mengembangkan pola kemitraan (*public private partnership*) untuk menyelenggarakan pelayanan publik / pembayaran pajak dengan pihak swasta.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD ditujukan untuk:

- a. Mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah, berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2019 serta memperhatikan perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat
- c. Meningkatkan proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui kegiatan intensifikasi sektor Pajak Daerah dan ekstensifikasi sektor Retribusi Daerah;
- d. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah secara partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi target penerimaan Pendapatan Daerah dan ekspektasi masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan publik yang prima;

Karenanya, dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan daerah tersebut ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Jawa Timur yang taat membayar pajak.
- b. Memperbarui dan meningkatkan kapasitas teknologi informasi sebagai salah satu tools penting dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Memperbarui sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan.
- d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur agar semakin profesional dan memiliki integritas tinggi, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi, melalui penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah kabupaten/kota, salah satunya dengan melakukan fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada kabupaten/ kota terkait.
- g. Meningkatkan dukungan terhadap kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai, dengan cara menambah jumlah kerjasama dan model jenis pembayaran berbasis non tunai dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- i. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan.
- j. Memanfaatkan aset/barang milik daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.
- k. Mengembangkan pola kemitraan (public private partnership) untuk menyelenggarakan pelayanan publik/pembayaran pajak dengan pihak swasta.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 33.427.673.068.552,55 (Rp. 33,427 trilyun) dan berhasil direalisasikan di angka Rp. 33.455.209.327.986,57 (Rp. 33,455 trilyun). Ini berarti tingkat capaian/realisasi Pendapatan Daerah sebesar 100,08% atau melebihi besaran yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 di mana realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 31.963.943 juta (Rp. 31,964 trilyun), maka Pendapatan Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan/pertumbuhan sebesar 4,67% (*Tabel 3.1*). Tingkat capaian tahun 2019 yang lebih kecil daripada tahun 2018 dapat memperlihatkan bahwa akurasi perencanaan keuangan meningkat, dimana penetapan target pendapatan daerah semakin mendekati realisasinya.

Tabel 3. 1. Target, Realisasi, dan Tingkat Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2018 dan 2019 (Rp. Juta)

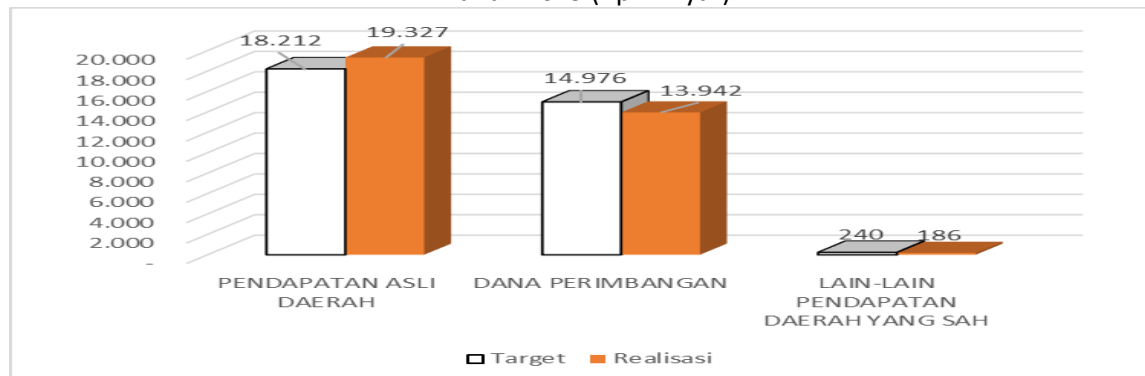
Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan (Realisasi)
2018	29.024.306	31.963.943	103,91%	
2019	33.427.673	33.455.209	100,08%	4,67%

Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020 dan RKPD 2019)

Jika dilihat per komponen penyusunnya, realiasi pendapatan daerah yang melebihi target tersebut disumbang oleh pendapatan asli daerah (PAD). *Gambar 3.1* memperlihatkan bahwa realiasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur sebagian besar (57,8%) disumbang oleh PAD, yaitu sebesar Rp. 19.327.125.485.405,93 (Rp. 19,327 trilyun). Sisanya sebesar 41,7% dan 0,56% disumbang oleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi PAD pun melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 18.212.437.333.663,55 (Rp. 18,212 trilyun), sehingga tingkat realisasinya mencapai 106,1%.

Realisasi pendapatan dari Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak mencapai angka yang ditargetkan dengan tingkat capaian masing-masing 93,1% dan 77,8%. Ketidaktercapaian target Dana Perimbangan dapat dimaklumi dan memang relatif sulit dikendalikan mengingat kewenangan pemberian dana berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah provinsi hanya menerima sesuai alokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, ketidaktercapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah perlu dievaluasi untuk perbaikan pengelolaannya di masa mendatang, meskipun sumbangannya terhadap pendapatan daerah sangat kecil.

Gambar 3. 1. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Realisasi PAD yang menggembirakan ini disumbang oleh realisasi penerimaan yang melebihi target dari hampir semua sub komponen penyusun PAD (Gambar 3.2). Penyumbang PAD terbesar adalah pajak daerah sebesar Rp. 15.522.201.423.333,00 (Rp. 15,522 trilyun) atau sebesar 80,3%, diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 3.255.809.637.717,81 (Rp. 3,256 trilyun) atau 16,8%, dan sisanya oleh Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, masing-masing sebesar 0,76% dan 2,1%. Tingkat realisasi penerimaan dari pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah masing-masing mencapai 104,2%, 105,0%, dan 117,6% yang berarti bahwa realisasi melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga secara total tidak mengherankan jika realiasi PAD melebihi targetnya. Hanya penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tidak mencapai angka yang ditargetkan dengan tingkat capaian sebesar 97,6%. Ketidaktercapaian target penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini disebabkan oleh adanya *mis-targeting* penerimaan BUMD, dimana angka yang dipasang sebagai target di tahun 2019 adalah angka tahun 2020, sehingga *over target*.

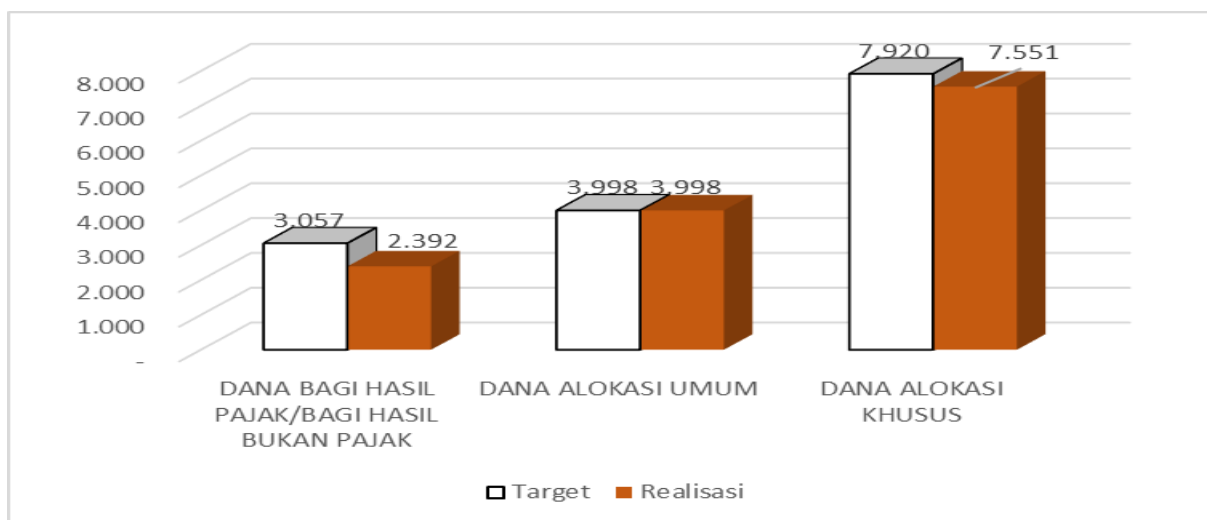
Gambar 3.2. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Secara keseluruhan realisasi Dana Perimbangan tidak mencapai target karena realisasi dua komponen Dana Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, juga tidak mencapai targetnya (*Gambar 3.2*). Tingkat capaian/realisasi Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak masing-masing sebesar 95,3% dan 78,2%. Realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus berkontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan, yaitu sebesar Rp 7.551.054.471.797,64 (Rp. 7,551 triliun) atau 54,2%, diikuti oleh Dana Alokasi Umum yang terealisasi sebesar Rp. 3,998 triliun atau 28,7%, dan sisanya sebesar Rp. 2,39 triliun (17,2%) dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Gambar 3.3. Target dan Realiasi Komponen Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)

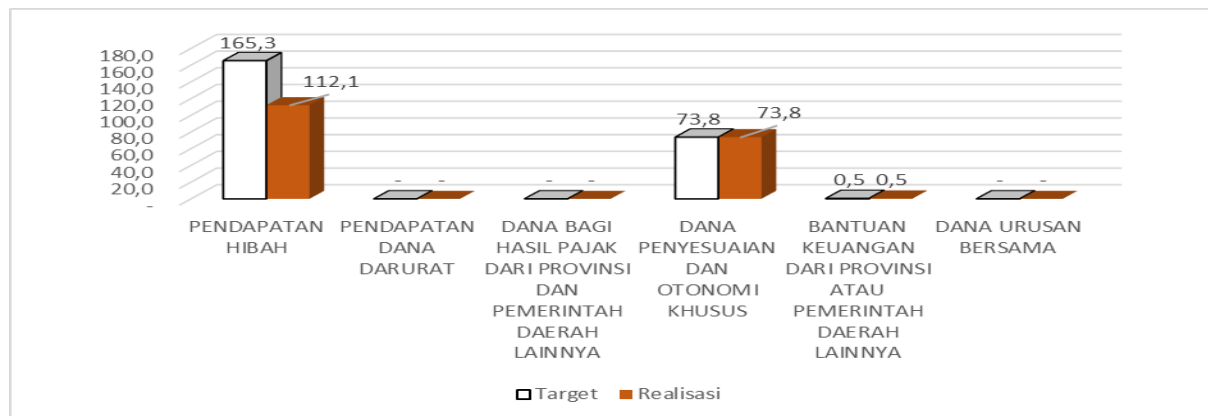


Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Sementara itu, meskipun berkontribusi hanya sekitar 0,56% terhadap Pendapatan Daerah, penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap berpotensi untuk terus dikembangkan. *Gambar 3.3* memperlihatkan bahwa di tahun 2019, komponen terbesar penyumbang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp. 112,1 milyar (atau 60,1%) dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Rp. 73,8 milyar atau 39,6%). Sisanya (0,3%) adalah penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Lain/Kabupaten/Kota sebesar Rp. 0,5 milyar. Tingkat realisasi/capaian pendapatan hibah hanya 67,8%, sementara pendapatan lainnya sebesar 100% (sesuai target). Dengan demikian, ketidaktercapaian target penerimaan dari

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Hibah.

Gambar 3.4. Target dan Realiasi Komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pencapaian target Pendapatan Daerah bergantung pada realisasi komponen penerimaan daerah, khususnya yang berkontribusi besar, yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Meskipun Provinsi Jawa Timur diuntungkan dengan kontribusi dominan PAD terhadap Pendapatan Daerah, namun secara keseluruhan, realisasi Dana Perimbangan tetap mempengaruhi besaran sekaligus tingkat capaian Pendapatan Daerah. Segala permasalahan pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan menjadi permasalahan peningkatan pendapatan daerah. Berikut adalah beberapa permasalahan dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah:

- Penerimaan dari Dana Perimbangan relatif stagnan bahkan cenderung turun sesuai kebijakan Pemerintah Pusat yang memang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Di tahun 2019, komponen dana perimbangan yang tidak sesuai target adalah Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH). Adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran DAK dari pusat ke daerah, misalnya pada penyaluran Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang semula disalurkan sekaligus berubah menjadi 2 tahap (semesteran), dapat mempengaruhi realisasinya. Sementara itu, DBH tahun 2019 menurun karena penerimaan negara juga sedang ‘terbatas’. DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, sehingga saat realiasi penerimaan negara tahun anggaran berjalan rendah, maka berimbas pula pada penerimaan DBH di daerah.

- Meskipun secara umum realisasi PAD melebihi angka yang ditargetkan, namun ada catatan tentang realisasi sub komponen PAD, yaitu:
 - Pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, tercatat bahwa secara kumulatif laju pertumbuhan kendaraan bermotor baru di Jawa Timur tahun 2019 cenderung stagnan, bahkan lebih rendah 0,26% apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Walaupun demikian, pelampauan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor relatif tinggi, hal ini salah satunya disebabkan karena tingginya jumlah pendaftaran kendaraan baru di Triwulan IV, untuk menghindari kenaikan tarif Bea Balik Nama Penyerahan Pertama yang berlaku pada tahun 2020;
 - Pada Pajak Bahan Bakar Bermotor, tercatat bahwa volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Timur meningkat 4,81%. Walaupun demikian, penerimaan Pajak Bahan Bakar Bermotor tidak optimal, karena penyesuaian harga jual beberapa jenis BBM yang cenderung turun dan tingginya jumlah konsumsi BBM jenis Premium apabila dibandingkan dengan jenis Perta Series dengan harga jual lebih tinggi;
 - Penerimaan Pajak Rokok tahun 2019 jauh dibawah target serta perkiraan penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan: (1) adanya pemotongan langsung bagian Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bagian bulan Desember 2018 dan Triwulan I 2019; dan (2) penerimaan Cukai Nasional yang cenderung turun pada tahun 2019, sehingga penerimaan Pajak Rokok bagian bulan Oktober, November 2019 jauh lebih rendah 30,17% apabila dibandingkan dengan tahun 2018.

Solusi :

- Melakukan pembaruan perhitungan target Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah, dengan memperhatikan kondisi yang mempengaruhi penerimaan pada triwulan IV tahun 2019;
- Mengevaluasi faktor-faktor yang mengakibatkan belum tercapainya penerimaan dari sektor PBBKB yang optimal dengan cara menghitung kembali penetapan target penerimaan dengan memperhatikan kondisi minyak dunia yang berpengaruh pada fluktuasi harga jual BBM yang terjadi pada tahun depan.
- Menghitung kembali penetapan target sektor Pajak Rokok di tahun depan secara cermat, terukur dan rasional serta memperhatikan proyeksi penerimaan Cukai Nasional yang mempengaruhi penerimaan Pajak Rokok, hal ini karena pada tahun 2020 pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 21,56%.
- Melakukan sosialisasi terkait manfaat dan jenis-jenis layanan pajak serta memberikan insentif yang sifatnya perpajakan yang sifatnya khusus, untuk menjaga iklim usaha kondusif dan meringankan beban masyarakat;
- Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya) untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak Daerah, pengembangan pelayanan samsat unggulan, tatacara/prosedur pembayaran Pajak Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat sadar pajak masyarakat;
- Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat;
- Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Swasta dan BUMN dalam rangka memperluas cakupan layanan di seluruh Jawa Timur serta mendukung program pemerintah terhadap Gerakan Non Tunai dalam pembayaran Pajak Daerah, melalui penyediaan modal pembayaran secara elektronik (mesin EDC, dan uang elektronik lainnya);
- Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan pajak secara *door to door*, operasi bersama dengan institusi terkait; dan
- Melakukan pendataan dan Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip penganggaran, dari money follow function menjadi money follow programme yang berarti bahwa fokus penganggaran diletakkan pada program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih jelas, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2019. Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Adapun sasaran dari dimensi pembangunan nasional ini adalah sebagai berikut: a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan; b. Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; d. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak; e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman. Sasaran dimensi pembangunan sektor unggulan ini sebagai berikut: a. Peningkatan Konektivitas dan TIK; b. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; d. Penanggulangan Bencana; e. Peningkatan Sistem Logistik.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya. Sasaran dimensi pemerataan dan

kewilayahan ini sebagai berikut: a. Peningkatan Ekspor dan Nilai tambah Produk Pertanian; b. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan; c. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; e. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas.

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Sasaran dimensi pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut: a. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi; b. Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan; c. Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air; d. Peningkatan Daya Dukung Sumber daya alam dan Daya Tampung Lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Sasaran dimensi pemerataan dan kewilayahan ini sebagai berikut: a. Kamtibmas dan Keamanan Siber; b. Kesuksesan Pemilu; c. Pertahanan Wilayah Nasional; d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi; Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar, pilihan serta penunjang yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur

Kebijakan umum belanja daerah tahun 2019 adalah memfokuskan penganggaran pada upaya pencapaian prioritas dan sasaran di atas. Selain itu, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah, walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas

oleh daerah), ruang fiskal daerah Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Karenanya, kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan detail tentang belanja daerah Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- b. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10%.
- c. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, dll) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- f. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Pada perubahan RKPD dan APBD tahun 2019, kebijakan pengelolaan belanja daerah difokuskan untuk mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%.
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, pilihan serta penunjang dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan

keuangan pada Pemerintah Desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas Aparatur Desa.

10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah di arahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.
12. Dalam melaksanakan agenda reformasi di bidang keuangan negara khususnya berkaitan dengan Pola Pengelolaan Keuangan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur efektif sejak Tahun Anggaran 2018 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Perangkat Daerah yang telah dinilai memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sebagai PPK-BLUD, meliputi: a. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur; b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; dan d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
13. Dalam penerapan Perangkat Daerah sebagai PPK-BLUD dilaksanakan secara bertahap, dan akan diusulkan menjadi status BLUD secara penuh setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, meliputi: a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/516/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah; b.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/517/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, meliputi: 1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Tamperan Pacitan; 2) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Pondok Dadap Malang; dan 3) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SKP) Mayangan Probolinggo. c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/518/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, meliputi: 1) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Padi Mojokerto; 2) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Palawija Singosari; 3) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Benih Hortikultura Pasuruan, dan 4) Unit Pelaksana Teknis Agribis Hortikultura Lawang. d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/519/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, meliputi: 1) SMKN 1, SMKN 5 dan SMKN 6 Surabaya; 2) SMKN 1 dan SMKN 3 Buduran Sidoarjo; 3) SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 11 Malang; 4) SMKN 1 Singosari Malang; 5) SMKN 1 Panji Situbondo; 6) SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi; 7) SMKN 2 Bondowoso; 8) SMKN 5 Jember; 9) SMKN 3 Madiun; 10) SMKN 1 Pacitan; 11) SMKN 2 Pasuruan; 12) SMKN 3 Boyolangu Tulungagung; 13) SMKN 1 Glagah Banyuwangi; 14) SMKN 1 Tegalampel Bondowoso; 15) SMKN 1 Jenangan Ponorogo.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dibuat meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar Rp. 30,76 trilyun menjadi sekitar Rp. 38,00 trilyun, walaupun realisasinya tidak sebesar yang ditargetkan (*Tabel 3.2*). Besaran realisasi belanja tahun 2019 sebesar 10,91% dari tahun 2018. Namun, karena kenaikan target yang sangat besar membuat tingkat capaian/realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 89,48%. Penurunan tingkat capaian Belanja Daerah tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 umumnya disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran, seperti adanya sisa dari lelang atau proses pengadaan barang/jasa. Angka target Belanja Daerah Tahun 2019

sebesar Rp. 38.004.721.350.292,36 (Rp. 38,004 triliun) dan direalisasikan di angka Rp. 34.007.062.917.513,86 (Rp. 34,007 triliun).

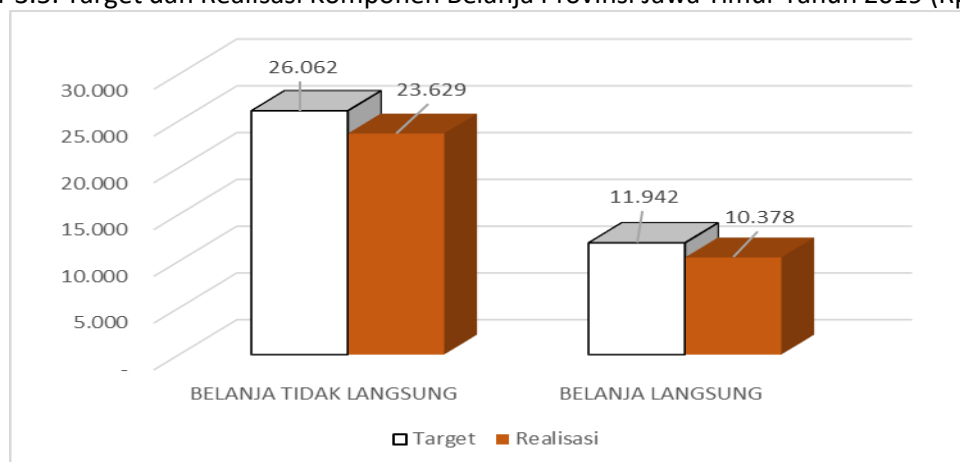
Tabel 3.2. Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan 2019 (Rp. Juta)

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan (Realisasi)
2018	30.762.056	30.662.093	99,68%	
2019	38.004.721	34.007.063	89,48%	10,91%

Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020 dan RKPD 2019)

Realisasi komponen-komponen Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 lebih rendah dari targetnya (*Gambar 3.5*). Tingkat realiasi Belanja Langsung sebesar 86,9%, sementara tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 90,7%. Ada dua kemungkinan penyebab tidak terealisasinya anggaran. Pertama, adanya efisiensi anggaran yang terjadi jika target indikator kinerja kegiatan tercapai dan masih tersedia anggaran yang tidak terserap. Kedua, anggaran tidak terserap karena kegiatan tidak sepenuhnya terlaksana. Dengan demikian, diharapkan bahwa anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Gambar 3.5. Target dan Realisasi Komponen Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Miliar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Gambar 3.5 juga memperlihatkan bahwa belanja daerah tahun 2019 didominasi oleh Belanja Tidak Langsung, yaitu sekitar 69,5%. Sisanya, 30,5% adalah untuk Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan kegiatan dan program pembangunan serta identik dengan belanja operasional, belanja wajib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun belanja untuk pemberian bantuan. Sementara itu, Belanja Langsung diidentikkan dengan belanja pembangunan, di mana semakin tinggi Belanja Langsung, maka diharapkan output dan outcome pembangunan akan lebih tinggi. Karenanya, dalam pengelolaan belanja daerah, maka semakin besar proporsi Belanja Langsung akan semakin baik.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)

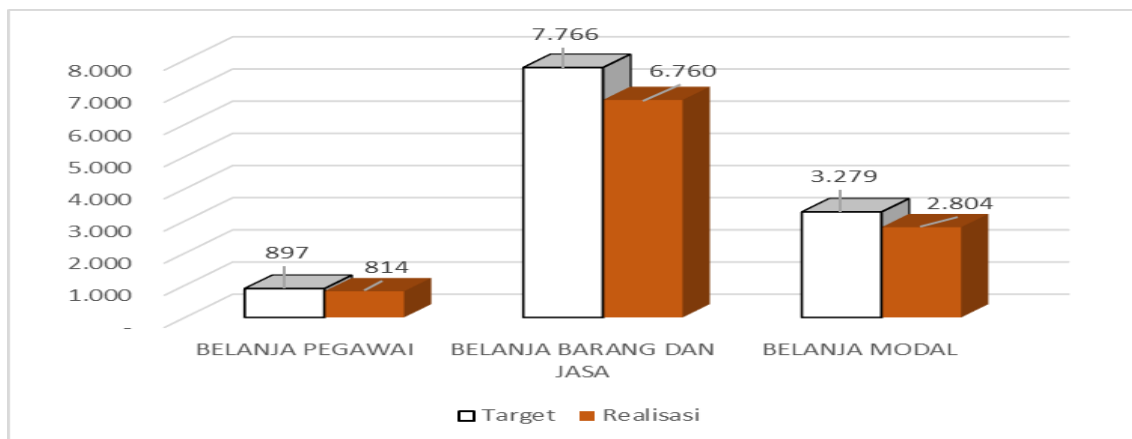
Komponen Belanja Tidak Langsung	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi
BELANJA PEGAWAI	7.872	7.179	91,2%	30,4%
BELANJA BUNGA	14	11	74,8%	0,0%
BELANJA SUBSIDI	38	29	76,9%	0,1%
BELANJA HIBAH	8.517	8.287	97,3%	35,1%
BELANJA BANTUAN SOSIAL	108	64	59,1%	0,3%
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	8.376	7.258	86,7%	30,7%
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA	874	769	88,0%	3,3%
BELANJA TIDAK TERDUGA	264	33	12,5%	0,1%
Total	26.062	23.629	90,7%	100%

Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Jika dilihat per komponen belanja tidak langsung (*Tabel 3.3*), terlihat bahwa semua realiasi seluruh komponen Belanja Tidak Langsung lebih rendah dari targetnya, yang mengindikasikan terjadinya efisiensi anggaran atau adanya bagian kegiatan yang direncanakan tidak terealisasi. Namun, kejadian tidak terealisasinya suatu kegiatan jarang terjadi, sehingga kemungkinan perbedaan target dan realisasi belanja disebabkan oleh adanya upaya efisiensi anggaran. Tingkat realisasi terendah adalah pada Belanja Tidak Terduga dan ini dapat dimaklumi karena belanja ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga. Tingkat realisasi yang relative rendah lainnya adalah pada belanja bantuan sosial, bunga dan subsidi.

Tabel 3.3 juga memperlihatkan bahwa proporsi terbesar Belanja Tidak Langsung adalah pada Belanja Hibah, Pegawai dan Belanja Bagi Hasil ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika ada upaya pengurangan proporsi Belanja Tidak Langsung untuk meningkatkan bagian Belanja Langsung, maka komponen pengurangan Belanja Pegawai relatif sulit dilakukan mengingat komponen tersebut merupakan pengeluaran rutin wajib bagi aparatur sipil negara demi operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Bagi Hasil merupakan belanja yang wajib dikeluarkan dan menjadi hak pemerintah provinsi lain/kabupaten/kota sesuai perundangan untuk membantu mereka, sehingga juga relative sulit ditekan. Dengan demikian, komponen yang dapat ditekan jika ingin meningkatkan Belanja Langsung adalah Belanja Hibah.

Gambar 3.6. Target dan Realisasi Komponen Belanjaan Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



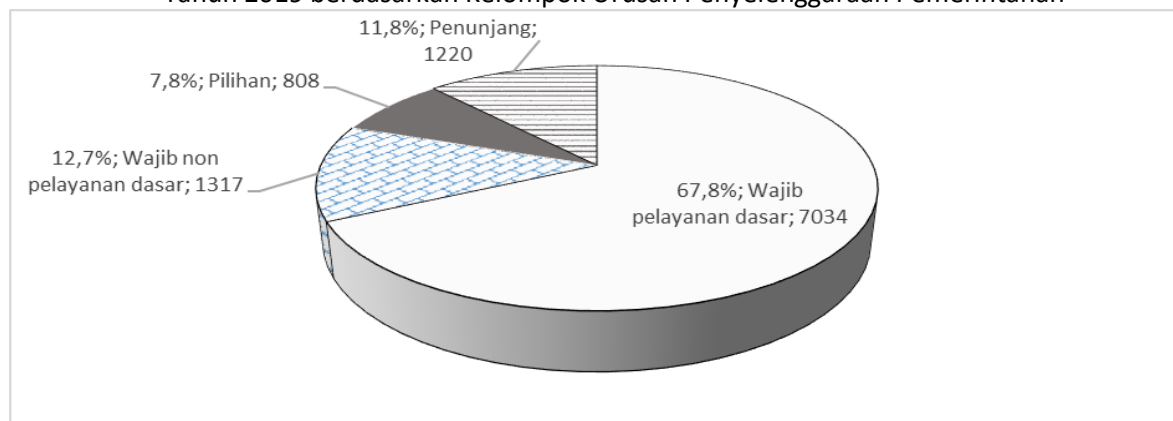
Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Realisasi seluruh komponen Belanja Langsung untuk program dan kegiatan pembangunan juga lebih kecil dari targetnya (*Gambar 3.6*). Tingkat realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing 90,7%, 87,0%, dan 85,5%. Sementara itu, dominasi realisasi Belanja Langsung dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebesar Rp. 6,76 triliun atau sekitar 65,1% dari seluruh Belanja Langsung. Sisanya, sebesar Rp. 2,8 triliun (27,0%) dan Rp. 814 milyar (7,8%) masing-masing untuk Belanja Modal dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Analisis pemanfaatan Belanja Langsung dapat juga dilihat berdasarkan distribusi alokasinya berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan atau perangkat daerah penyelenggaranya. *Gambar 3.7* memperlihatkan bahwa berdasarkan kelompok urusan

penyelenggaraan pemerintahan, Belanja Langsung sebagian besar (67,8% atau sebesar Rp. 7,034 triliun) dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Kontribusi terbesar berikutnya adalah untuk penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar (12,7% atau Rp. 1,317 triliun), urusan penunjang (11,8% atau Rp. 1,220 triliun), dan terakhir untuk urusan pilihan (7,8% atau Rp. 808 milyar). Porsi besar Belanja Langsung untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan wajib, utamanya untuk pelayanan dasar ini telah sesuai dengan arahan atau prioritas pembangunan nasional.

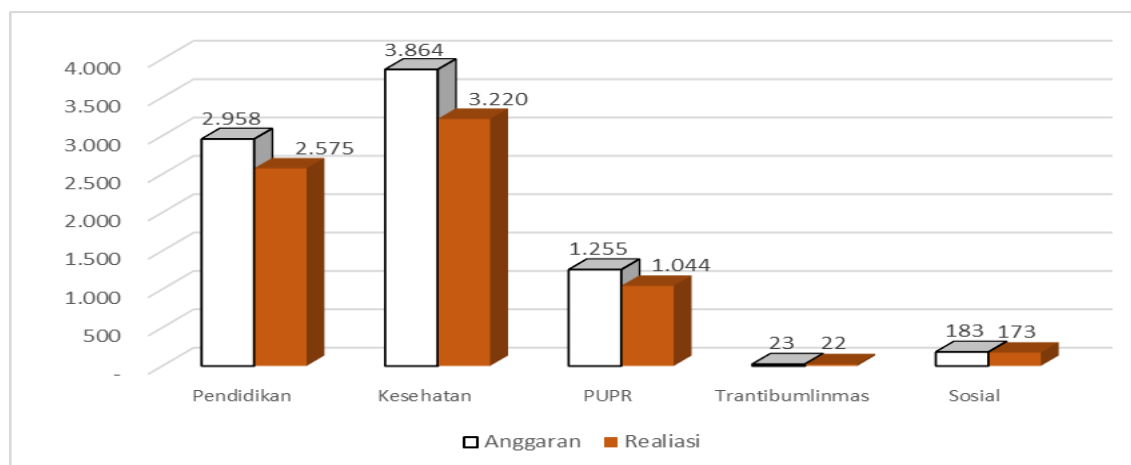
Gambar 3.7. Jumlah (Rp. Milyar) dan Komposisi (%) Realiasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 berdasarkan Kelompok Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Pada urusan wajib, alokasi Belanja Langsung terbesar diberikan pada penyelenggaraan urusan kesehatan, baru kemudian pada urusan pendidikan (Gambar 3.8). Alokasi keduanya jauh lebih tinggi daripada untuk Belanja Langsung urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

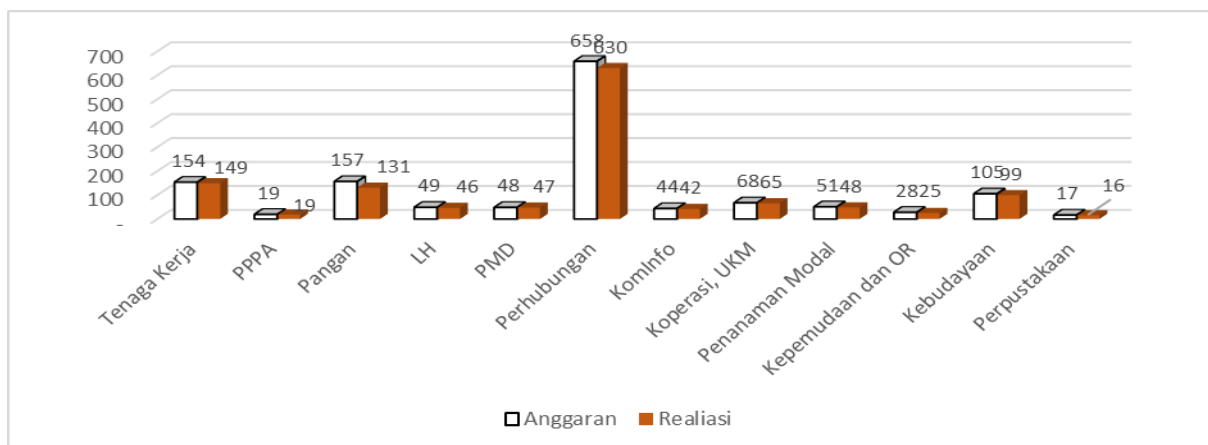
Gambar 3.8. Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Alokasi Belanja Langsung untuk urusan wajib non pelayanan dasar terbesar dialokasikan untuk urusan perhubungan (*Gambar 3.9*). Hal ini bisa dimaklumi karena kegiatan dan program pada urusan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (fisik) yang membutuhkan pendanaan yang lebih besar.

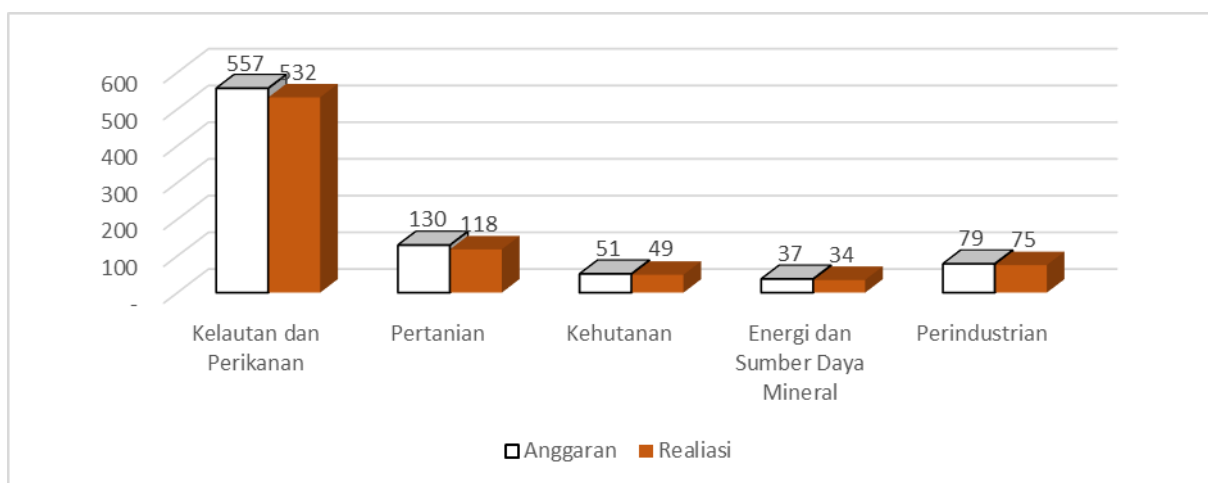
Gambar 3.9. Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Pada urusan pilihan, alokasi Belanja Langsung terbesar diberikan pada penyelenggaraan urusan perikanan dan kelautan. Alokasi untuk penyelenggaraan urusan lainnya bervariasi, sebagaimana terlihat pada *Gambar 3.10*.

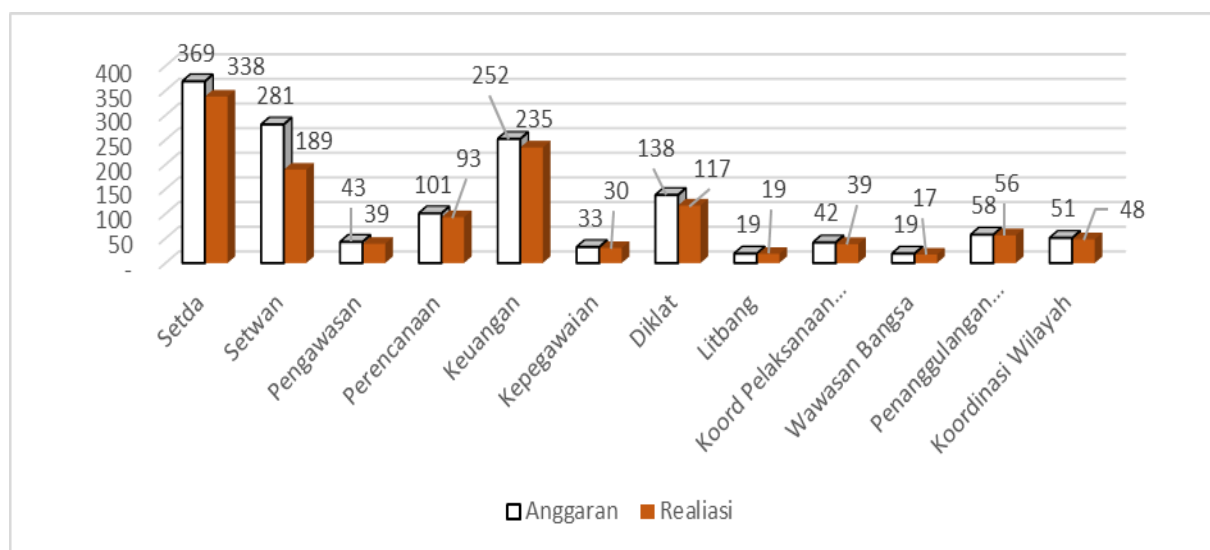
Gambar 3.10. Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Pilihan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Untuk penyelenggaraan urusan penunjang, tiga perangkat daerah yang mendapatkan alokasi belanja langsung terbesar adalah pada penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Keuangan (*Gambar 3.11*). Alokasi penyelenggaraan urusan penunjang lainnya bervariasi berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Gambar 3.11. Target dan Realisasi Belanja Langsung Penyelenggaraan Urusan Penunjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Miliar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Sebaran target dan realisasi anggaran Belanja Langsung per Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 terlihat di *Tabel 3.4*. Beberapa hal yang bisa dicermati dari tabel tersebut antara lain: (1) perangkat daerah yang mendapatkan proporsi realisasi anggaran sangat besar, seperti Dinas Pendidikan dengan proporsi 24% dan RSUD Dr. Soetomo dengan proporsi 12%. Jika kedua perangkat daerah ini dikeluarkan dari perhitungan, maka rata-rata proporsi belanja langsung per perangkat daerah sama dengan 0,69%. Dengan demikian akan terlihat perangkat daerah dengan proporsi belanja langsung yang di atas, sama dengan dan di bawah rata-rata; (2) perangkat daerah berdasarkan tingkat realisasi anggarannya di tahun 2019. Rata-rata tingkat realisasi anggaran sebesar 86,9%. Perangkat daerah yang memiliki tingkat realisasi anggaran cukup rendah atau di bawah rata-rata perlu dievaluasi penyebab ketidaktercapaiannya untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Tabel 3.4. Target, Realisasi, Tingkat dan Proporsi Realisasi Anggaran
Belanja Langsung Per Perangkat Daerah Tahun 2019 (Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi		
			Rp	%	Proporsi
1	Dinas Pendidikan	2.958.266.914.930,58	2.574.604.841.449,80	87,18	24,809%
2	Dinas Kesehatan	509.576.871.412,00	147.487.477.518,92	28,94	1,421%
3	UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu	87.455.800.373,84	81.432.096.117,00	93,11	0,785%
4	UPT Rumah Sakit Paru Jember	45.960.677.721,04	35.278.630.105,00	76,76	0,340%
5	UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	28.516.251.364,67	23.466.664.582,00	82,29	0,226%
6	UPT Rumah Sakit Kusta Kediri	16.762.892.260,11	16.649.739.971,00	99,32	0,160%
7	UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto	71.659.924.948,27	56.361.806.614,00	78,65	0,543%
8	UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	60.607.754.273,42	54.905.268.695,00	90,59	0,529%
9	UPT Rumah Sakit Paru Surabaya	25.002.169.456,46	15.730.854.897,00	62,92	0,152%
10	UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan	95.980.504.737,35	47.022.973.282,00	48,99	0,453%
11	UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun	17.654.336.604,39	17.237.633.907,00	97,64	0,166%
12	UPT Akademi Keperawatan Madiun	3.711.705.168,84	3.027.047.461,00	81,55	0,029%
13	UPT Akademi Gizi Surabaya	4.344.537.838,50	4.199.003.860,00	96,65	0,040%
14	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	31.331.834.019,84	24.913.026.980,00	79,51	0,240%
15	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	1.342.940.658.174,65	1.256.629.634.591,00	93,57	12,109%
16	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	880.714.920.294,68	865.386.421.266,03	98,26	8,339%
17	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun	338.174.125.398,58	309.211.265.290,00	91,44	2,980%
18	Rumah Sakit Haji Surabaya	251.198.841.687,63	212.207.268.703,00	84,48	2,045%
19	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	52.378.205.074,30	48.904.420.690,00	93,37	0,471%
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	911.077.231.000,00	753.413.446.680,55	82,69	7,260%
21	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	115.527.968.000,00	95.539.771.518,80	82,70	0,921%
22	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya	228.669.966.900,00	195.010.521.943,45	85,28	1,879%
23	Satuan Polisi Pamong Praja	23.122.600.313,00	21.845.118.170,00	94,48	0,210%
24	Dinas Sosial	182.845.883.247,00	173.085.248.926,86	94,66	1,668%
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153.857.396.000,00	149.030.037.747,00	96,86	1,436%
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	19.298.434.000,00	18.609.393.375,00	96,43	0,179%
27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	156.681.639.382,65	130.698.263.277,00	85,07	1,259%
28	Dinas Lingkungan Hidup	48.799.485.900,00	46.224.562.827,00	94,72	0,445%

29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.497.022.000,00	47.342.784.289,60	97,62	0,456%
30	Dinas Perhubungan	658.408.424.000,00	629.942.615.694,40	95,68	6,070%
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.965.259.000,00	41.756.325.534,00	94,98	0,402%
32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67.538.357.200,00	65.432.996.354,00	96,88	0,631%
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.120.792.558,00	47.900.470.243,00	93,70	0,462%
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28.270.162.080,00	25.003.182.626,00	88,44	0,241%
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105.234.915.000,00	99.251.334.230,00	94,31	0,956%
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.545.243.220,00	15.807.434.382,00	95,54	0,152%
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	556.928.345.550,34	531.879.586.887,23	95,55	5,125%
38	Dinas Perkebunan	62.730.620.900,00	56.780.248.129,00	90,51	0,547%
39	Dinas Peternakan	66.846.534.000,00	60.921.107.617,18	91,14	0,587%
40	Dinas Kehutanan	51.223.867.810,00	48.852.880.178,00	95,37	0,471%
41	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	37.315.070.000,00	34.482.366.246,00	92,41	0,332%
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.650.803.000,00	74.853.463.762,00	95,17	0,721%
43	Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	22.666.490.400,00	21.334.053.238,00	94,12	0,206%
44	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	52.254.354.645,00	49.911.544.012,00	95,52	0,481%
45	Biro Hukum	10.762.133.000,00	10.148.031.828,00	94,29	0,098%
46	Biro Administrasi Perekonomian	42.102.419.000,00	36.091.435.997,00	85,72	0,348%
47	Biro Administrasi Sumber Daya Alam	7.920.249.286,00	7.162.721.229,00	90,44	0,069%
48	Biro Administrasi Pembangunan	31.441.017.000,00	29.925.734.713,00	95,18	0,288%
49	Biro Organisasi	13.809.448.860,00	11.157.891.525,00	80,80	0,108%
50	Biro Umum	142.823.445.936,00	131.440.980.772,00	92,03	1,267%
51	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	45.126.895.000,00	40.603.700.575,00	89,98	0,391%
52	Sekretariat DPRD	281.392.254.000,00	189.487.218.546,64	67,34	1,826%
53	Inspektorat	43.117.950.125,00	39.011.904.739,00	90,48	0,376%
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101.096.599.000,00	92.854.492.383,00	91,85	0,895%
55	Badan Pendapatan Daerah	190.776.325.922,00	177.092.580.070,00	92,83	1,706%
56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	61.287.925.884,00	57.549.111.012,00	93,90	0,555%
57	Badan Kepegawaian Daerah	32.622.509.500,00	30.499.553.239,00	93,49	0,294%
58	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	138.335.805.000,00	116.588.185.386,00	84,28	1,123%
59	Badan Penelitian dan Pengembangan	19.385.484.000,00	18.628.904.396,00	96,10	0,180%
60	Badan Penghubung Daerah Provinsi	41.906.865.000,00	38.501.122.278,00	91,87	0,371%
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.315.015.000,00	17.189.442.045,00	89,00	0,166%
62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.741.975.000,00	56.288.604.299,00	97,48	0,542%

63	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun	9.944.424.000,00	9.073.740.201,00	91,24	0,087%
64	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro	9.842.756.000,00	8.863.122.050,00	90,05	0,085%
65	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang	10.267.032.000,00	9.954.026.756,00	96,95	0,096%
66	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan	10.567.495.000,00	9.836.629.180,00	93,08	0,095%
67	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	10.553.193.000,00	10.398.950.886,00	98,54	0,100%
TOTAL		11.942.455.008.358,10	10.377.912.917.973,50	86,90	100,0%

Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Permasalahan yang umum dijumpai pada perangkat daerah penyedia layanan kesehatan (Rumah Sakit) adalah pelunasan Piutang BPJS yang dilakukan pada akhir tahun, sehingga menunda belanja kebutuhan operasional perangkat daerah.
- Pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, terjadi perubahan e-catalog yang sewaktu-waktu menyebabkan beberapa item barang yang telah direncanakan batal tersedia karena item tersebut tidak muncul pada perubahan e-catalog
- Beberapa belanja operasional yang tidak terealisasi dikarenakan kurangnya waktu untuk pelaksanaan tender sehingga ada regulasi yang belum bisa dijalankan
- Untuk kegiatan dengan dana yang bersumber dari DAK: (1) terdapat perubahan metode pencairan dana serta aturan administrative yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa menyerapnya, sehingga serapan umumnya terjadi di triwulan IV tahun 2019; (2) Penyerapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (DAK) rendah dikarenakan pagu tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana hasil dari verifikasi Rencana Kerja

Solusi :

- Dalam rangka menjaga kesehatan keuangan rumah sakit akibat tersendatnya pembayaran utang BPJS Kesehatan, perlu melaksanakan: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta efisiensi biaya; (2) evaluasi bersama dengan pihak lintas sektor terkait, beserta pihak BPJS mengenai sistem pembayaran BPJS yang dirasa bisa mempengaruhi kegiatan operasional RS untuk kedepannya jika masih dengan sistem yang sama

- Meningkatkan koordinasi internal dengan rekonsiliasi rutin per bulan, antara bagian perencanaan, pengadaan dan pengelola keuangan terkait penyelesaian permasalahan pengadaan barang
- Melaksanakan lelang sesuai regulasi yang telah ditetapkan
- Untuk pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan dari DAK, harus dilakukan koordinasi intensif dengan Bappeda selaku verifikator awal usulan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan pihak terkait lainnya; memastikan masuknya usulan di Rencana Kerja

Selain penyelesaian permasalahan khusus di atas, berikut ini adalah langkah atau solusi umum untuk memperbaiki kinerja pengelolaan belanja daerah:

- Memanfaatkan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja;
- Mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dari belanja yang bersifat reguler/rutin dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- Memanfaatkan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;
- Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non Pemerintah Provinsi;
- Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance Base) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023;

- Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
- Pemanfaatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023; dan
- Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, maka untuk mengatasi hal tersebut kebijakan pendanaan pembangunan juga diarahkan dengan pendekatan:

- a. *Fiscal Engineering* yaitu dengan adanya keterbatasan pendapatan pemerintah maka pembiayaan pembangunan diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. Sedangkan untuk sektor produktif, skema loan agreement diharapkan bisa menjadi bentuk keberpihakan Negara dalam memberikan rasa adil sekaligus menjadi stimulus bagi UKM untuk mengembangkan diri. Kemudian Skema Agro Maritim

Financing diarahkan untuk dapat menggeser nilai tambah yang semula berada di industri off farm di perkotaan bergeser ke petani di pedesaan.

- b. *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor private dalam rangka penyediaan layanan berupa barang dan jasa public melalui beberapa skema yaitu pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Dalam Perubahan RKPD dituliskan bahwa pada Tahun 2019, APBD Provinsi Jawa Timur diproyeksikan mengalami surplus. Surplus anggaran ini dibiayai dari SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait faktor – faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

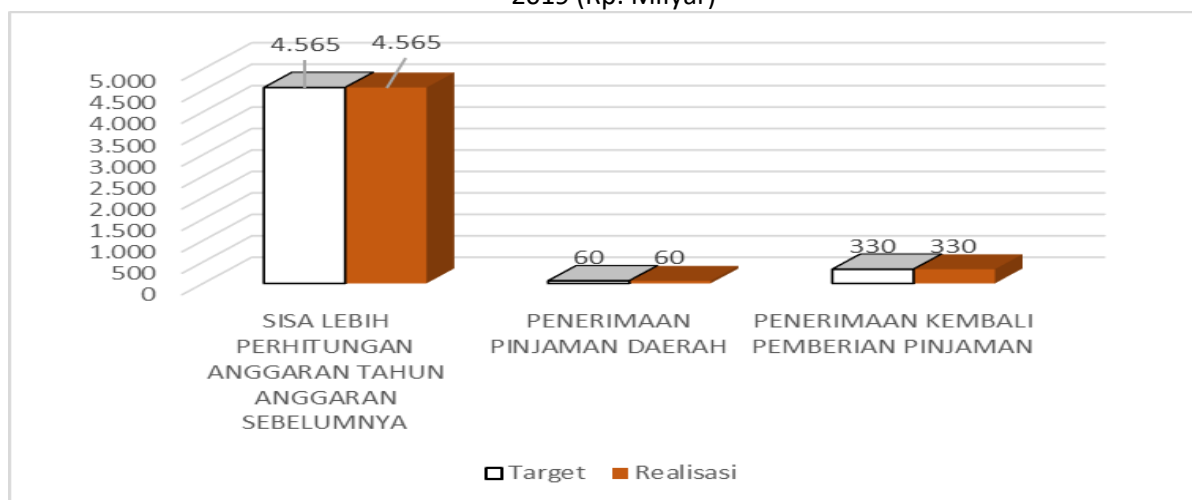
1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang in line mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UKM.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2019, APBD Provinsi Jawa Timur berstatus defisit yang berarti bahwa belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Besaran defisit ditargetkan sebesar Rp. 4.577.048.281.739,81 (Rp. 4,577 trilyun) dan realisasinya sebesar Rp. 551.853.589.527,29. (Rp. 551,853 milyar). Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah menggunakan Penerimaan Pembiayaan daerah. Secara total, target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 4.955.848.281.739,81 (Rp. 4,956 trilyun) dan terealisasi sebesar jumlah yang sama, sehingga tingkat ketercapaian/realisasi anggaran sebesar 100%.

Gambar 3.12 memperlihatkan bahwa sumber Penerimaan Pembiayaan terbesar (92% atau sebesar Rp. 4,565 trilyun) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Sumber Penerimaan Pembiayaan lainnya adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp 330 milyar (7%) dan sisanya (1% atau sebesar Rp. 60 milyar) berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah. Tidak ada penerimaan dari sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan lainnya selain tiga sumber di atas. Realisasi penerimaan pembiayaan ketiga sumber tersebut adalah 100% yang berarti bahwa realisasi sama dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.12. Target dan Realisasi Komponen Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)

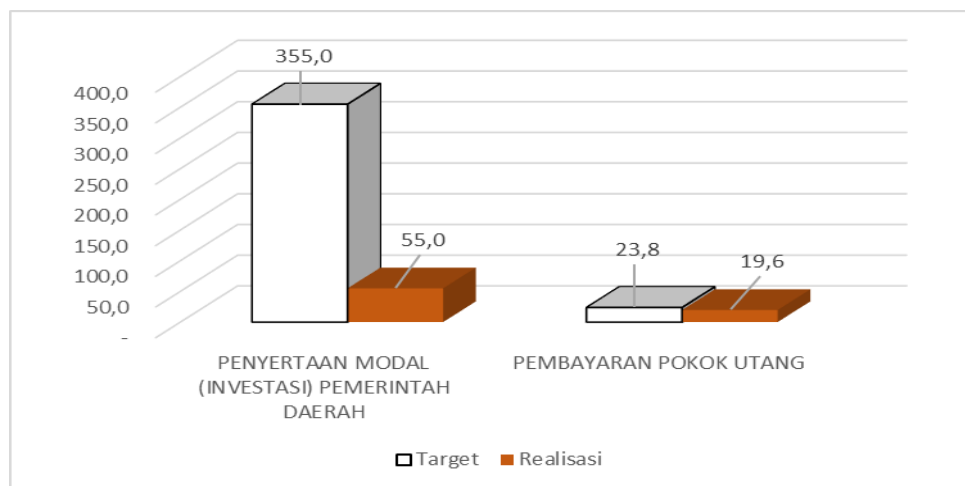


Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

Dengan jumlah realisasi penerimaan pembiayaan yang masih lebih besar dari realisasi defisit APBD, maka pemerintah Jawa Timur pada tahun 2019 dapat melakukan Pengeluaran Pembiayaan. Secara total, Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 378.800.000.000,00 (Rp. 378,800 milyar), namun terealisasi hanya sebesar Rp. 74.605.487.028,91 (Rp. 74,605 milyar) atau sekitar 19,7%.

Terdapat dua pengeluaran pembiayaan yang dilakukan pemerintah, yaitu Penyertaan Modal (investasi pemerintah daerah) dan Pembayaran Pokok Hutang. Namun, realisasi Penyertaan Modal serta Pembayaran Pokok Hutang di tahun 2019 tidak sebesar yang ditargetkan (*Gambar 3.12*). Tingkat realisasi Penyertaan Modal (investasi) hanya sebesar 15,5% atau sebesar Rp. 55 milyar dari Rp. 355 milyar yang ditargetkan. Pun demikian dengan pembayaran hutang dengan tingkat realiasi sebesar 82,4%.

Gambar 3.13. Target dan Realisasi Komponen Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Rp. Milyar)



Sumber: BPKAD Jatim (data unaudit 20 Maret 2020)

3. Permasalahan dan Solusi

Pembiayaan daerah, khususnya penerimaan pembiayaan merupakan sumber penting dana pembangunan saat Belanja Daerah melebihi Penerimaan atau Pendapatan Daerah (anggaran defisit). Untuk menutupinya, perlu penerimaan pembiayaan dari sumber selain PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Umumnya, penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA tahun sebelumnya, pinjaman atau pengembalian pinjaman dari pihak lain, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, pengembalian hasil penyertaan modal/investasi daerah, atau penerimaan pembiayaan daerah yang sah lainnya. Di sisi lain, ada pengeluaran pembiayaan yang mengurangi penerimaan pembiayaan, seperti untuk membayar pokok hutang, membentuk dana cadangan, menyertakan modal (investasi), memberikan pinjaman kepada pihak lain, atau pengeluaran pembiayaan daerah lainnya. Saat pembiayaan netto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) positif/surplus dan mampu menutupi defisit anggaran, maka secara umum pembiayaan daerah tidak bermasalah. Permasalahan akan muncul jika pembiayaan netto tidak

mampu menutupi defisit yang ada atau ada permasalahan dalam proses pemenuhan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan. Secara umum, pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 tidak bermasalah karena pembiayaan netto mampu menutupi defisit anggaran, bahkan ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 yang bisa digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2020.



BAB IV

PENYELENGGARAAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di segala bidang bersama masyarakat, tak terkecuali bidang ekonomi yang semakin membaik seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hasil yang telah dicapai dari pembangunan tersebut, secara ekonomi makro bisa dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp. 1.855,75 triliun, kemudian meningkat pada tahun berikutnya yaitu masing-masing Rp. 2.012,92 triliun (tahun 2017) dan 2.189,78 triliun (tahun 2018). Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi Rp. 2.352,42 triliun.

Tabel 4.1
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur dan Nasional

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.855,04	2.012,92	2.189,78	2.352,42
PDRB ADHK 2010 – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.405,56	1.482,30	1.563,76	1.650,14
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (%)	5,57	5,46	5,50	5,52
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Pusat dan Provinsi Jawa Timur

PDRB ADHK dihitung dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga, sehingga kenaikan PDRB ADHK mencerminkan kenaikan riil produksi barang dan jasa jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tahun yang dipakai sebagai tahun dasar pada saat ini adalah tahun 2010, artinya semua harga barang dan jasa menggunakan harga tahun 2010. Pada tahun 2016, PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur mencapai sebesar Rp. 1.405,56 triliun, selanjutnya meningkat menjadi Rp. 1.482,30

triliun pada tahun 2017 dan sebesar 1.563,76 triliun pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menjadi Rp. 1.650,14 triliun.

Peningkatan PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan tahun sebelumnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Angka pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2016 perekonomian Provinsi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,57 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 5,46 persen dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 5,50 persen.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2019 tumbuh 5,52 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,97 persen, diikuti PMTB 4,92 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,81 persen.

2. Indeks Theil

Salah satu isu penting dalam pembangunan adalah kondisi ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan per kapita sering kali tidak diikuti oleh keberhasilan dari sisi pendapatan. Seringkali terjadi pendapatan per kapita yang tinggi di suatu wilayah, namun ternyata pendapatan yang tinggi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, dalam artian masih banyak masyarakat yang memperoleh pendapatan per kapita yang rendah. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan dalam wilayah tersebut.

Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Berdasarkan hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, Indeks Theil pada kondisi awal tahun 2018 sebesar 0,4753 sedangkan untuk tahun 2019 masih menunggu hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur.

Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah, diantaranya : Pertama, Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat; Kedua, konsolidasi antar daerah atau kabupaten dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang komprehensif agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir; dan membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.

3. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi hampir di banyak negara. Kemiskinan menjadi topik bahasan yang menarik baik di media massa, dunia akademis, maupun pemerintahan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, karena terkait erat berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (BPS, 2014).

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanggulangan kemiskinan telah dimulai sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Setiap periode pemerintahan yang memegang kekuasaan memiliki program penanggulangan kemiskinan yang berbeda.

Tabel 4.2
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,85	11,20	10,85	10,20
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	4.638,53	4.405,27	4.292,25	4.050,00

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kecenderungan menurun. Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan. Pada tahun 2016

angka kemiskinan sebesar 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin 4.638,53 ribu jiwa, kemudian terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 10,20 persen dengan jumlah penduduk miskin 4.050,00 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

4. Indeks Gini

Dalam konteks pembangunan kita mengenal pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu aspek yang ingin dicapai dalam pertumbuhan ekonomi berkualitas tersebut yaitu pemerataan pendapatan atau tidak adanya kesenjangan pendapatan pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah kerap sejalan dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Kesenjangan pendapatan yang tinggi rawan menjadi pemicu adanya permasalahan sosial, antara lain kemiskinan dan kriminalitas. Mengingat hal tersebut maka aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, dan merupakan tujuan utama dari pembangunan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka pengendalian kesenjangan pendapatan tersebut perlu dipantau indikator yang bisa mengukur tingkat kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Gini Rasio. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pengeluaran jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien Gini dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

tingkat ketimpangan rendah ($<0,3$), ketimpangan sedang ($0,3-0,5$) dan ketimpangan tinggi ($>0,5$).

Tabel 4.3
Indeks Gini Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Gini	0,402	0,415	0,371	0,364

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 0,402, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,415 dan terus menurun menjadi 0,371 (tahun 2018) dan 0,364 (tahun 2019). Bila mengacu pada nilai Indeks Gini, tingkat ketimpangan rata-rata pengeluaran per kapita di Jawa Timur 2016-2019 masuk dalam kategori tingkat ketimpangan sedang ($0,3-0,5$). Kondisi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki serta memperlihatkan hasil pembangunan manusia bila ditinjau menurut gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi cara menghitungnya adalah IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 4.4
Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender	90,72	90,76	90,77	90,91

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Capaian IPG di Jawa Timur kurun waktu 2016-2019 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2016 mencapai 90,72, kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi 90,76 (tahun 2017); 90,77 (tahun 2018); dan 90,91 (tahun 2019). Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai kebijakan, berupaya untuk meningkatnya UHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah negara masuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam

menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbagi menjadi empat kategori yaitu : Kategori “Sangat Tinggi” ($IPM \geq 80$); Kategori “Tinggi” ($70 \leq IPM < 80$); Kategori “Sedang” ($60 \leq IPM < 70$); dan Kategori “Rendah” ($IPM \leq 60$).

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Manusia	69,74	70,27	70,77	71,50

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Timur

Selama empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 69,74 (tahun 2016); 70,27 (tahun 2017); 70,77 (tahun 2018); dan tahun 2019 mencapai 71,50. Kenaikan IPM ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

Capaian IPM pada tahun 2017-2019, Jawa Timur masuk dalam “Kategori Tinggi”. Sedangkan Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya, di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur tidak ada yang berkategori “rendah”. Sebelumnya masih ada satu wilayah

yaitu Sampang, capaian IPM berkategori “rendah”. Pada tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo yang semula IPM-nya berkategori “tinggi” naik kelas menjadi “sangat tinggi”. Kabupaten Blitar, Ponorogo, Ngawi dan Kabupaten Malang juga naik kelas dari IPM berkategori “sedang” menjadi kategori “tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap perlu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan menjadi krusial dari berbagai sisi karena menyangkut banyak hal. Dari sisi makro ekonomi, ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang diukur pencapaiannya terkait pengangguran, kesempatan kerja, maupun upah. Dari sisi mikro, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dimana kemampuannya baik *hard skill* maupun *soft skill* akan berpengaruh terhadap output suatu produksi.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menjadi salah satu sumber data ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ketenagakerjaan sampai tingkat kabupaten/kota. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Tabel 4.6
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,21	4,00	3,99	3,92

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Timur

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 sebesar 4,21 persen, kemudian terus menurun menjadi

3,92 persen pada tahun 2019. Penurunan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 cukup banyak menyerap tenaga pengangguran.

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 4.7
Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Reformasi Birokrasi	69,54	71,11	72,81	73,83

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Timur pada kurun waktu empat tahun (2016-2019) selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 69,54, meningkat menjadi 71,11 (tahun 2017), kemudian kembali meningkat menjadi 72,81 (tahun 2018). Terakhir, tahun 2019 meningkat menjadi 73,83. Peningkatan ini mencerminkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

9. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial (dimensi kepedulian sosial) dan lingkungan alam (dimensi kepedulian lingkungan). Dimensi kepedulian sosial terbentuk

dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan *stakeholder* lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur, Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur sebesar 62,52. Sedangkan untuk capaian tahun 2019 masih menunggu hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Timur.

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Penetapan IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Jawa Timur tentang kondisi lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 4.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,81	66,29	66,36	65,09

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot sebesar 40%.

Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90

2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir berada pada Kategori Cukup, dengan capaian 66,81 (2016); 66,29 (2017); 66,36 (2018); dan tahun 2019 menurun menjadi 65,09. Dengan semakin meningkatnya capaian IKLH ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

11. Indeks Risiko Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya

- Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.
- Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Tabel 4.9
Indeks Risiko Bencana Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Risiko Bencana	169	166	152	138

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Klasifikasi Indek Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- Tinggi : >144
- Sedang : 13 – 144
- Rendah : < 13

Indeks Risiko Bencana merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dan capaiannya terus menurun, yaitu dari 169 pada tahun 2016 kemudian menjadi 138 pada tahun 2019. Indeks Risiko Bencana ini bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut.

B. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR :

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1. DINAS PENDIDIKAN

a. Tujuan

1. Meningkatnya akses pendidikan menengah yang berkualitas
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah	Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/SMK/MA	68.36 %	80.01 %	117.04
	Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	81,57 %	90,87 %	111.40
	Angka Partisipasi Sekolah usia 16 - 18 tahun	74,26 %	82.70 %	111,37
	Angka Putus Sekolah jenjang SMA/SMK/MA	0,46 %	0,31 %	132.61
	Angka Lulusan jenjang SMA/SMK/MA	98,78 %	98,54 %	99.57
	Rata- rata Lama Sekolah usia 25 tahun ke atas	7,58 tahun	7, 59 tahun	100.13
Meningkatnya jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1	Prosentase Guru Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK berkualifikasi min D4/S1	99,00 %	99,98 %	100,99
Meningkatnya tata kelola /manajemen pendidikan menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	100

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pendidikan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah, ditetapkan 6 indikator kinerja yaitu:

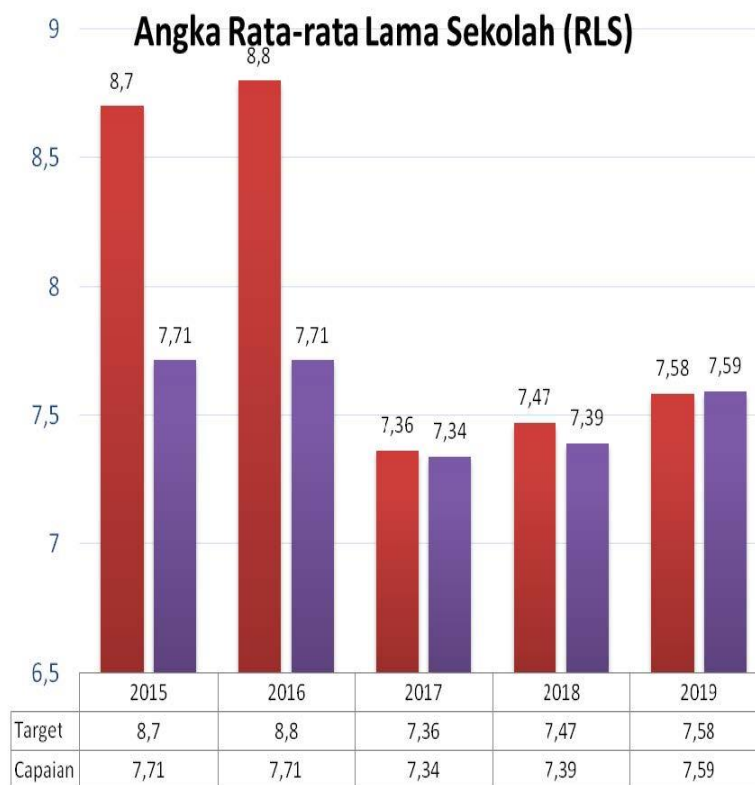
- Indikator Sasaran Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dengan target sebesar 68.36 % dan terealisasi sebesar 80.01 % atau 117.04 persen;
- Keberhasilan pembangunan pendidikan di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari indikator pembangunan sektor pendidikan, yaitu capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Sementara itu, pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- Program dan terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan menengah diantaranya melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Pada tahun 2019, Bantuan BOS SLTA (BKSM) dihapus dan diganti dengan prioritas Kepala Daerah terpilih periode tahun 2019 – 2024 sebagai implementasi dari Nawa Bhakti Satya – 3 yakni Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas, yang dikenal dengan nama program Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) atau Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
- Dengan program tersebut, diharapkan agar biaya pendidikan menjadi jauh lebih murah tetapi tetap berkualitas, namun demikian, tidak lantas menutup kesempatan bagi pihak lain atau orang tua siswa untuk tetap berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

- Indikator Sasaran Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2019 dengan target sebesar 81,57 % dan terealisasi sebesar 90,87 % atau 111.40 persen;
 - Dari tahun ke tahun, APK jenjang SMA/SMK/MA senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, APK jenjang SMA/SMK/MA menjadi 90,87%. Capaian ini lebih besar dari target tahun 2019 yaitu 81,57%.
 - Peningkatan APM dan APK jenjang SMA/MA/SMK terjadi karena didukung oleh semakin banyaknya orangtua siswa usia 16 s/d 18 tahun yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
- Indikator Sasaran Angka Partisipasi Sekolah usia 16 - 18 tahun pada tahun 2019 dengan target sebesar 74,26 % dan terealisasi sebesar 82.70 % atau 111,37 persen;
 - Angka Partisipasi Sekolah usia 16 - 18 tahun juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 sebesar 74,26% dan meningkat sebesar (8,44%) jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 82,70 %.
 - Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.
- Indikator Sasaran Angka Putus Sekolah jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dengan target 0,46 % dan terealisasi sebesar 0,31 % atau 132.61 persen;
 - Angka Putus Sekolah jenjang SMA/SMK tahun 2019 mencapai 0,31% lebih rendah daripada target sebesar 0,46%. Data ini diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada tahun ajaran 2018/2019. Data ini masih belum disandingkan dengan data EMIS Kemenag untuk siswa MA dan siswa SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan di pesantren.
 - Meskipun Pemerintah Provinsi telah membuat kebijakan mengenai pendidikan gratis berkualitas, namun masih banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik, ada yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Di Jawa Timur, Angka Putus Sekolah

jenjang SMA/SMK tahun 2019 mencapai 0,31%. Angka ini lebih rendah dari target sebesar 0,46%. Angka Putus Sekolah merupakan indikator dengan tingkat realisasi negatif, dimana semakin kecil capaiannya maka mengindikasikan keberhasilan. Data ini diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada tahun ajaran 2018/2019. Data ini masih belum disandingkan dengan data putus sekolah untuk siswa MA dan siswa SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan di pesantren (EMIS Kemenag).

- Putus sekolah terjadi karena dua bentuk kemungkinan yaitu mengundurkan diri dari sekolah sebelum menamatkan pelajaran dan gagal dalam menempuh ujian akhir. Dengan kata lain, putus sekolah jenjang SMA/SMK bisa terjadi saat siswa tidak bisa menamatkan pendidikan di tingkat tertinggi (kelas XII SMA/SMK) atau siswa mengundurkan diri sebelum mengikuti Ujian Nasional. Selain itu, angka putus sekolah juga berasal dari siswa kelas X dan Kelas XI yang tidak melanjutkan ke tingkat selanjutnya.
- Faktor budaya juga merupakan faktor penyebab putus sekolah tertinggi. Misalnya, budaya di beberapa daerah yang notabene lebih memilih pendidikan salaf di pesantren daripada pendidikan formal serta budaya menikahkan anak di usia dini. Di samping itu, meskipun mereka tahu ada berbagai program pemerintah yang bisa mendukung pendidikan, sebagian siswa tidak melanjutkan sekolah karena memutuskan untuk bekerja (membantu perekonomian keluarga), karena meskipun biaya SPP telah digratiskan (bagi SMA/SMK Negeri) dan SPP telah disubsidi (bagi SMA/SMK swasta) namun mereka masih mengalami keterbatasan dalam biaya untuk transportasi, uang jajan sehari-hari dan membeli buku tulis serta buku pelajaran. Beberapa siswa juga mengikuti mutasi orang tua ke daerah lain dan mutasi ke pondok pesantren.
- Dalam hal ini, upaya meningkatkan jumlah anak yang bersekolah sudah berhasil (dibuktikan dengan adanya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah) namun mempertahankan anak agar tetap bersekolah membutuhkan usaha yang lebih besar (Angka Putus Sekolah meningkat).
- Indikator Sasaran Angka Lulusan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2019 dengan target sebesar 98,78 % dan terealisasi sebesar 98,54 % atau 99.57 persen;

- Pada tahun 2019, indikator tersebut mencapai 98,54%, belum mencapai target sebesar 98,78%.
- Berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, pada Bab VI Pasal 19 Peserta didik dinyatakan Lulus dari Satuan / Program Pendidikan setelah:
 - Menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran
 - Memperoleh nilai sikap / perilaku minimal Baik; dan
 - Lulus ujian satuan / program pendidikan
- Sebagaimana diketahui bahwa seiring dihapusnya UN sebagai penentu kelulusan, kini kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya siswa diserahkan kepada sekolah masing-masing, sesuai ketentuan Permendikbud diatas.
- Jadi, menurunnya angka kelulusan pada tahun 2019 tidak lepas dari 3 faktor diatas, yaitu:
 - Adanya siswa / peserta didik yang belum menyelesaikan seluruh Program Pembelajaran
 - Rendahnya Nilai sikap / perilaku dari siswa / peserta didik sehingga pihak sekolah memutuskan untuk tidak meluluskan siswa tersebut
 - Masih banyaknya siswa yang tidak lulus atau tidak mencapai nilai minimal yang ditetapkan pada Ujian Sekolah
- Indikator Sasaran Rata- rata Lama Sekolah usia 25 tahun ke atas pada tahun 2019 dengan target sebesar 7,58 tahun dan terealisasi sebesar 7,59 tahun atau 100.13 persen;



- Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
- Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 = 7,59 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jawa Timur pada usia 15 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Terdapat perbedaan penghitungan target RLS antara tahun 2014 “ 2019. Pada tahun 2014 “ 2016, perhitungan yang dipakai adalah RLS usia 15 tahun ke atas. Sementara tahun 2017 “ 2019, perhitungan yang dipakai adalah RLS usia 25 tahun ke atas (metode baru).
- **Sasaran 2 :** Meningkatkan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:
 - Indikator Sasaran Prosentase Guru Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK berkualifikasi min D4/S1 pada tahun 2019 dengan target

sebesar 99,00 % dan terealisasi sebesar 99,98 % atau 100,99 persen;

- Sesuai Undang - Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005, setiap pendidik harus sudah memiliki ijazah minimal S1/D4. Adapun sasaran strategis ke-2 didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri dan swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang berakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil pembelajaran dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan serta memilih Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Sasaran dari program ini adalah tenaga pendidik (guru/kepala sekolah) dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di seluruh Jawa Timur.
- Program ini didukung oleh berbagai kegiatan seperti:
 - Peningkatan Kesejahteraan GTT dan PTT (GTT SMAN, SMKN dan PK-PLKN NEGERI mendapat SK Bantuan Kesejahteraan dari Gubernur Jawa Timur (mendapat honor dari APBD @Rp 750.000,- /perbulan dengan syarat dan ketentuan berlaku)
 - Honorarium Kinerja Guru Non PNS Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mendapat honor dari APBD @Rp 1.000.000,- /perbulan dengan syarat dan ketentuan berlaku)
 - Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi GTT dan PTT lembaga SMAN, SMKN dan PK-PLKN se Jawa Timur
 - Peningkatan Kualifikasi Guru ke S-2
 - Pendidikan Profesi Guru (PPG)

- Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
- Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru dan Tenaga Kependidikan
- Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan
- Sinkronisasi Perlindungan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Aplikasi A-GTK (untuk analisa kebutuhan guru), SIMPAK (untuk proses penilaian angka kredit guru), A-KINERJA, SINGLE WINDOW

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 24.341.761.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.526.803.660,00 atau 96,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 24.341.761.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.526.803.660,00 atau 96,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 22.272.733.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.486.055.361,00 atau 96,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 17.963.024.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.350.871.970,00 atau 96,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.309.709.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.135.183.391,00 atau 95,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.448.697.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.866.523.162,00 atau 92,26 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan :

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.342.514.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.620.313.603,00 atau 88,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.106.183.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.246.209.559,00 atau 93,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 200 Pegawai dan realisasi sebesar 200 pegawai. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 20 Pegawai dan realisasi sebesar 20 Pegawai. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 11.016.809.545,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.345.224.434,00 atau 84,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.124.674.642,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.452.728.870,00 atau 86,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 2.698.602.778,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.922.714.177,00 atau 71,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.534.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.252.135.288,00 atau 92,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 758.998.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 717.646.099,00 atau 94,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)** dengan anggaran sebesar Rp. 52.405.714.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.975.733.924,00 atau 93,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan dengan target 65 % dan realisasi 29.16 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.
1. Mutu Sarana dan Prasarana PK-PLK dengan anggaran sebesar Rp. 3.243.031.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.129.457.500,00 atau 96,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah lembaga Pendidikan Khusus yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dengan target sebesar 20 Lembaga dan realisasi sebesar 20 lembaga. (100 %)

2. Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 14.151.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.109.800.000,00 atau 85,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah siswa pendidikan khusus yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah dengan target sebesar 19.170 Siswa dan realisasi sebesar 19.170 siswa. (100 %)
3. Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik PK-PLK dengan anggaran sebesar Rp. 990.554.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 987.002.125,00 atau 99,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lembaga Pendidikan Khusus yang memenuhi standar akreditasi dengan target sebesar 110 Lembaga dan realisasi sebesar 110 Lembaga. (100 %)
4. Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 2.724.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.520.763.010,00 atau 92,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Guru PK/MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD dalam peningkatan mutu/pelayanan PK dan inklusif dengan target sebesar 1276 Orang dan realisasi sebesar 1276 orang. (100 %)
 - Jumlah guru MKKS yang mengikuti pelatihan/workshop/FGD/ (Focus Group Discussion) dalam peningkatan mutu/pelayanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil dan Terbelakang) dengan target sebesar 228 Orang dan realisasi sebesar 228 Orang. (100 %)
5. Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.623.591.150,00 atau 95,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa untuk menjadi olahragawan yang berprestasi tingkat regional, nasional, internasional dengan target sebesar 325 siswa dan realisasi sebesar 325 siswa. (100 %)
6. Sarana Prasarana PK-PLK (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 22.295.943.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.605.120.139,00 atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana dan prasarana dengan target sebesar 219 lembaga dan realisasi sebesar 219 lembaga. (100 %)

6) Program Pendidikan Menengah Atas dengan anggaran sebesar Rp. 986.501.325.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 840.860.308.772,00 atau 85,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM SMA dengan target 35 % dan realisasi 35 %.
(100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Mutu sarana dan prasarana SMA dengan anggaran sebesar Rp. 142.248.862.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.652.177.330,00 atau 57,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Guru yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana, prasarana dan media pembelajaran dengan target sebesar 1.280 Orang dan realisasi sebesar 1280 Orang. (100 %)

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA dengan anggaran sebesar Rp. 9.699.267.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.868.434.420,00 atau 91,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Guru untuk pemenuhan 8 standart nasional pendidikan SMA dengan target sebesar 16.885 Orang dan realisasi sebesar 16.885 Orang. (100 %)
- Prosentase sekolah pelaksana UNBK SMA dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- Jumlah sekolah yang menyelenggarakan K13 dengan target sebesar 580 lembaga dan realisasi sebesar 580 lembaga. (100 %)
- Jumlah siswa yang mendapatkan pembelajaran dan pelatihan yang bermutu dengan target sebesar 1264 siswa dan realisasi sebesar 1264 siswa. (100 %)

3. Manajemen Pendidikan SMA dengan anggaran sebesar Rp. 61.098.755.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.133.962.772,00 atau 90,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kepsek dan Guru pendidikan SMA yang ditingkatkan kualitas manajerialnya dengan target sebesar 3.888 Orang dan realisasi sebesar 3.888 orang. (100 %)

4. Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMA dengan anggaran sebesar Rp. 582.077.763.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 507.547.240.000,00 atau 87,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas dengan target sebesar 379.567 Siswa dan realisasi sebesar 379.567 siswa. (100 %)
5. Sarana Prasarana Pendidikan Menengah Atas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 191.376.678.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.658.494.250,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah lembaga sekolah pendidikan menengah umum yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dengan target sebesar 1000 lembaga dan realisasi sebesar 1000 lembaga. (100 %)
- 7) Program Pendidikan Menengah Kejuruan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.032.290.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 873.255.009.603,00 atau 83,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program APM SMK dengan target 34 % dan realisasi 35.38 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 46 kegiatan.
1. Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK dengan anggaran sebesar Rp. 18.793.916.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.052.906.117,00 atau 90,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diselaraskan kualitas pendidikan SMK dengan industri dengan target sebesar 8.290 orang dan realisasi sebesar 8.290 orang. (100 %)
2. Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK dengan anggaran sebesar Rp. 661.944.463.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 589.054.720.000,00 atau 88,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah dengan target sebesar 394.900 siswa dan realisasi sebesar 394.900 siswa. (100 %)
3. Mutu Sarana dan Prasarana SMK dengan anggaran sebesar Rp. 231.796.855.330,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.286.486.219,00 atau 61,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah lembaga yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang di SMK dengan target sebesar 435 lembaga dan realisasi sebesar 435 lembaga. (100 %)
4. Penyelenggaraan Kelembagaan dan Peserta Didik SMK dengan anggaran sebesar Rp. 21.520.810.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.742.784.898,00 atau 91,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa SMK bersertifikasi kompetensi yang terserap di dunia usaha dan dunia industri dengan target sebesar 20.702 siswa dan realisasi sebesar 20.702 siswa. (100 %)
 - jumlah lembaga SMK yang berstandart LSP dengan target sebesar 100 lembaga dan realisasi sebesar 100 lembaga. (100 %)
5. Manajemen Kelembagaan SMK Mini dengan anggaran sebesar Rp. 491.596.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 471.161.100,00 atau 95,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah tenaga terampil yang ada di SMK Mini dengan target sebesar 60.000 orang dan realisasi sebesar 60.000 orang. (100 %)
6. Penyelenggaraan DAK Pendidikan SMK dengan anggaran sebesar Rp. 109.485.279.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.646.951.269,00 atau 95,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana dengan target sebesar 615 lembaga dan realisasi sebesar 615 lembaga. (100 %)
7. Penyelenggaraan BLUD SMKN 6 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.675.683.929,78 dan terealisasi sebesar Rp. 1.667.057.468,00 atau 99,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 2407 siswa dan realisasi sebesar 2407 siswa. (100 %)
8. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 6 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 401.174.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 321.007.809,00 atau 80,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
9. Penyelenggaraan BLUD SMKN 2 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 4.168.099.402,21 dan terealisasi sebesar Rp. 2.184.643.869,00 atau 52,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 1893 siswa dan realisasi sebesar 1893 siswa. (100 %)
10. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 404.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 339.003.465,00 atau 83,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
11. Penyelenggaraan BLUD SMKN 4 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 3.323.214.902,80 dan terealisasi sebesar Rp. 2.175.498.356,00 atau 65,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 3133 siswa dan realisasi sebesar 3133 siswa. (100 %)
12. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 4 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 190.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 165.509.799,00 atau 86,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
13. Penyelenggaraan BLUD SMKN 11 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 2.318.057.126,99 dan terealisasi sebesar Rp. 1.954.136.379,00 atau 84,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 1634 siswa dan realisasi sebesar 1634 siswa. (100 %)
14. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 11 Malang dengan anggaran sebesar Rp. 315.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.478.189,00 atau 61,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
15. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.913.789.109,83 dan terealisasi sebesar Rp. 1.774.719.961,00 atau 92,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 2108 siswa dan realisasi sebesar 2108 siswa. (100 %)
16. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp. 356.278.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 234.469.113,00 atau 65,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

17. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Panji Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 2.299.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.990.916.500,00 atau 86,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 2141 siswa dan realisasi sebesar 2141 siswa. (100 %)

18. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Panji Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 70.429.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.084.750,00 atau 95,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

19. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 1.277.121.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.418.500,00 atau 37,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 228 siswa dan realisasi sebesar 228 siswa. (100 %)

20. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Kalipuro Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 97.432.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.080.046,00 atau 43,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

21. Penyelenggaraan BLUD SMKN 2 Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 700.824.097,61 dan terealisasi sebesar Rp. 660.646.200,00 atau 94,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 600 siswa dan realisasi sebesar 600 siswa. (100 %)

22. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 293.969.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 216.775.729,00 atau 73,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

23. Penyelenggaraan BLUD SMKN 5 Jember dengan anggaran sebesar Rp. 2.451.520.061,78 dan terealisasi sebesar Rp. 2.249.635.372,73 atau 91,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 2631 siswa dan realisasi sebesar 2631 siswa. (100 %)
24. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 5 Jember dengan anggaran sebesar Rp. 219.276.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 211.051.637,00 atau 96,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
25. Penyelenggaraan BLUD SMKN 3 Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 1.651.193.098,40 dan terealisasi sebesar Rp. 1.420.716.787,00 atau 86,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 1245 siswa dan realisasi sebesar 1245 siswa. (100 %)
26. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 231.758.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 211.547.919,00 atau 91,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
27. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.301.420,58 dan terealisasi sebesar Rp. 1.512.318.701,00 atau 79,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 1492 siswa dan realisasi sebesar 1492 siswa. (100 %)
28. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 136.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.289.677,00 atau 83,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
29. Penyelenggaraan BLUD SMKN 2 Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 1.413.755.560,47 dan terealisasi sebesar Rp. 633.493.700,00 atau 44,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 1344 siswa dan realisasi sebesar 1344 siswa. (100 %)
30. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 2 Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 323.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.629.546,00 atau 49,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
31. Penyelenggaraan BLUD SMKN 3 Boyolangu Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 2.088.181.497,12 dan terealisasi sebesar Rp. 2.047.541.600,00 atau 98,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 2097 siswa dan realisasi sebesar 2097 siswa. (100 %)
32. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 Boyolangu Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 474.619.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 331.309.535,00 atau 69,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
33. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Glagah Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 1.776.271.856,16 dan terealisasi sebesar Rp. 1.415.205.471,00 atau 79,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dengan target sebesar 679 siswa dan realisasi sebesar 679 siswa. (100 %)
34. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD SMKN 1 Glagah Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 648.344.328,00 dan terealisasi sebesar Rp. 178.650.500,00 atau 27,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
35. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Tegalampel Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 432.601.044,46 dan terealisasi sebesar Rp. 305.198.000,00 atau 70,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 2.631 siswa dan realisasi sebesar 2631 siswa. (100 %)
36. Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 1 Tegallampel Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 405.147.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 388.071.931,00 atau 95,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
37. Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Jenangan Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 1.676.691.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.695.145,00 atau 77,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 1.245 siswa dan realisasi sebesar 1245 siswa. (100 %)
38. Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 1 Jenangan Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 562.906.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 411.487.515,00 atau 73,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
39. Penyelenggaran BLUD SMKN 5 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.036.042.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.946.577.600,00 atau 73,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 1344 siswa dan realisasi sebesar 1344 siswa. (100 %)
40. Penyelenggaran Penatausahaan BLUD SMKN 5 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 444.388.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.853.519,00 atau 99,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
41. Penyelenggaran BLUD SMKN 1 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.545.447.663,45 dan terealisasi sebesar Rp. 3.956.700.000,00 atau 87,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 1.344 siswa dan realisasi sebesar 1344 siswa. (100 %)
42. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 539.277.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 396.587.060,00 atau 73,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
43. Penyelenggaraan BLUD SMKN 1 Buduran dengan anggaran sebesar Rp. 2.902.940.556,81 dan terealisasi sebesar Rp. 2.841.562.500,00 atau 97,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 2.097 siswa dan realisasi sebesar 2097 siswa. (100 %)
44. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 1 Buduran dengan anggaran sebesar Rp. 318.493.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.014.095,00 atau 95,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
45. Penyelenggaraan BLUD SMKN 3 Buduran dengan anggaran sebesar Rp. 2.178.954.553,83 dan terealisasi sebesar Rp. 1.900.000.000,00 atau 87,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah siswa yang SMK yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keahliannya dengan target sebesar 2.000 siswa dan realisasi sebesar 2000 siswa. (100 %)
46. Penyelenggaraan Penatausahaan BLUD di SMKN 3 Buduran dengan anggaran sebesar Rp. 338.822.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 328.203.668,00 atau 96,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
- 8) Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu TIK Pendidikan** dengan anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.275.182.087,00 atau 99,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase sekolah yang menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar dengan target 11 % dan realisasi 7.22 %. (60 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Metode Belajar Mengajar Menggunakan TIK dengan anggaran sebesar Rp. 642.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 637.808.500,00 atau 99,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah guru yang memanfaatkan TIK dalam pengembangan metode pembelajaran dengan target sebesar 2.000 orang dan realisasi sebesar 2000 orang. (100 %)
2. Penyebarluasan dan Pemanfaatan TIK Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.772.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.757.357.080,00 atau 99,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah guru yang akses penyebaran dan pemanfaatan TIK Pendidikan dengan target sebesar 1.500 guru dan realisasi sebesar 1500 guru. (100 %)
3. Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) dengan anggaran sebesar Rp. 885.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 880.016.507,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan UPT TIKP dengan target sebesar 5 Paket dan realisasi sebesar 5 Paket. (100 %)

9) Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kompetensi Guru dan Siswa SMK dengan anggaran sebesar Rp. 22.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.433.566.401,00 atau 89,62 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase guru dan siswa SMK yang lulus uji kompetensi keahlian dengan target 30 % dan realisasi 20 %. (99 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan di UPT PPK dengan anggaran sebesar Rp. 206.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 180.288.000,00 atau 87,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah materi pelatihan dan materi uji kompetensi di UPT PPK yang disusun dan dievaluasi dengan target sebesar 24 materi dan realisasi sebesar 24 materi. (100 %)
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan di UPT PPK untuk Guru dan Siswa SMK dengan anggaran sebesar Rp. 22.593.240.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 20.253.278.401,00 atau 89,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah guru/siswa SMK di Jawa Timur yang meningkat dan lulus uji kompetensinya dengan target sebesar 30.000 Orang dan realisasi sebesar 30000 orang. (100 %)

10) Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 713.684.398,00 atau 71,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase siswa yang berprestasi dengan target 21 % dan realisasi 20 %. (99 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Mutu Prestasi Non Akademik dengan anggaran sebesar Rp. 677.563.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 516.626.648,00 atau 76,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah siswa didik yang mengikuti lomba prestasi akademik dengan target sebesar 1100 orang dan realisasi sebesar 1100 orang. (100 %)

2. Penyelenggaraan Mutu Prestasi Akademik dengan anggaran sebesar Rp. 322.436.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 197.057.750,00 atau 61,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 177.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.773.900,00 atau 91,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Surabaya dengan target 98.21 % dan realisasi 98.57 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kota Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 122.765.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.977.900,00 atau 87,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kota Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 54.715.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.796.000,00 atau 98,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

12) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 16.599.348.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.289.522.318,00 atau 98,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Gresik dengan target 71.78 % dan realisasi 74.48 %. (99 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 16.549.068.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.239.776.933,00 atau 98,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah oebgelolaan saran dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 31.860.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.507.685,00 atau 98,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 18.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.237.700,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

13) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 87.911.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.671.645.978,00 atau 80,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sidoarjo dengan target 80.72 % dan realisasi 77.74 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 87.733.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.513.962.078,00 atau 80,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 122.765.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.507.900,00 atau 85,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan Pk-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 54.715.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.176.000,00 atau 95,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 14) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto** dengan anggaran sebesar Rp. 27.845.307.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.582.333.528,00 atau 95,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Mojokerto dengan target 72.24 % dan realisasi 90.51 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 27.758.687.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.499.153.878,00 atau 95,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 71.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.210.650,00 atau 96,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 15.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.969.000,00 atau 92,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

15) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 16.613.349.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.975.619.715,00 atau 90,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Jombang dengan target 80.83 % dan realisasi 105.52 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 16.563.349.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.926.016.715,00 atau 90,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.769.000,00 atau 99,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.834.000,00 atau 99,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

16) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Malang dengan anggaran sebesar Rp. 22.374.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.837.893.851,00 atau 88,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Malang dengan target 60.90 % dan realisasi 67.21 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang dengan anggaran sebesar Rp. 22.334.771.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.513.351,00 atau 88,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Malang dengan anggaran sebesar Rp. 31.590.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.150.500,00 atau 63,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Malang dengan anggaran sebesar Rp. 8.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.230.000,00 atau 99,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

17) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Batu dengan anggaran sebesar Rp. 53.067.284.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.029.925.363,00 atau 92,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Batu dengan target 90.82 % dan realisasi 107.90 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu dengan anggaran sebesar Rp. 53.062.284.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.024.925.363,00 atau 92,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
- 2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kota Malang/Kota Batu dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kota Malang dan Kota Batu dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

18) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro

dengan anggaran sebesar Rp. 68.571.469.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.178.330.500,00 atau 92,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bojonegoro dengan target 73.35 % dan realisasi 92.31 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 68.558.819.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.165.982.400,00 atau 92,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 12.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.110.100,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 238.000,00 atau 79,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

19) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 22.006.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.376.000,00 atau 78,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Tuban dengan target 59.50 % dan realisasi 69.26 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 15.606.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.676.000,00 atau 94,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 6.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,00 atau 42,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

20) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 15.797.743.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.535.920.495,00 atau 98,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Lamongan dengan target 75.22 % dan realisasi 83.79 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 15.764.269.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.502.697.195,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
- 2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 24.258.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.011.500,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 9.261.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.211.800,00 atau 99,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

21) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 41.665.671.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.825.835.459,00 atau 93,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Madiun dengan target 66.51 % dan realisasi 99.85 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 41.640.528.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.814.215.159,00 atau 93,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 18.892.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.650.300,00 atau 45,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 6.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.000,00 atau 47,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

22) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 15.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.392.900,00 atau 60,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Ngawi dengan target 64.38 % dan realisasi 81.19 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 9.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.442.900,00 atau 68,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 6.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.000,00 atau 47,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

23) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 26.382.016.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.933.482.331,00 atau 94,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Magetan dengan target 82.60 % dan realisasi 90.38 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 26.285.178.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.860.259.331,00 atau 94,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
- 2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 47.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.184.000,00 atau 53,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 49.467.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.039.000,00 atau 97,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

24) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 75.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.629.420,00 atau 98,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Ponorogo dengan target 75.05 % dan realisasi 93.83 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 49.690.000, dan terealisasi sebesar Rp. 48.689.420,00 atau 97,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 26.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.940.000,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

25) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 13.459.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.338.538.182,00 atau 99,10 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pacitan dengan target 60.91 % dan realisasi 81.21 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 13.386.194.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.265.705.182,00 atau 99,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.968.000,00 atau 99,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 20.865.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.865.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 26) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri** dengan anggaran sebesar Rp. 32.039.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.602.788.477,00 atau 98,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Kediri dengan target 73.39 % dan realisasi 87.30 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 31.993.324.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.556.658.477,00 atau 98,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 23.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.102.950,00 atau 99,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 23.051.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.027.050,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

27) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 20.234.338.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.188.525.841,00 atau 99,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Nganjuk dengan target 64.84 % dan realisasi 85.69 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 20.174.338.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.134.162.341,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.910.000,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.453.500,00 atau 81,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

28) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 23.804.532.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.871.309.221,00 atau 96,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Blitar dengan target 67.14 % dan realisasi 73.56 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 23.754.674.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.824.818.566,00 atau 96,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelola sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 39.892.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.692.505,00 atau 96,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 9.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.798.150,00 atau 78,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

29) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 40.531.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.622.050.199,00 atau 97,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Tulungagung dengan target 59.26 % dan realisasi 80.70 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 40.475.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.578.177.199,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 50.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.273.000,00 atau 79,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 5.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,00 atau 64,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

30) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 54.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.873.500,00 atau 41,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Trenggalek dengan target 59.83 % dan realisasi 78.68 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 31.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.873.500,00 atau 72,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 23.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

31) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 31.757.841.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.403.457.571,00 atau 95,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pasuruan dengan target 76.27 % dan realisasi 64.08 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 31.703.441.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.363.005.031,00 atau 95,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.780.000,00 atau 81,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.665.540,00 atau 62,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

32) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 23.669.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.747.956.313,00 atau 96,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Probolinggo dengan target 54.96 % dan realisasi 73.44 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 23.667.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.746.516.313,00 atau 96,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 990.000,00 atau 94,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 450.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

33) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.498.450,00 atau 99,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Lumajang dengan target 56.07 % dan realisasi 69,47 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 9.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.099.090,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 6.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.399.360,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

34) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember dengan anggaran sebesar Rp. 41.208.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.856.964.923,00 atau 99,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Jember dengan target 59.36 % dan realisasi 73.14 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 41.193.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.841.466.473,00 atau 99,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp. 9.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.099.090,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp. 6.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.399.360,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

35) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 26.426.291.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.858.409.986,00 atau 97,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bondowoso dengan target 50 % dan realisasi 50,25 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 26.411.497.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.843.616.486,00 atau 97,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 12.393.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.393.500,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
3. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

36) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 15.681.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.681.600,00 atau 100,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Situbondo dengan target 50.83 % dan realisasi 82.56 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 15.381.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.381.600,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelaksanaan kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 300.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

37) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi

dengan anggaran sebesar Rp. 23.741.384.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.434.510.802,00 atau 98,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Banyuwangi dengan target 71.54 % dan realisasi 91,30 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 23.704.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.397.890.802,00 atau 98,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 20.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.120.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.500.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

38) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan

dengan anggaran sebesar Rp. 14.002.972.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.490.653.920,00 atau 96,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Bangkalan dengan target 51.07 % dan realisasi 55.97 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 13.957.394.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.446.192.520,00 atau 96,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 41.677.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.561.400,00 atau 97,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 3.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

39) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 8.780.462.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.646.329.576,00 atau 98,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sampang dengan target 39.10 % dan realisasi 45.78 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 8.758.157.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.625.888.056,00 atau 98,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 18.848.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.991.520,00 atau 95,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 3.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.450.000,00 atau 70,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

40) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.723.634.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.402.218.658,00 atau 97,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Pamekasan dengan target 60.83 % dan realisasi 86.05 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.659.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.348.964.308,00 atau 97,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 53.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.254.350,00 atau 99,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 10.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

41) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 10.447.421.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.186.836.925,00 atau 97,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program APM Dikmen (Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah) Wilayah Sumenep dengan target 59.71 % dan realisasi 74.51 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 10.344.681.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.089.373.426,00 atau 97,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 75.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 73.460.499,00 atau 97,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 27.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.003.000,00 atau 86,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

42) Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 4.647.633.665,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.968.285.120,00 atau 85,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase bantuan yang disalurkan tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Manajemen BOS Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.016.632.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.691.150.665,00 atau 83,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta kegiatan koordinasi pengelolaan BOS Dikdas dengan target sebesar 225 orang dan realisasi sebesar 225 orang. (100 %)
- 2. Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.631.000.729,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.277.134.455,00 atau 86,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah penerima bantuan pendidikan dengan target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang. (100 %)

43) Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 14.963.942.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.589.390.995,00 atau 97,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi S1/D4 atau setara dengan target 99 % dan realisasi 97,42 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 5.678.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.658.487.153,00 atau 99,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraan dan motivasi pengabdianya dengan target sebesar 497 Orang dan realisasi sebesar 497 orang. (100 %)
2. Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 195.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah guru yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan KKT, S1, dan S2 sesuai dengan kompetensinya dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 60 orang. (100 %)
3. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.820.556.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.750.862.463,00 atau 97,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan SDM dan kinerjanya dengan target sebesar 570 Orang dan realisasi sebesar 570 orang. (100 %)
4. Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi dengan anggaran sebesar Rp. 756.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 720.573.709,00 atau 95,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terpilih berprestasi dan berdedikasi dengan target sebesar 1.561 Orang dan realisasi sebesar 1561 orang. (100 %)
5. Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 5.512.515.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.264.467.670,00 atau 95,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitas sesuai dengan prestasi yang dicapai dan standart kinerja dengan target sebesar 10570 Orang dan realisasi sebesar 10570 orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Melihat data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik(BPS) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , diketahui fenomena bahwa IPM Jawa Timur masih berada dibawah IPM rata-rata nasionalBila dibandingkan dengan Provinsi lain.Jawa Timur berada diurutan 15 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.Seperti diketahuilPM rata -rata nasional sebesar 70,81 dan IPM Jawa Timur sebesar 70,27 Ironisnya dilihat dari sumbangan masing-masingindeks, Kontribusi Indeks Pendidikan pada IPM Jawa Timur paling rendah ini fenomena merupakan sebagian permasalahan yang dihadapi oleh Dunia Pendidikan Jawa Timur.
- Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Belum terpenuhinya standar kualitas maupun kuantitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
- Masih tingginya disparitas (kesenjangan) kualitas pendidikan antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di di Indonesia “ sehingga mempengaruhi kualitas lulusan dari masing-masing daerah
- Belum meratanya kemampuan finansial untuk alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah sehingga berpengaruh nyata terhadap kualitas penyelenggaran pendidikan di masing-masing daerah
- Masih terdapatnya kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah, antara Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

- Masih belum optimalnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja sehingga masih terdapat lulusan yang belum dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja
- Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam bersama-sama membangun dan mengembangkan sektor pendidikan, sehingga aksesibilitas sebagian masyarakat di daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar masih cukup rendah
- Masih rendahnya Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
- Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan lambatnya regenerasi, akibat rekrutment yang lebih sedikit dibanding kebutuhan riil. Selain itu, terjadi penumpukan pendidik dan tenaga kependidikan di kota-kota besar
- Belum terpenuhinya Proporsi SMK terhadap SMA 70%:30%
- Masih rendahnya APK dan APM SMA/Sederajat;
- Belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1);
- Minimnya jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO; dan 14) Masih terdapatnya siswa yang memiliki kondisi latar belakang keluarga yang tidak kondusif sehingga belum mendapatkan pendidikan yang layak.
- Belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1)
- Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan
- Tingkat Kesejahteraan Guru belum memadai
- Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan.
- Masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu

Solusi :

- Dimensi pendidikan sebagai salah satu indikator pengukuran IPM, memiliki 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa rendahnya kontribusi pendidikan dalam capaian IPM Jawa Timur, bersumber dari kurang tersedianya kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan, yang secara kuantitatif tercermin dari rendahnya

tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berbagai jenjang pendidikan formal. Dalam konteks wewenang pengelolaan masalah rendahnya APM dan APK difokuskan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (PK-PLK). Sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan, APM dan APK menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan mendasar pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui bidang pendidikan.

- Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dapat mendorong kenaikan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah kab/kota berdasarkan kewenangan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan masyarakat (kesetaraan/kejar paket) melalui bantuan pembiayaan perluasan akses pendidikan kesetaraan.
- Sebagai implementasi dari Nawa Bhakti Satya “ 3 yakni Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas, yang dikenal dengan nama program Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, dan tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tunjangan PKL bagi siswa SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata).
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tetap menganggarkan penguatan BOSDA MADIN yakni bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah, serta memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu.
- Membantu lembaga pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam bentuk pemberian hibah sebagai upaya pemenuhan/ pencapaian standart kompetensi lulusan, standart penilaian, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart pengelolaan, standart sarana dan prasarana dan standart pembiayaan
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengadaan bahan praktik, bahan ajar dan alat bantu pembelajaran

- Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta tuntutan pasar kerja lokal dan global, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri
- Menindaklanjuti dan mensosialisasikan Pergub Jawa Timur No. 30 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur secara merata ke semua jenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan lembaga.
- Menambah jumlah pelatihan guru tentang penanganan ABK.
- Perlu koordinasi dalam menyusun RPJMD dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.
- Memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum berkualifikasi S1 untuk menempuh pendidikan sampai berkualifikasi S1 dan S2.
- Memberikan bantuan/ tunjangan/ insentif kepada guru-guru non PNS jenjang SMA dan SMK serta PK-LK sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
- Melaksanakan diklat kepada pendidik dan tenaga kependidikan mulai jenjang SMA dan SMK serta PK-LK sehingga kompetensi mereka menjadi meningkat.

e. Penghargaan Nasional

A. Penghargaan KOVABLIK



B. Anugerah Ki Hajar 2019



c. Gold Medal Awards



C. Penghargaan AICF



2. URUSAN KESEHATAN

2.1. DINAS KESEHATAN

a. Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya satus kesehatan Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu (AKI)	90,92	89,81	101,22
	Persentase Stunting	30	26,9	110,33
	Angka Kematian Bayi (AKB)	24,34	22,46	107,72
Meningkatnya Persentase Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	87	91,15	104,77
Menurunnya Angka Kesakitan	Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta	>91	93,4	102,64
	Persentase Penderita HIV yang Mendapatkan ARV	>90	90,8	100,89
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	>90	90	100

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Kesehatan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan satus kesehatan Ibu dan Bayi , ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90,92 /100.000 kelahiran hidup dan terealisasi sebesar 89,81 /100.000 kelahiran hidup atau 101,22 persen;

Pada Tahun 2019, diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 90,92/100.000 Kelahiran Hidup.

Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 89,81/100.000 Kelahiran Hidup; berhasil mencapai target. AKI nasional berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 adalah 305/100.000 KH. AKI Jawa Timur Tahun 2019 lebih bagus dibanding AKI nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengeliminasi kematian ibu dengan meningkatkan kesadaran

masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS), untuk melakukan perencanaan kehamilan dan menjalani asuhan kehamilan, persalinan dan nifas yang teratur dan berkualitas.

- Indikator Sasaran Persentase Stunting pada tahun 2019 dengan target sebesar 30 % dan terealisasi sebesar 26,9 % atau 110,33 persen; berhasil mencapai target.

Pada Tahun 2019, persentase stunting diharapkan pada angka 30%. Realisasi stunting Tahun 2019 pada angka 26,9%; sudah berhasil mencapai target. Prevalensi stunting nasional berada pada angka 27,67%. Selain hal tersebut, Persentase Stunting 2019 lebih baik dari Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Persentase Stunting Jawa Timur berada pada angka 32,81%; yang artinya kasus stunting di Jawa Timur Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,91%.

Permasalahan Stunting merupakan masalah gizi kronik yang disebabkan multi faktor, diantaranya faktor sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Pola asuh yang baik pada anak, juga berperan pada kasus stunting. Perlu upaya yang kuat, terus menerus dan komprehensif multi sektor untuk mengeliminir kasus stunting

- Indikator Sasaran Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 dengan target sebesar 24,34/1.000 Kelahiran Hidup dan terealisasi sebesar 22,46/1.000 Kelahiran Hidup atau 107,72 persen;

Pada Tahun 2019, target Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24,34/1.000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan AKB dari Direktorat Statistik Kependudukan BPS Pusat, Angka Kematian Bayi (AKB) Jawa Timur sebesar 22,46/1.000 Kelahiran Hidup; sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan di Tahun 2019. AKB di Jawa Timur juga sudah berhasil memenuhi target nasional Tahun 2019 sebesar 24,20/1.000 Kelahiran Hidup. Disamping itu, Angka Kematian Bayi Tahun 2019 lebih baik dari Tahun 2018; pada Tahun 2018 Angka Kematian Bayi 23,10/1.000 Kelahiran Hidup.

Sasaran 2 : Meningkatnya Persentase Akreditasi Rumah Sakit, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Persentase Rumah Sakit Terakreditasi pada Tahun 2019 dengan target sebesar 87% dan terealisasi sebesar 91,15% atau 104,77 persen; berhasil mencapai target;

Terbitnya Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, pada Bab II Pasal 3 diamanatkan bahwa Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.

Selain itu adanya dari aturan BPJS Kesehatan bahwa salah satu syarat wajib bagi fasilitas kesehatan untuk lulus *kredensialing* adalah memiliki sertifikat akreditasi.

Kredensialing sendiri bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien JKN-KIS, bermutu dan aman.

Sasaran 3 : Menurunnya Angka Kesakitan , ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta pada tahun 2019 dengan target sebesar >91 % dan terealisasi sebesar 93,4 % atau 102,64 persen;

Persentase RFT Rate Kusta pada Tahun 2019 dengan target >91%. Realisasi RFT Rate Kusta sebesar 93,4% atau mencapai 102,64 % dari targetnya.

Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk eliminasi Kusta di Jawa Timur

- Indikator Sasaran Persentase Penderita HIV yang Mendapatkan ARV pada tahun 2019 dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90,8% atau 100,89 persen;

Pada Tahun 2019, persentase penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang mendapatkan Antiretroviral (ARV) adalah > 90%; sedangkan Realisasinya adalah 90,8% atau mencapai 100,89% dibanding target yang ditetapkan.

ARV diharapkan dapat mengurangi jumlah virus dalam tubuh seseorang dengan HIV dan membangun sistem kekebalan tubuh cukup kuat untuk melawan penyakit.

- Indikator Sasaran Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC pada tahun 2019 dengan target sebesar >90 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 100 persen;

Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TB) pada Tahun 2019 dengan target > 90%. Realisasinya adalah 90% atau mencapai 100 % dibanding target yang ditetapkan.

Kepatuhan dan kedisiplinan pasien dalam menjalani pengobatan sampai tuntas sesuai pedoman, sangat menunjang Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.817.220.218,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.503.434.326,00 atau 93.49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.817.220.218,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.503.434.326,00 atau 93,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 4.853.395.731,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.423.844.935,92 atau 91,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.971.113.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.852.038.872,00 atau 93,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 5 paket/unit dan realisasi sebesar 5 paket/unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.882.282.231,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.571.806.063,92 atau 89,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 10 paket/unit dan realisasi sebesar 10 paket/unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.874.762.411,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.680.626.976,00 atau 93,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.146.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.056.174.751,00 atau 92,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.728.422.411,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.624.452.225,00 atau 93,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 16 Orang. (80 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.029.383.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 954.737.152,00 atau 92,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 659.156.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 608.696.590,00 atau 92,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
- 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 77.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.323.267,00 atau 81,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 149.364.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.964.000,00 atau 94,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 5 kali. (100 %)
- 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 143.363.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 141.753.295,00 atau 98,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 5) **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 8.127.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.000.614.649,00 atau 86,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase kab/kota yang mempunyai 60 % Posyandu PURI dengan target 84 % dan realisasi 89 %. (105,95 %)
 - Indikator Program Persentase kab/kota yang mempunyai 25% Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI dengan target 42 % dan realisasi 37 %. (88,10 %)
 - Indikator Program Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung dengan target 84 % dan realisasi 92,65 %. (110,30 %)
 - Indikator Program Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat dengan target 78 % dan realisasi 91,95 %. (117,88 %)

- Indikator Program Persentase kab/kota Yang menyelenggarakan program kesehatan kerja sesuai standar dengan target 40 % dan realisasi 53 %. (132,50 %)
- Indikator Program Persentase kab/kota Yang menyelenggarakan program kesehatan olah raga sesuai standar dengan target 40 % dan realisasi 50 %. (125,00 %)

Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan.

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan anggaran sebesar Rp. 2.246.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.772.126.800,00 atau 78,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi kesehatan (program Kesehatan Ibu dan Anak, Stunting, Imunisasi, TBC & Germas) dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) dengan anggaran sebesar Rp. 831.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 791.974.926,00 atau 95,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota yang mempunyai 25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI dengan target sebesar 16 kab/kota dan realisasi sebesar 15 . (93,75 %)
3. Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.836.000,00 atau 99,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sesuai standar dengan target sebesar 31 kab/kota dan realisasi sebesar 31 kab/kota. (100 %)
4. Penyehatan Sarana Air Minum dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.836.600,00 atau 99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan sarana air minum sesuai standar dengan target sebesar 75 % dan realisasi sebesar 75 %. (100 %)
5. Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.848.145,00 atau 99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU) sesuai standar dengan target sebesar 45 % dan realisasi sebesar 63 %. (140,00 %)
 - Persentase kab/kota melaksanakan Program Kota Sehat sesuai standar dengan target sebesar 95 % dan realisasi sebesar 95 %. (100 %)
6. Penyehatan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.927.850,00 atau 99,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sesuai standar dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 85 %. (100 %)
7. Pengamanan Limbah Cair dan Padat dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 84.875.648,00 atau 99,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan dengan target sebesar 40 RS dan realisasi sebesar 40 RS. (100 %)
8. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.774.293,00 atau 98,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan kerja dengan target sebesar 25 Kab/Kota dan realisasi sebesar 25 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah pembinaan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan di kab/kota dengan target sebesar 30 kab/kota dan realisasi sebesar 30 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah tenakes yang dilatih kesehatan kerja dengan target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang. (100 %)
9. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga dengan anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.975.000,00 atau 99,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan olah raga dengan target sebesar 20 kab/kota dan realisasi sebesar 20 kab/kota. (100 %)

- Jumlah pembinaan kesehatan olah raga terhadap tenaga kesehatan di kab/kota dengan target sebesar 20 kab/kota dan realisasi sebesar 20 kab/kota. (100 %)
- Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan olah raga dengan target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang. (100 %)

10. Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 4.349.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.739.439.387,00 atau 85,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pembinaan terpadu bantuan operasional kesehatan dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
- Jumlah kegiatan fasilitasi SDM, prasarana, dan teknologi yang dilakukan dengan target sebesar 8 kab/kota dan realisasi sebesar 8 kab/kota. (100 %)
- Jumlah kampanye, sosialisasi, dan advokasi perilaku hidup sehat yang dilakukan dengan target sebesar 10 kab/kota dan realisasi sebesar 10 kab/kota. (100 %)
- Jumlah kegiatan penguatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)

6) **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 12.262.592.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.966.907.972,00 atau 32,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Balita Gizi Kurang dengan target 10 % dan realisasi 8,5 %. (115 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 11.887.592.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.596.898.481,00 atau 30,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)

- Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi dengan target sebesar 12 mitra dan realisasi sebesar 12 mitra. (100 %)
2. Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan anggaran sebesar Rp. 34.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.830.000,00 atau 90,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 78.9 %. (98,63 %)
 - Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah pertemuan terkait pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (kadarzi) dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 4 kali. (100 %)
3. Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan gizi dengan anggaran sebesar Rp. 340.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 339.179.491,00 atau 99,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi dengan target sebesar 4 indikator dan realisasi sebesar 4 indikator. (100 %)
- 7) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp. 275.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 260.744.271,00 atau 94,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase pengelolaan admisnitasi keuangan sesuai SKP dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
 - Indikator Program Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
 - Indikator Program Persentase Dinkes dan UPT yang melaksanakan budaya kerja dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Penguatan kualitas program kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 95.277.231,00 dan terealisasi sebesar Rp. 87.199.040,00 atau 91,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan terselesaikan dengan target sebesar 77 kali dan realisasi sebesar 77 kali. (100 %)
 - Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan dengan target sebesar 10 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (100 %)
 - Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi/ kab/ kota/BLN dan lainnya dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan provinsi dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 5 kali. (100 %)
2. Pengembangan manajemen perencanaan dalam bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 76.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.755.680,00 atau 94,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah rapat koordinasi bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
 - Jumlah fasilitasi/monev/ konsultasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan dengan target sebesar 36 kali dan realisasi sebesar 36 kali. (100 %)
3. Kerjasama program, lintas sektor dan antar daerah dalam bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 53.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.931.350,00 atau 96,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi/ kab/ kota/BLN dan lainnya dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
4. Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT dengan anggaran sebesar Rp. 49.644.769,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.858.201,00 atau 98,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen hukum Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPT dengan target sebesar 13 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (92,31 %)
 - Jumlah Kelompok Budaya Kerja di dinkes dan UPT dengan target sebesar 13 kelompok dan realisasi sebesar 12 kelompok . (92,31 %)

- Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT sesuai aturan dan uraian jabatan dengan target sebesar 13 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (92,31 %)

8) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.139.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.709.366,00 atau 93,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase ketersediaan obat dan vaksin dengan target 100 % dan realisasi 95 %. (95 %)
- Indikator Program Persentase sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan target 90 % dan realisasi 93 %. (103,33 %)
- Indikator Program Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang memenuhi syarat dengan target 85 % dan realisasi 81 %. (95,29 %)
- Indikator Program Persentase produk makanan hasil sampling yang memenuhi syarat dengan target 80 % dan realisasi 70 %. (87,50 %)
- Indikator Program Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian dengan target 52 % dan realisasi 45 %. (86,54 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) dengan anggaran sebesar Rp. 58.192.392,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.192.392,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola Narkotika dan Psikotropika dengan target sebesar 3325 sarana dan realisasi sebesar 3325 sarana. (100 %)
2. Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika dengan anggaran sebesar Rp. 76.558.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.990.320,00 atau 92,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Upaya pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia dalam bentuk obat tradisional dan kosmetika dengan target sebesar 196 sarana dan realisasi sebesar 196 sarana. (100 %)

3. Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.338.000,00 atau 96,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
4. Upaya penyediaan dan pemerataan obat dan bahan medis habis pakai dengan anggaran sebesar Rp. 1.112.858.088,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.026.586.539,00 atau 92,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah paket obat buffer program yang diadakan dengan target sebesar 3 paket dan realisasi sebesar 3 paket. (100 %)
 - Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup sesuai kebutuhan dengan target sebesar 38 sarana dan realisasi sebesar 38 sarana. (100 %)
5. Pembinaan pelayanan kefarmasian dengan anggaran sebesar Rp. 74.330.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.188.750,00 atau 95,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan target sebesar 835 sarana dan realisasi sebesar 835 sarana. (100 %)
6. Pembinaan mutu penggunaan obat dengan anggaran sebesar Rp. 70.576.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.444.457,00 atau 94,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan penggunaan obat secara rasional untuk tiga penyakit indikator dengan target sebesar 1.041 sarana dan realisasi sebesar 1.041 sarana. (100 %)
7. Upaya Pembinaan mutu dan keamanan makanan dengan anggaran sebesar Rp. 36.484.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.090.700,00 atau 98,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi dengan target sebesar 5.436 IRTP dan realisasi sebesar 5.138 IRTP. (94,52 %)
8. Peningkatan kualitas produk alat kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 611.878.214,00 atau 92,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi alat kesehatan yang dibina untuk dapat memenuhi standar dengan target sebesar 65 sarana dan realisasi sebesar 92 . (141,54 %)

9) **Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.641.622.940,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.580.099.612,00 atau 96,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase institusi yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai standar dengan target 87 % dan realisasi 100 %. (114,94 %)
- Indikator Program Persentase pelatihan Bidang Kesehatan yang terakreditasi dengan target 95 % dan realisasi 105 %. (110,53 %)
- Indikator Program Persentase penerbitan Angka Kredit dengan target 96 % dan realisasi 113 %. (117,71 %)
- Indikator Program Persentase institusi yang mengajukan pemilihan tenaga kesehatan teladan dengan target 100 % dan realisasi 92 %. (92 %)
- Indikator Program Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya dengan target 88 % dan realisasi 59 %. (67,05 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan profesionalisme dan pengembangan karir tenaga kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 628.391.195,00 dan terealisasi sebesar Rp. 600.965.545,00 atau 95,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Penerbitan Angka Kredit (PAK) dengan target sebesar 1.800 PAK dan realisasi sebesar 864 PAK. (48 %)
 - Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih dengan target sebesar 27 nakes dan realisasi sebesar 24 naskes. (88,89 %)
2. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.649.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.649.345,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang disusun dengan target sebesar 50 dokumen dan realisasi sebesar 53 dokumen. (106,00 %)

- Jumlah Institusi yang dibina dalam penyusunan Data SDM dengan target sebesar 50 institusi dan realisasi sebesar 53 institusi. (106,00 %)
3. Penempatan, pengembangan dan pemenuhan tenaga kesehatan di tempat pelayanan (puskesmas, rumah sakit dan jaringannya) dengan anggaran sebesar Rp. 971.582.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 937.484.722,00 atau 96,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah RS Kelas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya dengan target sebesar 17 RS dan realisasi sebesar 17 RS. (100 %)
 - Jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi dengan target sebesar 4600 sertifikat dan realisasi sebesar 0 sertifikat. (0 %)
- 10) Program Pengendalian Penyakit** dengan anggaran sebesar Rp. 1.802.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.737.630.049,00 atau 96,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus dengan target 50 %(484 Puskesmas) dan realisasi 100 %(968 Puskesmas) . (200 %)
 - Indikator Program Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Hipertensi dengan target 50 % (484 Puskesmas) dan realisasi 100 % (968 Puskesmas). (200 %)
 - Indikator Program Persentase kab/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target 40 % (15 kab/kota) dan realisasi 100 % (38 kab/kota). (250 %)
 - Indikator Program Persentase kab/kota yang memiliki layanan NAPZA dengan target 15 % (6 kab/kota) dan realisasi 55,26 % (21 kab/kota). (368,4 %)
 - Indikator Program Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Penyakit Gigi dan Mulut dengan target 50 % (484 Puskesmas) dan realisasi 100 % (968 Puskesmas) . (200 %)
 - Indikator Program Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 48 jam dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)

- Indikator Program Persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan target 40 % dan realisasi 40 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI / Universal child imunization) dengan target 80 % dan realisasi 90 %. (112,5 %)
- Indikator Program Persentase Kab/Ko eliminasi malaria dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase penderita suspek pes yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase kab/ko dengan Incidence Rate DBD < 49/1000.000 penduduk dengan target 66 % dan realisasi 58 %. (112,12 %)
- Indikator Program Persentase kab /ko yang melakukan PE penyakit zoonotik dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase Kab/ ko yg 50 % puskesmasnya melaksanakan kegiatan tatalaksana ISPA sesuai standart dengan target 16 % dan realisasi 17 %. (106,25 %)
- Indikator Program Persentase kasus Filariasis yang ditemukan mendapat Penatalaksanaan Kasus secara standar dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase kab/ko mencapai cakupan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan > 75 % dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase puskesmas yg melaksanakan deteksi dini dan rujukan gangguan mata dengan target 30 % dan realisasi 30 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase kab/ko yang melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik 100% dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 93 % dan realisasi 99 %. (106,45 %)

Program tersebut didukung oleh 17 kegiatan.

1. Pengendalian Surveillance Epidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.429.107,00 atau 98,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dengan target sebesar 40 % dan realisasi sebesar 40 %. (100 %)
 - Persentase kab/kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap UCI (Universal Child Imunization) pada bayi dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 90 %. (112,5 %)
 - Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target sebesar 93 % dan realisasi sebesar 99 %. (106,45 %)
2. Pengendalian Penyakit Malaria dengan anggaran sebesar Rp. 55.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.055.366,00 atau 90,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2 malaria dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan dengan target sebesar 400 kasus dan realisasi sebesar 574 kasus. (143,5 %)
3. Pengendalian Penyakit PES dengan anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.646.215,00 atau 91,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent dengan target sebesar 15 dusun dan realisasi sebesar 15 dusun. (100 %)
 - Jumlah puskesmas yang melakukan survei humanis dengan target sebesar 5 puskesmas dan realisasi sebesar 7 puskesmas. (140 %)
 - Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Pes dengan target sebesar 1 kab/kota dan realisasi sebesar 1 kab/kota. (100 %)
4. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) dengan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.721.973,00 atau 95,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 DBD dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
5. Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.545.662,00 atau 91,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah jenis penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 20 kab/kota. (166,67 %)
6. Penyelenggaraan Imunisasi dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 277.072.000,00 atau 98,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah kegiatan Rapid Convenience Self Assessment (RCA) yang dilakukan dengan target sebesar 23 desa dan realisasi sebesar 23 desa. (100 %)
 - Jumlah kegiatan Data Quality Self Assessment (DQS) yang dilakukan dengan target sebesar 23 puskesmas dan realisasi sebesar 23 puskesmas. (100 %)
 - Jumlah kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin Managemen (EVM) yang dilakukan dengan target sebesar 23 Kab/Kota dan realisasi sebesar 23 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah kasus KIPI serius yang dilakukan Penyelidikan dengan target sebesar 83 % dan realisasi sebesar 83 %. (100 %)
 - Jumlah desa/ kelurahan yang mencapai UCI dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 86 %. (107,5 %)

7. Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.638.948,00 atau 99,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang difasilitasi dengan target sebesar 14 kasus dan realisasi sebesar 14 kasus. (100 %)
8. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.810.800,00 atau 92,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah puskesmas yang melakukan pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH dengan target sebesar 7 kab/kota dan realisasi sebesar 7 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah fasilitasi surveilan aktif KKM terintegrasi dengan target sebesar 7 kab/kota dan realisasi sebesar 7 kab/kota. (100 %)
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.467.916,00 atau 97,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP) dengan target sebesar 16 kab/kota dan realisasi sebesar 28 kab/kota. (175 %)
 - Jumlah kab ko yang dilakukan pembinaan teknis P2 ISPA dengan target sebesar 16 kab/kota dan realisasi sebesar 24 kab/kota. (150 %)
10. Pengendalian Vektor dengan anggaran sebesar Rp. 55.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.331.601,00 atau 96,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah asistensi pengendalian vektor yang dilakukan dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota. (100 %)
11. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan anggaran sebesar Rp. 271.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 252.274.462,00 atau 92,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular Terpadu (PANDU) dengan target sebesar 50 %(484 Puskesmas) dan realisasi sebesar 79,64 %(771 Puskesmas) . (159,28 %)

- Persentase desa / Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dengan target sebesar 50 % (4251 desa/kelurahan) dan realisasi sebesar 77,88 % (6196 desa/kelurahan). (155,76 %)
 - Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dengan target sebesar 50 % (484 Puskesmas) dan realisasi sebesar 90,08 % (872 Puskesmas). (180,16 %)
 - Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah dengan target sebesar 50 % (19 kab/kota) dan realisasi sebesar 65,78 % (25 kab/kota). (131,56 %)
 - Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan katarak dengan target sebesar 15 % (146 Puskesmas) dan realisasi sebesar 100 % (968 Puskesmas). (666,67 %)
12. Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dengan anggaran sebesar Rp. 263.158.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 254.342.162,00 atau 96,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan terkait program kesehatan jiwa dengan target sebesar 40 orang dan realisasi sebesar 40 orang. (100 %)
 - Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan penanganan pasien pasung di kab/kota dengan target sebesar 38 kali dan realisasi sebesar 38 kali. (100 %)
13. Pengendalian Masalah NAPZA dengan anggaran sebesar Rp. 52.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.225.550,00 atau 99,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan NAPZA dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
 - Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan masalah NAPZA dengan target sebesar 30 orang dan realisasi sebesar 30 orang. (100 %)
14. Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut dengan anggaran sebesar Rp. 38.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.683.258,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan gigi dan mulut dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)

15. Pengendalian Penyakit Hipertensi dengan anggaran sebesar Rp. 26.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.230.637,00 atau 99,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Kegiatan Pengendalian Penyakit Hipertensi dengan target sebesar 5 % (1.286.623 orang) dan realisasi sebesar 12,62 % (3.242.868 orang). (252,4 %)

16. Pengendalian Penyakit Diabetes dengan anggaran sebesar Rp. 58.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.017.058,00 atau 99,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan skrining diabetes mellitus dengan target sebesar 5 % (1.286.623 orang) dan realisasi sebesar 12,62 % (3.242.868 orang). (252,4 %)

17. Pengendalian penyakit kanker dengan anggaran sebesar Rp. 92.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.137.334,00 atau 98,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase perempuan usia 30-59 tahun yang dideteksi dini kanker leher Rahim dengan target sebesar 2 % (124.065 orang) dan realisasi sebesar 2,37 % (147.977 orang). (119,27%)

11) Program Pelayanan Kesehatan Primer dengan anggaran sebesar Rp. 2.668.276.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.578.209.553,00 atau 96,62 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase puskesmas memenuhi standar dengan target 70 % dan realisasi 99,48 %. (142,12 %)
- Indikator Program Persentase Ponkesdes sesuai standar dengan target 80 % dan realisasi 77,08 . (96,35 %)
- Indikator Program Persentase kab/kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan target 45 % dan realisasi 45 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 771.931.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 753.393.407,00 atau 97,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah puskesmas terakreditasi dengan target sebesar 672 puskesmas dan realisasi sebesar 116 puskesmas. (17,26 %)

- Jumlah kab/kota yang dibina dalam mendukung akreditasi puskesmas dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
2. Pembinaan kualitas pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dengan anggaran sebesar Rp. 228.068.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.013.950,00 atau 87,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 2.570 ponkesdes dan realisasi sebesar 1.921 ponkesdes. (74,75 %)
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di daerah terpencil dengan anggaran sebesar Rp. 1.170.276.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.133.929.809,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pembinaan ke Kabupaten yang mempunyai daerah terpencil dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 5 kali. (125 %)
4. Penguatan pelayanan kesehatan tradisional dengan anggaran sebesar Rp. 498.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 491.872.387,00 atau 98,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 . (100 %)
 - Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional dengan target sebesar 100 kelompok dan realisasi sebesar 250 kelompok. (250 %)
- 12) Program Pengembangan Kesehatan Tradisional** dengan anggaran sebesar Rp. 2.740.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.069.601.408,00 atau 75,53 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.
1. Pelayanan Kesehatan berbasis Keterampilan dengan anggaran sebesar Rp. 42.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.290.700,00 atau 70,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemanfaatan jamu yang berkualitas di pelayanan dengan target sebesar 5000 orang dan realisasi sebesar 5001 . (100 %)
- 2. Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar dengan anggaran sebesar Rp. 118.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.448.569,00 atau 66,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar dengan target sebesar 8.000 masyarakat dan realisasi sebesar 5.795 masyarakat. (72,44 %)
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan anggaran sebesar Rp. 1.666.314.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.344.251.970,00 atau 80,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 . (100 %)
- 4. Upaya Penguatan Mutu TOI dengan anggaran sebesar Rp. 422.061.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 284.046.979,00 atau 67,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah tanaman obat yang bermutu / berkualitas dengan target sebesar 10 jenis dan realisasi sebesar 24 . (240 %)
- 5. Penelitian obat tradisional yang berkualitas dengan anggaran sebesar Rp. 490.005.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 332.563.190,00 atau 67,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat obat dengan target sebesar 2 judul dan realisasi sebesar 4 . (200 %)

- 13) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.809.035.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.720.221.568,00 atau 95,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang berfungsi sesuai standar dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS dengan anggaran sebesar Rp. 474.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 471.408.000,00 atau 99,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan monev dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dengan target sebesar 50 RS dan realisasi sebesar 99 RS. (198 %)
2. Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Kegawatdaruratan dengan anggaran sebesar Rp. 1.003.571.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 919.532.749,00 atau 91,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah RS Rujukan Regional yang mendapatkan pembinaan dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan regionalisasi dengan target sebesar 8 RS dan realisasi sebesar 8 . (100 %)
 - Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sesuai standar dengan target sebesar 15 kab/kota dan realisasi sebesar 20 kab/kota. (133 %)
3. Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang dengan anggaran sebesar Rp. 118.587.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.388.280,00 atau 99,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 27 kali. (675 %)
4. Pembinaan Pelayanan dan penanggulangan masalah krisis kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 212.007.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 210.892.539,00 atau 99,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait penanggulangan bencana dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah kejadian bencana yang dilakukan Rapid Health Assessment (RHA dengan target sebesar 40 kejadian dan realisasi sebesar 24 kejadian. (60 %)
- 14) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan** dengan anggaran sebesar Rp. 460.831.665.012,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.363.979.935,00 atau 23,95 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan Kesehatannya dibiayai oleh Provinsi dengan target 262.524 Orang dan realisasi 8886 orang. (3,38 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 111.490.128.594,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.363.979.935,00 atau 98,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam mendukung jaminan kesehatan masyarakat dalam program JKN dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
2. Pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan anggaran sebesar Rp. 349.341.536.418,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase kepesertaan penduduk Jawa Timur dalam program jaminan kesehatan nasional dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar - . (- %)

15) Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dengan anggaran sebesar Rp. 292.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 286.778.471,00 atau 98,21 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kab/kota yang RFT rate nya mencapai target dengan target 75 % dan realisasi 89 %. (118,67 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dengan anggaran sebesar Rp. 292.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 286.778.471,00 atau 98,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta dengan target sebesar 26 kab/kota dan realisasi sebesar 31 kab/kota. (119,23 %)
 - Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang dilakukan pelacakan dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 74 %. (92,5 %)
 - Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak serumah dengan target sebesar 70 % dan realisasi sebesar 87 %. (124,29 %)

16) Program Pencegahan dan Pengendalian HIV dengan anggaran sebesar Rp. 295.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 291.288.724,00 atau 98,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan populasi kunci dan populasi khusus telah melakukan tes HIV dengan target 76 % dan realisasi 70 %. (92,11 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pengendalian HIV/AIDs dengan anggaran sebesar Rp. 295.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 291.288.724,00 atau 98,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan IMS dengan target sebesar 21 kab/kota dan realisasi sebesar 29 kab/kota. (138,10 %)

- 17) Program Pencegahan dan Pengendalian TB** dengan anggaran sebesar Rp. 317.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 301.689.779,00 atau 95,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase Kab/Kota yg mencapai target Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB > 85% dengan target 100 % dan realisasi 81 %. (81 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) dengan anggaran sebesar Rp. 317.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 301.689.779,00 atau 95,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2TB dengan target sebesar 11 kab/kota dan realisasi sebesar 18 kab/kota. (163,64 %)
- Jumlah layanan RS TB Resisten Obat dengan target sebesar 20 layanan dan realisasi sebesar 18 . (90 %)

- 18) Program Upaya Kesehatan Keluarga** dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 777.358.772,00 atau 97,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut dengan target 58 % dan realisasi 65,72 % (3.406.580 pelayanan). (113,31 %)
- Indikator Program Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap) dengan target 99 % dan realisasi 98,88 %(559.960 pelayanan),. (99,99 %)
- Indikator Program Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan target 68 % dan realisasi 70 %. (102,94 %)

- Indikator Program Cakupan Peserta KB Aktif dengan target 70 % dan realisasi 74,94 % (5.057.447 peserta). (107,06 %)
- Indikator Program Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes dengan target 98 % dan realisasi 97,04 % . (99,02 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 122.680.071,00 atau 98,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Pengembangan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut dengan target sebesar 10 kab/kota dan realisasi sebesar 10 kab/kota. (100 %)
2. Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.720.858,00 atau 96,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
 - Jumlah kabupaten/kota mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target sebesar 9 kab/kota dan realisasi sebesar 9 kab/kota. (100 %)
 - persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN lengkap Jumlah kabupaten/kota mendukung persalinan di fasilitas dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota. (100 %)
 - dengan target sebesar 99 % dan realisasi sebesar 98,30 %. (99,29 %)
 - Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4) dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 90,32 %. (100,36 %)
 - Persentase Kunjungan Nifas (KF) dengan target sebesar 98 % dan realisasi sebesar 95,46 %. (97,41 %)
3. Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 171.957.843,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Puskesmas terorientasi PKRT dengan target sebesar 8 puskesmas dan realisasi sebesar 8 puskesmas. (100 %)
- Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA dengan target sebesar 8 puskesmas dan realisasi sebesar 8 puskesmas. (100 %)
- Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan PPIA dengan

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kematian Ibu belum mencapai target yang ditetapkan dan kematian bayi yang masih tinggi
- Gizi Buruk dan Stunting yang masih terjadi di masyarakat
- Belum semua pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ter-akreditasi
- Jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur
- Meningkatnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Jaminan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan, belum terpenuhi seluruhnya
- Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang dan masih rendahnya akses sanitasi dasar

Solusi :

- Upaya komprehensif dalam menekan kematian ibu dan kematian bayi melalui upaya promotif; melakukan edukasi reproduksi remaja, antenatal care, persalinan dan pelayanan khususnya untuk kesehatan ibu dan bayi. Selain itu dengan meningkatkan perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan bayi.
- Melaksanakan intervensi terpadu khususnya pada lokus stunting, yang diharapkan akan mempercepat penurunan kejadian stunting dan gizi buruk. Upaya ini dengan melibatkan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan, pihak swasta, masyarakat, akademisi, organisasi profesi dengan berfokus pada 1) Intervensi gizi terpadu mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 2) Penurunan stunting melalui program dan kegiatan prioritas, 3) Optimalisasi potensi sumber daya dan sumber dana, 4) Memperluas advokasi, sosialisasi, kampanye stunting, konseling dan keterlibatan masyarakat, 5) Sinergisme

kegiatan stunting di berbagai level kaitannya dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antar pihak secara simultan.

- Meningkatkan komitmen dalam mewujudkan akreditasi pelayanan kesehatan (amanat Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi RS) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
- Sebaran tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan sebagaimana amanat Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tenaga Kesehatan
- Upaya preventif dan promotif terus digalakkan dan ditingkatkan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM) serta edukasi masyarakat untuk aktif dalam menwujudkan lingkungan yang sehat
- Diperlukan upaya komprehensif terkait ketersediaan obat dan BMHP, meliputi peningkatan kapasitas petugas dalam menyusun perencanaan kebutuhan obat dan BMHP, advokasi dalam penyediaan anggaran , koordinasi Lintas Program (unit pengadaan, pemegang program kesehatan) dan Lintas Sektor (penyedia, Kementerian Kesehatan) untuk menjamin pengadaan obat dan BMHP yang dibutuhkan.
- Peningkatan kapasitas petugas kefarmasian khususnya pada pelayanan farmasi klinis diharapkan mampu mewujudkan penggunaan obat dan BMHP secara efektif dan efisien, ditunjang kepatuhan petugas dalam menyampaikan laporan-laporan terkait obat dan BMHP yang dikelola

e. Penghargaan Nasional

- Pemenang Pertama Pengelola Data Informasi Terbaik Tingkat Nasional
- Pemenang Pertama Nasional Konsistensi Data Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
- Penghargaan Nasional sebagai Provinsi Terbaik dalam Inovasi P2PTM Tahun 2019 Dit P2PTM Kemenkes RI

2.2. RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO SURABAYA

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	77,95 %	91,71
	Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target	90 %	88,54 %	98,38
	Persentase kesesuaian terhadap standar Akreditasi RS	90 %	99,94 %	108,125
Meningkatnya mutu pendidikan/pelatihan di rumah sakit	Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu	80 %	86,50 %	120,76
	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSUD Dr.Soetomo	80 %	96,61 %	120,66
Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit	Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah	50 %	53,33 %	106,66
Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	Cost Recovery Ratio (CRR)	60 %	73,50 %	122,50

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 77,95 % atau 91,71 persen;
Berdasarkan hasil pengukuran IKM, diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/pasien terhadap layanan RSUD Dr. Soetomo termasuk dalam kategori **baik**

Indikator Sasaran Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 88,54 % atau 98,38 persen;

Indikator Sasaran Persentase kesesuaian terhadap standar Akreditasi RS pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 93,75 % atau 104,17 persen;

Tercapainya target indikator kesesuaian terhadap standar akreditasi rumah sakit RSUD Dr. Soetomo karena adanya dukungan pimpinan untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan melalui perbaikan alur dan standar prosedur operasional sesuai elemen akreditasi. dan melakukan self assesment terhadap penyesuaian standar sebelum dilakukan penilaian oleh surveyor akreditasi rumah sakit nasional maupun internasional sehingga dapat diketahui standar penilaian yang kurang.

Peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM selalu diupdate dengan cara melakukan resertifikasi terhadap pelatihan dasar yang harus dimiliki oleh semua SDM, misalnya basic life support, etika dan hukum serta K3RS dan PPRA.

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pendidikan/pelatihan di rumah sakit, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 86,50 % atau 108,125 persen;

Terdapatnya koordinasi yang baik antara RSUD Dr. Soetomo dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan memperhatikan rasio dokter klinis dibandingkan dengan peserta didik untuk selalu ideal yaitu 1:5 dan bimbingan yang intensif dan terencana antara dosen pembimbing dari mahasiswa menyebabkan indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas peserta didik, RSUD Dr. Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dalam membuat program sebelum, saat, dan sesudah pendidikan secara bersama-sama sesuai perkembangan ilmu/pelayanan medis yang berkembang terkini.

Indikator Sasaran Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 96,61 % atau 120,76 persen;

Penambahan ruang pendidikan pelatihan disertai tenaga pengajar yang berkompetensi dan berpengalaman yang dimiliki RSUD Dr. Soetomo sehingga RSUD Dr. Soetomo dapat mencapai target kewajiban mendidik dan melatih tenaga kesehatan dari instansi atau rumah sakit lain. Sebagai rumah sakit tipe A pendidikan RSUD Dr. Soetomo selalu menjadi rujukan rumah sakit lain dalam meningkatkan kompetensi SDMnya. Sampai saat ini, RSUD Dr. Soetomo hampir memenuhi semua permintaan pendidikan dan pelatihan tersebut disebabkan penambahan sarana prasarana kedokteran serta SDM pengajar. Untuk menangkap peluang ini, RSUD Dr. Soetomo sedang mengembangkan Soetomo Training Center. pengembangan ini dimaksudkan selain meningkatkan kompetensi tenaga administrasi dan kesehatan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan internal namun juga tenaga medis eksternal.

Sasaran 3 : Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah pada tahun 2019 dengan target sebesar 50 % dan terealisasi sebesar 53,33 % atau 106,66 persen;

Tercapainya target indikator ini dikarenakan di RSUD Dr. Soetomo terdapat penelitian unggulan melalui pendampingan dan pembiayaan di *Clinical Research Unit* (CRU) meningkatkan mutu penelitian sehingga hasil penelitian layak dimuat dalam jurnal, terutama terhadap penelitian-penelitian *clinical trial* atau eksperimental. Selain itu, SMF-SMF di RSUD Dr. Soetomo juga mendorong para anggotanya untuk rajin membuat karya tulis layak jurnal, terutama pada kasus-kasus sulit atau kompleks dan menjadi perhatian ilmuwan saat ini.

Sasaran 4 : Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Cost Recovery Ratio (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 74,87 % atau 124,78 persen;

Terpenuhinya target ini disebabkan oleh terdapatnya komitmen pimpinan untuk selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, terutama terhadap pos-pos yang kurang efisien, di antaranya pengurangan penggunaan kertas, pengelolaan penggunaan listrik dan air dengan memaksimalkan peran karyawan untuk tanggap terhadap pemakaian listrik dan air.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 2.271.666.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.670.718.740,00 atau 73,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 85 % dan realisasi 75,80 %. (89,18 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.271.666.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.670.718.740,00 atau 73,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 100 %. (117,65 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 8.492.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.907.407.792,00 atau 93,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 6.393.108.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.951.236.202,00 atau 93,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.099.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.956.171.590,00 atau 93,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 293.013.062,00 atau 91,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 75 % dan realisasi 100 %. (133,33 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.141.466,00 atau 94,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 150 Kali dan realisasi sebesar 150 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 179.871.596,00 atau 89,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- P embinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 20 Orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 685.398.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 647.371.043,00 atau 94,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 75 % dan realisasi 100 %. (133,33 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 474.522.451,00 atau 94,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 135.398.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.110.192,00 atau 91,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.738.400,00 atau 97,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.521.290.093,00 atau 90,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.521.290.093,00 atau 90,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Alat Kesehatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- 6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 155.186.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.431.375.265,00 atau 69,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUD dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 19.186.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.097.750.845,00 atau 94,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Alat Kesehatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 136.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 89.333.624.420,00 atau 65,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
- Jumlah alat yang terpelihara dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
- Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)

7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 1.115.985.226.174,65 dan terealisasi sebesar Rp. 1.084.158.458.596,00 atau 97,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % pencapaian indikator Pelayanan RS dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)
- Indikator Program % pegawai RS yg mengikuti pelatihan dengan target 65 % dan realisasi 84,03 %. (129,28 %)
- Indikator Program % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS dengan target 80 % dan realisasi 86,50 %. (108,12 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 1.115.985.226.174,65 dan terealisasi sebesar Rp. 1.084.158.458.596,00 atau 97,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Sering terlambatnya pembayaran utang BPJS Kesehatan memengaruhi operasional/pelaksanaan program kegiatan rumah sakit apalagi kurang lebih 3/4 pasien rumah sakit merupakan pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan.

Solusi :

Dalam rangka menjaga kesehatan keuangan rumah sakit akibat tersendatnya pembayaran utang BPJS Kesehatan akan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta efisiensi biaya, yaitu melalui:

- Integrated Practice Unit (IPU), yaitu mengintegrasikan pelayanan-pelayanan dengan penyakit/tindakan sejenis, misalnya penyakit jantung, kanker, dan laboratorium
- Financial engineering melalui peningkatan fungsi case mix, clinical guidelines, dan peningkatan kualitas rekam medis.
- Creative Financing, yaitu pembukaan layanan baru untuk peningkatan pendapatan misalnya: Poli Eksekutif, Pusat onkologi nasional, peningkatan utilisasi kamar operasi, medical check up non BPJS, Soetomo Wing & Transplant (STOC), pelayanan stem cell dan bank jaringan.
- Efisiensi biaya dengan menerapkan prinsip: (1) lean management (eliminated waste, & respect to people); (2) cheaper, simple, faster, accessible, creative, and innovative. Upaya nyata dari prinsip ini adalah menggantikan biaya-biaya Kerja Sama Operasional dengan pengadaan/pelayanan mandiri, yaitu meliputi pengadaan IT Mandiri dan Pengadaan alat-alat kedokteran atas pelayanan-pelayanan yang telah di-KSO-kan.

e. Penghargaan Nasional

1. Pemenang terbaik kategori *Human Resource Development Project* pada *Indonesian Hospital Management Awards PERSI AWARDS - IHMA 2019*
2. *Runner Up* kategori *Innovation in Hospital Management and Government Project* pada *Indonesian Hospital Management Awards PERSI AWARDS - IHMA 2019*
3. *Runner Up* kategori *Corporate Social Responsibility Project* pada *Indonesian Hospital Management Awards PERSI AWARDS - IHMA 2019*
4. *The Inspiring and Innovative Hospital* dari PERSI Jawa Timur

5. Rumah sakit dengan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS Kelas A dari BPJS Kesehatan
6. Iuran Tepat Waktu Tahun 2019 dari BPJS Ketenagakerjaan
7. Terbaik III kategori Inovasi Germas Sub Kategori Video Promosi Kesehatan dari IndoHCF Innovative Awards III – 2019

2.3. RUMAH SAKIT UMUM DR. SYAIFUL ANWAR MALANG

a. Tujuan

Mewujudkan Rumah Sakit bertaraf internasional yang profesional, transparan dan akuntabel

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar
Malang Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat	Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar	100 %	100 %	100
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.5	84.39	102.3
	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.	100 %	83.02 %	83.02
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit.	Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	Cost Recovery Ratio (CRR)	90 %	99.33 %	110.37
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja.	A	A	100

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Pencapaian sesuai target karena RSUD Dr. Saiful Anwar telah lulus Akreditasi SNARS Internasional, dimana nilai yang dibutuhkan untuk lulus Akreditasi SNARS Internasional sebesar

95. Nilai tersebut menunjukkan dari 16 BAB didalam akreditasi lulus dengan nilai diatas 95, sehingga elemen akreditasi RS yang memenuhi standar telah tercapai dari penilaian masing-masing BAB.

- Indikator Sasaran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 82.5 dan terealisasi sebesar 84.39 atau 102.3 persen;

Pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi target, menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal ini pasien dan keluarga pasien mayoritas puas terhadap pelayanan maupun sarana prasarana yang diberikan selama di RSUD Dr. Saiful Anwar. Penilaian IKM diperoleh dari kuisisioner yang dibagikan kepada pelanggan di masing-masing satuan kerja dilingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar.

- Indikator Sasaran Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target. pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 83.54 % atau 83.54 persen;

Belum tercapai Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) sesuai dengan target disebabkan karena ada 26 indikator dari 158 indikator yang belum tercapai sesuai target. Upaya yang dilakukan agar SPM tercapai sesuai target, dengan meningkatkan capaian indikator satuan kerja. Misal untuk mengurangi kematian pasien dengan meningkatkan jejaring rujukan, harapannya tidak ada lagi keterlambatan merujuk pasien, sehingga pasien masih dapat diselamatkan yang menyebabkan angka kematian rendah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Elemen akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar tercapai sesuai target hal ini disebabkan karena RSUD Dr. Saiful Anwar telah lulus untuk akreditasi RS Pendidikan, sehingga seluruh elemen

didalam akreditasi RS Pendidikan telah tercapai sesuai dengan standar.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Cost Recovery Ratio (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 99.33 % atau 110.37 persen;
- Cost Recovery Ratio (CRR) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup biayanya (Cost) dibandingkan dengan pendapatan (Revenue). Pendapatan RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2019 sebesar Rp 778.560.377.844,74 dan belanja operasional sebesar Rp 783.829.490.594,03. Target CRR sebesar 90%, terealisasi sebesar 99.33% sehingga capaian 110.37%. Hal ini artinya rumah sakit mampu untuk menutup biaya operasional sendiri atau dengan kata lain pengelolaan keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam kategori sudah baik, karena RSUD Dr. Saiful Anwar Malang merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.
- Indikator Sasaran Tingkat Akuntabilitas Kinerja. pada tahun 2019 dengan target sebesar A dan terealisasi sebesar A atau 100 persen;
- Tingkat akuntabilitas kinerja target A dan pada tahun 2019 RSUD Dr. Saiful Anwar mendapatkan predikat A untuk SAKIP sehingga persentase pencapaiannya 100%.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.191.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.162.902.915,00 atau 97,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.191.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.162.902.915,00 atau 97,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 979.290.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 968.552.522,00 atau 98,90 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 979.290.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 968.552.522,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.757.713,00 atau 98,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.757.713,00 atau 98,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 97 Kali dan realisasi sebesar 95 Kali. (98 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 341.297.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 274.010.590,00 atau 80,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 261.649.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.511.665,00 atau 79,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 53.925.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.432.125,00 atau 97,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 5.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.350.000,00 atau 86,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat Daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 20.703.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.716.800,00 atau 46,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 181.086.501.903,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.544.296.700,00 atau 98,04 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan, dan operasional dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 181.086.501.903,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.544.296.700,00 atau 98,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 36 jenis dan realisasi sebesar 36 jenis. (100 %)

- 6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 28.361.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.052.836.641,00 atau 84,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana termasuk alat kedokteran RS dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 18.361.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.401.687.200,00 atau 89,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang tersedia dengan target sebesar 24 jenis dan realisasi sebesar 24 jenis. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.651.149.441,00 atau 76,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 56 jenis dan realisasi sebesar 55 jenis. (98 %)

- 7) **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 668.737.680.391,68 dan terealisasi sebesar Rp. 661.367.064.185,03 atau 98,90 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase Pegawai RS yang telah mengikuti pelatihan dengan target 95 % dan realisasi 41.82 %. (44.02 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 668.737.680.391,00 dan terealisasi sebesar Rp. 661.367.064.185,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pemenuhan biaya operasional RS dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Penyerapan anggaran program penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan belum tercapai sesuai target disebabkan karena adanya efisiensi biaya akan tetapi secara kinerja terserap secara maksimal (100%).
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penyerapan anggaran tergantung *update e-catalog* oleh LKPP, dimana perubahan *e-catalog* yang sewaktu-waktu menyebabkan beberapa item barang yang telah direncanakan batal tersedia karena item tersebut tidak muncul pada perubahan *e-catalog*. Proses penyesuaian dengan *update e-catalog* menyebabkan ada beberapa perencanaan yang tidak bisa terealisasi (terutama pengadaan barang)

Solusi :

- Melaksanakan monitoring evaluasi dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil akhir program dan kegiatan, dengan mengoptimalkan penggunaan sistem *e-planning*.
- Melaksanakan rapat penyerapan anggaran secara rutin
- Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat terkait pengadaan barang dan jasa (yang tidak tersedia di *e-catalog*)

e. Penghargaan Nasional

-

2.4. RUMAH SAKIT UMUM DR. SOEDONO MADIUN

a. Tujuan

Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan rujukan bagi seluruh masyarakat

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis	Prosentase Elemen Akreditasi yang memenuhi standar	90 %	90 %	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 %	87,05 %	111,60
	Cost Recovery Rate	89 %	89 %	100
	Prosentase Indikator Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	78 %	81,01 %	103,86
Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan	Prosentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar	80 %	93 %	116,25

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase Elemen Akreditasi yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 100 persen;

Pada indikator prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standar tercapai 100% karena pada tahun 2019 di RSUD dr. Soedono Madiun telah dinyatakan lulus paripurna

Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 78 % dan terealisasi sebesar 87,05 % atau 111,60 persen;

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan jawaban masyarakat/ pengunjung rumah sakit yang dijadikan responden menyatakan puas.

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 78 % dan terealisasi sebesar 87,05 % atau 111,60 persen;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan jawaban masyarakat/ pengunjung rumah sakit yang dijadikan responden menyatakan puas.
- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate pada tahun 2019 dengan target sebesar 89 % dan terealisasi sebesar 89 % atau 100 persen;
- Target CRR tercapai 86,95% karena beberapa faktor yang mempengaruhi. CRR merupakan pendapatan dibagi dengan biaya operasional rumah sakit dalam satu tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian CRR tersebut adalah:
 - Pelunasan Piutang BPJS yang dilakukan pada akhir tahun.
 - Beban Belanja Operasional bertambah dengan adanya Tunjangan Kinerja.
 - Target CRR telah ditetapkan saat penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2017 sehingga Target tidak bisa dirubah ditengah-tengah pelaksanaan Renstra.
 - Sesuai Kep Menkes Nomor 1164/Menkes/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum bahwa Prosentase Capaian CRR > 70% masuk dalam katagori capaian sangat baik
- Indikator Sasaran Prosentase Indikator Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 78 % dan terealisasi sebesar 81,01 % atau 103,86 persen;
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD dr. Soedono Madiun sudah melampaui. Hal ini karena setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi dan dari evaluasi dilakukan pembenahan dan perbaikan dari indikator SPM yang belum memenuhi standar.

Sasaran 2 : Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 93 % atau 116,25 persen;

Target Prosentase elemen akreditasi RS Pendidikan di RSUD dr. Soedono Madiun telah tercapai. Akreditasi RS Pendidikan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. RSUD dr. Soedono Madiun ditetapkan sebagai RS Pendidikan Utama dengan Fak. Kedokteran UII Yogyakarta. dan selalu melaksanakan perbaikan untuk pemenuhan elemen akreditasi RS Pendidikan

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.598.326.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.365.653.228,00 atau 93,53 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 87,05 %. (87,05 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.598.326.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.365.653.228,00 atau 93,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 84,72 %. (84,72 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 5.033.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.552.611.651,00 atau 90,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.520.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.154.389.178,00 atau 91,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 6 Paket/Unit dan realisasi sebesar 6 paket/ unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 513.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.222.473,00 atau 77,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 150 Paket/Unit dan realisasi sebesar 150 paket/ unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 268.328.425,00 atau 89,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 132.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.713.120,00 atau 94,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 120 kali dan realisasi sebesar 120 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 168.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 143.615.305,00 atau 85,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 90 orang dan realisasi sebesar 937 Orang. (1041 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 106.185.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.974.799,00 atau 79,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.603.219,00 atau 77,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
- 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 14.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.584.580,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
- 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 4.130.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.451.900,00 atau 83,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan evaluasi berkala update data base OPD dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)
- 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.335.100,00 atau 58,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 21.892.174.902,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.258.089.860,00 atau 97,10 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

 1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.892.174.902,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.258.089.860,00 atau 97,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- 6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 17.254.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.493.266.408,00 atau 95,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana prasarana sesuai standart dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 254.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 248.971.200,00 atau 98,02%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang tersedia dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

3. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.244.295.268,00 atau 95,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 6 paket dan realisasi sebesar 6 unit. (100 %)

- 7) **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 289.989.544.496,58 dan terealisasi sebesar Rp. 263.189.340.919,00 atau 90,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal dengan target 97 % dan realisasi 81,56 %. (84,08 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 289.989.544.496,58 dan terealisasi sebesar Rp. 263.189.340.919,00 atau 90,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pemenuhan biaya operasional rumah sakit dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 75 %. (93,75 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Pencapaian Indikator Sasaran yang belum tercapaian adalah CRR dengan target 89% tercapai 77,39% (80,95%).

Alasan tidak tercapainya CRR karena:

- Pelunasan Piutang BPJS yang dilakukan pada akhir tahun
- Beban Belanja Operasional bertambah dengan adanya Tunjangan Kinerja

- Target CRR telah ditetapkan saat penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2017 sehingga Target tidak bisa dirubah ditengah-tengah pelaksanaan Renstra

Solusi :

- Evaluasi kembali penetapan Target CRR.
- Sesuai Kep Menkes Nomor 1164/Menkes/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum bahwa Prosentase Capaian CRR > 70% termasuk katagori sangat baik

e. Penghargaan Nasional

-

2.5. RUMAH SAKIT HAJI SURABAYA

a. Tujuan

Mewujudkan rumah sakit bertaraf internasional yang profesional, akuntabel dan transparan.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Haji Surabaya Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu pelayanan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82.8	81.05	97.89
	Indeks kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	82.6	90.23	109,23
	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai Target	93 %	94,42%	102
	Persentase penilaian standart SNARS yang memenuhi standar	100 %	100 %	100
	Persentase nilai Indikator Sasaran Keselamatan Pasien.	70 %	83.33 %	119.04
	Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar	100 %	50 %	50
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Persentase Elemen akreditasi Pendidikan yang memenuhi standar	100 %	100 %	100
	Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi	85 %	86.65 %	101.94
	Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran RS kelas B Pendidikan	83 %	94.50 %	113.85
Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit	Cost Recovery Rate	100 %	63.64 %	63.64

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Haji Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan mutu pelayanan, ditetapkan 6 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2019 dengan target sebesar 82.8 indeks dan terealisasi sebesar 81.05 indeks atau 97.88 persen;
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tinggi meskipun tidak mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa pelanggan mengeluh tentang adanya perubahan regulasi BPJS, baik dari sisi rujukan maupun pembatasan pelayanan pasien.

- Indikator Sasaran Indeks kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji pada tahun 2019 dengan target sebesar 82.6 indeks dan terealisasi sebesar 90.23 indeks atau 107.9 persen;
Indeks kepuasan pelayanan kesehatan jamaah haji mencapai 90,23 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82,6. hal ini menunjukkan kepuasan pelanggan akan layanan kesehatan jamaah haji yang ada di rumah sakit baik dari sisi sarana dan prasarana,SDM dan biaya/tarif.
- Indikator Sasaran Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai Target pada tahun 2019 dengan target sebesar 93 % dan terealisasi sebesar 68.87 % atau 74.53 persen;
 - Capaian penentuan indikator SPM RS yang memenuhi target adalah 68,87% dari target yang ditetapkan 93% atau dengan capaian sebesar 74,53%. Belum tercapainya target tahun 2019 karena :
 - Belum terpenuhinya seluruh standart sarana dan prasarana (alat kedokteran, gedung).
 - Belum terpenuhinya seluruh kompetensi/keahlian SDM sesuai standart Pelayanan
- Indikator Sasaran Persentase penilaian standart SNARS yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sudah terakreditasi SNARS dan lulus dengan kategori Paripurna.
- Indikator Sasaran Persentase nilai Indikator Sasaran Keselamatan Pasien. pada tahun 2019 dengan target sebesar 70 % dan terealisasi sebesar 83.33 % atau 119.04 persen;
Persentase indikator sasaran keselamatan pasien sudah melampaui target, hal ini menunjukkan kesadaran dari tiap individu akan pentingnya memperhatikan pasien.
- Indikator Sasaran Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 50 % atau 50 persen;
 - Nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit tahun 2019 meliputi 5 indikator mutu rawat inap, yaitu BOR,ALOS,TOI,BTO,NDR,GDR. terdapat capaian yang belum memenuhi standart yaitu Capaian BOR, ALOS, TOI dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- BOR mendekati standart minimal karena banyaknya perbaikan ruang rawat inap, kelas utama (Graha Nurafiah), kelas 1,2,3 sementara nilai TOI dalam batas normal karena adanya ketidaksinkronan data antara yaitu saat penghitungan BOR seluruh tempat tidur dihitung sedang TOI hanya menghitung tempat tidur yang terpakai (saat tempat tidur tidak digunakan /perbaikan gedung).
- ALOS dan BTO belum sesuai standar efisiensi era JKN, banyaknya perubahan regulasi BPJS terkait pelayanan (contoh: untuk pasien yang naik kelas hanya dibatasi 1 tingkat, sehingga pasien yang mendapat alokasi kelas 2 tidak bisa naik ke kelas utama.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Elemen akreditasi Pendidikan yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Rumah Sakit Haji merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan telah mengikuti Akreditasi Pendidikan dan lulus dengan memenuhi standar untuk rumah sakit pendidikan.
- Indikator Sasaran Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 86.61 % atau 101.94 persen;
Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi tahun 2019 sebesar 86,61% melebihi target 85 %, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kompetensi SDM guna memberikan pelayanan kepada pasien.
- Indikator Sasaran Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran RS kelas B Pendidikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 % dan terealisasi sebesar 94.50 % atau 113.85 persen;
Seluruh peralatan kedokteran yang ada di Rumah Sakit umum haji surbaya untuk memenuhi standart sebagai rumah sakit pendidikan kelas B sudah terpenuhi sebesar 94,50%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 63.64 % atau 63.64 persen;

Cost Recovery Rate atau tingkat pemulihan biaya rumah sakit adalah tingkat dimana rumah sakit dapat membiayai kebutuhan operasionalnya. Untuk realisasi CRR tahun 2019 sebesar 63,64%, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Rumah Sakit dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan (fungsional) cukup baik diatas 60%. Namun belum mencapai target yang ditetapkan rumah sakit sehingga masih diperlukan peningkatan pencapaian pendapatan melalui optimalisasi pelayanan unggulan dan pendapatan yang sah selain jasa layanan

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.148.268.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 898.281.000,00 atau 78,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.148.268.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 898.281.000,00 atau 78,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 8.707.050.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.310.337.892,00 atau 95,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.207.050.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.038.633.710,00 atau 96,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/unit. (100 %)
 - Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.271.704.182,00 atau 94,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 4 Paket/Unit dan realisasi sebesar 4 paket/unit. (100 %)
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 352.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 346.625.988,00 atau 98,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.459.113,00 atau 96,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 252.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 250.166.875,00 atau 99,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 90 Orang dan realisasi sebesar 90 orang. (100 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 320.509.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 265.335.585,00 atau 82,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.330.400,00 atau 82,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 120.509.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.432.985,00 atau 85,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.572.200,00 atau 75,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.912.435.062,00 atau 98,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

 1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.912.435.062,00 atau 98,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- 6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 49.121.543.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.580.793.499,00 atau 86,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS dengan target 84 % dan realisasi 84 %. (84 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

 1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 20.572.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.231.353.418,00 atau 88,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Kesehatan dengan target sebesar 5 paket dan realisasi sebesar 5 paket. (100 %)
 - 2. Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan anggaran sebesar Rp. 2.610.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.269.668.906,00 atau 86,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - 3. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.938.733.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.079.771.175,00 atau 85,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 10 Paket dan realisasi sebesar 10 Paket. (100 %)
 - 7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 186.549.470.167,63 dan terealisasi sebesar Rp. 154.893.459.677,00 atau 83,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS dengan target 84 % dan realisasi 81,05 %. (81,05 %)
 - Indikator Program % pencapaian indikator Pelayanan RS dengan target 84 % dan realisasi 50 %. (50 %)
 - Indikator Program % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi dengan target 83 % dan realisasi 86.6 %. (86.6 %)
 - Indikator Program % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS dengan target 98 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 186.549.470.167,63 dan terealisasi sebesar Rp. 154.893.459.677,00 atau 83,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum tercapainya nilai indikator standart pelayanan minimal (SPM).
2. Nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit belum mencapai target yang ditetapkan.
3. Cost Recovery Rate (CRR) tidak mencapai target.

Solusi :

Solusi untuk Permasalahan belum tercapainya nilai indikator standart pelayanan minimal (SPM) yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan SDM terhadap kebijakan sistem yang ada.
2. Melakukan evaluasi berkala dan menindalanjuti SPM yang tidak tercapai agar sesuai dengan standart.
3. Memenuhi sarana dan prasarana baik peralatan kedokteran (Kualitas dan Kuantitas) serta pemeliharaan gedung/fisik.

Solusi untuk Nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit belum mencapai target yang ditetapkan.

1. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standart akreditasi snars dan SPM
2. Optimalisasi terhadap pemeliharaan peralatan kedokteran, sarana dan prasarana dan Gedung.

Solusi untuk CRR yang belum mencapai target yaitu :

1. Optimalisasi pelayanan unggulan dan pendapatan yang sah selain jasa layanan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan.

e. Penghargaan Nasional

1. Penghargaan dari KEMENPAN RB sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019
2. Juara 1 Lomba Hand Hygiene dalam rangka hari kesehatan nasional Tahun 2019.
3. Juara 2 lomba KBK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
4. Penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa timur dengan **Kategori A "Memuaskan"**.
5. Top 45 kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2019 kategori **Kesehatan** dengan judul **GETAS (Geriatri Prioritas)**.
6. Penghargaan dari Kementrian PAN RB untuk RSUD Haji sebagai Wilayah Bebas Korupsi tahun 2019.

Penghargaan sebagai Pemenang Favorite Lomba Poster Session pada Seminar XVI PERSI



- Juara 1 Lomba Hand Hygiene dalam rangka hari kesehatan nasional Tahun 2019.
- Juara 2 lomba KBK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
- Penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa timur dengan **Kategori A "Memuaskan"**.



- Top 45 kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur 2019 kategori **Kesehatan** dengan judul **GETAS (Geriyatri Prioritas)**.



- Penghargaan dari Kementrian PAN RB untuk RSU Haji sebagai Wilayah Bebas Korupsi tahun 2019.



- Penghargaan sebagai Pemenang Favorite Lomba Poster Session pada Seminar XVI PERSI.



2.6. RUMAH SAKIT Jiwa MENUR SURABAYA

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS 82%.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa yang kompeten dan profesional, dengan indikator persentase standar akreditasi RS Pendidikan yang terpenuhi 82%.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di RS, yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	Bed Occupancy Rate (BOR)	74 %	78.78 %	106.46
	Average Length of Stay (ALOS)	24 hari	22 hari	108,33
	Bed Turn Over	10 hari	12,86 hari	128,60
	Persentase indikator SPM yang mencapai target	85 %	83,01 %	97,66
	Cost Recovery Rate	44 %	44.26 %	100.59
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan	95 %	82.43 %	88.77
	Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial ke masyarakat	87 %	95,97 %	110,31
	Persentase pasien pasung terlayani	100 %	100 %	100
	Turn Over Interval	10 Hari	6,02 Hari	139,80
Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan, dengan indikator kinerja utama	Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan dan berijazah/ bersertifikat	88 %	96 %	109,09
	Persentase kecukupan SDM RS sesuai standar	75 %	77,14 %	102,85

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di RS, yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ditetapkan 9 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 74 % dan terealisasi sebesar 78,78 % atau 106,46 persen;
BOR (*Bed Occupancy Rate*) adalah gambaran tingkat hunian rumah sakit atau pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. BOR optimal apabila berada pada rentang standard. Target BOR tahun 2019 sebesar 74%, realisasi 78,78%, telah mencapai target dengan persen capaian 106,46. Hal ini karena
 - Adanya peningkatan kegiatan promotif melalui (1) website rsjmenur.jatimprov.go.id, media sosial, pameran (Pelayanan Publik, Jatim Fair, HKN), bhakti sosial, dan (2) Adanya inovasi dan KBK, yang disamping meningkatkan kinerja RS Jiwa Menur, juga membuat RS Jiwa Menur lebih dikenal masyarakat.
 - Adanya peningkatan upaya kuratif/ rehabilitatif yaitu (1) Meningkatnya kualitas pelayanan karena mengikuti standar Akreditasi SNARS Edisi 1 yaitu telah Lulus Paripurna per 31 Desember 2018 dan telah di Survey Verifikasi Pertama oleh Surveyor KARS pada 19 â€“ 20 Desember 2019. (2) Peningkatan peran DPJP yaitu mulai dari pasien opname (MRS) sampai pasien pulang (KRS) satu pasien ditangani oleh satu DPJP yang sama. Sedangkan sebelumnya satu pasien ditangani oleh beberapa DPJP secara bergantian (3) Adanya pengaturan visite dokter yang lebih baik. (4) Peningkatan kerja sama dengan Liponsos Keputih Surabaya yang menampung gelandangan psikotik.
 - Meningkatnya jumlah pasien rawat inap tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal ini karena adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan RS dengan menambah kapasitas tempat tidur, sedangkan tahun 2019 ada regulasi rujukan berjenjang, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan Liposos Keputih untuk penanganan gelandangan psikotik.

- Indikator Sasaran Average Length of Stay (ALOS) pada tahun 2019 dengan target sebesar 24 hari dan terealisasi sebesar 22 hari atau 108,33 persen;
ALOS (*Average Length of Stay*) adalah angka rata-rata lama pasien dirawat. ALOS semakin tinggi bukan berarti semakin baik, namun semakin dekat dengan target semakin baik. Target ALOS tahun 2019 sebesar 24 hari realisasi 22 hari, artinya telah mencapai target dengan persen capaian 108,33. Hal ini karena :
 - Meningkatnya edukasi pada keluarga pasien dengan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat melalui Promosi Kesehatan Rumah Sakit kepada keluarga pasien dan meningkatkan peran admisi, agar keluarga lebih peduli kepada pasien sehingga pasien tidak perlu dirawat terlalu lama, bagi pasien sembuh segera dijemput keluarga dan keluarga mau menerima dan merawat pasien dengan baik.
 - Adanya penurunan jumlah pasien pasung dengan penyulit dan komorbiditas yang memerlukan hari perawatan lebih lama.
 - Adanya pasien Liponsos yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter dan bisa dialihkan ke perawatan Rawat Jalan segera dijemput oleh Liponsos.
- Indikator Sasaran Bed Turn Over pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 hari dan terealisasi sebesar 12,86 hari atau 128,60 persen;
BTO (*Bed Turn Over*) adalah nilai frekuensi/ berapa kali tempat tidur rumah sakit dipakai dalam satu periode (satu tahun). BTO optimal apabila berada pada rentang standard. Target BTO tahun 2019 sebesar 10 kali realisasi 12 hari, artinya telah mencapai target dengan persen capaian 128,60. Hal ini karena :
 - Adanya peningkatan jumlah pasien, yang akan berpengaruh pada tingkat Hunian (BOR), dan akan berpengaruh pula pada frekuensi tempat tidur dipakai (BOR).

- Lama dirawat (ALOS) yang pendek akan menyebabkan tempat tidur semakin sering dipakai bila pasien meningkat atau tingkat hunian (BOR) meningkat.
- Indikator Sasaran Persentase indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 83,01 % atau 97,66 persen; Standard Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, serta spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh RS kepada masyarakat. Semakin tinggi capaian SPM berarti semakin banyak indikator SPM yang memenuhi target yang diharapkan. Target SPM tahun 2019 sebesar 85%, realisasi 85,01%, persen capaian 97,66%. Hal ini karena masih adanya indikator yang belum tercapai di beberapa unit layanan
- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate pada tahun 2019 dengan target sebesar 44 % dan terealisasi sebesar 44.26 % atau 100.59 persen;
CRR (*Cost Recovery Rate*) adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit dalam menutupi biayanya operasional (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). Semakin tinggi nilai CRR, maka kemampuan kemandirian keuangan RS juga semakin baik. Target CRR tahun 2019 sebesar 44% realisasi 44,26%, telah mencapai target dengan persen capaian 100,59%. Pencapaian ini artinya kemampuan RSJ Menur untuk memenuhi belanja operasional selama tahun 2019, telah mencapai target, namun belum mandiri penuh dan masih memerlukan subsidi.
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 82,43 % atau 88,77 persen;
Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. Semakin tinggi hasil IKM

maka semakin baik. Formulasi pengukuran adalah berdasarkan hasil survey. Survey dilakukan dengan menilai 9 unsur pelayanan di 15 lokasi unit kerja pelayanan. Target IKM tahun 2019 sebesar 95% realisasi 82,43%, belum mencapai target dengan persen capaian 86,77%. Hal ini karena Hal ini karena secara umum SKM dari masing - masing unit layanan belum memenuhi target.

- Indikator Sasaran Perseentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial ke masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 87 % dan terealisasi sebesar 95,97 % atau 110,31 persen;

Persentase Pasien Jiwa yang Kembali Berfungsi Sosial di Masyarakat adalah persentase pasien yang sembuh sosial. Definisi sembuh sosial yaitu bisa mengurus dirinya sendiri, mandi, berpakaian, makan dan hal dasar lainnya dan kembali berfungsi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya penentuan pasien yang sudah bisa kembali berfungsi social dimasyarakat ditentukan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (Sp.KJ) yang menangani, berdasarkan scor Gaf Scale dari pasien tersebut. Target Persentase Pasien Jiwa yang Kembali Berfungsi Sosial di Masyarakat tahun 2019 sebesar 87% realisasi 95,97%, telah mencapai target dengan persen capaian 110,31%. Hal ini karena faktor “faktor sebagai berikut :

- Semakin meningkatnya kemampuan dokter dengan adanya pelatihan baik internal maupun eksternal.
- Semakin meningkatnya ilmu farmasi atau pengobatan bagi penderita gangguan jiwa, sehingga tersedia obat - obat baru dengan efek yang jauh lebih baik.
- Adanya kebijakan bahwa seluruh pasien rawat inap ditangani oleh psikiater, dibantu oleh dokter.
- Semakin dikembangkannya kegiatan terapi ADL (Activity Daily Living) dan TAK (Terapi Aktivitas Kelompok) oleh Tim Perawatan di ruangan.
- Sudah mulai terlaksananya kegiatan di Instalasi Rehabilitasi Mental Psikosial, dimana pasien rawat inap mendapat mendapatkan berbagai terapi antara lain

terapi kerja, terapi olah raga dan terapi musik. Terapi kerja meliputi pembuatan sulaman, anyaman, sulak, melukis dan membuat bunga, sehingga membantu percepatan kesembuhan pasien

- Indikator Sasaran Persentase pasien pasung terlayani pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Persentase pasien pasung yang terlayani adalah cakupan pasien pasung yang menjalani perawatan di RS Jiwa Menur dibandingkan dengan pasien pasung yang datang ke RS Jiwa Menur. Semakin tinggi hasil maka semakin baik. Target Persentase pasien pasung yang terlayani tahun 2019 sebesar 100% realisasi 100%, telah mencapai target dengan persen capaian 100%. Hal ini karena

- Kebijakan bahwa semua pasien pasung yang dirujuk ke RSJ Menur harus dilayani, karena RSJ Menur adalah satu - satunya RS Sakit Khusus Jiwa milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak boleh menolak pasien;
- Inovasi RSJ Menur Multi Level Manajemen Pasung.
- Pelayanan pasien pasung telah dilakukan sejak sebelum tahun 2013, namun pelayanan tidak dibedakan antara pasien pasung dan non pasung. Sejak ditetapkan gerakan Jatim bebas pasung, RSJ Menur memberikan pelayanan khusus berupa ruang perawatan khusus pasung di ruang Wijaya Kusuma dan ruang khusus di Instalasi Rehabilitasi Medik dan Mental yang terpisah dari penderita gangguan jiwa non pasung.
- Indikator Sasaran Turn Over Interval pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 Hari dan terealisasi sebesar 6,02 Hari atau 139,80 persen;
TOI (*Turn Over Interval*) adalah nilai rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya, yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit. TOI optimal apabila berada pada rentang standard. Target TOI tahun 2019 sebesar 10 hari, realisasi 6,02 hari, telah mencapai target dengan persen capaian

139,80. Hal ini karena : TOI seiring dengan ALOS, capaian ALOS yang meningkat maka TOI juga ikut meningkat.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan, dengan indikator kinerja utama, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan dan berijazah/ bersertifikat pada tahun 2019 dengan target sebesar 88 % dan terealisasi sebesar 96 % atau 109,09 persen;

Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan dan berijazah/ bersertifikat adalah persen jumlah karyawan yang lulus pendidikan atau pelatihan dalam tahun tersebut yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Semakin tinggi capaian, semakin baik. Target tahun 2019 sebesar 88%, realisasi 96%, telah mencapai target dengan persen capaian 109,09. Hal ini karena :

- Adanya tuntutan IKU Direktur Tahun 2019 bahwa satu karyawan minimal mengikuti pelatihan satu kali dalam setahun;
 - Adanya standar SPM Permenkes, bahwa satu karyawan minimal mengikuti pelatihan 20 jam dalam setahun;
 - Adanya perbaikan seleksi pelatihan sehingga pelatihan tidak diberikan berulang “ ulang pada orang yang sama;
 - Adanya pelatihan yang bisa mencakup semua karyawan dengan semua spesifikasi pendidikan yaitu Pelatihan Orientasi Pegawai Lama dan Baru;
 - Adanya Pelatihan yang dipersyaratkan Akreditasi (PPI, PMKP, BHD dan K3RS).
- Indikator Sasaran Persentase kecukupan SDM RS sesuai standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 77,14 % atau 102,85 persen;
Persentase kecukupan SDM yang harus dipenuhi yaitu persen jumlah pegawai yang ada di RSJ Menur dibanding jumlah kebutuhan pegawai RSJ Menur sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A. Target tahun 2019 sebesar 75%, realisasi 77,14%,

telah mencapai target dengan persen capaian 102,85. Hal ini karena :

- Adanya Surat Edaran dari Gubernur bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilarang merekrut tenaga BLUD.
- Adanya Dokter Sp Kulit Kelamin dan paru tidak ada pada kualifikasi kebutuhan RS Jiwa, namun jabatan tersebut ada.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.088.091.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.028.541.650,00 atau 94,53 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 74.60 %. (74.60 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.088.091.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.028.541.650,00 atau 94,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 74.60 %. (74.60 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 4.916.147.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.198.336.378,00 atau 85,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 98 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.374.947.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.700.994.019,00 atau 84,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 14 Paket/Unit dan realisasi sebesar 14 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 541.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 497.342.359,00 atau 91,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 4 Paket/Unit dan realisasi sebesar 4 . (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.170.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.894.801.751,00 atau 91,30 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.216.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.168.080.659,00 atau 96,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 256 Kali dan realisasi sebesar 307 kali. (119,92 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.953.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.726.721.092,00 atau 88,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 435 Orang dan realisasi sebesar 466 . (107.13 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 358.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 240.923.150,00 atau 67,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 143.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.259.400,00 atau 39,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 14 Dokumen dan realisasi sebesar 14 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 36.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.251.750,00 atau 68,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 53 Dokumen dan realisasi sebesar 53 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 83.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.024.000,00 atau 99,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 95.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.388.000,00 atau 79,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (2 %)
- 5) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 2.443.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.233.358.789,00 atau 91,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 95 % dan realisasi 82.43 . (86.77 %)Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.443.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.233.358.789,00 atau 91,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Kesehatan dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)
- 6) **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 40.401.347.074,3 dan terealisasi sebesar Rp. 38.308.458.972,00 atau 94,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Bed Occupancy Rate (BOR) dengan target 74 % dan realisasi 78.78 %. (106.46 %)

- Indikator Program % pencapaian indikator Pelayanan RS dengan target 100 % dan realisasi 75 %. (75 %)
- Indikator Program % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS dengan target 100 % dan realisasi 109.87 %. (109.87 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 40.401.347.074,3 dan terealisasi sebesar Rp. 38.308.458.972,00 atau 94,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pemenuhan biaya oprasional RS dengan target sebesar 44 % dan realisasi sebesar 44.26 %. (100.59 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih adanya indikator yang belum tercapai yaitu TOI, SPM dan IKM

Solusi :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan cara.
 - Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar SPM.
 - Menciptakan berbagai inovasi yang berbasis Teknologi Informasi.
 - Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM
2. Meningkatkan BOR dengan cara
 - Optimalisasi kerjasama dengan Liposos Kota Surabaya
 - Promosi pelayanan RSJ Menur melalui berbagai media
 - Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Stake Holder terkait

e. Penghargaan Nasional

1. Ditetapkan sebagai unit kerja pelayanan dengan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan pada 10 Desember 2019 di Jakarta.
2. Direktur dr. Herlin Ferliana, M.Kes ditetapkan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan pada 10 Desember 2019 di Jakarta.
3. Terbaik ke 3 Kelompok Budaya Kerja (KBK) Kesling Rindu Mesra dalam Gelar Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

4. Terbaik ke 5 Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat A Tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan nilai.
5. Lulus Re Akreditasi SNARS Edisi 1 Tahun 2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

2.7. RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	80,23 %	100,28
	Persentase indikator SPM yang mencapai target	80 %	80,89 %	101,11
	Cost Recovery Rate	60 %	66,7 %	111,17
	Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 80,23 % atau 100,28 persen;
Meskipun sudah mencapai target, namun berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017, masih ada beberapa unsur penilaian yang dinilai kurang baik oleh masyarakat yaitu penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana serta sistem/mekanisme/prosedur pelayanan. Hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan sebagian operasional pelayanan ke gedung baru yang berseberangan dengan gedung pelayanan lama.
- Indikator Sasaran Persentase indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 80,89 % atau 101,11 persen;
Dari 89 indikator, ada 72 indikator yang sudah mencapai target. Secara umum, indikator yang masih belum mencapai

target adalah yang berhubungan dengan waktu pelayanan serta pelatihan SDM.

- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 66,7 % atau 111,17 persen;
Capaian Cost Recovery Rate RSUD Karsa Husada Batu pada tahun 2019 sudah mencapai target dan juga berada di rentang ideal. Namun, RSUD Karsa Husada Batu masih tetap memerlukan subsidi dari APBD untuk memenuhi sebagian kebutuhannya terutama belanja pegawai karena rasio belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) pada tahun 2019 mencapai 22,34% dari total belanja RS.
- Indikator Sasaran Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Pada tahun 2019, RSUD Karsa Husada Batu melaksanakan survei akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 sebanyak 16 bab dengan hasil paripurna. Hal ini berarti seluruh bab akreditasi mendapatkan nilai >80%.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.071.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.533.021,00 atau 96,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 85 % dan realisasi 78,5 %. (92 %)
 Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.071.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.533.021,00 atau 96,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 78,5 %. (92,35 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 3.097.124.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.038.617.821,00 atau 98,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.640.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.597.101.136,00 atau 98,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 17 Paket/Unit dan realisasi sebesar 13 Paket/Unit. (76,47 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 456.459.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.516.685,00 atau 96,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 10 Paket/Unit dan realisasi sebesar 11 Paket/Unit. (110 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 491.002.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 467.037.431,00 atau 95,12 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 153.102.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 136.649.987,00 atau 89,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 20 Kali dan realisasi sebesar 18 Kali. (90,00 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 337.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 330.387.444,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 300 pegawai dan realisasi sebesar 234 pegawai. (78,00 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal dengan target sebesar 50 pegawai dan realisasi sebesar 55 pegawai. (110 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 441.638.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 413.820.579,00 atau 93,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 134.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.761.609,00 atau 87,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 60.381.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.457.488,00 atau 96,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 113.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.921.950,00 atau 93,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 134.476.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 132.679.532,00 atau 98,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 13 Dokumen dan realisasi sebesar 13 Dokumen. (100 %)

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.920.526.057,00 atau 96,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.920.526.057,00 atau 96,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemenuhan / pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 5 jenis dan realisasi sebesar 5 jenis. (100 %)
- Jumlah gedung di rehabilitasi / pelihara dengan target sebesar 2 unit dan realisasi sebesar 2 unit. (100 %)
- Jumlah pemenuhan / pengadaan obat-obatan dengan target sebesar 24 jenis dan realisasi sebesar 16 jenis. (67 %)
- Jumlah pemenuhan / pengadaan bahan habis pakai dengan target sebesar 2 jenis dan realisasi sebesar 2 jenis. (100 %)
- Jumlah pemenuhan / pengadaan bahan kimia dengan target sebesar 1 jenis dan realisasi sebesar 1 jenis. (100 %)

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 19.790.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.347.275.268,00 atau 82,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD Karsa Husada Batu dengan standart RS sesuai kemenkes dengan target 90 % dan realisasi 85,92 %. (95 %)
- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 90 % dan realisasi 85,92 %. (95,47 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.238.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.897.849.546,00 atau 82,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pembangunan dengan target sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.419.101.327,00 atau 94,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kegiatan promotif dan preventif dalam dan luar gedung dengan target sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 3 kegiatan. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 1 jenis dan realisasi sebesar 1 jenis. (100 %)
3. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.352.577.480,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.030.324.395,00 atau 90,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pembangunan gedung dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
 - Jumlah rehabilitasi gedung dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 61.151.710.893,84 dan terealisasi sebesar Rp. 58.208.285.940,00 atau 95,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 60 % dan realisasi 66,7 %. (111,17 %)
 - Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 78,99 %. (92,93 %)
 - Indikator Program Rumah Sakit Terakreditasi versi 2012 dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
 - Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
 - Indikator Program Persentase indikator SPM yang mencapai target dengan target 85 % dan realisasi 74,16 %. (92,7 %)
 - Indikator Program Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit dengan target 90 % dan realisasi 103 %. (114,44 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Penguatan pelayanan RS/RS Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 61.151.710.893,84 dan terealisasi sebesar Rp. 58.208.285.940,00 atau 95,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- BOR (Bed Occupancy Ratio) dengan target sebesar 60 % dan realisasi sebesar 54,33 %. (90,55 %)

- ALOS (Average Length of Stay) dengan target sebesar 4 hari dan realisasi sebesar 3,34 hari. (83,5 %)
- TOI (Turn Over Interval) dengan target sebesar 3 hari dan realisasi sebesar 2,82 hari. (106 %)
- BTO (Bed Turn Over) dengan target sebesar 50 kali dan realisasi sebesar 53,3 kali. (106,7 %)
- GDR (Gross Death Rate) dengan target sebesar 45 permil dan realisasi sebesar 42 permil. (106,7 %)
- NDR (Nett Death Rate) dengan target sebesar 25 permil dan realisasi sebesar 21,1 permil. (115,6 %)
- Rata-rata kunjungan poliklinik per hari dengan target sebesar 330 kunjungan dan realisasi sebesar 363 kunjungan. (110 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Pembayaran klaim BPJS selama 4 bulan mengganggu cash flow RS untuk pelayanan.
- Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) belum berjalan dengan optimal sehingga berpengaruh terhadap kecepatan waktu pelayanan.
- Prasarana pelayanan publik masih belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan pasien.

Solusi :

- Efisiensi penggunaan operasional rumah sakit.
- Penambahan tenaga programmer untuk membangun SIM RS sesuai dengan kebutuhan.
- Mengusulkan pengadaan prasarana pelayanan publik pada APBD 2020.

e. Penghargaan Nasional

Akreditasi RS Versi SNARS Edisi 1 oleh KARS dengan Predikat PARIPURNA

2.8. RUMAH SAKIT PARU JEMBER

a. Tujuan

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar Nasional (IKM)

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Paru Jember Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan	CRR	46,16 %	55,49 %	120,21
Meningkatnya health promotion hospital sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan kesehatan paru, bedah dan jantung dan penelitian pengembangan teknologi kesehatan tepat guna	Pemeriksaan berkala petugas	100 %	100 %	100
	Pilot Project Area Bebas TB	40 %	20 %	50
Meningkatnya sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia	Rumah Sakit Terakreditasi KARS versi 2012	100 %	100 %	100
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar Nasional	BOR	78,20 %	41,49 %	53,05
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,86 %	78 %	91,91

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Paru Jember yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran CRR pada tahun 2019 dengan target sebesar 46,16 % dan terealisasi sebesar 55,49 % atau 120,21 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya health promotion hospital sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan kesehatan paru, bedah dan jantung dan penelitian pengembangan teknologi kesehatan tepat guna, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Pemeriksaan berkala petugas pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Pemeriksaan berkala bagi petugas yang bersinggungan langsung dengan pasien dalam 1 tahun terlaksana dengan baik
- Indikator Sasaran Pilot Project Area Bebas TB pada tahun 2019 dengan target sebesar 40 % dan terealisasi sebesar 20 % atau 50 persen; Dalam Pilot Project Area Bebas TB dilakukan secara bertahap setiap tahunnya

Sasaran 3 : Meningkatnya sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Rumah Sakit Terakreditasi KARS versi 2012 pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Terakreditasi lulus Paripurna

Sasaran 4 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar Nasional, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran BOR pada tahun 2019 dengan target sebesar 78,20 % dan terealisasi sebesar 41,49 % atau 53,05 persen; Angka BOR mulai menurun sejak diberlakukannya sistem berjenjang oleh pihak BPJS mengingat RS Paru Jember merupakan Rumah Sakit Khusus tipe B
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 84,86 % dan terealisasi sebesar 78 % atau 91,91 persen; Masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik internal maupun eksternal terkait dengan sarana prasarana yang tersedia serta pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 475.133.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.955.900,00 atau 87,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 81 %. (81 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 475.133.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.955.900,00 atau 87,97%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 75 % dan realisasi sebesar 81 %. (108 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 1.112.485.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 988.759.868,00 atau 88,88 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.049.985.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 926.643.360,00 atau 88,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 7 Paket dan realisasi sebesar 6 Paket. (78,57 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.116.508,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 21 Unit dan realisasi sebesar 21 Unit. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 533.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 492.448.785,00 atau 92,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 507.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 467.498.785,00 atau 92,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 300 kali dan realisasi sebesar 255 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 26.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.950.000,00 atau 94,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 7 orang dan realisasi sebesar 7 orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 122.016.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 117.534.100,00 atau 96,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 21.899.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.454.250,00 atau 84,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 4.916.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.329.150,00 atau 88,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.750.700,00 atau 91,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 8.172.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.391.676.574,00 atau 90,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 100 % dan realisasi 99,46 %. (99,46 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.172.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.391.676.574,00 atau 90,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah alat kesehatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- Jumlah obat-obatan dengan target sebesar 320 Jenis dan realisasi sebesar 320 Jenis. (100 %)
- Jumlah bahan pakai habis dengan target sebesar 181 Jenis dan realisasi sebesar 181 Jenis. (100 %)
- Jumlah reagen dengan target sebesar 31 Jenis dan realisasi sebesar 30 Jenis. (96,77 %)
- Jumlah pemeliharaan bangunan dengan target sebesar 5 Unit dan realisasi sebesar 5 Unit. (100 %)
- Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan dengan target sebesar 14 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit. (85,71 %)

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 5.711.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.950.550.106,00 atau 86,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program prosentase responden yang puas terhadap fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia dengan target 100 % dan realisasi 76,29 %. (76,29 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan anggaran sebesar Rp. 5.323.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.585.103.206,00 atau 86,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan target sebesar 6 Kegiatan dan realisasi sebesar 6 Kegiatan. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 388.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 365.446.900,00 atau 94,14%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah alat kesehatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 29.833.886.721,04 dan terealisasi sebesar Rp. 20.919.704.772,00 atau 70,12 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program tingkat kebutuhan kegiatan operasional rumah sakit dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 29.833.886.721,04 dan terealisasi sebesar Rp. 20.919.704.772,00 atau 70,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- BOR dengan target sebesar 78,20 % dan realisasi sebesar 41,49 %. (53,06 %)
- ALOS dengan target sebesar 4,17 hari dan realisasi sebesar 3,66 hari. (87,77 %)
- TOI dengan target sebesar 2,57 hari dan realisasi sebesar 5,15 hari. (200,39 %)
- BTO dengan target sebesar 63,49 kali dan realisasi sebesar 41,48 kali. (65,33 %)
- GDR dengan target sebesar 35,78 permit dan realisasi sebesar 20,70 permit. (57,85 %)
- NDR dengan target sebesar 20,66 permit dan realisasi sebesar 12,32 permit. (59,63 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pendapatan RS tidak mencapai target akibat dari sistem pembayaran BPJS yang tertunda untuk 3 bulan terakhir di tahun 2019

Solusi :

1. Perlu di adakan evaluasi bersama dengan pihak lintas sektor terkait, beserta pihak BPJS mengenai sistem pembayaran BPJS yang dirasa bisa

mempengaruhi kegiatan operasional RS untuk kedepannya jika masih dengan sistem yang sama

e. Penghargaan Nasional

-

2.9. RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Paru Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.	Prosentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus	90 %	90,70 %	100,8
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	90 %	90,23 %	100,2
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	90 %	90,27 %	100,3
Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Adm Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100 %	100 %	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100 %	100 %	100
	Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	100 %	100 %	100
	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Paru Dungus Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Paru Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal., ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90,70 % atau 100,8 persen;
Capaian SPM Rumah Sakit sangat dipengaruhi adanya koordinasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90,23 % atau 100,2 persen;
Masih adanya keluhan pasien yang perlu diakomodir dan ditindaklanjuti terutama yang berkaitan dengan persyaratan

rujukan pasien BPJS yang memerlukan sosialisasi lagi ke masyarakat.

- Indikator Sasaran Persentase Keberhasilan Pengobatan TB pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90,27 % atau 100,3 persen;

Angka keberhasilan pengobatan TB yang kami maksudkan adalah pengobatan tuntas pada program TB DOTs selama kurun waktu yang telah ditetapkan (6-9 bulan). Angka keberhasilan pengobatan TB sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya dikarenakan jarak tempat tinggal pasien dengan rumah sakit yang cukup jauh. Tetapi hal ini telah diminimalisir dengan peningkatan komunikasi dengan pasien dan penguatan jejaring pengendalian TB dengan Puskesmas Puskesmas terdekat melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Adm Perkantoran dan Kenyamanan Kantor pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 465.901.399,0 dan terealisasi sebesar Rp. 427.127.050,00 atau 91,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 465.901.399,00 dan terealisasi sebesar Rp. 427.127.050,00 atau 91,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 2.018.344.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.965.689.665,00 atau 97,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.618.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.588.598.013,00 atau 98,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 10 Paket dan realisasi sebesar 10 Paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 399.580.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 377.091.652,00 atau 94,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 10 Paket dan realisasi sebesar 10 Paket. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 428.196.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 404.555.676,00 atau 94,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 196.069.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 196.063.752,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
- 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 232.126.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 208.491.924,00 atau 89,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 140 Pegawai dan realisasi sebesar 142 Pegawai. (101,43 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 295.973.451,00 dan terealisasi sebesar Rp. 294.687.952,00 atau 99,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 27.134.451,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.803.552,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (125 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 29.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.017.400,00 atau 98,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (133,33 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 221.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 221.692.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.175.000,00 atau 97,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.174.428.552,00 atau 96,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.174.428.552,00 atau 96,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pemeliharaan Gedung/ Bangunan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- Jumlah Pengadaan Obat-obatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- Jumlah Pengadaan Bahan/ Alat Kesehatan Habis Pakai dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
- Jumlah Pengadaan Bahan Kimia dan Reagen dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
- Jumlah Kalibrasi dan Sertifikasi Alat dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- Jumlah Pengadaan Suku Cadang dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
- Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
- Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 12.107.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.424.222.389,00 atau 61.32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program (%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 12.107.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.424.222.387,00 atau 61,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembangunan Gedung / Prasarana dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 0 Paket. (0 %)
- Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 25 Paket dan realisasi sebesar 24 Paket. (96 %)

7) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 10.950.235.365,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.775.953.298,00 atau 98,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 10.950.235.365,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.775.953.298,00 atau 98,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- BOR dengan target sebesar 55 % dan realisasi sebesar 52 %. (94,55 %)
- AvLOS dengan target sebesar 6 Hari dan realisasi sebesar 5 Hari. (83,33 %)
- TOI dengan target sebesar 3 Hari dan realisasi sebesar 3 Hari. (100 %)
- BTO dengan target sebesar 40 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (37,50 %)
- NDR dengan target sebesar 25 /1000 dan realisasi sebesar 24 /1000. (104,17 %)
- GDR dengan target sebesar 45 /1000 dan realisasi sebesar 33 /1000. (136,36 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Munculnya fenomena kasus TBC di masyarakat yang datang ke rumah sakit dengan penyakit penyerta seperti TB-HIV (4 orang), TB-DM (2 Orang), TB-MDR (5 orang).
- Didapatkan 21,05% anak yang terdeteksi terinfeksi TBC dari anak yang terindikasi (38 anak) dalam kegiatan deteksi dini penyakit paru.

Solusi :

- Meningkatkan program pengendalian penyakit TBC di masyarakat , melalui kegiatan Promosi Kesehatan, Pencegahan dan deteksi dini, Pengobatan, pemantauan dan penguatan jejaring program pengendalian TBC.

e. Penghargaan Nasional

Terakreditasi KARS : LULUS Akreditasi PERDANA

2.10. RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

a. Tujuan

Menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi versi 2012 tingkat Paripurna.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Kusta Kediri Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas.	Persentase IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90 %	87,23 %	96,92
	Persentase Cost Recovery Rate (CRR)	85 %	79,5 %	93,5
	Persentase RFT Rate Kusta di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah	55 %	58,8 %	106

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Kusta Kediri yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas., ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 87,23 % atau 96,92 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 79,5 % atau 93,5 persen;
- Indikator Sasaran Persentase RFT Rate Kusta di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah pada tahun 2019 dengan target sebesar 55 % dan terealisasi sebesar 58,8 % atau 106 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 668.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 602.687.275,00 atau 90,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 92,13 %. (92,13 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 668.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 602.687.275,00 atau 90,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 92,13 %. (92,13 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 814.550.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.250.925,00 atau 74,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 75 %. (75 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 516.500.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 467.631.215,00 atau 90,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia dengan target sebesar 32 Unit dan realisasi sebesar 32 Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 298.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.619.710,00 atau 47,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan target sebesar 226 Unit dan realisasi sebesar 103 Unit. (46 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.105.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 774.167.439,00 atau 70,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 62 %. (62 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 883.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.997.339,00 atau 69,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 775 Orang/Kali dan realisasi sebesar 898 Orang/Kali. (116 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 222.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 163.170.100,00 atau 73,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai atau Tenaga yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal dengan target sebesar 18 orang dan realisasi sebesar 20 orang. (111 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 116.697.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.732.253,00 atau 54,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.277.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.275.700,00 atau 45,01%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.894.000,00 atau 59,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 82.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.012.203,00 atau 66,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 12 Modul dan realisasi sebesar 12 Modul. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 20.344.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.350,00 atau 7,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 18.477.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 16.604.069.509,00 atau 89,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Pelayanan BLUD dengan target 100 % dan realisasi 93,21 %. (93,21 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.560.125.143,00 atau 85,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 243 unit dan realisasi sebesar 210 unit. (86 %)

2. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 8.477.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.043.944.366,00 atau 94,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana kesehatan dengan target sebesar 12 paket dan realisasi sebesar 12 paket. (100 %)

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 47.777.010.948,27 dan terealisasi sebesar Rp. 37.706.899.213,00 atau 78,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 87,23 %. (102,62 %)
- Indikator Program Prosentase Indikator SPM yang Mencapai Target dengan target 95 % dan realisasi 94,6 %. (99,58 %)
- Indikator Program Capaian Institusi yang Terakreditasi dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)
- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 85 % dan realisasi 68,2 %. (80,24 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 47.777.010.948,27 dan terealisasi sebesar Rp. 37.706.899.213,00 atau 78,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pasien di IGD dengan target sebesar 14000 pasien dan realisasi sebesar 15398 pasien. (109,99 %)
- Jumlah Pasien Rawat jalan dengan target sebesar 45000 pasien dan realisasi sebesar 63713 pasien. (141,58 %)

- BOR dengan target sebesar 75 % dan realisasi sebesar 59,1 %. (78,8 %)
- LOS dengan target sebesar 6 hari dan realisasi sebesar 4 hari. (66,67 %)
- TOI dengan target sebesar 2 hari dan realisasi sebesar 3 hari. (150 %)
- BTO dengan target sebesar 45 kali dan realisasi sebesar 56 kali. (124,44 %)
- Penyusunan Dokumen SPM dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen . (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Dari pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa permasalahan antara lain:
 1. Pelaksanaan jadwal pertemuan tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran yang sudah ditentukan
 2. Tidak dilakukan realisasi penyerapan nasi kotak pada saat pertemuan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan : Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas bahwa tidak ada penyerapan anggaran dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pengadaan barang dan modifikasi barang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Permasalahan di Rumah Sakit secara keseluruhan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya Sistem Manajemen Rumah Sakit secara optimal
2. Terganggunya cash flow keuangan Rumah Sakit karena tertundanya pembayaran klaim BPJS selama 5 bulan

3. Sistem Perhitungan Pendapatan yang berlaku adalah penerimaan cash basic, sehingga dalam perhitungan CRR capaian menjadi rendah

Solusi :

1. Integrasi Sistem Manajemen Rumah Sakit secara optimal.
2. Pengusulan kembali pengadaan barang yang belum terlaksana pada tahun 2020.
3. Melakukan evaluasi secara berkala pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
4. Evaluasi kembali sistem perhitungan pendapatan yang selama ini adalah cash basic.

e. Penghargaan Nasional

-

2.11. RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang berkualitas	Persentase IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	90 %	87,23 %	96,92
	Persentase Cost Recovery Rate (CRR)	85 %	79,5 %	93,5
	Persentase RFT Rate Kusta di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah	55 %	58,8 %	106

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang berkualitas, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 87,23 % atau 96,92 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 79,5 % atau 93,5 persen;
- Indikator Sasaran Persentase RFT Rate Kusta di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah pada tahun 2019 dengan target sebesar 55 % dan terealisasi sebesar 58,8 % atau 106 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 668.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 602.687.275,00 atau 90,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 92,13 %. (92,13 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 668.816.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 602.687.275,00 atau 90,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Pegawai yang Puas terhadap Pelayanan Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 92,13 %. (92,13 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 814.550.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.250.925,00 atau 74,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 75 %. (75 %)Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 516.500.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 467.631.215,00 atau 90,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia dengan target sebesar 32 Unit dan realisasi sebesar 32 Unit. (100 %)
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 298.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.619.710,00 atau 47,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan target sebesar 226 Unit dan realisasi sebesar 103 Unit. (46 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.105.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 774.167.439,00 atau 70,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 62 %. (62 %)Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 883.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.997.339,00 atau 69,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 775 Orang/Kali dan realisasi sebesar 898 Orang/Kali. (116 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 222.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 163.170.100,00 atau 73,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai atau Tenaga yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal dengan target sebesar 18 orang dan realisasi sebesar 20 orang. (111 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 116.697.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.732.253,00 atau 54,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.277.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.275.700,00 atau 45,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.894.000,00 atau 59,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 82.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.012.203,00 atau 66,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 12 Modul dan realisasi sebesar 12 Modul. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 20.344.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.350,00 atau 7,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 5) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 18.477.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.604.069.509,00 atau 89,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Pelayanan BLUD dengan target 100 % dan realisasi 93,21 %. (93,21 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.560.125.143,00 atau 85,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan dengan target sebesar 243 unit dan realisasi sebesar 210 unit. (86 %)
2. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 8.477.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.043.944.366,00 atau 94,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana kesehatan dengan target sebesar 12 paket dan realisasi sebesar 12 paket. (100 %)

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 47.777.010.948,27 dan terealisasi sebesar Rp. 37.706.899.213,00 atau 78,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 87,23 %. (102,62 %)
- Indikator Program Prosentase Indikator SPM yang Mencapai Target dengan target 95 % dan realisasi 94,6 %. (99,58 %)
- Indikator Program Capaian Institusi yang Terakreditasi dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)
- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 85 % dan realisasi 68,2 %. (80,24 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 47.777.010.948,27 dan terealisasi sebesar Rp. 37.706.899.213,00 atau 78,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pasien di IGD dengan target sebesar 14000 pasien dan realisasi sebesar 15398 pasien. (109,99 %)
 - Jumlah Pasien Rawat jalan dengan target sebesar 45000 pasien dan realisasi sebesar 63713 pasien. (141,58 %)
 - BOR dengan target sebesar 75 % dan realisasi sebesar 59,1 %. (78,8 %)
 - LOS dengan target sebesar 6 hari dan realisasi sebesar 4 hari. (66,67 %)
 - TOI dengan target sebesar 2 hari dan realisasi sebesar 3 hari. (150 %)
 - BTO dengan target sebesar 45 kali dan realisasi sebesar 56 kali. (124,44 %)
 - Penyusunan Dokumen SPM dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen . (100 %)

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 100 Persentase dan realisasi 0 %. (0,00 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 0 unit. (___ %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa permasalahan antara lain:

1. Pelaksanaan jadwal pertemuan tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran yang sudah ditentukan.
2. Tidak dilakukan realisasi penyerapan nasi kotak pada saat pertemuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Kegiatan : Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas bahwa tidak ada penyerapan anggaran dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pengadaan barang dan modifikasi barang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Permasalahan di Rumah Sakit secara keseluruhan selama tahun 2019 sebagai berikut:
 1. Belum terintegrasinya Sistem Manajemen Rumah Sakit secara optimal
 2. Terganggunya cash flow keuangan Rumah Sakit karena tertundanya pembayaran klaim BPJS selama 5 bulan

3. Sistem Perhitungan Pendapatan yang berlaku adalah penerimaan cash basic, sehingga dalam perhitungan CRR capaian menjadi rendah.

Solusi :

1. Integrasi Sistem Manajemen Rumah Sakit secara optimal.
2. Pengusulan kembali pengadaan barang yang belum terlaksana pada tahun 2020.
3. Melakukan evaluasi secara berkala pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
4. Evaluasi kembali sistem perhitungan pendapatan yang selama ini adalah cash basic.

e. Penghargaan Nasional

-

2.12. RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

a. Tujuan

1. Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai pemberi pelayanan kesehatan mata yang bermutu, efektif dan efisien secara paripurna (Promotif, Preventif, Kurative dan Rehabilitatif).
2. Mewujudkan jalannya sistem manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang, transparan dan akuntabel.
3. Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang mempunyai Jejaring kemitraan, koordinasi, pendidikan dan penelitian dengan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan mata seluruh Jawa Timur.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	80,98	95,27
	Persentase Operasi Katarak	8,7 %	6,43 %	73,88
	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	90 %	95,60 %	106,22
Terlaksananya kegiatan operasional Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	Cost Recovery Rate (CRR)	90 %	106,42 %	118,24
	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Ketatausahaan	90 %	94,00 %	104,00
Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi Kesehatan Mata di Jawa Timur	Persentase Kabupaten/Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat	40 %	5.26 %	14
	Persentase Screening dan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)	90 %	41,27 %	45,86

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 dan terealisasi sebesar 80,98 atau 95,27 persen;

- Indikator Sasaran Persentase Operasi Katarak pada tahun 2019 dengan target sebesar 8,7 % dan terealisasi sebesar 6,43 % atau 73,88 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 95,60 % atau 106,22 persen;

Sasaran 2 : Terlaksananya kegiatan operasional Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 106,42 % atau 118,24 persen;
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Ketatausahaan pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 94,00 % atau 104,00 persen;

Sasaran 3 : Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi Kesehatan Mata di Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Kabupaten/Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 40 % dan terealisasi sebesar 5.26 % atau 14 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Screening dan Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 41,27 % atau 45,86 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 672.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 643.303.405,00 atau 95,72 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 672.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 643.303.405,00 atau 95,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan** anggaran sebesar Rp. 2.180.902.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.946.438.853,00 atau 89,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.238.188.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.086.359.116,00 atau 87,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana yang tersedia (paket) dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 942.714.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 860.079.737,00 atau 91,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana yang terpelihara (paket) dengan target sebesar 4 Paket/Unit dan realisasi sebesar 4 Paket/Unit. (100 %)
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan** anggaran sebesar Rp. 721.199.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 642.300.697,00 atau 89,06 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 - 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 209.699.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 206.962.597,00 atau 98,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kegiatan Konsultasi (kali) dengan target sebesar 50 Kali dan realisasi sebesar 147 Kali. (294 %)
 - 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 511.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 435.338.100,00 atau 85,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM dengan target sebesar 180 Orang dan realisasi sebesar 180 Orang. (100 %)
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal (orang) dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (500 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 179.762.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.893.900,00 atau 75,04 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 42.373.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.597.300,00 atau 65,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan [RKA, Renja, RBA, dan DPA] yang tersusun (dokumen) dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 12.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.261.800,00 atau 18,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan [LPPD, Lap. Kinerja, LKPJ] yang tersusun (dokumen) dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokument. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 107.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 88.420.000,00 atau 82,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Update database perangkat daerah (paket) dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.752.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.614.800,00 atau 93,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen pelaporan keuangan (dokumen) dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokument. (100 %)
- 5) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.940.295.813,00 atau 97,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.940.295.813,00 atau 97,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pemenuhan/ pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 6 Paket / Unit dan realisasi sebesar 6 Paket / Unit. (100 %)
- 6) **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 49.853.856.273,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.246.786.625,00 atau 90,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 90 % dan realisasi 106,42 %. (118,24 %)
 - Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 80,98 %. (95.27 %)

- Indikator Program % indikator SPM yg mencapai target dengan target 90 % dan realisasi 95,60 %. (106,22 %)
- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 90 dan realisasi 80 . (88,88 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 49.853.856.273,42 dan terealisasi sebesar Rp. 45.243.334.125,00 atau 90,75%.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.354.701.902,00 atau 87,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.354.701.902,00 atau 87,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Alat Kesehatan [sesuai menu DAK] yang diadakan (paket) dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Penentuan spesifikasi teknis beberapa kegiatan dan alat kedokteran membutuhkan proses cukup panjang.
2. Pencairan dana DAK tahun 2019 dilakukan dengan metode Sekaligus. Hasil koordinasi dengan semua RS pada Bidang Kesehatan, BPKAD dan KPPN, dana akan ditransfer sekaligus ketika semua kontrak bidang sudah BAST. Sehingga baru dapat diserap pada TW IV tahun 2019.
3. Beberapa indikator program Fungsional baru dapat dilakukan pengukuran pada akhir tahun. Seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan pengukuran Standar Pelayanan Minimal.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi internal dengan rekonsiliasi rutin per bulan, antara bagian perencanaan, pengadaan dan pengelola keuangan UPT RSMM Jawa Timur.
2. Meningkatkan koordinasi dan advokasi lintas program, seperti 5 RS dan 12 UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta KPPN dan BPKAD Provinsi Jawa Timur terkait proses pencairan dana DAK tahun 2019.
3. Mengupayakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan standar pelayanan minimal dilakukan rutin per bulan menggunakan aplikasi kepuasan touch screen pada setiap instalasi dan unit pelayanan.

e. Penghargaan Nasional

-

2.13. RUMAH SAKIT PARU SURABAYA

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Paru Surabaya Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas	Presentase capaian SPM sesuai standard	85 %	75 %	88,24
	Cost Recovery Rate (CRR)	32,23 %	60,05 %	186,32
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	77,30 %	96,63
Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard	85 %	86 %	101
Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya	Angka keberhasilan pengobatan TB (succes rate)	81 %	75,8 %	93,58
	Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	80 %	84,50 %	105,63

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Paru Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Presentase capaian SPM sesuai standard pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 75 % atau 88,24 persen;
- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 32,23 % dan terealisasi sebesar 60,05 % atau 186,32 persen;
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 77,30 % atau 96,63 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 86 % atau 101 persen;

Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Angka keberhasilan pengobatan TB (succes rate) pada tahun 2019 dengan target sebesar 81 % dan terealisasi sebesar 75,8 % atau 93,58 persen;
- Indikator Sasaran Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate) pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 84,50 % atau 105,63 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 458.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 418.507.658,00 atau 91,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 80 % dan realisasi 75 %. (93.75 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 458.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 418.507.658,00 atau 91,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase pegawai yang puas terhadap pelayana Perkantoran dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 75 %. (93,75 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 855.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 783.266.437,00 atau 91,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 725.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 683.306.836,00 atau 94,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 4 Paket/Unit dan realisasi sebesar 4 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.959.601,00 atau 76,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 13 Paket/Unit dan realisasi sebesar 13 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 179.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 154.332.506,00 atau 85,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.099.781,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 12 Kali dan realisasi sebesar 12 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 69.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.232.725,00 atau 63,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 10 orang dan realisasi sebesar 13 orang. (130 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal dengan target sebesar 5 orang dan realisasi sebesar 6 orang. (120 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 10.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.211.334,00 atau 30,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 6.235.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.317.764,00 atau 37,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun dengan target sebesar 10 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (70 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 571.870,00 atau 39,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 35 Dokumen dan realisasi sebesar 27 Dokumen. (77,14 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Update database perangkat daerah dengan target sebesar 12 paket dan realisasi sebesar 12 . (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 321.700,00 atau 32,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 5) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 732.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 144.872.000,00 atau 19,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai standar pelayanan dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 732.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 144.872.000,00 atau 19,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah alat kesehatan dengan target sebesar 2 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (50 %)

- 6) **Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 20.766.371.436,46 dan terealisasi sebesar Rp. 12.330.851.339,00 atau 59,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 32,25 % dan realisasi 36,30 %. (109,79 %)
- Indikator Program indeks kepuasan masyarakat dengan target 84 % dan realisasi 78,58 %. (93,55 %)
- Indikator Program Presentase indikator SPM dengan target 90 % dan realisasi 85,40 %. (94,89 %)
- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Capaian standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 90 % dan realisasi 85,40 %. (94,89 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 20.766.371.436,46 dan terealisasi sebesar Rp. 12.330.851.339,00 atau 59,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Bed Occupancy Ratio (BOR) dengan target sebesar 55 dan realisasi sebesar 16,15 . (29,36 %)
- Average Length Of Stay (ALOS) dengan target sebesar 5 hari dan realisasi sebesar 5 hari. (100 %)
- Turn Over Internal (TOI) dengan target sebesar 3 hari dan realisasi sebesar 21 hari. (47,62 %)
- Bed Turn Over (BTO) dengan target sebesar 36 kali dan realisasi sebesar 15,10 kali. (41,94 %)

- Net Death Rate (NDR) dengan target sebesar 25 % dan realisasi sebesar 24,17 %. (28,18 %)
- Gross Death Rate (GDR) dengan target sebesar 45 % dan realisasi sebesar 52,62 %. (117 %)
- Rata-rata kunjungan poliklinik per hari dengan target sebesar 200 pasien dan realisasi sebesar 98 pasien. (49 %)

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.895.813.623,00 atau 94,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 100 dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Penyediaan / peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.895.813.623,00 atau 94,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pemenuhan / pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 7 jenis dan realisasi sebesar 7 jenis. (100 %)
- Jumlah gedung di rehabilitasi / pelihara dengan target sebesar 2 unit dan realisasi sebesar 2 unit. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Capaian PAD RS Paru Surabaya pada Tahun 2019 hanya mencapai Rp.11.432.311.410,90 dari target Rp.19.000.000.000,- atau tercapai 60,17%. Hal ini disebabkan karena Kunjungan pasien turun dari 44.163 pada tahun 2018 menjadi 24.222 pada tahun 2019 atau turun 45,15%. Hal ini disebabkan karena ada kebijakan rujukan on line BPJS sehingga RS Paru tidak menerima rujukan pasien non paru karena RS Paru Surabaya adalah rumah sakit khusus bukan rumah sakit umum.

Solusi :

1. Prioritas belanja adalah pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit

e. Penghargaan Nasional

-

2.14. RUMAH SAKIT MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya dalam rangka keselamatan dan kepuasan pasien
2. .Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya
3. Meningkatkan kualitas manajemen RS yang akuntabel dan transparan.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Mohammad Noer
Pamekasan Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3.23 indeks	3.23 indeks	100
	Cost Recovery Ratio (CRR)	54%	46%	85,2
	Persentase evaluasi SPM yang mencapai target	68%	82,7%	121,6

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Mohammad Noer Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien

bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya., ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 3.23 indeks dan terealisasi sebesar 3.34 indeks atau 103.4 persen;

Indeks kepuasan masyarakat dimana survei dilakukan pada pasien yang berobat di rumah sakit, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berkesinambungan dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang juga sudah tercapai dari target.

- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 54 persen dan terealisasi sebesar 46 persen atau 85,2 persen; Akibat tidak tercapainya target CRR RSUD Mohammad Noer Pamekasan dikarenakan plafon anggaran terbesar yang diterima RSUD Mohammad Noer Pamekasan bersumber dana subsidi (Pajak Rokok) dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan tanah yang belum bisa terserap sampai pada akhir tahun anggaran 2019

- Indikator Sasaran Persentase evaluasi SPM yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 68 persen dan terealisasi sebesar 82,7 persen atau 121,6 persen;

Evaluasi standar pelayanan minimal yang dilakukan berdasarkan observasi dan tanya jawab langsung kepada masing-masing unit jenis pelayanan (sebanyak 21 jenis pelayanan) sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berkesinambungan dengan indeks kepuasan masyarakat rumah sakit yang juga sudah tercapai dari target.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 245.252.005,00 dan terealisasi sebesar Rp. 242.176.389,00 atau 98,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 245.255.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 242.176.389,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (persen %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.765.044,00 atau 91,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.765.044,00 atau 91,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (paket/unit) dengan target sebesar 6 Paket/Unit dan realisasi sebesar 6 paket/unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan target sebesar 0 Paket/Unit dan realisasi sebesar 0 . (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 286.213.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 283.986.146,00 atau 99,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 277.413.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 275.386.146,00 atau 99,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan target sebesar 400 Kali dan realisasi sebesar 460 persen. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,00 atau 97,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 2 kegiatan. (100 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 226.488.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 193.455.599,00 atau 85,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.553.500,00 atau 94,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.638.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.309.700,00 atau 90,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 219.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.397.199,00 atau 85,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengadaan prasarana RS dengan target sebesar 42 unit dan realisasi sebesar 42 unit. (100 %)
 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.195.200,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 56.380.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 6.228.070.053,00 atau 11,05 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase pemenuhan sarana prasarana termasuk alat kedokteran RS dengan target 90 % dan realisasi 85 %. (94 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.560.784.053,00 atau 98,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jenis pengadaan alat Kedokteran dengan target sebesar 35 unit dan realisasi sebesar 35 unit. (100 %)

2. Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) dengan anggaran sebesar Rp. 50.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 167.286.000,00 atau 0,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luas pengadaan tanah yang berhasil terbeli dengan target sebesar 5,5 hektar dan realisasi sebesar 5,5 hektar. (100 %)

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengadaan alat kedokteran dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)

- 6) **Program Peningkatan Pelayanan BLUD** dengan anggaran sebesar Rp. 24.035.831.353,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.218.783.990,00 atau 109,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional dengan target 85 % dan realisasi 80 %. (94,11 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 24.035.831.353,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.218.783.990,00 atau 109,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pasien yang dilayani RS dengan target sebesar 198.764 pasien dan realisasi sebesar 180.747 pasien. (90,9 %)

- 7) **Program Pembinaan Lingkungan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 14.711.716.384,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.769.736.061,00 atau 93,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dengan target 85 % dan realisasi 80 %. (94,11 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.711.716.384,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.769.736.061,00 atau 93,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengadaan alat kedokteran dengan target sebesar 316 unit dan realisasi sebesar 315 unit. (99,7 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pengadaan tanah yang belum berhasil terbeli seluas 5,5 hektar
2. Akibat tidak tercapainya target CRR RSUD Mohammad Noer Pamekasan dikarenakan plafon anggaran terbesar yang diterima bersumber dana subsidi (Pajak Rokok) dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan tanah yang belum bisa terserap sampai pada akhir tahun anggaran 2019

Solusi :

1. Perlu peran serta antar instansi terkait untuk koordinasi dan konsultasi yang perlu peran antar stakeholder
2. Target CRR yang tidak tercapai secara maksimal perlu peran serta antar pemangku kebijakan lintas sektor dalam rangka penyerapan anggaran tanah sehingga mempengaruhi penyerapan total anggaran RSUD Mohammad Noer Pamekasan.

e. Penghargaan Nasional

Tidak ada

2.15. RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM)

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal	CRR (Cost Recovery Rate)	45 %	49,13 %	109
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,20	3,26	81,46
	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	91 %	91 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart

pelayanan minimal, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran CRR (Cost Recovery Rate) pada tahun 2019 dengan target sebesar 45 % dan terealisasi sebesar 49,13 % atau 109 persen; Kenaikan biaya operasional dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan akreditasi, walaupun capaian pendapatan fungsiona mengalami peningkatan
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 3,20 dan terealisasi sebesar 3,26 atau 81,46 persen;
- Belum tersedianya antrian online dan akan direalisasikan pada tahun 2020
- Indikator Sasaran Persentase Indikator SPM yang mencapai target pada tahun 2019 dengan target sebesar 91 % dan terealisasi sebesar 91 % atau 100 persen;
- Hasil laboratorium instalasi limbah masih belum memenuhi standar dan akan diadakan perbaikan di tahun 2020 baik instalasi limbah, MOU kualitas limbah

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 897.632.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 861.950.820,00 atau 96,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 90 %. (90 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 897.632.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 861.950.820,00 atau 96,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 90 %. (112,5 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 988.214.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 910.450.288,00 atau 92,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 871.274.880,00 dan terealisasi sebesar Rp. 802.839.327,00 atau 92,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 116.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.610.961,00 atau 92,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 10 Paket/Unit dan realisasi sebesar 10 Paket/Unit. (100 %)
 - 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.039.473.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 981.911.614,00 atau 94,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 870.473.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 844.666.614,00 atau 97,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 200 Kali dan realisasi sebesar 639 kali. (319,5 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 169.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 137.245.000,00 atau 81,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 10 pegawai dan realisasi sebesar 17 pegawai. (170 %)

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 10 pegawai dan realisasi sebesar 6 pegawai. (60 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 258.091.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 252.200.825,00 atau 97,72 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 20.453.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.291.800,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 12.011.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.080.000,00 atau 92,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 219.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 214.318.500,00 atau 97,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.626.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.510.525,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.877.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.378.262.498,00 atau 89,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan, dan operasional dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.877.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.378.262.498,00 atau 89,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Obat-obatan dengan target sebesar 120 jenis dan realisasi sebesar 73 jenis. (60,83 %)
- Jumlah bahan habis pakai dengan target sebesar 50 Jenis dan realisasi sebesar 35 Jenis. (70 %)
- Jumlah kalibrasi/sertifikasi dengan target sebesar 24 Paket dan realisasi sebesar 24 Paket. (100 %)
- Jumlah bahan kimia dengan target sebesar 40 Jenis dan realisasi sebesar 25 Jenis. (62,5 %)
- Jumlah reagen dengan target sebesar 2 Jenis dan realisasi sebesar 60 Jenis. (3000 %)
- Jumlah pemenuhan/pengadaan alat kesehatan dengan target sebesar 29 Jenis dan realisasi sebesar 29 Jenis. (100 %)
- Jumlah gedung di rehabilitasi/pelihara dengan target sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit. (100 %)
- Jumlah pemenuhan pengadaan suku cadang dengan target sebesar 1 Jenis dan realisasi sebesar 1 Jenis. (100 %)

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 7.043.624.604,39 dan terealisasi sebesar Rp. 7.636.148.780,00 atau 108,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 45 % dan realisasi 36 %. (80 %)
- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 3,20 dan realisasi 3,18 . (79,5 %)
- Indikator Program % indikator SPM yg mencapai target dengan target 91 % dan realisasi 85 %. (93 %)
- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 100 % dan realisasi 90 %. (90 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 7.043.624.604,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.636.148.780,00 atau 108,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- BOR (Bed Occupancy Ratio) dengan target sebesar 45 % dan realisasi sebesar 31 %. (145 %)
- ALOS (Average Length of Stay) dengan target sebesar 6 hari dan realisasi sebesar 3-4 hari. (66,66 %)
- TOI (Turn Over Internal) dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (200 %)
- BTO (Bed Turn Over) dengan target sebesar 20 kali dan realisasi sebesar 6 kali. (30 %)
- NDR (Net Death Rate) dengan target sebesar 25 % dan realisasi sebesar 21 %. (84 %)
- GDR (Gross Death Rate) dengan target sebesar 45 % dan realisasi sebesar 32 %. (71 %)

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 2.549.500.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 2.216.709.082,00 atau 86,95 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Alat Kesehatan dengan target 4 pkt dan realisasi 4 pkt. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.549.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.216.709.082,00 atau 86,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Alat Kesehatan dengan target sebesar 4 paket dan realisasi sebesar 4 paket. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Adanya kenaikan harga obat di e-katalog
2. Pada triwulan III, ada obat yang turun tayang
3. Pada bulan Agustus-September e-katalog mengalami downtime yang mengakibatkan situs tidak dapat diakses sehingga memakan waktu proses pengadaan 1-2 bulan

Solusi :

1. Melaksanakan revisi rincian obyek pada DPA
2. Melaksanakan pembelian langsung lewat dana Fungsional

e. Penghargaan Nasional

-

2.16. AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Akademi Keperawatan Madiun Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional	Hasil Akreditasi Program Studi	B	B	100
	Persentase lulusan dengan IPK 3.00	80 %	100 %	100
	Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester	90 %	98 %	98
	Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25	1:25	1:25	100
	Persentase Kelulusan Uji Kompetensi	90 %	100 %	100
	Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja	100 %	100 %	100
Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	90 %	90 %	90
	Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal	1:100	1:100	100
	Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif	Cakupan kerjasama dengan mitra strategis	85 %	85 %	85
	Rasio dosen dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	1:2	1:2	100

Pada Tahun 2019 kinerja Akademi Keperawatan Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional, ditetapkan 6 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Hasil Akreditasi Program Studi pada tahun 2019 dengan target sebesar B dan terealisasi sebesar B atau 100 persen;
Hasil akreditasi program studi pada tahun 2019 sudah memenuhi target yaitu B

- Indikator Sasaran Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00 pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Terlaksananya evaluasi pembelajaran dan yudisium pada akhir program. Dari 99 mahasiswa, 98 mahasiswa lulus PBM dengan IPK $\geq 3,00$.
- Indikator Sasaran Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 98 % atau 98 persen;
Rerata masa studi mahasiswa 6 semester pada tahun 2019 sebesar 98% ini dikarenakan adanya peningkatan mutu dari kualitas soal ujian yang diterapkan kepada mahasiswa guna meningkatkan daya saing bagi para lulusan
- Indikator Sasaran Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25 pada tahun 2019 dengan target sebesar 1:25 dan terealisasi sebesar 1:25 atau 100 persen;
Rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2019 sama dengan terget yaitu 1:25 ini dikarenakan proses passing out UPT Akademi Keperawatan Madiun, 8 (delapan) orang dosen inpassing menjadi Widya Iswara
- Indikator Sasaran Persentase Kelulusan Uji Kompetensi pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Terlaksananya evaluasi pembelajaran dan yudisium pada akhir program. Dari 99 mahasiswa, 98 mahasiswa lulus PBM, dan 1 orang DO dikarenakan mengalami kecelakaan lalu lintas. Dari 98 mahasiswa 97 mengikuti uji kompetensi Periode II bulan Juli 2019 dengan predikat lulus 100% dan 1 orang tidak mengikuti uji kompetensi
- Indikator Sasaran Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja pada tahun 2018 maupun tahun 2019

sudah 100% karena semua mahasiswa yang telah mendapatkan pembekalan kompetensi pra kerja

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 90 persen;
Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar Indikator Sasaran Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal pada tahun 2019 dengan target sebesar 1:100 dan terealisasi sebesar 1:100 atau 100 persen;
Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap semester pada tahun 2019 sudah memenuhi target, ini disesuaikan dengan jumlah mahasiswa setiap tahunnya
- Indikator Sasaran Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah disusun

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Cakupan kerjasama dengan mitra strategis pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 85 % atau 85 persen;
Kerjasama dengan mitra strategis disesuaikan dengan jumlah lahan praktik yang digunakan untuk kegiatan praktik klinik mahasiswa
- Indikator Sasaran Rasio dosen dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan target sebesar 1:2 dan terealisasi sebesar 1:2 atau 100 persen;
Rasio dosen dengan kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2019 yaitu 1:2 ini dikarenakan proses passing out UPT Akademi Keperawatan Madiun, 8 (delapan) orang dosen inpassing menjadi Widya Iswara

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.728.151.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.522.566.074,00 atau 88,10 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 89 %. (88,10 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.728.151.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.522.566.074,00 atau 88,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 89 %. (88,10 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 365.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 313.671.395,00 atau 85,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 86 %. (85,75 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 65.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.956.713,00 atau 68,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 86 %. (68,33 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 268.714.682,00 atau 89,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 90 %. (89,57 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 547.236.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 452.531.291,00 atau 82,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 83 %. (82,69 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 501.436.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 410.577.878,00 atau 81,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 45.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.953.413,00 atau 91,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 200 pegawai dan realisasi sebesar 33 pegawai. (16,5 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 26.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.251.096,00 atau 77,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 78 %. (77,59 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.406.275,00 atau 72,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 13.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.844.821,00 atau 82,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.428.168,84 dan terealisasi sebesar Rp. 718.027.605,00 atau 68,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 85 % dan realisasi 70 %. (68,75 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.044.428.168,84 dan terealisasi sebesar Rp. 718.027.605,00 atau 68,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dengan target sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 3 keg. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Kerangka landasan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan keperawatan berdasar Perubahan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya pendidikan keperawatan sebagai konsekuensi Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah belum mendukung dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa seluruh undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah Kewenangan Pemerintah Pusat. Jaringan kerjasama institusi pendidikan tinggi milik daerah dan sponsor dengan institusi pengguna lulusan sudah dikembangkan namun belum secara optimal karena terbatasnya kewenangan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang terkait.

Solusi :

Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik, untuk memberikan advokasi terhadap para lulusan UPT Akademi Keperawatan Madiun dalam aspek leglitas kelulusan dan penyerapan lapangan kerja khususnya pada Institusi Pelayanan Kesehatan dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara bertahap bersedia melangkah menuju profesionalisme melalui bentuk-bentuk evaluasi diri, dengan melakukan perubahan instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan kualitas lulusan, sumber daya dan kemahasiswaan dengan melakukan pembekalan-pembekalan kompetensi untuk menghadapi uji kompetensi serta persaingan di pasar kerja.

Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengguna jasa lulusan baik pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan non pemerintah

Meningkatkan kapasitas sumberdaya yang ada menuju perubahan dari UPT Pendidikan Tinggi menuju UPT Pendidikan dan Pelatihan teknis Kesehatan yang memiliki rumpun terdekat dengan SDM yang ada saat ini.

e. Penghargaan Nasional

-

2.17. AKADEMI GIZI SURABAYA

a. Tujuan

- Melaksanakan upaya pendidikan tenaga kesehatan perjenjangan bidang gizi

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Akademi Gizi Surabaya Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan	Prosentase peningkatan Lulusan dengan IPK >3,5	10 %	33,33 %	333,3
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Yang Relevan	Peningkatan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti diklat	80 %	85 %	106,25
Meningkatnya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan Pencapaian Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	85 %	85 %	100
Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan lulusan	Persentase publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di jurnal nasional	30 %	30 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Akademi Gizi Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase peningkatan Lulusan dengan IPK >3,5 pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 % dan terealisasi sebesar 33,33 % atau 333,3 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan Yang Relevan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Peningkatan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti diklat pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 85 % atau 106,25 persen;

Sasaran 3 : Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Peningkatan Pencapaian Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 85 % atau 100 persen;

Sasaran 4 : Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan lulusan , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di jurnal nasional pada tahun 2019 dengan target sebesar 30 % dan terealisasi sebesar 30 % atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.424.996.500,0 dan terealisasi sebesar Rp. 1.403.764.670,00 atau 98,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.424.996.500,0 dan terealisasi sebesar Rp. 1.403.764.670,00 atau 98,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 85 %. (106 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 930.063.500,0 dan terealisasi sebesar Rp. 902.896.033,00 atau 97,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 703.063.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 680.653.767,00 atau 96,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 6 Paket/Unit dan realisasi sebesar 10 paket/unit. (167 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 227.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.242.266,00 atau 97,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 879.884.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 852.830.781,00 atau 96,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 518.404.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 495.071.044,00 atau 95,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah konsultasi dengan target sebesar 25 Kali dan realisasi sebesar 36 kali. (144 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 361.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 357.759.737,00 atau 98,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal dengan target sebesar 25 Orang dan realisasi sebesar 44 orang. (176 %)
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 54 orang. (108 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 60.705.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.423.841,00 atau 96,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.394.000,00 atau 92,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 18.005.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.125.841,00 atau 95,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.904.000,00 atau 96,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

5) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 1.048.888.838,50 dan terealisasi sebesar Rp. 981.088.535,00 atau 93,54 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)
- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 9,4 % dan realisasi 8,8 %. (94 %)
- Indikator Program % indikator SPM yg mencapai target dengan target 80 % dan realisasi 85 %. (106 %)

- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.048.888.838,5 dan terealisasi sebesar Rp. 981.088.535,00 atau 93,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dengan target sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 3 kegiatan. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, Ruang Kelas dan gedung) dibandingkan dengan standar BAN-PT sudah mencapai 80% dan belum dapat diberdayakan dengan baik untuk meningkatkan kegiatan kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang isinya antara lain menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Mei 2017 Nomor 061/9085/031.1/2017, yang isinya antara lain tentang 1). penutupan AKZI Surabaya dan AKPER Madiun milik provinsi Jawa Timur, 2) dukungan dana selama masa transisi dan 3) mengalihkan fungsi UPT pendidikan tinggi kesehatan menjadi UPT yang berkaitan dengan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keadaan tersebut maka berpengaruh terhadap penurunan PAD dan penurunan Cost Recovery Rate (CFR)
- Minimnya anggaran untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi, terutama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

Solusi :

- Membuat inovasi dan pengembangan produk pangan dan gizi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama keluarga yang mempunyai masalah gizi
- Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan instansi dan pihak lain (Instansi Pemerintah dan NGO) yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD serta meningkatkan promosi pemanfaatan aset pada masyarakat

- Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi penyelenggara pelatihan dan konseling penanganan berbagai masalah gizi baik bagi praktisi di bidang kesehatan maupun masyarakat umum

e. Penghargaan Nasional

- Penilaian Akreditasi oleh LAM-PTKes dengan Predikat B

2.18. UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI - LAWANG

a. Tujuan

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat
Murnajati - Lawang Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan Meningkatkan pemanfaatan UPT Latkesmas	Persentase pelatihan yang terakreditasi	100 %	100 %	100
	Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur	100 %	100 %	100
	Persentase kerjasama dengan mitra strategis	60 %	88 %	147
	Persentase rata-rata capaian utilitas ideal	96 %	98 %	102
Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efektif dan efisien	Skor Akreditasi Institusi	4.4	4.54	103
	Cost Recovery Rate (CRR)	68 %	97 %	142
	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai	91 %	95 %	104

Pada Tahun 2019 kinerja UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati - Lawang yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan
Meningkatnya pemanfaatan UPT Latkesmas , ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase pelatihan yang terakreditasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Seluruh pelatihan kesehatan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang terakreditasi dikarenakan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati merupakan institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi
- Indikator Sasaran Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Seluruh pelatihan kesehatan telah mendukung program pembangunan kesehatan.

- Indikator Sasaran Persentase kerjasama dengan mitra strategis pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 88 % atau 147 persen; Jumlah Instansi baik pemerintah maupun swasta yang menggunakan layanan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati semakin meningkat.
- Indikator Sasaran Persentase rata-rata capaian utilitas ideal pada tahun 2019 dengan target sebesar 96 % dan terealisasi sebesar 98 % atau 102 persen; Rata-rata capaian utilitas ideal terdiri dari Persentase Kegiatan Pelatihan, Persentase Pelatihan Kesehatan, Bed Occupancy rate (BOR) dan Seat Occupancy Rate (SOR). Adapun capaian dari masing-masing komponen utilitas ideal telah melebihi target.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efektif dan efisien, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Skor Akreditasi Institusi pada tahun 2019 dengan target sebesar 4.4 dan terealisasi sebesar 4.54 atau 103 persen; Merupakan hasil penilaian atas komponen penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Skor Akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan habis masa berlakunya pada Akhir tahun 2019.
- Indikator Sasaran Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2019 dengan target sebesar 68 % dan terealisasi sebesar 97 % atau 142 persen; Diperoleh dengan menghitung perbandingan antara pendapatan dengan belanja operasional.
- Indikator Sasaran Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai pada tahun 2019 dengan target sebesar 91 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 104 persen; Beberapa indikator yang belum tercapai adalah ketersediaan iphone dimasing-masing kamar asrama dan ketersediaan air panas.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 705.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.109.269,00 atau 95,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 84,97 %. (84,97 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 705.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.109.269,00 atau 95,57%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 87,65 %. (87,65 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 486.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.239.523,00 atau 94,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 349.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 323.734.163,00 atau 92,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 136.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.505.360,00 atau 98,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 28.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.116.120,00 atau 99,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 28.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.116.120,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 10 Kali dan realisasi sebesar 14 Kali. (140 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 12.032.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.064.350,00 atau 67,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3,785.500,00 atau 75,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 2.907.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.615.000,00 atau 89,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.663.850,00 atau 40,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 5) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** dengan anggaran sebesar Rp. 14.383.794.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.006.539.908,00 atau 41,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUD dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 14.383.794.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.006.539.908,00 atau 41,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pembangunan dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)

6) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dengan anggaran sebesar Rp. 15.715.848.019,84 dan terealisasi sebesar Rp. 17.737.957.810,00 atau 112,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Cost Recovery Rate dengan target 65 % dan realisasi 72,47 %. (111,49 %)
- Indikator Program indeks kepuasan masyarakat dengan target 80 % dan realisasi 84,97 %. (106,21 %)
- Indikator Program Capaian institusi yang terakreditasi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program % indikator SPM yg mencapai target dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.715.848.019,84 dan terealisasi sebesar Rp. 17.737.957.810,00 atau 112,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dengan target sebesar 190 kegiatan dan realisasi sebesar 226 kegiatan. (118,95 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Penyerapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (DAK) rendah dikarenakan pagu tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana hasil dari verifikasi Rencana Kerja.

Solusi :

Saran tindak lanjut untuk pelaksanaan Rencana Kerja tahun selanjutnya apabila memperoleh alokasi DAK adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan Bappeda selaku verifikator awal usulan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu memasukkan usulan di masing-masing jenis usulan sehingga apabila alokasi yang sudah ditetapkan turun, maka dalam melakukan penggeseran usulan lebih fleksibel.

e. Penghargaan Nasional

3. 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

a. Tujuan

1. Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman.
2. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan potensial.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.	Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis dalam sistem jaringan jalan primer.	61.96 %	62.32 %	100,58

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis dalam sistem jaringan jalan primer. pada tahun 2019 dengan target sebesar 61.96 % dan terealisasi sebesar 62,32 % atau 100,58 persen;

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan ini adalah dilaksanakan dengan peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalur lalu lintas sekaligus meningkatkan daya dukung struktur jalan melalui kegiatan Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Provinsi sepanjang 38,38 km.
2. Pelaksanaan penggantian jembatan di 5 (lima) lokasi dengan duplikasi jembatan maupun penggantian struktur dan pelebaran jembatan.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** Dengan Anggaran Sebesar Rp. 5.654.804.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.978.659.540,00 atau 88,04 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.654.804.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.978.659.540,00 atau 88,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 88 %. (88 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 15.019.728.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.186.733.388,00 atau 94,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 9.766.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.277.838.747,00 atau 95,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia (unit/buah) dengan target sebesar 12 Unit/Buah dan realisasi sebesar 12 Unit/Buah. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.253.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.908.894.641,00 atau 93,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 15 Unit/Buah dan realisasi sebesar 15 Unit/Buah. (100 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 4.613.530.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.135.190.798,00 atau 89,63 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 106.880.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.596.400,00 atau 8,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 5 kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.506.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.125.594.398,00 atau 91,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 30 pegawai dan realisasi sebesar 30 pegawai. (100 %)
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 300 pegawai dan realisasi sebesar 300 pegawai. (100 %)

- 4) Program Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 4.579.100.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.419.896.899,00 atau 96,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.906.620.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.798.409.758,00 atau 94,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 541.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 538.520.100,00 atau 99,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 1.524.868.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 1.491.685.678,00 atau 97,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 3 paket dan realisasi sebesar 3 paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 606.012.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 591.281.363,00 atau 97,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (150 %)

5) Program Pengaturan, Pengendalian Jalan Dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.344.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.656.943.179,00 atau 85,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan, dan Dokumen Lingkungan yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase ketersediaan dokumen perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Kajian Pengembangan Jaringan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 3.320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.511.657.500,00 atau 75,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen kajian pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan, dan Dokumen Lingkungan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

2. Pengembangan Data Base Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 640.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 553.547.500,00 atau 86,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Leger Jalan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

3. Pengendalian Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.516.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.363.416.742,00 atau 93,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi jalan dan jembatan dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen hasil pengendalian dan fasilitasi pemanfaatan ruang jalan dan jembatan dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan dan Jembatan dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
4. Penyiapan dan Pengolahan Data dengan anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.683.352.000,00 atau 82,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen perencanaan umum jalan dan jembatan dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)
 - Jumlah updating peremajaan dan pemeliharaan sistem manajemen jalan dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
5. Provincial Road Management System (PRMS) Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan anggaran sebesar Rp. 4.708.688.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.117.582.590,00 atau 87,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Survey Jalan dan Jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek PRMS dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan PHJD dengan target sebesar 115 buah dan realisasi sebesar 115 buah. (100 %)
6. Peningkatan Tata Kelola/Institusi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dengan anggaran sebesar Rp. 5.109.312.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.427.386.847,00 atau 86,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Peningkatan Tata Kelola/Institusi dengan target sebesar 79 buah dan realisasi sebesar 79 buah. (100 %)
 - Jumlah Kegiatan Rapat Peningkatan Tata Kelola/Institusi dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)

- Jumlah Luasan Gedung / Kantor yang direhabilitasi dengan target sebesar 300 m² dan realisasi sebesar 75 m². (25 %)

6) Program Pemenuhan Kualitas Perencanaan Dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 21.054.056.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.910.345.600,00 atau 85,07 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dimanfaatkan dengan target 6 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen. (100 %)
- Indikator Program Jumlah dokumen hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 26 Dokumen dan realisasi 26 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Perencanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan dengan anggaran sebesar Rp. 2.380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.908.615.500,00 atau 80,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen hasil perencanaan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
2. Perencanaan pembangunan dan penggantian jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 890.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 731.674.000,00 atau 82,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen hasil perencanaan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Panduan Pelaksanaan Perencanaan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 343.366.375,00 atau 95,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendukungnya dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen hasil perencanaan dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Kebijakan perencanaan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
4. Supervisi pembangunan dan rekonstruksi jalan dengan anggaran sebesar Rp. 4.935.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.336.062.720,00 atau 87,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Peningkatan Jalan dengan target sebesar 11 Dokumen dan realisasi sebesar 11 Dokumen. (100 %)
5. Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp. 7.875.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.667.782.582,00 atau 84,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Supervisi rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 dokumen. (100 %)
6. Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan Beserta Pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 396.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 347.100.619,00 atau 87,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Spesifikasi Teknis yang Dilaksanakan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti dengan target sebesar 26 dokumen dan realisasi sebesar 26 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
7. Pembinaan Perencanaan Pengawasan dan Pengembangan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 2.312.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.129.723.954,00 atau 92,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Pengembangan Teknologi Jalan dan Jembatan dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan Sosialisasi / Pelaksanaan Pembinaan Teknik dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
 - Jumlah Kajian Teknik Jalan dan Jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, dan pengembangan teknologi dengan target sebesar 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan. (100 %)

8. Supervisi pembangunan dan penggantian jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.905.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.446.019.850,00 atau 75,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Pembangunan/Penggantian Jembatan dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)

7) Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan Serta Fasilitas Pengadaan Lahan dengan anggaran sebesar Rp. 17.219.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.946.033.286,00 atau 92,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase hasil pelaksanaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 1.637.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.467.957.091,00 atau 89,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pendukung kebijakan pembangunan dan rekonstruksi jalan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pembangunan dan rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan pembangunan dan rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

2. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 401.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 332.241.140,00 atau 82,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pendukung kebijakan pembangunan dan penggantian jembatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pembangunan dan penggantian jembatan dengan

target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

3. Penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan/rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.501.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.212.945.738,00 atau 88,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen standar pengadaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan / rekonstruksi jalan dan penggantian Jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pengadaan lahan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

4. Pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan/pelebaran jalan dengan anggaran sebesar Rp. 12.679.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.932.889.317,00 atau 94,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luasan pengadaan lahan dengan target sebesar 2100 M2 dan realisasi sebesar 1976.42 M2. (94.11 %)
- Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan lahan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

8) Program Pembinaan, Evaluasi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan/Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.050.750.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.632.447.497,00 atau 90,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 6.353.878.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.104.641.268,00 atau 96,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana/kejadian alam dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 740.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 688.949.737,00 atau 93,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan monitoring hasil pelaksanaan pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan standar operasional pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana/kejadian alam dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan dokumen pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.956.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.838.856.492,00 atau 85,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen standar pengadaan pemeliharaan jalan dan Jembatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam/kejadian alam dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

9) Program Pengelolaan Peralatan Berat Dan Jembatan Bailey dengan anggaran sebesar Rp. 6.441.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.142.059.608,00 atau 95,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase ketersediaan sarana peralatan berat dan jembatan bailey yang layak operasi dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)
- Indikator Program Indeks Kepuasan terhadap pelayanan pengoperasian alat berat, jembatan bailey dan kendaraan UPT Depo Peralatan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset Peralatan/Kendaraan dengan anggaran sebesar Rp. 780.704.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 673.821.547,00 atau 86,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

2. Perencanaan, Penggunaan dan Pengendalian Alat Berat, Peralatan dan Kendaraan dengan anggaran sebesar Rp. 153.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.306.882,00 atau 62,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah alat berat, peralatan dan kendaraan yang dioperasikan untuk menunjang kegiatan Bencana Alam dan Rehab, / Pemel dengan target sebesar 424 unit dan realisasi sebesar 424 unit. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan kondisi peralatan dan kendaraan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan pemakaian peralatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat dengan anggaran sebesar Rp. 5.508.096.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.372.931.179,00 atau 97,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah alat berat, peralatan, dan jumlah kendaraan yang dipelihara dengan target sebesar 36 unit dan realisasi sebesar 36 unit. (100 %)

10) Program Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 26.445.169.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.023.615.868,68 atau 90,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang layak pakai dan memadai dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pembangunan Gedung / Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.364.721.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.507.957.267,48 atau 83,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luasan gedung / kantor yang baru dengan target sebesar 2280.91 m2 dan realisasi sebesar 1908.26 m2. (83.66 %)
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung / Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 15.080.448.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.515.658.601,20 atau 96,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Luasan gedung / Kantor yang direhabilitasi dengan target sebesar 7200 m2 dan realisasi sebesar 6930.35 m2. (96.25 %)

11) Program Peningkatan Pelayanan Dan Pengujian Laboratorium Bahan Jalan & Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.936.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.519.765.820,00 atau 91,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase monitoring dan evaluasi kualitas pekerjaan jalan dan jembatan dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase kepuasan pelayanan dan pengujian laboratorium dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase rekayasa teknologi bahan jalan dan jembatan yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pengadaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.442.544.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.367.244.000,00 atau 94,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan dengan target sebesar 22 unit dan realisasi sebesar 22 unit. (100 %)
2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat - alat laboratorium Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp. 168.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.512.700,00 atau 86,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah alat alat laboratorium kebinamargaan yang disertifikasi/ kalibrasi dengan target sebesar 65 buah dan realisasi sebesar 65 buah. (100 %)
3. Pelayanan dan Pengujian Laboratorium bahan jalan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 741.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 724.500.444,00 atau 97,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pelayanan dan pengujian dengan target sebesar 110 dokumen dan realisasi sebesar 110 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen rencana program pelayanan dan pengujian dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kualitas pekerjaan dengan target sebesar 20 dokumen dan realisasi sebesar 20 dokumen. (100 %)
4. Pengendalian Manajemen Mutu dengan anggaran sebesar Rp. 327.387.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 288.744.226,00 atau 88,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pelaksanaan manajemen mutu dengan target sebesar 20 dokumen dan realisasi sebesar 20 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen rencana program manajemen mutu dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen evaluasi penerapan manajemen mutu dengan target sebesar 8 dokumen dan realisasi sebesar 8 dokumen. (100 %)
5. Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.255.743.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.993.764.450,00 atau 88,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

12) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 513.526.609.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 429.100.069.380,52 atau 83,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Surabaya dengan target 85,50 % dan realisasi 90,74 %. (106,13 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Mojokerto dengan target 97,12 % dan realisasi 91,69 %. (94,41 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Bojonegoro dengan target 93,46 % dan realisasi 92,64 %. (99,12 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Madiun dengan target 84,36 % dan realisasi 89,41 %. (105,99 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Pacitan dengan target 90,00 % dan realisasi 99,80 %. (110,88 %)

- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Kediri dengan target 97,87 % dan realisasi 93,01 %. (95,03 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Malang dengan target 90,00 % dan realisasi 90,23 %. (100,25 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional di wilayah UPT Probolinggo dengan target 96,31 % dan realisasi 98,15 %. (101,91 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT Jember dengan target 91,38 % dan realisasi 85,74 %. (93,83 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di Wilayah UPT Banyuwangi dengan target 89,23 % dan realisasi 98,24 %. (110,10 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di Wilayah UPT Pamekasan dengan target 95,85 % dan realisasi 90,78 %. (90,78 %)

Program tersebut didukung oleh 35 kegiatan.

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 33.597.495.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.921.401.407,29 atau 83,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 101.955 Km dan realisasi sebesar 84.73 Km. (83.11 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 2 Km dan realisasi sebesar 1.66 Km. (83.11 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 5.325.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.819.152.587,00 atau 90,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 761.75 m dan realisasi sebesar 689.39 m. (90.50 %)

- Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jalan dengan target sebesar 15 m dan realisasi sebesar 13.58 m. (90.50 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.847.478.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.511.488.118,00 atau 93,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu (laporan per triwulanan) dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 30.451.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.961.177.323,00 atau 81,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 131.06 Km dan realisasi sebesar 107.43 Km. (81.79 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 3.3 Km dan realisasi sebesar 2.7 Km. (81.79 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 3.041.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.028.163.407,00 atau 66,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 263.2 m dan realisasi sebesar 175.53 m. (66.69 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)

- Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
6. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 4.467.434.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.033.420.915,00 atau 90,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 29.357.524.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.270.265.875,00 atau 89,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 125.58 Km dan realisasi sebesar 112.37 Km. (89.48 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar - Km dan realisasi sebesar - Km. (- %)
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 4.196.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.636.902.820,00 atau 86,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 2.181 m dan realisasi sebesar 1890.08 m. (86.68 %)
 - Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp.

3.523.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.275.808.188,00 atau 92,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 11.365.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.099.743.650,21 atau 97,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 82.47 Km dan realisasi sebesar 80.54 Km. (97.66 %)
- Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 0 Km dan realisasi sebesar 0 Km. (0 %)
- Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

11. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 2.621.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.360.634.960,00 atau 90,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 654.1 m dan realisasi sebesar 588.92 m. (90.04 %)
- Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 0 m dan realisasi sebesar 0 m. (0 %)
- Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

12. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 8.725.362.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.864.858.116,00 atau 90,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)

- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 26.298.678.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.523.403.375,00 atau 78,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 102.29 m dan realisasi sebesar 79.83 m. (78.04 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 2.58 Km dan realisasi sebesar 2.01 Km. (78.04 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
14. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 1.778.617.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.756.872.851,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 914.8 m dan realisasi sebesar 903.62 m. (98.78 %)
 - Panjang rehabilitasi / pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 0 m dan realisasi sebesar 0 m. (0 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
15. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 6.655.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.899.545.911,00 atau 88,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

16. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 37.481.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.880.222.298,00 atau 79,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 155.85 Km dan realisasi sebesar 124.22 Km. (80 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 10.95 Km dan realisasi sebesar 8.73 Km. (79.72 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
17. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 2.530.614.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.196.194.205,00 atau 86,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 1395 m dan realisasi sebesar 1210.62 m. (86.79 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang rehabilitasi/pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 0 m dan realisasi sebesar 0 m. (0 %)
18. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 3.172.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.981.900.082,00 atau 94,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
19. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 25.806.762.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.763.960.161,00 atau 68,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 110 Km dan realisasi sebesar 75.72 Km. (68.83 %)

- Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 6.41 Km dan realisasi sebesar 4.41 Km. (68.83 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
20. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 3.092.424.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.528.709.426,00 atau 81,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 923.35 m dan realisasi sebesar 755.03 m. (81.77 %)
 - Panjang rehabilitasi / pelebaran pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 0 m dan realisasi sebesar 0 m. (0 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
21. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 3.165.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.051.551.624,00 atau 96,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
22. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 5.126.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.729.295.280,00 atau 92,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 113.93 Km dan realisasi sebesar 105.10 Km. (92.25 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 9.7 Km dan realisasi sebesar 8.95 Km. (92.27 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

23. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 3.108.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.784.479.189,00 atau 89,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
24. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 43.890.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.122.006.805,00 atau 86,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 5.2 Km dan realisasi sebesar 4.52 Km. (86.92 %)
 - Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 191.26 Km dan realisasi sebesar 166.12 Km. (86.85 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
25. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 6.570.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.302.842.709,00 atau 95,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Rehabilitasi/ pelebaran jembatan dengan target sebesar 15 m dan realisasi sebesar 14.39 m. (95.93 %)
 - Pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 119 m dan realisasi sebesar 114.16 m. (95.93 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
26. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 4.574.566.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.354.916.187,00 atau 95,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
27. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 41.605.664.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.718.807.932,02 atau 78,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 8.72 Km dan realisasi sebesar 6.86 Km. (78.67 %)
 - Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 12 Km dan realisasi sebesar 9.44 Km. (78.64 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
28. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 5.202.716.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.545.063.179,00 atau 87,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang rehabilitasi/ pelebaran jembatan dengan target sebesar 11.87 m dan realisasi sebesar 10.37 m. (87.36 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 1244.71 m dan realisasi sebesar 1087.37 m. (87.36 %)
29. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 2.922.774.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.791.559.029,00 atau 95,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)

- Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
30. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 29.474.144.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.984.727.651,00 atau 91,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pemeliharaan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pemeliharaan berkala jalan dengan target sebesar 2.2 Km dan realisasi sebesar 2.01 Km. (91.55 %)
 - Panjang pemeliharaan rutin jalan dengan target sebesar 138.9 Km dan realisasi sebesar 127.17 Km. (91.55 %)
31. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 3.320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.120.537.201,00 atau 93,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pemeliharaan jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang rehabilitasi/ pelebaran pemeliharaan jalan dengan target sebesar 23.36 m dan realisasi sebesar 21.96 m. (93.99 %)
 - Panjang pemeliharaan rutin jembatan dengan target sebesar 835.59 m dan realisasi sebesar 785.39 m. (93.99 %)
32. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Aset, Jalan dan Jembatan Wilayah UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 6.030.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.812.203.287,00 atau 79,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan kepegawaian yang tepat waktu (laporan per triwulanan) dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan keuangan yang tepat waktu dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan aset dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

33. Pemeliharaan Jembatan Rangka Baja dan Jembatan Khusus dengan anggaran sebesar Rp. 12.017.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.604.768.365,00 atau 88,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang jembatan yang diperbaiki dengan target sebesar 500 m dan realisasi sebesar 441.23 m. (88.25 %)

34. Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Wilayah UPT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 21.284.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.270.249.042,00 atau 81,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan dengan target sebesar 0 Km dan realisasi sebesar 0 Km. (0 %)
- Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan dengan target sebesar 66.07 Km dan realisasi sebesar 53.61 Km. (81.14 %)
- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeliharaan Jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

35. Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Wilayah UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 76.898.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.593.236.225,00 atau 78,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan dengan target sebesar 12 Km dan realisasi sebesar 9.46 Km. (78.80 %)
- Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan dengan target sebesar 102 Km dan realisasi sebesar 80.37 Km. (78.80 %)
- Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeliharaan Jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

13) Program Pembangunan Dan Rekonstruksi Jalan Dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 258.191.606.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.761.685.816,35 atau 76,98 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Surabaya dengan target 92,5 % dan realisasi 52,47 %. (56,72 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Mojokerto dengan target 62,73 % dan realisasi 82,37 %. (131,31 %)

- Indikator Program persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Bojonegoro dengan target 61,11 % dan realisasi 65,73 %. (107,56 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Madiun dengan target 88,18 % dan realisasi 97,35 %. (110,40 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pacitan dengan target 58,15 % dan realisasi 59,14 %. (101,70 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Kediri dengan target 63,23 % dan realisasi 60,51 %. (95,70 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Malang dengan target 40,80 % dan realisasi 61,76 %. (151,37 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Probolinggo dengan target 28,46 % dan realisasi 62,81 %. (220,69 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Jember dengan target 44,88 % dan realisasi 55,05 %. (122,66 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Banyuwangi dengan target 21,32 % dan realisasi 59,15 %. (277,44 %)
- Indikator Program Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah UPT Pamekasan dengan target 46,95 % dan realisasi 29,28 %. (62,36 %)

Program tersebut didukung oleh 15 kegiatan.

1. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 10.375.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.795.959.148,35 atau 75,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 2 Km dan realisasi sebesar 1.5 Km. (75 %)
 - Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
2. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 32.190.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.204.000.000,00 atau 72,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 6 Km dan realisasi sebesar 4.33 Km. (72.08 %)
 - jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 24.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.215.217.470,00 atau 69,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 Km dan realisasi sebesar 2.76 Km. (69 %)
4. Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.185.464.000,00 atau 88,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan / penggantian jembatan dengan target sebesar 25.6 m dan realisasi sebesar 22.62 m. (88.36 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan /penggantian jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- Jumlah dokumen laporan pembangunan / penggantian jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
5. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 16.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.033.149.155,00 atau 78,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1.4 Km dan realisasi sebesar 1.1 Km. (78.75 %)
 - Jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
6. Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.001.515.000,00 atau 83,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan / penggantian jembatan dengan target sebesar 13.1 m dan realisasi sebesar 10.92 m. (83.35 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/pembangunan jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
7. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 14.673.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.817.302.000,00 atau 73,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan dengan target sebesar 2 Km dan realisasi sebesar 1.47 Km. (73.5% - %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - jumlah dokumen laporan pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

8. Pembangunan dan Penggantian Jembatan Wilayah UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 6.590.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.795.149.000,00 atau 72,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/rekonstruksi jembatan dengan target sebesar 41 m dan realisasi sebesar 29.83 m. (72.75 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan jembatan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jembatan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
9. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 11.965.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.052.433.000,00 atau 75,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1.781 Km dan realisasi sebesar 1.35 Km. (75.65 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
10. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 10.386.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.283.322.750,00 atau 70,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1.75 Km dan realisasi sebesar 1.23 Km. (70.12 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan pembangunan / rekonstruksi jalan dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
11. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 8.910.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.303.112.631,00 atau 81,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan dengan target sebesar 4 Km dan realisasi sebesar 3.28 Km. (81.96 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jalan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
12. Pembangunan dan penggantian Jembatan Wilayah UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.243.767.767,00 atau 80,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/ penggantian jembatan (m) dengan target sebesar 46 m dan realisasi sebesar 37.02 m. (80.49 %)
 - Jumlah dokumen data jembatan dalam rangka peningkatan/ pembangunan jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan peningkatan/ pembangunan jembatan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
13. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 13.143.938.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.274.302.565,00 atau 70,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan / rekonstruksi jalan dengan target sebesar 2 Km dan realisasi sebesar 1.41 Km. (70.56 %)
 - Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan peningkatan/rekonstruksi jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
14. Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Wilayah UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.911.673.000,00 atau 96,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pembangunan/ rekonstruksi jalan dengan target sebesar 6 Km dan realisasi sebesar 5.78 Km. (96.37 %)

- Jumlah dokumen data jalan dalam rangka pembangunan jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- Jumlah dokumen laporan peningkatan/pembangunan jalan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- Rekonstruksi jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 56.456.908.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.645.318.330,00 atau 73,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang pelebaran dan rekonstruksi jalan dengan target sebesar 10.5 Km dan realisasi sebesar 7.75 Km. (73.76 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Terdapat ruas jalan Provinsi yang rawan longsor di ruas jalan Jurusan Dengok - Bts. Kab. Pacitan (Link 139) yang berlokasi di Km Sby 226

Solusi :

Solusi penanganan yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan penanganan sementara maupun permanen sesuai karakteristik kerusakannya.
2. Untuk jangka panjang diusulkan pembangunan jalan baru Ponorogo - Pacitan yang kondisi tanahnya stabil.

e. Penghargaan Nasional

-

3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

a. Tujuan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air	Persentase pelayanan air untuk irigasi	83,8 %	83,94 %	100,17
Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, domestik, industri, perikanan dan peternakan)	Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku	88,1 %	87,84 %	99,7
Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,12 %	69,15 %	100,04
Tercapainya penurunan dampak atau kerugian di daerah rawan bencana banjir	Persentase penanganan luas daerah genangan banjir	79,79 %	74,36 %	93,19

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase pelayanan air untuk irigasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 83,8 % dan terealisasi sebesar 83,94 % atau 100,17 persen;

Hal ini disebabkan kegiatan operasi jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peran aktif masyarakat petani/HIPPA/GHIPPA/ IHIPPA dalam kegiatan operasi jaringan irigasi.

Sasaran 2 : Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, domestik, industri, perikanan dan peternakan), ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku pada tahun 2019 dengan target sebesar 88,1 % dan terealisasi sebesar 87,84 % atau 99,7 persen;

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembangunan waduk yang masih berjalan (on going). Diantaranya, Waduk Tugu Trenggalek (9,3 juta m3), Waduk Bendo Ponorogo (43,11 juta m3), Waduk Tukul

Pacitan (8,68 juta m³), Waduk Gongseng Bojonegoro (22,43 juta m³), Waduk Semantok Nganjuk (7,44 juta m³), Waduk Bagong Trenggalek (17,4 juta m³).

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka dilakukan beberapa upaya yaitu:

1. Koordinasi percepatan penyelesaian pembangunan waduk.
2. Penambahan kapasitas resapan hulu Daerah Aliran Sungai melalui pembuatan konstruksi penahan air di hulu (di atas orde 3) serta penanaman pohon.
3. Pembangunan embung/ tampungan air skala kecil.
4. Revitalisasi waduk, sungai, embung dan ranu Kewenangan Provinsi.

Sasaran 3 : Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 dengan target sebesar 69,12 % dan terealisasi sebesar 69,15 % atau 100,04 persen;

Hal ini disebabkan oleh :

- Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi berjalan sesuai dengan standar dan meningkatnya partisipasi masyarakat petani/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Meningkatnya peran serta lembaga pengelola irigasi diantaranya komisi irigasi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring pemeliharaan jaringan irigasi;
- Kegiatan fisik pemeliharaan jaringan irigasi tidak terdapat kendala, namun pada kegiatan fisik rehabilitasi jaringan irigasi terdapat kendala pada proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan konstruksi.

Sasaran 4 : Tercapainya penurunan dampak atau kerugian di daerah rawan bencana banjir, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penanganan luas daerah genangan banjir pada tahun 2019 dengan target sebesar 79,79 % dan terealisasi sebesar 74,36 % atau 93,19 persen;

Hal ini disebabkan pengurangan resiko banjir secara ideal harus dilakukan secara menyeluruh pada satu sistem DAS, akan tetapi kegiatan pengendalian banjir baru dapat dilakukan pada lokasi tebing putus, usulan masyarakat yang terdampak banjir pada alur sungai yang endapan sedimennya tinggi di lokasi - lokasi tertentu.

Untuk meningkatkan presentase penanganan luas daerah genangan banjir maka beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Konservasi di wilayah Daerah Aliran Sungai melalui penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai, pengendalian laju erosi lahan melalui pembuatan *gully plug* di Daerah Aliran Sungai, meningkatkan daya resap air pada tanah untuk mengurangi genangan air permukaan di wilayah tengah dan hilir sungai menggunakan biopori;
2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) untuk mendukung flood early warning system;
3. Perbaikan tanggul-tanggul kritis dan pengembangan infrastruktur penahan banjir;
4. Pemberdayaan komunitas masyarakat peduli sungai dan koordinasi antar lembaga.
5. perkuatan database sungai dan sistem pelaporan banjir.
6. Respon tanggap darurat maksimum 18 jam setelah laporan masuk.
7. Pengoperasian Ruang Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) yang meliputi : monitoring tinggi muka air sungai dengan AWLR dan monitoring tinggi muka air sungai secara realtime melalui CCTV.
8. Pemetaan daerah rawan banjir.

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.252.590.731,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.977.496.725,00 atau 91,54 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.252.590.731,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.977.496.725,00 atau 91,54 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 6.232.595.968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.032.571.686,00 atau 96,79 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.415.968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.328.643.086,00 atau 96,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang tersedia dengan target sebesar 19 alat dan realisasi sebesar 19 alat. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.732.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.703.928.600,00 atau 98,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 14 paket dan realisasi sebesar 14 paket. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.301.216.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.147.479.305,00 atau 93,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 101,89 %. (101,89 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.271.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.254.143.930,00 atau 98,66%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 12 kali dan realisasi sebesar 12 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.030.066.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 893.335.375,00 atau 86,73%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 157 orang. (104,67 %)

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 303 orang. (101 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 110.004.001,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.552.400,00 atau 47,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 108,33 %. (108,33 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 41.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.550.875,00 atau 47,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 15.854.001,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.492.525,00 atau 97,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (133 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 30.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.550.000,00 atau 11,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 21.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.959.000,00 atau 63,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

PROGRAM PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SUNGAI, WADUK DAN PANTAI UPT DEPO PERALATAN dengan anggaran sebesar Rp. 8.685.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.253.499.049,00 atau 83,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Volume normalisasi dengan target 250.000 m³ dan realisasi 208.788,82 m³. (83,52 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pemeliharaan Peralatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.090.654.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.700.836.000,00 atau 81,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dengan target sebesar 13 Kendaraan berat dan realisasi sebesar 14 Kendaraan berat. (107,6 %)
 - Jumlah alat berat yang dikelola dengan target sebesar 25 Alat berat dan realisasi sebesar 25 Alat berat. (100 %)
 - Jumlah mesin/pompa air yang diperbaiki dengan target sebesar 27 Mesin/Pompa Air dan realisasi sebesar 27 Mesin/Pompa Air. (100 %)
2. Normalisasi Sungai, Waduk dan Pantai dengan anggaran sebesar Rp. 6.594.556.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.552.663.049,00 atau 84,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Waduk/Embung dengan target sebesar 10 waduk/ embung dan realisasi sebesar 1 Waduk/Embung. (10 %)
 - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai dengan target sebesar 20 Sungai dan realisasi sebesar 22 Sungai. (110 %)

PROGRAM PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR dengan anggaran sebesar Rp. 543.040.463,00 dan terealisasi sebesar Rp. 536.221.547,00 atau 98,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kinerja Pengelolaan Banjir dengan target 31 % dan realisasi 31 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 - Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengamanan Pantai dengan anggaran sebesar Rp. 543.040.463,00 dan terealisasi sebesar Rp. 536.221.547,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Buku Rekapitulasi Kejadian Banjir dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Posko Banjir dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Dokumen SOP dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Peta Rawan Banjir dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

PROGRAM PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DI UPT PSDA dengan anggaran sebesar Rp. 7.131.846.063,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.392.867.999,00 atau 89,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Monitoring dan Koordinasi Penanganan Banjir pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS dengan target 6 bulan dan realisasi 6 bulan. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan.
1. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 47.951.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.806.700,00 atau 55,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Koordinasi Penanganan Banjir dan Kekeringan dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (50 %)
 - Monitoring Siaga banjir dengan target sebesar 6 Bulan dan realisasi sebesar 6 Bulan. (100 %)
 2. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.365.724,00 atau 94,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Monitoring Siaga banjir dengan target sebesar 6 Bulan dan realisasi sebesar 6 Bulan. (100 %)
 - Koordinasi Penanganan Banjir dan Kekeringan dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
 3. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 150.665.188,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.788.025,00 atau 94,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Monitoring Siaga banjir dengan target sebesar 6 Bulan dan realisasi sebesar 6 Bulan. (100 %)
 - Koordinasi Penanganan Banjir dan Kekeringan dengan target sebesar 7 Kegiatan dan realisasi sebesar 7 Kegiatan. (100 %)
 4. Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 2.509.604.230,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.210.923.100,00 atau 88,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang sungai yang dipelihara/ diamankan dengan target sebesar 1640 meter dan realisasi sebesar 427 meter. (26,04 %)
 - Jumlah sungai yang dipelihara / diamankan dengan target sebesar 6 Sungai dan realisasi sebesar 6 Sungai. (100 %)
 5. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 59.368.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.013.450,00 atau 99,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Monitoring Banjir UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan target sebesar 6 bulan dan realisasi sebesar 6 bulan. (100 %)

- Koordinasi penanganan banjir dan kekeringan dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)
6. Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.416.617.575,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.129.676.500,00 atau 79,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang sungai yang dipelihara/ diamankan dengan target sebesar 584 meter dan realisasi sebesar 372 meter. (63,69 %)
 - Jumlah sungai yang dipelihara / diamankan dengan target sebesar 4 sungai dan realisasi sebesar 3 sungai. (75 %)
7. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 41.894.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.528.000,00 atau 96,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Monitoring siaga banjir dengan target sebesar 6 bulan dan realisasi sebesar 6 bulan. (100 %)
 - Koordinasi penanganan banjir dan kekeringan dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 2 kegiatan. (100 %)
8. Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 2.105.909.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.020.064.000,00 atau 95,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang sungai yang dipelihara/ diamankan dengan target sebesar 837,9 meter dan realisasi sebesar 822,52 meter. (98,16 %)
 - Jumlah sungai yang dipelihara / diamankan dengan target sebesar 5 sungai dan realisasi sebesar 5 sungai. (100 %)
9. Monitoring Banjir UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 212.810.420,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.631.500,00 atau 87,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Koordinasi penanganan banjir dan kekeringan dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 2 kegiatan. (100 %)
 - Monitoring siaga banjir dengan target sebesar 6 bulan dan realisasi sebesar 6 bulan. (100 %)
10. Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 487.026.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.071.000,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Panjang sungai yang dipelihara/ diamankan dengan target sebesar 170 meter dan realisasi sebesar 162 meter. (96 %)

- Jumlah sungai yang dipelihara / diamankan dengan target sebesar 3 sungai dan realisasi sebesar 3 sungai. (100 %)

PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SUNGAI, WADUK DAN PANTAI UPT PSDA dengan anggaran sebesar Rp. 1.889.238.875,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.704.607.726,00 atau 90,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Normalisasi sungai dan sumber air lainnya pada wilayah kerja UPT PSDA WS dengan target 16.910 m³ dan realisasi 16.910 m³. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 71.694.085,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.003.300,00 atau 99,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang dipelihara dengan target sebesar 6 laporan dan realisasi sebesar 6 laporan. (100 %)
 - Kegiatan sidang TKPSDA WS dengan target sebesar 2 laporan dan realisasi sebesar 2 laporan. (100 %)
2. Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 932.380.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 802.303.600,00 atau 86,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang dipelihara dengan target sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 3 laporan. (100 %)
3. Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 209.871.140,00 dan terealisasi sebesar Rp. 189.712.155,00 atau 90,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang dipelihara dengan target sebesar 2 laporan dan realisasi sebesar 2 laporan. (100 %)
4. Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 675.292.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 641.588.671,00 atau 95,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sungai yang dipelihara dengan target sebesar 3 lokasi dan realisasi sebesar 3 lokasi. (100 %)

PROGRAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR dengan anggaran sebesar Rp. 3.989.254.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.752.700.790,00 atau 69,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kinerja layanan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air dengan target 33 % dan realisasi 22,77 %. (69,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset dengan anggaran sebesar Rp. 966.201.058,00 dan terealisasi sebesar Rp. 953.709.551,00 atau 98,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sosialisasi pemanfaatan SDA dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Dokumen rekomtek izin tanah dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Dokumen rekomtek izin air dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Dokumen aset/ barang Milik Daerah dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Dokumen prasertifikasi tanah dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Dokumen rekomtek WIUP/ pertambangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.675.508.045,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.460.135.515,00 atau 54,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen peringkat HIPPA dan GHIPPA dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (50 %)
 - Jumlah naskah kerjasama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah pelatihan OP partisipatif dengan target sebesar 5 kegiatan dan realisasi sebesar 3 kegiatan. (60 %)
3. Pengawasan dan Pengendalian dengan anggaran sebesar Rp. 347.544.897,00 dan terealisasi sebesar Rp. 338.855.724,00 atau 97,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Lokasi penertiban dengan target sebesar 2 lokasi dan realisasi sebesar 2 lokasi. (100 %)
 - Sosialisasi pengendalian tanah dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)

PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN HIDROLOGI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DI UPT PSDA dengan anggaran sebesar Rp. 3.201.146.658,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.112.299.736,00 atau 97,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Volume Ketersediaan Air Baku pada Wilayah Kerja UPT PSDA WS dengan target 22.200.000.000 m³ dan realisasi 19.499.691.142 m³. (87,84 %)

Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan.

1. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 39.716.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.663.900,00 atau 84,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pos duga air yang dimonitor datanya dengan target sebesar 100 unit dan realisasi sebesar 100 unit. (100 %)
 - Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ gully plug/ sumur resapan) dengan target sebesar 64 unit dan realisasi sebesar 64 unit. (100 %)
2. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.574.000,00 atau 97,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen dukungan rekomtek perijinan dan aset dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (150 %)
 - Jumlah unit konservasi air (biopori) dengan target sebesar 200 buah dan realisasi sebesar 200 buah. (100 %)
3. Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 573.504.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 553.961.647,00 atau 96,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan target sebesar 122 Buah dan realisasi sebesar 122 Buah. (100 %)
 - Pos duga air yang dimonitor datanya dengan target sebesar 12 Buah dan realisasi sebesar 12 Buah. (100 %)
 - Stasiun klimatologi yang dimonitor datanya dengan target sebesar 2 Buah dan realisasi sebesar 2 Buah. (100 %)
 - Kegiatan sidang TKPSDA WS dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 2 kegiatan. (50 %)
4. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 117.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.416.400,00 atau 91,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen dukungan rekomtek perijinan dan aset dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

5. Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 661.659.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 652.341.350,00 atau 98,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah stasiun klimatologi yang dimonitor datanya dengan target sebesar 2 Buah dan realisasi sebesar 2 Buah. (100 %)
 - Jumlah stasiun hujan yang dimonitor datanya dengan target sebesar 130 Buah dan realisasi sebesar 130 Buah. (100 %)
 - Jumlah pos duga air yang dimonitor datanya dengan target sebesar 8 Buah dan realisasi sebesar 8 Buah. (100 %)
6. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 49.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.472.500,00 atau 91,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dukungan rekomtek perijinan dan aset dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ gully plug/ sumur resapan) dengan target sebesar 250 Buah dan realisasi sebesar 250 Buah. (100 %)
7. Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 752.843.138,00 dan terealisasi sebesar Rp. 739.096.879,00 atau 98,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Stasiun hujan yang dimonitor dengan target sebesar 94 Buah dan realisasi sebesar 94 Buah. (100 %)
 - Pos duga air yang dimonitor dengan target sebesar 15 Buah dan realisasi sebesar 15 Buah. (100 %)
 - Pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan pos duga air dengan target sebesar 1 Buah dan realisasi sebesar 1 Buah. (100 %)
 - Kegiatan sidang TKPSDA wilayah Sungai Welang Pekalen dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
8. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 90.617.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.615.500,00 atau 95,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen dukungan rekomtek perijinan dan aset dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah unit konservasi air (pohon/ biopori/ gully plug/ sumur resapan) dengan target sebesar 1000 Buah dan realisasi sebesar 1000 Buah. (100 %)

9. Data dan Jaringan Hidrologi UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 764.581.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 745.162.560,00 atau 97,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Stasiun hujan yang dimonitor dengan target sebesar 68 Buah dan realisasi sebesar 68 Buah. (100 %)
 - Pos duga air yang dimonitor dengan target sebesar 13 Buah dan realisasi sebesar 13 Buah. (100 %)
 - Stasiun klimatologi yang dimonitor dengan target sebesar 2 Buah dan realisasi sebesar 2 Buah. (100 %)
 - Jumlah pembangunan/ perbaikan/ pemeliharaan pos duga air dengan target sebesar 1 Buah dan realisasi sebesar 1 Buah. (100 %)
10. Pemanfaatan dan Pengawetan Sumber Daya Air UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.995.000,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Dokumen dukungan rekomtek perijinan dan aset dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

PROGRAM HIDROLOGI, PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR dengan anggaran sebesar Rp. 1.292.740.244,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.275.469.729,00 atau 98,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kinerja layanan data dan informasi sumber daya air dengan target 29 % dan realisasi 29 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Hidrologi dan Kualitas Air dengan anggaran sebesar Rp. 713.405.243,00 dan terealisasi sebesar Rp. 702.751.280,00 atau 98,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah software dengan target sebesar 2 Software dan realisasi sebesar 2 Software. (100 %)
 - Jumlah desiminasi dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Publikasi data hidrologi dengan target sebesar 9 Buku dan realisasi sebesar 9 Buku. (100 %)
2. Sistem Informasi Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 579.335.001,00 dan terealisasi sebesar Rp. 572.718.449,00 atau 98,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Operasional web OPD dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)

- Rapat kerja dengan target sebesar 1 bulan dan realisasi sebesar 1 bulan. (100 %)
- Bintel dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)

PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR dengan anggaran sebesar Rp. 2.633.076.756,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.966.475.438,00 atau 74,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program kinerja perencanaan sumber daya air sesuai kewenangan dengan target 39 % dan realisasi 31 %. (79,49 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Perencanaan Umum Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 342.312.046,00 dan terealisasi sebesar Rp. 333.688.790,00 atau 97,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen Renja 2020 dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Dokumen Renstra 2019 – 2023 dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Tata Pengaturan Sumber Daya Air Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 315.511.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 274.601.060,00 atau 87,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan Rapat Paripurna dan Komisi Dewan SDA dengan target sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 2 Laporan. (100 %)
3. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 1.975.252.960,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.358.185.588,00 atau 68,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen desain sungai dengan target sebesar 1 buah dan realisasi sebesar 1 buah. (100 %)
 - Dokumen desain irigasi dengan target sebesar 5 buah dan realisasi sebesar 3 buah. (60 %)

PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI dengan anggaran sebesar Rp. 2.720.827.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.559.429.001,00 atau 94,07 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kinerja pengelolaan jaringan irigasi dengan target 45 % dan realisasi 45 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Eksploitasi jaringan irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 683.503.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 643.160.655,00 atau 94,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaporan data operasi dengan target sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 3 laporan. (100 %)
 - Laporan Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
 - Dokumen Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Tersier dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 566.133.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.320.270,00 atau 95,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kegiatan lomba Petugas Irigasi dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Pembinaan SDM Pengelola Irigasi dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 565.117.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.984.568,00 atau 95,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Paket PAI dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
 - Laporan data pemeliharaan dengan target sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 3 laporan. (100 %)
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 415.783.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 374.848.508,00 atau 90,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kegiatan Workshop DAK/Rehabilitasi JI dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Kegiatan Evaluasi Pelaporan DAK dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Laporan data rehabilitasi dengan target sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 3 laporan. (100 %)
5. Pembinaan Irigasi Partisipatif (IPDMIP) dengan anggaran sebesar Rp. 490.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 462.115.000,00 atau 94,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Terbentuknya Pedoman Teknis Utama dengan target sebesar 1 pedoman dan realisasi sebesar 1 pedoman. (100 %)

- Terselenggaranya Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses dengan target sebesar 1 lokasi dan realisasi sebesar 1 lokasi. (100 %)
- Tersedianya data RP2I dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
- Terselenggaranya Kampanye Efisiensi Air dengan target sebesar 1 video dan realisasi sebesar 1 video. (100 %)

PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI UPT PSDA dengan anggaran sebesar Rp. 69.232.854.404,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.591.342.293,80 atau 78,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jaringan irigasi dalam kondisi baik pada Wilayah kerja UPT PSDA WS dengan target 70 % dan realisasi 55 %. (78,57 %)

Program tersebut didukung oleh 37 kegiatan.

1. Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 1.381.648.372,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.333.283.698,00 atau 96,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan operasi DI dengan target sebesar 7 Laporan dan realisasi sebesar 7 Laporan. (100 %)
 - Jumlah Laporan AKNOP DI dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. (100 %)
2. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 1.445.089.588,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.375.414.875,00 atau 95,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Jaringan Irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 5 Jaringan Irigasi dan realisasi sebesar 5 Jaringan Irigasi. (100 %)
 - Panjang Jaringan Irigasi dengan target sebesar 700 Meter dan realisasi sebesar 2052,1 Meter. (293,1 %)
3. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 866.500.516,00 dan terealisasi sebesar Rp. 735.429.090,00 atau 84,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan operasi DI dengan target sebesar 20 Laporan dan realisasi sebesar 20 Laporan. (100 %)
 - Laporan AKNOP DI dengan target sebesar 24 Laporan dan realisasi sebesar 24 Laporan. (100 %)

4. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 2.273.625.975,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.965.251.077,00 atau 86,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 1100 Meter dan realisasi sebesar 1309,82 Meter. (119,0 %)
 - Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 6 Jaringan Irigasi dan realisasi sebesar 6 Jaringan Irigasi. (100 %)
 - Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 1 Buah dan realisasi sebesar 4 Buah. (400 %)
5. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 1.220.070.189,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.022.992.370,00 atau 83,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100 %)
6. Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 1.868.001.352,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.810.685.820,00 atau 96,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Laporan operasi DI dengan target sebesar 7 Laporan dan realisasi sebesar 7 Laporan. (100 %)
 - Laporan AKNOP daerah irigasi dengan target sebesar 5 Laporan dan realisasi sebesar 5 Laporan. (100 %)
7. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas dengan anggaran sebesar Rp. 1.636.885.578,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.589.803.012,81 atau 97,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 835,20 Meter dan realisasi sebesar 535,58 Meter. (64,12 %)
 - Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 5 Jaringan Irigasi dan realisasi sebesar 5 Jaringan Irigasi. (100 %)
8. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 3.542.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.507.282.743,00 atau 99,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 19 laporan dan realisasi sebesar 19 laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan AKNOP DI dengan target sebesar 19 laporan dan realisasi sebesar 19 laporan. (100 %)

9. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 1.911.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.797.895.092,00 atau 94,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 7 Jl dan realisasi sebesar 7 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 2550 Meter dan realisasi sebesar 1.313,60 Meter. (194,12 %)
10. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 1.839.914.930,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.714.741.328,00 atau 93,20 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 6 Laporan dan realisasi sebesar 7 Laporan. (116 %)
11. Operasi Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 1.539.706.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.510.056.229,00 atau 98,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 39 Laporan dan realisasi sebesar 39 Laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan AKNOP DI dengan target sebesar 39 Laporan dan realisasi sebesar 39 Laporan. (100 %)
12. Pemeliharaan Jaringan Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo dengan anggaran sebesar Rp. 3.352.913.330,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.006.234.358,00 atau 89,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 700 Meter dan realisasi sebesar 2004 Meter. (286,2 %)
 - Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 13 Jl dan realisasi sebesar 13 Jl. (100 %)
13. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 2.310.739.156,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.263.755.908,00 atau 97,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 13 Laporan dan realisasi sebesar 13 Laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan AKNOP DI dengan target sebesar 13 Laporan dan realisasi sebesar 13 Laporan. (100 %)
14. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.664.573,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.221.817.550,00 atau 95,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 7 Jl dan realisasi sebesar 7 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 1268 meter dan realisasi sebesar 992,20 meter. (78,25 %)
15. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Sampean Setail dengan anggaran sebesar Rp. 1.180.469.878,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.123.848.503,00 atau 95,20 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan. (100 %)
16. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.924.022.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.906.582.170,00 atau 99,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 13 laporan dan realisasi sebesar 13 laporan. (100 %)
 - Jumlah Laporan AKNOP DI dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
17. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.016.115.075,00 dan terealisasi sebesar Rp. 951.987.500,00 atau 93,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 4 Jl dan realisasi sebesar 4 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 1050 Meter dan realisasi sebesar 660,50 Meter. (62,90 %)
18. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru dengan anggaran sebesar Rp. 689.297.830,00 dan terealisasi sebesar Rp. 675.850.812,00 atau 98,05 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan. (100 %)
19. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 1.980.796.556,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.953.856.460,00 atau 98,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan AKNOP DI dengan target sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 2 Laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 2 Laporan. (100 %)

20. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 3.391.277.196,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.338.915.700,00 atau 98,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 13 Jl dan realisasi sebesar 13 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 2436 Meter dan realisasi sebesar 4194 Meter. (172,16 %)
21. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Welang Pekalen dengan anggaran sebesar Rp. 720.547.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 670.026.802,99 atau 92,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. (100 %)
22. Operasi Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 2.093.774.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.070.952.922,00 atau 98,91 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan AKNOP DI dengan target sebesar 5 Laporan dan realisasi sebesar 5 Laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan operasi DI dengan target sebesar 5 DI dan realisasi sebesar 5 DI. (100 %)
23. Pemeliharaan Jaringan Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 1.286.074.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.234.061.328,00 atau 95,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 5 Jl dan realisasi sebesar 5 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan target sebesar 800 Meter dan realisasi sebesar 1.452 Meter. (181,50 %)
24. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan UPT PSDA WS Kepulauan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 564.163.510,00 dan terealisasi sebesar Rp. 544.982.140,00 atau 96,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan ketatalaksanaan dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. (100 %)
25. Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Brantas (IPDMIP) dengan anggaran sebesar Rp. 2.124.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.438.938.000,00 atau 67,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 3 Jl dan realisasi sebesar 3 Jl. (100 %)

- Panjang saluran yang direhabilitasi dengan target sebesar 1200 Meter dan realisasi sebesar 2088 Meter. (174 %)
 - Jumlah bangunan yang di rehabilitasi dengan target sebesar 4 Buah dan realisasi sebesar 4 Buah. (100 %)
26. Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Bengawan Solo (IPDMIP) dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.090.663.700,00 atau 54,53 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 663 Meter dan realisasi sebesar 663 Meter. (100 %)
27. Pembinaan Irigasi Partisipatif Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (IPDMIP) (1 paket pekerjaan putus kontrak) dengan anggaran sebesar Rp. 10.468.234.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.230.757.929,00 atau 59,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (50 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 60.000 meter dan realisasi sebesar 6.829 meter. (11,38 %)
28. Pembinaan Irigasi Partisipatif UPT PSDA WS Bondoyudo Baru (IPDMIP) (gagal lelang) dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.270.400,00 atau 2,26 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1 Jl dan realisasi sebesar 0 Jl. (0 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1000 Meter dan realisasi sebesar 0 Meter. (0 %)
29. Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Malang UPT PSDA WS Brantas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 832.725.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 647.921.650,00 atau 77,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1 Jl dan realisasi sebesar 1 Jl. (100 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 500 Meter dan realisasi sebesar 971,1 Meter. (194,22 %)
30. Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Surabaya UPT PSDA WS Brantas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.679.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 863.992.800,00 atau 82,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 1 Jl. (50 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 350 Meter dan realisasi sebesar 350 Meter. (100 %)
31. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Bengawan Solo (DAK) (putus kontrak) dengan anggaran sebesar Rp. 981.815.940,00 dan terealisasi sebesar Rp. 162.936.740,00 atau 16,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1 Jl dan realisasi sebesar 0 Jl. (0 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 311 Meter dan realisasi sebesar 0 Meter. (0 %)
32. Rehabilitasi Daerah Irigasi Koordinator Wilayah Madiun UPT PSDA WS Bengawan Solo (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 821.128.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 394.260.033,00 atau 48,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 1 Jl. (50 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 400 Meter dan realisasi sebesar 26,1 Meter. (6,525 %)
33. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Sampean Setail (DAK) (gagal lelang) dengan anggaran sebesar Rp. 1.282.707.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.439.600,00 atau 1,2%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 0 Jl. (0 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1.350 Meter dan realisasi sebesar 0 Meter. (0 %)
34. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 407.192.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 312.978.700,00 atau 76,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 1 Jl. (50 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 600 Meter dan realisasi sebesar 510 Meter. (85 %)
35. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Welang Pekalen (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.442.746.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.333.314.000,00 atau 92,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 1 Jl. (50 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 355 meter dan realisasi sebesar 343 meter. (96,62 %)
36. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Kepulauan Madura (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 990.081.570,00 dan terealisasi sebesar Rp. 853.268.100,00 atau 86,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 4 Jl dan realisasi sebesar 3 Jl. (75 %)
 - Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 1100 meter dan realisasi sebesar 1372 meter. (124,73 %)
37. Rehabilitasi Daerah Irigasi UPT PSDA WS Brantas (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.012.746.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.841.893.153,00 atau 91,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Jl dan realisasi sebesar 2 Jl. (100 %)
 - Panjang saluran yang direhabilitasi dengan target sebesar 600 meter dan realisasi sebesar 976,5 meter. (162,75 %)
 - Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi dengan target sebesar 2 Buah dan realisasi sebesar 3 Buah. (150 %)

PROGRAM OPERASI, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SUNGAI, WADUK DAN PANTAI dengan anggaran sebesar Rp. 2.312.326.537,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.184.758.094,00 atau 94,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kinerja Pengelolaan Sungai, Waduk dan Pantai dengan target 27 % dan realisasi 27 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Operasi Sungai, Waduk dan Pantai dengan anggaran sebesar Rp. 1.789.624.349,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.672.989.559,00 atau 93,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen pedoman operasi SWP dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Inventarisasi dan AKNOP Sungai dengan target sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 3 kegiatan. (100 %)
 - Dokumen SOP operasi sungai dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- Kegiatan Rapat Alokasi Air Tahunan (RAAT) dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Kegiatan Sosialisasi KMPS dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Pengukuhan dan Sidang Pleno TKPSDA WS Bondoyudo Bedadung dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
2. Pemeliharaan Sungai, Waduk dan Pantai dengan anggaran sebesar Rp. 522.702.188,00 dan terealisasi sebesar Rp. 511.768.535,00 atau 97,91 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Kegiatan Monev Rehabilitasi SWP dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)
 - Dokumen pedoman pemeliharaan SWP dan pengawasan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Kegiatan rapat kerja sungai dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Kegiatan verifikasi RAB SWP dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Daya dukung, Fungsi Sumber Daya Air, Daya Tampung Air dan Sumber-sumber Air yang terus menurun.
2. Pengelolaan Irigasi yang belum optimal.
3. Masih terdapat daerah rawan bencana banjir.

Solusi :

1. Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber daya Air, melalui penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air serta melakukan pengendalian dan pengawasan Aset Sumber Daya Air.
2. Meningkatkan kualitas data dan koordinasi lintas sektor melalui :
 - Pemantauan pos hujan dan duga air yang mendukung flood early warning system dan pengumpulan data;
 - Pembuatan mini lab kualitas air untuk assesmen cepat;
 - Relokasi pos hujan berbasis hasil rasionalisasi hidrologi;
 - Peningkatan kualitas data dan peningkatan kemampuan analisa alokasi air.
3. Penambahan kapasitas resapan di hulu Daerah Aliran Sungai melalui pembuatan konstruksi penahan air di hulu (di atas Orde 3) serta penanaman pohon.
4. Peningkatan Kinerja Jaringan Irigasi melalui :

- Rehabilitasi Bangunan Utama, Pengurangan kebocoran di saluran primer dan sekunder dan perbaikan pintu air dan pembuang;
 - Pengerukan rutin saluran primer dan sekunder;
 - Pemenuhan kebutuhan tenaga Juru Pengairan di Daerah Irigasi Provinsi.
5. Optimalisasi kebutuhan air Irigasi melalui :
- Pengelolaan Irigasi partisipatif yang melibatkan P3A;
 - Pembentukan dan penguatan Komisi Irigasi di Kabupaten;
 - Percepatan pengesahan Perda Irigasi.
6. Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis melalui :
- Revitalisasi waduk, sungai, embung, ranu kewenangan provinsi;
 - Penerbitan sempadan, sertifikasi asset dan pemasangan patok batas;
 - Perbaikan tanggul dan pembuatan parapet, parapet Bio Engineering dan penanaman vetiver.
7. Peningkatan Kualitas penanganan kejadian banjir melalui :
- Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dan Koordinasi antar Lembaga;
 - Perkuatan database sungai dan system pelaporan banjir;
 - Respon tanggap darurat maksimum 18 jam setelah Laporan Masuk;
 - Pembentukan Satuan Pemantau Banjir;
 - Pengadaan Stock Bahan Banjiran Rp 1 M/UPT/Tahun;
 - Peremajaan alat berat dan pengadaan alat/bahan tanggap darurat banjir;
 - Pengoperasian Ruang Kendali Sungai;
 - Publikasi Data Sungai rawan banjir.

e. Penghargaan Nasional

- Juara III lomba TKPSDA kategori berkembang UPT PSDA WS Sampean Setail di Bondowoso.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

a. Tujuan

- Meningkatnya capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.
- Terwujudnya kepastian penyelenggaraan penataan ruang.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase kepala keluarga yang memiliki rumah	78,57 %	87,58 %	111,46
	Persentase rumah layak huni	81,17 %	98,68 %	121,57
	Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	22,15 %	18,67 %	84,29
Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah dikeluarkan	90 %	100 %	111,11

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kepala keluarga yang memiliki rumah pada tahun 2019 dengan target sebesar 78,57 % dan terealisasi sebesar 87,58 % atau 111,46 persen;
Adanya pembangunan rumah tapak sederhana di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur
- Indikator Sasaran Persentase rumah layak huni pada tahun 2019 dengan target sebesar 81,17 % dan terealisasi sebesar 98,68 % atau 121,57 persen;
- Indikator Sasaran Persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2019 dengan target sebesar 22,15 % dan terealisasi sebesar 18,67 % atau 84,29 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah dikeluarkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 111,11 persen;

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.359.702.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.258.229.146,00 atau 96,98 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.359.702.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.258.229.146,00 atau 96,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 4.324.897.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.123.866.767,00 atau 95,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.316.197.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.237.411.558,00 atau 96,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 20 Paket/Unit dan realisasi sebesar 20 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.008.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.886.455.209,00 atau 93,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 20 Paket/Unit dan realisasi sebesar 20 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.314.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.875.703.792,00 atau 93,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.546.964.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.455.362.892,00 atau 94,08%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 452.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 420.340.900,00 atau 92,92%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 70 orang dan realisasi sebesar 70 orang. (100 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 923.882.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 742.936.308,00 atau 80,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 836.132.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 665.938.308,00 atau 79,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan yang tersusun dengan target sebesar 27 Dokumen dan realisasi sebesar 27 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 87.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.998.000,00 atau 87,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

Program Penataan Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 7.256.451.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.055.037.504,00 atau 83,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Monitoring dan Evaluasi Atas IPR yang telah dikeluarkan dengan target 80 % dan realisasi 99,98 %. (124,97 %)
- Indikator Program Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR Kab/kota) dengan target 12 dokumen dan realisasi 25 dokumen. (208,33 %)
- Indikator Program Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota yang sudah mendapat izin lokasi dengan target 40 % dan realisasi 0.0 %. (0.0 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Penyusunan RTR Kawasan Strategis dengan anggaran sebesar Rp. 1.913.025.705,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.821.916.951,00 atau 95,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah RTR kawasan strategis yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Peta Dasar Rencana Rinci Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 659.193.130,00 dan terealisasi sebesar Rp. 643.211.330,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peta dasar RDTR Kabupaten/Kota dengan target sebesar 4 Peta dan realisasi sebesar 4 Peta. (100 %)
3. Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 693.347.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 513.860.407,00 atau 74,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis dengan target sebesar 12 Dokumen dan realisasi sebesar 28 Dokumen. (233,33 %)
4. Penyusunan Petunjuk Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.053.257.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.019.511.329,00 atau 96,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
5. Monitoring Evaluasi atas IPR yang Telah Dikeluarkan dengan anggaran sebesar Rp. 2.295.877.465,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.517.004.597,00 atau 66,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah monitoring dan evaluasi atas IPR yang telah dikeluarkan dengan target sebesar 7 IPR dan realisasi sebesar 44 IPR. (628,57 %)

6. Penataan Pertanahan Lintas Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 641.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.532.890,00 atau 84,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Luas pemanfaatan hamparan tanah lintas kab/kota dengan target sebesar 10 Ha dan realisasi sebesar 8.750,97 Ha. (875,097 %)

Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 11.531.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.030.723.824,00 atau 95,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Penurunan Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog), dengan target 7,82 % dan realisasi 20,70 %. (264,70 %)
- Indikator Program Angka luasan kawasan permukiman kumuh (penurunan) dengan target 884,91 Ha dan realisasi 75,50 Ha. (8,53 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.422.492.898,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen/laporan pengawasan renovasi RTLH dengan target sebesar 25 dokumen dan realisasi sebesar 25 dokumen. (100 %)

2. Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 9.081.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.865.947.315,00 atau 97,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Panjang jalan lingkungan dan/atau drainase terbangun dengan target sebesar 5.000 meter dan realisasi sebesar 9.377,32 meter. (187,54 %)

3. Penyelenggaraan Rumah Susun dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 742.283.611,00 atau 74,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jenis unit PSU rusun yang terbangun dengan target sebesar 2 Unit PSU Rusun dan realisasi sebesar 2 Unit PSU Rusun. (100 %)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis, Cepat Tumbuh dan Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp. 2.717.915.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.378.132.590,00 atau 87,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase perencanaan permukiman yang ditindaklanjuti dengan target 50 % dan realisasi 53,33 %. (106,66 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Perbatasan dengan anggaran sebesar Rp. 1.210.521.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.048.660.415,00 atau 86,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.817.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.009.976.720,00 atau 88,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)
3. Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan dengan anggaran sebesar Rp. 369.577.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 319.495.455,00 atau 86,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pendataan kawasan kumuh perkotaan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

Program **Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi** dengan anggaran sebesar Rp. 55.152.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.646.842.843,20 atau 77,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase rumah tangga dengan layanan Sanitasi yang aman dengan target 85,75 % dan realisasi 69,02 %. (80,48 %)
- Indikator Program Presentase Rumah Tangga yang dapat Pelayanan Air Bersih yang layak dengan target 90,07 % dan realisasi 77,67 %. (86,23 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Sanitasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.120.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.590.798.326,00 atau 75,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan sarana prasarana sanitasi dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah sarana prasarana sanitasi terbangun dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)
 - Jumlah dokumen pengawasan pengembangan sarana prasarana sanitasi dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

2. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air dengan anggaran sebesar Rp. 9.398.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.113.017.717,20 atau 86,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan sarana prasarana air bersih dengan target sebesar 9 dokumen dan realisasi sebesar 9 dokumen. (100 %)
 - Jumlah sarana prasarana air bersih terbangun dengan target sebesar 45 unit dan realisasi sebesar 40 unit. (88,88 %)
 - Jumlah dokumen pengawasan pengembangan sarana prasarana air bersih dengan target sebesar 9 Dokumen dan realisasi sebesar 9 Dokumen. (100 %)
3. Penyelenggaraan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Regional dengan anggaran sebesar Rp. 43.449.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.808.892.595,00 atau 75,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana prasarana air bersih dan sanitasi regional terbangun dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)
 - Jumlah dokumen pengawasan sarana prasarana air bersih dan sanitasi regional dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
4. Pembinaan Teknis dan Manajemen Penyelenggaraan Air Bersih dan Sanitasi dengan anggaran sebesar Rp. 184.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.134.205,00 atau 72,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah orang yang mendapat pelatihan sanitasi dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 83 orang. (138,33 %)
 - Jumlah orang yang mendapat pelatihan air bersih dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (166,67 %)

Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 132.607.352.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.975.126.549,25 atau 86,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Penyelenggaraan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan target 6,58 % dan realisasi 45,79 %. (695,89 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 131.478.554.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.042.548.612,25 atau 86,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan teknis bangunan gedung dengan target sebesar 67 dokumen dan realisasi sebesar 67 dokumen. (100 %)

- Jumlah gedung terbangun dengan target sebesar 49 gedung dan realisasi sebesar 49 gedung. (100 %)
 - Jumlah dokumen pengawasan dengan target sebesar 49 dokumen dan realisasi sebesar 49 dokumen. (100 %)
2. Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 820.978.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 634.261.937,00 atau 77,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
3. Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara dengan anggaran sebesar Rp. 307.819.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.316.000,00 atau 96,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 203 orang. (101,5 %)

Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 8.796.451.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.923.922.620,00 atau 90,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Layanan Informasi dan Pengujian dengan target 80 % dan realisasi 81,50 %. (101,87 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 617.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 568.200.880,00 atau 91,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah orang yang terlayani akses informasi dengan target sebesar 11.150 orang dan realisasi sebesar 121.392 orang. (1.088,71 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembinaan Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 201.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 167.796.600,00 atau 83,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah orang yang mendapat pelatihan dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)
3. Pelayanan Teknologi dan Pengujian Bidang Perumahan dan Permukiman dengan anggaran sebesar Rp. 1.121.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 954.555.725,00 atau 85,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengujian yang terlayani dengan target sebesar 100 pengujian dan realisasi sebesar 133 pengujian. (133 %)
- 4. Penataan dan Pemeliharaan Rumah Susun dengan anggaran sebesar Rp. 6.856.071.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.233.369.415,00 atau 90,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KK yang terlayani dengan target sebesar 752 KK dan realisasi sebesar 860 KK. (114,36 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih adanya luasan kawasan kumuh di perkotaan.
- Belum optimalnya penanganan kumuh squatter di perkotaan karena terkendala kewenangan pemilik lahan (bantaran sungai, PT. KAI).
- Belum optimalnya peningkatan pelayanan air minum yang layak, dan daerah rawan air.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah terutama pada TPA.
- Belum adanya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung negara.
- Belum optimalnya penyediaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, belum optimalnya evaluasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, serta belum optimalnya NSPK pemanfaatan ruang dan pemantauan pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat.
- Belum teridentifikasinya tanah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN, semua bidang tanah sudah terbagi habis berdasarkan batas administrasi sehingga di lapangan tidak ada bidang tanah yang berada di lintas Kabupaten/Kota.

Solusi :

- Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNSPSR) melalui penyediaan hunia rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
- Meningkatkan peran serta seluruh stake holder dalam upaya meningkatkan layanan air minum yang layak, air limbah yang aman serta layanan drainase dan persampahan.
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum, air limbah, drainase dan persampahan sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum, air limbah, drainase dan persampahan melalui pemberdayaan kelembagaan.
- Meningkatkan pemahaman tentang peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara.
- Mengoptimalkan peran Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar wilayah.

e. Penghargaan Nasional

-

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

5.1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. Tujuan

Meningkatkan Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan	Persentase penegakan Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur	293 kasus	270 kasus	92,15
Meningkatnya ketertiban umum masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yg ditangani	82 kasus	77 kasus	93,90
Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran	Persentase Anggota Satlinmas dan Pemadam Kebakaran yang terlatih dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, PAM Swakarsa, dan pemadam kebakaran	600 orang	850 orang	141,67

Pada Tahun 2019 kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penegakan Pelanggaran Perda Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 293 kasus dan terealisasi sebesar 270 kasus atau 92,15 persen;

Sasaran 2 : Meningkatkan ketertiban umum masyarakat , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yg ditangani pada tahun 2019 dengan target sebesar 82 kasus dan terealisasi sebesar 77 kasus atau 93,90 persen;

Sasaran 3 : Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Anggota Satlinmas dan Pemadam Kebakaran yang terlatih dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, PAM Swakarsa, dan pemadam kebakaran pada tahun 2019 dengan target sebesar 600 orang dan terealisasi sebesar 850 orang atau 141,67 persen;

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.264.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.114.585.408,00 atau 88,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.264.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.114.585.408,00 atau 88,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 5.671.028.313,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.355.857.889,00 atau 94,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.698.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.448.634.084,00 atau 93,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 6 paket/unit dan realisasi sebesar 6 paket/unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.972.428.313,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.907.223.805,00 atau 96,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 5 paket/unit dan realisasi sebesar 5 paket/unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.006.072.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.464.851.968,00 atau 93,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 420 orang dan realisasi 57 orang. (120,71 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.468.077.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.121.451.671,00 atau 85,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 150 kali dan realisasi sebesar 147 kali. (98 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.537.995.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.343.400.297,00 atau 96,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 270 Orang dan realisasi sebesar 360 Orang. (133,33 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 461.394.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.063.500,00 atau 95,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 7 Dokumen dan realisasi 7 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 16.919.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.822.300,00 atau 69,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 16.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.374.200,00 atau 61,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 61.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.265.000,00 atau 91,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 366.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 362.602.000,00 atau 98,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 2.678.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.593.585.770,00 atau 96,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target 316 kegiatan dan realisasi 409 kegiatan. (129,43 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting dengan anggaran sebesar Rp. 451.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 446.733.271,00 atau 99,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting dengan target sebesar 150 kali dan realisasi sebesar 266 kali. (177 %)
2. Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan anggaran sebesar Rp. 276.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 269.812.000,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengamanan Unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan target sebesar 44 kali dan realisasi sebesar 31 kali. (70 %)
3. Patroli wilayah trantibum dengan anggaran sebesar Rp. 1.191.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.153.196.381,00 atau 96,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Patroli wilayah trantibum dengan target sebesar 100 kali dan realisasi sebesar 102 kali. (102 %)
4. Penyelenggaraan Tibum dan tranmas dengan anggaran sebesar Rp. 759.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 723.844.118,00 atau 95,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Tibum dan tranmas dengan target sebesar 6 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (167 %)

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.720.566.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.686.784.595,00 atau 98,04 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase anggota Satlinmas yang terlatih dengan target 5 % dan realisasi 7,08 %. (141,67 %)
- Indikator Program Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap dalam Pamswakarsa dan penanggulangan bencana dengan target 600 Orang dan realisasi 850 Orang. (141,67 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 469.866.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 462.653.824,00 atau 98,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 300 Orang. (150 %)
2. Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 979.981.084,00 atau 97,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Satuan Linmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 450 Orang. (225 %)
3. Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran. dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.149.687,00 atau 97,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Satlinmas, masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran. dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 100 orang. (50 %)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda dengan anggaran sebesar Rp. 1.971.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.888.988.780,00 atau 95,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Penegakan Perda yang ditangani dengan target 15 Kegiatan dan realisasi 19 Kegiatan. (127 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penegakkan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.186.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.120.985.890,00 atau 94,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penegakkan Peraturan Daerah dengan target sebesar 10 kali dan realisasi sebesar 33 kali. (330 %)
2. Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Perda serta Perkada dengan anggaran sebesar Rp. 784.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 768.002.890,00 atau 97,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyuluhan, pengawasan dan Advokasi Perda serta Perkada dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 6 kali. (120 %)

Program Pengembangan dan pelatihan sumber daya anggota dengan anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.299.400.260,00 atau 96,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase tingkat pemahaman anggota Satpol PP setelah mengikuti Pelatihan dengan target 910 orang dan realisasi 944 orang. (137 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 680.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 654.377.950,00 atau 96,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim dengan target sebesar 690 Orang dan realisasi sebesar 760 Orang. (110 %)
2. Bimbingan teknis Aparat Satpol PP dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 283.822.380,00 atau 94,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Bimbingan teknis Aparat Satpol PP dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (100 %)
3. Pelatihan SDM dan performance PPNS se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP dengan anggaran sebesar Rp. 369.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 361.199.930,00 atau 97,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelatihan SDM dan performance PPNS se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 84 Orang. (84 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan perkada

2. Maraknya gangguan Trantibum di Jawa Timur yang disebabkan oleh Galian C, Minuman beralkohol, PMKS, Unjuk rasa yang anarkis, dan gangguan trantibum lainnya
3. Kurangnya Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan melalui deteksi dini termasuk untuk mencegah penggunaan dan penyebaran narkoba, radikalisme, terorisme dan gangguan keamanan lainnya
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
2. Pemberdayaan masyarakat guna menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasana operasional;
4. Menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bersanksi pidana secara kontinyu;
5. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan sadar hukum.

e. Penghargaan Nasional

-

6. URUSAN SOSIAL

6.1. DINAS SOSIAL

a. Tujuan

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan indikator: Persentase PMKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya.
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan indikator: Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosialnya.	1,25 %	1,25 %	100
Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	18,88 %	18,88 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Sosial yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosialnya. pada tahun 2019 dengan target sebesar 1,25 % dan terealisasi sebesar 1,25 % atau 100 persen;
 1. Karena ketepatan sasaran
 2. Adanya dukungan anggaran
 3. Adanya regulasi yang mendukung tercapainya program
 4. Adanya SDM yang kompeten
 5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. pada tahun 2019 dengan target sebesar 18,88 % dan terealisasi sebesar 18,88 % atau 100 persen;
 1. Ketepatan sasaran
 2. Adanya dukungan anggaran
 3. Adanya regulasi yang mendukung tercapainya program
 4. Adanya SDM yang kompeten
 5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 6.474.600.310,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.043.932.316,00 atau 93,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 6.474.600.310,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.043.932.316,00 atau 93,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 11.696.723.747,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.593.226.497,00 atau 90,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 7.830.427.047,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.901.838.971,00 atau 88,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.866.296.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.691.387.526,00 atau 95,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 71 Paket/Unit dan realisasi sebesar 71 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.942.925.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.507.233.190,00 atau 85,20 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.003.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 811.270.860,00 atau 80,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.939.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.695.962.330,00 atau 87,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 1.294 Orang dan realisasi sebesar 1.294 Orang. (100 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.433.726.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.248.179.863,00 atau 87,06 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 1 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 544.396.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 493.699.887,00 atau 90,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 359.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 329.401.450,00 atau 91,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 385.332.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 300.603.101,00 atau 78,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 144.448.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.475.425,00 atau 86,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 9.772.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.759.831.044,00 atau 89,63 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target 100 % dan realisasi 2062 Orang. (5,81 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.158.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.129.519.800,00 atau 97,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dengan target sebesar 1.400 Orang dan realisasi sebesar 1.400 Orang. (100 %)
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 8.349.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.497.164.244,00 atau 89,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat dengan target sebesar 903 orang dan realisasi sebesar 903 orang. (100 %)
3. Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.

264.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 133.147.000,00 atau 50,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan target sebesar 185 penyelenggara dan realisasi sebesar 185 penyelenggara. (100 %)

Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 6.867.109.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.397.271.182,00 atau 93,16 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % Keluarga Fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya dengan target 100 % dan realisasi 650 Orang. (0,02 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dengan anggaran sebesar Rp. 3.167.109.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.023.213.502,00 atau 95,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dengan target sebesar 2.143 orang dan realisasi sebesar 2.143 orang. (100 %)

2. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Klien Fakir Miskin dengan anggaran sebesar Rp. 3.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.374.057.680,00 atau 91,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Klien Fakir Miskin dengan target sebesar 800 KK dan realisasi sebesar 800 KK. (100 %)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 6.797.306.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.497.784.660,00 atau 95,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya dengan target 100 % dan realisasi 1265 Orang. (0,19 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Penanganan Lanjut Usia Telantar dengan anggaran sebesar Rp. 975.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 876.718.350,00 atau 89,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penanganan Lanjut Usia Telantar dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang. (100 %)

2. Penanggulangan dampak sosial HIV/AIDS dengan anggaran sebesar Rp. 348.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 340.027.250,00 atau 97,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penanggulangan dampak sosial HIV/AIDS dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang. (100 %)
3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dengan anggaran sebesar Rp. 943.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 922.602.910,00 atau 97,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dengan target sebesar 380 orang dan realisasi sebesar 380 orang. (100 %)
4. Pelayanan Sosial bagi Anak dengan anggaran sebesar Rp. 899.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 890.362.950,00 atau 98,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Sosial bagi Anak dengan target sebesar 185 orang dan realisasi sebesar 185 orang. (100 %)
5. Penanggulangan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.131.800,00 atau 90,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penanggulangan Tuna Sosial dan Pembinaan Eks WBP dengan target sebesar 240 orang dan realisasi sebesar 240 orang. (100 %)
6. Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.264.075.350,00 atau 98,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penanganan Korban Pasung Psikotik berbasis Keluarga dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)
7. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi klien Anak Jalanan dengan anggaran sebesar Rp. 698.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 667.517.700,00 atau 95,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi klien Anak Jalanan dengan target sebesar 20 Anak dan realisasi sebesar 20 anak. (100 %)
8. Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah dengan anggaran sebesar Rp. 524.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 515.348.350,00 atau 98,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah dengan target sebesar 75 orang dan realisasi sebesar 75 orang. (100 %)

Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 13.590.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.045.951.222,00 atau 88,63 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS penerima manfaat program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya dengan target 100 % dan realisasi 5119 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana sosial dengan anggaran sebesar Rp. 355.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 348.624.936,00 atau 98,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana sosial dengan target sebesar 90 KK dan realisasi sebesar 90 kk. (100 %)
2. Kesiap-siagaan penanggulangan bencana sosial Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.127.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.153.563.564,00 atau 54,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kesiap-siagaan penanggulangan bencana sosial Berbasis Masyarakat dengan target sebesar 800 Tagana dan realisasi sebesar 800 tagana. (100 %)
3. Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam Berbasis Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 10.738.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.178.090.160,00 atau 94,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kesiap-siagaan penanggulangan bencana alam Berbasis Masyarakat dengan target sebesar 1.600 orang dan realisasi sebesar 1.600 orang. (100 %)
4. Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 369.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 365.672.562,00 atau 99,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana alam dengan target sebesar 90 KK dan realisasi sebesar 90 KK. (100 %)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 25.687.087.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.640.524.904,00 atau 92,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan

meningkat fungsi sosialnya dengan target 100 % dan realisasi 1100 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 25.210.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.226.578.886,00 atau 92,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan target sebesar 39 orang dan realisasi sebesar 39 orang. (100 %)
2. Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 476.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 413.946.018,00 atau 86,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penanganan dan perlindungan sosial bagi orang terlantar dengan target sebesar 1.100 orang dan realisasi sebesar 1.100 orang. (100 %)

Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.764.111.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.453.836.847,00 atau 93,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS penerima manfaat program pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan fungsi sosialnya dengan target 100 % dan realisasi 1070 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 2.683.548.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.435.480.202,00 atau 90,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyuluhan dan publikasi kesejahteraan sosial dengan target sebesar 900 orang dan realisasi sebesar 900 orang. (100 %)
2. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial lanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 373.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 355.716.006,00 atau 95,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial lanjutan dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Eks Klien dengan anggaran sebesar Rp. 1.277.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.245.145.975,00 atau 97,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Eks Klien dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang. (100 %)
- 4. Integrasi Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 430.163.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.494.664,00 atau 97,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Integrasi Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan target sebesar 4 naskah dan realisasi sebesar 4 naskah. (100 %)

Program Pengembangan dan Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.882.978.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.853.424.812,00 atau 98,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PSKS yang menerima program pengembangan dan pelatihan melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.882.978.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.853.424.812,00 atau 98,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang dengan target sebesar 650 orang dan realisasi sebesar 650 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 3.226.973.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.140.719.286,00 atau 97,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Balita Terlantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 50 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 3.226.973.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.140.719.286,00 atau 97,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 3.257.855.680,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.167.150.344,00 atau 97,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 120 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 3.257.855.680,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.167.150.344,00 atau 97,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek dengan target sebesar 120 orang dan realisasi sebesar 120 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 3.209.095.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.154.021.285,00 atau 98,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 130 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 3.209.095.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.154.021.285,00 atau 98,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo dengan target sebesar 130 orang dan realisasi sebesar 130 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 3.006.412.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.928.542.750,00 atau 97,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 95 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 3.006.412.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.928.542.750,00 atau 97,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep dengan target sebesar 95 orang dan realisasi sebesar 95 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 3.925.305.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.876.897.295,00 atau 98,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 135 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 3.925.305.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.876.897.295,00 atau 98,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk dengan target sebesar 135 orang dan realisasi sebesar 135 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu dengan anggaran sebesar Rp. 2.559.169.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.524.498.245,00 atau 98,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 1200 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu dengan anggaran sebesar Rp. 2.559.169.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.524.498.245,00 atau 98,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu dengan target sebesar 1.200 orang dan realisasi sebesar 1.200 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 2.203.955.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.189.268.305,00 atau 99,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 214 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 2.203.955.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.189.268.305,00 atau 99,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang dengan target sebesar 214 orang dan realisasi sebesar 214 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 1.965.359.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.922.035.569,00 atau 97,80 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 170 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 1.965.359.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.922.035.569,00 atau 97,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dengan target sebesar 170 orang dan realisasi sebesar 170 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 3.933.949.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.867.412.002,00 atau 98,31 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 162 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 3.933.949.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.867.412.002,00 atau 98,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan dengan target sebesar 162 orang dan realisasi sebesar 162 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 3.310.919.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.248.879.354,00 atau 98,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 135 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 3.310.919.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.248.879.354,00 atau 98,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar dengan target sebesar 135 orang dan realisasi sebesar 135 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 3.537.980.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.491.343.735,00 atau 98,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 155 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 3.537.980.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.491.343.735,00 atau 98,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang dengan target sebesar 155 orang dan realisasi sebesar 155 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 3.813.419.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.755.357.490,00 atau 98,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 145 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 3.813.419.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.755.357.490,00 atau 98,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dengan target sebesar 155 lansia dan realisasi sebesar 155 lansia. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.156.073.580,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.137.193.575,00 atau 99,12 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Tubuh penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 75 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.156.073.580,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.137.193.575,00 atau 99,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dengan target sebesar 75 orang dan realisasi sebesar 75 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.220.506.240,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.207.249.500,00 atau 99,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Intelektual penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 50 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.220.506.240,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.207.249.500,00 atau 99,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.014.502.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.129.800,00 atau 98,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Rungu Wicara penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 60 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.014.502.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.129.800,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 60 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 5.211.167.840,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.133.250.299,00 atau 98,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 254 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 5.211.167.840,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.133.250.299,00 atau 98,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan dengan target sebesar 254 orang dan realisasi sebesar 254 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 4.320.844.220,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.252.881.040,00 atau 98,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Mental penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 205 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 4.320.844.220,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.252.881.040,00 atau 98,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri dengan target sebesar 205 orang dan realisasi sebesar 205 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.223.509.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.188.073.550,00 atau 98,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 100 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.223.509.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.188.073.550,00 atau 98,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 3.398.008.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.353.295.515,00 atau 98,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Jalanan Hasil Rasia penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 150 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 3.398.008.760,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.353.295.515,00 atau 98,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 2.539.131.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.476.219.720,00 atau 97,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Gelandangan Pengemis penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 100 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 2.539.131.640,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.476.219.720,00 atau 97,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.442.245.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.404.525.660,00 atau 98,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS eks Penderita Kusta penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 90 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.442.245.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.404.525.660,00 atau 98,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan target sebesar 90 orang dan realisasi sebesar 90 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri dengan **anggaran** sebesar Rp. 1.992.492.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.976.831.140,00 atau 99,21 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS eks Tuna Susila penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 180 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 1.992.492.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.976.831.140,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri dengan target sebesar 180 orang dan realisasi sebesar 180 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.564.467.240,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.281.690.715,00 atau 88,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Berhadapan Hukum dan Anak Nakal penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 170 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.564.467.240,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.281.690.715,00 atau 88,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 1.971.349.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.944.336.650,00 atau 98,63 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 170 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 1.971.349.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.944.336.650,00 atau 98,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro dengan target sebesar 170 orang dan realisasi sebesar 170 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 2.175.637.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.141.932.155,00 atau 98,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Anak Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 160 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 2.175.637.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.141.932.155,00 atau 98,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan dengan target sebesar 160 orang dan realisasi sebesar 160 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember dengan anggaran sebesar Rp. 3.260.900.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.191.838.185,00 atau 97,88 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 140 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember dengan anggaran sebesar Rp. 3.260.900.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.191.838.185,00 atau 97,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember dengan target sebesar 140 orang dan realisasi sebesar 140 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 2.460.344.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.441.477.194,00 atau 99,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 70 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 2.460.344.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.441.477.194,00 atau 99,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi dengan target sebesar 70 orang dan realisasi sebesar 70 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 2.543.792.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.511.989.400,00 atau 98,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Lanjut Usia Telantar penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 90 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 2.543.792.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.511.989.400,00 atau 98,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso dengan target sebesar 90 orang dan realisasi sebesar 90 orang. (100 %)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 6.824.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.505.467.051,00 atau 95,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya. dengan target 100 % dan realisasi 1744 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 13 kegiatan.

1. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Netra Malang dengan anggaran sebesar Rp. 304.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.704.750,00 atau 98,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Netra Malang dengan target sebesar 105 orang dan realisasi sebesar 105 orang. (100 %)
2. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 825.560.885,00 atau 97,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang dengan target sebesar 214 orang dan realisasi sebesar 214 orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 670.049.970,00 atau 89,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar dengan target sebesar 170 orang dan realisasi sebesar 170 orang. (100 %)

4. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.354.900,00 atau 99,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan dengan target sebesar 75 orang dan realisasi sebesar 75 orang. (100 %)
5. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.548.300,00 atau 98,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 60 orang. (100 %)
6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 365.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 363.726.889,00 atau 99,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)
7. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.229.900,00 atau 88,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui Balai Pelayanan PMKS Sidoarjo dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)
8. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 373.800.650,00 atau 99,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)
9. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 247.483.500,00 atau 98,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dengan target sebesar 90 orang dan realisasi sebesar 90 orang. (100 %)

10. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 845.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 838.203.500,00 atau 99,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri dengan target sebesar 180 orang dan realisasi sebesar 180 orang. (100 %)

11. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 736.679.452,00 atau 98,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)

12. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 647.692.228,00 atau 86,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro dengan target sebesar 170 orang dan realisasi sebesar 170 orang. (100 %)

13. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 652.432.127,00 atau 93,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi PMKS Melalui UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan dengan target sebesar 160 orang dan realisasi sebesar 160 orang. (100 %)

Program Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan anggaran sebesar Rp. 2.666.208.180,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.640.545.581,00 atau 99,04 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % PMKS Disabilitas Netra penerima manfaat Program Kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkat fungsi sosialnya Melalui Unit Pelaksana Teknis dengan target 100 % dan realisasi 105 Orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan anggaran sebesar Rp. 2.666.208.180,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.640.545.581,00 atau 99,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan target sebesar 105 orang dan realisasi sebesar 105 orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih banyaknya korban penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur.
2. Jumlah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Jawa Timur masih tinggi.
3. Tingginya populasi lanjut usia terlantar di Jawa Timur.
4. Masih adanya kasus korban pasung bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
5. Ketidakberdayaan SDM disabilitas mengakses dunia kerja.
6. Masih banyak kasus penelantaran pada anak.
7. Masih tingginya prosentase penduduk miskin di pedesaan.
8. Keadaan bangunan fisik dan sarana prasarana di UPT yang kurang memadai.
9. Terbatasnya daya tampung dalam panti.
10. Menurunnya nilai-nilai kesetiakawanan, kepedulian dan gotong-royong pada generasi muda.
11. Sebagian besar wilayah Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana.

Solusi :

1. Diusulkan pembangunan shelter rehabilitasi korban NAPZA dan shelter pelayanan bagi penderita ODHA, sebagai sarana menekan penyebaran dan menggali potensi positif penderita untuk dapat dikembangkan.
2. Pemberian jaminan sosial bagi lansia non potensial.
3. Penyelenggaraan penilaian Kab/Kota ramah lansia.
4. Diusulkan pembangunan rumah perawatan khusus lansia
5. Melanjutkan program pembebasan korban pasung dan optimalisasi pendampingan bagi korban pasung yang telah dibebaskan sehingga tidak kembali dipasung.

6. Menyediakan pelatihan keterampilan khusus disabilitas sesuai permintaan pasar kerja dan merangkul dunia usaha agar menyediakan kuota bagi penyandang disabilitas.
7. Fasilitasi hak dasar anak, pembinaan dan supervisi kepada LKSA/panti penyelenggara kesejahteraan sosial anak.
8. Fokus di 10 Kabupaten kantong kemiskinan, veri-vali data kemiskinan, sinergitas program pemerintah pusat, daerah dan antar OPD
9. UPT untuk peningkatan pelayanan sesuai dengan SPM bidang sosial.
10. Diusulkan pemberian bantuan keuangan bagi Kab/Kota yang memiliki shelter pelayanan PMKS untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
11. Pembinaan generasi muda melalui sarasehan, kompetisi/perlombaan tematik, pemberian santunan bagi perintis dan janda perintis serta memperkuat publikasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
12. Pembentukan Kawasan Siaga Bencana (KSB) diseluruh daerah rawan bencana, optimalisasi tagana untuk edukasi kebencanaan di lingkungan masyarakat pada daerah rawan bencana.

e. Penghargaan Nasional

1. Juara Umum Jambore Tagana Tingkat Nasional 2019
2. Predikat Stand Terfavorit Jatim Fair 2019
3. Harapan II Kategori Pelayanan Jasa Non Medis dalam Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a. Tujuan

- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja.
- Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis.
- Meningkatnya Taraf Ekonomi dan Sosial Transmigran.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	% lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan.	62 %	65.16 %	105.1
	% pertumbuhan produktivitas perusahaan	45 %	45.4 %	100.8
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	% Pencari kerja yang ditempatkan	67 %	69,77 %	104,13
Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	% kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjajian Bersama.	57 %	57 %	100
	% Perusahaan yang membayar upah melebihi UMK	32 %	32,22 %	100,69
Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.	Capaian penerapan sistem Manajemen keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (SMK3).	70 %	68,30 %	97,57
Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran	% transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	70 %	75,99 %	100,56

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran prosentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi yang ditempatkan. pada tahun 2019 dengan target sebesar 62 % dan terealisasi sebesar 65.16 % atau 105.1 persen;

Jika dibandingkan antara jumlah yang ditempatkan pada tahun 2019 sebesar 65,16 %, dan tahun 2018 sebesar 69,30%, terjadi penurunan sebesar 4,14 %. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang dilatih juga mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan dengan target penempatan tahun 2019 sebesar 62% dengan realisasi sebesar 65,16 % atau tercapai 105,09 persen. Dari jumlah 65,16 % tersebut bukan berarti sisanya menganggur , tetapi banyak yang membuka usaha sendiri/berwirausaha sesuai dengan kejuruan yang diikuti.

Indikator Sasaran Prosentase pertumbuhan produktivitas perusahaan pada tahun 2019 dengan target sebesar 45 % dan terealisasi sebesar 45.4 % atau 100.8 persen;

- Capaian Kinerja program bimbingan peningkatan produktivitas perusahaan (skala UKM) tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan (sebesar 45 %)
- Secara komparatif, capaian kinerja peningkatan produktivitas perusahaan (nilai omzet penjualan) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,55 %
- Dari sisi produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan dan sesudah bimbingan mengalami kenaikan dari Rp. 3.734.667,- tahun 2018 menjadi Rp. 5.887.268 (mengalami kenaikan sebesar 57,63 %)
- Penurunan prosentase pertumbuhan produktivitas (omzet penjualan) sebesar 1,55 % pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 diprediksi terjadi karena faktor makro ekonomi, situasi politik dalam negeri dan beberapa kebijakan dasar.
- Walaupun ada penurunan pertumbuhan produktivitas dari sisi omzet penjualan, disisi lain terjadi pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 57,63 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena perbaikan dan intervensi dengan adanya program bimbingan konsultasi yang digulirkan dengan tools

dan teknik peningkatan produktivitas tenaga kerja seperti penerapan 5S/ 5R dan lain lain

Sasaran 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran % Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 67 % dan terealisasi sebesar 69,77 % atau 104,13 persen;

Penyerapan pencari kerja menunjukkan kinerja sangat baik, secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Kondisi ini antara lain dikarenakan :

- Penempatan tenaga kerja AKL (Antar Kerja Lokal) secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan telah adanya dari komitmen stakeholder (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota / Provinsi Lain, dan Perusahaan) dalam memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan secara optimal.
- Peningkatan kapasitas dan pelayanan informasi dan konsultasi kerja melalui fasilitas website secara online, job fair, bursa kerja bulanan dan pendampingan bagi lembaga bursa di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Bursa Kerja Khusus bagi SMK dan Career Centre di Perguruan Tinggi serta optimalisasi layanan mobil informasi kerja.
- Penempatan melalui Antar Kerja Antar (AKAN) yang tercatat dalam data base penempatan setiap tahun mengalami peningkatan hal ini mengindikasikan bahwa Masyarakat JawaTimur masih tertarik bekerja di Luar Negeri dan pelayanan LPTSA P2PMI milik Pemerintah Provinsi dan LPTSA Kab/kota yang merupakan sinergitas antar lembaga pemerintah (Disnakertrans Prov, Disnaker Kab/Kota, Kepolisian, imigrasi, Dinas yang membidangi kependudukan serta BP2PMI) berjalan dengan optimal untuk melaksanakan sosialisasi bekerja keluar negeri secara prosedural dan untuk mereduksi PMI Non Prosedural.
- Peningkatan sosialisasi kegiatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) menjadikan penempatan melalui Antar Kerja Antar Daerah mengalami peningkatan dimana para pekerja

yang bekerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) pada sektor berkebunan sudah mulai terdata dalam sistem AKAD.

- Meningkatnya rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal dikarenakan adanya pembinaan kepada peserta yang dimulai dari pelatihan, pasca pelatihan dan terobosan yang berupa jalinan kemitraan dengan OPD maupun institusi lainnya. Selain itu perluasan kesempatan kerja khususnya pada sektor informal yang selama ini belum di pandang sebagai sektor utama mulai di minati oleh para generasi *millenial*. Generasi sekarang yang lebih tertarik pada pekerjaan yang bersifat *freelance* dengan penggunaan teknologi informasi yang cukup canggih dan serta didukung *massive* nya *platform* media sosial sebagai sarana pemasaran produk maupun jasa dari usaha para generasi *millenial*.
- Meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan / menginformasikan adanya lowongan kerja, menggunakan jasa Pusat Layanan Karir Terpadu dan mengikuti program kegiatan Bursa Kerja Online.

Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi hubungan insdustrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjajian Bersama. pada tahun 2019 dengan target sebesar 57 % dan terealisasi sebesar 57 % atau 100 persen;

Meningkatnya kesadaran pekerja akan tuntutan hak-haknya serta di perlukan Sosialisasi /pembinaan tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Indikator Sasaran % Perusahaan yang membayar upah melebihi UMK pada tahun 2019 dengan target sebesar 32 % dan terealisasi sebesar 32,22 % atau 100,69 persen;

Pada tahun 2019 jumlah perusahaan yang membayar upah melebihi UMK meningkat dibanding tahun sebelumnya, Meski di tahun 2019 kenaikan UMK di Jawa Timur sangat bervariasi ,

namun semakin banyaknya perusahaan yang membayar upah melebihi UMK dimungkinkan antara lain karena dari tahun ke tahun semakin banyak perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah . Penerapan struktur dan skala upah ini wajib di taati oleh perusahaan , sehingga semakin banyak pula pekerja yang upahnya dibayar berdasarkan jabatan , golongan , masa kerja, pendidikan dan kompetensinya, serta tidak semata-mata mengacu kepada UMK

Sasaran 4 : Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Indikator Sasaran Capaian penerapan sistem Manajemen keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (SMK3). pada tahun 2019 dengan target sebesar 70 % dan terealisasi sebesar 68,30 % atau 97,57 persen;

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Kewajiban penerapan SMK3 berlaku untuk perusahaan dengan jumlah tenaga kerja minimal 100 orang, atau dibawah 100 akan tetapi memiliki potensi bahaya yang tinggi. Penerapan SMK3 ditujukan sebagai bentuk peningkatan perlindungan kepada tenaga kerja dengan cara menerapkan K3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan Tahun 2019 terdapat penambahan perusahaan yang menerapkan SMK3 sebanyak 181 perusahaan, yang dibuktikan dengan pelaksanaan audit external dari badan auditor yang di tunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya , dimana pencapaian tahun 2018 sebanyak 265 perusahaan yang telah menerapkan SMK3.

Sasaran 5 : Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Indikator Sasaran Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga) pada tahun 2019 dengan target sebesar 70 % dan terealisasi sebesar 75,99 % atau 100,56 persen;

Tahun 2019 dari target 70 % dari 50 Kepala Keluarga Transmigran yang dimonitoring dan disurvey, Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebanyak 75,99 %. Evaluasi keberhasilan dilaksanakan setelah 3-4 tahun transmigran ditempatkan. Tingkat keberhasilan transmigran asal Jawa Timur dievaluasi dengan menggunakan 9 (Sembilan) indikator yaitu : pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal permukiman, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi dan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 8.021.173.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.780.781.054,00 atau 97,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 98 %. (98 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 8.021.173.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.780.681.054,00 atau 97,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 10.029.647.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.646.974.942,00 atau 96,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 97 %. (97 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 6.294.268.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.065.862.784,00 atau 96,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.735.379.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.581.112.158,00 atau 95,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.600.971.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.434.646.447,00 atau 95,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 97 %. (97 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.355.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.334.941.427,00 atau 98,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 120 Kali dan realisasi sebesar 120 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.245.471.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.099.705.020,00 atau 93,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 629 Pegawai dan realisasi sebesar 629 Pegawai. (100 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.472.415.020,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.240.618.402,00 atau 90,62 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 95 %. (95 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.148.770.520,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.083.993.322,00 atau 94,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
- 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 656.897.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 524.704.000,00 atau 79,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)
- 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 246.402.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 215.920.600,00 atau 87,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)
- 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 420.345.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 416.000.480,00 atau 98,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.894.607.334,00 atau 96,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program % kejuruan lembaga pelatihan yang memenuhi standar mutu pelatihan di LPK dengan target 65 % dan realisasi 80 %. (123,08 %)
 - Indikator Program % penempatan tenaga kerja magang dalam negeri dengan target 72 % dan realisasi 95 %. (131,94 %)
 - Indikator Program % tenaga kerja magang ke luar negeri dengan target 28 % dan realisasi 23 %. (82,14 %)Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.
 1. Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan dengan anggaran sebesar Rp. 810.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 777.556.026,00 atau 95,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan dengan target sebesar 300 Orang dan realisasi sebesar 300 Orang. (100 %)

2. Pembinaan Kelembagaan Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Kelembagaan dan Instruktur dengan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 310.138.994,00 atau 89,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peserta LPK yang mengikuti pembinaan dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
 - Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan akreditasinya LPK dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
 - Jumlah instruktur yang ter-Upgrade keterampilannya dalam peningkatan kompetensinya dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
3. Pembinaan Produktivitas dan Penyelenggaraan Sertifikasi dengan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 336.521.971,00 atau 97,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta yang mengikuti harmonisasi program sertifikasi dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
 - Jumlah tenaga kerja yg ditingkatkan produktivitasnya dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
 - Jumlah perusahaan yang ditingkatkan produktivitsnya dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di Bidang Pelatihan dan Produktivitas dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 494.232.390,00 atau 98,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan dan pemagangan dalam negeri dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
5. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 976.157.953,00 atau 97,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta yang mengikuti program pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)

6) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.085.168.521,00 atau 97,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKA dengan target 310.000 Orang dan realisasi 451.556 . (145,66 %)
- Indikator Program % binaan di sektor informal yg berhasil menyerap tenaga kerja baru dengan target 85 % dan realisasi 86 %. (101,18 %)
- Indikator Program Jumlah mitra kerja jejaring bursa kerja dengan target 550 perusahaan dan realisasi 562 Perusahaan. (102,19 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja dengan target 78 dan realisasi 79,29 . (101,65 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan.

1. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 393.978.000,00 atau 98,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peserta dan lokasi Sosialisasi AKAD dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)

2. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 536.497.200,00 atau 97,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta dan lokasi sosialisasi pencegahan TKI Non prosedural dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (100 %)
- Jumlah Peserta dan lokasi pemulangan TKI bermasalah dari luar negeri dengan target sebesar 2000 Orang dan realisasi sebesar 2000 Orang. (100 %)

3. Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penciptaan Pasar Kerja melalui Pembinaan Kelembagaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja Dalam dan Luar Negeri dengan target sebesar 0 Perusahaan dan realisasi sebesar 0 Perusahaan. (0 %)

4. Penguatan SDM Antar Kerja untuk Mengoptimalkan Penciptaan Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri dengan

anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.076.425,00 atau 88,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta PNS kab/kota yang mengikuti dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)

5. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 1.914.867.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.900.545.428,00 atau 99,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan/orientasi kewirausahaan dengan target sebesar 320 orang dan realisasi sebesar 320 Orang. (100 %)

6. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 1.756.507.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.707.847.248,00 atau 97,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mendapat sosialisasi program dan informasi penempatan melalui bursa kerja keliling dengan target sebesar 100 Perusahaan dan realisasi sebesar 105 Perusahaan. (105 %)
- Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti bursa kerja bulanan dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
- Jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti job market fair dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
- Jumlah peserta dan perusahaan yang mengikuti sosialisasi pra penempatan AKAD dengan target sebesar 300 Orang dan realisasi sebesar 300 Orang. (100 %)

7. Fasilitas promosi bagi usaha mandiri di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 328.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 324.224.220,00 atau 98,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang mengikuti pameran dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)

7) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.570.359.163,00 atau 98,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % terbentuknya LKS Bipartit di perusahaan dengan target 55 % dan realisasi 117,72 %. (214,37 %)
- Indikator Program % terbentuknya Peraturan Perusahaan (PP) dengan target 35 % dan realisasi 74,47 %. (212 %)
- Indikator Program % terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan target 11 % dan realisasi 13,46 %. (122,36 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pembinaan hubungan industrial dengan target 82 dan realisasi 79,28 . (96,68 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.481.577.509,00 atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peserta Sosialisasi LKS Bipartit Perusahaan dengan target sebesar 500 Perusahaan dan realisasi sebesar 500 Perusahaan. (100 %)
- Jumlah Peserta Bimtek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Pelaku Hubungan Industrial dengan target sebesar 125 Orang dan realisasi sebesar 125 Orang. (100 %)
- Jumlah Peserta Bimtek Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 120 Orang. (100 %)

2. Penguatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 493.891.945,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta Penguatan LKS Tripartit Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)
- Jumlah perusahaan Fasilitasi pembentukan LKS Bipartit dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
- Jumlah peserta Pertemuan dan Konsultasi Hubungan Industrial dengan target sebesar 396 Orang dan realisasi sebesar 396 Orang. (100 %)

3. Pembinaan Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.123.211.288,00 atau 99,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pergub tentang UMK dan UMSK dengan target sebesar 1 Pergub dan realisasi sebesar 1 Pergub. (100 %)
 - Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
4. Penguatan Kapasitas SDM Hubungan Industrial untuk Mendorong Terwujudnya Iklim Hubungan Industrial yang Kondusif dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 471.678.421,00 atau 94,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta Forum Komunikasi dan Konsultasi Mediator HI se Jatim dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
 - Jumlah kasus yang diselesaikan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan target sebesar 10 Kasus dan realisasi sebesar 10 Kasus. (100 %)

8) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 3.187.836.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.176.758.322,00 atau 99,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % perusahaan yang memenuhi persyaratan K3 dengan target 47 % dan realisasi 68.30 %. (145 %)
- Indikator Program % penyelesaian kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan dengan target 55 % dan realisasi 55,27 %. (100.49 %)
- Indikator Program % pekerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Aktif dengan target 57 % dan realisasi 87.63 %. (153.73 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penguatan dan Penerapan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.212.836.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.209.782.526,00 atau 99,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah bimtek bidang pengawasan ketenagakerjaan dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
2. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Norma Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp. 894.927.000,00 atau 99,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- % kasus yang ditangani dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 825.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 822.600.921,00 atau 99,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pelatihan dan atau sosialisasi yang dilakukan dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan bidang K3 dengan target sebesar 500 Perusahaan dan realisasi sebesar 500 Perusahaan. (100 %)

4. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 249.447.875,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Bimbingan dan pelatihan yang dilakukan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)

9) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Singosari dengan anggaran sebesar Rp. 8,160,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 7,553,123,332.00 atau 92,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 67,43 %. (73,29 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 89,08 %. (104,80 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 dan realisasi 79,31 . (94,42 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 dan realisasi 79,31 . (99,13 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 53 %. (165,63 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di PK Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp.

1.810.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.575.511.950,00 atau 87,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 176 orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.582.246.800,00 atau 98,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 272 Orang dan realisasi sebesar 272 Orang. (100 %)

3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.182.012.382,00 atau 90,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 240 Orang dan realisasi sebesar 240 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 288 Orang dan realisasi sebesar 288 Orang. (100 %)

4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Singosari Malang dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.013.600,00 atau 96,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 50 perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)

5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Singosari dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 584.338.600,00 atau 97,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 4 Gedung dan realisasi sebesar 4 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 12 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit. (100 %)
- ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

10) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Jember dengan anggaran sebesar Rp. 6.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.146.055.436,00 atau 98,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 100 %. (108,70 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 dan realisasi 79,38 . (94,50 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 dan realisasi 98 . (122,5 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 68 %. (212,5 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jember dengan anggaran sebesar Rp. 993.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 958.146.800,00 atau 96,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 128 Orang dan realisasi sebesar 128 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT- PK Jember dengan anggaran sebesar Rp. 1.256.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.234.643.000,00 atau 98,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 288 Orang dan realisasi sebesar 288 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jember dengan anggaran sebesar Rp. 2.932.427.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.907.508.236,00 atau 99,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 160 orang dan realisasi sebesar 160 Orang . (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 160 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (100 %)

4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jember dengan anggaran sebesar Rp. 443.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 434.861.500,00 atau 98,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jember dengan anggaran sebesar Rp. 624.072.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.895.900,00 atau 97,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan dengan target sebesar 2 Gedung dan realisasi sebesar 2 Gedung. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 8 Unit dan realisasi sebesar 8 Unit. (100 %)
 - ISO dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)

11) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 6.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.639.384.678,00 atau 99,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 93 %. (101 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 82,99 %. (97,64 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 dan realisasi 79,44 . (94,57 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 dan realisasi 79,44 . (99,3 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 57,99 %. (181,22 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 1.004.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.003.485.760,00 atau 99,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 208 orang dan realisasi sebesar 208 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.046.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.044.106.550,00 atau 99,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 368 orang dan realisasi sebesar 368 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 3.115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.108.737.067,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 416 Orang dan realisasi sebesar 416 Orang. (100 %)
 - Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Intensif dengan target sebesar 16 Orang dan realisasi sebesar 16 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 176 Orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 300 Orang dan realisasi sebesar 300 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.791.301,00 atau 99,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 55 Perusahaan dan realisasi sebesar 55 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 358.264.000,00 atau 99,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)

- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 28 Unit dan realisasi sebesar 28 Unit. (100 %)
- Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

12) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 5.910.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.883.576.900,00 atau 99,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 96,77 %. (105,40 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 97,26. (114,42%)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,84 %. (92,67 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 77,84 %. (92,67 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 69,25. (216,40 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 1.129.443.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.127.124.400,00 atau 99,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 192 Orang dan realisasi sebesar 192 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 1.280.556.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.268.116.800,00 atau 99,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 272 Orang dan realisasi sebesar 272 Orang. (100 %)

3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.542.234.650,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 368 Orang dan realisasi sebesar 368 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 320 Orang dan realisasi sebesar 320 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 348.558.050,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Mojokerto dengan target sebesar 100 perusahaan dan realisasi sebesar 100 perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 597.543.000,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 2 Gedung dan realisasi sebesar 2 Gedung. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 17 Unit dan realisasi sebesar 17 Unit. (100 %)
 - Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 5,837,500,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,825,850,060.00 atau 99,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 79,11 %. (94,18 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 79,11 %. (98,89 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 62 %. (193,75 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 687.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 684.974.250,00 atau 99,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 96 orang dan realisasi sebesar 96 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.749.750.205,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 256 orang dan realisasi sebesar 256 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta Uji Kompetensi dengan target sebesar 320 Orang dan realisasi sebesar 320 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 2.720.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.715.738.120,00 atau 99,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 176 orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)
 - jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 336 Orang dan realisasi sebesar 336 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 380.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 377.342.835,00 atau 99,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 100 perusahaan dan realisasi sebesar 100 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.044.650,00 atau 99,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 11 Unit dan realisasi sebesar 11 Unit. (100 %)
- Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

14) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 8.225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.779.785.049,00 atau 94,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 93 %. (101 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 82,99 %. (97,64 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 80,66 %. (96,02 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 63 %. (196,86 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi __. (__ %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.936.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.827.462.100,00 atau 96,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 352 orang dan realisasi sebesar 352 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.538.268.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.442.130.599,00 atau 93,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 288 orang dan realisasi sebesar 288 Orang. (100 %)

- Jumlah peserta uji kompetensi dengan target sebesar 128 Orang dan realisasi sebesar 128 Orang. (100 %)
- 3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.635.596.150,00 atau 95,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 240 orang dan realisasi sebesar 240 orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat; dengan target sebesar 208 Orang dan realisasi sebesar 208 Orang. (100 %)
- 4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 506.616.200,00 atau 84,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 30 perusahaan dan realisasi sebesar 30 Perusahaan. (100 %)
- 5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 367.980.000,00 atau 92,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 3 Gedung dan realisasi sebesar 3 Gedung. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 9 Unit dan realisasi sebesar 9 Unit. (100 %)

- 15) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Nganjuk** dengan anggaran sebesar Rp. 5.647.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.534.403.040,00 atau 98,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 99 %. (107,61 %)
 - Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 99 %. (116,47 %)
 - Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 79,26 %. (94,36 %)

- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 79,26 %. (99,08 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 36 %. (112,5 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 1.474.532.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.429.421.900,00 atau 96,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 224 orang dan realisasi sebesar 224 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 1.022.968.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.641.100,00 atau 95,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis Kompetensi dengan target sebesar 256 orang dan realisasi sebesar 256 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 2.610.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.592.080.040,00 atau 99,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 256 orang dan realisasi sebesar 256 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 32 Orang dan realisasi sebesar 32 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.680.000,00 atau 99,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 40 perusahaan dan realisasi sebesar 40 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Nganjuk dengan anggaran sebesar

Rp. 340.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 338.580.000,00 atau 99,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 18 Unit dan realisasi sebesar 18 Unit. (100 %)

16) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 7,435,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,973,400,505.00 atau 93,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92,79 %. (100,86 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 84 %. (98,82 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,23 %. (91,94 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 79 %. (246,88 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.215.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.173.000,00 atau 91,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan ketrampilan institusional dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 469.165.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 447.472.544,00 atau 95,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Surabaya dengan anggaran sebesar

Rp. 2.720.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.485.969.711,00 atau 91,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pelatihan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (bekerjasama dengan DIII - ITS) dengan target sebesar 90 orang dan realisasi sebesar 90 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 96 Orang dan realisasi sebesar 96 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 40 Orang dan realisasi sebesar 40 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 224 Orang dan realisasi sebesar 224 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 422.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 414.675.500,00 atau 98,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Job Market Fair dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.606.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.595.109.750,00 atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 10 Gedung dan realisasi sebesar 10 Gedung. (100 %)
 - Jumlah peralatan yang dilakukan pengadaan dengan target sebesar 73 Unit dan realisasi sebesar 73 Unit. (100 %)

- 17) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Sumenep** dengan anggaran sebesar Rp. 4,645,352,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 4,619,028,613.00 atau 99,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)
 - Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)
 - Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 78,29 %. (93,20 %)

- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 78,29. (97,99 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 54 %. (168,75 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.044.668.000,00 atau 99,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 176 orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 348.973.000,00 atau 99,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 112 Orang dan realisasi sebesar 112 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 2.593.602.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.579.660.113,00 atau 99,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 688 orang dan realisasi sebesar 688 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 125.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.783.500,00 atau 99,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 40 perusahaan dan realisasi sebesar 40 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 526.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 520.944.000,00 atau 98,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 51 Unit dan realisasi sebesar 51 Unit. (100 %)
- Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

18) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 4,810,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 4,796,654,098.00 atau 99,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 91 %. (98,91 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 94,75 %. (111,47 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 79,31 %. (94,42 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 79,31. (94,42 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 59,79 %. (186,84 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT Pelatihan Kerja Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.406.974.799,00 atau 99,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 240 orang dan realisasi sebesar 240 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.795.299,00 atau 99,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 48 orang dan realisasi sebesar 48 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Situbondo dengan anggaran sebesar

Rp. 2.730.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.723.395.700,00 atau 99,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 176 orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 60 Orang dan realisasi sebesar 60 Orang. (100 %)

4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.148.500,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 50 perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)

5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 319.339.800,00 atau 99,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat/sarana dengan target sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit. (100 %)
- Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

19) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 5,810,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,694,445,286.00 atau 98,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 96,97 %. (105,40 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 70,32 %. (219,75 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 97,26 %. (114,42 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 dan realisasi 77,93 . (92,77 %)

- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 dan realisasi 77,93 . (97,41 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 2.189.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.146.613.056,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 384 orang dan realisasi sebesar 384 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 221.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 204.532.169,00 atau 92,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 48 Orang dan realisasi sebesar 48 Orang. (100 %)

3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 2.810.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.766.632.636,00 atau 98,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 464 orang dan realisasi sebesar 464 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 96 Orang dan realisasi sebesar 96 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 80 Orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)

4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 223.661.627,00 atau 97,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Kediri dengan target sebesar 50 perusahaan dan realisasi sebesar _____. (0 %)

5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Kediri dengan anggaran sebesar

Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.005.798,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 27 Unit dan realisasi sebesar 27 Unit. (100 %)
- Jumlah Sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

20) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 6,362,500,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,294,892,044.00 atau 98,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 94,75 %. (111,47 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,53 %. (92,30 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 92,30 %. (115,38 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 55 %. (171,88 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 1.965.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.962.750.281,00 atau 99,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 352 Orang dan realisasi sebesar 352 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 996.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 991.805.384,00 atau 99,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 224 Orang dan realisasi sebesar 224 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 2.532.274.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.483.024.281,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 320 Orang dan realisasi sebesar 320 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 256 Orang dan realisasi sebesar 256 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 120 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 293.495.399,00 atau 97,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah perusahaan mitra Penempatan UPT PK dengan target sebesar 50 Perusahaan- dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 567.725.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 563.816.699,00 atau 99,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 2 Gedung dan realisasi sebesar 2 Gedung. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 4 Unit dan realisasi sebesar 4 Unit. (100 %)

21) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 5,820,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,364,858,585.00 atau 92,16 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 85 %. (100 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 78,41 %. (93,35 %)

- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 78,41 %. (98 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 61 %. (190,63 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.730.069.600,00 atau 96,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 336 Orang dan realisasi sebesar 336 Orang. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 620.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 529.131.420,00 atau 85,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 128 Orang dan realisasi sebesar 128 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 2.658.102.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.546.416.255,00 atau 95,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 416 Orang dan realisasi sebesar 416 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 208 Orang dan realisasi sebesar 208 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 368.937.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 257.088.310,00 atau 69,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 100 Perusahaan- dan realisasi sebesar 100 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Madiun dengan anggaran sebesar

Rp. 372.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 302.153.000,00 atau 81,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 6 Unit. (100 %)

22) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK

Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 6.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.108.259.460,00 atau 94,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 100 %. (117,65 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,97 %. (92,82 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 77 %. (96,25 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 68 %. (212,5 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 2.021.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.787.053.460,00 atau 88,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 384 Orang dan realisasi sebesar 384 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT- PK Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 1.029.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 957.033.500,00 atau 93,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 192 Orang dan realisasi sebesar 192 Orang. (100 %)

- Jumlah peserta Uji kompetensi dengan target sebesar 192 Orang dan realisasi sebesar 192 Orang. (100 %)
- 3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 2.875.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.848.694.500,00 atau 99,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 528 Orang dan realisasi sebesar 528 Orang. (100 %)
- 4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 116.915.000,00 atau 93,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 30 Perusahaan dan realisasi sebesar 30 Perusahaan. (100 %)
- 5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.563.000,00 atau 99,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan dengan target sebesar 2 Gedung dan realisasi sebesar 2 Gedung. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat Bengkel dan alat perlengkapan kantor dengan target sebesar 32 Unit dan realisasi sebesar 32 Unit. (100 %)
 - Jumlah sertifikat ISO dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

- 23) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK Bojonegoro** dengan anggaran sebesar Rp. 5.810.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.742.808.960,00 atau 98,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 98,15 %. (106,68 %)
 - Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 99,19 %. (116,69 %)
 - Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,95 %. (92,80 %)
 - Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 % dan realisasi 77,95 %. (97,43 %)

- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 71,6 %. (223, 75 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT-PK Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 1.191.008.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.181.434.330,00 atau 99,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 224 Orang dan realisasi sebesar 224 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT-PK Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 1.218.992.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.196.543.550,00 atau 98,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 272 Orang dan realisasi sebesar 272 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta uji kompetensi dengan target sebesar 160 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (100 %)

3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 2.735.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.712.311.680,00 atau 99,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 304 Orang dan realisasi sebesar 304 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 272 Orang dan realisasi sebesar 272 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan swadana dengan target sebesar 48 Orang dan realisasi sebesar 48 Orang. (100 %)

4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 254.110.850,00 atau 95,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK Bojonegoro dengan target sebesar 30 Perusahaan dan realisasi sebesar _____. (0 %)

5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.408.550,00 atau 99,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 1 Gedung dan realisasi sebesar 1 Gedung. (100 %)
- Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 9 Unit dan realisasi sebesar 9 Unit. (100 %)

24) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang dengan anggaran sebesar Rp. 6.742.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.701.761.719,00 atau 99,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan target 92 % dan realisasi 122 %. (112 %)
- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 121 %. (103 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan pelatihan dengan target 84 % dan realisasi 77,56 %. (92,33 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pengguna tenaga kerja eks siswa UPT PK dengan target 80 dan realisasi 77 . (96,25 %)
- Indikator Program % penempatan lulusan pelatihan dengan target 32 % dan realisasi 61,20 %. (191,25 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Revitalisasi Lembaga Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.323.644.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.320.583.416,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis Masyarakat dengan target sebesar 176 Orang dan realisasi sebesar 176 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Program-Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di UPT PK PPPTKLN Wonojati Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.418.856.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.408.855.500,00 atau 99,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 320 Orang dan realisasi sebesar 320 Orang. (100 %)
3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PK PPPTKLN Wonojati dengan anggaran sebesar Rp. 2.794.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.774.779.443,00 atau 99,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah peserta pelatihan berbasis masyarakat dengan target sebesar 208 Orang dan realisasi sebesar 208 Orang. (100 %)
 - Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 240 Orang dan realisasi sebesar 240 Orang. (100 %)
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja di UPT PK PPPTKLN Wonojati dengan anggaran sebesar Rp. 177.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 175.764.460,00 atau 99,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah perusahaan mitra penempatan UPT PK dengan target sebesar 40 Perusahaan dan realisasi sebesar 40 Perusahaan. (100 %)
5. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan di UPT PK PPPTKLN Wonojati dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.778.900,00 atau 99,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah gedung dan bangunan yang dilakukan pembangunan dan pemeliharaan dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 6 Unit. (100 %)
 - Jumlah pengadaan alat / sarana dengan target sebesar 40 Unit dan realisasi sebesar 40 Unit. (100 %)

25) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.706.714.495,00 atau 98,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dengan target 70 % dan realisasi 70 %. (100 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan produktivitas dengan target 81 dan realisasi 81 . (100 %)

- Indikator Program % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas dengan target 13 % dan realisasi 13 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 263.467.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 256.093.720,00 atau 97,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah perusahaan dalam pelaksanaan kompetisi dengan target sebesar 50 Perusahaan dan realisasi sebesar 50 Perusahaan. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan Produktivitas di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 336.533.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 319.131.700,00 atau 94,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan manajemen produktivitas dan pelatihan kewirausahaan pengukuran produktivitas sektor regional dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan yang dimonitoring dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)

3. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di UPT PPTK Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.131.489.075,00 atau 99,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktivitas dengan target sebesar 350 Orang dan realisasi sebesar 350 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dengan target sebesar 500 Orang dan realisasi sebesar 500 Orang. (100 %)

26) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di UPT P3TKI dengan anggaran sebesar Rp. 2.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.606.419.792,00 atau 91,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan penempatan tenaga kerja dengan target 80 dan realisasi 80,05 . (100 %)

- Indikator Program % TKI yang ditempatkan pada jabatan formal dengan target 35 % dan realisasi 37.66 %. (107.6 %)
- Indikator Program % TKI yang ditempatkan pada Jabatan Informal dengan target 65 % dan realisasi 62.34 %. (95.90 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Pengembangan Kelembagaan, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 807.190.613,00 atau 94,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah TKI yang dilayani di Kedatangan TKI dengan target sebesar 40.000 Orang dan realisasi sebesar 29178 Orang. (72.94 %)
- Jumlah TKI bermasalah yang ditangani dengan target sebesar 190 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (78,94 %)
- Jumlah peserta bimtek pemberdayaan TKI Purna dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta sosialisasi pencegahan TKI Non Prosedural dengan target sebesar 1800 Orang dan realisasi sebesar 1800 Orang. (100 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan target sebesar 15.000 Orang dan realisasi sebesar _____. (0 %)

3. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.799.229.179,00 atau 89,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta Bimtek AKA dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)
- Jumlah peserta Bimbingan Pekerja Migran Indonesia Produktif dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (100 %)

27) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.318.657.399,00 atau 95,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program % pengujian kualitas udara dengan target 91 % dan realisasi 137,9 %. (151,54 %)
- Indikator Program Hasil survey IKM pelayanan K3 dengan target 81,3 dan realisasi 78,46 . (96,51 %)
- Indikator Program % pemeriksaan kesehatan kerja di perusahaan dengan target 63 % dan realisasi 100 %. (158,73 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 149.826.120,00 atau 99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta pelatihan hiperkes dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (100 %)
2. Pengkondisian Lingkungan Kerja yang Aman, Nyaman dan Selamat, Serta Tenaga Kerja yang Sehat dan Produktif di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 205.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 201.715.487,00 atau 98,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah tenaga kerja yang melakukan pengujian bidang hiperkes dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (100 %)
 - Jumlah lokasi yang melakukan pengujian bidang hiperkes dengan target sebesar 20 Lokasi dan realisasi sebesar 20 Lokasi. (100 %)
 - Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian bidang hiperkes dengan target sebesar 10 Perusahaan dan realisasi sebesar 10 Perusahaan. (100 %)
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Revitalisasi dan Penembangan Kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 644.625.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 641.483.850,00 atau 99,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah layanan operasional yang diberikan oleh UPT K3 Surabaya dengan target sebesar 12 Kali dan realisasi sebesar 12 Kali. (100 %)

4. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.924.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.807.318.842,00 atau 93,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah perusahaan yang diuji pada sektor industri dengan target sebesar 100 Perusahaan dan realisasi sebesar 100 Perusahaan. (100 %)

5. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri di UPT K3 Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.575.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.313.100,00 atau 96,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan penunjang pengujian pada sektor industri tembakau dengan target sebesar 23 Unit dan realisasi sebesar 23 Unit. (100 %)

28) Program Ketransmigrasian dengan anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.910.144.111,00 atau 95,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah penempatan transmigran dengan target 150 KK dan realisasi 169 kk. (112.67 %)
- Indikator Program % kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang direalisasikan dengan target 83 % dan realisasi 100 %. (120.48 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan Perpindahan dan Penempatan Penduduk ke Luar Jawa dengan anggaran sebesar Rp. 320.925.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 314.813.750,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta temu teknis bidang ketransmigrasian dengan target sebesar 70 Orang dan realisasi sebesar 70 Orang. (100 %)

2. Pembinaan Kapasitas Calon Transmigran dengan anggaran sebesar Rp. 729.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 726.529.819,00 atau 99,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah bimbingan teknis peningkatan kompetensi calon transmigran dan penyuluhan program transmigran dengan target sebesar 4 Lokasi dan realisasi sebesar 4 Lokasi. (100 %)
3. Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.868.800.542,00 atau 93,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah transmigrasi yang diseleksi dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 BLK belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan IPTEK sehingga masih perlu dilakukan revitalisasi
- Kecukupan jumlah instruktur dan kejuruannya yang sepenuhnya belum dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat industri
- Peran dan fungsi kabupaten/kota terhadap pembinaan pemagangan di wilayahnya belum optimal dan data pemagangan mandiri tidak terdata dengan baik di Kab./Kota
- Naiknya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur secara signifikan berimbas pada potensi yang menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial

Solusi :

- Menyelesaikan target revitalisasi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. Dengan makin memadainya sarana-prasarana pelatihan, maka *output* pelatihan berupa tenaga kerja dengan kompetensi memadai akan meningkat secara kualitas maupun kuantitas
- Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan.

- Pemenuhan kebutuhan instruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta/praktisi, instansi maupun perguruan tinggi guna memenuhi kesenjangan kualitas instruktur
- Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah).
- Mendorong Kab./Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan UMK

e. Penghargaan Nasional

1. SIMPADU PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) merupakan layanan informasi konsultasi dan pengaduan yang terintergrasi dengan layanan pelatihan/setifikasi serta LPTSA-PMI. SIMPADU-PMI bertujuan untuk mempermudah kepastian alur, transparansi, waktu dan biaya perlindungan dan pemberdayaan PMI purna tugas penyediaan helpdesk di Bandara Juanda, pengelolaan remitansi dan aktifitas ekonomi secara produktif melalui program pro empowerment. Zona Integritas PMI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani "Janji kami untuk memberi layanan secara prima, biaya tarif transparan, bebas pungli dan percaloan"



2. Perhargaan Paramakarya 2019, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, berhasil meraih penghargaan sebagai Pembina Produktivitas Paramakarya Tahun 2019. Penghargaan yang diprakarsai oleh Kementerian Tenaga Kerja R.I. ini diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa oleh Wakil Presiden R.I. dan di dampingi oleh Menteri

Ketenagakerjaan R.I. atas dukungan dan pembinaannya kepada perusahaan UKM asal Jatim yang berhasil meningkatkan produktivitasnya, sehingga perusahaan tersebut meraih penganugerahan Produktivitas Paramakarya Tahun 2019.



3. Penghargaan Indeks Prestasi Ketenagakerjaan (IPK) Jatim Tahun 2019. Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan Indeks Prestasi Ketenagakerjaan (IPK) yang diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan R.I. Bpk. M. Hanif Dhakiri kepada Kepala Daerah yang sukses meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan. Penganugerahan IPK merupakan apresiasi Pemerintah (Pusat) kepada Gubernur, Bupati atau Walikota berprestasi di Bidang Ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Timur menyampaikan "Ini adalah penghargaan yang ke 32 selama beliau dan Bpk. Emil menjadi pemimpin di Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima atau diwakili oleh Asisten II Setda Prov. Jatim Bpk. Wahid Wahyudi di Jakarta, Menaker R.I. mengungkapkan hasil IPK 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25 dibandingkan IPK Tahun 2018 sebesar 60,8.



4. Melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) turut mewujudkan pembangunan Zona Integritas untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur sangat besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik transparan dan berhasil membangun zona integritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk layanan sekaligus merupakan Pemprov penerima penghargaan terbanyak dari seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.



5. Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mendapatkan penganugerahan Penghargaan Keselamatan dan Kadisnakertrans Prov. Jatim Bpk. Dr. Himawan Estu Bagijo, SH., MM. mewakili Gubernur Jawa Timur yang diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan R.I. Bpk. Hanif Dhakiri adalah untuk memotivasi perusahaan, Pemerintah Daerah dan Pekerja dalam mengimplentasikan K3. K3 justru merupakan investasi sangat baik agar produktivitas perusahaan bisa terus dijaga dan ditingkatkan. penghargaan tersebut antara lain penghargaan kecelakaan nihil, program pencegahan HIV-AIDS di tempat kerja serta penghargaan SMK3.



8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Tujuan

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,89	69,71*	95,63
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	30 %	37,57 %	125,23
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur	25 %	-1,27 %	-5,08
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Persentase Data Kependudukan yang Akurat	100 %	99,47 %	99,47
	Cakupan KB Aktif	71 %	75,72 %	106,64

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 dengan target sebesar 72,89 dan terealisasi sebesar 69,71* atau 95,63 persen;
Data IDG Tahun 2019 masih menggunakan data IDG tahun 2018. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019, perhitungan belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Indikator Sasaran Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2019 dengan target sebesar 30 % dan terealisasi sebesar 37,57 % atau 125,23 persen;
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2019 dengan target sebesar 30% dan terealisasi sebesar 41,09% atau 100%. Realisasi ini memang diupayakan peningkatannya melalui koordinasi yang intensif dengan semua perangkat daerah dan khususnya dalam rangka menghadapi penilaian APE untuk mengurangi kesenjangan gender khususnya di daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 25 % dan terealisasi sebesar -1,27 % atau -5,08 persen;

Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur dengan target sebesar 25% dan terealisasi sebesar -1,27 % atau -5,08%. Tidak mencapai target dikarenakan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 397 kasus, meningkat sebanyak 5 kasus atau jika dibandingkan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 392 kasus. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Data Kependudukan yang Akurat pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 99,47 % atau 99,47 persen;

Persentase Data Kependudukan yang Akurat dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,47% atau 99,47%. Secara target tercapai, hal ini disebabkan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan cakupan perekaman penduduk wajib KTP elektronik
 2. Forum komunikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 3. Peningkatan SDM petugas administrasi database kependudukan
- Indikator Sasaran Cakupan KB Aktif pada tahun 2019 dengan target sebesar 71 % dan terealisasi sebesar 75,72 % atau 106,64 persen;

Cakupan KB aktif pada tahun 2019 dengan target sebesar 71% dan terealisasi sampai dengan TW IV sebesar 75,72% atau 106,64%. Mencapai target, hal ini disebabkan ada beberapa upaya yang telah

dilakukan dalam meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif, antara lain melalui:

1. Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Kespro)
2. Penguatan Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi
3. Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.810.398.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.732.221.334,00 atau 97,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.810.398.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.732.221.334,00 atau 97,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 4.120.084.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.796.765.611,00 atau 92,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.684.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.564.063.934,00 atau 95,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 Paket/Unit dan realisasi sebesar 100 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.428.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.232.701.677,00 atau 86,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 Paket/Unit dan realisasi sebesar 100 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 920.482.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 898.954.828,00 atau 97,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 370.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 369.955.156,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 550.457.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 528.999.672,00 atau 96,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 100 Orang. (100 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.033.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.297.049.489,00 atau 99,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 435.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 435.550.140,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 289.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 288.875.123,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 84.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 84.782.200,00 atau 99,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 12 Paket dan realisasi sebesar 12 Paket. (100 %)
- 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 488.033.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 487.842.026,00 atau 99,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.445.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.395.090.203,00 atau 96,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen dengan target 15 % dan realisasi 16,7 %. (111,33 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dengan anggaran sebesar Rp. 815.243.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 784.920.008,00 atau 96,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pelaku usaha perempuan yang dibina dengan target sebesar 160 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (100 %)
2. Pembinaan tentang Keluarga TKW dengan anggaran sebesar Rp. 99.696.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 93.916.750,00 atau 94,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah keluarga TKW di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dengan target sebesar 76 Orang dan realisasi sebesar 75 Orang. (98,68 %)
3. Pendayagunaan Peran Perempuan dalam Bidang Politik dengan anggaran sebesar Rp. 305.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 295.721.155,00 atau 96,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kader partai politik yang mengikuti pelatihan pengambilan keputusan dengan target sebesar 30 Kader Partai Politik dan realisasi sebesar 30 Kader Partai Politik. (100 %)
 - Jumlah kader partai politik yang mengikuti Orientasi Peningkatan Peran Perempuan dalam bidang politik dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 42 Orang. (84 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dengan target sebesar 76 Orang dan realisasi sebesar 76 Orang. (100 %)

4. Pendayagunaan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera dengan anggaran sebesar Rp. 225.016.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 220.532.290,00 atau 98,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta dari desa/kelurahan yang mewakili 18 Kab/Kota yang telah mengikuti Evaluasi P2WKSS dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)
- Persentase organisasi kemasyarakatan (perempuan) yang aktif berpartisipasi dalam PP dan PA dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 45 Orang. (90 %)

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 2.264.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.560.633,00 atau 94,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Penanganan Korban KDRT, Non KDRT, dan Trafficking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 2 Kab/Kota dan realisasi 3 Kab/Kota. (150 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelaksanaan Gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak dengan anggaran sebesar Rp. 603.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.882.588,00 atau 87,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jejaring yang mengikuti sosialisasi, koordinasi, dan advokasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak dengan target sebesar 300 Orang dan realisasi sebesar 300 Orang. (100 %)

2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang dengan anggaran sebesar Rp. 486.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 453.883.060,00 atau 93,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
- Jumlah jejaring lintas sektor terkait pelayanan dan kinerja P2TP2A dengan target sebesar 3 Jejaring dan realisasi sebesar 3 Jejaring. (100 %)

3. Pelaksanaan Tumbuh Kembang Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.174.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.165.794.985,00 atau 99,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Kab/Kota dengan target sebesar 39 Forum Anak dan realisasi sebesar 39 Forum Anak. (100 %)
- Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota yang terlatih sebagai pelopor dan pelapor dengan target sebesar 5 Forum Anak dan realisasi sebesar 38 Forum Anak. (760 %)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan anggaran sebesar Rp. 2.268.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.207.217.218,00 atau 97,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program prosentase kab/kota yang memiliki peraturan perundangan yang mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 80 % dan realisasi 84 %. (105 %)
- Indikator Program Persentase kab/kota yang memiliki peraturan perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan target 84 % dan realisasi 82 . (97,62 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penguatan Sistem Pendataan Dinamika Gender dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 232.344.688,00 atau 92,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah buku indeks Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang sudah dianalisis dengan target sebesar 1 Buku dan realisasi sebesar 1 Buku. (100 %)

2. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dengan anggaran sebesar Rp. 938.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 905.140.672,00 atau 96,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah jejaring/lembaga yang mendukung PUHA dengan target sebesar 63 Jejaring/Lembaga dan realisasi sebesar 63 Jejaring/Lembaga. (100 %)

3. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran sebesar Rp. 1.080.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.069.731.858,00 atau 99,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak di Provinsi dan di 38 Kab/Kota dengan target sebesar 19 % dan realisasi sebesar 18,4% %. (96,84 %)

- Jumlah peserta implementasi Keluarga Bina Setara di Kab/Kota dengan target sebesar 76 Orang dan realisasi sebesar 47 Orang. (61,84 %)
- Jumlah pertemuan koordinasi kelembagaan PUG dan PUA dengan target sebesar 295 Orang dan realisasi sebesar 248 Orang. (84,06 %)
- Persentase Kab/Kota yang dipetakan capaian pelaksanaan PUG dan PUHA dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 2.890.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.862.758.811,00 atau 99,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Profil Kependudukan Jawa Timur berdasar elemen data kependudukan dengan target 1 Buku dan realisasi 1 Buku. (100 %)
- Indikator Program Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP dengan target 95 % dan realisasi 99 %. (104,21 %)
- Indikator Program Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan akte kelahiran dengan target 85 % dan realisasi 86 %. (101,17 %)
- Indikator Program Persentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan akte kematian dengan target 35 % dan realisasi 53 %. (151,42 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pengintegrasian Sistem DataBase Informasi Administrasi Kependudukan Terpadu (SIAK) dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 395.277.001,00 atau 98,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kab/Kota yang data kependudukannya telah dikonsolidasi oleh pusat dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan bimbingan teknik ADB (Administrator Data Base) Peningkatan pengolahan SIAK Pelayanan Excellent dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah buku data kependudukan per semester dan bulletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan dengan target sebesar 3 Buku dan realisasi sebesar 3 Buku. (100 %)
2. Sinkronisasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 396.740.301,00 atau 99,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kab/Kota yang sarana prasarannya sudah diinventarisir dan dilaporkan ke Pusat dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)

- Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SOP Pelayanan Kependudukan sesuai standar yang sudah diinventarisir dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah OPD/Institusi yang memanfaatkan data kependudukan dengan target sebesar 10 OPD dan realisasi sebesar 2 OPD. (20 %)
3. Penataan Administrasi Sistim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 446.981.900,00 atau 99,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan laporan data kependudukan sesuai standar dan tepat waktu dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan laporan data kependudukan mikro sesuai standar dan tepat waktu dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
4. Pencatatan Administrasi Kependudukan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.640.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.623.759.609,00 atau 98,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan Kab/Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi aparat Kab/Kota dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Fasilitasi pelaksanaan penertiban KTP-el di Kab/Kota dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
 - Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.250.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.775.248,00 atau 99,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Kabupaten/Kota yang Cakupan KB Aktifnya $\geq 80\%$ dengan target 44,70 % dan realisasi 44,64 %. (99,86 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 581.250.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 579.175.940,00 atau 99,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Kab/Kota yang sudah mengupayakan ketahanan keluarga dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. pengendalian penduduk, advokasi dan informasi dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 394.967.608,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Kab/Kota yang sudah membentuk DWG dengan target sebesar 57,90 % dan realisasi sebesar 52,60 %. (90,84 %)
3. keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.631.700,00 atau 99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Kab/Kota yang sudah diorientasi KIE KB dengan target sebesar 89,47 % dan realisasi sebesar 84,21 %. (94,12 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Dalam Pembangunan Responsif Gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) semua PD Provinsi sudah mendukung dan berpartisipasi aktif pelaksanaannya. Hanya belum semua pengambil keputusan dan pelaksana di PD memahami PUG sehingga dalam mewujudkan penyusunan ARG belum optimal kualitasnya. PUG melalui Kelembagaannya dan ARG.
2. Dalam Pembangunan Responsif Gender Kabupaten/Kota belum semua Kab/Kota melaksanakan PUG secara optimal karena pokja PUG belum bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), belum seluruh PD mendukung melaksanakan tanggungjawab dalam klasternya masing-masing untuk mendukung terwujudnya kabkota layak anak. Sedangkan Kabupaten/kota masih 6 kab/kota yang belum berupaya mencapai KLA didaerahnya masing-masing.
4. Belum semua PD menyusun data terpilah.
5. Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan usahanya.

6. Kurangnya wawasan perempuan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang politik.
7. Belum semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
8. Pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, serta jumlah SDM yang terlatih masih terbatas dan sering ada rotasi.
9. Masih banyaknya Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM serta minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/aktivis/pemerhati anak yang terlatih PATBM.
10. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, serta SDM pengelola P2TP2A banyak yang belum dilatih.
11. Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di kabupaten/kota masih minim.
12. Masih ada data penduduk ganda
13. Keterbatasan sumber daya manusia petugas dari kab/kota
14. Kesadaran masyarakat masih rendah tentang pentingnya dokumen kependudukan terutama di daerah pelosok
15. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
16. Masih tingginya ego sektor dan ego program yang membuat kurang maksimalnya koordinasi
17. Kurangnya dukungan politis dari para pemangku kebijakan, sehingga kurangnya pembinaan, monitoring, dan evaluasi program
18. Kegiatan yang telah dilakukan DP3AK Provinsi Jawa Timur belum dapat ditindaklanjuti sampai ke Kabupaten/Kota secara maksimal karena keterbatasan dana yang ada

Solusi :

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi melalui pertemuan, rapat rutin, pelatihan dan pendampingan kepada pengambil keputusan dan para tim pokja PUG dan focal poin PD terutama dalam menyusun ARG dan membuat inovasi pembangunan responsif gender

2. Menyusun Raperda PUG, Rencana Aksi Daerah dan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan upaya fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencapaian kabkota melalui pertemuan, pelatihan dan pendampingan kepada Kabkota dan tim Gugus tugas KLA kabkota pada tahun 2019 akan diutamakan pada kabkota yang belm mendapat penghargaan KLA.
4. Menyepakati, mengumpulkan data data gender dan anak baik data dari BPS juga data dari PD maupun di lintas bidang
5. Diadakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dan pembinaan bersama lintas sektor baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial.
6. Pelatihan dan Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang politik perempuan.
7. Perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas SDM bagi aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Memberikan pelatihan/bimtek dalam rangka menjangkau kabupaten/kota untuk mengikuti PATBM
9. Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola P2TP2A dalam rangka layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
10. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor, sehingga memudahkan dalam pengendalian kegiatan terkait pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak dan melakukan koordinasi secara intens serta terobosan baru dalam implementasi program kegiatan DP3AK Prov. Jatim di tahun mendatang.
12. Melaksanakan sentralisasi database dengan melakukan penunggalan NIK
13. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Kab/Kota
14. Memberikan sosialisasi secara kontinyu ke instansi yang terkait
15. Perlu adanya advokasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan, dan evaluasi program

e. Penghargaan Nasional

- Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Makassar pada tanggal 23 Juli 2019.

9. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

9.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup serta penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55	52.24	94.98
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.4	83.32	93.20
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	63	61.05	96.90

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2019 dengan target sebesar 55 dan terealisasi sebesar 52.24 atau 94.98 persen; Terdapat penurunan Indeks Kualitas Air di tahun 2019 disebabkan beberapa hal diantaranya:
 1. Meningkatnya alih fungsi lahan terutama di daerah resapan air yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian dengan tanaman semusim yang menyebabkan berkurangnya jumlah dan debit mata air;
 2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air ;
 3. Meningkatnya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari aktifitas permukiman sejalan dengan pertumbuhan penduduk
 4. Meningkatnya jumlah industri UMKM yang masih belum memiliki pengelolaan limbah yang baik;
 5. Tingginya curah hujan dalam periode musim hujan yang pendek menyebabkan limpasan air meningkat.

Upaya meningkatkan IKA:

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran lingkungan & praktek konservasi berbasis masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk menekan dampak dari alih fungsi lahan;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sumber daya air terhadap kelompok pertanian dan perikanan (pesisir);
 3. Mendorong/ mengusulkan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik dan sanitasi publik pada setiap kota/ kabupaten
 4. Memfasilitasi UMKM di kabupaten/ kota dengan bantuan sarana, alat, ataupun jasa pengelolaan limbah;
 5. Melaksanakan pembinaan dan pembelajaran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada masyarakat di kabupaten/ kota.
- Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2019 dengan target sebesar 89.4 dan terealisasi sebesar 83.32 atau 93.20 persen; Penurunan IKU disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Terjadinya perubahan iklim mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga suhu udara pada musim kemarau yang tinggi mempengaruhi laju percepatan terbentuknya konsentrasi polutan di udara dan berdampak pada pergerakan udara dan kondisi suhu yang memungkinkan polusi udara tetap mengapung di suatu wilayah dan mengakibatkan peningkatan polutan;
 2. Meningkatnya alih fungsi lahan mengakibatkan laju penyerapan polutan di udara juga rendah sehingga berdampak pada penurunan kualitas udara setiap tahunnya;

Upaya meningkatkan IKU:

1. Melaksanakan pembinaan dan pembelajaran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada masyarakat di kabupaten/ kota;
 2. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan luasan tutupan lahan dan Ruang Terbuka Hijau dalam meningkatkan laju penyerapan polutan di udara perkotaan.
- Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2019 dengan target sebesar 63 dan terealisasi sebesar 61.05 atau 96.90 persen;

Penurunan IKTL tahun 2019 disebabkan penurunan luasan tutupan lahan Hutan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Penurunan (%)
Hutan Lahan Kering Primer (Ha)	32.758,93	32.543,56	0,66
Hutan Lahan Kering Sekunder (Ha)	405.705,82	399.213,53	1,60
Hutan Mangrove Primer (Ha)	11.813,56	11.304,85	4,30
Hutan Mangrove Sekunder (Ha)	2.714,81	2.263,30	16,63
Hutan Rawa Primer (Ha)	-	461,81	
Hutan Rawa Sekunder (Ha)	14,21	-	
Hutan Tanaman (Ha)	909.920,81	907.463,39	0,27

Sumber data :

1. Interpretasi lahan kritis dari Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, 2018
2. Kehutanan Dalam Angka, 2019

Penghitungan % penurunan dengan rumus sebagai berikut :

% Penurunan= (Nilai penurunan/Nilai sebelum penurunan)x100%

Untuk peningkatan nilai IKTL yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan RTH yang berupa kesatuan wilayah seperti hutan kota, taman keanekaragaman hayati, dan kebun raya;
2. Peningkatan penanaman di wilayah sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25%;
3. Peningkatan hutan mangrove primer dan sekunder untuk wilayah pesisir.

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.019.413.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.681.328.034,00 atau 91,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %).

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.019.413.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.681.328.034,00 atau 91,59%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 85 %. (94,44 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 5.458.882.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.027.197.041,00 atau 92.09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.819.584.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.500.509.249,00 atau 88,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit. (88.68 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.639.298.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.526.687.792,00 atau 95,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.379.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.247.875.042,00 atau 90,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 90 % dan realisasi 85 %. (94.44 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 617.302.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 563.523.187,00 atau 91,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 7 Kali dan realisasi sebesar 7 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 762.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 684.351.855,00 atau 89,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 28 . (56 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 100 Orang dan realisasi sebesar 172 Orang. (172 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.133.424.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.866.632.667,00 atau 87,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 90 % dan realisasi 90 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 493.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 409.046.311,00 atau 82,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 327.967.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 250.032.770,00 atau 76,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 1.077.857.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 990.371.726,00 atau 91,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 234.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 217.181.860,00 atau 92,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 5.315.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.977.393.347,00 atau 93,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Kualitas udara ambien parameter SO₂ (ppm) dengan target 8.2 ppm dan realisasi 10.15 ppm. (-47.79 %)

- Indikator Program Kualitas udara ambien parameter NO₂ (ppm) dengan target 14.3 (ppm) dan realisasi 11.72 ppm. (18.04 %)
- Indikator Program Kualitas air sungai parameter BOD (mg/l) dengan target 4.12 (mg/l) dan realisasi 8.57 mg/L. (-110.05 %)
- Indikator Program Kualitas air sungai parameter COD (mg/l) dengan target 11.84 (mg/l) dan realisasi 18.92 mg/L. (-60.88 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup. dengan anggaran sebesar Rp. 1.564.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.445.296.356,00 atau 92,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Frekuensi pemantauan kualitas air pada titik pantau dengan target sebesar 207 Kali dan realisasi sebesar 187 Kali. (90.34 %)
- Frekuensi pemantauan kualitas udara ambien pada titik pantau dengan target sebesar 114 Kali dan realisasi sebesar 95 Kali. (83 %)
- Jumlah review instrumen pengendalian pencemaran air (baku mutu air, air limbah, dan/atau air limbah domestik) dengan target sebesar 0 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (0 %)
- Jumlah review instrumen pengendalian pencemaran udara (baku mutu udara ambien dan/atau udsara emisi) dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (0 %)
- Jumlah perusahaan yang dinilai peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan target sebesar 83 Perusahaan dan realisasi sebesar 93 Perusahaan. (112 %)
- Jumlah rapat koordinasi standarisasi lingkungan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas air dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- Jumlah laporan hasil pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- Jumlah laporan hasil rapat koordinasi standarisasi lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup. dengan anggaran sebesar Rp. 2.092.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.952.510.947,00 atau 93,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan dengan target sebesar 3 unit dan realisasi sebesar 3 unit. (100 %)
 - Jumlah DED sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non-institusi dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (200 %)
 - Jumlah rapat koordinasi penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil pemantauan sumber pencemar dan kawasan rawan pencemaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non-institusi dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup. dengan anggaran sebesar Rp. 1.657.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.579.586.044,00 atau 95,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah review instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan target sebesar 1 Baku kerusakan dan realisasi sebesar 1 Baku kerusakan. (100 %)
 - Jumlah DED rehabilitasi ekosistem atau kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah action learning rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 4 Kegiatan. (400 %)
 - Jumlah demplot rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)
 - Jumlah rapat koordinasi pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil action learning rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (400 %)
 - Jumlah laporan hasil demplot rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (0 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan pemulihan kerusakan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 . (0 %)
5. Rehabilitasi dan/ atau Restorasi Ekosistem Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Rehabilitasi dan/ atau Restorasi Ekosistem Sungai dan Danau dengan target sebesar 5 Ha dan realisasi sebesar 0 Ha. (0 %)
6. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih (DBHCHT) dengan target sebesar 0 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan target sebesar 0 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)
- 8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)

Program Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 703.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.893.069,00 atau 96,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan target 45 % dan realisasi 45 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 703.001.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.893.069,00 atau 96,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah rapat kerja daerah sinkronisasi pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat kerja daerah sinkronisasi pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 18.868.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.157.898.837,00 atau 96,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Peningkatan Rata-Rata Waktu Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan (hari) dengan target 14 (hari) dan realisasi 14 (hari). (100 %)
- Indikator Program Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan RPPLH dan KLHS dengan target 50 % dan realisasi 52.36 %. (105 %)

- Indikator Program Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Limbah (juta ton eq CO₂) dengan target 4 juta ton eq CO₂ dan realisasi 4.30 juta ton eq CO₂. (108 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Inventarisasi dan Penerapan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 13.687.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.230.394.282,00 atau 96,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah buku data SDA-LH atau laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Penerapan Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 2.548.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.433.322.376,00 atau 95,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan yang diterbitkan sesuai tata laksana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 - Jumlah rapat kerja AMDAL dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (200 %)
 - Jumlah rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan hidup dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)
 - Jumlah laporan hasil penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- Jumlah laporan hasil rapat kerja AMDAL dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi kajian dampak lingkungan hidup atau KLHS dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan dan verifikasi tata laksana penilaian dokumen lingkungan hidup dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dengan target sebesar 0 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (0 %)
3. Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. dengan anggaran sebesar Rp. 2.632.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.494.182.179,00 atau 94,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 6 Unit. (100 %)
 - Jumlah verifikasi usulan Desa Proklamasi dengan target sebesar 35 Desa/Kelurahan dan realisasi sebesar 42 Desa/Kelurahan. (120 %)
 - Jumlah profil Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah profil keanekaragaman hayati dengan target sebesar 0 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah rencana aksi keanekaragaman hayati dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (0 %)
 - Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pemeliharaan dan pelestarian SDA-LH dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi konservasi keanekaragaman hayati dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)

- Jumlah laporan hasil penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan lingkungan hidup dan/atau pelestarian SDA dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Gas Rumah Kaca dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi konservasi keanekaragaman hayati dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pemeliharaan dan pelestarian SDA-LH dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
4. Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Restorasi Taman Keanekaragaman Hayati dan Taman Hijau dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Restorasi Taman Keanekaragaman Hayati dan Taman Hijau dengan target sebesar 1 Ha dan realisasi sebesar 0 Ha. (0 %)
5. Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Sumber Mata Air dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Sumber Mata Air dengan target sebesar 3 Ha dan realisasi sebesar 0 Ha. (0 %)
6. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan, serta Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja (DBHCHT) dengan target sebesar 5 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)
7. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan target sebesar 5 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)

8. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam dengan target sebesar 5 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)

Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 4.538.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.460.737.904,00 atau 98,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Limbah B3 yang dikelola dengan target 45 % dan realisasi 45 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase Sampah yang di kelola dengan target 35 % dan realisasi 35 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan.

1. Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengolahan dan Pemrosesan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 941.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 940.793.200,00 atau 99,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase sampah yang dikelola di TPST dengan target sebesar 20 % dan realisasi sebesar 20 %. (100 %)
- Jumlah kerjasama pengelolaan sampah antar daerah dengan target sebesar 1 Kerjasama dan realisasi sebesar 1 Kerjasama. (100 %)
- Jumlah rapat koordinasi pengurangan dan penanganan sampah dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan sampah dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah laporan hasil pengelolaan sampah di Bank Sampah dan TPST dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengurangan dan penanganan sampah dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan sampah dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

2. Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 570.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 560.978.550,00 atau 98,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 - Jumlah dokumen pemetaan potensi dan pengelola limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (200 %)
 - Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi Teknis Izin pengelolaan limbah B3 dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 1 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 skala provinsi dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
 - Jumlah laporan bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengelolaan limbah B3 dan/atau pemberian Rekomendasi Teknis Izin pengelolaan limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Penguatan Fasilitas Teknis, Investasi dan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 3.026.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.958.966.154,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah sarana dan prasarana teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 2 Unit. (100 %)
 - Jumlah dokumen perencanaan teknis pengembangan fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah DED fasilitas dan teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

- Jumlah rapat koordinasi pengembangan fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengelolaan sampah dan/atau limbah B dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
 - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi pengembangan fasilitas, teknologi dan investasi pengelolaan sampah dan/atau limbah B3 dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
4. Kegiatan Pengendalian dan Pengurangan Timbulan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Kegiatan Pengendalian dan Pengurangan Timbulan Sampah dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)
5. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pelaksanaan dan Penguatan Instrumen Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)
6. penyediaan sarana dan prasaran pengolahan limbah industri melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- penyediaan sarana dan prasaran pengolahan limbah industri melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)
7. Pelatihan dan/atau Sertifikasi bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan melalui Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelatihan dan/atau Sertifikasi bagi Tenaga Teknis di Bidang Lingkungan melalui Pembinaan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0 %)

Prograam Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 2.997.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.879.024.715,00 atau 96,06 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat pada peraturan perundang - undang lingkungan hidup dengan target 29 % dan realisasi 23.16 %. (79.85 %)
- Indikator Program Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 90 % dan realisasi 100 %. (111 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 997.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 969.514.729,00 atau 97,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Langsung dengan target sebesar 80 Usaha dan/atau Kegiatan dan realisasi sebesar 95 Usaha dan/atau Kegiatan. (119 %)
- Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi melalui Pengawasan Tidak Langsung dengan target sebesar 150 usaha dan/atau kegiatan dan realisasi sebesar 204 usaha dan/atau kegiatan. (136 %)
- Jumlah sarana dan prasarana pengawasan dengan target sebesar 5 Unit dan realisasi sebesar 5 Unit. (100 %)
- Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah laporan hasil Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
- Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pengawasan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)

2. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Penaatan Hukum Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 855.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 807.946.009,00 atau 94,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan pelayanan penanganan pengaduan dan/atau penaatan hukum dengan target sebesar 3 Kegiatan dan realisasi sebesar 3 Kegiatan. (100 %)
- Jumlah pengujian laboratorium dengan target sebesar 0 Sampel dan realisasi sebesar 0 Sampel. (0 %)

- Jumlah sarana dan prasarana pelayanan penanganan pengaduan dan penataan hukum dengan target sebesar 8 Unit dan realisasi sebesar 8 Unit. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan pelayanan penanganan pengaduan dan/atau penataan hukum dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil pelayanan penanganan pengaduan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil penataan hukum dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Pelaksanaan Upaya dan Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 1.143.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.101.563.977,00 atau 96,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah institusi dan non-institusi yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dengan target sebesar 187 institusi dan non-institusi dan realisasi sebesar 187 institusi dan non-institusi. (100 %)
 - Jumlah bimbingan teknis/workshop/pembinaan institusi dan non-institusi dengan target sebesar 5 Kegiatan dan realisasi sebesar 8 Kegiatan. (160 %)
 - Jumlah institusi dan non-institusi yang diberi penghargaan terkait lingkungan hidup dengan target sebesar 105 institusi dan non-institusi dan realisasi sebesar 105 institusi dan non-institusi. (100 %)
 - Jumlah sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan kerjasama yang diberikan kepada institusi dan non-institusi dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 13 Unit. (217 %)
 - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis/workshop/pembinaan institusi dan non-institusi dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (267 %)
 - Jumlah laporan hasil pemberian penghargaan dan/atau sarana dan prasarana institusi dan non-institusi dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)
4. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pengawasan Penerapan Izin Lingkungan dengan target

sebesar 225 Usaha dan/atau Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Usaha dan/atau Kegiatan. (0 %)

Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 3.385.978.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.251.582.171,00 atau 96,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program PAD atau Retribusi Daerah (Milyar) dengan target 2 milyar dan realisasi 2.28 milyar. (114 %)
- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan dengan target 75.75 % dan realisasi 75.75 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase pemenuhan akreditasi laboratorium dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, serta Penguatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 907.814.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 870.055.851,00 atau 95,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil pelaksanaan administrasi umum, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan, dan Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan Pelanggan dengan anggaran sebesar Rp. 477.936.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 467.337.850,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah layanan pengujian kualitas lingkungan dengan target sebesar 3.600 Sampel dan realisasi sebesar 4595 Sampel. (127.64 %)
 - Persentase penanganan pengaduan/keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil pelayanan pengujian kualitas dan penanganan pengaduan/keluhan pelanggan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Penguatan Kapasitas, Kompetensi dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkungan, serta Jaringan Pemantauan dan Penyajian Data Kualitas Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.397.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.343.838.470,00 atau 96,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sertifikasi dan kalibrasi alat uji laboratorium dengan target sebesar 50 Unit dan realisasi sebesar 50 Unit. (100 %)
 - Jumlah Laporan Penyajian Data Kualitas Lingkungan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- Jumlah SDM yang mengikuti diklat kompetensi laboratorium dengan target sebesar 5 Orang dan realisasi sebesar 8 Orang. (160 %)
 - Jumlah laporan hasil pelaksanaan diklat SDM laboratorium dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah laporan hasil sertifikasi dan kalibrasi alat uji laboratorium dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
4. Pembangunan dan/atau Penguatan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 602.648.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 570.350.000,00 atau 94,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pengadaan alat uji kualitas lingkungan dengan target sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit. (100 %)
5. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan target sebesar 30 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)
6. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri melalui Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan dengan target sebesar 30 Unit dan realisasi sebesar 0 Unit. (0 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Sub-kegiatan demplot rehabilitasi kerusakan lingkungan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana perencanaan awal disebabkan terkendala masalah status lahan untuk lokasi kegiatan karena harus melalui proses hibah;
- 2) Sampai dengan tahun 2019, Provinsi Jawa Timur belum menyusun RPPLH Provinsi Jawa Timur;
- 3) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, masih banyak

perusahaan yang belum siap dalam memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut sehingga pengelolaan lingkungannya menjadi tidak taat;

- 4) Pengoperasian IPAL UMKM yang telah dibangun terkendala oleh biaya operasional yang membebani pelaku UMKM
- 5) Terdapat beberapa kegiatan yang target dan realisasinya nol.

Solusi :

- 1) Anggaran Sub-kegiatan demplot maupun Penambahan anggaran pada APBD-P awalnya direncanakan untuk penambahan tutupan vegetasi (sub-kegiatan demplot) guna menambah nilai IKTL namun pada akhirnya digeser untuk kegiatan edukasi / pembelajaran serta aksi melalui action learning pada daerah dengan fokus pada daerah rawan bencana baik bencana abrasi maupun tsunami maupun daerah dengan kerawanan longsor serta wilayah yang merupakan catchment area sumber air umbulan;
- 2) Pada tahun 2019, DLH telah melaksanakan workshop serta kunjungan kerja terkait RPPLH untuk menjaring data informasi dan permasalahan penyusunan RPPLH. Sedangkan pada tahun 2020 akan dilaksanakan penyusunan naskah akademik RPPLH di triwulan III;
- 3) Dibutuhkan waktu bagi perusahaan untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan PermenLHK No. 68 Tahun 2016;
- 4) Perlu dilengkapi biaya operasional dan pemeliharaan sebelum diserahkan;
- 5) Beberapa kegiatan yang target dan realisasinya nol merupakan kegiatan yang didanai oleh DBHCHT. Tahun 2019 DLH Provinsi Jawa Timur tidak mendapatkan anggaran DBHCHT.

e. Penghargaan Nasional

-

10. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Tujuan

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kel;
2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan pemerintahan desa;

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel.	Jumlah UEM yang berdaya	13708 UEM	13724 UEM	100,12
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif	presentase peningkatan lembaga kemasyarajatan desa/kel. yang aktif	6,25 %	6,38 %	102.08
Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa	Presentase desa cepat berkembang di Jawa Timur	10 %	10,90 %	109

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah UEM yang berdaya pada tahun 2019 dengan target sebesar 13708 UEM dan terealisasi sebesar 13724 UEM atau 100,12 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran presentase peningkatan lembaga kemasyarajatan desa/kel. yang aktif pada tahun 2019 dengan target sebesar 6,25 % dan terealisasi sebesar 6,38 % atau 102.08 persen;

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Presentase desa cepat berkembang di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 % dan terealisasi sebesar 10,90 % atau 109 persen;

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.177.927.725,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.169.294.500,00 atau 99,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.177.927.725,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.169.294.500,00 atau 99,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 83 % dan realisasi sebesar 83 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 6.905.419.875,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.598.505.677,00 atau 95,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.870.265.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.737.893.736,00 atau 96,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 1.552 Paket/Unit dan realisasi sebesar 1552 . (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.035.154.175,00 dan terealisasi sebesar Rp. 286.061.1941,00 atau 94,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 17 Paket/Unit dan realisasi sebesar 17 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.916.161.988,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.873.679.914,00 atau 97,78 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.258.752.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.422.891,00 atau 99,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 70 Kali dan realisasi sebesar 70 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 657.409.988,00 dan terealisasi sebesar Rp. 623.257.023,00 atau 94,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 500 Orang dan realisasi sebesar 500 Orang. (100 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.421.190.812,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.360.480.207,00 atau 97,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 606.751.474,00 dan terealisasi sebesar Rp. 590.918.323,00 atau 97,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 8 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 396.184.642,00 dan terealisasi sebesar Rp. 381.707.068,00 atau 96,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 10 Dokumen dan realisasi sebesar 10 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 373.144.268,00 dan terealisasi sebesar Rp. 359.557.000,00 atau 96,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.045.110.428,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.028.297.816,00 atau 98,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 28 Dokumen dan realisasi sebesar 28 Dokumen. (100 %)

Program Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 18.216.217.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.940.494.099,00 atau 98,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Terbentuk dengan target 115 lembaga dan realisasi 115 . (100 %)
- Indikator Program Jumlah RTS Yang Memiliki Usaha dengan target 13682 RTS dan realisasi 13682 RTS. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Pemberdayaan Pasar Desa dengan anggaran sebesar Rp. 822.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 808.612.799,00 atau 98,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pasar Desa terbaik Jawa Timur (pasar) dengan target sebesar 6 pasar dan realisasi sebesar 6 pasar. (100 %)
2. Pemberdayaan BUMDesa dengan anggaran sebesar Rp. 1.034.894.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.010.812.283,00 atau 97,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah BUMDesa terbaik Jawa Timur (BUMDesa) dengan target sebesar 6 Bumdesa dan realisasi sebesar 6 . (100 %)
3. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.666.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.642.297.899,00 atau 98,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kelompok UEM yang difasilitasi (UEM) dengan target sebesar 14 UEM dan realisasi sebesar 30 UEM. (214,29 %)
4. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan anggaran sebesar Rp. 5.930.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.837.531.571,00 atau 98,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KRTP yang diberikan bantuan (KRTP) dengan target sebesar 8259 krtp dan realisasi sebesar 8259 krtp. (100 %)
5. Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 313.303.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 308.983.200,00 atau 98,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah program/kegiatan yang diinventarisir terkait program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kelompok program pemberdayaan masyarakat (program/kegiatan) dengan target sebesar 10 program/kegiatan dan realisasi sebesar 10 program/kegiatan. (100 %)
- 6. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan anggaran sebesar Rp. 3.010.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.002.794.985,00 atau 99,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lembaga desa yang diberikan bantuan (desa) dengan target sebesar 115 desa dan realisasi sebesar 115 desa. (100 %)
- 7. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM) dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.758.272.751,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah RTSM yang diberikan bantuan (RTSM) dengan target sebesar 5423 RTSM dan realisasi sebesar 5743 RTSM. (105,90 %)
- 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dengan anggaran sebesar Rp. 1.639.683.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.571.188.611,00 atau 95,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa Tertinggal yang diberikan bantuan (desa) dengan target sebesar 75 desa dan realisasi sebesar 36 desa. (48 %)

Program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. dengan anggaran sebesar Rp. 7.386.540.242,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.085.128.008,00 atau 95,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif dengan target 85 % dan realisasi 96,20 %. (113,18 %)
- Indikator Program Persentase KPM yang aktif dengan target 20,9 % dan realisasi 54,16 %. (259,14 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kel. dengan anggaran sebesar Rp. 2.552.759.620,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.491.761.778,00 atau 97,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Lembaga pelaksana Gotong Royong terbaik (lembaga) dengan target sebesar 8 lembaga dan realisasi sebesar 8 lembaga. (100 %)
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 2.835.780.622,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.642.863.687,00 atau 93,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah TP PKK yang difasilitasi dengan target sebesar 38 TP PKK dan realisasi sebesar 38 TP PKK. (100 %)
- 3. Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat dengan anggaran sebesar Rp. 470.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 462.529.964,00 atau 98,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lembaga adat yang difasilitasi akses pengembangannya dengan pihak terkait (lembaga) dengan target sebesar 20 lembaga dan realisasi sebesar 95 lembaga. (475 %)
- 4. Penguatan kapasitas lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 529.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 496.366.537,00 atau 93,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Lembaga adat yang di Perkades Kan (lembaga) dengan target sebesar 10 lembaga dan realisasi sebesar 16 lembaga. (160 %)
- 5. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp. 752.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 746.102.192,00 atau 99,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KPM yang dilatih (orang) dengan target sebesar 80 orang dan realisasi sebesar 80 orang. (100 %)
- 6. Pemberdayaan Forum/Asosiasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 247.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 245.503.850,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah terbentuknya forum KPM di Jawa Timur (forum) dengan target sebesar 14 forum dan realisasi sebesar 14 forum. (100 %)

Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.908.719.758,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.788.590.608,00 atau 97,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan aparatur desa telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes dengan target 11 % dan realisasi 11 %. (100 %)
- Indikator Program Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tepat waktu dengan target 25 % dan realisasi 28 %. (112 %)
- Indikator Program Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dengan target 25 % dan realisasi 28 %. (112 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 813.789.770,00 atau 99,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah data desa yang Aparatur pemerintahan desanya telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes (dok) dengan target sebesar 30 dokumen dan realisasi sebesar 30 dokumen. (100 %)
2. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 500.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.726.910,00 atau 97,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang dievaluasi kinerjanya (kades/perangkat desa) dengan target sebesar 30 kepala desa/perangkat desa dan realisasi sebesar 36 kepala desa/perangkat desa. (120 %)
3. Pembinaan perencanaan pembangunan desa dengan anggaran sebesar Rp. 887.758.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.500.218,00 atau 97,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah data kabupaten yang telah menerapkan aplikasi perencanaan pembangunan desa (dokumen) dengan target sebesar 30 dokumen dan realisasi sebesar 26 dokumen. (86,67 %)
4. Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kel dengan anggaran sebesar Rp. 434.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 425.085.215,00 atau 97,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah desa yang telah memiliki profil desa/kel (desa/kel) dengan target sebesar 8501 desa/kel dan realisasi sebesar 8024 desa/kel. (94,39 %)
5. Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel dengan anggaran sebesar Rp. 799.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 768.445.539,00 atau 96,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah desa/kel berhasil (ds/kel) dengan target sebesar 8 desa/kel dan realisasi sebesar 8 desa/kel. (100 %)
6. Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 569.843.980,00 dan terealisasi sebesar Rp. 566.038.208,00 atau 99,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah desa yang telah melaksanakan tertib administrasi (desa) dengan target sebesar 60 desa dan realisasi sebesar 60 desa. (100 %)
7. Pembinaan penataan aset desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.371.817.778,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.349.519.573,00 atau 98,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah desa yang telah melakukan penataan aset desa (desa) dengan target sebesar 60 desa dan realisasi sebesar 55 desa. (91,67 %)
- 8. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 526.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 512.485.175,00 atau 97,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pendamping desa yang berkinerja baik (orang) dengan target sebesar 2960 Orang dan realisasi sebesar 2862 Orang. (96,69 %)

Program Peningkatan kerjasama desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.564.844.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.526.611.276,00 atau 98,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan kawasan perdesaaan dengan target 25 % dan realisasi 26 %. (104 %)
- Indikator Program Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana prasarana desa dengan target 13 % dan realisasi 24 %. (184,62 %)
- Indikator Program Jumlah kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan TTG dengan target 6 % dan realisasi 20 %. (333,33 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pemberdayaan sumberdaya lokal berbasis kawasan perdesaaan dengan anggaran sebesar Rp. 836.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 830.646.290,00 atau 99,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kawasan perdesaaan yang dipetakan untuk pengembangan kawasan yang dikerjasamakan (kawasan) dengan target sebesar 5 kawasan dan realisasi sebesar 5 kawasan. (100 %)
2. Pembangunan potensi kawasan perdesaaan dengan anggaran sebesar Rp. 341.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 340.703.225,00 atau 99,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pemetaan potensi kerjasama pembangunan kawasan perdesaaan (kawasan) dengan target sebesar 5 kawasan dan realisasi sebesar 5 kawasan. (100 %)
3. Pembinaan pendayagunaan sarana pedesaan dengan anggaran sebesar Rp. 835.178.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 827.538.664,00 atau 99,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah potensi Kerjasama pendayagunaan sarana perdesaaan yang dipetakan (potensi) dengan target sebesar 12 potensi dan realisasi sebesar 13 potensi. (108,33 %)

4. Pemberdayaan kualitas prasarana perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 351.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 339.754.102,00 atau 96,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah pemetaan kawasan potensi Kerjasama Peningkatan kualitas prasarana perdesaan yang difasilitasi (dokumen) dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
5. Pendayagunaan TTG dengan anggaran sebesar Rp. 541.036.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 532.045.110,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Kerjasama pemanfaatan Jenis alat TTG (kerjasama) dengan target sebesar 15 kerjasama dan realisasi sebesar 20 kerjasama. (133,33 %)
6. Inovasi TTG dengan anggaran sebesar Rp. 658.749.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 655.923.885,00 atau 99,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah inovasi TTG yang dapat difasilitasi dengan target sebesar 5 buah dan realisasi sebesar 5 buah. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan. Saat ini persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur berdasarkan data BPS per September 2019 adalah sebesar 10,20 %, masih berada diatas nasional per September 2019 adalah sebesar 9,22 %, persentase penduduk miskin terus menurun walaupun kecil karena berhadapan dengan *hardcore poverty*, atau ada pula yang menyebutnya, *ultra-poor*, atau *extreme poor*, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (*The poorest of the poor*), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau, kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, akan dapat semakin berdampak antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat , yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup tinggi dan sangat rentan terhadap guncangan yang dapat mengakibatkan ketidakberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin jatuh pada kemiskinan yang lebih dalam, membutuhkan program penanggulangan yang mampu menahan dan memberikan penguatan untuk masyarakat miskin lebih dapat survive.

Solusi :

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan yang *pro poor*, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan

lembaga kemasyarakatan di desa/kel., pengambilan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian. Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel. Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang miskin yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dan secara bertahap, akan langsung terdampak oleh kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

e. Penghargaan Nasional

Tingkat Nasional Lomba Desa dan Kelurahan

1. Pemenang II tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2019, Kelurahan Tulusrejo Kecamatan lowokwaru Kota Malang Wilayah II Jawa Bali;
2. Pemenang III tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2019, Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Wilayah II Jawa Bali

Penghargaan Tingkat Nasional

Dari Kegiatan Pemberdayaan BUM Desa ada beberapa BUM Desa yang meraih prestasi Nasional, antara lain :

- a). Meraih kejuaran ISTA (Indonesia Suistenable Tourism award) yang diadakan oleh Kementerian Desa dan PDTT RI BUM Desa yang meraih juara adalah :
BUM Desa Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang
BUM Desa Sentul Advanture Desa SentulÂ Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
BUM Desa Usaha Mandiri Desa Mendak Kecamatan mendak Kabupaten Madiun.
- b). Meraih kejuaran Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2019, BUM Desa yang telah menerima pengharaan dari Kementerian Desa, PDTT RI di Yogakarta, yaitu dari BUM Desa :
BUM Desa Tugu Kuning Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan (juara harapan II Katagori Berkembang
BUM Desa Jolo Sutro Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
(juara III Katagori Maju)

Program Jalin Matra, BRTSM mendukung Kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam mengikuti ajang Inovasi Penanggulangan Kemiskinan pada United Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2019. Tahun 2019 Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diikuti oleh Kementerian PAN RB dalam ajang United Nation Public Service Award (UNPSA).

Kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dalam mengikuti ajang Inovasi Penanggulangan Kemiskinan pada United Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2019.

Tingkat Nasional Lomba Desa dan Kelurahan

1. Pemenang II tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2019, Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Wilayah II Jawa Bali;
2. Pemenang III tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2019, Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Wilayah II Jawa Bali

11. URUSAN PERHUBUNGAN

11.1. DINAS PERHUBUNGAN

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan sektor transportasi serta ketersediaan infrastruktur perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna kendaraan umum AKDP	75 nilai indeks	72,06 nilai indeks	96,08
	Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Umum	1 %	3,76 %	378
	Persentase pemenuhan SDM Penguji Kendaraan Bermotor dibandingkan kebutuhan	100 %	96,17 %	96,17
	Jumlah rute pelayanan mudik balik gratis laut	6 rute	6 rute	100,00
	Persentase peningkatan jumlah penumpang Kereta Api di Jawa Timur	5 %	14,32 %	280
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi perhubungan	Persentase sub kategori transportasi (angkutan laut) terhadap PDRB	0,25 %	0,28 %	112,00
	Persentase sub kategori transportasi (angkutan penyeberangan) terhadap PDRB	0,03 %	0,03 %	100,00
	Persentase sub kategori transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB	0,95 %	0,93 %	98,00
	Persentase Penguatan kapasitas Terminal Tipe B	0,08 %	1,36 %	1696,83
	Persentase kesesuaian travel time AKDP terhadap konsidi lapangan	85 %	93,91 %	110,48

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Perhubungan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi, ditetapkan 5 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna kendaraan umum AKDP pada tahun 2019 dengan target sebesar 75 nilai indeks dan terealisasi sebesar 72,06 nilai indeks atau 96,08 persen;

Menurunnya nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna AKDP pada tahun 2019 dikarenakan minimnya kesadaran keselamatan dari pengemudi, kendaraan yg belum memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan dan ketepatan waktu, serta persaingan pada jarak dekat dengan pelayanan kendaraan pribadi (R2) serta layanan angkutan online

- Indikator Sasaran Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Umum pada tahun 2019 dengan target sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 3,76 % atau 378 persen;

Pada tahun 2019, penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Umum adalah sebesar 3,76 % dengan target yang ditetapkan sebesar 1 % sedangkan pada tahun 2018 penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Umum adalah sebesar 7,46 % dengan target yang ditetapkan sebesar 1 %. Terlampauinya target penurunan angka kecelakaan yang telah ditetapkan menunjukkan adanya kinerja maksimal dari berbagai unsur yang terlibat seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi maupun Kepolisian.

- Indikator Sasaran Persentase pemenuhan SDM Penguji Kendaraan Bermotor dibandingkan kebutuhan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 96,17 % atau 96,17 persen;

Tidak terpenuhinya SDM Penguji di Jawa Timur disebabkan karena naiknya wajib uji dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah SDM Penguji. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menjadi penguji dengan keterbatasan yang ada serta beberapa penguji yang ada ditempatkan di OPD yang tidak memiliki kewenangan pengujian.

- Indikator Sasaran Jumlah rute pelayanan mudik balik gratis laut pada tahun 2019 dengan target sebesar 6 rute dan terealisasi sebesar 6 rute atau 100,00 persen;

Layanan mudik balik gratis laut pada tahun 2019 dilaksanakan pada 6 (enam) rute sebagai berikut:

1. Lintas Surabaya Masalembu
2. Lintas Kalianget Kangean
3. Lintas Gresik Bawean
4. Lintas Jangkar Raas
5. Lintas Tanjung Wangi Sapeken
6. Lintas Kalianget Sapeken

Meningkatnya rute pelayanan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan mudik gratis kepada masyarakat.

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan jumlah penumpang Kereta Api di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 5 % dan terealisasi sebesar 14,32 % atau 280 persen; Tercapainya target peningkatan jumlah penumpang Kereta Api di Jawa Timur dikarenakan adanya peningkatan pelayanan perkeretaapian baik yang disediakan oleh PT. KAI maupun dukungan program keselamatan yg dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi perhubungan, ditetapkan 5 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase sub kategori transportasi (angkutan laut) terhadap PDRB pada tahun 2019 dengan target sebesar 0,25 % dan terealisasi sebesar 0,28 % atau 112,00 persen; Pada awal tahun hingga pertengahan, sebagian besar investor di sektor ekspor impor barang byk yg menunda kegiatan impor barang terkait situasi ekonomi dan politik yang belum menentu. Ditambah kebijakan pemerintah yg memang sedang berupaya mengurangi kegiatan impor menyebabkan kegiatan bongkar di plb. Tanjung Perak tahun 2019 menurun 6,41% dibandingkan tahun 2018. Utk kegiatan ekspor sendiri pada Tahun 2019 terjadi pelemahan ekonomi global, meskipun masih terjadi kenaikan sebesar 8,64 % dari tahun 2018. Dari sisi perizinan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Ddi pelabuhan mulai diwajibkannya sistem OSS (Online Single Submission) oleh BKPM kepada semua jenis usaha termasuk usaha terkait angkutan laut menjadikan byk pemohon ijin masih kebingungan karena web OSS belum terkoneksi dengan sistem perijinan di daerah sbg pengeluar ijin sesuai kewenangannya. Hal ini menjadikan jumlah

perusahaan yg mengurus ijin usaha menurun dari tahun 2018 sebanyak 182 perusahaan menjadi 163 perusahaan pada Tahun 2019. hal tersebut juga ditengarai sebagai menurunnya pelayanan JPT di pelabuhan

- Indikator Sasaran Persentase sub kategori transportasi (angkutan penyeberangan) terhadap PDRB pada tahun 2019 dengan target sebesar 0,03 % dan terealisasi sebesar 0,03 % atau 100,00 persen;

Tercapainya target sasaran pada tahun 2019 dikarenakan adanya upaya perbaikan layanan baik yang diberikan oleh PT. ASDP maupun penyediaan infrastruktur pelabuhan penyeberangan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

- Indikator Sasaran Persentase sub kategori transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB pada tahun 2019 dengan target sebesar 0,95 % dan terealisasi sebesar 0,93 % atau 98,00 persen;

Tidak tercapainya indikator Penurunan Persentase sub kategori transportasi (angkutan udara) terhadap PDRB sejalan dengan menurunnya jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara. Hal tersebut dikarenakan beberapa factor diantaranya mahalnnya harga tiket angkutan udara, disamping itu masyarakat memiliki pilihan moda yang lebih kompetitif (harga dan waktu tempuh) untuk perjalanan jarak jauh yaitu kereta api dan bus (via tol).

- Indikator Sasaran Persentase Penguatan kapasitas Terminal Tipe B pada tahun 2019 dengan target sebesar 0,08 % dan terealisasi sebesar 1,36 % atau 1696,83 persen;

Terpenuhinya target penguatan kapasitas terminal dikarenakan adanya upaya pemenuhan fasilitas utama maupun penunjang di terminal tipe B selurauh jawa timur.

- Indikator Sasaran Persentase kesesuaian travel time AKDP terhadap konsidi lapangan pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 93,91 % atau 110,48 persen;

Terpenuhinya target kesesuaian time travel dengan kondisi riil disebabkan karena semakin menurunnya hambatan perjalanan yang dikarenakan oleh pelayanan manajemen rekayasa yang baik serta penyediaan fasilitas jalan yang terus ditingkatkan, selain itu juga disebabkan adanya pengawasan yang ketat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.942.689.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.157.404.614,00 atau 90,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 nilai indeks dan realisasi 100 nilai indeks. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.942.689.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.157.404.614,00 atau 90,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100,00 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 13.286.666.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.399.708.995,00 atau 93,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 9.726.258.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.960.455.765,00 atau 92,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100,00 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.560.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.439.253.230,00 atau 96,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100,00 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.720.199.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.925.857.279,00 atau 78,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.804.693.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.360.621.979,00 atau 84,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Koordinasi Konsultasi dengan target sebesar 144 Kali dan realisasi sebesar 144 Kali. (100,00 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 915.506.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 565.235.300,00 atau 61,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 20 Orang. (100,00 %)
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 200 Peserta dan realisasi sebesar 200 Peserta. (100,00 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.269.989.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.085.344.099,00 atau 85,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 652.489.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 633.068.950,00 atau 97,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 . (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 90.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.253.200,00 atau 71,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 . (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 180.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sambungan fiber optik penunjang operasional pusat pelayanan data Dishub dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 . (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 346.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.021.949,00 atau 59,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 . (100 %)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 98.163.435.758,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.166.453.100,00 atau 93,89 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang dibandingkan kebutuhan dengan target 65.07 % dan realisasi 65.07 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 24 kegiatan.

1. Pengadaan dan pemasangan RPPJ model Bando dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.332.000,00 atau 94,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah RPPJ model bando terpasang dengan target sebesar 1 buah dan realisasi sebesar 1 buah. (100 %)

2. Pengadaan dan pemasangan paku marka dengan anggaran sebesar Rp. 6.528.463.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.990.917.750,00 atau 91,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Paku Marka terpasang dengan target sebesar 1.020 buah dan realisasi sebesar 1.020 buah. (100 %)

3. Pengadaan dan pemasangan traffic light dengan anggaran sebesar Rp. 7.921.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.555.265.061,00 atau 95,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Traffic light terpasang dengan target sebesar 12 lokasi dan realisasi sebesar 12 lokasi. (100 %)

4. Pengadaan dan Pemasangan Flashing Light dengan anggaran sebesar Rp. 4.249.437.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.004.738.267,00 atau 94,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Flashing Light terpasang dengan target sebesar 12 unit dan realisasi sebesar 12 unit. (100 %)

5. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ model F dengan anggaran sebesar Rp. 2.560.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.403.007.750,00 atau 93,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah RPPJ Model F terpasang dengan target sebesar 10 buah dan realisasi sebesar 10 buah. (100 %)

6. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 12.039.312.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.413.691.850,00 atau 94,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Marka jalan terpasang dengan target sebesar 132.700 meter dan realisasi sebesar 132.700 meter. (100 %)
7. Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 7.105.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.806.790.767,00 atau 95,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pagar Pengaman Jalan terpasang dengan target sebesar 1.642 meter dan realisasi sebesar 1.642 meter. (100 %)
8. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 3.591.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.395.176.800,00 atau 94,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Rambu Lalu Lintas terpasang dengan target sebesar 390 buah dan realisasi sebesar 390 buah. (100 %)
9. Pengadaan dan Pemasangan Papan Himbauan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 168.950.900,00 atau 96,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Papan Himbauan terpasang dengan target sebesar 31 buah dan realisasi sebesar 31 buah. (100 %)
10. Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (delineator) dengan anggaran sebesar Rp. 4.734.284.508,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.446.146.700,00 atau 93,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Patok Tikungan (delineator) Terpasang dengan target sebesar 1.094 buah dan realisasi sebesar 1.094 buah. (100 %)
11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dengan anggaran sebesar Rp. 3.820.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.468.196.570,00 atau 90,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpasang dengan target sebesar 67 unit dan realisasi sebesar 67 unit. (100 %)
12. Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) model F dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 251.410.974,00 atau 91,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) model F terpelihara dengan target sebesar 13 buah dan realisasi sebesar 13 buah. (100 %)

13. Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) model Bando dengan anggaran sebesar Rp. 265.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 252.772.500,00 atau 95,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) model Bando terpelihara dengan target sebesar 5 buah dan realisasi sebesar 5 buah. (100 %)
14. Pemeliharaan Traffic Light dengan anggaran sebesar Rp. 14.645.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.557.467.292,00 atau 92,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah APILL terpelihara dengan target sebesar 30 unit dan realisasi sebesar 30 unit. (100 %)
15. Pemeliharaan Flashing Light dengan anggaran sebesar Rp. 3.740.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.381.543.900,00 atau 90,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Flashing light terpelihara dengan target sebesar 70 unit dan realisasi sebesar 70 unit. (100 %)
16. Pemeliharaan pagar pengaman jalan (Guard Rail) dengan anggaran sebesar Rp. 2.621.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.473.239.800,00 atau 94,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pagar Pengaman Jalan Terpelihara dengan target sebesar 420 buah dan realisasi sebesar 420 meter. (100 %)
17. Pemeliharaan rambu lalu lintas dengan anggaran sebesar Rp. 2.371.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.225.776.900,00 atau 93,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Terpelihara dengan target sebesar 822 buah dan realisasi sebesar 822 . (100 %)
18. Pemeliharaan Papan Himbauan dengan anggaran sebesar Rp. 122.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.889.225,00 atau 91,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Papan Himbauan terpelihara dengan target sebesar 45 buah dan realisasi sebesar 45 . (100 %)
19. Pemeliharaan Patok Tikungan (Deliniator) dengan anggaran sebesar Rp. 1.233.937.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.006.400,00 atau 93,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Patok Tikungan (delineator) Terpelihara dengan target sebesar 455 buah dan realisasi sebesar 455 . (100 %)

20. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dengan anggaran sebesar Rp. 12.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.622.289.500,00 atau 94,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terpelihara dengan target sebesar 262 unit dan realisasi sebesar 524 . (200 %)
21. Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 6.295.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.934.205.344,00 atau 94,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Papan Informasi Lalu Lintas terpasang dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 2 . (200 %)
22. Pemeliharaan Papan Informasi Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 419.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 407.763.000,00 atau 97,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Papan Informasi Lalu Lintas terpelihara dengan target sebesar 2 unit dan realisasi sebesar 2 . (100 %)
23. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.868.000,00 atau 98,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi terpasang dengan target sebesar 1 titik dan realisasi sebesar 1 titik. (100 %)
24. Pemeliharaan Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.044.005.850,00 atau 99,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi terpelihara dengan target sebesar 10 unit dan realisasi sebesar 10 unit. (100 %)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut dengan anggaran sebesar Rp. 112.996.359.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 109.033.433.548,41 atau 96,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi Laut dengan target 58 % dan realisasi 58 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan.

1. Pembangunan Pelabuhan Laut Brondong Kabupaten Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 22.101.842.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.882.142.605,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Brondong dengan target sebesar 3 pekerjaan dan realisasi sebesar 3 pekerjaan. (100,00 %)

2. Pembangunan Pelabuhan Laut Boom Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 5.874.901.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.693.331.398,00 atau 96,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Boom dengan target sebesar 4 pekerjaan dan realisasi sebesar 4 pekerjaan. (100,00 %)
3. Pembangunan Pelabuhan Laut P. Giliraja Kabupaten Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 1.147.488.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.108.071.483,00 atau 96,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah pekerjaan pembangunan pelabuhan giliraja dengan target sebesar 1 pekerjaan dan realisasi sebesar 1 pekerjaan. (100,00 %)
4. Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 3.658.311.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.302.754.488,45 atau 90,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan laut jawa timur dengan target sebesar 3 pekerjaan dan realisasi sebesar 3 pekerjaan. (100,00 %)
5. Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.189.461.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.128.366.610,00 atau 94,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah SBNP terbangun dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100,00 %)
6. Pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan laut Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.413.191.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.394.162.680,00 atau 98,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pemeliharaan Prasarana Pelabuhan Laut dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100,00 %)
7. Pembangunan Pelabuhan Laut Probolinggo Kota Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 51.669.941.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.295.568.506,00 atau 97,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Probolinggo dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100,00 %)
8. Pembangunan Pelabuhan Laut di Pulau Gilimandagin Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 2.946.711.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.710.213.540,00 atau 91,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili mandangin dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100,00 %)
- 9. Pembangunan Pelabuhan Laut P. Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 4.168.347.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.836.561.759,5 atau 92,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan gili ketapang dengan target sebesar 3 pekerjaan dan realisasi sebesar 3 pekerjaan. (100,00 %)
- 10. Pembangunan Pelabuhan Laut Prigi Kabupaten Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 18.826.162.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.682.260.478,46 atau 93,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100,00 %)

Program Manajemen Pengelolaan, Penguatan, Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 15.262.257.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.970.120.252,6 atau 98,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov. Jatim dengan target 80 nilai indeks dan realisasi 79,77 nilai indeks. (99,71 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Manajemen Pusat Data dan Informasi Sektor Transportasi Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 780.824.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 764.598.700,00 atau 97,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Media Transportasi dengan target sebesar 6 edisi dan realisasi sebesar 6 edisi. (100,00 %)
 - Operasional Website dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100,00 %)
 - Jumlah Operasional Website dengan target sebesar 1 Laporan dan realisasi sebesar 1 Laporan. (100,00 %)
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung dengan anggaran sebesar Rp. 13.828.041.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.569.264.152,6 atau 98,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pekerjaan peningkatan/pembangunan sarana prasarana gedung dengan target sebesar 6 pekerjaan dan realisasi sebesar 6 pekerjaan. (100,00 %)

- Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana prasarana operasional dengan target sebesar 3 pekerjaan dan realisasi sebesar 3 pekerjaan. (100,00 %)
- 3. Sinkronisasi program, tatalaksana dan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp. 653.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 636.257.400,00 atau 97,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase terlaksananya kegiatan penguatan kerjasama program, tatalaksana dan organisasi (Rapat sinkronisasi) dengan target sebesar 499 peserta dan realisasi sebesar 499 peserta. (100,00 %)

Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Transportasi dengan anggaran sebesar Rp. 14.787.626.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.910.192.000,00 atau 94,07 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sektor Perhubungan dengan target 13.56 % dan realisasi 14,00 %. (103,24 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Survey Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 696.293.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 578.564.800,00 atau 83,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen karakteristik lalu lintas pada ruas jalan utama di Jatim dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
2. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.219.977.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.202.900.500,00 atau 98,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 24 dokumen dan realisasi sebesar 24 dokumen. (100 %)
3. Manajemen Perencanaan Teknis Sektor Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 12.871.356.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.128.726.700,00 atau 94,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen perencanaan teknis sektor perhubungan dengan target sebesar 41 dokumen dan realisasi sebesar 41 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Peserta Rapat koordinasi sektor perhubungan dengan target sebesar 1.371 Peserta dan realisasi sebesar 1.371 Peserta. (100 %)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 12.718.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.389.576.580,00 atau 97,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Ratio jumlah seat AKDP perseribu penduduk dengan target 8 nilai indeks dan realisasi 8 nilai indeks. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Pembinaan Pengusaha Angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.901.130,00 atau 97,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta rapat koordinasi dengan pengusaha angkutan dengan target sebesar 220 peserta dan realisasi sebesar 220 peserta. (100 %)
2. Evaluasi Tarif Angkutan AKDP di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 560.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 556.213.500,00 atau 99,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Evaluasi Tarif Angkutan AKDP di Jawa Timur dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 dokumen. (100 %)
 - Jumlah penyelenggaraan Rapat koordinasi evaluasi tarif angkutan AKDP di Jawa Timur dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
3. Pemilihan Abdi Yasa Teladan dengan anggaran sebesar Rp. 1.423.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.414.094.449,00 atau 99,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peserta Pemilihan Abdi Yasa Teladan dengan target sebesar 76 peserta dan realisasi sebesar 76 peserta. (100 %)
4. Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang dengan anggaran sebesar Rp. 1.713.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.693.220.739,00 atau 98,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kegiatan Pembinaan pengemudi dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)
5. Survei load factor dan evaluasi kebutuhan armada angkutan AKDP di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 620.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 614.468.000,00 atau 99,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Survey Load Factor dengan target sebesar 20 dokumen dan realisasi sebesar 20 dokumen. (100 %)
6. Pembinaan Teknis Petugas Terminal dengan anggaran sebesar Rp. 422.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.841.100,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pembinaan Teknis Petugas Terminal dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)

7. Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat berbasis Jalan (Bus) dengan anggaran sebesar Rp. 6.280.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.021.424.162,00 atau 95,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Bus Mudik Balik Gratis dengan target sebesar 480 Bus dan realisasi sebesar 480 Bus. (100 %)
 - o Jumlah Bus Shuttle Mudik Gratis dengan target sebesar 80 Bus dan realisasi sebesar 80 Bus. (100 %)
8. Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.560.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.536.413.500,00 atau 98,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Rapat koordinasi kesiapan angkutan lebaran/natal terpadu dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)

Program Kelaikan Teknik Kendaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.390.080.594,00 atau 95,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) dengan target 100 % dan realisasi 92,82 %. (92,82 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan Penguji Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 540.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 518.507.594,00 atau 96,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pembinaan PKB dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)
2. Pembinaan Teknis Pengujian, Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 219.835.000,00 atau 87,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pembinaan pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 1.710.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.651.738.000,00 atau 96,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan Penguji Kendaraan Bermotor dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 dokumen. (100 %)

Program Pelayanan Angkutan Kereta Api dengan anggaran sebesar Rp. 54.419.730.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.417.533.803,00 atau 94,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dengan target 1 % dan realisasi -34,48 %. (3448 %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat Berbasis Rel (Kereta Api) dengan anggaran sebesar Rp. 3.421.330.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.368.113.100,00 atau 98,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah penumpang kereta api mudik balik gratis dengan target sebesar 134.810 penumpang dan realisasi sebesar 172.824 penumpang. (100 %)
2. Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api dengan anggaran sebesar Rp. 1.684.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.563.312.150,00 atau 92,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sosialisasi keselamatan perkeretaapian dengan target sebesar 8 kali dan realisasi sebesar 8 kali. (100 %)
3. Pengadaan dan Pemasangan EWS di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 4.054.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.709.553.467,00 atau 91,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Early warning system terpasang dengan target sebesar 3 unit dan realisasi sebesar 3 unit. (100 %)
4. Pengadaan dan Pemasangan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 895.621.000,00 atau 94,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rambu pada perlintasan KA terpasang dengan target sebesar 14 buah dan realisasi sebesar 14 buah. (100 %)
5. Pemeliharaan EWS di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 41.124.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.748.017.186,00 atau 94,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Early Warning System terpelihara dengan target sebesar 53 unit dan realisasi sebesar 53 unit. (100 %)
6. Pengadaan Sarana Prasarana Perkeretaapian Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 410.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 399.960.850,00 atau 97,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah PJU yang terpasang dengan target sebesar 6 unit dan realisasi sebesar 6 unit. (100 %)

7. Pemeliharaan Rambu di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 2.116.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.096.276.800,00 atau 99,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Rambu yang terpelihara dengan target sebesar 382 buah dan realisasi sebesar 382 buah. (100 %)
8. Pemeliharaan PJU di Perlintasan Sebidang KA se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 659.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 636.679.250,00 atau 96,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah PJU yang terpelihara dengan target sebesar 12 unit dan realisasi sebesar 12 unit. (100 %)

Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 13.242.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.008.617.943,00 atau 98,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase tingkat pelanggaran angkutan umum dengan target 9 % dan realisasi 9 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Angkutan dan Keselamatan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 2.410.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.342.199.613,00 atau 97,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Monitoring Evaluasi Pengendalian Angkutan Jalan dengan target sebesar 27 kali dan realisasi sebesar 27 kali. (100 %)
2. Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.536.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.524.124.300,00 atau 99,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Pemilihan pelajar pelopor dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
3. Kampanye Keselamatan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 580.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 574.436.000,00 atau 99,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Kampanye keselamatan lalu lintas dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
4. Sadar Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 8.566.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.420.099.030,00 atau 98,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Jumlah Operasi Kestib LLAJ dengan target sebesar 264 kali dan realisasi sebesar 264 kali. (100 %)

5. Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan anggaran sebesar Rp. 149.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.759.000,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pembinaan PPNS dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 108.503.553.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.168.118.138,36 atau 96,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Angkutan Jalan Terhadap Standar Pelayanan dengan target 0,08 % dan realisasi 2,28 %. (2850 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 77.371.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.464.837.991,2 atau 96,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pembangunan Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan target sebesar 26 pekerjaan dan realisasi sebesar 26 pekerjaan. (100 %)
2. Pemeliharaan Sarana Prasana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 24.080.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.728.491.632,16 atau 98,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Jalan terpelihara dengan target sebesar 26 pekerjaan dan realisasi sebesar 26 pekerjaan. (100 %)
3. Manajemen Sistem Informasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 6.660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.586.453.515,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengembangan Sistem Informasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan target sebesar 26 pekerjaan dan realisasi sebesar 26 pekerjaan. (100 %)
4. Standarisasi ISO 9001 Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 391.453.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 388.335.000,00 atau 99,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Standarisasi ISO 9001;2015 Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)

Program Pengelolaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 7.983.994.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.730.007.394,00 atau 96,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kab/kota mendapatkan predikat WTN dengan target 84.21 % dan realisasi 84.21 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Evaluasi Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan LLAJ dengan anggaran sebesar Rp. 6.538.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.379.252.634,00 atau 97,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen evaluasi dan manajemen rekayasa LLAJ dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Rapat Manajemen Rekayasa LLAJ dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
2. Pembinaan Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 515.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 474.512.335,00 atau 92,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pembinaan tertib lalu lintas angkutan jalan dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
3. Penyelenggaraan Angkutan Sepeda Motor Gratis dengan anggaran sebesar Rp. 525.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 477.405.425,00 atau 90,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sepeda motor peserta mudik balik gratis dengan target sebesar 400 unit dan realisasi sebesar 400 unit. (100 %)
4. Pembinaan Petugas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan anggaran sebesar Rp. 405.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 398.837.000,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Petugas MRLI dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan anggaran sebesar Rp. 151.902.927.442,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.030.659.107,00 atau 96,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase terpenuhinya Sarana Prasarana Transportasi ASDP dengan target 89 % dan realisasi 89 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pemeliharaan Sarana Prasarana ASDP dengan anggaran sebesar Rp. 7.826.209.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.597.522.950,00 atau 97,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pekerjaan pemeliharaan prasarana dermaga sungai danau dan penyeberangan dengan target sebesar 3 pekerjaan dan realisasi sebesar 3 pekerjaan. (100,00 %)
2. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kab. Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 11.401.682.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.082.331.768,00 atau 97,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan Ketapang dengan target sebesar 6 pekerjaan dan realisasi sebesar 6 pekerjaan. (100,00 %)
3. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 69.898.153.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.382.440.081,00 atau 96,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pekerjaan pembangunan prasarana pelabuhan penyeberangan Paciran dengan target sebesar 1 pekerjaan dan realisasi sebesar 1 pekerjaan. (100,00 %)
4. Pemantauan dan Evaluasi ASDP dengan anggaran sebesar Rp. 482.221.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 371.227.130,00 atau 76,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemantauan dan evaluasi lintasan angkutan penyeberangan dengan target sebesar 4 lintasan dan realisasi sebesar 4 lintasan. (100,00 %)
5. Pembangunan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 62.294.662.042,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.597.137.178,00 atau 97,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kegiatan pembangunan sarana prasarana penyeberangan sungai dan danau dengan target sebesar 2 lokasi dan realisasi sebesar 2 lokasi. (100,00 %)
 - Kegiatan pembangunan sarana prasarana penyeberangan sungai dan danau dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100,00 %)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelayaran dengan anggaran sebesar Rp. 10.868.669.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.701.457.059,00 atau 89,26 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Peserta Mudik Balik Gratis Kapal Laut Terakomodasi dengan target 36 % dan realisasi 2,34 %. (6,5 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Laut (Kepulauan) dengan anggaran sebesar Rp. 7.746.546.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.898.663.453,00 atau 89,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kapal Laut Mudik Balik Gratis dengan target sebesar 7 unit dan realisasi sebesar 7 unit. (100,00 %)
2. Kampanye Keselamatan Pelayaran dengan anggaran sebesar Rp. 3.122.123.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.802.793.606,00 atau 89,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Kampanye Keselamatan Pelayaran dengan target sebesar 6 kali dan realisasi sebesar 6 kali. (100,00 %)
 - Pengukuran kapal dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100,00 %)
 - Pembinaan kesyahbandaran dan Angkutan Laut dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100,00 %)

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda dengan anggaran sebesar Rp. 21.940.527.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.884.685.781,03 atau 95,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase terpenuhinya sarana prasarana keterpaduan multimoda dengan target 0.95 % dan realisasi 0.95 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pembangunan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda dengan anggaran sebesar Rp. 7.103.871.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.605.977.240,00 atau 92,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pekerjaan pembangunan prasarana bandara dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan multimoda dengan anggaran sebesar Rp. 580.053.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 243.986.550,00 atau 42,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pemantauan, monitoring dan evaluasi operasional pelayanan angkutan multimoda dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100 %)
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda dengan anggaran sebesar Rp. 14.126.603.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.929.173.891,03 atau 98,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana prasarana keterpaduan multimoda dengan target sebesar 73 pekerjaan dan realisasi sebesar 73 pekerjaan. (100 %)
- 4. Pembangunan Bandara Pulau Kangean dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.603.200,00 atau 75,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pekerjaan pembangunan Bandara Pulau Kangean dengan target sebesar 2 pekerjaan dan realisasi sebesar 2 pekerjaan. (100 %)
- 5. Pembangunan Bandara Pulau Masalembo dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.944.900,00 atau 89,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pekerjaan pembangunan Bandara Pulau Masalembo dengan target sebesar 2 paket dan realisasi sebesar 2 paket. (100 %)

Program Pengelolaan dan kelembagaan sarana Prasarana Keterpaduan Multimoda dengan anggaran sebesar Rp. 6.898.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.573.365.407,00 atau 95,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abdulrahman Saleh Malang dengan target 10 % dan realisasi -33 %. (-330 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pengelolaan Sarana Prasarana Kelembagaan Bandara Abd. Saleh Malang dengan anggaran sebesar Rp. 6.898.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.573.365.407,00 atau 95,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pekerjaan mendukung kinerja dengan target sebesar 7 pekerjaan dan realisasi sebesar 7 pekerjaan. (100,00 %)
 - Jumlah belanja jasa dengan target sebesar 2 jasa dan realisasi sebesar 2 jasa. (100,00 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih terbatasnya SDM sektor Transportasi yang kompeten
2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum
3. Masih tingginya resiko kecelakaan pada sektor perhubungan

Solusi :

1. Melakukan kerjasama dengan sekolah tinggi perhubungan seperti Poltek Penerbangan, Poltek Pelayaran, Sekolah Tinggi Transportasi Darat serta Badan Diklat Kementerian Perhubungan

2. Perbaikan pelayanan angkutan diantaranya dengan melakukan pembangunan infrastruktur misalnya dengan menggagas angkutan aglomerasi Gerbang Kertasusila
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan transportasi serta penambahan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi baik darat, laut dan udara

e. Penghargaan Nasional

1. Bandara Abdulrachman saleh meraih Juara I Kategori Bandara Kelas II se-Indonesia pada acara Penganugrahan Bandara Award Tahun 2019
2. Juara I Abdi Yasa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019
3. Juara III Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Tingkat Nasional Tahun 2019
4. Penandatanganan MoU Pemprov Jatim, KEMENHUB dan KEMENKES untuk mengoperasikan Kapal Rumah Sakit Terapung untuk melayani masyarakat kepulauan

12. URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

12.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Tujuan

1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam layanan informasi publik.
2. Meningkatkan layanan dan pemanfaatan infrastruktur TIK.
3. Meningkatkan layanan data statistik

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik	Persentase OPD Prov Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	60 %	60 %	100
	Persentase partisipasi aktif lembaga komunikasi publik dalam pengelolaan komunikasi publik	73 %	73 %	100
Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	30 %	30 %	100
	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation data center Pemprov Jatim	60 %	60 %	100
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase data statistik pembangunan yang dipublikasikan	60 %	60 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan layanan informasi publik, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase OPD Prov Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 60 % atau 100 persen;

Pencapaian target tersebut disebabkan karena Pelayanan Informasi merupakan salah satu sub kegiatan yang menjadi unggulan pada kegiatan ini adalah Pelayanan Informasi Publik dengan mengoptimalkan

peran dan fungsi PPID Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan/implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga dalam tahun tersebut PPID Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi “Menuju Informatif”. Selain Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur juga memberi penghargaan khusus sebagai apresiasi kinerja PPID Pada 2019 ini dengan memberikan penilaian kepada OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa di Jawa Timur. Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID Badan Publik Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Penyedia Informasi Berkala Terbaik :

- OPD Pemprov Jatim (RS. SAIFUL ANWAR)
- Kab/ Kota Se-Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi)
- Desa Se-Jawa Timur (Desa Kauman Bojonegoro)

2. Penyedia Informasi Setiap saat Terbaik :

- OPD Pemprov Jatim (RS. SAIFUL ANWAR)
- Kota Se-Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan)
- Desa Se-Jawa Timur (Desa Kauman Bojonegoro)

3. Penyedia Layanan Informasi Terbaik :

- OPD Pemprov Jatim (RS. SAIFUL ANWAR)
- Kab/Kota Se-Jawa Timur (Kota Blitar)
- Desa Se-Jawa Timur (Desa Kauman Bojonegoro)

4. Pendokumentasian Informasi Terbaik :

- OPD Pemprov Jatim (RS. SAIFUL ANWAR)
- Kab/Kota Se-Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi)
- Desa Se-Jawa Timur (Desa Ngumbul Pacitan)

5. Mitra Keterbukaan Informasi Publik Terbaik :

- Kabupaten Pamekasan

6. Mitra Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur :

- Dinas Komunisasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- DPRD Provinsi Jawa Timur

7. Badan Publik Menuju Informatif (kategori B, nilai 80-95)

OPD Pemprov Jatim :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Jatim, dengan Nilai 81.4

Kab/Kota Se-Jawa Timur :

- Kabupaten Bojonegoro, dengan nilai 94
- Kota Probolinggo, dengan nilai 93.4
- Kabupaten Banyuwangi, dengan nilai 92.8
- Kabupaten Blitar, dengan nilai 91.6
- Kabupaten Pacitan, dengan nilai 90.6
- Kabupaten Lumajang, dengan nilai 88
- Kota Malang, dengan nilai 87
- Kabupaten Trenggalek, dengan nilai 85
- Kabupaten Pamekasan, dengan nilai 75.4

Desa Se-Jawa Timur :

- Desa Kauman Bojonegoro, dengan nilai 93.4 8.

8. Badan Publik Informatif (kategori A, nilai 96-100) :

- OPD Pemprov Jatim RS. SAIFUL ANWAR, dengan nilai 98.6
- Kab/Kota Se-Jawa Timur Kota Madiun, dengan nilai 96.2

9. Badan Publik Favorit (Kota Batu)

10. Badan Publik Terbaik (RS. SAIFUL ANWAR)

Acara penganugerahan ini dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Pacitan, Bupati Lumajang, Pj. Walikota Blitar, Walikota Madiun, Walikota Malang, Wakil Walikota Batu, Wakil Walikota Probolinggo dan Wakil Bupati Pamekasan.

- Indikator Sasaran Persentase partisipasi aktif lembaga komunikasi publik dalam pengelolaan komunikasi publik pada tahun 2019 dengan target sebesar 73 % dan terealisasi sebesar 73 % atau 100 persen;

Capaian target tersebut disebabkan karena Dinas Kominfo Prov Jatim berinisiatif untuk memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Jawa Timur menjadi agen penguatan literasi digital masyarakat sekaligus produsen informasi positif tentang program pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut, karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, sehingga masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top

down) atau sebaliknya antara masyarakat dengan pemerintah (bottom up).

- Terselenggaranya Jatim Kominfo Festival Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019 sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Magetan lalu karena Kabupaten Magetan selain sebagai Tuan Rumah juga bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Magetan.
- Selain kegiatan yang melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Persentase peningkatan partisipasi aktif lembaga komunikasi publik dalam pengelolaan komunikasi publik juga ditentukan oleh aktivitas Bakohumas Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Forum Bakohumas dan FGD Kehumasan. Kegiatan Forum Kehumasan Provinsi dilaksanakan tiga kali dan pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur dari unsur OPD Provinsi dan BUMN/BUMD. Selain Forum Kehumasan juga ada Kegiatan FGD Kehumasan yang berupa diskusi yang dihadiri oleh praktisi pejabat unit kerja Humas atau Pejabat Fungsional Pranata Humas sebagai Anggota Bakohumas Provinsi Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatnya manajemen TIK menuju East Java Smart Province, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 30 % dan terealisasi sebesar 30 % atau 100 persen; Capaian target tersebut disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan assessment keamanan informasi berbasis OWASP dan menggunakan tools Vulnerability Assessment Tools (VAT) terhadap aplikasi yang berada di Data Center Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah melakukan Assessment Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota guna memetakan area tata kelola keamanan sistem informasi serta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan berbasis INDEKS KAMI. Evaluasi secara berkala yang dilakukan terhadap aplikasi adalah bahwa aplikasi yang

telah dibangun oleh perangkat daerah dan disertai masukan-masukan untuk perbaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aplikasi yang akan dibangun oleh OPD harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hal ini dimaksudkan supaya aplikasi tersebut dapat memenuhi standard keamanan informasi.

- Indikator Sasaran Persentase pemanfaatan hosting dan collocation data center Pemprov Jatim pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 60 % atau 100 persen; Pencapaian target tersebut disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan Data Center Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meningkatnya kepercayaan ini tidak terlepas dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Data Center. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Data Center yang dilakukan antara lain berupa peningkatan kapasitas server dan penyimpanan data dengan memanfaatkan teknologi virtual private server (VPS), mengoptimalkan fungsi-fungsi keamanan informasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola melalui pelatihan yang bersertifikasi, dan memaksimalkan fungsi DRC (Disaster Recovery Center) di Batam yang merupakan suatu fasilitas dalam organisasi yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu unit ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit Pemerintah penting di Pemerintahan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja Data Center

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase data statistik pembangunan yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 % dan terealisasi sebesar 60 % atau 100 persen; Capaian target tersebut disebabkan dengan adanya data yang terpublish terwujudnya tercetaknya buku infografis yang terbagi dalam 4 edisi yang didapat dari 28 produsen data dengan rincian berasal dari 24 Dinas, 1 Badan dan 3 Rumah Sakit dengan jumlah data sebanyak 320 nama data.

c. Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.515.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.157.958.444,00 atau 93,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.515.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.157.958.444,00 atau 93,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 7.918.782.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.037.380.510,00 atau 88,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.381.932.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.675.008.499,00 atau 86,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 4217 Paket/Unit dan realisasi sebesar 4217 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.536.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.362.372.011,00 atau 93,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 160 Paket/Unit dan realisasi sebesar 160 Paket/Unit. (100 %)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.867.688.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.754.994.263,00 atau 93,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.124.188.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.121.898.680,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah konsultasi dengan target sebesar 60 Kali dan realisasi sebesar 60 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 743.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 633.095.583,00 atau 85,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan format dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 6 Orang. (30 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 190 Orang dan realisasi sebesar 149 Orang. (78.42 %)

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 367.931.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 258.405.846,00 atau 70,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 162.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 106.408.593,00 atau 65,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 116.881.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.582.453,00 atau 67,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 28.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.075.000,00 atau 83,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.339.800,00 atau 82,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

Program Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 10.062.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.952.808.336,00 atau 98,91 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah layanan informasi dan saluran media dengan target 10 jenis dan realisasi 10 jenis. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Layanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 2.341.925.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.287.389.553,00 atau 97,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pengelolaan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 1.336.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.288.097.869,00 atau 96,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengelolaan informasi publik dengan target sebesar 5 bimbingan teknis dan realisasi sebesar 5 bimbingan teknis. (100 %)

3. Penyebaran Informasi melalui Media Publik dengan anggaran sebesar Rp. 6.384.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.377.320.914,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah penyebaran informasi dengan target sebesar 10 jenis dan realisasi sebesar 10 jenis. (100 %)

Program Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 3.194.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.100.401.381,00 atau 97,07 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan dengan target 290 Lembaga dan realisasi 290 Lembaga. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Manajemen Opini Publik dengan anggaran sebesar Rp. 767.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 752.948.225,00 atau 98,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen isu aktual dengan target sebesar 24 dokumen dan realisasi sebesar 24 dokumen. (100 %)

2. Kemitraan Lembaga Kehumasan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 431.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 417.853.582,00 atau 96,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- o Jumlah partisipasi aktif lembaga kehumasan pemerintah dalam kegiatan kemitraan komunikasi publik dengan target sebesar 80 kelompok dan realisasi sebesar 80 kelompok. (100 %)

3. Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 1.995.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.929.599.574,00 atau 96,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- o Jumlah partisipasi aktif Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya komunikasi dengan target sebesar 220 kelompok dan realisasi sebesar 220 kelompok. (100 %)

Program Aplikasi Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 4.778.730.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.638.253.297,00 atau 97,06 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase layanan aplikasi di lingkungan Pemprov. Jatim dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK dengan anggaran sebesar Rp. 1.061.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.047.961.203,00 atau 98,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- o Jumlah kebijakan tata kelola TIK dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

2. Penguatan Fungsional Aplikasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.253.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.130.013.168,00 atau 96,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- o Jumlah aplikasi pelayanan publik dilingkungan Pemprov Jatim yang memenuhi kriteria peraturan yang berlaku dengan target sebesar 42 aplikasi dan realisasi sebesar 42 aplikasi. (100 %)

3. Persandian dan Keamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 464.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 460.278.926,00 atau 99,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- o Jumlah aplikasi yang diamankan dengan target sebesar 145 aplikasi dan realisasi sebesar 145 aplikasi. (100 %)

Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 8.332.748.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.088.522.736,00 atau 97,07 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pemeliharaan jaringan TIK PD Prov Jatim dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK dengan anggaran sebesar Rp. 6.177.646.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.041.182.308,00 atau 97,79%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemprov Jatim dengan target sebesar 600 mbps dan realisasi sebesar 600 mbps. (100 %)
- Jumlah kebijakan standar infrastruktur dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- Jumlah workshop/ FGD/ Sosialisasi dengan target sebesar 8 kali dan realisasi sebesar 8 kali. (100 %)

2. Pemeliharaan Infrastruktur TIK dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.792.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.652.033.039,00 atau 97,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemeliharaan perangkat keras dan lunak (data center) dengan target sebesar 12 Kali dan realisasi sebesar 12 kali. (100 %)
- Jumlah workshop/ FGD/ Sosialisasi dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)

3. Pengendalian Infrastruktur TIK dengan anggaran sebesar Rp. 454.310.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 395.307.389,00 atau 87,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah monitoring dan pengendalian jaringan TIK PD dan UPT dengan target sebesar 100 Kali dan realisasi sebesar 100 kali. (100 %)
- Jumlah workshop/ FGD/ Sosialisasi dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100 %)

Program Pengelolaan Data dan Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 1.927.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.767.600.721,00 atau 91,73 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase data statistik sektoral dengan target 60 % dan realisasi 60 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pengelolaan Data dengan anggaran sebesar Rp. 652.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 575.928.542,00 atau 88,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Persentase data yang terhimpun dengan target sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 %. (100 %)
2. Analisis Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 572.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 542.032.576,00 atau 94,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Persentase analisis statistik dengan target sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 %. (100 %)
3. Evaluasi dan Informasi Data Statistik dengan anggaran sebesar Rp. 702.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 649.639.603,00 atau 92,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - o Persentase data dan analisis yang di evaluasi informasikan dan dipublikasikan melalui web dengan target sebesar 50 % dan realisasi sebesar 50 %. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih kurangnya sinergitas, kerjasama dan kepedulian Badan Publik secara terus-menerus dalam upaya implementasi UU keterbukaan Informasi Publik :
 - Respon Pimpinan Badan Publik masih kurang
 - Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik masih kurang optimal
 - Koordinasi dalam hal pengumpulan data (DIP, Laporan Tahunan PPID Badan Pembantu dll) masih lemah
 - Terjadinya mutasi staf sehingga berdampak pada SDM yang kurang kompeten
 - Masih banyaknya sengketa informasi yang secara tidak langsung menjelaskan kurang responnya Badan Publik terhadap permohonan informasi yang masuk
2. Belum adanya agenda setting dalam manajemen isu publik sehingga belum dapat menyusun konten media publikasi yang akan disebarluaskan oleh lembaga komunikasi publik sesuai dengan aspirasi dan isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat
3. Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi kerap kali terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga komunikasi publik
4. Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi

5. Kapasitas server dan penyimpanan data saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk Big Data Jawa Timur.
6. SDM yang mengelola Data Center secara kuantitas dan kualitas belum sepenuhnya mendukung.
7. Masih kurangnya SDM ataupun staf teknis yang berlatarbelakang ilmu statistik.
8. Belum optimalnya proses pengumpulan data statistik sektoral yang didapat dari produsen data.
9. Kurangnya pemahaman produsen data (Perangkat Daerah) tentang data apa yang harus disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku wali data statistik sektoral

Solusi :

1. Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui : melakukan pembinaan dan monitoring, FGD, Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas helpdesk PPID bagi PPID Pembantu/OPD di 5 wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur serta Rapat Koordinasi PPID dengan PPID Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (FK PPID) Provinsi Jawa Timur yang anggotanya PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PPID Pembantu Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai wadah menampung permasalahan dan solusi dalam hal keterbukaan informasi publik
3. Membuka ruang konsultasi PPID bagi PPID Pembantu di Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota melalui Klinik PPID.
4. Meng-inisiasi media monitoring melalui aplikasi berbasis online yang dapat memantau perkembangan isu, persepsi masyarakat dan perspektif media akan suatu kebijakan pemerintah. Aplikasi ini menjadi dasar penyusunan isu publik yang pada akhirnya akan memproduksi konten media pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
5. Menyusun regulasi di tingkatan pemerintah daerah sebagai petunjuk teknis penguatan kelembagaan KIM di daerah sekaligus sebagai dasar hukum fasilitasi pendanaan bagi KIM melalui Dana Desa/Alokasi Dana Desa bagi KIM yang berbasis desa dan anggaran kelurahan bagi KIM yang ada di kelurahan. Fasilitasi pendanaan ini diharapkan mampu mendukung perbaikan sarana dan prasarana

bagi lembaga komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

6. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aplikasi yang akan dibangun harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standard keamanan informasi
7. Melakukan penambahan kapasitas pada server yang telah ada dan melakukan penambahan server baru untuk meningkatkan kapasitas yang telah ada
8. Mengadakan pelatihan untuk ASN yang terkait dengan pengelolaan Data Center
9. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen dalam penguatan statistik sektoral untuk mewujudkan “Satu Data” Jawa Timur.
10. Melakukan pendampingan dengan kalangan Akademisi baik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya maupun Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya guna mencari pokok-pokok pikiran maupun solusi yang tepat dalam mengembangkan Statistik Sektoral Jawa Timur

e. Penghargaan Nasional

1. Penghargaan diberikan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai Stand Terbaik pada Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 24 – 26 April 2019 di Taman Blambangan – Kabupaten Banyuwangi
2. Penghargaan diberikan Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atas Komitmen Menyelamatkan Arsip Statis Perorangan yang Berkategori Permanen dari Kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2019 di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
3. Penghargaan dari BAWASLU diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Mitra Kerja Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres Tahun 2019. Diberikan pada hari sabtu tanggal 2 Nopember 2019 di Hotel Wyndham Jl. Basuki Rahmad No. 67 – 73 Surabaya
4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Kategori Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Menuju Informatif Dalam Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

diberikan pada hari Kamis tanggal 21 Bopember 2019 di Istana Wakil Presiden Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat.

5. Penghargaan Diberikan kepada Dinas Kominfo Prov. Jatim Atas Prestasinya Dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Derngan Predikat Nilai A Pada Tanggal 3 Desember 2019 di Hotel Bhumi Surabaya.

13. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

13.1. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indikator Pertumbuhan omset Koperasi dan UKM yang ditargetkan sebesar 9,7% persen dan dapat direalisasikan sebesar 9,7% persen.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Koperasi Aktif	6 persen	6 persen	100
	Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi	15 Produk	46 Produk	307
	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi	60 persen	84 persen	140
	Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya	5 persen	5,67 persen	113

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Pertumbuhan Koperasi Aktif pada tahun 2019 dengan target sebesar 6 persen dan terealisasi sebesar 6 persen atau 100 persen; target pada indikator ini tercapai karena adanya pembinaan intensif dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui berbagai kegiatan antara lain Fasilitasi Akta Notaris Badan Hukum; Penyuluhan Koperasi; Penguatan kelembagaan Koperasi; Advokasi Pengembangan Koperasi dan UKM; Pelatihan Perkoperasian; serta Workshop Penguatan SDM Perkoperasian.

- Indikator Sasaran Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 15 Produk dan terealisasi sebesar 46 Produk atau 307 persen; target pada indikator ini tercapai karena terdapat upaya serius dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan - kegiatan antara lain Pendaftaran Merk; Fasilitas Sertifikasi Halal; Fasilitas Sertifikasi ISO; Pelatihan Singkat di *Business Development Center* (BDC); Pelatihan Pengembangan Usaha di 5 (lima) Bakorwil; serta Penguatan Usaha KUKM melalui Magang.
- Indikator Sasaran Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 60 persen dan terealisasi sebesar 84 persen atau 140 persen; capaian pada indikator ini memenuhi target karena Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur melakukan upaya intensif melalui Penguatan Jaringan Kerjasama Antar Koperasi Syariah; Bimbingan Teknis Penguatan Akses Permodalan Bagi KUKM; Penguatan Pembiayaan Syariah bagi KSPPS/ USPPS - Koperasi; Pendampingan Akses Permodalan; dan Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan Bersumber Dana Non Perbankan
- Indikator Sasaran Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya pada tahun 2019 dengan target sebesar 5 persen dan terealisasi sebesar 5,67 persen atau 113 persen; capaian untuk indikator ini memenuhi target. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk memperluas akses pemasaran bagi KUKM, di antaranya melalui kegiatan - kegiatan Pameran baik di dalam maupun luar negeri; Fasilitas Pemasaran Di Gedung Galeri dan *Cooperative Trading House* (CTH); Misi Dagang (B2B) ke Provinsi Jawa Barat Dan Bali; dan Fasilitas Kemitraan KUKM.

c. Program dan Kegiatan

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.960.444.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.439.046,00 atau 96,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 80 dan realisasi 80 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.960.444.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.439.046,00 atau 96,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 4.387.909.545,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.962.941.304,00 atau 90,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.191.032.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.126.025.027,00 atau 94,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 11 Paket dan realisasi sebesar 11 Paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.196.876.795,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.836.916.277,00 atau 88,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 6 Paket dan realisasi sebesar 6 Paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

dengan anggaran sebesar Rp. 1.947.290.255,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.881.329.858,00 atau 96,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 903.416.505,00 dan terealisasi sebesar Rp. 868.278.201,00 atau 96,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi yang dilakukan dengan target sebesar 16 Kali dan realisasi sebesar 16 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.043.873.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.013.051.657,00 atau 97,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal dengan target sebesar 8 Orang dan realisasi sebesar 8 Orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 3.070.964.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.949.015.123,00 atau 96,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 895.665.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 873.674.635,00 atau 97,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
- 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 941.478.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 907.052.682,00 atau 96,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 7 Laporan dan realisasi sebesar 7 Laporan. (100 %)
- 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 849.601.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 823.194.429,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
- 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 384.219.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 345.093.377,00 atau 89,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 5) **Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM** dengan anggaran sebesar Rp. 7.205.178.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.071.158.323,00 atau 98,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan dengan target 5,5 persen dan realisasi 7,06 persen. (128,36 %)Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
 1. Penguatan akses permodalan K-UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.421.665.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.

2.373.827.793,80 atau 98,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan dengan target sebesar 570 unit dan realisasi sebesar 570 unit. (100 %)
2. Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah dengan anggaran sebesar Rp. 1.990.899.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.964.971.992,00 atau 98,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah dengan target sebesar 1.200 unit dan realisasi sebesar 1.200 unit. (100 %)
3. Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 652.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 633.699.819,60 atau 97,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya dengan target sebesar 375 unit dan realisasi sebesar 375 unit. (100 %)
4. Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.140.163.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.098.658.717,60 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan dengan target sebesar 865 unit dan realisasi sebesar 865 unit. (100 %)

6) **Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha** dengan anggaran sebesar Rp. 15.063.404.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.439.765.953,00 atau 95,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi dengan target 15 unit dan realisasi 30 unit. (200 %)
- Indikator Program Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya dengan target 2 persen dan realisasi 1,17 persen. (59 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.733.255.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.673.878.975,00 atau 97,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya dengan target sebesar 950 unit dan realisasi sebesar 950 unit. (100 %)
2. Standardisasi Produk Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 3.076.163.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.988.842.712,00 atau 97,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi dengan target sebesar 30 unit dan realisasi sebesar 30 unit. (100 %)
3. Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE dengan anggaran sebesar Rp. 5.311.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.007.364.248,00 atau 94,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre dengan target sebesar 2.630 unit dan realisasi sebesar 2.630 unit. (100 %)
4. Penguatan Usaha K-UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 946.941.784,00 atau 94,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya dengan target sebesar 290 unit dan realisasi sebesar 290 unit. (100 %)
5. Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 784.516.850,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya dengan target sebesar 800 unit dan realisasi sebesar 800 unit. (100 %)
6. Restrukturisasi usaha K-UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.142.986.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.038.221.384,00 atau 95,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya dengan target sebesar 800 unit dan realisasi sebesar 800 unit. (100 %)

7) **Program Pemasaran Produk Koperasi UKM** dengan anggaran sebesar Rp. 12.088.640.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.668.532.344,00 atau 96,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya dengan target 5 persen dan realisasi 5 persen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.325.032.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.528.108,00 atau 98,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha dengan target sebesar 405 unit dan realisasi sebesar 405 unit. (100 %)
2. Penguatan informasi pasar bagi K-UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.157.613.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.085.405.661,00 atau 96,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar dengan target sebesar 180 unit dan realisasi sebesar 180 unit. (100 %)
3. Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 6.402.505.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.277.573.555,00 atau 98,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran dengan target sebesar 175 unit dan realisasi sebesar 175 unit. (100 %)
4. Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.203.488.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.000.025.020,00 atau 90,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM dengan target sebesar 300 unit dan realisasi sebesar 300 unit. (100 %)

8) **Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM** dengan anggaran sebesar Rp. 8.601.731.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.471.583.196,00 atau 98,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase koperasi aktif dengan target 70 persen dan realisasi 82,23 persen. (117,47 %)
- Indikator Program Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha dengan target 100 unit dan realisasi 75 unit. (75 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 786.835.140,00 atau 98,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan dengan target sebesar 180 unit dan realisasi sebesar 180 unit. (100 %)
2. Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.657.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.626.635.210,00 atau 98,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya dengan

target sebesar 740 unit dan realisasi sebesar 740 unit. (100 %)

3. Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 682.398.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 678.458.050,00 atau 99,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 200 orang. (100 %)

4. Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.372.702.525,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.339.417.457,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM dengan target sebesar 800 unit dan realisasi sebesar 800 unit. (100 %)

5. Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.676.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.236.889.659,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya dengan target sebesar 185 unit dan realisasi sebesar 185 unit. (100 %)

6. Pengawasan Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.838.203.925,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.803.347.680,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan dengan target sebesar 600 unit dan realisasi sebesar 600 unit. (100 %)

- 9) **Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi** dengan anggaran sebesar Rp. 13.212.794.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.095.231.207,00 atau 99,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik dengan target 65 persen dan realisasi 78 persen. (120 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.306.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.262.114.115,00 atau 98,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 80 %. (100 %)
2. Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM dengan anggran sebesar Rp. 1.602.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.574.066.727,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase diklat yang berkualitas dengan target sebesar 80 % dan realisasi sebesar 80 %. (100 %)
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.474.511.846,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM dengan target sebesar 467 orang dan realisasi sebesar 467 orang. (100 %)
4. peningkatan kapasitas koperasi, UKM dengan anggaran sebesar Rp. 5.504.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.489.270.738,00 atau 99,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah SDM K-UKM yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 1.540 orang dan realisasi sebesar 1.540 orang. (100 %)
5. Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

1.295.267.781,00 atau 99,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta diklat Koperasi UKM dengan target sebesar 836 orang dan realisasi sebesar 836 orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum optimalnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM. Pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM terutama pada isu - isu terbaru masih perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri.
- Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM
- Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang feasible namun tidak bankable.%
- Kapasitas produksi masih belum memadai dan kualitas produksi KUKM yang masih perlu ditingkatkan. Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip% *demand and supply*.
- Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM yang belum optimal

Solusi :

- Solusi dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM. Salah satunya melalui pelatihan manajerial dan pelatihan vokasional.
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut.
- Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Sehingga solusi yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas

Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur.

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM. Solusi yang harus kita tempuh untuk mewujudkannya adalah melalui Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
- Meningkatkan omset Koperasi dan UKM. Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. % Sehingga untuk mewujudkannya, % yang perlu kita tempuh adalah melalui Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM.

e. Penghargaan Nasional

- Terbaik Pertama Progress Pendataan Koperasi Triwulan III Tahun 2019 yang diberikan Oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

14. URUSAN PENANAMAN MODAL

14.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

a. Tujuan

Mewujudkan Peningkatan Minat dan Realisasi Penanaman Modal

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,29 %	1,79 %	138,76
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	86	88,34	102,72

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal pada tahun 2019 dengan target sebesar 1,29 % dan terealisasi sebesar 1,79 % atau 138,76 persen; Data tersebut diperoleh dari Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Jawa Timur Tahun 2019 sebesar Rp. 2.300 Trilyun, dari nilai tersebut unsur investasi sebagai unsur pembentukan PMTB sebesar 28% atau Rp. 644 Trilyun. Sehingga Nilai investasi UMKM (PMDN Non Fas) adalah sebesar Rp. 64,4 Trilyun. Sedangkan Nilai investasi PMA Tahun 2019 sebesar Rp. 13 Trilyun dan PDN sebesar Rp. 45,45 Trilyun.
Total Realisasi Investasi Tahun 2019 sebesar Rp. 122,9 Trilyun atau melebihi target 88,65 Trilyun.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada tahun 2019 dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 88,34 atau 102,72 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 7.084.027.558,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.841.759.946,00 atau 96,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor dengan target 100 % dan realisasi 88,34 . (88,34 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.084.027.558,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.841.759.946,00 atau 96,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Pegawai Yang Puas Terhadap Pelayanan Perkantoran dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 85 %. (100 %)

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 3.561.175.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.071.005.855,00 atau 86,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.100.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.785.600.111,00 atau 85,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia dengan target sebesar 1 Paket/Unit dan realisasi sebesar 1 Paket/Unit. (100 %)
- 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.460.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.285.405.744,00 atau 88,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Sarana Yang Terpelihara dengan target sebesar 1 Paket/Unit dan realisasi sebesar 1 Paket/Unit. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.334.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.060.782.057,00 atau 88,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 - 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.536.253.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.426.119.045,00 atau 92,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 60 Kali dan realisasi sebesar 60 Kali. (100 %)
 - 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 798.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 634.663.012,00 atau 79,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal dengan target sebesar 10 Orang dan realisasi sebesar 11 Orang. (110 %)
 - Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan target sebesar 185 Orang dan realisasi sebesar 180 Orang. (97,29 %)

4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.086.615.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 950.484.756,00 atau 87,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 450.745.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 389.560.375,00 atau 86,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Yang Tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
1. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 265.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 231.529.681,00 atau 87,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 163.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 152.212.000,00 atau 92,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Update Database Perangkat Daerah dengan target sebesar 1 Aplikasi dan realisasi sebesar 0 Aplikasi. (0 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 207.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.182.700,00 atau 85,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

5) **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan anggaran sebesar Rp. 13.240.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.316.369.098,00 atau 93,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Pelayanan Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP dengan target 100 % dan realisasi 80 %. (80 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT P2T dengan anggaran sebesar Rp. 4.690.199.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.526.409.047,00 atau 96,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT P2T dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 96 %. (117 %)
2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 5.978.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.341.377.009,00 atau 89,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Persetujuan/Perizinan Yang Diterbitkan dengan target sebesar 9.000 Dokumen dan realisasi sebesar 8.211 Dokumen. (91,23 %)
3. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.571.551.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.448.583.042,00 atau 95,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Rekomendasi/Non Izin Yang Dikeluarkan dengan target sebesar 21.000 Dokumen dan realisasi sebesar 7.363 Dokumen. (35,06 %)
 - Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 79 %. (79 %)

6) Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Penanaman Modal

dengan anggaran sebesar Rp. 7.678.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.428.682.005,00 atau 96,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Hasil Survey Kemudahan Melakukan Usaha dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Kajian Potensi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 2.303.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.217.973.283,00 atau 96,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Potensi Penanaman Modal dengan target sebesar 8 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 902.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 887.686.903,00 atau 98,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rumusan Kebijakan Penanaman Modal dengan target sebesar 2 Rumusan dan realisasi sebesar 2 Rumusan. (100 %)

3. Pemberdayaan Usaha Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 4.473.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.323.021.819,00 atau 96,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Usaha Besar dengan target sebesar 14 UMKM dan realisasi sebesar 25 UMKM. (178,57 %)
- Jumlah Dokumen Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

7) Program Peningkatan Realisasi Penanaman Modal dengan anggaran

sebesar Rp. 3.297.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.196.117.891,00 atau 96,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah) dengan target 88,65 Trilyun Rupiah dan realisasi 60,78 Trilyun Rupiah. (68,56 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 966.011.496,00 atau 96,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Permasalahan Penanaman Modal Yang Difasilitasi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 - Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Memahami Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target sebesar 450 Orang dan realisasi sebesar 360 Orang. (80 %)
2. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.211.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.178.246.207,00 atau 97,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang Dipantau Perkembangan Realisasinya dengan target sebesar 1.500 Dokumen dan realisasi sebesar 1.280 Dokumen. (85,33 %)
3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.085.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.051.860.188,00 atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target sebesar 325 Dokumen dan realisasi sebesar 381 Dokumen. (117,23 %)

- 8) **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
dengan anggaran sebesar Rp. 2.792.500.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 2.693.373.824,00 atau 96,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) dengan target 2 Data dan realisasi 2 Data. (100 %) Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
 1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.445.735.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.410.568.590,00 atau 97,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jenis Data dan Informasi yang Diupload Melalui Aplikasi Penanaman Modal dengan target sebesar 9 Jenis dan realisasi sebesar 9 Jenis. (100 %)
 2. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 525.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 512.619.100,00 atau 97,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal yang Akurat dengan target sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (200 %)
 3. Analisis Evaluasi Data Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 821.055.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 770.186.134,00 atau 93,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Dokumen Evaluasi Kinerja Penanaman Modal Kab/Kota dan PMA/PMDN dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Dokumen Peningkatan Kinerja Penanaman Modal Kab/Kota dan PMA/PMDN dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 9) **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp. 10.045.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.341.894.811,00 atau 93,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah minat Penanaman Modal PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip (Trilyun Rupiah) dengan target 138,68 Trilyun Rupiah dan realisasi 0 Trilyun Rupiah. (0 %) Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 7.315.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.784.606.848,00 atau 92,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Promosi dan Fasilitasi Promosi Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri dengan target sebesar 28 kali dan realisasi sebesar 40 Kali. (142,85 %)
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Kerjasama Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 1.629.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.512.887.485,00 atau 92,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dengan target sebesar 3 Jenis dan realisasi sebesar 5 Jenis. (250 %)
 - Jumlah Dokumen Loi/MoU dengan Luar Negeri dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.044.400.478,00 atau 94,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pedoman Strategi Promosi Penanaman Modal yang Berkualitas dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Terhambatnya pembebasan lahan (land clearing) pada beberapa mega proyek investasi di Jawa Timur seperti yang dialami PT. Pertamina Rosneft;
- Masih tingginya UMK/UMSK di ring 1 Jawa Timur, yang mana dalam penentuan ini juga masih perlu ditambahkan upah sektoral sebesar 5%-7% sehingga menjadi tinggi dan kurang dapat bersaing. Selain itu, di Kabupaten tertentu juga ada penambahan 5% sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten setempat;
- Masih banyak proyek investasi yang belum tercatat sebagai realisasi investasi, diantaranya pembangunan pembangunan yang dilaksanakan oleh BUMN seperti peningkatan jaringan listrik oleh PLN, pembangunan dan pengembangan pelabuhan oleh PT. Pelindo, pembangunan pipa air oleh PDAM, hotel, jalan tol, dan bandara oleh Angkasa Pura;
- Pengurusan izin-izin lanjutan di daerah yang terhambat oleh kebijakan yang ada di masing-masing Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang berbeda-beda;
- Diberlakukannya Online Single Submission sejak 9 Juli 2018, yang sampai saat ini masih terdapat kendala dalam implementasinya walaupun sudah mendapat pembaharuan OSS Versi 1.1 yang sudah diluncurkan oleh BKPM.

Solusi :

- Penyusunan regulasi yang lebih pro investasi dengan menginventarisasi semua peraturan perizinan pada OPD terkait menjadi satu melalui Peraturan Gubernur;
- Melakukan sosialisasi Online Single Submission dan memberikan konsultasi serta pendampingan dalam melakukan akses Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Melakukan sosialisasi penyusunan project prospektus di Kabupaten/kota dan mensinergikan perencanaan investasi dengan stakeholder terkait;
- Meningkatkan pelayanan dan konsultasi permasalahan-permasalahan di bidang Penanaman Modal melalui helpdesk;

- Membuat project-project baru yang menarik dan layak untuk ditawarkan kepada investor;
- Memacu terciptanya kawasan-kawasan ekonomi penunjang investasi (Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Kawasan Logistik Berikat) khususnya bagi Kabupaten/ Kota yang berada di ring 2 dan 3;
- East Java Investival sebagai even bisnis dan investasi di Jawa Timur yang menampilkan peluang investasi unggulan 38 Kabupaten/Kota, `BUMN, BUMD, sektor swasta, jasa perbankan, start up, franchise dan travel market yang menghadirkan para investor dan pelaku bisnis dari Indonesia dan luar negeri;
- Menambah SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada dengan mengikuti diklat dan workshop yang terkait dengan penanaman modal.

e. Penghargaan Nasional

-

15. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

15.1. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tujuan

1. Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan Prestasi Olahraga

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun
2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya peran aktif pemuda dan organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	18,19 %	18,19 %	100
Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat	Persentase pembibitan olahragawan berbakat	27,15 %	27,15 %	100
	Jumlah Atlet Berprestasi	1.288 Orang	1.288 Orang	100

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya peran aktif pemuda dan organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan pada tahun 2019 dengan target sebesar 18,19 % dan terealisasi sebesar 18,27 % atau 100 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase pembibitan olahragawan berbakat pada tahun 2019 dengan target sebesar 27,15 % dan terealisasi sebesar 33,55 % atau 123,57 persen;

- Indikator Sasaran Jumlah Atlet Berprestasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 1.288 Orang dan terealisasi sebesar 1.300 Orang atau 100,93 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 3.257.566.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.887.622.582,00 atau 88,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 95 % dan realisasi 95 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.257.566.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.887.622.582,00 atau 88,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran dengan target sebesar 95 % dan realisasi sebesar 95 %. (100 %)

2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 2.525.812.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.362.929.857,00 atau 93,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 865.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 774.324.265,00 atau 89,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia dengan target sebesar 9 Paket/Unit dan realisasi sebesar 9 . (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.659.827.160,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.588.605.592,00 atau 95,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 . (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 945.654.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 868.350.940,00 atau 91,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 477.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 435.931.190,00 atau 91,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Aturan yang berlaku dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 467.694.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 432.419.750,00 atau 92,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM dengan target sebesar 176 Orang dan realisasi sebesar 176 orang. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 4 orang dan realisasi sebesar 4 orang. (100 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp.

569.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 427.865.086,00 atau 75,13 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 253.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 177.540.900,00 atau 70,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 169.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.042.900,00 atau 86,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 112.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.705.286,00 atau 69,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 34.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.576.000,00 atau 74,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** dengan anggaran sebesar Rp. 3.387.341.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.105.966.178,00 atau 91,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Peran Serta Kepemudaan dengan target 18.19 % dan realisasi 18.19 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. **Penyadaran Pemuda Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis** dengan anggaran sebesar Rp. 1.541.316.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.413.573.180,00 atau 91,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pemuda yang sadar terhadap perubahan lingkungan strategi dengan target sebesar 535 orang dan realisasi sebesar 535 orang. (100 %)
2. **Pembinaan Potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda** dengan anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.056.974.366,00 atau 96,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pemuda berpotensi dan berkualitas jasmani mental spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda dengan target sebesar 228 Orang dan realisasi sebesar 228 Orang. (100 %)
3. **Pemberdayaan Potensi Ketrampilan dan Kemandirian berusaha** dengan anggaran sebesar Rp. 746.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 635.418.632,00 atau 85,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pemuda potensi yang memiliki ketrampilan dan kemandirian usaha dengan target sebesar 420 Orang dan realisasi sebesar 420 Orang. (100 %)

6) **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga** dengan anggaran sebesar Rp. 13.310.463.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.688.914.079,00 atau 87,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Pembinaan Olahraga berbakat, massal, dan Khusus dengan target 12.03 % dan realisasi 12.03 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat dengan anggaran sebesar Rp. 5.622.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.667.268.740,00 atau 83,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat dengan target sebesar 1971 Orang dan realisasi sebesar 1971 Orang. (100 %)

2. Pemberdayaan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 6.435.263.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.199.608.289,00 atau 96,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peserta Olahraga Massal dengan target sebesar 15.134 Orang dan realisasi sebesar 15.134 Orang. (100 %)

3. Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualang dan Tantangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.253.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 822.037.050,00 atau 65,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Olahragawan Usia Dini, Lanjut Usia, Disabilitas, Petualangan dan Tantangan dengan target sebesar 1000 Orang dan realisasi sebesar 1000 Orang. (100 %)

7) **Program Pengembangan Kerjasama Kemitraan Pemuda dan Olahraga** dengan anggaran sebesar Rp. 1.895.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.347.115.984,00 atau 71,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen perjanjian kerjasama yang di susun dengan target 42,37 % dan realisasi 42,37 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.683.260,00 atau 79,65%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rumusan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

2. Kreatifitas Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 545.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.527.013,00 atau 71,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah karya kreatif dengan target sebesar 6 Karya dan realisasi sebesar 6 Karya. (100 %)

3. Pemberdayaan dan Penambahan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 975.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 660.905.711,00 atau 67,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang diberdayakan dengan target sebesar 2 Sarpras dan realisasi sebesar 2 Sarpras. (100 %)

- 8) **Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Pemuda dan Olahraga** dengan anggaran sebesar Rp. 2.378.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.314.417.920,00 atau 97,29 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Tenaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang mengikuti Pengembangan Manajemen dengan target 35,47 % dan realisasi 35,47 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan Manajemen Organisasi Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 369.870.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 362.304.810,00 atau 97,95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pengelola/Pengurus Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang difasilitasi dalam latihan manajemen Organisasi dengan target sebesar 255 Orang dan realisasi sebesar 255 Orang. (100 %)
2. Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Profesi dengan anggaran sebesar Rp. 1.515.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.502.673.810,00 atau 99,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga yang difasilitasi dengan target sebesar 350 Orang dan realisasi sebesar 350 Orang. (100 %)
3. Pembinaan Kualitas SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan dengan anggaran sebesar Rp. 493.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 449.439.300,00 atau 91,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang dibina dengan target sebesar 280 Orang dan realisasi sebesar 280 Orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

➤ **Permasalahan Bidang Kepemudaan**

- Banyaknya pemuda terjebak dalam dekadensi moral, kriminalitas, Narkoba dan terpapar radikalisme;
- Masih terbatasnya pemuda yg bergerak di bidang Kewirausahaan dan mengembangkan Kepeloporan;
- Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan belum maksimal;
- Banyak OKP belum patuh terhadap Undang-Undang Kepemudaan;
- Peran aktif Pemuda dalam Pembangunan belum maksimal.

➤ **Permasalahan Bidang Keolahragaan**

- Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bina prestasi olahraga.
- Terbatasnya sentra-sentra olahraga prestasi di masyarakat.
- Belum maksimalnya sinergitas industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya dalam mendukung kegiatan olahraga prestasi.

2) **Solusi :**

- Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama,
- Peningkatan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan dalam pembangunan,
- Perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras serta penyebaran penyakit HIV/AIDS,
- 4. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa,
- Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan,
- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan olahraga.

e. Penghargaan Nasional

1. Terbaik nasional Pemuda Pelopor bidang Agama, Sosial dan Budaya atas nama Musalyna;
2. Terbaik nasional Pemuda Pelopor bidang Inovasi Teknologi atas nama Rangga Ega Santoso;
3. Terbaik nasional Pemuda Pelopor bidang Pangan, atas nama Rizky Syahrirul Barokah;
4. Wirausaha Muda Pemula tingkat nasional bidang Industri kreatif atas nama Sisti Nur Banin;

5. Wirausaha Muda Pemula tingkat nasional bidang Socioprenuer atas nama Arsseliyah Nuraiani;
6. Penggerak Wirausaha berprestasi tingkat nasional atas nama Dymas Tunggul Panuju dengan nama lembaga Forum Silaturrahim UKM Pantura;
7. Juara Umum Pekan Paralimpian Pelajar Nasional (Peparpenas) Tahun 2019 dengan perolehan medali 20 emas, 2 perak dan 1 perunggu;
8. Pekan Olahraga Pelajar tingkat Nasional (POPNAS) dengan perolehan medali 29 emas, 30 perak dan 41 perunggu.
9. Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) dengan perolehan medali 10 emas, 9 perak dan 11 perunggu

16. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

16.1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku seni dalam penciptaan kreatifitas dan karya seni sesuai dengan nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.
3. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya	Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional	20 penghargaan	37 penghargaan	185
Meningkatnya Pemeliharaan/Pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur	Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan	271 cagar budaya	298 cagar budaya	109.96
Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur	persentase peningkatan wisatawan mancanegara	1 %	18.74 %	18.74
	Persentase peningkatan wisatawan nusantara	2 %	46.31 %	23.16
	Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara	1 %	0.84 %	0.84
	Pesentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara	2 %	7.51 %	3.76

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional pada tahun 2019 dengan target sebesar 20 penghargaan dan terealisasi sebesar 37 penghargaan atau 185 persen; hal tersebut dicapai karena pembinaan yang telah dilakukan kepada seniman serta keikutsertaan pada event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemeliharaan/Pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah Cagar Budaya (benda, struktur, situs kawasan) yang dipelihara/dilestarikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 271 cagar budaya dan terealisasi sebesar 298 cagar budaya atau 109.96 persen; hal tersebut merupakan target yang telah ditetapkan dalam penemuan benda, struktur, situs, kawasan

Sasaran 3 : Meningkatnya kunjungan, penerimaan Devisa dan Pengeluaran Wisatawan mancanegara dan nusantara di Jawa Timur, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran persentase peningkatan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dengan target sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 18.74 % atau 18.74 persen; hal tersebut karena adanya promosi melalui digitalisasi serta direct promotion dan diversifikasi paket wisata, Famtrip sebagai endoser pariwisata.
- Indikator Sasaran Persentase peningkatan wisatawan nusantara pada tahun 2019 dengan target sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 46.31 % atau 23.16 persen;

- hal tersebut karena adanya promosi melalui digitalisasi dan diversifikasi paket wisata, Famtrip sebagai endoser pariwisata.
- Indikator Sasaran Persentase peningkatan penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dengan target sebesar 1 % dan terealisasi sebesar 0.84 % atau 0.84 persen;
hal tersebut sebagai dampak dari jumlah wisatawan meningkat diikuti dengan pengeluaran wisatawan yang meningkat pula. Seimbang dengan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan.
- Indikator Sasaran Pesentase peningkatan pengeluaran wisatawan nusantara pada tahun 2019 dengan target sebesar 2 % dan terealisasi sebesar 7.51 % atau 3.76 persen;
hal tersebut sebagai dampak dari jumlah wisatawan meningkat diikuti dengan pengeluaran wisatawan yang meningkat pula. Seimbang dengan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 15.234.149.714,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.924.721.624,00 atau 97,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 81.50 %. (81.50 %)
Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 15.234.149.714,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.924.721.624,00 atau 97,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 10.653.702.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.309.026.252,00 atau 96,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.280.970.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.068.344.283,00 atau 95,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 6.372.732.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.240.681.969,00 atau 97,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.575.265.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.454.013.593,00 atau 95,29 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.415.881.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.375.323.001,00 atau 97,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.159.384.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.078.690.592,00 atau 93,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebesar 260 Orang dan realisasi sebesar 260 Orang. (100 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.352.036,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.811.984.697,00 atau 94,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.007.117.036,00 dan terealisasi sebesar Rp. 942.203.598,00 atau 93,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 839.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 797.594.912,00 atau 94,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 12 Dokumen dan realisasi sebesar 12 Dokumen. (100 %)
- 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 73.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.186.187,00 atau 98,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 2 jenis dan realisasi sebesar 2 jenis. (100 %)
- 5) **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan anggaran sebesar Rp. 5.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.053.592.011,00 atau 99,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Jumlah cagar budaya dengan target 271 Benda Cagar Budaya dan realisasi 298 Benda Cagar Budaya. (109.96 %)Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.965.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.951.848.448,00 atau 99,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pemahaman nilai sejarah dan wawasan kebangsaan dengan target sebesar 450 Orang dan realisasi sebesar 534 Orang. (118.67 %)
 2. Pembinaan Dan Pelestarian Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.354.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.333.364.772,00 atau 99,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah cagar budaya yang terpelihara dengan target sebesar 240 Situs dan realisasi sebesar 240 Situs. (100 %)

- Jumlah masyarakat yang berperan memelihara cagar budaya dengan target sebesar 460 Orang dan realisasi sebesar 460 Orang. (100 %)

3. Registrasi Cagar Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 781.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 768.378.791,00 atau 98,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Cagar Budaya yang terinventarisir dengan target sebesar 271 Benda Cagar Budaya dan realisasi sebesar 298 Benda Cagar Budaya. (109.96 %)
- Jumlah Dokumentasi Sejarah Lokal dengan target sebesar 1500 Buku dan realisasi sebesar 1500 Buku. (100 %)

6) **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** dengan anggaran sebesar Rp. 12.686.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.196.935.169,00 atau 96,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah penyajian seni budaya dengan target 58 Kegiatan Seni Budaya dan realisasi 156 Kegiatan Seni Budaya. (268.97 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan festival budaya daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.802.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.728.078.500,00 atau 97,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah karya seni budaya daerah dengan target sebesar 60 karya seni dan realisasi sebesar 69 karya seni. (115 %)

2. Pembinaan Kesenian dengan anggaran sebesar Rp. 6.764.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.529.565.607,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah grup kesenian yang dibina melalui fasilitasi dalam dan luar daerah dengan target sebesar 81 Grup dan realisasi sebesar 81 . (100 %)

3. Pemberdayaan Kelembagaan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.119.052.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.939.291.062,00 atau 94,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lembaga budaya yang dikembangkan dengan target sebesar 53 Sanggar dan realisasi sebesar 53 Sanggar. (100 %)
- 7) **Program pengembangan Lembaga Seni Wilwatikta** dengan anggaran sebesar Rp. 5.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.514.469.088,00 atau 99,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Jumlah seniman berbasis akademik dengan target 768 seniman dan realisasi 1.068 seniman. (139.06 %) Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Penguatan sarana dan prasarana UPT Pemberdayaan Lembaga Seni wilwatikta dengan anggaran sebesar Rp. 284.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 269.696.248,00 atau 94,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 2. Penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta dengan anggaran sebesar Rp. 5.265.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.244.772.840,00 atau 99,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah karya akademis / Gelar Karya dengan target sebesar 8 Gelar Karya dan realisasi sebesar 35 . (437.50 %)
 - Jumlah karya akademis / Sendratari dengan target sebesar 2 Sendratari dan realisasi sebesar 4 Sendratari. (200 %)
- 8) **Program Pengembangan Taman Budaya** dengan anggaran sebesar Rp. 9.027.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.879.128.875,00 atau 98,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase masyarakat yang puas terhadap penyelenggaraan seni budaya dengan target 82 % dan realisasi 95.60 %. (116.59 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penguatan sarana dan prasarana UPT Taman Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 826.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 819.289.505,00 atau 99,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Taman Budaya dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 99.15 %. (110.17 %)
 2. Penyajian Seni Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 5.979.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.872.026.870,00 atau 98,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah penyajian seni budaya di Taman Budaya dengan target sebesar 48 kali dan realisasi sebesar 48 kali. (100 %)
 3. Pendokumentasian dan Publikasi Seni Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 543.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 538.197.200,00 atau 98,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumentasi dan publikasi seni budaya dengan target sebesar 13 item dan realisasi sebesar 25 item. (192.31 %)
 4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.677.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.649.615.300,00 atau 98,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia dengan target sebesar 10 buah dan realisasi sebesar 10 buah. (100 %)
- 9) **Program Pengembangan Laboratorium, pelatihan dan Kesenian** dengan anggaran sebesar Rp. 9.177.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.145.591.004,00 atau 99,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah pelaku seni yang terlatih dengan target 570 Orang dan realisasi 570 Orang. (100 %)
- Indikator Program Revitalisasi Kesenian dengan target 2 kesenian dan realisasi 2 kesenian. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penguatan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian dengan anggaran sebesar Rp. 959.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 950.421.366,00 atau 99,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 90 %. (100 %)

2. Revitalisasi dan Reaktualisasi Seni Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.961.205.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.950.135.800,00 atau 99,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah revitalisasi seni budaya dengan target sebesar 2 Keg. Revitalisasi dan realisasi sebesar 2 Keg. Revitalisasi. (100 %)
- Jumlah seni budaya yang teraktualisasi dengan target sebesar 2 cipta karya seni dan realisasi sebesar 2 . (100 %)

3. pelatihan seni budaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.256.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.245.033.838,00 atau 99,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah grup seni yang terlatih dengan target sebesar 45 grup dan realisasi sebesar 140 grup. (311.11 %)

- 10) **Program pengelolaan Museum** dengan anggaran sebesar Rp. 6.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.970.922.643,00 atau 98,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase peningkatan kunjungan ke Museum Mpu Tantular dengan target 2 % dan realisasi 2 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penguatan sarana dan prasarana UPT Museum Mpu Tantular dengan anggaran sebesar Rp. 2.660.631.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.636.494.873,00 atau 99,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT Museum Mpu Tantular dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 90 %. (100 %)
2. Penyajian dan Bimbingan Edukasi Museum dengan anggaran sebesar Rp. 1.087.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.072.645.820,00 atau 98,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta bimbingan edukasi dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 200 orang. (100 %)
3. Pelestarian Koleksi Museum dengan anggaran sebesar Rp. 501.868.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 495.915.100,00 atau 98,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah koleksi museum mpu tantular yang dikonservasi dengan target sebesar 500 koleksi dan realisasi sebesar 500 koleksi. (100 %)
4. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Museum dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.765.866.850,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah koleksi museum yang terkonservasi dan terlabel dengan target sebesar 800 buah dan realisasi sebesar 800 buah. (100 %)
 - jumlah pengunjung museum dengan target sebesar 55.000 orang dan realisasi sebesar 121.500 orang. (220.91 %)

11) **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** dengan anggaran sebesar Rp. 7.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.519.280.124,00 atau 99,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 56.398.774 orang dan realisasi 72.386.921 orang. (128.35 %)
- Indikator Program Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 637.278 orang dan realisasi 726.897 orang. (114.06 %)
- Indikator Program Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan target 55.761.496 orang dan realisasi 71.660.024 orang. (128.51 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Promosi Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 4.254.818.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.239.795.678,00 atau 99,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah promosi pariwisata dalam negeri yang telah dilaksanakan dan diikuti dengan target sebesar 11 Kali dan realisasi sebesar 16 kali. (145.45 %)
2. Promosi Pariwisata Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 770.583.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 769.271.900,00 atau 99,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah promosi pariwisata luar negeri yang telah diikuti dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)
3. Penguatan sarana promosi dan informasi pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 1.974.182.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.964.225.196,00 atau 99,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Jenis Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata dengan target sebesar 20 Jenis dan realisasi sebesar 20 jenis. (100 %)
4. Pendataan dan pemetaan pasar dengan anggaran sebesar Rp. 550.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

545.987.350,00 atau 99,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen analisa pasar dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

12) **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** dengan anggaran sebesar Rp. 5.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.507.326.319,00 atau 99,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) yang dikembangkan dengan target 3 KSPP dan realisasi 3 KSPP. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya Dan Buatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.940.184.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.924.857.626,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Daya Tarik Wisata Budaya dan Buatan yang dikembangkan dengan target sebesar 20 DTW dan realisasi sebesar 20 DTW. (100 %)

2. Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam dengan anggaran sebesar Rp. 1.362.726.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.344.592.714,00 atau 98,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Daya Tarik Wisata Alam yang dikembangkan dengan target sebesar 8 DTW dan realisasi sebesar 44 DTW. (550 %)

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.247.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.237.875.979,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok masyarakat dan tata kelola pariwisata yang dikembangkan di destinasi pariwisata provinsi dengan target sebesar 1.160 orang dan realisasi sebesar 1.340 orang. (115.52 %)

13) **Program pengembangan ekonomi kreatif** dengan anggaran sebesar Rp. 8.908.139.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.771.803.816,00 atau 53,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase produk ekonomi kreatif yang difasilitasi pemasarannya dengan target 33 % dan realisasi 33 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penguatan sarana dan prasarana UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 1.165.485.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.311.236,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT. Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 90 %. (100 %)

2. Penguatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 718.064.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 707.100.850,00 atau 98,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta pelaku usaha Ekonomi kreatif dengan target sebesar 120 orang dan realisasi sebesar 120 orang. (100 %)

3. Penguatan Produk Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 516.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 514.665.500,00 atau 99,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah usaha Ekonomi kreatif dengan target sebesar 40 usaha dan realisasi sebesar 40 usaha. (100 %)

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 6.508.139.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.393.726.230,00 atau 36,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan target sebesar 4 buah dan realisasi sebesar 2 buah. (50 %)
- 14) **Program Pengembangan Industri Pariwisata** dengan anggaran sebesar Rp. 5.252.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.192.539.015,00 atau 98,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase usaha pariwisata yang dikembangkan dengan target 33 % dan realisasi 33 %. (100 %) Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Penguatan Usaha Sarana Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 2.113.504.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.092.616.187,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah usaha sarana pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya dengan target sebesar 400 usaha dan realisasi sebesar 532 usaha. (133 %)
 2. Penguatan Usaha Jasa Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 1.108.396.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.093.910.910,00 atau 98,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pelaku usaha Jasa yang ditingkatkan kualitasnya dengan target sebesar 300 usaha dan realisasi sebesar 300 usaha. (100 %)
 - Jumlah Pelaku usaha Jasa yang ditingkatkan kualitasnya dengan target sebesar 80 BPW dan realisasi sebesar 80 BPW. (100 %)
 3. Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 2.030.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.006.011.918,00 atau 98,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih tersertifikasi dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 220 . (110 %)

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- 1) Lebih dioptimalkan kegiatan dokumentasi dan inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
- 2) Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya lokal.
- 3) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu dijaga.
- 4) Semakin ketatnya persaingan antar negara, antar provinsi dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 5) Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang.

2) Solusi :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal.
- 2) Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha pariwisata.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.
- 4) Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri, terutama pada pasar potensial.
- 5) Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi

e. Penghargaan Nasional

1. Lawatan Sejarah Tk. Nasional an. Alimatul Sa'adah (Siswa SMAN 1 Purwosari) sebagai Pemenang Harapan II.
2. Jejak Tradisi Tingkat Nasional di Bandung meraih Juara ke 2 atas nama :

No	Nama	SMAN	Kab/Kota
1	Devin Elysia Dhywinanda	SMAN 1 Ponorogo	Kab. Ponorogo
2	Diah Ayu Febrianti	SMAN 1 Pamekasan	Kab. Pamekasan
3	Kharismatul Zaenab Akhilla	SMAN 1 Jombang	Kab. Jombang

3. Parade Tari Nusantara di TMII Jakarta dari Kab. Blitar memperoleh penghargaan :
 - a. 3 Penyaji Unggulan Non Ranking
 - b. 5 Penulis Naskah Non Ranking
 - c. 5 Penata Rias Busana Non Ranking (Dimas Anggoro Putra)
4. Parade Musik Daerah di TMII Jakarta â€œDepot Panjakâ€ PPST SMPN 4 Malang memperoleh penghargaan : Penyaji Unggulan
5. Festival Dalang Bocah di TMII Jakarta memperoleh penghargaan :

No	Nama	Kategori	Lakon	Kab/Kota
1	Dyah Ayu Kusumaningtyas	Dalang Bocah Mumpuni	Warastra Siswa Tama, Wayang LKulit gagrak Surakarta	Kota Madiun
2	Dyah Ayu Kusumaningtyas	Penyaji Catur Terbaik unsur Pakeliran	Warastra Siswa Tama, Wayang LKulit gagrak Surakarta	Kota Madiun
3	Farhan Barru Aziz	Penyaji Lakon Terbaik unsur Pakeliran	Salyo Gugur, Wayang Kulit Gagrak Surakarta	Kab. Ponorogo
4	Farhan Barru Aziz	Penyaji Terbaik Non Rangking	Salyo Gugur, Wayang Kulit Gagrak Surakarta	Kab. Pnorogo

6. Gelar Tari Remaja Nasional di Gedung Kesenian Jakarta membawakan Tarian Damar Kurung dari Kab. Gresik memperoleh penghargaan :
 - d. Penari terpilih : Sanggar Seni Giri Budaya Spentig Gresik
 - e. Koreografer Terpilih : Thalita Ayu Safitri
 - f. Grup Penyaji terpilih : Sanggar Seni Giri Budaya Spentig Gresik
7. Konser Karawitan Anak Tingkat Nasional dari Kab. Banyuwangi di Gedung Kesenian Jakarta memperoleh penghargaan :
 - g. 5 Penyaji Terpilih
 - h. 10 Pemusik Terpilih : Muhamad Ismail (Pengendang)
8. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) :

No	Karya Budaya	Domain	Kab/Kota
1	Mocoan Lontar Yusuf Banyuwangi	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Kab. Banyuwangi
2	Jaran Kepang Jawa Timur	Seni Pertunjukan	Kota Batu
3	Bantengan Jawa Timur	Seni Pertunjukan	Kota Batu dan Kab. Pasuruan
4	Reog Bulkiyo	Seni Pertunjukan	Kab. Blitar
5	Larung Sesaji Pantai Tambakrejo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Blitar
6	Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku mengenai Alam Semesta	Kab. Bojonegoro
7	Sanggiring Gumeno	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Gresik
8	Besuatan Jombang	Seni Pertunjukan	Kab. Jombang
9	Riyaya Undhuh-Undhuh Mojowarno	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Jombang
10	Kedhuk Beji	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Ngawi
11	Kethek Ogleng Pacitan	Seni Pertunjukan	Kab. Pacitan
12	Kiprah Glipang	Seni Pertunjukan	Kab. Probolinggo
13	Kerapan Sapi Brujul	Seni Pertunjukan	Kota Probolinggo
14	Hodo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Situbondo

15	Ojhung	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Situbondo
16	Mamaca Situbondo	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Kab. Situbondo
17	Pengantin Putri Jenggolo	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Sidoarjo
18	Saronen	Seni Pertunjukan	Kab. Sumenep
19	Jamasan Pusaka kanjeng Kyai Upas	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Kab. Tulungagung
20	Gemblak Tuban	Seni Pertunjukan	Kab. Tuban

9. ISTA di Jakarta :

No	Nama	Kategori	Desa Wisata/DTW/Hotel	Penghargaan
1	Desa Wisata / DTW	Tata Kelola Destinasi	Wisata Grand Watu Dodol Banyuwangi	Green Silver
		Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal	Desa Wisata Boonpring Sanankerto Kab. Malang	Green Bronze
		Pelestarian Budaya	Wisata Alam Watu Rumpuk dan Pendakian Tapak Bima Kab. Madiun	Green Silver
		Pelestarian Lingkungan	Desa Wisata Kertosari Kab. Pasuruan	Green
2	Pokdarwis	Mandiri	Dukung Alas Lestari Kab. Malang	Peringkat ke 4
3	Hotel		Grand Mercure Mirama Surabaya	Peringkat ke 2
			JW Marriot Surabaya	Peringkat ke 4
			Shangri-La Surabaya	Peringkat ke 5

10.Indonesia Attractiveness Award di Ballroom Hotel Pullman Jakarta,
Jawa Timur meraih penghargaan Platinum untuk Bidang Pelayanan Publik dan Pariwisata;

11. Duta Wisata Indonesia di River Side Hall Bali meraih Penghargaan Wakil II (Raka Raki Jatim);
12. Lomba Desa Wisata Nusantara dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Tebing Breksi, Desa Sambirejo, Sleman, Yogyakarta memperoleh penghargaan :
 - a. Desa Wisata Kategori Maju : Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur (Juara 3);
 - b. Desa Wisata Kategori Berkembang : Desa Dadapan, Pacitan, Jawa Timur (Harapan 2);

17. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

17.1. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

a. Tujuan

1. Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur
2. Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan di Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat Jawa Timur	Indeks Minat Baca	74 %	73,6 %	99,45
	Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam	50 %	53,05 %	106,1
Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tertib Arsip	80 %	85,10 %	106,37
Pemerintah Daerah yang Tertib, Rapi dan Handal	Persentase Arsip yang Terselamatkan	28,78 %	55,03 %	191,20

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Gemar dan Budaya Baca Masyarakat Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Minat Baca pada tahun 2019 dengan target sebesar 74 % dan terealisasi sebesar 73,6 % atau 99,45 persen;
Pengukuran minat baca masyarakat Jawa Timur tergolong tinggi yaitu 73,6 namun masih sebatas minat/keinginan membaca saja belum ada tindakan (action) untuk membaca. Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur selain mengukur minat membaca juga dilakukan mengukur tingkat kegemaran membaca (action) dan hasilnya masih 60,6 atau sedang. Tindakan berikutnya yang harus dilakukan bila keinginan/minat membaca sudah

ada, kini tinggal dorongan dan pendekatan perpustakaan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan nyata, menyediakan buku/e-book bermutu bagus, dengan berbagai macam subyek, memberikan pelayanan yang baik dan menjemput bola dengan mobil perpustakaan keliling atau mobil dongeng keliling kepada masyarakat yang keberadaannya jauh dari perpustakaan.

- Indikator Sasaran Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam pada tahun 2019 dengan target sebesar 50 % dan terealisasi sebesar 53,05 % atau 106,1 persen;

Dunia penerbitan bahan pustaka (buku, e book dll) di Jawa Timur cukup berkembang dan sesuai data yang ada di tahun 2019 ada 377 baik penerbit swasta ataupun penerbit pemerintah dan yang aktif hanya 200 penerbit saja dengan produk yang diserahkan berjumlah sekitar 5.778 judul. Melihat data penerbit yang aktif dan yang diserahkan sebenarnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa memperoleh lebih banyak terbitan, kedepan kegiatan akan lebih diarahkan pada pendekatan pada penerbit baik dari penerbit swasta maupun penerbit pemerintah karena masih banyak penerbit yang belum tahu bahwa menyerahkan hasil penerbit merupakan kewajibannya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah yang Tertib, Rapi dan Handal, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tertib Arsip pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 85,10 % atau 106,37 persen;

Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan karena ada upaya perbaikan penyelenggaraan kearsipan melalui berbagai kegiatan kearsipan, disamping itu ada upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui upaya pendampingan, sosialisasi, penyediaan anggaran

dan penyediaan sarana prasarana kearsipan. Dari jumlah 47 Perangkat Daerah yang memiliki nilai pengawasan memuaskan sampai dengan cukup sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 ada 40 Perangkat Daerah atau 85,10%.

- Indikator Sasaran Persentase Arsip yang Terselamatkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 28,78 % dan terealisasi sebesar 29,18 % atau 101,38 persen;
Ada peningkatan hasil yang signifikan dari arsip yang terselamatkan, karena banyaknya upaya penyelamatan melalui akuisisi, restorasi, pengolahan dan alih media. Total jumlah khazanah arsip 1.425,8 ML namun yang sudah dapat diakses 784,6 ML yang sisanya masih dalam proses pengolahan.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 3.734.656.220,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.578.088.499,00 atau 95,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.734.656.220,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.578.088.499,00 atau 95,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 4.308.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.144.209.503,00 atau 96,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.330.283.663,00 atau 97,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.908.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.813.925.840,00 atau 95,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.366.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.284.385.308,00 atau 93,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 403.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 402.819.072,00 atau 99,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 962.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 881.566.236,00 atau 91,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebesar 200 Pegawai dan realisasi sebesar 200 orang. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 200 orang. (100 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 742.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 728.452.500,00 atau 98,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 288.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 288.456.200,00 atau 99,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 160.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.241.100,00 atau 99,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 81.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.614.100,00 atau 85,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update Database SKPD dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 211.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 210.141.100,00 atau 99,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.257.583.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.949.887.516,00 atau 86,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Perpustakaan di Jawa Timur dengan target 27.745 Perpustakaan dan realisasi 27.646 . (99.64 %) Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.517.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.189.610,00 atau 80,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah perpustakaan PKK Desa/Kelurahan yang dibentuk dengan target sebesar 30 perpustakaan desa/kel dan realisasi sebesar 28 . (93.33 %)
 - Jumlah penetapan angka kredit pustakawan dengan target sebesar 45 Orang pustakawan dan realisasi sebesar 43 . (95,5 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pengelolaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 632.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.897.853,00 atau 99,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah tenaga pengelola perpustakaan PKK desa/Kelurahan yang terlatih dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 60 orang. (100 %)

- Jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang dilatih dengan target sebesar 240 Orang dan realisasi sebesar 180 . (75 %)
3. Perluasan Jaringan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 107.163.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.800.053,00 atau 97,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kerjasama Perpustakaan dengan target sebesar 6 kerjasama dan realisasi sebesar 6 . (100 %)
- 6) **Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.152.387.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.151.016.114,00 atau 99,88 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Koleksi Perpustakaan dengan target 467.791 Buku dan realisasi 484.204 Buku. (103,50 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Pendayagunaan Koleksi Deposit dengan anggaran sebesar Rp. 16.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.517.500,00 atau 99,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang terhimpun dengan target sebesar 2.500 item dan realisasi sebesar 5.778 . (231,12 %)
2. Penguatan Muatan Lokal dan Budaya Etnis dengan anggaran sebesar Rp. 157.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 157.505.129,00 atau 99,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah koleksi Muatan Lokal dengan target sebesar 200 Judul dan realisasi sebesar 140 Judul. (70 %)
 - Jumlah informasi terseleksi muatan lokal dengan target sebesar 80 entry dan realisasi sebesar 80 . (100 %)

- Jumlah koleksi literatur sekunder dengan target sebesar 5.000 Entri dan realisasi sebesar 6.685 . (133,7 %)
3. Akuisisi dan Alih Media dengan anggaran sebesar Rp. 771.162.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 769.967.741,00 atau 99,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan dengan target sebesar 3.850 buku dan realisasi sebesar 5.352 buku. (139 %)
 - Jumlah koleksi digital dengan target sebesar 1.400 buku dan realisasi sebesar 2.180 buku. (155,71 %)
4. Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 207.065.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.025.744,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Koleksi Perpustakaan yang terolah dengan target sebesar 4000 buku dan realisasi sebesar 5.445 . (136 %)
 - Jumlah koleksi perpustakaan yang dikonservasi dengan target sebesar 500 buku dan realisasi sebesar 505 . (101 %)
 - Jumlah naskah kuno yang terdata dengan target sebesar 60 judul dan realisasi sebesar 62 judul. (103,33 %)
- 7) **Program Peningkatan Mutu Layanan Perpustakaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.041.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.035.147.345,00 atau 99,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan dengan target 84 dan realisasi 80.31 . (95.60 %) Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Pelayanan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.092.214,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemustaka di Jawa Timur dengan target sebesar 4.550.000 orang dan realisasi sebesar 12.834.401 . (282.07 %)
 - Jumlah buku yang dipinjam dengan target sebesar 2.200.000 buku dan realisasi sebesar 8.015.516 buku. (364,34 %)
2. Pelayanan Ekstensi dengan anggaran sebesar Rp. 94.223.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 94.108.900,00 atau 99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Pelayanan Ekstensi dengan target sebesar 75 kali dan realisasi sebesar 111 kali. (148 %)
3. Otomasi Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 205.777.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 205.324.261,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Perpustakaan yang terotomasi dengan target sebesar 50 Perpustakaan dan realisasi sebesar 50 . (100 %)
4. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca dengan anggaran sebesar Rp. 441.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 436.621.970,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Promosi dan Publikasi dengan target sebesar 4 pameran kali dan realisasi sebesar 8 kali. (200 %)
 - Jumlah pelayanan mobil dongeng keliling dengan target sebesar 72 kali dan realisasi sebesar 121 kali. (168,06 %)
- 8) **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 848.053.500,00 atau 99,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah OPD yang tertib arsip dengan target 47 OPD dan realisasi 40 OPD. (85,10 %)
 - Indikator Program Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan target 150 orang dan realisasi 1162 orang. (774.66 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Pembinaan Orientasi Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.860.600,00 atau 99,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah SDM Kearsipan terlatih dengan target sebesar 360 orang dan realisasi sebesar 400 . (111.11 %)
 - Jumlah bimbingan dan konsultasi dengan target sebesar 47 OPD dan realisasi sebesar 50 OPD. (106,38 %)
2. Pemasyarakatan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 126.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 125.424.400,00 atau 99,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta sosialisasi Kearsipan dengan target sebesar 375 orang dan realisasi sebesar 375 . (100 %)
 - Jumlah publikasi kearsipan dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 148.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 148.732.400,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sekretaris Desa/kelurahan terlatih dalam pengelolaan arsip dengan target sebesar 276 orang dan realisasi sebesar 276 . (100 %)
4. Pengawasan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.319.900,00 atau 99,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah OPD yang dilakukan Pengawasan Kearsipan dengan target sebesar 50 OPD dan realisasi sebesar 50 . (100 %)
5. Penilaian Kinerja Arsiparis dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

99.716.200,00 atau 99,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Penetapan Angka Kredit Arsiparis dengan target sebesar 100 arsiparis dan realisasi sebesar 97 . (97 %)
- Jumlah Arsiparis bersertifikasi dengan target sebesar 4 orang arsiparis dan realisasi sebesar 17 . (425 %)

9) **Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip** dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 799.072.347,00 atau 99,88 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah arsip dapat di akses publik dengan target 54.200 nomor dan realisasi 57.000 . (105,16 %)
 - Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Arsip dengan target 82 Indeks dan realisasi 80,20 Indeks. (97,80 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penilaian, Penyusutan, Akuisisi dan Pengolahan Arsip dengan anggaran sebesar Rp. 263.207.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 262.910.025,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Arsip yang diakuisisi dengan target sebesar 10 Meter Linier dan realisasi sebesar 10.8 . (108 %)
- Jumlah arsip yang diolah dengan target sebesar 2 inventaris dan realisasi sebesar 11 . (550 %)

2. Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip dengan anggaran sebesar Rp. 291.345.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 291.015.722,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Arsip yang direstorasi dengan target sebesar 5.200 Lembar dan realisasi sebesar 11.052 . (212.5 %)
- Jumlah arsip yang alihmediakan dengan target sebesar 20.000 Lembar dan realisasi sebesar 84.229 . (421,14 %)

3. Pengolahan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) dengan anggaran sebesar Rp. 64.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.363.600,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah informasi arsip statis yang dientri dengan target sebesar 3.000 Nomor dan realisasi sebesar 1.531 . (51.03 %)
 4. Layanan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 180.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 180.783.000,00 atau 99,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengguna arsip dengan target sebesar 1.500 Orang dan realisasi sebesar 1.549 . (103.26 %)
 - Jumlah pengunjung wisata arsip dengan target sebesar 1.200 orang dan realisasi sebesar 1.650 . (137.5 %)
- 10) **Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan** dengan anggaran sebesar Rp. 292.417.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 289.121.750,00 atau 98,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Peraturan/pedoman kearsipan yang ditetapkan dengan target 24 peraturan dan realisasi 4 . (16,66 %)
 - Indikator Program Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target 12 kerjasama dan realisasi 6 . (50 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Pengkajian, Pengembangan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 190.945.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 189.531.963,00 atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peraturan/pedoman yang ditetapkan dengan target sebesar 4 Peraturan dan realisasi sebesar 4 . (100 %)
 - Jumlah kajian yang dihasilkan dengan target sebesar 1 kajian dan realisasi sebesar 1 Kajian. (100 %)

2. Perluasan Jaringan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 101.472.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.589.787,00 atau 98,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kerjasama Kearsipan dengan target sebesar 6 Kerjasama dan realisasi sebesar 6 . (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan urusan perpustakaan adalah :

- Keinginan/minat membaca masyarakat sudah menunjukkan perkembangan kearah lebih baik namun untuk tingkat perilaku kegemaran membaca masyarakat atau tindakan membaca masih rendah, perlu dorongan agar mau melakukan kegiatan membaca.
- Sarana prasarana perpustakaan yang masih kurang/terbatas, gedung/ruang sudah tidak bisa menampung penempatan rak-rak buku yang jumlahnya tiap tahun bertambah, ruang baca yang kurang luas sehingga pemustaka terlihat berjubel dan sudah tidak nyaman lagi untuk kegiatan membaca/belajar di perpustakaan.
- Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi keberadaan perpustakaan terutama pengembangan pengadaan bahan pustaka, bila dahulu pengadaan berupa buku sekarang sudah bergeser kepada koleksi bahan pustaka berbentuk digital.
- Sumber Daya Pengelola perpustakaan atau Fungsional Pustakawan sangat terbatas sehingga banyak perpustakaan yang berpotensi maju dan berkembang tidak tertangani dengan baik

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah :

- Kebijakan tentang kearsipan belum lengkap, masih minimnya pedoman/standar/peraturan yang ada membuat penyelenggaraan kearsipan belum berjalan dengan baik. Hal ini membuat unit kearsipan yang seharusnya melaksanakan fungsi penyelenggaraan kearsipan dinamis belum terkelola dengan semestinya.
- Masih rendahnya apresiasi pimpinan dan staf lembaga terhadap kearsipan sehingga banyak arsip dan mungkin aset yang bernilai dan

berharga yang seharusnya terselamatkan dikawatirkan akan rusak/hilang.

- Sumber daya pengelola kearsipan atau fungsional Arsiparis masih sangat kurang, banyak lembaga yang tidak memiliki SDM ini sehingga arsipnya tidak tertangani dengan semestinya.

Solusi :

Solusi urusan perpustakaan :

- Bila keinginan/minat membaca masyarakat sudah ada dan terhitung tinggi maka tinggal dorongan dan pendekatan kearah tindakan membaca lebih gencar dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah membuat program dan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat diantaranya menyediakan berbagai bahan pustaka yang sekarang digemari masyarakat baik bentuk cetak (buku dll) maupun non cetak/digital. Menyiapkan subyek/jenis bahan pustaka yang bermacam-macam sesuai dengan perkembangan informasi saat ini. Kegiatan promosi dan publikasi yang lebih intens, memanfaatkan berbagai media yang ada. Melengkapi sarana mobil perpustakaan keliling (MPK) atau Mobil Dongeng Keliling untuk anak dan remaja (Mobil DARLING) yang menjangkau masyarakat yang jauh dari keberadaan perpustakaan. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemustaka yang datang langsung ke perpustakaan serta menciptakan inovasi-inovasi yang menunjang program/kegiatan di perpustakaan.
- Gedung dan ruang yang terbatas diatasi dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap pengadaan buku (dalam bentuk cetak), hanya buku yang benar-benar dibutuhkan pemustaka dan bernilai baik yang diadakan. Pengadaan bahan pustaka bergeser kepada bentuk e-book/bentuk digital yang tidak membutuhkan ruang/rak buku. Kerjasama dengan perpustakaan lain dengan berbagai jenis perpustakaan (perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan instansi/khusus dan sebagainya) dalam hal berbagi informasi tentang buku untuk saling melengkapi koleksi. Namun perencanaan pembangunan gedung baru yang lebih luas dan yang bisa menampung koleksi perpustakaan perlu dipikirkan ke depannya.

- Program e-library atau perpustakaan digital perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, untuk itu sarana dan prasarana yang mendukung perlu disiapkan terutama penganggarannya selain SDM yang mumpuni agar perkembangan teknologi informasi yang sedemian pesat dapat diikuti oleh perpustakaan.
- Peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan/fungsional pustakawan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung, melakukan bimbingan teknis, pelatihan kepustakawanan, mengikuti seminar/workshop/lokakarya/diskusi serta yang lebih penting mengusulkan formasi pustakawan yang memang berlatar belakang pendidikan perpustakaan sehingga kekurangan SDM perpustakaan dapat terpenuhi.

Solusi urusan kearsipan :

- Melalui produk hukum kearsipan diharapkan sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap perangkat daerah, karena produk hukum ini menjadi pedoman bagi langkah-langkah kegiatan dalam administrasi kearsipan, bagaimana penyusunannya, bagaimana akuisisinya dan bagaimana cara penyelamatannya. Dengan program pengembangan penyelenggaraan kearsipan tersusun peraturan teknis kearsipan dan jadwal retensi arsip substantif, tersusun hasil kajian tentang pemetaan kearsipan dan memperluas jaringan kearsipan dan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Sosialisasi kearsipan perlu terus-menerus dilakukan Perangkat Daerah terutama kepada pemangku kepentingan, pemegang kebijakan, dan staf. Kegiatan lain pendampingan penataan arsip disetiap perangkat daerah, pengawasan internal kearsipan hingga urusan kearsipan dipastikan akan mendapat perhatian karena indikasi pemerintahan yang baik adalah tertib arsip dan administrasi.
- bidang kearsipan tidak banyak diminati oleh ASN karena mungkin tidak memberikan banyak keuntungan, sehingga keberadaan pengelola kearsipan /arsiparis sulit berkembang. Peningkatan kapasitas perlu dilakukan melalui berbagai kegiatan diklat, bimtek, seminar/workshop sedang secara kuantitas SDM pengelola kearsipan/arsiparis dapat bertambah dengan adanya program impassing bagi yang sudah memenuhi syarat dan formasi arsiparis untuk tahun -tahun yang akan

datang. Dengan demikian secara kualitas dan kuantitas SDM kearsipan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kekurangan SDM.

e. Penghargaan Nasional

-

2. URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN

2.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Tujuan

Meningkatkan kontribusi sub sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan	Persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas	0.2 %	0.86 %	430
Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan	3.5 %	8 %	228,57
	Persentase peningkatan produksi garam rakyat	10 %	65.57 %	655.7
Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan	Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan	10.7 %	12.86 %	120.19
Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.5 %	33,47 %	1.338,8
	Persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	85 %	100 %	117.65

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas pada tahun 2019 dengan target sebesar 0.2 % dan terealisasi sebesar 0.86 % atau 430 persen;
Pada tahun 2019 kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas ditargetkan sebesar 0,2 % atau sebanyak 19 kelompok dari total kelompok usaha kelautan dan perikanan sebesar 9.286 kelompok. Realisasi kelompok yang meningkat kelasnya di tahun 2019 adalah 0,86 % atau sebanyak 80 kelompok sehingga capaian kinerja adalah sebesar 430 %.

Kelompok kelautan dan perikanan yang mengalami peningkatan kelas kelompok tersebut merupakan kelompok yang mendapatkan pembinaan berupa pelatihan/bimtek bidang kelautan dan perikanan. Melalui tahapan pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi kelompok, verifikasi kebutuhan dan performa kelompok, serta memfasilitasi dengan pemberian bantuan sarana dan pelatihan/bimtek, sehingga harapannya kelompok usaha kelautan dan perikanan tersebut dapat memperkuat kapasitas baik kemampuan personil maupun kelembagaannya.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, terdapat kelompok usaha kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kelompoknya. Upaya meningkatkan kelas kelompok ini diharapkan dapat turut menstimulasi kelompok dalam memperbesar skala usaha, sehingga dapat turut meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan realisasi kinerja yang signifikan. Peningkatan kinerja tersebut merupakan suatu keberhasilan koordinasi yang terjalin baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan di 38 Kab/Kota dengan kelompok kelautan dan perikanan serta pihak terkait yang membantu pencapaian target kenaikan kelas kelompok.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 3.5 % dan terealisasi sebesar 8 % atau 228,57 persen;
- Indikator kinerja utama ini memiliki 2 (dua) variabel indikator pembentuk yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 509.276,0 ton meningkat 4,5 % dari produksi perikanan tangkap pada tahun

2018 sebesar 487.331,9 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2019 didukung dengan kondisi cuaca yang cenderung lebih baik meskipun pada triwulan 1 tahun 2019 masih terdapat cuaca ekstrim namun selebihnya kondisi cuaca mulai membaik.

Produksi perikanan tangkap sebesar 509.276,0 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap di laut sebesar 497.928,9 ton dan produksi perikanan tangkap di perairan umum darat sebesar 11.347,1 ton.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 meningkat sebesar 3,5 % dari tahun 2018 yaitu sebesar 1.224.640,67 ton di tahun 2018 meningkat menjadi 1.267.567,9 ton di tahun 2019. Produksi perikanan budidaya sebesar 1.267.567,9 ton terdiri dari produksi perikanan budidaya di laut sebesar 686.765,77 ton, tambak sebesar 240.737,36 ton, kolam 263.240,67 ton, sawah tambak/mina padi sebesar 63.704,19 ton, karamba sebesar 2.784,72 ton dan jaring apung sebesar 10.335,20 ton.

Angka realisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2019 masih berupa angka sementara karena validasi data statistik kelautan dan perikanan antara Pemerintah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat direncanakan dilaksanakan pada triwulan II.

Upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja produksi perikanan tangkap antara lain pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan, pemulihan sumber daya ikan di laut dengan underwater restocking dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD), perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (Fish apartement) guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut serta memberikan bantuan

pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasi secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat mengurangi tindak illegal fishing, penerapan aturan dalam penggunaan alat tangkap yang dilarang, sosialisasi pengelolaan SDI yang berkelanjutan, pengendalian kegiatan penangkapan ikan melalui pengaturan perijinan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja khususnya produksi perikanan budidaya adalah pemberian stimulan berupa paket hibah produksi, sarana prasarana dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya; pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis/Instalasi Budidaya untuk mendukung penyediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul yang bersertifikasi; fasilitasi standar mutu CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) bagi unit usaha perikanan budidaya; pengendalian kualitas produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, kandungan residu, lingkungan budidaya serta pemantauan peredaran dan pemakaian pakan dan obat ikan kimia dan biologi (OIKB);

pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor; fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan; pengembangan kawasan agropolitan perikanan budidaya; fasilitasi program pakan mandiri; sosialisasi dan pembinaan.

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan produksi garam rakyat pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 % dan terealisasi sebesar 65.57 % atau 655.7 persen;

Persentase peningkatan produksi garam rakyat pada tahun 2019 yang ditargetkan meningkat 10% telah terealisasi melampaui target dengan peningkatan sebesar 65,57 % atau mencapai 655,7%. Produksi garam rakyat tahun 2018 sebesar 952.286,08 ton dan pada tahun 2019 mencapai 1.576.672,4 ton.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah memberikan bantuan teknologi berupa geomembran, rumah garam, tandon air tua dan peralatan produksi sebagai

sarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat; pembangunan jalan produksi tambak garam dan normalisasi saluran; sosialisasi integrasi lahan tambak; sosialisasi sertifikasi mutu garam dan sertifikasi petambak garam; monitoring dan evaluasi serta pengawasan hasil produksi garam. Selain itu juga diupayakan dengan menjalin kemitraan antara petani produsen garam rakyat dengan Bank UMKM serta lembaga pendamping dalam fasilitasi dukungan permodalan, mempercepat pembentukan koperasi garam serta memfasilitasi lembaga koperasi garam yang sudah ada agar dapat difasilitasi permodalannya dalam rangka membantu pemasaran garam rakyat, mengembangkan sistem resi gudang garam seperti halnya resi gudang untuk tebu dan lain-lain, meningkatkan sistem pendataan garam di lapangan terkait produksi, penyerapan dan stok garam.

Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 10.7 % dan terealisasi sebesar 12.86 % atau 120.19 persen;

Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2019 adalah 12,86 Triliun Rupiah dari target yang telah ditetapkan sebesar 10,7 Triliun Rupiah atau mencapai 120.19 %. Total nilai produksi perikanan tahun 2019 sebesar 43,88 Triliun Rupiah dan Total nilai produk olahan sebesar 56,74 Triliun Rupiah maka sesuai dengan formulasi penghitungan diperoleh nilai tambah sebesar 12,86 Triliun Rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 maka terdapat peningkatan sebesar 8,98 %.

Upaya yang akan terus dilaksanakan dalam rangka mencapai target Renstra adalah meningkatkan kemampuan kapasitas kelompok pengolah dan pemasar melalui pembinaan dan sosialisasi, mengedukasi pentingnya penerapan jaminan mutu hasil produk jelautan dan perikanan, memberikan fasilitas kepada pelaku usaha UMKM pengolah dan pemasar baik dari sisi kelembagaan, akses pasar dan jaminan mutu hasil produk kelautan dan perikanan, memaksimalkan pengembangan produk

komoditas perikanan untuk memberikan alternative produk konsumsi maupun non konsumsi dan memberikan kemudahan berinvestasi.

Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan , ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 2.5 % dan terealisasi sebesar 33.47 % atau 1.338,8 persen;
- Indikator kinerja utama ini memiliki 3 (tiga) variabel indikator pembentuk sebagai berikut :
 - 1) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali tahun 2019 sebesar 0,19 %;
 - 2) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang pulih kembali tahun 2019 sebesar 0,0029 %;
 - 3) Persentase peningkatan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir tahun 2019 sebesar 100,23%.

Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali sebesar 0,19 % pada tahun 2018 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi mangrove di 20 lokasi. Keberhasilan dalam pencapaian target juga didukung dengan pelaksanaan yang dikerjakan tepat waktu sesuai dengan musim tanam serta kesesuaian bibit mangrove dengan tekstur kondisi lahan tanam. Selanjutnya juga karena adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu menjaga dan memelihara hasil rehabilitasi mangrove dari kegiatan yang merusak. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan luasan ekosistem mangrove yang pulih diantaranya penyadaran kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, dilakukan kegiatan Gerakan Pesisir Berseri, dilakukan kegiatan Sekolah Pantai. Kendala yang dihadapi adalah masih terjadi tindakan perusakan ekosistem mangrove (pertambahan, penebangan, pepohonan, reklamasi serta pencemaran lingkungan).

Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang direhabilitasi sebesar 0,0029 % pada tahun 2018 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi terumbu karang di 10 (sepuluh) lokasi. Selain itu juga didukung dengan partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan memelihara hasil rehabilitasi serta mengelola kawasan perairan yang direhabilitasi serta adanya penerapan teknologi transplantasi yang tepat lokasi sesuai dengan persyaratan teknis. Kegiatan ini sangat terbantu oleh masyarakat sekitar yang sebelumnya telah menerima sosialisasi dan pelatihan tentang upaya rehabilitasi terumbu karang sehingga pemeliharaan hasil rehabilitasi terumbu karang didukung oleh masyarakat pesisir yang terampil dan terlatih. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan luasan ekosistem terumbu karang diantaranya penyadaran kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, membuat kebun bibit terumbu karang, melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kendala yang dihadapi adalah dampak dari pembangunan fisik daerah pesisir; polusi laut, sedimentasi dan masih maraknya tindakan pencemaran dari darat, *overfishing* (penangkapan sumberdaya berlebih), destruktif *fishing* (penangkapan ikan dengan cara merusak), dan pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat pemanasan global.

Luasan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir pada tahun 2019 seluas 1006,8 Ha meningkat 100,23 % dari luasan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir tahun 2018 sebesar 502,3 Ha. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sosialisasi berkelanjutan kepada stakeholder terkait Perda No. 1 Tahun 2018 termasuk didalamnya dan konsultasi publik mengenai dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur; melaksanakan integrasi lintas sector dalam pengelolaan potensi desa pesisir sebagai sarana pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan dan koordinasi dengan organisasi pemerintahan di lingkup

Provinsi Jawa Timur perihal SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut khususnya UPT P2T , BPM dan Bappeda. Kendala yang masih terjadi adalah masyarakat belum seluruhnya memahami bahwa pengelolaan ruang laut saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan belum adanya pemahaman di lingkungan Pemerintah mengenai SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut.

- Indikator Sasaran Persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 117.65 persen;

Persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan pada tahun 2019 adalah 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 85 % atau mencapai 117,65 %. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan/ pembinaan bersama dengan instansi terkait serta melakukan patrol/pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masyarakat khususnya nelayan belum seluruhnya memahami dan melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas terkait dengan kewenangan 12 Mill tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada dan masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan *fishing ground* yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 21.270.324.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.280.740.704,00 atau 95,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 96.6 %. (96.6 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 21.270.324.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.280.740.704,00 atau 95,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 96,6 %. (96,6 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 10.416.404.098,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.069.364.443,00 atau 96,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 8.402.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.105.040.332,00 atau 96,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 40 Paket dan realisasi sebesar 40 Paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.014.379.098,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.964.324.111,00 atau 97,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 20 Paket dan realisasi sebesar 20 Paket. (100 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.912.304.702,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.679.259.446,00 atau 92,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.199.924.702,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.179.876.238,00 atau 98,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 280 Kali dan realisasi sebesar 280 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.712.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.499.383.208,00 atau 87,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 10 Orang dan realisasi sebesar 13 Orang. (130 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 5.699.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.430.280.444,00 atau 95,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.440.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.262.798.122,00 atau 92,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 492.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 475.744.790,00 atau 96,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 2.484.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.426.146.379,00 atau 97,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database PD dengan target sebesar 2 paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 282.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 265.591.153,00 atau 94,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 73.639.919.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.503.330.574,81 atau 97,10 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah produksi Perikanan Budidaya dengan target 1.194.149 ton dan realisasi 1.062.085,3 ton. (88,94 %)

Program tersebut didukung oleh 14 kegiatan.

1. Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 2.650.923.142,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.634.189.680,00 atau 99,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 21 Kelompok dan realisasi sebesar 21 Kelompok. (100 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 60 Orang dan realisasi sebesar 56 Orang. (93,3 %)

2. Intensifikasi Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 24.356.839.866,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.980.286.579,55 atau 98,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 3465 Orang dan realisasi sebesar 3465 Orang. (100 %)
- Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 165 Kelompok dan realisasi sebesar 165 Kelompok. (100 %)
- Jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 71 Orang. (47,3 %)
- Jumlah pembenih ikan yang bersertifikat dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 49 Orang. (245 %)

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 20.168.805.232,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.989.273.233,26 atau 94,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi dengan target sebesar 201 Orang dan realisasi sebesar 201 Orang. (100 %)
- Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 19 Kelompok dan realisasi sebesar 19 Kelompok. (100 %)

- Jumlah lokasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPT/Instalasi perikanan budidaya dengan target sebesar 6 Lokasi dan realisasi sebesar 6 Lokasi. (100 %)
- 4. Pengendalian Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.709.102.618,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.699.499.637,00 atau 99,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi dengan target sebesar 682 Orang dan realisasi sebesar 584 Orang. (85,6 %)
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 19 Kelompok dan realisasi sebesar 19 Kelompok. (100 %)
- 5. Budidaya Perikanan di Kawasan Agropolitan dengan anggaran sebesar Rp. 1.867.282.095,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.861.605.483,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 29 Kelompok dan realisasi sebesar 29 Kelompok. (100 %)
- 6. Klasterisasi Komoditas Perikanan Unggulan Berpotensi Ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 683.641.047,00 dan terealisasi sebesar Rp. 680.841.841,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah klaster/kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 6 Kelompok dan realisasi sebesar 6 Kelompok. (100 %)
- 7. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 11.444.672.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.436.786.847,00 atau 99,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lokasi pembinaan pembudidaya ikan dengan target sebesar 48 Lokasi dan realisasi sebesar 62 Lokasi. (129,2 %)
 - Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah produksi benih ikan air payau dengan target sebesar 24.375.000 Ekor dan realisasi sebesar 37.347.615 Ekor. (153,2 %)
 - Jumlah produksi benih ikan air laut dengan target sebesar 10.327.000 Ekor dan realisasi sebesar 14.871.500 Ekor. (144 %)
- 8. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 6.605.327.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.340.367.675,00 atau 95,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%) dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
9. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 2.446.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.417.000.915,00 atau 98,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan hasil uji kesehatan ikan dan lingkungan dengan target sebesar 400 LHU dan realisasi sebesar 851 LHU. (212,8 %)
 - Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah lokasi monitoring pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan dengan target sebesar 38 Lokasi dan realisasi sebesar 38 Lokasi. (100 %)
10. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 554.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 520.435.368,00 atau 93,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 95 %. (95 %)
11. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 343.367.503,00 atau 91,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 350 Unit Usaha dan realisasi sebesar 315 Unit Usaha. (90 %)
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 30 Unit Usaha dan realisasi sebesar 1 Unit Usaha. (3,3 %)
12. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 238.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.564.475,00 atau 98,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 420 Orang dan realisasi sebesar 420 Orang. (100 %)

- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 15 Unit Usaha dan realisasi sebesar 1 Unit Usaha. (6,7 %)
13. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 365.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 203.308.650,00 atau 55,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 385 Orang dan realisasi sebesar 280 Orang. (72,7 %)
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 35 Unit Usaha dan realisasi sebesar 3 Unit Usaha. (8,6 %)
14. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Budidaya di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 174.475.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.802.688,00 atau 92,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 175 Orang dan realisasi sebesar 175 Orang. (100 %)
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 2 Unit Usaha dan realisasi sebesar 2 Unit Usaha. (100 %)
- 6) **Program Pengembangan Perikanan Tangkap** dengan anggaran sebesar Rp. 312.705.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.482.741.816,42 atau 95,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah produksi Perikanan Tangkap dengan target 430.000 Ton dan realisasi 493.698,8 Ton. (114,81 %)

Program tersebut didukung oleh 24 kegiatan.

1. Pembangunan Kepelabuhanan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 262.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 250.304.568.800,05 atau 95,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah lokasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan target sebesar 17 Lokasi dan realisasi sebesar 17 Lokasi. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 638 Orang dan realisasi sebesar 638 Orang. (100 %)
2. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok, Fungsional, dan Penunjang Pelabuhan Perikanan Kewenangan

Pemerintah Provinsi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 9.195.671.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.044.824.000,00 atau 98,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun atau diperbaiki dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)

3. Pelestarian Sumberdaya Ikan dengan anggaran sebesar Rp. 15.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.639.085.083,00 atau 95,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok penerima paket hibah underwater restocking dengan target sebesar 11 Kelompok dan realisasi sebesar 11 Kelompok. (100 %)
- Jumlah kelompok penerima paket hibah penbaran benih ikan di PUD dengan target sebesar 43 Kelompok dan realisasi sebesar 43 Kelompok. (100 %)
- Jumlah kelompok penerima paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan dengan target sebesar 20 Kelompok dan realisasi sebesar 20 Kelompok. (100 %)
- Jumlah kelompok penerima paket hibah rumah ikan dengan target sebesar 19 Kelompok dan realisasi sebesar 19 Kelompok. (100 %)
- Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 750 Orang dan realisasi sebesar 645 Orang. (86 %)

4. Pemberdayaan Nelayan dengan anggaran sebesar Rp. 13.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.729.906.950,00 atau 96,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok penerima paket hibah alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan dengan target sebesar 83 Kelompok dan realisasi sebesar 83 Kelompok. (100 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 1.335 Orang dan realisasi sebesar 1.499 Orang. (112,3 %)

5. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 998.741.312,00 atau 95,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 115 Kapal dan realisasi sebesar 184 Kapal. (160 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 252 Dokumen dan realisasi sebesar 252 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 105 Orang dan realisasi sebesar 105 Orang. (100 %)
6. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.913.219.571,00 atau 95,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 79 Unit dan realisasi sebesar 79 Unit. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 70 Orang dan realisasi sebesar 70 Orang. (100 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 158 Unit dan realisasi sebesar 158 Unit. (100 %)
7. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.477.057.215,00 atau 98,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 100 Bulan dan realisasi sebesar 206 Bulan. (206 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 50 Dokumen dan realisasi sebesar 62 Dokumen. (124 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (100 %)
8. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.893.023.614,37 atau 94,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 5 Unit dan realisasi sebesar 7 Unit. (140 %)

- Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 30 Unit dan realisasi sebesar 25 Unit. (83,3 %)
9. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.473.661.384,00 atau 98,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 150 Kapal dan realisasi sebesar 150 Kapal. (100 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 10 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (60 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 500 Orang dan realisasi sebesar 500 Orang. (100 %)
10. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 746.278.817,00 atau 93,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 8 Unit dan realisasi sebesar 10 Unit. (125 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 120 Orang. (100 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 48 Unit dan realisasi sebesar 48 Unit. (100 %)
11. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 466.560.878,00 atau 93,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 3.085 Kapal dan realisasi sebesar 3.477 Kapal. (112,7 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 25 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (___ %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 70 Orang dan realisasi sebesar 70 Orang. (100 %)

12. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 666.634.696,00 atau 95,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 1 Unit dan realisasi sebesar 1 Unit. (100 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 51 Unit dan realisasi sebesar 51 Unit. (100 %)
13. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh dengan anggaran sebesar Rp. 399.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 372.427.023,00 atau 93,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 87 Kapal dan realisasi sebesar 71 Kapal. (81,6 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (133,3 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 75 Orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (106,7 %)
14. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh dengan anggaran sebesar Rp. 491.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 489.059.000,00 atau 99,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 3 Unit dan realisasi sebesar 3 Unit. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 60 Dokumen dan realisasi sebesar 80 Dokumen. (133,3 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 10 Unit dan realisasi sebesar 10 Unit. (100 %)
15. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 362.215.015,00 atau 96,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 100 Unit Usaha dan realisasi sebesar 38 Unit Usaha. (38 %)

- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 160 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (100 %)
16. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 289.993.350,00 atau 96,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 100 Unit Usaha dan realisasi sebesar 99 Unit Usaha. (99 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 280 Orang dan realisasi sebesar 280 Orang. (100 %)
17. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 330.018.720,00 atau 82,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 125 Unit Usaha dan realisasi sebesar 128 Unit Usaha. (102,4 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 160 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (100 %)
18. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 293.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 285.466.388,00 atau 97,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 75 Unit Usaha dan realisasi sebesar 116 Unit Usaha. (154,7 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 180 Orang dan realisasi sebesar 152 Orang. (84,4 %)
19. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.836.026.085,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.772.923.496,00 atau 97,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 550 Kapal dan realisasi sebesar 550 Kapal. (100 %)

- Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 500 Dokumen dan realisasi sebesar 500 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)
20. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.701.300.737,00 atau 97,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 15 Unit dan realisasi sebesar 15 Unit. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 288 Orang dan realisasi sebesar 288 Orang. (100 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 60 Unit dan realisasi sebesar 60 Unit. (100 %)
21. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dengan anggaran sebesar Rp. 573.265.195,07 dan terealisasi sebesar Rp. 408.379.938,00 atau 71,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
 - Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 255 Kapal dan realisasi sebesar 333 Kapal. (130,6 %)
 - Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 729 Dokumen dan realisasi sebesar 216 Dokumen. (29,6 %)
22. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dengan anggaran sebesar Rp. 1.521.529.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.492.861.042,00 atau 98,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 6 Unit. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 60 Orang dan realisasi sebesar 60 Orang. (100 %)
 - Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 40 Unit dan realisasi sebesar 35 Unit. (87,5 %)
23. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dengan anggaran sebesar Rp. 764.546.270,24 dan

terrealisasi sebesar Rp. 472.363.901,00 atau 61,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
- Jumlah kapal yang dilayani dengan target sebesar 640 Kapal dan realisasi sebesar 2.424 Kapal. (378,8 %)
- Jumlah dokumen SKPI, SHTI dan CPIB yang diterbitkan dengan target sebesar 100 Dokumen dan realisasi sebesar 335 Dokumen. (335 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 0 Orang. (__ %)

24. Tatakelola dan Pelayanan Usaha di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dengan anggaran sebesar Rp. 783.517.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 764.757.500,00 atau 97,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dipelihara dengan target sebesar 4 Unit dan realisasi sebesar 4 Unit. (100 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 120 Orang. (100 %)
- Jumlah unit usaha yang terfasilitasi dengan target sebesar 150 Unit dan realisasi sebesar 150 Unit. (100 %)

7) Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 3.740.773.259,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.493.463.207,00 atau 93,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kelompok yang terakses dengan target 4.070 kelompok dan realisasi 9.980 kelompok. (245,2 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 947.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 851.695.860,00 atau 89,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pokmaswas dan Kugar yang mengikuti bimtek/pelatihan dengan target sebesar 100 Kelompok dan realisasi sebesar 121 Kelompok. (121 %)

2. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 823.566.456,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti bimtek/pelatihan dengan target sebesar 424 Kelompok dan realisasi sebesar 300 Kelompok. (70,8 %)
3. Pendidikan kemasyarakatan produktif perikanan tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 959.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 863.608.500,00 atau 90,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KUB nelayan yang mengikuti bimtek/pelatihan dengan target sebesar 520 Kelompok dan realisasi sebesar 209 Kelompok. (40,2 %)
4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 984.523.259,00 dan terealisasi sebesar Rp. 954.592.391,00 atau 96,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mengikuti bimtek/pelatihan dengan target sebesar 154 Kelompok dan realisasi sebesar 415 Kelompok. (269,5 %)

8) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 43.872.861.741,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.527.250.174,00 atau 94,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Rehabilitasi Mangrove (Ha) dengan target 175 Ha dan realisasi 95.03 Ha. (54,30 %)
- Indikator Program Rehabilitasi Terumbu Karang (Ha) dengan target 18 Ha dan realisasi 11,97 Ha. (66,5 %)
- Indikator Program Luasan zonasi wilayah ruang laut dan pesisir (km2) dengan target 3.300 km2 dan realisasi 1.006,77 km2. (30,51 %)

Program tersebut didukung oleh 33 kegiatan.

1. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.141.475.305,00 atau 92,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kapal pengawasan yang beroperasi dengan target sebesar 27 unit dan realisasi sebesar 24 unit. (88,9 %)
 - Jumlah poskamladu yang beroperasi dengan target sebesar 21 Lokasi dan realisasi sebesar 20 Lokasi. (95,2 %)

- Jumlah pengawasan usaha perikanan dengan target sebesar 14 Kali dan realisasi sebesar 14 Kali. (100 %)
 - Jumlah pengawasan perairan dengan target sebesar 17 Kali dan realisasi sebesar 11 Kali. (64,7 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 1.280 Orang dan realisasi sebesar 960 Orang. (75 %)
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 454.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 452.902.452,00 atau 99,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan (DAK) dengan target sebesar 5 unit dan realisasi sebesar 5 unit. (100 %)
3. Pemanfaatan Ruang Laut dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.817.739.673,00 atau 97,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen kajian dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 180 Orang dan realisasi sebesar 180 Orang. (100 %)
4. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp. 4.370.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.130.534.546,00 atau 94,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 9 kelompok dan realisasi sebesar 9 kelompok. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 550 Orang dan realisasi sebesar 550 Orang. (100 %)
5. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 101.847.600,00 atau 33,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 24 Laporan dan realisasi sebesar 24 Laporan. (100 %)
6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp. 388.023.099,00 atau 97,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

7. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.438.256,00 atau 78,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 24 Laporan dan realisasi sebesar 24 Laporan. (100 %)

8. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 370.283.391,00 atau 92,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

9. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh dengan anggaran sebesar Rp. 211.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 191.998.850,00 atau 90,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100 %)

10. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh dengan anggaran sebesar Rp. 896.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 835.469.942,00 atau 93,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

11. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 490.457.758,00 atau 98,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 30 Laporan dan realisasi sebesar 29 Laporan. (96,7 %)

12. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 483.734.208,00 atau 96,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 90 %. (90 %)
13. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 421.914.353,00 atau 93,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 35 Laporan dan realisasi sebesar 35 Laporan. (100 %)
14. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 423.314.110,00 atau 84,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
15. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelatihan Teknis kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan anggaran sebesar Rp. 2.759.226.741,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.591.387.364,00 atau 93,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 94 %. (94 %)
16. Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 3.140.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.066.147.873,00 atau 97,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 560 Orang dan realisasi sebesar 551 Orang. (98,4 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dengan target sebesar 54 Ha dan realisasi sebesar 24,9 Ha. (46,1 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi terumbu karang dengan target sebesar 6 Ha dan realisasi sebesar 6 Ha. (100 %)
17. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 1.460.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.402.311.922,00 atau 96,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
18. Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 3.975.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.861.800.142,00 atau 97,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 510 Orang dan realisasi sebesar 480 Orang. (94,1 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dengan target sebesar 50 Ha dan realisasi sebesar 49,8 Ha. (98,6 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi terumbu karang dengan target sebesar 3 Ha dan realisasi sebesar 2,95 Ha. (98,56 %)
19. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 761.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 747.661.712,00 atau 98,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
20. Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.473.764.494,00 atau 98,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 215 Orang dan realisasi sebesar 215 Orang. (100 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dengan target sebesar 15,5 Ha dan realisasi sebesar 15,5 Ha. (100 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi terumbu karang dengan target sebesar 1 Ha dan realisasi sebesar 3 Ha. (300 %)
21. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.126.709,00 atau 95,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

22. Konservasi Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 1.392.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.366.619.142,00 atau 98,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah luasan rehabilitasi terumbu karang dengan target sebesar 1 Ha dan realisasi sebesar 0,02 Ha. (2 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan dengan target sebesar 105 Orang dan realisasi sebesar 149 Orang. (141,9 %)
 - Jumlah luasan rehabilitasi mangrove dengan target sebesar 5 Ha dan realisasi sebesar 5,35 Ha. (107 %)
23. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 976.285.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 934.495.779,00 atau 95,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
24. Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 68.804.900,00 atau 91,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 4 Unit Usaha dan realisasi sebesar 10 Unit Usaha. (250 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 36 Orang dan realisasi sebesar 48 Orang. (133,3 %)
25. Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.892.500,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 90 Orang dan realisasi sebesar 60 Orang. (66,7 %)
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 2 Unit Usaha dan realisasi sebesar 1 Unit Usaha. (50 %)
26. Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran

sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.925.750,00 atau 54,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 3 Unit Usaha dan realisasi sebesar 1 Unit Usaha. (33,3 %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 72 Orang dan realisasi sebesar 0 Orang. (___ %)

27. Pelayanan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Ruang Laut di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 89.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.178.344,00 atau 88,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 1 Unit Usaha dan realisasi sebesar 0 Unit Usaha. (___ %)
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 52 Orang dan realisasi sebesar 42 Orang. (80,8 %)

28. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan anggaran sebesar Rp. 696.436.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 495.115.065,00 atau 71,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 24 Laporan dan realisasi sebesar 24 Laporan. (100 %)

29. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.911.351.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.647.350.719,00 atau 93,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

30. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dengan anggaran sebesar Rp. 678.471.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 675.410.302,00 atau 99,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 35 Laporan dan realisasi sebesar 35 Laporan. (100 %)

31. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan dengan anggaran sebesar Rp. 3.122.676.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.058.364.956,00 atau 97,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
32. Dukungan Teknis Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dengan anggaran sebesar Rp. 416.483.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.872.600,00 atau 97,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hasil kegiatan pemantauan dengan target sebesar 0 Laporan dan realisasi sebesar 0 Laporan. (0 %)
33. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap dengan anggaran sebesar Rp. 4.083.792.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.987.349.700,00 atau 97,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 9) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** dengan anggaran sebesar Rp. 52.172.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.401.194.741,00 atau 94,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah produk olahan dari UPI yang bersertifikat dengan target 900.000 ton dan realisasi 1.896.677,5 ton. (210,74 %)
- Program tersebut didukung oleh 11 kegiatan.
1. Pengendalian jaminan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 8.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.348.352.844,00 atau 95,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah unit usaha yang termonitor standarisasi jaminan mutu (Unit) dengan target sebesar 200 unit dan realisasi sebesar 206 unit. (103 %)
 - Jumlah hasil verifikasi draft rekomendasi SKP dengan target sebesar 150 Dokumen dan realisasi sebesar 528 Dokumen. (352 %)
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 40 Kelompok dan realisasi sebesar 40 Kelompok. (100 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi dengan target sebesar 2.890 Orang dan realisasi sebesar 1.415 Orang. (49 %)
2. Penguatan usaha kelautan dan perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 8.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.431.021.640,00 atau 96,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/ sosialisasi dengan target sebesar 2.998 orang dan realisasi sebesar 3.020 orang. (100,7 %)
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 37 Kelompok dan realisasi sebesar 37 Kelompok. (100 %)
 - Jumlah hasil verifikasi draft rekomendasi pengajuan SIUP pengolahan dan pemasaran dengan target sebesar 160 Dokumen dan realisasi sebesar 172 Dokumen. (107,5 %)
 - Jumlah dokumen data statistik pengolahan dan pemasaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Promosi, Pemasaran dan Penguatan Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 19.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.174.846.874,00 atau 94,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 4.140 orang dan realisasi sebesar 5.030 orang. (121,5 %)
 - Jumlah pameran/gelar/Bazar produk perikanan dalam dan luar provinsi dengan target sebesar 38 Kali dan realisasi sebesar 39 Kali. (102,6 %)
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 4 Kelompok dan realisasi sebesar 4 Kelompok. (100 %)
4. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.841.878.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.320.398.836,00 atau 86,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan dengan target sebesar 3 Jenis dan realisasi sebesar 3 Jenis. (100 %)
 - Jumlah sertifikat analisa uji yang diterbitkan dengan target sebesar 5.000 Sertifikat dan realisasi sebesar 7.465 Sertifikat. (149,3 %)
 - Jumlah hasil monitoring dengan target sebesar 300 Hasil Uji dan realisasi sebesar 318 Hasil Uji. (106 %)
 - Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)
5. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi dengan anggaran sebesar

Rp. 3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.382.299.053,00 atau 96,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah hasil kaji terap teknologi pengolahan dengan target sebesar 2 Jenis dan realisasi sebesar 6 Jenis. (300 %)
- Jumlah sertifikat analisa uji yang diterbitkan dengan target sebesar 1.350 Sertifikat dan realisasi sebesar 2.179 61,4. (161,4 %)
- Jumlah hasil monitoring dengan target sebesar 150 Hasil Uji dan realisasi sebesar 249 Hasil Uji. (166 %)
- Jumlah operasional UPT dengan target sebesar 12 Bulan dan realisasi sebesar 12 Bulan. (100 %)

6. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 4.358.122.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.171.379.255,00 atau 95,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 77 %. (77 %)

7. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.979.839.948,00 atau 97,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

8. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 158.311.899,00 atau 90,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 40 Unit Usaha dan realisasi sebesar 42 Unit Usaha. (105 %)

9. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.768.000,00 atau 93,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 35 Unit Usaha dan realisasi sebesar 85 Unit Usaha. (242,9 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (100 %)
10. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 128.623.900,00 atau 73,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (75 %)
 - Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 50 Unit Usaha dan realisasi sebesar 24 Unit Usaha. (48 %)
11. Pelayanan Verifikasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 172.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 165.352.492,00 atau 95,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah permohonan ijin unit usaha yang diverifikasi dengan target sebesar 10 Unit Usaha dan realisasi sebesar 5 Unit Usaha. (50 %)
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 250 Orang. (208,3 %)

10) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 7.329.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.129.911.381,00 atau 97,27 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Peningkatan produksi Garam Rakyat (Ton) dengan target 1.194.710 Ton dan realisasi 1.576.672,4 Ton. (119,97 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 7.329.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.129.911.381,00 atau 97,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah SDM yang mengikuti pertemuan/sosialisasi dengan target sebesar 500 orang dan realisasi sebesar 610 orang. (122 %)
 - Jumlah kelompok penerima paket hibah dengan target sebesar 52 Kelompok dan realisasi sebesar 52 Kelompok. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang terbatas;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana beberapa pelabuhan perikanan, khususnya yang baru dilimpahkan ke Provinsi Jawa Timur;
3. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pellet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya;
4. Alih fungsi lahan perikanan budidaya dan tambak garam rakyat untuk kegiatan non - perikanan;
5. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya;
6. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur;
7. Minimnya pembinaan terhadap pelaku industri pengolahan dan pemasaran, khususnya untuk ekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk pemasaran ke Luar Negeri;
8. Kompetensi pelaku industri perikanan skala UKM belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global;
9. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi;
10. Masih adanya inkonsistensi aturan hukum terkait kegiatan penangkapan ikan contohnya pelarangan penggunaan alat tangkap Cantrang dan penangkapan benur (benih Lobster);
11. Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas sesuai kewenangan 12 mil, tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada;
12. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena ketidakseimbangan laju kerusakan ekosistem dengan laju pertumbuhan biota;
13. Produktivitas garam belum optimal;
14. Masih banyak ditemui pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan alokasi ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.

Solusi :

1. Melakukan perbaikan habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan dan *underwater restocking* serta pengkayaan ikan di laut dan perairan umum darat (PUD) yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya;
2. Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mendukung operasional penangkapan ikan, serta pemberian informasi akses permodalan;
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan untuk mendukung usaha perikanan tangkap;
4. Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, lembaga pemasyarakatan menggunakan sistem bioflok; revitalisasi tambak tradisional dengan pemberian sarana produksi;
5. Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok;
6. Menjalin kerjasama dengan provinsi lain sebagai upaya untuk mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) dapat mencari bahan baku ikan ke provinsi lain di luar Jawa;
7. Melakukan koordinasi dengan KKP untuk mendapatkan akses dan informasi terkait pembinaan kepada pelaku ekspor hasil perikanan;
8. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi

terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia;

9. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan serta kelompok masyarakat pengawas dan membentuk satgas dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kabupaten/kota dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan;
10. Perlu adanya kejelasan tentang aturan hukum yang inkonsistensi terkait kegiatan penangkapan ikan;
11. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan bersama dengan instansi terkait serta melakukan patrol/ pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan;
12. Menyediakan sarana dan prasarana pengawasan baik untuk petugas maupun Pokmaswas serta mengusulkan penambahan petugas untuk pengawasanserta mengoptimalkan peran Pokmaswas dan Poskamladu yang ada di wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
13. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan konservasi dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan penyadartahuan kepada kelompok masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan; meningkatkan kuantitas, kualitas dan usaha garam melalui pemberian bantuan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran;
14. Perlu dilakukan sosialisasi lebih masif terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018- 2038 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara berkelanjutan.Â

e. Penghargaan Nasional

1. Piagam penghargaan Peringkat 1 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kategori AA (Sangat Memuaskan) Tahun 2019 oleh Gubernur Jawa Timur



2. Piagam penghargaan Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 kategori Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Jawa Timur



3. Piagam penghargaan Terbaik 1 Kategori Capaian Pelaksana Laporan Pertanggungjawaban Satker Pengelola DK/TP Semester II Tahun 2018 oleh KPPN Surabaya II Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI



4. Piagam penghargaan atas Rekor Sajian Bandeng Presto Terbanyak Tahun 2019 oleh MURI
5. Piagam penghargaan Terbaik 3 Provinsi dengan Kinerja Terbaik oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI



6. Piagam penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2019 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI
7. Piagam penghargaan Juara II Stand Terbaik pada penyelenggaraan ITT Makassar Expo 2019
8. Piagam penghargaan Juara III Stand Terbaik pada Pameran Semarang PUKD 2019



2.2. URUSAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

2.2.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

a. Tujuan

1. Meningkatnya ketahanan pangan;
2. Meningkatnya kontribusi pertanian dan ketahanan pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,70 %	92,5 %	105,47
	Ketersediaan pangan dari hasil produksi Beras di Jawa Timur	9.035.000,0 ton	3.463.495,0 ton	38,33
	Ketersediaan pangan dari hasil produksi Jagung di Jawa Timur	6.500.000,0 ton	5.923.562,7 ton	91,13
	Ketersediaan pangan dari hasil produksi Kedelai di Jawa Timur	360.000,0 ton	110.666,8 ton	30,74
2) Meningkatnya Produksi Komoditas Utama dan Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Prosentase pertumbuhan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,00 %	-6,87 %	-343,38

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 dengan target sebesar 87,70 % dan terealisasi sebesar 92,5 % atau 105,47 persen;

Tingkat konsumsi dan kualitas pangan ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH ideal 100. Skor PPH Jawa Timur mencapai 92,5 pada tahun 2019, mencapai 105,47% dari target 2019 sebesar 87,7. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi

pangan untuk hidup sehat, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengoptimalkan dan mengumandangkan Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.

Tabel Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Penduduk Jawa Timur Tahun 2019

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan/g/kap/hr	Energi (KKal)	% AKE *)	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	306,1	1.267	63,4	31,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	46,3	54	2,7	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	103,0	206	10,3	20,6	24	20,6
4	Lemak & Minyak	26,1	234	11,7	5,9	5,0	5,0
5	Buah/Biji Minyak	4,9	27	1,3	0,7	1,0	0,7
6	Kacang-kacangan	35,5	87	4,4	8,7	10,0	8,7
7	Gula	23,0	85	4,2	2,1	2,5	2,1
8	Sayur & Buah	248,0	116	5,8	29,1	30,0	29,1
9	Lainnya	106,5	58	2,9	0	0	0
	Jumlah		2.134	106,7	100	100	92,5

Keterangan : *). Angka Kecukupan Energi.

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di Jawa Timur masih belum beragam, hal ini terlihat dengan masih tingginya konsumsi beras dan masih kurangnya konsumsi protein hewani, sayur dan buah. Oleh karena itu masih perlu lagi ditingkatkan diversifikasi pangan, didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan panganku B2SA dalam rangka mewujudkan SDM unggul di Jawa Timur. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis pangan lokal merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pangan impor

dengan memanfaatkan umbi-umbian, mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

- Indikator Sasaran Ketersediaan pangan dari hasil produksi Beras di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 9.035.000 ton dan terealisasi sebesar 3.463.498,0 ton atau 38,33 persen; Penyediaan Pangan Masyarakat merupakan tujuan utama dalam Pembangunan Pertanian tahun 2019 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan, keterjangkauan pangan serta pemanfaatan (konsumsi) yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi beras di Jawa Timur Tahun 2019 menunjukkan kondisi surplus.

No	Tahun	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus / Defisit (ton)
1	2018	Beras	9.035.000	2.361.542	3.562.027
2	2019	Beras	3.463.495	2.376.741	1.086.754

Namun, terhadap target tidak terealisasi karena adanya perubahan metodologi oleh BPS. BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berupaya memperbaiki metodologi perhitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN untuk mengestimasi luas panen padi. Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras. Perbedaan

metodologi penghitungan tersebut menyebabkan produksi padi di Jawa Timur mengalami penurunan. Disisi lain dalam menentukan target dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan sebelum BPS melakukan perubahan metodologi dengan Kerangka Sampel Area (KSA)

- Indikator Sasaran Ketersediaan pangan dari hasil produksi Jagung di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 6.500.000 ton dan terealisasi sebesar 5.923.562,7 ton atau 91,13 persen;

Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi jagung di Jawa Timur Tahun 2019 menunjukkan kondisi surplus.

No	Tahun	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus / Defisit (ton)
1	2018	Jagung	6.079.771	106.282	5.973.489
2	2019	Jagung	5.923.343	105.986	5.817.357

- Indikator Sasaran Ketersediaan pangan dari hasil produksi Kedelai di Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 360.000 ton dan terealisasi sebesar 110.666,8 ton atau 30,74 persen;

Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi beras di Jawa Timur Tahun 2019 menunjukkan kondisi defisit sehingga pemenuhan kebutuhan pangan akan kedelai melalui impor.

No	Tahun	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus / Defisit (ton)
1	2018	Kedelai	109.136	318.744	-209.608
2	2019	Kedelai	110.666	320.608	-209.941

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Komoditas Utama dan Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase pertumbuhan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,00 % dan terealisasi sebesar -6,87 % atau -346,85 persen;

Indikator Sasaran Prosentase pertumbuhan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,00 % dan terealisasi sebesar -6,87 % atau -343,38 persen. Rendahnya realisasi disebabkan beberapa komoditas mengalami penurunan produksi pada beberapa komoditas terutama produksi padi. Pada tahun 2018, BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berupaya memperbaiki metodologi perhitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN untuk mengestimasi luas panen padi. Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif mulai dari perhitungan luas lahan baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras. Perbedaan metodologi penghitungan tersebut menyebabkan produksi padi di Jawa Timur mengalami penurunan. Disisi lain dalam menentukan target dalam Renstra Dinas sebelum BPS melakukan perubahan metodologi dengan KSA. Sedangkan produksi padi dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya jumlah curah hujan sebesar 153 mm kubik dari 2.015 mm kubik dengan 121 hari hujan pada tahun 2018 menjadi 1.862 mm kubik dengan 101 hari hujan pada tahun 2019. Total produksi padi di Jawa Timur pada 2019 sekitar 9,58 juta ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 622,279 ribu ton (6,10 persen) dibandingkan tahun 2018. Penurunan produksi terbesar di Kabupaten Bojonegoro sebesar 60.440,24 ton dan Jember turun 71.950,94 ton. Di Kabupaten Bojonegoro banyak lahan yang tidak dapat ditanami padi karena kurangnya ketersediaan air sebanyak terjadi puso sekitar 5.765 hektar. Sedangkan di Kabupaten Jember mengalami penurunan luas panen karena

kekurangan air serta terjadi serangan hama wereng dan tikus. Jika dibandingkan antar bulan, penurunan produksi terbesar pada 2019 dibandingkan tahun 2018 terjadi pada bulan Februari, yaitu sekitar 83,22 ribu ton. Produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 341,66 ribu ton dan produksi terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar 44,95 ribu ton. Sama halnya dengan produksi pada 2019, produksi padi tertinggi pada 2018 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 391,63 ribu ton, sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 36,12 ribu ton. Kenaikan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Ngawi, Mojokerto, dan Gresik. Sementara itu, penurunan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Sumenep, Jember, Banyuwangi, dan Bojonegoro.

Sedangkan untuk komoditas Jagung dan Kedelai, perhitungan tahun 2019 menggunakan Rekapitulasi Kabupaten-Statistik Pertanian (RKSP) untuk tanaman Kedelai mengalami penurunan produksi sedangkan Jagung menunjukkan peningkatan produksi jika dibandingkan tahun 2018. Namun terhadap target produksi 2019, jagung mencapai 1,57 persen dan kedelai melambat 44,30 persen.

Perkembangan produksi dan produktivitas mangga meningkat, namun jumlah tanaman menghasilkan menurun. Tanaman Mangga di Kabupaten Banyuwangi, Magetan, Ponorogo, Jombang, Pamekasan, Kediri, Bojonegoro dan Madiun mengalami penurunan produksi yang disebabkan banyak tanaman sudah tua sehingga tidak optimal lagi seperti di Magetan, Ponorogo, Bojonegoro. Sedangkan di Kabupaten Jombang, Kediri dan Madiun populasi tanaman mangga banyak berkurang.

Perkembangan produksi dan tanaman jeruk yang menghasilkan meningkat, namun produktivitas menurun. Tanaman Jeruk Siam / keprok pada umumnya mengalami peningkatan di Kabupaten Ponorogo, Tuban, Kediri, Tulungagung, Situbondo dan Pamekasan disebabkan meningkatnya jumlah tanaman

menghasilkan dan meningkatnya produktivitas. Sebaliknya di Lumajang, Kota Batu dan Mojokerto mengalami peningkatan produksi meskipun jumlah tanaman yang menghasilkan justru mengalami penurunan. Untuk kabupaten Magetan dan Banyuwangi mengalami penurunan produksi kurangnya pemeliharaan, pengaruh iklim yang tidak menentu sehingga memberikan hasil yang tidak maksimal.

Perkembangan produksi dan produktivitas pisang meningkat, namun jumlah tanaman menghasilkan menurun. Tanaman Pisang di beberapa Kabupaten mengalami penurunan produksi, seperti Pacitan disebabkan karena adanya curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan banyak penyakit sehingga hasil tanaman pisang berkurang. Tanaman pisang di Lumajang terkena OPT fusarium dan sigatoka, sedangkan Pamekasan dipengaruhi musim kemarau di tahun 2019 lebih panjang, untuk kabupaten Bojonegoro, tanaman pisang diserang serangan OPT Jamur Batang sedangkan tanaman pisang di Banyuwangi mengalami penurunan produktivitasnya, karena kurangnya pemeliharaan, pengaruh iklim yang tidak menentu sehingga memberikan hasil yang tidak maksimal.

Perkembangan Bawang Merah di Jawa Timur mengalami peningkatan luas panen, produksi, dan produktivitas secara signifikan dengan kontribusi terbanyak berada di Kabupaten Bojonegoro, Nganjuk, dan Probolinggo. Hal ini disebabkan pada komoditas ini tidak adanya serangan hama/penyakit serta curah hujan di tahun 2019 yang mendukung sehingga pertumbuhan komoditas bawang merah meningkat. Penurunan produksi bawang merah hanya terdapat di kabupaten Mojokerto, Pamekasan dan Ponorogo. Di Kecamatan Pacet Mojokerto yang merupakan sentra bawang merah namun banyak petani yang alih komoditas menanam cabai. Di Pamekasan karena faktor curah hujan dan hari hujan yang jauh berkurang juga adanya serangan ulat grapyak dan *Ileomyza*. Sp. Untuk komoditas Cabai, secara keseluruhan, Cabai Besar di Jawa Timur mengalami peningkatan pada produksi dan produktivitas,

namun luas panen menurun. Peningkatan produksi terbanyak berada di Kabupaten Tuban, Magetan, Nganjuk, dan Gresik. Hal ini disebabkan adanya pendampingan dari penyuluh dan bantuan benih dari Pemerintah. Selain itu harga Cabai besar yang tinggi menyebabkan petani banyak membudidayakan komoditas ini. Namun luas panen secara keseluruhan menurun dikarenakan di Kabupaten Blitar serta Kediri mengalami penurunan luas panen dikarenakan cuaca kemarau. Di Pamekasan, serangan lalat buah sekitar 30 % sehingga banyak buah yang rontok dan kondisi tanaman banyak yang keriting.

Perkembangan Cabai Rawit tahun 2019 di Jawa Timur mengalami peningkatan pada produksi dan produktivitas, namun luas panen menurun. Peningkatan produksi terbanyak berada di Kabupaten Blitar yang dikarenakan sebagian petani mengganti benih Cabai rawit lokal dengan Cabai rawit berlabel. Jadi, benih yang baru ini sepertinya memiliki kualitas produksi yang bagus sehingga luas panen yang turun tidak menurunkan produksi malah meningkat. Di Kabupaten Tuban produksi cukup bagus, selain tidak ada serangan OPT juga dengan pemeliharaan yang intensif serta adanya bantuan benih dari Pemerintah. Penurunan produksi terdapat di beberapa kabupaten, yaitu : Madiun, Kota Blitar, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Batu, dan Jombang yang umumnya karena musim kemarau panjang dengan kondisi air yang sangat kurang sehingga kemampuan produksi tanaman menurun.

Produksi Jahe menurun hampir disemua kabupaten penghasil Jahe, demikian juga dengan luas panen meskipun produktivitas meningkat. Menurunnya produksi jahe disebabkan beralihnya komoditas jahe ke porang di Situbondo dan Ponorogo. Peningkatan produksi hanya di kabupaten Kediri yang ditanam secara tumpangsari. Untuk komoditas Temulawak, produksi dan luas panen meningkat akan tetapi produktivitas menurun. Peningkatan produksi di kabupaten Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo. Namun menurunnya produksi juga terjadi di kabupaten Pamekasan, Malang,

Jombang, Mojokerto dan Madiun yang disebabkan berkurangnya ketersediaan air karena kemarau panjang sehingga pertumbuhan umbi temulawak kurang optimal.

Perkembangan tanaman anggrek, baik produksi, luas panen dan produktivitas meningkat ditahun 2019. Penurunan produksi anggrek di Kabupaten Malang, Mojokerto, Kota Malang dan Batu Menurunnya produksi anggrak disebabkan karena banyak petani anggrek yang beralih menanam sayur organik dan sebagian lagi beralih menanam tanaman hias indoor dan landscape yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Demikian juga dengan tanaman Krisan meskipun luas panennya menurun tetapi produksi dan produktivitasnya meningkat. Penurunan produksi terbanyak dari Kabupaten Malang karena petani beralih menanam sayuran.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 14.225.163.730,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.427.109.643,00 atau 94,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100%)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 14.225.163.730,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.427.109.643,00 atau 94,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 7.996.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.980.812.806,00 atau 74,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 5. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.498.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.725.202.158,00 atau 67,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket / unit dan realisasi sebesar 10 Paket / unit. (83,33 %)
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.498.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 2.255.610.648,00 atau 90,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 683 Paket/Unit dan realisasi sebesar 683 . (100 %)
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.783.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.535.803.875,00 atau 91,10 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.335.746.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.145.859,00 atau 97,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan konsultasi dalam kelembagaan dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.447.919.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.230.658.016,00 atau 84,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal atau pembinaan peningkatan kapasitas SDM (Orang) dengan target sebesar 210 Orang dan realisasi sebesar 210 Orang. (100 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 3.902.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.384.563.177,00 atau 86,73 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.121.907.192,00 atau 93,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dengan target sebesar 9 Dokumen dan realisasi sebesar 9 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.125.018.356,00 atau 97,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 8 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 651.302.123,00 atau 76,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Update Database Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 5 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (80 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 702.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.335.506,00 atau 69,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 20 Dokumen dan realisasi sebesar 20 . (100 %)

- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)** dengan anggaran sebesar Rp. 8.302.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.767.260.813,00 atau 93,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Penurunan Daerah Rawan Pangan (%) dengan target 2 % dan realisasi 0,05%. (27,50%)
 - Indikator Program Skor PPH dengan target 87.7 % dan realisasi 92.5 %. (105.47 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan.

1. Pemanfaatan Lumbung Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 948.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 582.267.803,00 atau 61,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi dengan target sebesar 6 Unit dan realisasi sebesar 6 Unit. (100 %)
- 2. Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 795.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 722.638.250,00 atau 90,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah LPG / Gapoktan yang difasilitasi dengan target sebesar 23 unit dan realisasi sebesar 20 unit. (86,96 %)
- 3. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 590.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 565.440.050,00 atau 95,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok PKK Daerah Rawan Pangan yang mampu membuat pangan olahan dengan target sebesar 20 Unit dan realisasi sebesar 20 Unit. (100 %)
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan anggaran sebesar Rp. 1.675.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.635.123.888,00 atau 97,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah desa yang mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (TP PKK) dengan target sebesar 25 paket dan realisasi sebesar 25 paket. (100 %)
- 5. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.814.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.803.095.621,00 atau 99,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kantin sekolah yang terfasilitasi dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan target sebesar 7 Unit dan realisasi sebesar 7 Unit . (100 %)
- 6. Pemanfaatan Teknologi Pangan Olahan dengan anggaran sebesar Rp. 780.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 777.687.525,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Taman Posyandu/Kelompok yang terfasilitasi Teknologi Pangan Olahan dengan target sebesar 100 peserta dan realisasi sebesar 100 peserta. (100 %)
- 7. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Masyarakat untuk Karangkitri dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 681.007.676,00 atau 97,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Desa yang difasilitasi Karangkitri (TP. PKK) dengan target sebesar 20 Paket dan realisasi sebesar 20 Paket. (100 %)

6) Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 73.708.702.886,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.849.832.121,00 atau 82,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Produktivitas Padi (Angka Perkiraan 2019) dengan target 65,35 ku/ha dan realisasi ku/ha. (77,59 %)
- Indikator Program Produktivitas Jagung (Angka Perkiraan 2019) dengan target 59,82 ku/ha dan realisasi 53,43 ku/ha. (89,31 %)
- Indikator Program Produktivitas Kedelai (Angka Perkiraan 2019) dengan target 16,07 ku/ha dan realisasi 15,30 ku/ha. (95,21 %)
- Indikator Program Produksi Padi (Angka Perkiraan 2019) dengan target 13.122.446 Ton dan realisasi 10.182.093 Ton. (77,59 %)
- Indikator Program Produksi Jagung (Angka Perkiraan 2019) dengan target 7.607.112 Ton dan realisasi 6.859.425 Ton. (90,17 %)
- Indikator Program Produksi Kedelai (Angka Perkiraan 2019) dengan target 340.000 Ton dan realisasi 120.999 Ton. (22,44 %)

Program tersebut didukung oleh 16 kegiatan.

1. Produksi Benih Padi Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 20.792.275.886,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.888.671.133,00 atau 61,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perbanyak benih padi unggul yang bersertifikat dengan target sebesar 1.771.650 Kg dan realisasi sebesar 1.801.660 Kg. (101,69 %)
2. Produksi Benih Palawija Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 4.081.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.766.912.384,00 atau 92,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perbanyak benih palawija unggul yang bersertifikat dengan target sebesar 80 ton dan realisasi sebesar 50,44 ton. (63,05 %)
3. Proteksi Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.259.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.226.428.902,00 atau 98,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) yang meningkatkan kinerja dalam pengendalian hama /penyakit tanaman dengan target sebesar 460 Petugas POPT dan realisasi sebesar 460 Petugas POPT. (100 %)

4. Penataan Data Statistik Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 282.591.995,00 atau 80,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah cakupan entri data statistik tanaman pangan sebagai bahan kebijakan dan pelaporan dengan target sebesar 7 Laporan Komoditas dan realisasi sebesar 7 Laporan Komoditas. (100 %)
5. Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Serealia dengan anggaran sebesar Rp. 1.514.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.194.266.646,00 atau 78,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peserta Pencanangan Tanam/Panen dalam rangka Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Serealia dengan target sebesar 600 Orang dan realisasi sebesar 600 Orang. (100 %)
 - Luas Pengembangan Serealia (Jagung, Shorgum dan Padi Gogo) dengan target sebesar 47 hektar dan realisasi sebesar 47 hektar. (100 %)
6. Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan anggaran sebesar Rp. 757.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 708.669.500,00 atau 93,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pelaksanaan tanam/ panen serentak dalam rangka Ekstensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan target sebesar 560 Orang dan realisasi sebesar 480 Orang. (85,71 %)
 - Luas pengembangan Aneka kacang-kacangan dan Umbi dengan target sebesar 24 hektar dan realisasi sebesar 20 hektar. (83,33 %)
7. Penataan Agribisnis melalui Cooperative Farming dengan anggaran sebesar Rp. 4.189.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.821.526.525,00 atau 91,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penerapan model agribisnis melalui Cooperative Farming dengan target sebesar 11 Unit dan realisasi sebesar 11 . (100 %)
8. Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.717.802.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.668.279.465,00 atau 97,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah produksi menerapkan Agribisnis di kebun Tanaman Pangan seluas 17 hektar dengan target sebesar 140 ton dan realisasi sebesar 73,21 ton. (52,29 %)
9. Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 19.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.070.936.572,00 atau 87,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dengan target sebesar 195 Unit dan realisasi sebesar 195 Unit. (100 %)
10. Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 605.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 530.862.802,00 atau 87,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Pameran Komoditas tanaman pangan di sentra produksi tanaman pangan dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100 %)
11. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.320.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.249.400.731,00 atau 96,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah benih unggul bermutu dan bersertifikat komoditas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang tanah dan Kacang hijau) dengan target sebesar 37.000 kg dan realisasi sebesar 79.389.297 kg. (214.565,67 %)
12. Pembangunan/Perbaikan UPTD Tanaman Pangan Dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 388.436.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 383.995.000,00 atau 98,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran UPT Pengembangan Benih Padi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
13. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Benih Palawija dengan anggaran sebesar Rp. 364.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 337.905.100,00 atau 92,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
14. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 285.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 191.535.362,00 atau 92,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

15. Pemasaran Benih Padi Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 13.743.378.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12918641054,00 atau 94,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemasaran Benih Padi Unggul dengan target sebesar 1.801,66 benih dan realisasi sebesar 1.035,08 . (57,45 %)

16. Pemasaran Benih Palawija Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 840.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 609.208.950,00 atau 72,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemasaran Benih Palawija Unggul dengan target sebesar 48 Kg dan realisasi sebesar 14,31 Kg. (29,81 %)

7) Program Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil dengan anggaran sebesar Rp. 3.295.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.238.929.642,00 atau 98,30 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah sertifikasi produk hasil pertanian dan teregistrasinya hasil pertanian yang beredar di pasar Jawa Timur (Unit) dengan target 70 Unit dan realisasi 528 Unit. (754,29 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Standardisasi Mutu Produk dengan anggaran sebesar Rp. 2.295.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.246.857.457,00 atau 97,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Kab/Kota) untuk Sertifikasi Prima 2/3, Pendaftaran Nomor PSAT, Rekomendasi ekspor, Health Certificate, Registrasi Packing House dengan target sebesar 38 Kabupaten/Kota dan realisasi sebesar 38 Kabupaten/Kota. (100 %)

2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 992.072.185,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan (orang) dengan target sebesar 500 Orang dan realisasi sebesar 500 Orang. (100 %)

8) Program Peningkatan Produksi , Produktivitas, Mutu Hasil dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 22.075.834.766,65 dan terealisasi sebesar Rp. 20.548.780.722,00 atau 93,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Produksi Bawang Merah (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 315.336 Ton dan realisasi 451.912 Ton. (143,31 %)
- Indikator Program Produksi Cabai Merah (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 149.168 Ton dan realisasi 115.384 Ton. (77,35 %)
- Indikator Program Produksi Cabai Rawit (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 386.880 Ton dan realisasi 513.108 Ton. (132,63 %)
- Indikator Program Produksi Mangga (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 1.182.409 Ton dan realisasi 583.381 Ton. (49,34 %)
- Indikator Program Produksi Pisang (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 1.917.710 Ton dan realisasi 1.433.938 Ton. (74,77 %)
- Indikator Program Produksi Jeruk Siam (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 510.327 Ton dan realisasi 893.148 Ton. (175,01 %)
- Indikator Program Produktivitas Bawang Merah (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 127,27 ku/ha dan realisasi 110,78 . (87,05 %)
- Indikator Program Produktivitas Cabai Merah (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 78,57 ku/ha dan realisasi ku/ha. (132,59 %)
- Indikator Program Produktivitas Cabai Rawit (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 68,91 ku/ha dan realisasi ku/ha. (129,13 %)
- Indikator Program Produktivitas Mangga (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 154,47 Kg/pohon dan realisasi Kg / pohon. (68,79 %)
- Indikator Program Produktivitas Pisang (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 89,85 kg/pohon dan realisasi kg/pohon. (75,60 %)
- Indikator Program Produktivitas Jeruk Siam / Keprok (data Sementara Rekap Provinsi, 2020) dengan target 141,12 kg/pohon dan realisasi kg/pohon. (75,47 %)

Program tersebut didukung oleh 14 kegiatan.

1. Produksi Benih Hortikultura Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 413.277.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.050.849.106,00 atau 98,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Produksi Benih Hortikultura Unggul dengan target sebesar 4.132.771.000 Kg dan realisasi sebesar 4.050.849.106 Kg. (98,00 %)
2. Penataan Data Statistik Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 268.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 254.818.970,00 atau 94,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah cakupan entri data statistik (komoditas) tanaman hortikultura dengan target sebesar 90 laporan komoditas dan realisasi sebesar 90 laporan komoditas. (100 %)
- 3. Pembinaan Tanaman Buah dan Tanaman Hias dengan anggaran sebesar Rp. 1.363.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.287.559.990,00 atau 94,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Luas Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias dengan target sebesar 34 hektar dan realisasi sebesar 34 hektar. (100 %)
- 4. Pembinaan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dengan anggaran sebesar Rp. 735.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 674.402.030,00 atau 91,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Luas Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dengan target sebesar 14 hektar dan realisasi sebesar 14 hektar. (100 %)
- 5. Sinkronisasi antar Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.966.414,00 atau 93,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Koordinasi Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama dalam rangka Sinkronisasi antar Pemerintahan Daerah dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100 %)
- 6. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Buah dan Tanaman Hias dengan anggaran sebesar Rp. 622.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 612.593.800,00 atau 98,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah registrasi kebun yang menerapkan GAP pada komoditas tanaman buah dan hias yang baik dan benar untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk dengan target sebesar 247 kebun / kelompok dan realisasi sebesar 253 kebun / kelompok . (102,43 %)
- 7. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada Kawasan Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dengan anggaran sebesar Rp. 760.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 731.721.825,00 atau 96,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah registrasi kebun yang menerapkan GAP pada komoditas sayur dan obat yang baik dan benar untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk dengan target sebesar 278 Kebun dan realisasi sebesar 313 Kebun. (112,59 %)

8. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 1.436.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.385.876.112,00 atau 96,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah benih unggul bermutu dan bersertifikat tanaman hortikultura (Benih Sayuran) dengan target sebesar 625 kg dan realisasi sebesar 2.812.669 kg. (450.03 %)
9. Pemasaran Produk-Produk Komoditas Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 945.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 936.408.300,00 atau 99,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pameran komoditas Tanaman Hortikultura dengan target sebesar 6 kali dan realisasi sebesar 6 kali. (100 %)
10. Penerapan Agribisnis Kebun Tanaman Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 2.939.021.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.877.183.002,00 atau 97,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah produksi hasil penerapangan agribisnis pada kebun tanaman hortikultura seluas 18 hektar dengan target sebesar 115,479 ton dan realisasi sebesar 85,21 ton. (73,79 %)
11. Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 4.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.036.668.654,00 atau 98,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana pasca panen dan kelengkapannya (Pasca Panen dan Pengolahan Hasil) Hortikultura dengan target sebesar 26 unit dan realisasi sebesar 26 unit. (100 %)
12. Pembangunan / Perbaikan UPTD Hortikultura Dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.626.564.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.045.390.140,00 atau 77,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pembangunan/Perbaikan UPTD Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (Rehab gedung kantor 5 unit, Pembangunan screen house 1 unit, Pembangunan jalan lingkungan kebun 2 unit, Pembangunan pagar kebun 2 unit dan Pembangunan ruang pertemuan 1 unit dengan target sebesar 11 unit dan realisasi sebesar 10 unit. (90,91 %)
13. Pemasaran Benih Hortikultura Unggul dengan anggaran sebesar Rp. 692.689.027,64 dan terealisasi sebesar Rp. 635.182.980,00 atau 91,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah benih varietas unggul sayuran bersertifikat terjual (kg) dengan target sebesar 45.486 kg dan realisasi sebesar 39.525 Kg . (86,89 %)
- Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual (batang) dengan target sebesar 32.200 Batang dan realisasi sebesar 25.500 Batang. (79,19 %)

14. Sarana dan Prasarana Agribisnis Kebun Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 1.395.789.739,01 dan terealisasi sebesar Rp. 973.159.399,00 atau 69,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Penerimaan pendapatan berupa Jasa layanan Agrowisata, penjualan hasil produksi/ benih/ bibit, Jasa layanan laboratorium dengan target sebesar 725.000.000 Rupiah dan realisasi sebesar 860.258.000 Rupiah. (118,66 %)

9) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 15.851.688.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.836.559.035,00 atau 55,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Peningkatan Kecukupan Alsintan dengan target 5,00 % dan realisasi 4,37 %. (87,40 %)
- Indikator Program Prosentase Peningkatan Luas Tambah Tanam Tanaman Padi dengan target 2,00 % dan realisasi 22,88 %. (1.144 %)

Program tersebut didukung oleh 9 kegiatan.

1. Penerapan Penggunaan Pupuk Organik dengan anggaran sebesar Rp. 322.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.284.150,00 atau 94,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Prosentase Penerapan Penggunaan Pupuk Organik dengan target sebesar 0,2 persen dan realisasi sebesar 0,6 persen. (300 %)
2. Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 849.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 837.582.734,00 atau 98,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah bimbingan teknis pengembangan usaha dalam rangka Pembinaan Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)
3. Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 757.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 316.392.770,00 atau 89,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan pendapatan petani di daerah miskin (unit pokmas) dengan target sebesar 41 pokmas dan realisasi sebesar 15 pokmas. (100 %)
- 4. Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Air Irigasi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 322.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 316.392.770,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Air Irigasi Pertanian dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 kali. (100 %)
- 5. Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan dengan anggaran sebesar Rp. 6.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.176.184.250,00 atau 65,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Prosentase penyaluran saprodi bersubsidi (%) dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 90,82 %. (90,82 %)
- 6. Pembinaan dan Pembiayaan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 2.265.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.451.592.665,00 atau 64,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Luas areal yang diikuti Asuransi Usaha Tani Pertanian(ha) dengan target sebesar 275.386 hektar dan realisasi sebesar 488.000,06 hektar. (177,21 %)
- 7. Pembinaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan anggaran sebesar Rp. 852.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 823.699.479,00 atau 96,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan target sebesar 6 unit dan realisasi sebesar 6 unit. (100 %)
- 8. Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan dengan anggaran sebesar Rp. 284.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 250.282.810,00 atau 88,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pertanian dalam rangka Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan dengan target sebesar 10 Unit dan realisasi sebesar 10 Unit. (100 %)
- 9. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) dengan anggaran sebesar Rp. 3.850.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Peningkatan Pemanfaatan Irigasi Pertanian dan Adaptasi Iklim melalui perbanyakan benih dasar dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 0 paket. (0 %)

10) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.540.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.128.611.443,00 atau 90,94 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Petani yang meningkat kapasitas SDM nya dengan target 3,00 % dan realisasi 0,05 %. (1,7 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan anggaran sebesar Rp. 2.651.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.528.301.987,00 atau 95,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peserta Pelatihan Penerapan sistem agribisnis / pertanian dengan target sebesar 450 peserta dan realisasi sebesar 450 peserta. (100 %)
2. Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 379.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 378.890.000,00 atau 99,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kelompok yang menerapkan Pengelolaan Tanaman Sehat (kelompok skala kawasan @ 4 kelompok) dengan target sebesar 3 kelompok dan realisasi sebesar 3 kelompok. (100 %)
3. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.473.000,00 atau 9,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bimbingan Teknis Pengawalan Komoditi Tanaman Pangan ditingkat lapang dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100 %)
4. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.260.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.197.946.456,00 atau 95,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok dan penyuluh pertanian yang difasilitasi dalam rangka Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan target sebesar 450 orang dan realisasi sebesar 450 orang. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Ketersediaan sarana produksi (pupuk dan benih) masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga;
2. Semakin terbatasnya tenaga kerja pertanian di pedesaan terutama untuk kegiatan on farm;
3. Kondisi jaringan irigasi (JITUT / JIDES) banyak mengalami kerusakan dan sekitar lebih dari 50 persen memerlukan rehabilitasi;
4. Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, terutama perkembangan luas lahan sawah irigasi masih merupakan angka sementara;
5. Masih lemahnya daya saing komoditas karena lemahnya posisi tawar Petani / Kelompok tani;
6. Masih lemahnya kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis dalam menerapkan budidaya yang baik dan benar (GAP) serta berwirausaha.
7. Optimalisasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terkendala kemampuan manajemen kelompok;
8. Belum optimalnya jaringan distribusi pangan dan belum kontinyu pemantauan dan ketepatan waktu pelaporan harga, akses dan pasokan pangan;
9. Belum diterapkan analisa SKPG dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan;
10. Belum Optimalnya penyaluran bantuan Hibah;
11. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terkendala dengan jumlah tenaga penyuluh terbatas;
12. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal spesifikasi lokasi serta tingkat konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) dimana masih tingginya konsumsi pangan sumber karbohidrat didominasi kelompok pangan padi-padian (beras);
13. Masih banyak makanan yang beredar di masyarakat yang menggunakan bahan tambahan Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis.

Solusi :

1. Melakukan koordinasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara intensif dalam mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya kelangkaan pupuk sesuai prinsip 6 tepat, pada tahun 2019 serta Pembinaan dan Pengawasan

Pupuk, Pestisida dan Alsintan. Penyediaan benih padi dan jagung di Jawa Timur sudah terpenuhi di tingkat usaha tani, namun untuk benih kedelai yang ketersediaannya terbatas, dapat dilakukan dengan cara Jabalsim. Salah satu upaya untuk memperbaiki pengadaan dan penyaluran benih kedelai dapat dilakukan melalui pola Jabalsim. Jabalsim adalah salah satu pola pengadaan dan penyaluran benih kedelai antar wilayah yang berlangsung secara alami dan dipengaruhi oleh alam dan musim. Keuntungan Jabalsim adalah kebutuhan benih dapat dipenuhi di sentra produksi sendiri, b) kualitas benih terjaga dengan tidak terlalu lama menyimpan benih, c) varietas sesuai dengan preferensi petani karena diproduksi di lingkungan sendiri, d) potensi penangkar lokal cukup memadai sebagai penyangga kebutuhan benih.

2. Menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) terutama untuk kegiatan on farm (proses pengolahan tanah dan tanam) dikawasan sentra produksi sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi, pada tahun 2019 dialokasikan melalui : i) kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan; ii) Pengembangan Sistem Agribisnis melalui Kooperatif Farming; iii) Anti Poverty Program Bidang Pertanian; iv) Pemberdayaan Kelompok Mitra Usaha Kawasan Agropolitan;
3. Melalui APBD dialokasikan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan Pembinaan bagi kelompok pelaksana RJIT dan Pembuatan Embung Tahun 2019 dari APBN;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun instansi vertikal lintas sektor bersama Dinas Pertanian Kabupaten / Kota secara terpadu dan berkesinambungan, utamanya yang tergabung dalam Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten bersama BPN terutama pada inventarisasi luasan lahan LP2B 2018;
5. Upaya peningkatan nilai tambah produksi tanaman pangan dan hortikultura telah dilaksanakan melalui kegiatan : i) Pengembangan Sistem Agribisnis melalui Kooperatif Farming; ii) Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dan Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; iii) ketersediaan Informasi Pasar;
6. Telah menyusun kurikulum serta memfasilitasi pelatihan agribisnis bagi petani tentang daya saing produk pertanian yang meliputi mutu produk, keamanan pangan dan tingkat efisiensi usaha tani karena biaya produksi yang relatif tinggi berdampak harga produk menjadi kurang kompetitif.

7. Upaya untuk optimalisasi Lumbung Pangan tahun 2019 bantuan hibah barang berupa gabah isi lumbung pangan masyarakat;
8. Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan berupa bantuan hibah gabah pengembangan lembaga distribusi pangan dalam rangka stabilisasi harga pangan;
9. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Pangan berupa bantuan hibah barang alat pengolahan pangan;
10. Mengoptimalkan penyaluran bantuan Hibah dengan melakukan CPCL bagi calon penerima dan ditindaklanjuti dengan verifikasi CPCL sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
11. Mengintensifkan tenaga penyuluh dari PNS dan THL-TB;
12. Upaya yang telah dilakukan i) Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman dengan peserta Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota; ii) Gerakan Panganku Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); iii) Pengembangan Teknologi Pangan Olahan dan Workshop Pengembangan Taman Posyandu Berbasis Pangan Lokal, Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi Pangan Olahan;
13. Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan agar lebih ditingkatkan pada 38 kab/kota melalui Pengujian Kualitatif Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis.

e. Penghargaan Nasional

1. Penghargaan kepada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, UPT Dinas Pertanian sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



2. Penghargaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan predikat nilai Kategori (Memuaskan)



2.2.2 DINAS PERKEBUNAN

a. Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan sub kategori perkebunan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	2.84 %	1.55 %	98.71

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Perkebunan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : MENINGKATNYA PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2019 dengan target sebesar 2.84 % dan terealisasi sebesar 1.51 % atau 98.71 persen;

Tabel 3.2 Data Luas Areal Dan Angka Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2018 dan 2019

No	Komoditi	2018		2019		Pertumbuhan (%)	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal	Produksi
I. Tanaman Semusim							
1	Tebu : - Gula Kristal	184.892	1.067.646	175.632	1.046.856	-5,01	-1,95
	- Gula Merah	12.583	86.490	17.950	124.026	42,65	43,40
2	Tembakau	114.490	126.075	121.728	132.648	6,32	5,21
	Lain-lain	8.590	21.753	8.562	21.782	-0,33	0,13
Jumlah I		320.555	1.301.964	318.537	1.289.236	-0,63	-0,98
II. Tanaman Tahunan							
3	Kopi	113.124	66.618	113.332	68.114	0,18	2,25
	- Arabika	28.665	13.650	28.867	13.952	0,70	2,21
	- Robusta	84.459	52.968	84.465	54.162	0,01	2,25
4	Kakao	57.526	34.119	57.648	35.285	0,21	3,42
5	Cengkeh	44.443	10.312	44.475	11.658	0,07	13,05
6	Jambu Mete	42.577	16.773	42.356	16.652	-0,52	-0,72
7	Kelapa	263.347	244.060	261.040	242.520	-0,88	-0,63
8	Lain-lain	115.590	72.702	115.612	73.426	0,02	1,00
Jumlah II		636.607	444.584	634.463	447.655	-0,34	0,69
JUMLAH TOTAL (I + II)		957.162	1.746.548	958.335	1.772.967	0,12	1,51

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa hampir seluruh komoditi perkebunan mengalami peningkatan produksi apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan produksi di hampir seluruh komoditi perkebunan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni sebagai berikut:

1. Faktor iklim; keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman perkebunan, khususnya pada komoditi tanaman perkebunan semusim seperti Tebu dan Tembakau. Keadaan iklim pada tahun 2019 relatif stabil, sama dengan tahun sebelumnya, karena tidak ada fenomena alam yang berpotensi dapat mempengaruhi pola curah hujan, sehingga karena tidak ada perubahan cuaca yang ekstrim tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi tanaman perkebunan.
2. Pupuk; ketersediaan pupuk yang mencukupi serta pendistribusian pupuk yang tepat pada waktunya, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan semusim yang pola tanamnya harus menyesuaikan dengan jadwal penanaman, maka ketersediaan pupuk tepat pada waktunya sangat diperlukan, karena bila pupuk yang diperlukan mengalami keterlambatan pasokan, maka bisa dipastikan dapat berpengaruh kepada menurunnya kualitas tumbuh kembang tanaman perkebunan semusim tersebut, seperti Tebu dan Tembakau.
3. Hama; pengendalian hama secara cepat, tepat, dan tanggap, merupakan salah satu faktor pendukung bagi upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Pada tahun 2019 telah diupayakan pengendalian terhadap serangan hama dan penyakit yang didahului dengan pemetaan wilayah serangan dan pengamatan terhadap jenis serangan, kemudian dilakukan upaya terpadu terhadap pengendalian serangan hama dan penyakit tersebut. Upaya terpadu yang dimaksud ialah dengan memberikan bimbingan kepada petani dan kelompok tani mengenai strategi pengendalian hama, serta memberikan bantuan kepada petani dan kelompok tani berupa berbagai macam pestisida yang menyesuaikan dengan jenis serangan.
4. Benih; meningkatnya produksi tanaman perkebunan tidak lepas dari kualitas atau mutu benih yang digunakan. Ketersediaan benih unggul bersertifikat merupakan salah satu faktor pokok bagi upaya untuk meningkatkan produksi tanaman perkebunan, sehingga diupayakan agar petani dan kelompok tani yang membudidayakan tanaman perkebunan mendapatkan kepastian terhadap ketersediaan benih yang unggul serta sudah mendapatkan sertifikat.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.909.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.547.693.107,00 atau 81,05 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.909.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.547.693.107,00 atau 81,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.793.941.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.543.356.208,00 atau 91,03 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.809.729.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.646.080.478,00 atau 90,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 1 Paket/Unit dan realisasi sebesar 1 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 984.212.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 897.275.730,00 atau 91,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 647.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 574.332.332,00 atau 88,73 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.404.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.736.810,00 atau 90,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 12 kali dan realisasi sebesar 12 kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 551.885.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 487.595.522,00 atau 88,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 135 Orang dan realisasi sebesar 135 Orang. (100 %)

- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.661.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.627.835.087,00 atau 97,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 715.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 704.450.654,00 atau 98,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 344.143.796,00 atau 98,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 294.369.978,00 atau 98,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 296.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 284.870.659,00 atau 95,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 31.787.796.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.533.236.239,00 atau 89,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan produksi tanaman semusim dengan target 1,59 % dan realisasi -0,98 %. (97,47 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman tebu dengan anggaran sebesar Rp. 3.146.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.791.999.305,00 atau 88,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luas pengawalan dan pendampingan pengembangan tanaman Tebu dengan target sebesar 200 hektar dan realisasi sebesar 200 hektar. (100 %)
 - Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Tebu dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)
2. Ekstensifikasi, Intensifikasi, diversifikasi, penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 405.237.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 368.704.542,00 atau 90,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luas Pengembangan tanaman semusim lainnya dengan target sebesar 2 hektar dan realisasi sebesar 2 hektar. (100 %)
 - Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman semusim lainnya dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)

3. Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practices Tembakau dengan anggaran sebesar Rp. 19.953.267.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.902.731.254,00 atau 89,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luas intensifikasi Tembakau dengan target sebesar 7.000 hektar dan realisasi sebesar 6.985 hektar. (99,79 %)
 4. Penanganan Panen dan Pasca Panen dengan anggaran sebesar Rp. 2.922.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.815.848.927,00 atau 96,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tembakau dengan target sebesar 2.600 buah/unit dan realisasi sebesar 2.602 buah/unit. (100,08 %)
 5. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau dengan anggaran sebesar Rp. 4.657.642.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.974.895.130,00 atau 85,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah bantuan sarana on farm tembakau dengan target sebesar 109 unit dan realisasi sebesar 103 unit. (94,50 %)
 6. Penerapan Inovasi Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 702.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 679.057.081,00 atau 96,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah varietas unggul lokal dengan target sebesar 1 inovasi dan realisasi sebesar 1 inovasi. (100 %)
- 6) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Perkebunan** dengan anggaran sebesar Rp. 10.322.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.170.301.809,00 atau 88,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan dengan target 1,25 % dan realisasi 0,69 %. (99,45 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.
1. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi dengan anggaran sebesar Rp. 5.551.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.961.213.505,00 atau 89,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika dengan target sebesar 250 hektar dan realisasi sebesar 250 hektar. (100 %)

- Jumlah luas pemupukan tanaman kopi dengan target sebesar 100 hektar dan realisasi sebesar 90 hektar. (90 %)
 - Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi rakyat dengan target sebesar 50 hektar dan realisasi sebesar 50 hektar. (100 %)
 - Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Kopi dengan target sebesar 9 unit dan realisasi sebesar 49 unit. (544,44 %)
2. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kopi di kawasan agropolitan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 87.264.250,00 atau 87,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah luas tertanam bibit kopi di kawasan agropolitan dengan target sebesar 10 hektar dan realisasi sebesar 10 hektar. (100 %)
3. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, panen dan pasca panen tanaman kakao dengan anggaran sebesar Rp. 3.670.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.203.257.754,00 atau 87,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah luas tertanam bibit Kakao dengan target sebesar 250 hektar dan realisasi sebesar 250 hektar. (100 %)
 - Jumlah luas pemupukan tanaman kakao dengan target sebesar 100 hektar dan realisasi sebesar 100 hektar. (100 %)
 - Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao rakyat dengan target sebesar 50 hektar dan realisasi sebesar 50 hektar. (100 %)
 - Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen Kakao dengan target sebesar 60 buah/unit dan realisasi sebesar 80 buah/unit. (133,33 %)
4. Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi, diversifikasi, panen, dan pasca panen tanaman tahunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 918.566.300,00 atau 91,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah luas pengembangan tanaman Kelapa dengan target sebesar 150 hektar dan realisasi sebesar 150 hektar. (100 %)
 - Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat dengan target sebesar 50 hektar dan realisasi sebesar 50 hektar. (100 %)

- Jumlah luas pemupukan tanaman kelapa rakyat dengan target sebesar 50 hektar dan realisasi sebesar 30 hektar. (60 %)
- Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh rakyat dengan target sebesar 50 hektar dan realisasi sebesar 50 hektar. (100 %)
- Jumlah bantuan alat penanganan panen dan pasca panen tanaman tahunan lainnya dengan target sebesar 20 buah/unit dan realisasi sebesar 20 buah/unit. (100 %)

7) Program Perlindungan Tanaman perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 2.524.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.361.368.818,00 atau 93,53 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan pengamanan nilai produksi dengan target 20 % dan realisasi 20 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.040.740.393,00 atau 92,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana prasarana pengendalian OPT dengan target sebesar 117,5 hektar dan realisasi sebesar 117,5 hektar. (100 %)
- Jumlah sarana prasarana konservasi dengan target sebesar 77,5 hektar dan realisasi sebesar 77,5 hektar. (100 %)

2. Pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 893.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 844.634.675,00 atau 94,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luas pengendalian OPT Perkebunan dengan target sebesar 117,5 hektar dan realisasi sebesar 117,5 hektar. (100 %)

3. Usaha tani konservasi komoditi Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 475.993.750,00 atau 95,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luas konservasi lahan perkebunan dengan target sebesar 77,5 hektar dan realisasi sebesar 77,5 hektar. (100 %)

8) Program Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 5.760.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.323.584.511,00 atau 92,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan dengan target 10 % dan realisasi 10 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pembinaan kemitraan, Promosi produk dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar dengan anggaran sebesar Rp. 2.197.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.038.937.423,00 atau 92,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah promosi produk perkebunan dengan target sebesar 6 kali dan realisasi sebesar 6 kali. (100 %)
- Jumlah kebun yang dilakukan pembinaan dengan target sebesar 152 kebun dan realisasi sebesar 125 kebun. (100 %)
- Jumlah kemitraan petani dan mitra dagang dengan target sebesar 1 kemitraan dan realisasi sebesar 1 kemitraan. (100 %)

2. Anti Proverty Program (APP) Bidang Perkebunan (Supporting tim APP Provinsi) dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 190.531.000,00 atau 95,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok yang tertangani APP bidang perkebunan dengan target sebesar 2 Kelp dan realisasi sebesar 2 kelp. (100 %)

3. Pengawasan dan sertifikasi Mutu Produk Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.178.871.369,00 atau 90,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sertifikasi mutu produk perkebunan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 7 sertifikat. (350 %)

4. Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 963.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 915.244.719,00 atau 95,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peningkatan kelas kelompok petani perkebunan dengan target sebesar 12 Kelp dan realisasi sebesar 12 Kelp. (100 %)
- Jumlah kelompok sekolah lapang Agribisnis dengan target sebesar 9 Kelp dan realisasi sebesar 9 Kelp. (100 %)

- 9) **Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih** dengan anggaran sebesar Rp. 2.716.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.507.485.606,00 atau 92,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Peningkatan Penanganan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan target 8 % dan realisasi 6 %. (75 %) Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Sertifikasi dan Pengujian Mutu dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.185.025.850,00 atau 94,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi teknis produsen benih tanaman perkebunan dengan target sebesar 64 dokumen dan realisasi sebesar 25 dokumen. (39,06 %)
 - Jumlah benih tersertifikasi dengan target sebesar 600 dokumen dan realisasi sebesar 477 dokumen. (79,50 %)
 2. Pengawasan dan Peredaran Benih dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 338.060.350,00 atau 93,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah benih yang terawasi dengan target sebesar 600 dokumen dan realisasi sebesar 477 dokumen. (79,50 %)
 - Jumlah labelisasi benih bersertifikat dengan target sebesar 120 dokumen dan realisasi sebesar 72 dokumen. (60 %)
 - Jumlah produsen terakses informasi legalitas benih dengan target sebesar 64 unit usaha dan realisasi sebesar 25 unit usaha. (39,06 %)
 3. Pelayanan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.106.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 984.399.406,00 atau 89,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan keuangan (laporan) dengan target sebesar 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan. (100 %)
 - Jumlah laporan barang daerah (laporan) dengan target sebesar 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang dikelo (orang) dengan target sebesar 19 orang dan realisasi sebesar 19 orang. (100 %)
 - Jumlah surat yang diproses (dokumen) dengan target sebesar 100 dokumen dan realisasi sebesar 100 dokumen. (100 %)
 - Jumlah barang daerah yang dikelola (unit) dengan target sebesar 10 unit dan realisasi sebesar 10 unit. (100 %)

10) Program Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 2.606.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.591.054.412,00 atau 99,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Peningkatan pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan dengan target 2,4 % dan realisasi 2,4 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Perbenihan Tanaman Tahunan dengan anggaran sebesar Rp. 755.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 751.052.517,00 atau 99,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luas pengembangan kebun benih perkebunan (tanaman tahunan) dengan target sebesar 11,07 hektar dan realisasi sebesar 11,07 hektar. (100 %)

2. Perbenihan Tanaman Semusim dengan anggaran sebesar Rp. 1.282.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.281.417.167,00 atau 99,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah luas pengembangan kebun benih perkebunan (tanaman semusim) dengan target sebesar 20 hektar dan realisasi sebesar 20 hektar. (100 %)

3. Pelayanan UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 568.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 558.584.728,00 atau 98,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan keuangan (laporan) dengan target sebesar 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan. (100 %)
- Jumlah laporan barang daerah (laporan) dengan target sebesar 12 laporan dan realisasi sebesar 12 laporan. (100 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola (orang) dengan target sebesar 19 orang dan realisasi sebesar 19 orang. (100 %)
- Jumlah surat yang diproses (dokumen) dengan target sebesar 100 dokumen dan realisasi sebesar 100 dokumen. (100 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola (unit) dengan target sebesar 10 unit dan realisasi sebesar 10 unit. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Terdapat sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yakni intensifikasi Tanaman Kopi seluas 10 ha di Kabupaten Ngawi. Hal ini disebabkan oleh karena setelah diadakan verifikasi ulang terhadap CPCL Kelompok Tani yang bersangkutan, ternyata Kelompok Tani tersebut juga mengajukan bantuan hibah untuk komoditi Tanaman Kakao;
- 2) Selain sub kegiatan intensifikasi Tanaman Kopi, terdapat sub kegiatan intensifikasi Tanaman Kelapa seluas 20 ha di Kabupaten Bangkalan yang tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kesalahan prosedur pengajuan bantuan hibah.

Solusi :

- 1) Diperlukan pengajuan proposal bantuan hibah melalui mekanisme aplikasi berbasis elektronik.

e. Penghargaan Nasional

-

2.2.3. DINAS PETERNAKAN

- **Tujuan**

Meningkatkan kontribusi subkategori peternakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

- **Sasaran**

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Peternakan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Produksi Komoditas Utama dan Unggulan Peternakan	Persentase Pertumbuhan Produksi Daging	2,50 %	5,67 %	226,80
	Persentase Pertumbuhan Produksi Telur	2,20 %	2,63 %	119,54
	Persentase Pertumbuhan Produksi Susu	2,00 %	1,28 %	64,05
	Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Daging Sapi	25,00 %	29,96 %	119,84
	Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Telur	20 %	25 %	125,00
	Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Susu	40 %	57 %	142,50

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Peternakan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Komoditas Utama dan Unggulan Peternakan, ditetapkan 6 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi Daging pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,50 % dan terealisasi sebesar 5,67 % atau 226,80 persen; Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah - langkah strategi dan kebijakan sebagai berikut : (1) Meningkatkan angka kelahiran sapi potong diutamakan melalui inovasi INTAN SELAKSA (Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi), mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur, meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi; (2) Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak; (3) Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini yaitu Integrasi Sistem

Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS) yang berbasis online, peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); (4) Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif, revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

- Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi Telur pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,20 % dan terealisasi sebesar 2,63 % atau 119,54 persen; Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah - langkah strategi dan kebijakan sebagai berikut : (1) Mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur (ayam buras dan bebek mojosari), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi; (2) Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan Pengawasan mutu pakan yang beredar; (3) Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini berbasis online yaitu Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (ISIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); (4) Pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.
- Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi Susu pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,00 % dan terealisasi sebesar 1,28 % atau 64,05 persen; Capaian kinerja presentase pertumbuhan produksi susu tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan adanya 1) jumlah produksi susu sapi perah yang tidak optimal karena kualitas pakan yang diberikan rendah (kualitas pakan yang diberikan rendah karena harga pakan yang berkualitas cukup tinggi sehingga memberatkan peternak untuk membeli) dan penurunan jumlah sapi yang laktasi karena adanya replacement dengan sapi yang muda

(masa persiapan berproduksi); 2) terjadi penurunan produksi susu kambing dibandingkan tahun 2018. (Penurunan produksi susu kambing disebabkan sebagian indukan di kabupaten sentra kambing perah mengalami masa kering kandang).

- Indikator Sasaran Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Daging Sapi pada tahun 2019 dengan target sebesar 25,00 % dan terealisasi sebesar 29,96 % atau 119,84 persen; Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah - langkah strategi dan kebijakan sebagai berikut : (1) Meningkatkan mutu produk olahan daging sapi yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), promosi RPH berstandar di Kabupaten/Kota, bimbingan teknis pasca panen produk daging sapi kepada peternak, dll; (2) Fasilitasi Promosi produk olahan daging sapi; (3) Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- Indikator Sasaran Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Telur pada tahun 2019 dengan target sebesar 20 % dan terealisasi sebesar 25 % atau 125,00 persen; Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah - langkah strategi dan kebijakan sebagai berikut : (1) Meningkatkan mutu produk olahan telur yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), bimbingan teknis pasca panen produk telur kepada peternak, dll; (2) Fasilitasi Promosi produk olahan telur; (3) Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- Indikator Sasaran Persentase Nilai Tambah Produk Olahan Susu pada tahun 2019 dengan target sebesar 40 % dan terealisasi sebesar 57 % atau 142,50 persen; Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari langkah - langkah strategi dan kebijakan sebagai berikut : (1) Meningkatkan mutu produk olahan susu yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), bimbingan teknis pasca panen produk susu kepada peternak, dll; (2) Fasilitas Promosi produk olahan susu; (3) Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

- **Program dan Kegiatan**

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.825.606.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.164.166.782,18 atau 88,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.825.606.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.164.166.782,18 atau 88,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100,00 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 8.252.037.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.320.694.476,00 atau 88,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.526.542.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.869.772.043,00 atau 85,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 8 Paket/Unit dan realisasi sebesar 8 Paket/Unit. (100,00 %)

2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.725.495.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.450.922.433,00 atau 92,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100,00 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.429.013.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.719.481.405,00 atau 79,31 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Kegiatan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.194.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.860.267.793,00 atau 77,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 12 Kali dan realisasi sebesar 12 Kali. (100,00 %)

2. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.819.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 859.213.612,00 atau 83,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 74 Orang. (148,00 %)
- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 302 Orang dan realisasi sebesar 302 Orang. (100,00 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.440.073.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.322.264.739,00 atau 95,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.015.323.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 983.137.784,00 atau 96,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100,00 %)

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 578.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 540.554.880,00 atau 93,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100,00 %)
3. Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 778.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 733.375.875,00 atau 94,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100,00 %)
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 68.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.196.200,00 atau 94,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100,00 %)
- 5) Program peningkatan Produksi Peternakan** dengan anggaran sebesar Rp. 18.136.004.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.505.925.864,00 atau 85,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Produksi Daging dengan target 438.620 Ton dan realisasi 610.037 Ton. (139,08 %)
 - Indikator Program Produksi Telur dengan target 488.765 Ton dan realisasi 558.269 Ton. (114,22 %)
 - Indikator Program Produksi Susu dengan target 511.137 Ton dan realisasi 534.609 Ton. (104,59 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Kegiatan Budidaya ternak dengan anggaran sebesar Rp. 3.079.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.948.877.325,00 atau 95,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kelompok pembudidaya ternak yang menerapkan good farming practice dengan target sebesar 8 kelompok dan realisasi sebesar 8 kelompok. (100,00 %)
2. Kegiatan Pengawasan Mutu Bibit Ternak dengan anggaran sebesar Rp. 2.069.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.018.040.226,00 atau 97,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah sapi potong layak bibit yang dibudidayakan masyarakat dengan target sebesar 68 ekor dan realisasi sebesar 68 ekor. (100,00 %)

- Jumlah sapi perah layak bibit yang dibudidayakan masyarakat dengan target sebesar 10 ekor dan realisasi sebesar 10 ekor. (100,00 %)
 - Jumlah kambing senduro layak bibit yang dibudidayakan masyarakat dengan target sebesar 43 ekor dan realisasi sebesar 43 ekor. (100,00 %)
3. Kegiatan Penataan Kawasan Agropolitan/Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 412.169.277,00 atau 91,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kelompok partisipatif penataan kawasan agropolitan dengan target sebesar 2 Kelompok dan realisasi sebesar 2 Kelompok. (100,00 %)
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan, Penerapan Teknologi Pakan, dan Penyaluran Benih HPT dengan anggaran sebesar Rp. 5.102.004.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.469.875.178,00 atau 87,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah alsin pengolah pakan yang sesuai standar dengan target sebesar 32 Unit dan realisasi sebesar 31 Unit. (98,87 %)
 - Jumlah bibit HPT legume unggul yang disebar dengan target sebesar 15.000 stek dan realisasi sebesar 15.000 stek. (100,00 %)
 - Jumlah bibit HPT rumput unggul yang disebar dengan target sebesar 40.000 stek dan realisasi sebesar 40.000 stek. (100,00 %)
 - Jumlah hasil pengujian sampel pakan dengan target sebesar 500 Sampel dan realisasi sebesar 1.367 Sampel. (273,40 %)
5. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan UPTD Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.879.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.368.951.173,00 atau 86,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Sarana dengan target sebesar 11 Unit dan realisasi sebesar 11 Unit. (100,00 %)
 - Jumlah Peralatan dengan target sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (66,67 %)
6. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan UPTD/Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) dengan anggaran sebesar Rp.

3.556.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.288.012.685,00 atau 64,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Sarana dengan target sebesar 5 Unit dan realisasi sebesar 5 Unit. (100,00 %)
- Jumlah Peralatan dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (50,00 %)

6) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.997.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.948.919.949,00 atau 98,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase nilai tambah produk olahan daging sapi dengan target 25 % dan realisasi 29,96 %. (119,84 %)
- Indikator Program Persentase nilai tambah produk olahan telur dengan target 20 % dan realisasi 25 %. (125,00 %)
- Indikator Program Persentase nilai tambah produk olahan susu dengan target 40 % dan realisasi 57 %. (142,50 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Kegiatan Pengolahan Produk Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 638.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 631.704.300,00 atau 98,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kelompok pengolah hasil peternakan yang dibina dengan target sebesar 8 Kelompok dan realisasi sebesar 13 Kelompok. (162,50 %)
 - Jumlah produk yang dihasilkan kelompok pengolah hasil peternakan dengan target sebesar 4 Produk dan realisasi sebesar 8 Produk. (200,00 %)
2. Kegiatan Informasi Pasar dan Promosi dengan anggaran sebesar Rp. 739.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 717.584.299,00 atau 97,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah ekspose informasi harga pasar hasil peternakan dengan target sebesar 235 kali dan realisasi sebesar 350 kali. (148,94 %)
 - Jumlah promosi produk peternakan dengan target sebesar 2 kali dan realisasi sebesar 2 kali. (100,00 %)
3. Kegiatan Investasi Usaha dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternak dengan anggaran sebesar Rp. 1.319.800.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 1.303.733.800,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok yang difasilitasi pembiayaan dengan target sebesar 25 Kelompok dan realisasi sebesar 25 Kelompok. (100,00 %)
- Jumlah kelompok yang difasilitasi asuransi ternak dengan target sebesar 100 Kelompok dan realisasi sebesar 137 Kelompok. (137,00 %)
- Jumlah kelompok peternak berprestasi dengan target sebesar 15 Kelompok dan realisasi sebesar 15 Kelompok. (100,00 %)

4. Kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 295.897.550,00 atau 98,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah penerima fasilitas APP dengan target sebesar 4 Kelompok dan realisasi sebesar 4 Kelompok. (100,00 %)

7) Program Penjaminan Kesehatan Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 3.994.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.786.742.789,00 atau 94,80 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase ternak/ hewan yang menjadi kebal terhadap penyakit hewan menular strategis tertentu dengan target 80 % dan realisasi 80,07 %. (100,09 %)
- Indikator Program Jumlah sertifikat veteriner/ Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang diterbitkan (dokumen) dengan target 12.000 sertifikat dan realisasi 15.771 sertifikat. (131,43 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan Menular dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.237.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.155.225.782,00 atau 93,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pelayanan kesehatan hewan pada hewan kesayangan dengan target sebesar 3.000 Ekor dan realisasi sebesar 2.908 Ekor. (96,93 %)
- Jumlah sampel yang diuji untuk surveillance penyakit hewan menular strategis tertentu dengan target sebesar 3.800 Sampel dan realisasi sebesar 3.800 Sampel. (100,00 %)
- Jumlah petugas dan peternak yang dilatih cara pelaporan penyakit hewan dengan target sebesar 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang. (100,00 %)

- Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen bebas flu burung dengan target sebesar 2 Unit usaha dan realisasi sebesar 6 Unit usaha. (300,00 %)
 - Jumlah tenaga medik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dengan target sebesar 40 Orang dan realisasi sebesar 40 Orang. (100,00 %)
2. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dengan anggaran sebesar Rp. 1.917.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.160.214,00 atau 96,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hewan/ternak yang divaksin PHMS Tertentu dengan target sebesar 302.000 Ekor dan realisasi sebesar 302.500 Ekor. (100,17 %)
 - Jumlah petugas dan peternak yang telah dilatih penerapan bio security 3 zona dengan target sebesar 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang. (100,00 %)
 - Jumlah ternak sapi di UPT lingkup Disnak Provinsi yang memperoleh penanganan gangguan reproduksi dengan target sebesar 125 Ekor dan realisasi sebesar 70 Ekor. (56,00 %)
 - Jumlah desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan terpadu dengan target sebesar 3 Desa dan realisasi sebesar 3 Desa. (100,00 %)
 - Jumlah pos pemeriksaan hewan di wilayah perbatasan yang terfasilitasi dengan target sebesar 9 Pos dan realisasi sebesar 9 Pos. (100,00 %)
3. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 839.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 780.356.793,00 atau 92,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah berita acara pengawasan peredaran obat hewan di distributor obat hewan dengan target sebesar 60 Dokumen dan realisasi sebesar 84 Dokumen. (140,00 %)
 - Jumlah berita acara pengawasan penggunaan obat hewan pada unit pelayanan kesehatan hewan dengan target sebesar 30 Dokumen dan realisasi sebesar 46 Dokumen. (153,33 %)
 - Jumlah sampling obat hewan yang memenuhi syarat mutu dengan target sebesar 85 Produk dan realisasi sebesar 85 Produk. (100,00 %)

8) Program Peningkatan Produk Hewan yang ASUH dengan anggaran sebesar Rp. 3.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.478.825.964,00 atau 98,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar dengan target 10 % dan realisasi 35,98 %. (359,80 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Penerapan Jaminan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.037.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.028.006.012,00 atau 99,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah RPH yang memenuhi standar dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 3 Unit. (150,00 %)
- Jumlah usaha produk hewan yang memenuhi standar NKV dengan target sebesar 20 Unit dan realisasi sebesar 84 Unit. (420,00 %)

2. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas dan Peredaran Produk Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.865.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.822.572.649,00 atau 97,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi peredaran produk hewan yang diterbitkan dengan target sebesar 840 Dokumen dan realisasi sebesar 1.059 Dokumen. (126,00 %)
- Jumlah hasil pengujian produk hewan dengan target sebesar 1.350 Data dan realisasi sebesar 1.787 Data. (132,37 %)
- Jumlah pengawas kesmavet yang bersertifikat dengan target sebesar 38 Orang dan realisasi sebesar 38 Orang. (100,00 %)

3. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan dengan anggaran sebesar Rp. 639.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 628.247.303,00 atau 98,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah masyarakat yang memperoleh ketrampilan kesrawan dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (300,00 %)
- Jumlah masyarakat yang memperoleh ketrampilan zoonosis dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 60 Orang. (120,00 %)
- Jumlah rekomendasi dari hasil pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina ruminansia produktif dengan target sebesar 6 Rekomendasi dan realisasi sebesar 6 Rekomendasi. (100,00 %)

9) Program Pembibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 1.771.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.761.246.610,00 atau 99,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah produksi bibit ayam buras (ekor) dengan target 5.000 Ekor dan realisasi 14.516 Ekor. (290,32 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Ayam Buras dan Hijaun Pakan Ternak UPT PT dan HMT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 766.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 760.400.350,00 atau 99,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah populasi ayam buras yang dipelihara dengan target sebesar 2.250 Ekor dan realisasi sebesar 2.924 Ekor. (129,96 %)
- Jumlah produksi telur ayam buras dengan target sebesar 328.500 Butir dan realisasi sebesar 277.705 Butir. (84,54 %)
- Luas tanam HPT dengan target sebesar 1,3 Ha dan realisasi sebesar 1 Ha. (76,92 %)
- Jumlah Produksi Bibit HPT dengan target sebesar 165.000 Stek dan realisasi sebesar 489.333 Stek. (296,57 %)

2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Ayam Buras UPT PT dan HMT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 40.885.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.465.475,00 atau 98,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Magetan dengan target sebesar 650 Orang dan realisasi sebesar 589 Orang. (90,62 %)
- Jumlah bibit ayam buras afkir yang dipasarkan dengan target sebesar 855 Ekor dan realisasi sebesar 919 Ekor. (107,49 %)
- Jumlah telur yang dipasarkan dengan target sebesar 197.100 Butir dan realisasi sebesar 144.690 Butir. (73,41 %)

3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 964.202.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 960.380.785,00 atau 99,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)

- Jumlah Laporan Barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 36 Orang dan realisasi sebesar 38 Orang. (105,56 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 200 Eksemplar dan realisasi sebesar 500 Eksemplar. (250,00 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 175 Unit dan realisasi sebesar 175 Unit. (100,00 %)

10) Program Pembibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.484.779.085,00 atau 98,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah produksi bibit itik mojosari (ekor) dengan target 2.000 Ekor dan realisasi 2.044 Ekor. (102,20 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Itik Mojosari dan Hijauan Pakan Ternak UPT PT dan HMT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 903.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 888.666.575,00 atau 98,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah populasi itik yang dipelihara dengan target sebesar 1.950 Ekor dan realisasi sebesar 1.234 Ekor. (63,28 %)
 - Jumlah produksi telur itik dengan target sebesar 5.000 Butir dan realisasi sebesar 28.194 Butir. (563,88 %)
 - Luas Tanam HPT dengan target sebesar 2 Ha dan realisasi sebesar 2 Ha. (100,00 %)
2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Itik Mojosari UPT PT dan HMT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.520.000,00 atau 96,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Kediri dengan target sebesar 350 Orang dan realisasi sebesar 750 Orang. (214,29 %)
 - Jumlah telur yang dipasarkan dengan target sebesar 5.000 Butir dan realisasi sebesar 23.785 Butir. (475,70 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 581.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 581.592.510,00 atau 99,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 11 Orang dan realisasi sebesar 33 Orang. (300,00 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 350 Eksemplar dan realisasi sebesar 405 Eksemplar. (115,71 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 826 Unit dan realisasi sebesar 826 Unit. (100,00 %)

11) Program Pembibitan Ternak Domba Sapudi di UPT PT dan HMT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 1.761.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.738.403.198,00 atau 98,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah domba sapudi yang layak bibit (ekor) dengan target 120 Ekor dan realisasi 120 Ekor. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Domba Sapudi dan Hijauan Pakan Ternak UPT PT dan HMT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 626.785.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 605.705.200,00 atau 96,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah populasi domba sapudi yang dipelihara dengan target sebesar 600 Ekor dan realisasi sebesar 626 Ekor. (104,33 %)
 - Jumlah kelahiran domba sapudi dengan target sebesar 300 Ekor dan realisasi sebesar 316 Ekor. (105,33 %)
 - Luas tanam HPT dengan target sebesar 7 Ha dan realisasi sebesar 7 Ha. (100,00 %)
 - Jumlah produksi bibit HPT dengan target sebesar 100.000 Stek dan realisasi sebesar 107.000 Stek. (107,00 %)
2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Domba Sapudi UPT PT dan HMT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 19.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.487.500,00 atau 99,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah bibit domba sapudi yang dipasarkan dengan target sebesar 100 Ekor dan realisasi sebesar 263 Ekor. (263,00 %)

- Jumlah bibit HPT yang dipasarkan dengan target sebesar 37.000 Stek dan realisasi sebesar 52.000 Stek. (140,54 %)
 - Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Jember dengan target sebesar 1.300 Orang dan realisasi sebesar 3.805 Orang. (292,69 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 1.115.414.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.113.210.498,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 42 Orang dan realisasi sebesar 44 Orang. (104,76 %)
 - Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 650 Eksemplar dan realisasi sebesar 676 Eksemplar. (104,00 %)
 - Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 200 Unit dan realisasi sebesar 300 Unit. (150,00 %)

12) Program Pembibitan Ternak Kambing di UPT PT dan HMT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.562.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.539.107.481,00 atau 98,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kambing yang layak bibit (ekor) dengan target 25 Ekor dan realisasi 43 Ekor. (172,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Kambing dan Hijauan Pakan Ternak UPT PT dan HMT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 822.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 813.312.041,00 atau 98,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah populasi kambing yang dipelihara dengan target sebesar 575 Ekor dan realisasi sebesar 528 Ekor. (91,83 %)
 - Jumlah kelahiran kambing dengan target sebesar 200 Ekor dan realisasi sebesar 201 Ekor. (100,50 %)
 - Luas tanam HPT dengan target sebesar 11 Ha dan realisasi sebesar 11 Ha. (100,00 %)
 - Jumlah produksi bibit HPT dengan target sebesar 50.000 Stek dan realisasi sebesar 65.000 Stek. (130,00 %)

- Jumlah susu kambing yang diproduksi dengan target sebesar 2.000 Liter dan realisasi sebesar 1.925 Liter. (96,25 %)
2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Kambing UPT PT dan HMT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.730.000,00 atau 98,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Malang dengan target sebesar 1.000 Orang dan realisasi sebesar 1.703 Orang. (170,30 %)
 - Jumlah bibit kambing yang dipasarkan dengan target sebesar 10 Ekor dan realisasi sebesar 10 Ekor. (100,00 %)
 - Jumlah bibit HPT yang dipasarkan dengan target sebesar 20.000 Stek dan realisasi sebesar 0 Stek. (0,00 %)
 - Jumlah susu kambing yang dipasarkan dengan target sebesar 1.000 Liter dan realisasi sebesar 1.087 Liter. (108,70 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Malang dengan anggaran sebesar Rp. 735.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 721.065.440,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 39 Orang dan realisasi sebesar 41 Orang. (105,13 %)
 - Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 350 Eksemplar dan realisasi sebesar 386 Eksemplar. (110,29 %)
 - Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 260 Unit dan realisasi sebesar 263 Unit. (101,15 %)

13) Program Pembibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu dengan anggaran sebesar Rp. 1.578.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.508.512.933,00 atau 95,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah sapi perah yang layak bibit (ekor) dengan target 20 Ekor dan realisasi 18 Ekor. (90,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak UPT PT dan HMT Batu dengan anggaran sebesar Rp. 783.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 729.653.750,00 atau 93,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah populasi sapi perah yang dipelihara dengan target sebesar 60 Ekor dan realisasi sebesar 60 Ekor. (100,00 %)
 - Jumlah kelahiran sapi perah dengan target sebesar 25 Ekor dan realisasi sebesar 12 Ekor. (48,00 %)
 - Luas tanam HPT dengan target sebesar 8,5 Ha dan realisasi sebesar 8,5 Ha. (100,00 %)
 - Jumlah produksi bibit HPT dengan target sebesar 5.000 Stek dan realisasi sebesar 4.000 Stek. (80,00 %)
 - Jumlah susu sapi perah yang diproduksi dengan target sebesar 108.000 Liter dan realisasi sebesar 67.036 Liter. (62,07 %)
2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Sapi Perah UPT PT dan HMT Batu dengan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.248.500,00 atau 96,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT dan HMT Batu dengan target sebesar 700 Orang dan realisasi sebesar 3.997 Orang. (571,00 %)
 - Jumlah bibit sapi perah yang dipasarkan dengan target sebesar 4 Ekor dan realisasi sebesar 1 Ekor. (25,00 %)
 - Jumlah bibit HPT yang dipasarkan dengan target sebesar 5.000 Stek dan realisasi sebesar 4.000 Stek. (80,00 %)
 - Jumlah susu sapi perah yang dipasarkan dengan target sebesar 108.000 Liter dan realisasi sebesar 38.875 Liter. (35,99 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Batu dengan anggaran sebesar Rp. 746.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 731.610.683,00 atau 97,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)

- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 36 Orang dan realisasi sebesar 34 Orang. (94,44 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 470 Eksemplar dan realisasi sebesar 470 Eksemplar. (100,00 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 200 Unit dan realisasi sebesar 200 Unit. (100,00 %)

14) Program Pembibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.579.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.564.722.813,00 atau 99,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah sapi PO yang layak bibit (ekor) dengan target 10 Ekor dan realisasi 11 Ekor. (110,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Sapi PO dan Hijauan Pakan Ternak UPT PT dan HMT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 770.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 761.664.175,00 atau 98,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah populasi sapi PO yang dipelihara dengan target sebesar 80 Ekor dan realisasi sebesar 90 Ekor. (112,50 %)
 - Jumlah kelahiran sapi PO dengan target sebesar 10 Ekor dan realisasi sebesar 12 Ekor. (120,00 %)
 - Luas tanam HPT dengan target sebesar 3 Ha dan realisasi sebesar 3 Ha. (100,00 %)
 - Jumlah Produksi bibit HPT dengan target sebesar 3 Ton dan realisasi sebesar 3 Ton. (100,00 %)
2. Kegiatan Pelayanan dan Pemasaran Produk Hasil Ternak Sapi PO UPT PT dan HMT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 22.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.380.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah masyarakat yang berkunjung ke UPT PT dan HMT Tuban dengan target sebesar 2.600 Orang dan realisasi sebesar 2.696 Orang. (103,69 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan HMT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 786.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 780.678.638,00 atau 99,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)

- Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 32 Orang dan realisasi sebesar 33 Orang. (103,13 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 850 Eksemplar dan realisasi sebesar 429 Eksemplar. (50,47 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 135 Unit dan realisasi sebesar 135 Unit. (100,00 %)

15) Program Pembibitan Ternak Sapi Madura di UPT PT dan Keswan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.301.490.142,00 atau 94,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah sapi Madura yang layak bibit (ekor) dengan target 12 Ekor dan realisasi 12 Ekor. (100,00 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Produksi Bibit Sapi Madura dan Hijauan Makanan Ternak UPT PT dan Keswan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 602.788.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 589.944.450,00 atau 97,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah populasi sapi madura yang dipelihara dengan target sebesar 95 Ekor dan realisasi sebesar 128 Ekor. (134,74 %)
- Jumlah kelahiran sapi madura dengan target sebesar 15 Ekor dan realisasi sebesar 39 Ekor. (260,00 %)
- Luas tanam HPT dengan target sebesar 1 Ha dan realisasi sebesar 1,5 Ha. (150,00 %)
- Jumlah produksi bibit HPT dengan target sebesar 7.500 Stek dan realisasi sebesar 7.562 Stek. (100,83 %)

2. Kegiatan Surveillance, Pemeriksaan, dan Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan di Wilayah Madura dengan anggaran sebesar Rp. 118.521.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.432.950,00 atau 93,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sampel uji penyakit hewan dengan target sebesar 1.500 Sampel dan realisasi sebesar 1.500 Sampel. (100,00 %)
- Jumlah sampel uji produk hewan dengan target sebesar 30 Sampel dan realisasi sebesar 30 Sampel. (100,00 %)

3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT PT dan Keswan Madura dengan anggaran sebesar Rp. 1.713.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.601.112.742,00 atau 93,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 34 Orang dan realisasi sebesar 32 Orang. (94,12 %)
 - Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 400 Eksemplar dan realisasi sebesar 690 Eksemplar. (172,50 %)
 - Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 10 Unit dan realisasi sebesar 10 Unit. (100,00 %)

16) Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.866.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.704.430.133,00 atau 94,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kelahiran sapi hasil inseminasi buatan (ekor) dengan target 1.200.000 Ekor dan realisasi 1.029.424 Ekor. (85,79 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Pelayanan Inseminasi Buatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.795.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.701.783.373,00 atau 94,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah akseptor IB dengan target sebesar 1.500.000 Ekor dan realisasi sebesar 1.717.433 Ekor. (114,49 %)
 - Jumlah pemeriksaan kualitas semen beku dengan target sebesar 102 Laporan dan realisasi sebesar 198 Laporan. (194,12 %)
2. Kegiatan Bioteknologi Reproduksi dengan anggaran sebesar Rp. 365.076.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 332.140.026,00 atau 90,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah penerapan transfer embrio dengan target sebesar 25 Ekor dan realisasi sebesar 57 Ekor. (228,00 %)
 - Frekuensi penampungan semen ternak SDGH dengan target sebesar 72 Kali dan realisasi sebesar 42 Kali. (58,33 %)

3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT Inseminasi Buatan dengan anggaran sebesar Rp. 705.458.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 670.506.734,00 atau 95,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
 - Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 21 Orang dan realisasi sebesar 17 Orang. (80,95 %)
 - Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 800 Eksemplar dan realisasi sebesar 800 Eksemplar. (100,00 %)
 - Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 206 Unit dan realisasi sebesar 206 Unit. (100,00 %)

17) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.561.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.487.559.806,00 atau 95,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan produk hewan (dokumen) dengan target 13.124 Dokumen dan realisasi 17.430 Dokumen. (132,81 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Surveillance, Pemeriksaan, dan Pengujian Penyakit Hewan di Wilayah Kerja 18 Kab/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 277.056.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 273.713.200,00 atau 98,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sampel uji penyakit hewan dengan target sebesar 12.000 Sampel dan realisasi sebesar 15.204 Sampel. (126,70 %)
2. Kegiatan Surveillance, Pemeriksaan, dan Pengujian Produk Hewan di Wilayah Kerja 18 Kab/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 245.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 243.439.250,00 atau 99,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sampel uji produk hewan dengan target sebesar 1.124 Sampel dan realisasi sebesar 2.226 Sampel. (198,04 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT Laboratorium Keswan Malang dengan anggaran sebesar Rp. 1.038.574.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 970.407.356,00 atau 93,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang. (100,00 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 1.650 Eksemplar dan realisasi sebesar 2.572 Eksemplar. (155,88 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 190 Unit dan realisasi sebesar 190 Unit. (100,00 %)

18) Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Type B Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.613.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.583.833.448,00 atau 98,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah hasil uji sampel penyakit hewan dan produk hewan (dokumen) dengan target 13.700 Dokumen dan realisasi 17.786 Dokumen. (129,82 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Kegiatan Surveillance, Pemeriksaan, dan Pengujian Penyakit Hewan di Wilayah Kerja 16 Kab/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 252.706.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 249.899.273,00 atau 98,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sampel uji penyakit hewan dengan target sebesar 12.000 Sampel dan realisasi sebesar 15.723 Sampel. (131,03 %)
2. Kegiatan Surveillance, Pemeriksaan, dan Pengujian Produk Hewan di Wilayah Kerja 16 Kab/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 202.274.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.637.150,00 atau 98,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sampel uji produk hewan dengan target sebesar 1.700 Sampel dan realisasi sebesar 2.063 Sampel. (121,35 %)
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi UPT Laboratorium Keswan Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.158.419.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.135.297.025,00 atau 98,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan keuangan dengan target sebesar 12 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (100,00 %)

- Jumlah laporan barang daerah dengan target sebesar 4 Laporan dan realisasi sebesar 4 Laporan. (100,00 %)
- Jumlah pegawai yang dikelola dengan target sebesar 30 Orang dan realisasi sebesar 30 Orang. (100,00 %)
- Jumlah surat yang diproses dengan target sebesar 1.050 Eksemplar dan realisasi sebesar 1.583 Eksemplar. (150,76 %)
- Jumlah barang daerah yang dikelola dengan target sebesar 480 Unit dan realisasi sebesar 486 Unit. (101,25 %)

- **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

1. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembiayaan program/kegiatan pembangunan peternakan di Jawa Timur mengingat kontribusi produksi peternakan Jawa timur sangat penting terhadap produksi peternakan Nasional;
2. Sumber daya manusia peternakan Jawa Timur masih didominasi peternak kecil/rumah tangga yang memiliki skala usaha yang kecil dan terbatas;
3. Sumber daya lahan peternakan yang semakin terbatas sehingga menghambat perluasan usaha peternakan.

Solusi :

1. melaksanakan program/kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan capaian kinerja peternakan Jawa Timur;
2. melakukan pembinaan teknis manajerial usaha dan fasilitasi terhadap akses permodalan kepada peternak sehingga mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan perhutani dan TNI dalam usaha memberdayakan lahan tidur milik TNI atau kawasan pinggir hutan sebagai kawasan peternakan baru.

- **Penghargaan Nasional**

- Penghargaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan Predikat nilai Kategori "A" (Memuaskan);



- Perhargaan Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) se-Jawa Timur 2019, dengan inovasi "Inseminasi Buatan Sejuta lebih Anakan Sapi (INTAN SELAKSA)";
- Penghargaan Terbaik IV Atas Prestasi Kinerja Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA dan Penyampaian LPJ Bendahara Kategori Satker Pengelola Pagu Besar Tahun Anggaran 2019 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;



- Penghargaan Peringkat 1 (satu) Tingkat Nasional Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Wilayah Dominan Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian RI;



- Penghargaan Peringkat 1 (satu) Tingkat Nasional Petugas Pemeriksa Kebuntingan Wilayah Dominan IB, Penilaian Kinerja Pelayanan Petugas Teknis Reproduksi Tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian RI (a.n petugas Sidi Kabupaten Pasuruan);



- Penghargaan Peringkat 2 (dua) Tingkat Nasional Petugas Inseminator Wilayah Dominan IB, Penilaian Kinerja Pelayanan Petugas Teknis Reproduksi Tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian RI (a.n petugas Supnandar Kabupaten Bondowoso).



2.3. URUSAN KEHUTANAN

2.3.1. DINAS KEHUTANAN

a. Tujuan

1. Meningkatkan kontribusi subsektor kehutanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kelestarian sumber daya hutan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
optimalnya produksi hasil hutan	Nilai produksi hutan dan penebangan kayu (Rp. X 1.000.000)	7486774.5 Rp	10665756,91 Rp	142,46
meningkatnya luas tutupan hutan	persentase tutupan hutan	36.36 Persen	36,43 Persen	100,19

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Kehutanan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : optimalnya produksi hasil hutan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Nilai produksi hutan dan penebangan kayu (Rp. X 1.000.000) pada tahun 2019 dengan target sebesar 7486774.5 Rp dan terealisasi sebesar 10665756,91 Rp atau 142,46 persen;

Sasaran 2 : meningkatnya luas tutupan hutan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran persentase tutupan hutan pada tahun 2019 dengan target sebesar 36.36 Persen dan terealisasi sebesar 36,43 Persen atau 100,19 persen;
Tutupan hutan di Jawa Timur Tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan. Luas tutupan hutan merupakan luas tutupan kawasan hutan dan areal hutan rakyat. Pada Tahun 2019 luas tutupan hutan sebesar 1.741.559,09 Ha meningkat dibanding Tahun 2018 seluas 1.717.698,63 Ha, sedangkan luas daratan Jawa Timur sebesar 4.779.975 Ha.
Meningkatnya luas tutupan hutan sebagai hasil kegiatan rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan. Rehabilitasi di

dalam kawasan hutan dilaksanakan oleh pengelola kawasan hutan (Perhutani, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan UPTD Dinas Kehutanan Prov. Jatim) sedangkan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilaksanakan oleh masyarakat di lahan yang dibebani hak atas tanah.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.972.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.813.605.342,00 atau 98,01 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Indikator Program indek kepuasan masyarakat/aparatur thd pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.972.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.813.605.342,00 atau 98,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%) dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.080.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.967.793.710,00 atau 94,57 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.146.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.097.679.296,00 atau 95,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 934.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 870.114.414,00 atau 93,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara dengan target sebesar 2 Paket dan realisasi sebesar 2 Paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 784.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 766.199.872,00 atau 97,73 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 69.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.609.615,00 atau 96,54%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 5 Kali dan realisasi sebesar 5 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 715.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 699.590.257,00 atau 97,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal dengan target sebesar 14 Orang dan realisasi sebesar 14 Orang. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 964.764.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 944.262.453,00 atau 97,87 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 497.014.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.841.130,00 atau 97,95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 199.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 198.357.000,00 atau 99,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang disusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 204.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 199.381.371,00 atau 97,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 Paket. (100 %)
 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 64.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.682.952,00 atau 93,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- 5) Program Pemanfaatan Potensi Perbenihan Tanaman Hutan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.667.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.621.780.751,00 atau 97,26 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah bibit tanaman hutan yang bersertifikat dengan target 1.025.000 Bibit dan realisasi 1387650 Bibit. (135,38 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 606.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 583.143.270,00 atau 96,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen sertifikasi perbenihan tanaman hutan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
 2. Inventarisasi Sumber Benih Tanaman Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.061.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.038.637.481,00 atau 97,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen sumber benih tanaman hutan yang diinventarisir dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

6) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan anggaran sebesar Rp. 1.838.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.769.906.295,00 atau 96,25 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah IPHHK yang berizin dengan target 1.148 Industri dan realisasi 1116 Industri. (97,21 %)
- Indikator Program Jumlah kelompok yang memiliki sertifikasi SVLk/PHBML dengan target 67 kelompok dan realisasi 69 kelompok. (102,99 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penatausahaan dan Pengawasan Pungutan Iuran Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 669.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 638.500.075,00 atau 95,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekonsiliasi PSDH dengan target sebesar 3 kali dan realisasi sebesar 3 Kali. (100 %)

2. Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 355.883.510,00 atau 94,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pembinaan pengendalian produksi hasil hutan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

3. Ekolabeling Hutan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 319.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.764.100,00 atau 95,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok yang terfasilitasi VLK/PHBML dengan target sebesar 2 Kelompok dan realisasi sebesar 2 Kelompok. (100 %)

4. Pembinaan dan Pengawasan Industri Hasil Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 470.758.610,00 atau 99,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

7) Program Pemanfaatan Potensi dan Pemantauan Peredaran Hasil Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 2.533.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.501.427.314,00 atau 98,73 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Kayu Beredar di Jawa Timur yang Diukur dengan target 2.012.000 m³ dan realisasi 2383170 m³. (118,45 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pemantauan Peredaran Hasil Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 2.533.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.501.427.314,00 atau 98,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemegang ijin industri yang tertib mengikuti penatausahaan hasil hutan dengan target sebesar 325 unit dan realisasi sebesar 325 unit. (100 %)

- 8) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp. 2.028.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.901.791.400,00 atau 93,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Kelompok Kelas Utama dengan target 3 kelompok dan realisasi 3 kelompok. (100 %)
- Indikator Program Luas rehabilitasi hutan dan lahan yang dimonitoring dengan target 10000 Ha dan realisasi 10000 Ha. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 549.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 546.525.700,00 atau 99,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kelompok yang Meningkatkan Kelas Kelembagaannya dengan target sebesar 5 Kelompok dan realisasi sebesar 5 Kelompok. (100 %)

2. Perhutanan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 545.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 526.066.235,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kelompok yang Memiliki Usaha Produktif dengan target sebesar 3 kelompok dan realisasi sebesar 3 kelompok. (100 %)

3. APP Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.551.450,00 atau 99,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kelompok Penerima Hibah dengan target sebesar 4 kelompok dan realisasi sebesar 4 kelompok. (100 %)

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan anggaran sebesar Rp. 683.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 581.648.015,00 atau 85,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Bibit yang Ditanam di Areal Rehabilitasi dengan target sebesar 3000 bibit dan realisasi sebesar 3000 bibit. (100 %)

9) Program Tata Hutan dan Pemantauan Kawasan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.561.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.537.187.240,00 atau 98,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jenis Data Potensi dan Rencana Kehutanan (jenis) dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis. (100 %)
- Indikator Program Luas tutupan kawasan hutan dan areal hutan rakyat dengan target 1764343 Ha dan realisasi 1741559 Ha. (98,71 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pemantauan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp. 761.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 743.776.840,00 atau 97,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pemantauan kawasan hutan dan pengendalian perubahan iklim dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
2. Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 396.050.400,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pengelolaan kehutanan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 397.360.000,00 atau 99,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen informasi pembangunan kehutanan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

10) Program Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam dengan anggaran sebesar Rp. 1.710.345.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.665.578.340,00 atau 97,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Gangguan Keamanan Hutan dengan target 650 kejadian dan realisasi 154 kejadian. (176 %)
- Indikator Program Luas lahan hutan akibat TMKH dan PPKH dengan target 150 Ha dan realisasi 257 Ha. (171.33 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Perlindungan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 530.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 520.492.260,00 atau 98,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perlindungan hutan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
- 2. Konservasi dan Wisata Alam dengan anggaran sebesar Rp. 760.145.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 739.402.150,00 atau 97,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KKA dan KPA yang mengikuti pembinaan dengan target sebesar 75 Orang dan realisasi sebesar 75 Orang. (100 %)
- 3. Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 419.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 405.683.930,00 atau 96,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Peta Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Hutan yang Dibuat dengan target sebesar 3 Peta dan realisasi sebesar 3 Peta. (100 %)

- 11) Program Pengelolaan Hutan Kewilayahan** dengan anggaran sebesar Rp. 23.080.567.810,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.715.371.778,00 atau 94,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Luas Pengembangan Hutan Rakyat dengan target 3.000 Ha dan realisasi 2914,61 Ha. (97,15 %)

Program tersebut didukung oleh 20 kegiatan.

1. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah I dengan anggaran sebesar Rp. 886.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 853.818.618,00 atau 96,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 60.000 Batang dan realisasi sebesar 60.000 Batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
2. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp. 1.293.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.277.868.089,00 atau 98,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah bibit yang ditanam di lahan milik dengan target sebesar 60.000 batang dan realisasi sebesar 60000 batang. (100 %)
 - jumlah dokumen potensi dan hasil pembangunan kehutanan di wilayah kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

3. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah III dengan anggaran sebesar Rp. 1.321.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.263.250.647,00 atau 95,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah bibit yang ditanam di lahan milik dengan target sebesar 16400 batang dan realisasi sebesar 16400 batang. (100 %)
 - jumlah dokumen potensi dan hasil pembangunan kehutanan di wilayah kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
4. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IV dengan anggaran sebesar Rp. 1.629.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.609.204.971,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 101210 batang dan realisasi sebesar 101210 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
5. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah V dengan anggaran sebesar Rp. 1.720.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.675.606.303,00 atau 97,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 87400 batang dan realisasi sebesar 87400 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
6. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VI dengan anggaran sebesar Rp. 1.518.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.453.118.138,00 atau 95,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 33000 batang dan realisasi sebesar 33000 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
7. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VII dengan anggaran sebesar Rp. 1.484.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.428.154.750,00 atau 96,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 84000 batang dan realisasi sebesar 84000 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
8. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah VIII dengan anggaran sebesar Rp. 1.181.870.810,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.146.298.316,00 atau 96,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 82950 batang dan realisasi sebesar 82950 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
9. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah IX dengan anggaran sebesar Rp. 909.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 888.366.660,00 atau 97,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Bibit yang Ditanam di Lahan Milik dengan target sebesar 70300 batang dan realisasi sebesar 70300 batang. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Potensi dan Hasil Pembangunan Kehutanan di Wilayah Kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
10. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah I dengan anggaran sebesar Rp. 809.664.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 790.087.100,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 174 Ha dan realisasi sebesar 174 Ha. (100 %)
11. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp. 840.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 837.997.930,00 atau 99,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 164 Ha dan realisasi sebesar 164 Ha. (100 %)
12. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah III dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 972.807.900,00 atau 97,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 100 Ha dan realisasi sebesar 100 Ha. (100 %)
13. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IV dengan anggaran sebesar Rp. 1.407.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.248.205.700,00 atau 88,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 262 Ha dan realisasi sebesar 262 Ha. (100 %)
14. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah V dengan anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.473.112.990,00 atau 93,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 33 Ha dan realisasi sebesar 33 Ha. (100 %)
15. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VI dengan anggaran sebesar Rp. 894.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 798.809.350,00 atau 89,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 150 Ha dan realisasi sebesar 150 Ha. (100 %)
16. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VII dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 566.705.240,00 atau 80,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 300 Ha dan realisasi sebesar 300 Ha. (100 %)
17. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah VIII dengan anggaran sebesar Rp. 590.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 454.151.400,00 atau 76,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 44 Ha dan realisasi sebesar 44 Ha. (100 %)
18. Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK) Wilayah IX dengan anggaran sebesar Rp. 415.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 407.152.840,00 atau 98,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 56 Ha dan realisasi sebesar 56 Ha. (100 %)
19. Konservasi dan Usaha Kehutanan Wilayah X dengan anggaran sebesar Rp. 1.035.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 925.013.461,00 atau 89,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah bibit yang ditanam di lahan milik dengan target sebesar 37600 batang dan realisasi sebesar 37600 batang. (100 %)
- jumlah dokumen potensi dan hasil pembangunan kehutanan di wilayah kerja dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

20. Pengelolaan Hutan Rakyat Wilayah X (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.867.607.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.645.641.375,00 atau 88,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan dengan target sebesar 223 Ha dan realisasi sebesar 223 Ha. (100 %)

12) Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo dengan anggaran sebesar Rp. 5.001.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.647.975.683,00 atau 92,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Luas Kawasan Hutan Tahura R Soerjo yang Dikonservasi dengan target 27.838 Ha dan realisasi 27.838 Ha. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Soerjo dengan anggaran sebesar Rp. 3.065.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.989.646.735,00 atau 97,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Sarana dan Prasarana Tahura R Soerjo yang diperbaiki dan dipelihara dengan target sebesar 15 Unit dan realisasi sebesar 15 unit. (100 %)
2. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Soerjo dengan anggaran sebesar Rp. 336.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 295.886.875,00 atau 87,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Intensitas Pencegahan Penanggulangan dan Penanganan Gangguan Keamanan Hutan yang Dilakukan sesuai SOP dengan target sebesar 122 kali dan realisasi sebesar 122 kali. (100 %)
3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.362.442.073,00 atau 85,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah prasarana terbangun dengan target sebesar 19 unit dan realisasi sebesar 19 unit. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi tersebut berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan
- 2) Kegiatan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan sehingga proses pengadaan benih/bibit untuk kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.
- 3) Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal.
- 4) Masih banyak pengolah kayu bulat yang belum memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- 5) Banyak pemegang IUIPHHK dengan kapasitas ijin di bawah 6.000 m³/th yang belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
- 6) Sulitnya memberikan pemahaman kepada petani hutan rakyat terkait kewajiban mendapatkan SVLK/ PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah memiliki SVLK.
- 7) Kelembagaan Forest Managemen Unit (FMU) belum kuat.
- 8) Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/ PHBML masih belum merasakan manfaat langsung atas produk kayu tersebut (kayu yang bersertifikat seharusnya memiliki nilai lebih namun pada kenyataannya sama dengan kayu yang belum bersertifikat).
- 9) Harga kayu di tingkat petani masih rendah, harga optimal masih dikuasai tengkulak/ pedagang lokal.
- 10) Kelompok pengelola hutan rakyat belum seluruhnya memiliki jejaring usaha dalam memasarkan produk kayu.
- 11) Harga patokan sebagai dasar pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan belum menggambarkan kondisi riil harga kayu di petak hutan.
- 12) Jumlah Satuan Pengamanan Hutan dirasa masih minim untuk melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 43 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.
- 13) Potensi gangguan keamanan hutan yang disebabkan faktor alam (kebakaran) sulit diprediksi.
- 14) Tidak adanya kejelasan batas lahan yang dikelola beberapa kelompok Perhutanan Sosial dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung

Solusi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan secara rutin pada masing-masing desa penyangga dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Khusus kepada masyarakat desa penyangga, perlu diberikan stimulan dalam bentuk hibah dan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup.
- 2) Kegiatan reboisasi yang dipengaruhi oleh faktor alam sulit untuk dialihkan ke waktu lainnya sehingga pelaksanaan reboisasi tetap seperti semula
- 3) Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangkau menggunakan teknik reboisasi yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara manual.
- 4) Menyelenggarakan sosialisasi perizinan secara simultan bagi IPHHK yang belum berizin.
- 5) Melakukan pendampingan SVLK industri secara berkelompok.
- 6) Bekerjasama dengan Penyuluh Kehutanan lapangan, Dinas terkait dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya SVLK/ PHBML bagi pengelola hutan rakyat.
- 7) Pentingnya dilakukan kegiatan yang mampu menguatkan kelembagaan FMU seperti pelatihan keterampilan manajerial bagi pengurus FMU agar mampu menjalankan organisasi dan bisnis kelompok. Oleh karena itu, perlu dibentuk koperasi yang bertujuan menyejahterakan anggotanya.
- 8) Mengusulkan di setiap diskusi/FGD/seminar/rapat tingkat pusat/ daerah terkait SVLK, kepada instansi yang membidangi untuk membuat kebijakan penggunaan kayu yang bersertifikat dalam pengadaan barang konstruksi untuk pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah; meningkatkan keterampilan bagi pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan lokal untuk kebutuhan ekspor; memberikan modal bergulir berupa hibah sesuai kebutuhan masyarakat diantaranya pengolahan lahan di bawah tegakan dengan sistem Agroforestry dan proses pengolahannya, alat penggergajian kayu dll.
- 9) Memberikan keterampilan bagi FMU terkait tata cara penaksiran volume, pembacaan tabel volume lokal, tata cara pembagian batang yang benar dan taksiran harga kayu.

- 10) Setiap tahun melakukan temu usaha antara kelompok yang memiliki SLK dengan pelaku usaha baik pelaku usaha hasil hutan kayu maupun non kayu (empon-empon, getah pinus, dsb); membentuk forum komunikasi FMU untuk jejaring usaha.
- 11) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya setiap semester melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan wajib bayar dalam penyusunan harga patokan sebagai dasar pengenaan PSDH/ DR (Provisi Sumber Daya Hutan/ Dana Reboisasi) sebagaimana diamanatkan dalam PP No 12 Tahun 2014.
- 12) Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/ merekrut Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan.
- 13) Perlu dilakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan kebakaran hutan sehingga dapat diantisipasi secara dini kemungkinan kejadian kebakaran hutan. Disamping itu, kerjasama dengan BMKG perlu ditingkatkan.
- 14) Perlu disusun peta kerja pelaksanaan Perhutanan Sosial oleh masing-masing Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi oleh Tim Pokja

e. Penghargaan Nasional

1. juara 2 tingkat nasional lomba wanalestari kategori Kelompok Tani Hutan (KTH)
2. Juara harapan 1 tingkat nasional lomba wanalestari kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.

2.4. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.4.1. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

a. Tujuan

1. Terwujudnya tatakelola kelembagaan yang baik dan terwujudnya pelayanan aparatur yang profesional di sektor ESDM
2. Meningkatnya ketersediaan dan pengusaha energi dan ketenagalistrikan
3. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik guna pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan
4. Terwujudnya pemanfaatan data kegeologian dan pengelolaan air tanah yang berkesinambungan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatkan fungsi dan manfaat sarana dan prasarana secara optimal sebagai penunjang pembangunan sektor ESDM	Persentase sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pembangunan sektor ESDM yang akuntabel	100 %	95 %	95
Terjaminnya pasokan listrik dan energi khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan daerah terpencil	Rasio Elektrifikasi	96 %	99,29 %	103,4
Meningkatnya koordinasi dan ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri serta penyediaan dan/atau fasilitas energi baru terbarukan bagi masyarakat pedesaan dan terpencil	Jumlah pembangkit energi baru terbarukan yang terbangun	452 unit/KK	452 unit/KK	100
Meningkatnya pengusaha pertambangan dan produksi mineral dan batuan serta terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan	Persentase penyelesaian rekomendasi izin pertambangan	80 %	81,6 %	102
	Persentase pemegang izin yang patuh azas lingkungan	100 %	100 %	100
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan laboratorium ESDM	94 %	96,36 %	102,13
Meningkatnya ketersediaan data/informasi geologi	Persentase peningkatan pemenuhan	1,5 %	13,52 %	901

dan air bersih dan air tanah bagi masyarakat secara berkelanjutan	kebutuhan air bersih pada daerah sulit air melalui bantuan sumur bor			
---	--	--	--	--

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan fungsi dan manfaat sarana dan prasarana secara optimal sebagai penunjang pembangunan sektor ESDM, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pembangunan sektor ESDM yang akuntabel pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 95 persen; cukup terpenuhi sarana dan prasarana

Sasaran 2 : Terjaminnya pasokan listrik dan energi khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan daerah terpencil, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Rasio Elektrifikasi pada tahun 2019 dengan target sebesar 96 % dan terealisasi sebesar 99,29 % atau 103,4 persen; RE melebihi target sesuai dengan harapan peningkatan anggaran pada P-APBD

Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi dan ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri serta penyediaan dan/atau fasilitas energi baru terbarukan bagi masyarakat pedesaan dan terpencil, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah pembangkit energi baru terbarukan yang terbangun pada tahun 2019 dengan target sebesar 452 unit/KK dan terealisasi sebesar 452 unit/KK atau 100 persen; Peningkatan target dan capaiannya berbanding lurus peningkatan anggaran pada P-APBD

Sasaran 4 : Meningkatnya usaha pertambangan dan produksi mineral dan batuan serta terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase penyelesaian rekomendasi izin pertambangan pada tahun 2019 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 81,6 % atau 102 persen .

Dari pengajuan permohonan rekomtek sejumlah 837 pemohon telah diselesaikan sebanyak 683 permohonan, sehingga terealisasi sebesar 81,6 %, jadi capaian kinerja mencapai 102 persen.

- Indikator Sasaran Persentase pemegang izin yang patuh azas lingkungan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan laboratorium ESDM pada tahun 2019 dengan target sebesar 94 % dan terealisasi sebesar 96,36 % atau 102,13 persen; Capaian Kinerja melampaui target dikarenakan adanya pelayanan baru dengan nama : UMISARI (Uji Mineral Satu Hari) yaitu hasil uji bisa dikeluarkan dalam tempo satu hari

Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan data/informasi geologi dan air bersih dan air tanah bagi masyarakat secara berkelanjutan , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih pada daerah sulit air melalui bantuan sumur bor pada tahun 2019 dengan target sebesar 1,5 % dan terealisasi sebesar 13,52 % atau 901 persen; Peningkatan realisasi terjadi karena adanya koordinasi bidang Geologi dan air tanah ke Badan Geologi Kementerian ESDM berkaitan dengan bantuan sumur bor di Jawa Timur.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.513.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.374.501.537,00 atau 96,04 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 92 % dan realisasi 97 %. (102,11 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.513.810.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.374.501.537,00 atau 96,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 92 % dan realisasi sebesar 96 %. (104,39 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.474.053.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.306.345.422,00 atau 93,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 96 % dan realisasi 95 %. (99 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.670.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.513.961.570,00 atau 90,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 25 unit dan realisasi sebesar 25 unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 803.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 792.383.852,00 atau 98,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 17 unit dan realisasi sebesar 17 unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.228.021.637,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.557.914,00 atau 79,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 90 % dan realisasi 92 %. (102,22 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 288.350.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 248.814.680,00 atau 86,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 20 kali dan realisasi sebesar 20 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 939.671.437,00 dan terealisasi sebesar Rp. 725.743.234,00 atau 77,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/pendidikan formal dengan target sebesar 12 orang dan realisasi sebesar 12 orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.

1.281.509.363,00 dan terealisasi sebesar Rp. 979.706.845,00 atau 76,45 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 436.013.358,00 dan terealisasi sebesar Rp. 401.740.000,00 atau 92,14%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 224.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.584.927,00 atau 89,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 532.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.543.718,00 atau 57,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 88.446.005,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.838.200,00 atau 82,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

5) Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM dengan anggaran sebesar Rp. 70.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.069.950,00 atau 76,23 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah usulan program/kegiatan pembangunan sektor ESDM dengan target 38 usulan dan realisasi 398 usulan. (1047,37 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM dengan anggaran sebesar Rp. 70.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.069.950,00 atau 76,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah usulan program/kegiatan pembangunan sektor ESDM dengan target sebesar 38 usulan dan realisasi sebesar 398 usulan. (1047 %)

- 6) **Program Pengelolaan Ketenagalistrikan** dengan anggaran sebesar Rp. 14.524.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.442.464.306,00 atau 99,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Peningkatan ketersediaan listrik dengan target 200000 KVA dan realisasi 1363544,8 KVA. (682 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pendataan dan Penyediaan Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 13.010.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.955.702.627,00 atau 99,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rumah tangga berlistrik bagi warga miskin dengan target sebesar 9474 KK dan realisasi sebesar 9474 KK. (100 %)

2. Pengusahaan Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 664.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 654.884.484,00 atau 98,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomtek izin ketenagalistrikan dengan target sebesar 100 rekomtek dan realisasi sebesar 582 rekomtek. (582 %)

3. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 850.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 831.877.195,00 atau 97,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah badan usaha/pemegang izin ketenagalistrikan yang diawasi dengan target sebesar 100 pemegang Izin dan realisasi sebesar 165 pemegang izin. (165 %)

- 7) **Program Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan** dengan anggaran sebesar Rp. 6.722.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.366.262.744,00 atau 79,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Peningkatan penyediaan energi dengan target 452 KK dan realisasi 452 KK. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pendataan dan Pengembangan Energi (Pengembangan infrastruktur energi) dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 578.930.763,00 atau 64,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah data dan informasi energi yang terpublikasikan (target tidak tercapai karena pihak pemenang lelang tidak melaksanakan tugasnya) dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (50 %)
 - 2. Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi dengan anggaran sebesar Rp. 4.972.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.985.326.346,00 atau 80,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dan fasilitas energi dengan target sebesar 452 KK dan realisasi sebesar 452 KK. (100 %)
 - 3. Konservasi Energi dengan anggaran sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 802.005.635,00 atau 94,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi konservasi energi dengan target sebesar 560 orang dan realisasi sebesar 563 orang. (100,5 %)
- 8) Program Pengelolaan Usaha Pertambangan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.053.886.844,00 atau 97,80 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah rekomtek ijin pertambangan dengan target 510 rekomtek dan realisasi 683 rekomtek. (133,92 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Inventarisasi wilayah dan sumber daya minerba dengan anggaran sebesar Rp. 580.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 569.903.370,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi teknis WIUP dengan target sebesar 200 rekomtek dan realisasi sebesar 314 rekomtek. (157 %)
 2. Pengusahaan Pertambangan Mineral dan batubara dengan anggaran sebesar Rp. 979.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 946.057.919,00 atau 96,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomtek izin usaha pertambangan (IUP) dengan target sebesar 310 rekomtek dan realisasi sebesar 369 rekomtek. (119,03 %)
 3. Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan minerba dengan anggaran sebesar Rp. 540.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 537.925.555,00 atau 99,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemegang izin yang membayar reklamasi dengan target sebesar 75 pemegang Izin dan realisasi sebesar 67 pemegang izin. (89,33 %)

9) Program Pengelolaan Kegeologian Dan Air Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.797.682.028,00 atau 87,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah daerah sulit air yang mendapatkan fasilitas pemanfaatan air tanah dengan target 3 desa dan realisasi 2 desa. (66,67 %)
- Indikator Program Jumlah sumur resapan yang terbangun dari pengusaha air tanah dengan target 75 unit dan realisasi 57 unit. (76 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Inventarisasi dan Penyediaan Data kegeologian dan air tanah dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 959.035.889,00 atau 95,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi informasi kegeologian dan air tanah dengan target sebesar 72 orang dan realisasi sebesar 99 orang. (137,50 %)

2. Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.458.966.877,00 atau 81,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomtek SIP, SIPA dan SIPPAT yang diterbitkan dengan target sebesar 900 rekomtek dan realisasi sebesar 1710 rekomtek . (190 %)
- Jumlah daerah sulit air yang terbangun sumur bor air bersih (target tidak tercapai karena P-APBD waktunya singkat dan untuk bantuan sumur di Kabupaten Trenggalek tidak ada peserta yang daftar lelang) dengan target sebesar 3 unit dan realisasi sebesar 2 unit. (66.7 %)

3. Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 379.679.262,00 atau 94,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pemegang SIPA yang terawasi dengan target sebesar 300 izin dan realisasi sebesar 259 izin. (86,33 %)
- Jumlah sumur pantau yang terbangun pada daerah padat pengusaha air tanah dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit. (100 %)

10) Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral dengan anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.885.655.714,00 atau 96,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan layanan laboratorium uji kualitas air dan mineral dengan target 94 % dan realisasi 96 %. (102,13 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 543.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.133.734,00 atau 96,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik dan layak untuk operasional pelayanan dengan target sebesar 37 unit dan realisasi sebesar 37 unit. (100 %)
2. Pelayanan Teknis Laboratorium Kualitas Air dan Mineral dengan anggaran sebesar Rp. 1.205.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.163.724.452,00 atau 96,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium kualitas air dan mineral dengan target sebesar 650 sertifikat dan realisasi sebesar 1077 sertifikat. (165,69 %)
3. Pengembangan Laboratorium Kualitas Air dan Mineral dengan anggaran sebesar Rp. 159.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 155.445.309,00 atau 97,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pengguna jasa layanan pengujian air dan mineral dengan target sebesar 500 pengguna dan realisasi sebesar 752 pengguna. (150,40 %)
4. Operasional UPT Laboratorium dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.352.219,00 atau 98,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sumber daya manusia laboratorium yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target sebesar 4 orang dan realisasi sebesar 4 orang. (100 %)

11) Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Migas dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.232.942,00 atau 98,89 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah laporan hasil pengawasan pertambangan dan Migas dari Inspektur Tambang dan Inspektur Migas dengan target 100 laporan dan realisasi 60 laporan. (60 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pengawasan Usaha Pertambangan dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.232.942,00 atau 98,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah izin usaha pertambangan yang terawasi dengan target sebesar 100 pemegang izin dan realisasi sebesar 60 pemegang izin. (60 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pada program/kegiatan sinkronisasiÂ sektor ESDM pencapaian target sangat tinggi sekali karena penetapan jumlah usulan dari masing-masing Kabupaten/Kota hanya 1 usulan, sementara seluruh kabupaten/kota mengusulkan bantuan lebih dari 3 usulan.
2. Jumlah rekomtek air tanah seharusnya pencapaian target hanya dihitung dari pemohon izin yang baru saja, tidak menghitung pemohon rekom perpanjangan izin sehingga capaian target tidak terlalu tinggi sekali .
3. Kegiatan inspektur tambang yang tercatat dalam target capaian hanya pengawasan izin tambang, sementara dinas luar Inspektur banyak juga memenuhi undangan narasumber dan pemanggilan sebagai saksi ahli dalam kasus pertambangan

Solusi :

1. Pada kegiatan sinkronisasi akan ditingkatkan jumlah target usulan, sehingga lebih proporsional hasilnya
2. Penetapan capaian rekomtek akan disesuaikan dengan permohonan izin baru saja.
3. Laporan meliputi seluruh kegiatankedinasan inspektur tambang.

e. Penghargaan Nasional



Piagam Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi untuk Kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah Daerah Juara Harapan II Tingkat Nasional.

2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.5.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

a. Tujuan

Meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri	1. Persentase pertumbuhan net ekspor non migas	7,00 persen	127,11 persen	1.815,86
Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri	1. Persentase pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah	4,00 persen	-4,47 persen	-111,75
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Persentase pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk	1,00 persen	16,95 persen	1.695
	2. Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar	2,00 persen	3,31 persen	165,5
Meningkatnya kontribusi sektor industri	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	28,94 persen	30,24 persen	4,49

Pada Tahun 2019 kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan net ekspor non migas perdagangan luar negeri, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran 1. Persentase pertumbuhan net ekspor non migas pada tahun 2019 dengan target sebesar 7,00 persen dan terealisasi sebesar 127,11 persen atau 1.815,86 persen;
Angka pertumbuhan ekspor Jawa Timur terlihat sangat tinggi.pada tahun 2018 nilai net ekspor Jawa Timur mencapai USD – 1,61 milyar lalu pada tahun 2019 meningkat sebesar 127,11% sebesar USD – 0,435 milyar
Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya daya saing produk dari Provinsi Jawa Timur

mampu berkontribusi meningkatkan nilai ekspor Jawa Timur. Adanya "*Trade War*" antara Amerika Serikat dan China bukan menjadi hambatan produk lokal untuk masuk di pasar global. Beberapa komoditi dari AS maupun China yang terkena tariff tersebut bisa digantikan oleh produk dari Jawa Timur.

Kedua, Mulai banyaknya produk-produk IKM Jawa Timur yang mulai menembus pasar ekspor turut serta menyumbang kenaikan angka ekspor Jawa Timur. Melalui perdagangan online (*e-commerce*) produk IKM Jawa Timur lebih mudah di dapatkan oleh konsumen dari luar negeri.

Ketiga, neraca pembayaran nasional (*balance of payment*) semakin membaik seiring menguatnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Sasaran 2 : Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran 1. Persentase pertumbuhan net ekspor perdagangan antar daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar 4,00 persen dan terealisasi sebesar -4,47 persen atau -111,75 persen;

Nilai net ekspor perdagangan antar daerah Jawa Timur tahun 2019 sebesar Rp 167,83 triliun mengalami penurunan sebesar 4,47% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 175,68 triliun.

Masih rendahnya pertumbuhan net ekspor antar daerah lebih disebabkan karena penurunan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap produk-produk Jawa Timur mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan pertumbuhan net ekspor antar daerah.

Selain faktor tersebut, perdagangan antar daerah mengalami distorsi akibat perubahan iklim yang cukup ekstrim. Pada awal hingga pertengahan tahun 2019, Jawa Timur mengalami kemarau panjang yang mengakibatkan beberapa komoditi utama perdagangan daerah mengalami penurunan produksi, seperti cabe, bawang putih dan sayuran lain.

Hal tersebut berlanjut pada bulan Oktober 2019, dimana pengiriman barang ke daerah tujuan melalui laut terganggu akibat tingginya gelombang laut yang pasang. Kondisi ini cukup mengganggu kinerja perdagangan antar daerah baik dari maupun ke Jawa Timur.

Sasaran 3 : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, ditetapkan 2 indikator kerja yaitu :

- Indikator Sasaran 1. Persentase pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk pada tahun 2019 dengan target sebesar 1,00 persen dan terealisasi sebesar 16,95 persen atau 1695 persen; Pada tahun 2018 sertifikat mutu komoditi/produk yang telah dikeluarkan sebanyak 6.795 sertifikat sedang pada tahun 2019 telah dikeluarkan sertifikat sebanyak 7.947. Sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 16,95%.

Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya volume pengujian mutu, sampling dan inspeksi dari beberapa komoditi, diantaranya; pupuk, biji kopi dan biji kakao. Selain itu, Laboratorium Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya pada bulan Pebruari 2019 sudah terakreditasi kembali oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sehingga dunia usaha dapat menggunakan kebutuhan jasa kalibrasi sebagai persyaratan untuk proses kepengurusan ijin dan sebagainya.

- Indikator Sasaran 2. Persentase jumlah temuan dalam pengawasan barang beredar pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,00 persen dan terealisasi sebesar 3,31 persen atau 165,5 persen; Selama 2019 dilakukan pengawasan barang beredar sebanyak 1.406.996 unit dengan jumlah temuan sebanyak 46.706 unit. Masih terdapat 3,31% jumlah barang yang belum sesuai dengan ketentuan perundangan, seperti Manual Kartu Garansi (MKG), produk SNI dan label bahasa indonesia. Sehingga peran Perlindungan Konsumen masih perlu ditingkatkan lagi di tengah gencarnya produk-produk impor yang masuk.

Selain itu, situasi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan fasilitasi dalam pengembangan mutu produk seperti Kekayaan Intelektual, merk dan hak cipta bagi pelaku usaha dan pelaku industri.

Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor industri, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran 1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim pada tahun 2019 dengan target sebesar 28,94 persen dan terealisasi sebesar 30,24 persen atau 4,49 persen;

Terdapat beberapa faktor pendukung (*enabling factors*) yang mempengaruhi peningkatan kontribusi sektor industri ini. Pertama, penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur industri seperti pendirian kawasan industri dan akses kawasan industri ke pelabuhan dan bandar udara.

Kedua, iklim perizinan dan regulasi investasi yang sangat memudahkan bagi investor dengan kecepatan pelayanan yang memadai. Hal ini menyebabkan biaya usaha menjadi rendah dan mengurangi resiko usaha.

Ketiga, faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah kesetabilan makro ekonomi, politik dan hukum. Hal ini cukup membuat iklim investasi semakin membaik.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.469.904.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.276.618.348,00 atau 96,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Barang yang diawasi (unit) dengan target 780 unit dan realisasi 944.799 unit. (121.128,08 %)

Program tersebut didukung oleh 15 kegiatan.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 802.951.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 766.521.754,00 atau 95,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)

2. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.370.500,00 atau 99,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan target sebesar 900 Unit dan realisasi sebesar 320.837 unit. (35.648,56 %)
3. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 198.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.709.000,00 atau 98,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dengan target sebesar 250 Orang dan realisasi sebesar 1.675 orang. (670 %)
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan anggaran sebesar Rp. 565.700.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 556.667.074,00 atau 98,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)
5. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan anggaran sebesar Rp. 198.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.519.080,00 atau 98,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan target sebesar 165 unit dan realisasi sebesar 48.570 unit. (219.687,27 %)
6. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan anggaran sebesar Rp. 310.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 303.250.950,00 atau 97,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 3.593 Orang. (1.796,50 %)

7. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan anggaran sebesar Rp. 536.760.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 511.050.212,00 atau 95,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)
8. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan anggaran sebesar Rp. 161.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 153.906.448,00 atau 95,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan target sebesar 160 Unit dan realisasi sebesar 23.442 unit. (14.651,25 %)
9. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan anggaran sebesar Rp. 343.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 327.133.900,00 atau 95,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Jember dengan target sebesar 450 Orang dan realisasi sebesar 450 orang. (100 %)
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 733.234.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 694.873.979,00 atau 94,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)
11. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 136.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 126.834.000,00 atau 92,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan target sebesar 450 Unit dan realisasi sebesar 41.000 unit. (9.115,56 %)
12. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp.

219.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 218.097.500,00 atau 99,45%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Bojonegoro dengan target sebesar 200 Orang dan realisasi sebesar 200 Orang. (100 %)

13. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 787.327.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 773.649.801,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)

14. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 170.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.024.550,00 atau 96,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan target sebesar 251 Unit dan realisasi sebesar 197.016 unit. (78.492,43 %)

15. Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 180.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 167.009.600,00 atau 92,40%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Kediri dengan target sebesar 270 Orang dan realisasi sebesar 1.168 Orang. (432,59 %)

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 9.798.607.938,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.342.125.539,00 atau 95,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Net ekspor perdagangan dalam negeri (trilyun) (*tw3-2019) dengan target 130 trilyun dan realisasi 140,41 trilyun. (108.01 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan.

1. Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar dengan anggaran sebesar Rp. 2.201.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.090.341.478,00 atau 94,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan pokok serta penyediaan informasi pasar dengan target sebesar 116 pasar dan realisasi sebesar 116 pasar. (100 %)
- 2. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang dengan anggaran sebesar Rp. 95.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 90.170.859,00 atau 94,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Sistem Resi Gudang dengan target sebesar 2 Unit dan realisasi sebesar 2 unit. (100 %)
- 3. Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dengan anggaran sebesar Rp. 4.992.758.638,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.838.514.627,00 atau 96,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dengan target sebesar 231 kerjasama dan realisasi sebesar 231 kerjasama. (100 %)
- 4. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 95.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.732.850,00 atau 61,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target sebesar 41 Unit dan realisasi sebesar 41 pasar. (100 %)
- 5. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran dengan anggaran sebesar Rp. 154.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 143.926.940,00 atau 93,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran dengan target sebesar 765 Unit dan realisasi sebesar 765 unit. (100 %)
- 6. Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen dengan anggaran sebesar Rp. 63.132.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.785.200,00 atau 67,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)
- 7. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Melalui Promosi Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 2.196.492.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.077.653.585,00 atau 94,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Melalui Promosi Dalam Negeri dengan target sebesar 60 unit usaha dan realisasi sebesar 60 unit usaha. (100 %)

3) Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor dengan anggaran sebesar Rp. 4.217.478.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.068.540.687,00 atau 96,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Net ekspor nonmigas (milyar US\$) dengan target 6,44 Milyar US\$ dan realisasi 3,57 Milyar US\$. (55,43 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Intensifikasi pelayanan ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 1.944.095.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.823.187.346,00 atau 93,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Intensifikasi pelayanan ekspor dengan target sebesar 158.858 SKA dan realisasi sebesar 158.482 SKA. (99,76 %)

2. Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor dengan anggaran sebesar Rp. 451.868.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 439.366.752,00 atau 97,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pengendalian dan pengawasan produk-produk impor dengan target sebesar 25 Importir dan realisasi sebesar 31 importir. (124 %)

3. Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan anggaran sebesar Rp. 1.821.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.805.986.589,00 atau 99,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan target sebesar 40 Unit Usaha dan realisasi sebesar 37 unit usaha. (92,50 %)

4) Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dengan anggaran sebesar Rp. 10.383.453.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.719.001.442,00 atau 93,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Sertifikasi yang dikeluarkan (sertifikat) dengan target 7.933 sertifikat dan realisasi 7.143 sertifikat. (90,04 %)

Program tersebut didukung oleh 11 kegiatan.

1. Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 3.297.406.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.937.000.000,00 atau 89,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Surabaya dengan target sebesar 2 komoditi dan realisasi sebesar 2 komoditi. (100 %)
- 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.577.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.876.487.535,00 atau 95,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Surabaya dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)
- 3. Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 109.130.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.062.710,00 atau 88,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Surabaya dengan target sebesar 126 sertifikat dan realisasi sebesar 65 sertifikat. (51,59 %)
- 4. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 256.457.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 245.673.907,00 atau 95,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Surabaya dengan target sebesar 4.088 sertifikat dan realisasi sebesar 3.541 sertifikat. (86,62 %)
- 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 1.774.846.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.731.818.073,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT PSMB-LT Jember dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 %. (100 %)
- 6. Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 263.517.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 253.878.581,00 atau 96,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Jaminan Mutu di UPT PSMB-LT Jember dengan target sebesar 55 sertifikat dan realisasi sebesar 49 sertifikat. (89,09 %)
- 7. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 213.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 211.232.000,00 atau 98,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di UPT PSMB-LT Jember dengan target sebesar 3.590 sertifikat dan realisasi sebesar 3.488 sertifikat. (97,16 %)

8. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 166.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.566.836,00 atau 99,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Jember dengan target sebesar 759 orang dan realisasi sebesar 1.294 orang. (170,49 %)
 9. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 187.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 163.644.402,00 atau 87,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penumbuhan dan penguatan kelembagaan di UPT BPSMB LT Surabaya dengan target sebesar 50 orang dan realisasi sebesar 50 orang. (100 %)
 10. Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.062.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 970.751.589,00 atau 91,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Surabaya dengan target sebesar 2 dan realisasi sebesar 2 . (100 %)
 11. Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 1.083.940.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.067.885.809,00 atau 98,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penerapan Inovasi Teknis di UPT PSMB-LT Jember dengan target sebesar 2 komoditi dan realisasi sebesar 1 komoditi. (50 %)
- 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 5.647.621.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.380.690.341,00 atau 95,27 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 95 %. (95 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.647.621.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.380.690.341,00 atau 95,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 95 % dan realisasi sebesar 97,89 . (103,5 %)

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 7.246.204.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.809.921.083,00 atau 93,98 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 4.113.478.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.936.055.835,00 atau 95,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 20 Paket/Unit dan realisasi sebesar 20 . (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.132.726.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.873.865.248,00 atau 91,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 20 Paket/Unit dan realisasi sebesar 20 . (100 %)

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 915.966.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 831.890.496,00 atau 90,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 915.966.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 831.890.496,00 atau 90,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 25 Orang dan realisasi sebesar 25 . (100 %)

8) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.744.704.162,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.625.694.615,00 atau 93,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 95 %. (95 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 655.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 610.173.444,00 atau 93,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 . (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 594.889.162,00 dan terealisasi sebesar Rp. 543.446.771,00 atau 91,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 . (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 313.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.018.600,00 atau 95,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 3 Paket dan realisasi sebesar 3 . (100 %)
 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 180.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 173.055.800,00 atau 95,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 12 Dokumen dan realisasi sebesar 1 . (100 %)
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri** dengan anggaran sebesar Rp. 17.885.422.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.180.996.649,00 atau 96,06 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Jasa pelayanan teknis dengan target 1.572 pelayanan dan realisasi 6.066 pelayanan. (385,88 %)
- Program tersebut didukung oleh 16 kegiatan.
1. Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 2.421.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.377.482.170,00 atau 98,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis dengan target sebesar 10 paket dan realisasi sebesar 10 paket. (100 %)
 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan anggaran sebesar Rp. 2.581.624.400,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 2.375.569.774,00 atau 92,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 . (100 %)
3. Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan anggaran sebesar Rp. 204.945.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 202.524.182,00 atau 98,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Teknis pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan target sebesar 780 jasa dan realisasi sebesar 725 . (92,95 %)
4. Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan anggaran sebesar Rp. 176.845.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 175.048.200,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan industri pada UPT Aneka Industri dan Kerajinan dengan target sebesar 110 Pelaku industri dan realisasi sebesar __. (__ %)
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan anggaran sebesar Rp. 1.877.942.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.832.028.439,00 atau 97,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 . (100 %)
6. Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan anggaran sebesar Rp. 381.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 374.705.082,00 atau 98,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Teknis pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan target sebesar 780 Jasa dan realisasi sebesar 2.026 . (259,74 %)
7. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan anggaran sebesar Rp. 2.392.457.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.311.397.783,00 atau 96,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan target sebesar 92 % dan realisasi sebesar 95 . (102,79 %)
8. Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan anggaran sebesar Rp. 257.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 248.769.000,00 atau 96,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pelayanan Teknis pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan target sebesar 1.190 Jasa dan realisasi sebesar 1.515 . (127,31 %)

9. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.772.130.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.661.734.002,00 atau 96,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Logam dan Perekayasaan dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 . (100 %)
10. Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan dengan anggaran sebesar Rp. 474.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 466.432.194,00 atau 98,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Teknis pada UPTI Logam dan Perekayasaan dengan target sebesar 416 Jasa dan realisasi sebesar 1.074 . (258,17 %)
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan anggaran sebesar Rp. 2.406.688.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.287.904.144,00 atau 95,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan target sebesar 82 dan realisasi sebesar 82 . (100 %)
12. Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan anggaran sebesar Rp. 246.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 230.898.122,00 atau 93,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Teknis pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan target sebesar 870 Jasa dan realisasi sebesar 726 . (83,45 %)
13. Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan anggaran sebesar Rp. 225.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 215.078.385,00 atau 95,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan industri pada UPTI Makanan, Minuman, dan Kemasan dengan target sebesar 140 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 160 . (114,29 %)
14. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan anggaran sebesar Rp. 493.636.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 489.616.514,00 atau 99,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kayu dan Produk Kayu dengan target sebesar 125 dan realisasi sebesar 125 . (100 %)

15. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan anggaran sebesar Rp. 428.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 416.772.150,00 atau 97,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Kulit dan Produk Kulit dengan target sebesar 180 dan realisasi sebesar 160 . (88,89 %)

16. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan dengan anggaran sebesar Rp. 544.038.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 515.036.508,00 atau 94,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi IKM Pada UPTI Logam dan Perakayasaan dengan target sebesar 240 dan realisasi sebesar 319 . (132,92 %)

10) Program Peningkatan Standarisasi Industri dengan anggaran sebesar Rp. 5.341.417.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.137.966.106,00 atau 96,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program prosentase IKM yang telah menerapkan standarisasi dan HKI dengan target 8,25 persen dan realisasi 6,30 persen. (76,36 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 898.947.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.773.222,00 atau 96,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya dengan target sebesar 82 % dan realisasi sebesar 82 . (100 %)

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan anggaran sebesar Rp. 888.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 857.465.179,00 atau 96,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan target sebesar 82 dan realisasi sebesar 82 . (100 %)

3. Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi

Kreatif Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.312.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.812.447,00 atau 99,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya dengan target sebesar 600 dan realisasi sebesar 684 . (114 %)

4. Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya dengan anggaran sebesar Rp. 907.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 854.120.808,00 atau 94,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya dengan target sebesar 295 dan realisasi sebesar 801 . (271,53 %)

5. Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan anggaran sebesar Rp. 889.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 879.625.850,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan target sebesar 733 dan realisasi sebesar 1.558 . (212,55 %)

6. Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan anggaran sebesar Rp. 444.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 374.168.600,00 atau 84,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan Pelatihan Desain Produk Industri dan Teknologi Kreatif pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Malang dengan target sebesar 270 dan realisasi sebesar 510 . (188,89 %)

11) Program pengembangan industri agro dengan anggaran sebesar Rp. 4.549.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.256.733.307,00 atau 93,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program PDRB industri agro (Milyar Rupiah) dengan target 325,644 Trilyun Rupiah dan realisasi - Trilyun Rupiah. (- %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan.

1. Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan dengan anggaran sebesar Rp. 245.362.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.310.336,00 atau 95,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Pelaku Industri di Kawasan Agropolitan dengan target sebesar 140 IKM dan realisasi sebesar 140 . (100 %)
2. Pemetaan industri hasil tembakau dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.000.000,00 atau 98,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemetaan industri hasil tembakau dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
3. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret dengan anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 439.056.500,00 atau 92,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret dengan target sebesar 52 sertifikat dan realisasi sebesar 52 sertifikat. (100 %)
4. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 440.682.484,00 atau 92,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat dengan target sebesar 390 orang dan realisasi sebesar 430 orang. (110,26 %)
5. Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 705.016.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 660.188.767,00 atau 93,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan dengan target sebesar 280 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 253 Pelaku Industri. (90,36 %)
6. Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro dengan anggaran sebesar Rp. 139.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.906.440,00 atau 86,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri Agro dengan target sebesar 4 Kelompok Masyarakat dan realisasi sebesar 4 Kelompok. (100 %)
7. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dengan anggaran sebesar Rp. 1.675.166.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.562.727.661,00 atau 93,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar dengan target sebesar 363 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 380 Pelaku Industri. (104,68 %)
8. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 785.135.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 748.861.119,00 atau 95,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan dengan target sebesar 295 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 282 Pelaku Industri. (95,59 %)

12) Program pengembangan industri non agro dengan anggaran sebesar Rp. 2.724.442.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.623.041.353,00 atau 96,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program PDRB industri non agro (Milyar Rupiah) dengan target 209,822 Trilyun Rupiah dan realisasi - Trilyun Rupiah. (- %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan :

1. Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi dengan anggaran sebesar Rp. 435.902.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 424.759.040,00 atau 97,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi dengan target sebesar 280 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 223 . (79,64 %)
2. Anti-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro dengan anggaran sebesar Rp. 266.320.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 241.370.300,00 atau 90,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Anty-Poverty Program (APP) Bidang Industri non-Agro dengan target sebesar 100 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 80 Pelaku Industri. (80 %)

3. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dengan anggaran sebesar Rp. 1.285.392.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.257.067.615,00 atau 97,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dengan target sebesar 244 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 257 Pelaku Industri. (105,33 %)
4. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Elektronika dan Telematika dengan anggaran sebesar Rp. 736.827.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 699.844.398,00 atau 94,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Industri Elektronika dan Telematika dengan target sebesar 255 Pelaku Industri dan realisasi sebesar 125 Pelaku Industri. (49,02 %)

13) Program Penataan Struktur Industri dan Pengembangan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.725.781.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.243.796,00 atau 95,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan target 16 draft rancangan kebijakan dan realisasi 16 draft rancangan kebijakan. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Penataan Struktur Industri dengan anggaran sebesar Rp. 923.995.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 888.635.785,00 atau 96,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penataan Struktur Industri dengan target sebesar 2.223 dan realisasi sebesar 2.223 . (100 %)
2. Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 352.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 336.520.450,00 atau 95,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri dengan target sebesar 3 Kebijakan dan realisasi sebesar 3 Kebijakan. (100 %)
3. Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 222.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 209.431.497,00 atau 94,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Wilayah untuk Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan target sebesar 10 dan realisasi sebesar 7 . (94,19 %)
- 4. Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 860.356.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 816.580.699,00 atau 94,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 5. Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 366.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 349.075.365,00 atau 95,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Perdagangan dengan target sebesar 2 kebijakan dan realisasi sebesar 2 kebijakan. (100 %).

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Produktifitas dan daya saing Industri yang masih rendah
- Masih tingginya penggunaan bahan baku impor
- Sektor industri yang hanya kuat di hilirnya tetapi hulunya masih sangat lemah
- Masih tingginya biaya distribusi dan logistik
- Daya saing produk yang masih rendah
- Sebagian produk ekspor masih berbentuk raw material
- Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga

Solusi :

- Program link and match antara industri besar dengan IKM perlu ditingkatkan
- Peningkatan kualitas bahan baku terutama bahan baku yang tersedia di dalam negeri (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas)
- Pengembangan standarisasi industri
- Substitusi bahan baku impor
- Peningkatan kapasitas teknologi bagi IKM melalui pelayanan UPT industri.
- Penciptaan kelembagaan skema keterkaitan (linkage) hulu-hilir industri di Jawa Timur, yaitu hilirisasi industri yang melibatkan semua stakeholder yang ada
- Pemanfaatan KPD sebagai market intelegent

- Peningkatan kerjasama perdagangan dan pengembangan Promosi
- Pemanfaatan hasil kerjasama internasional
- Peningkatan standarisasi bagi produk produk potensi ekspor
- Pengembangan pasar melalui penajakan kerjasama dengan pasar non tradisional dan promosi
- Pemanfaatan FTA Center
- Peningkatan pengawasan barang beredar di masyarakat
- Pengembangan sarana pengujian mutu barang, sumber daya dan kemampuan (SDM).

e. Penghargaan Nasional



Penghargaan Zona Integritas pada UPT Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember dengan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) di tahun 2019.

3. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

a. Tujuan

Meningkatkan rekomendasi dan kebijakan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa di Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa di Provinsi Jawa Timur	prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan dan otonomi daerah	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan pemerintahan desa di Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran prosentase rumusan rekomendasi dan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang Pemerintahan dan otonomi daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; tercapainya realisasi rumusan rekomendasi dan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah disebabkan proses perumusan kebijakan Biro Adm. Pemerintahan dan Otda dilakukan melalui sistem informasi elektronik untuk mempercepat penerbitannya.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1,302,849,400.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,262,536,150.00 atau 96,93 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1,302,849,400.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,262,536,150.00 atau 96,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 314,700,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 314,023,700.00 atau 99,78 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 257,700,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 257,073,700.00 atau 99,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 4 paket dan realisasi sebesar 4 paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 57,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 56,950,000.00 atau 99,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 20 paket dan realisasi sebesar 20 paket. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 659,140,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 641,582,364.00 atau 97,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 519,140,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 513,275,977.00 atau 98,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 25 kali dan realisasi sebesar 25 kali. (100 %)
- 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 140,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 128,306,387.00 atau 91,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 40,925,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 28,185,000.00 atau 68,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 11,560,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 10,610,000.00 atau 91,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 15,410,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 10,600,000.00 atau 68,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 8,220,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,200,000.00 atau 75,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 5,735,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 775,000.00 atau 13,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

5) Program Penataan dan Penyempurnaan Kelembagaan Demokrasi serta Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6,194,388,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 6,090,241,251.00 atau 98,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Otonomi Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Keanggotaan DPRD di Provinsi Jawa Timur dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1,250,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,198,877,100.00 atau 95,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota dengan target sebesar 100 % telaah atas berkas penga dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Monitoring Dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 917,388,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 892,839,710.00 atau 97,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Monitoring Dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kab/Kota dengan target sebesar 19 laporan fasilitasi penyelen dan realisasi sebesar 19 laporan. (100 %)
- jumlah ijin cuti kampanye kada/wakada, ijin cuti keluar negeri dengan alasan penting (ibadah,sakit, keperluan keluarga) dengan target sebesar 20 dokumen dan realisasi sebesar 20 dokumen. (100 %)

3. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 4,027,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 3,998,524,441.00 atau 99,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peringatan hari otoda dan hari jadi prov. Jatim dengan target sebesar 3 kegiatan dan realisasi sebesar 3 kegiatan. (100 %)
- Jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan pengembangan otonomi daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

6) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 2,364,800,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,281,368,368.00 atau 96,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase rumusan Rekomendasi dan Kebijakan layanan Administrasi pemerintahan desa yang dihasilkan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Sinkronisasi Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 298,817,600.00 atau 99,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah fasilitasi pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa pemerintah desa dengan target sebesar 15 kegiatan dan realisasi sebesar 15 kegiatan. (100 %)

2. Pembinaan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 293,017,248.00 atau 97,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah fasilitasi pembinaan penataan dan administrasi pemerintahan desa dengan target sebesar 15 kegiatan dan realisasi sebesar 15 kegiatan. (100 %)

3. Pembinaan Penataan Pendapatan dan Kekayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1,764,800,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,689,533,520.00 atau 95,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas apartur pemdes dengan target sebesar 15 kegiatan dan realisasi sebesar 15 kegiatan. (100 %)

7) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan anggaran sebesar Rp. 11,789,688,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 10,716,220,954.00 atau 90,90 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yg baik yang dihasilkan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 4,891,633,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 4,814,611,700.00 atau 98,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan peningkatan tugas umum pemerintahan yang dihasilkan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Pembinaan Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 767,705,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 734,048,595.00 atau 95,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- jumlah rumusan kebijakan atau kebijakan pembinaan kecamatan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
3. Pelayanan Administrasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 463,335,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 406,498,645.00 atau 87,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan penataan wilayah dan pertanahan di jatim dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
4. Penyelenggaraan MPU dan APPSI dengan anggaran sebesar Rp. 3,978,208,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 3,139,493,084.00 atau 78,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah laporan kegiatan MPU dan APPSI dengan target sebesar 10 laporan dan realisasi sebesar 10 laporan. (100 %)
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan anggaran sebesar Rp. 1,180,657,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,128,549,551.00 atau 95,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- jumlah fasilitasi penyusunan LPPD Kab/kota di jatim dengan target sebesar 8 kegiatan dan realisasi sebesar 8 kegiatan. (100 %)
 - jumlah IPPD Prov. Jatim dengan target sebesar 1 LPPD dan realisasi sebesar 1 LPPD. (100 %)
6. Penataan Batas Antar Daerah dan Penyusunan Toponimi/Rupabumi Data Administrasi Wilayah Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 508,150,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 493,019,379.00 atau 97,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- jumlah fasilitasi penyelesaian batas daerah di jatim dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)

- Jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan batas daerah, penamaan rupabumi/toponimi/kode data wilayah di Jatim dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum optimalnya langkah-langkah pemerintah daerah dan pemohon dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Proyek strategis Nasional PSN untuk pembangunan kepentingan umum;
- Belum optimalnya rekomendasi kebijakan terkait pemerintahan dan otonomi daerah yang ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota
- Belum adanya penyamanan persepsi pemerintahan Kab/Kota dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Regulasi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Ijin Kepala daerah dan DPRD belum dilaksanakan secara optimal oleh aparatur pemda Kabupaten/Kota;
- Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang tidak cepat mengusulkan pengganti kepala daerahnya yang terkena kasus hukum;
- Terkait usulan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum skala kecil dibawah 5 hektar yang seharusnya tidak perlu ada penetapan lokasi untuk efisiensi , namun dalam pelaksanaannya, masih dimintakan penetapan lokasi kepada Gubernur.

Solusi :

- Perlunya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemohon dalam mendukung percepatan PSN yang sudah Permendagri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam merumuskan kebijakan terkait pemerintahan dan otonomi daerah;
- Meningkatkan sosialisasi terkait regulasi pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui bimtek dan rapat secara berkala;
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk pro aktif segera menyampaikan usulan pengganti kepala daerah yang berkasus hukum.

- Perlu adanya aturan yang menegaskan pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk percepatan penerbitan penetapan lokasi.
- e. Penghargaan Nasional
- Peringkat pertama se Nasional atas hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 berdasarkan Kepmendagri No. 118 - 8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017.

3.2. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kesejahteraan Sosial melalui kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
	Presentase Kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti	100 %	98,35 %	98,35
	Presentase kebijakan di bidang tenagakerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
	Presentase kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
	Presentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti	100 %	99,12 %	99,12

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial , ditetapkan 5 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Presentase Kebijakan di bidang mental kerohanian yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Pencapaian ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan perumusan kebijakan

- Indikator Sasaran Presentase Kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 98,35 % atau 98,35 persen;

Berbagai kebijakan perlu diambil untuk mengatasi isu strategis terkait pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sehingga diharapkan adanya peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan prestasi anak-anak. Selain itu juga untuk meningkatkan Produktivitas dan Kewirausahaan pemuda yang mandiri serta meningkatkan prestasi olahraga sekaligus meningkatkan usia harapan hidup serta fasilitas keolahragaan. Kemudian menggunakan potensi dan kreatifitas pemuda Jawa Timur sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan pariwisata yang ada.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata dapat diamati dari persentase kebijakan yang ditindaklanjuti.

Belum mencapai target 100 % karena masih belum maksimal dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan rumusan kebijakan yang di hasilkan.

- Indikator Sasaran Presentase kebijakan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen; Keberhasilan dalam pencapaian kinerja di bidang tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diamati dari persentase kebijakan yang ditindaklanjuti walaupun belum memenuhi target 100%, yang disebabkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam perumusan kebijakan belum maksimal
- Indikator Sasaran Presentase kebijakan di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja di bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diamati dari persentase kebijakan yang ditindaklanjuti. Belum mencapai target 100% namun beberapa kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan rumusan kebijakan walau belum maksimal.

- Indikator Sasaran Presentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 99,12 % atau 99,12 persen;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pemberian bantuan Hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk melaksanakan program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial, dilaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi lembaga sosial kemasyarakatan, serta kegiatan sosialisasi.

Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka tertib pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah bagi penerima bantuan Hibah. Selain pelaksanaan verifikasi/survei lembaga, Biro Administrasi Kemasyarakatan perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi bantuan Hibah kepada calon penerima bantuan Hibah di Jawa Timur agar bisa memahami tatacara pengajuan, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, pemanfaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam pencapaian persentase rekomendasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti mencapai target sebesar 99,12 % , walau belum mencapai target 100% Pencapaian ini telah menghasilkan rumusan kebijakan.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.011.175.795,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.951.472.649,00 atau 98,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Index kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 98,02 %. (98,02 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.011.175.795,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.951.472.649,00 atau 98,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 98,02 %. (98,02 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.991.420.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.861.132.999,00 atau 93,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 93,46 %. (93,46 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.895.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.210.170.739,00 atau 91,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase Penyediaan Peralatan Sarana dan prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 91,20 %. (91,20 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 664.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 650.962.260,00 atau 97,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Peralatan dan perlengkapan Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 12 paket dan realisasi sebesar 12 paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 577.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.213.580,00 atau 76,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 76,35 %. (76,35 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 153.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 143.491.480,00 atau 93,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi Kelembagaan dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 424.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 297.722.100,00 atau 70,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan SDM dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 146.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.696.000,00 atau 59,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 59,32 %. (59,32 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.867.500,00 atau 24,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah diselesaikan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.820.000,00 atau 9,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 89.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.543.500,00 atau 85,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update data base perangkat daerah dengan target sebesar 6 paket dan realisasi sebesar 6 paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 16.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.465.000,00 atau 20,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

5) Program Layanan Administrasi Bidang Mental dan Kerohanian dengan anggaran sebesar Rp. 8.227.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.885.110.384,00 atau 95,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase rumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Mental Kerohanian dengan target 100 % dan realisasi 95,87 %. (95,87 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Peningkatan Kualitas Guru Madin dengan anggaran sebesar Rp. 510.057.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 493.288.800,00 atau 96,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah kualifikasi guru madin dengan target sebesar 1150 mahasiswa dan realisasi sebesar 1150 mahasiswa. (100 %)

2. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.565.887.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.413.622.474,00 atau 94,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 94,16 %. (94,16 %)

3. Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian dengan anggaran sebesar Rp. 5.151.535.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.978.199.110,00 atau 96,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi di bidang kerohanian dengan target sebesar 12 rekomendasi dan realisasi sebesar 12 rekomendasi. (100 %)

6) Program layanan administrasi bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 8.513.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.287.244.986,00 atau 97,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan target 100 % dan realisasi 97,35 %. (97,35 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.583.998.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.537.485.460,00 atau 98,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase rumusan kebijakan di bidang Pendidikan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 98,20 %. (98,20 %)

2. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 4.478.696.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.405.473.436,00 atau 98,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga dengan target sebesar 12 rumusan dan realisasi sebesar 12 rumusan. (100 %)

3. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.004.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 960.075.970,00 atau 95,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan dengan target sebesar 12 rumusan dan realisasi sebesar 12 rumusan. (100 %)

4. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 446.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 384.210.120,00 atau 86,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata dengan target sebesar 12 rumusan dan realisasi sebesar 12 rumusan. (100 %)

7) Program layanan administrasi Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 13.152.443.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.855.365.004,00 atau 97,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan target 100 % dan realisasi 97,74 %. (97,74 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penanganan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 6.812.317.550,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.711.874.604,00 atau 98,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase rumusan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 98,53 %. (98,53 %)

2. Penanganan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 342.755.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 320.153.980,00 atau 93,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi di Bidang Transmigrasi dengan target sebesar 4 rekomendasi dan realisasi sebesar 4 rekomendasi. (100 %)

3. Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 5.997.371.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.823.336.420,00 atau 97,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target sebesar 12 rumusan dan realisasi sebesar 12 rumusan. (100 %)

- 8) Program layanan administrasi bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana** dengan anggaran sebesar Rp. 4.121.285.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.515.719.751,00 atau 98,31 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan target 100 % dan realisasi 98,31 %. (98,31 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 3.256.485.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.691.222.867,00 atau 82,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Surat Edaran dan SK Gubernur dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- 2. Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 402.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 382.928.000,00 atau 95,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi di Bidang Penanganan Bencana dengan target sebesar 12 rekomendasi dan realisasi sebesar 12 rekomendasi. (100 %)
- 3. Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 462.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.568.884,00 atau 95,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rumusan kebijakan di bidang Kesehatan dengan target sebesar 12 rumusan dan realisasi sebesar 12 rumusan. (100 %)

9) Program dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 12.512.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.027.588.659,00 atau 99,12 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Presentase pelaksanaan layanan administrasi bantuan hibah dan bantuan sosial dengan target 100 % dan realisasi 99,12 %. (99,12 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.512.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.027.588.659,00 atau 96,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Presentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada Lembaga Sosial Kemasyarakatan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 96,12 %. (96,12 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Adanya disparitas atau kesenjangan pendapatan buruh antara daerah yang berdekatan wilayahnya. Hal ini terkait dengan perbandingan upah minimum regional kabupaten/kota yang terpaut jauh, meskipun jarak antar wilayahnya berdekatan, sehingga bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat, karena harga kebutuhan pokok yang relatif mirip, tetapi dilain

pihak ada perbedaan yang cukup signifikan dari segi pemasukan para pekerja.

Permasalahan ini timbul karena belum adanya kebijakan yang mempertimbangkan tentang disparitas pendapatan pekerja antar wilayah di Jawa Timur.

2. Di beberapa daerah di Jawa Timur, masih marak budaya pernikahan dini dan budaya mementingkan ilmu agama (mondok di pesantren konvensional) daripada belajar akademis atau ketrampilan. Selain itu kualitas dari tenaga pengajar di lingkungan Madrasah Diniyah masih sangat terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar 9 tahun yang masih rendah di wilayah tersebut.

Permasalahan ini timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat dan kebijakan di Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pernikahan dini dan kurangnya kualitas guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Selain itu juga diperlukan adanya kebijakan tentang pendidikan vokasional di Jawa Timur, termasuk juga pendidikan vokasional di pondok pesantren, agar pendidikan yang ada tidak hanya menitikberatkan pada salah satu aspek akademis atau agamis, tetapi juga menyeluruh hingga kepada ketrampilan yang layak guna di masyarakat.

3. Potensi dan Peran Pemuda di Jawa Timur yang kurang dioptimalkan untuk membangun pariwisata, menjaga kebudayaan dan menjadi GenRe (Generasi Berencana). Padahal seharusnya generasi milenial memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai program di Jawa Timur, karena kemudahan mereka dalam mengakses dan juga menyebarkan berbagai informasi melalui media sosial.

Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan belum adanya kebijakan yang bisa menggerakkan pemuda Jawa Timur agar turut berperan dalam pembangunan pariwisata, menjaga kebudayaan, berwawasan global, responsif gender dan menjadi Generasi Berencana.

4. Masih adanya kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berpenghasilan mampu dan berpenghasilan kurang, terutama di daerah perkotaan. Disparitas yang terjadi di perkotaan bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Permasalahan ini terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan di masyarakat yang seharusnya bisa diminimalkan dengan kebijakan ataupun kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. Angka balita yang mengalami gizi buruk dan balita stunting di Jawa Timur secara global telah mengalami penurunan, akan tetapi masih terdapat kantung-kantung permasalahan terkait stunting dan gizi buruk yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Permasalahan ini disebabkan karena belum adanya kebijakan khusus yang seharusnya diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan kepada ibu hamil dan menyusui terkait bahaya stunting dan gizi buruk.

6. Jawa Timur merupakan salah satu daerah rawan bencana karena kontur geografis nya yang memiliki banyak pegunungan dan beberapa kepulauan berpotensi menimbulkan gempa, tanah longsor, banjir hingga tsunami. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang mitigasi bencana yang diperlukan.

Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya kebijakan yang mengatur tentang upaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal tersebut dalam rangka meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.

Solusi :

Beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial memburuk namun sebagai pendorong kinerja untuk lebih baik lagi dalam mencapai target kinerja kedepannya. Keberhasilan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tidak dicapai dengan mudah namun diperlukan kerja sama tim dan kerja keras dalam menjalankan tugasnya selain itu beberapa faktor pendorong keberhasilan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Perencanaan yang baik oleh pimpinan
 2. Kerjasama yang baik di lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya
 4. Tersedianya sarana dan prasarana di Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial
- Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain adalah :
- a) Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas ;

- b) Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
- c) Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial ;
- d) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Tehnis.

e. Penghargaan Nasional

-

3.3. BIRO HUKUM

a. Tujuan

1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
2. Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang taat hukum.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Hukum Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Predikat evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah.	A	A	100
2. Terwujudnya Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum.	1. Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum	85 %	100 %	118
	2. Persentase Produk Hukum Kabupaten /Kota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum.	85 %	100 %	118
3. Meningkatnya Informasi di Bidang Hukum.	Persentase Informasi di Bidang Hukum yang tersampaikan kepada Masyarakat.	85 %	100 %	118
4. Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur.	Persentase Masalah Hukum dan HAM di Jawa Timur yang diselesaikan	85 %	100 %	118

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Hukum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Predikat evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah. pada tahun 2019 dengan target sebesar A dan terealisasi sebesar A atau 100 persen;

- Sasaran 2 :** Terwujudnya Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum., ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:
- Indikator Sasaran 1. Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 118 persen;
 - Indikator Sasaran 2. Persentase Produk Hukum Kabupaten /Kota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum. pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 118 persen;

- Sasaran 3 :** Meningkatnya Informasi di Bidang Hukum., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:
- Indikator Sasaran Persentase Informasi di Bidang Hukum yang tersampaikan kepada Masyarakat. pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 118 persen;

- Sasaran 4 :** Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:
- Indikator Sasaran Persentase Masalah Hukum dan HAM di Jawa Timur yang diselesaikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 118 persen;

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 652.190.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 603.347.600,00 atau 92,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 652.190.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 603.347.600,00 atau 92,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 546.445.625,00 dan terealisasi sebesar Rp. 529.267.500,00 atau 96,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 493.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 476.402.500,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 52.920.625,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.865.000,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 58 Paket/Unit dan realisasi sebesar 71 Paket/Unit. (122 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 537.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 518.813.437,00 atau 96,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 263.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 257.349.831,00 atau 97,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 65 Kali dan realisasi sebesar 58 Kali. (89 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 273.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 261.463.606,00 atau 95,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal dengan target sebesar 8 Orang dan realisasi sebesar 9 Orang. (113 %)
- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 27 Orang. (135 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 104.886.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.896.188,00 atau 95,24 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 32.158.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.126.700,00 atau 96,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 53.168.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.132.688,00 atau 96,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 15.899.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.626.000,00 atau 91,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.010.800,00 atau 82,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

5) Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 2.190.788.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.076.838.758,00 atau 94,80 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase pembentukan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur dengan target 85 % dan realisasi 100 %. (118 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Produk Hukum Penetapan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 167.997.990,00 dan terealisasi sebesar Rp. 156.974.429,00 atau 93,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Produk Hukum Penetapan (Kepgub) yg disusun dengan target sebesar 400 Kepgub dan realisasi sebesar 693 Kepgub. (173 %)

2. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 1.267.510.610,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.819.205,00 atau 95,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Produk Hukum Pengaturan (Perda) yg Diundangkan dengan target sebesar 60 % dan realisasi sebesar 54 %. (90 %)
- Jumlah Produk Hukum Pengaturan (Pergub) yg Diundangkan dengan target sebesar 100 Pergub dan realisasi sebesar 95 Pergub. (95 %)

3. Pengkajian Produk Hukum Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 755.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 704.045.124,00 atau 93,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pengkajian Produk Hukum Provinsi yang dihasilkan dengan target sebesar 25 Nota Dinas, Surat, Telaahan dan realisasi sebesar 24 Nota Dinas, Surat, Telaahan. (96 %)

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.778.876.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.601.032.187,00 atau 90,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten / Kota dengan target 85 % dan realisasi 100 %. (118 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah I dengan anggaran sebesar Rp. 631.514.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 550.342.900,00 atau 87,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Raperda Kab/Kota yang dievaluasi Wilayah I dengan target sebesar 55 Raperda dan realisasi sebesar 41 Raperda. (75 %)
 - Jumlah Raperda / Raperkada Kab / Kota yg difasilitasi Wilayah I dengan target sebesar 110 Raperda / Raperkada dan realisasi sebesar 137 Raperda / Raperkada. (125 %)
 2. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah II dengan anggaran sebesar Rp. 631.514.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 572.421.910,00 atau 90,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Raperda Kab/Kota yang dievaluasi Wilayah II dengan target sebesar 55 Raperda dan realisasi sebesar 55 Raperda. (100 %)
 - Jumlah Raperda / Raperkada Kab / Kota yg difasilitasi Wilayah II dengan target sebesar 110 Raperda / Raperkada dan realisasi sebesar 118 Raperda / Raperkada. (107 %)
 3. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota Wilayah III dengan anggaran sebesar Rp. 515.848.168,00 dan terealisasi sebesar Rp. 478.267.377,00 atau 92,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Raperda Kab/Kota yang dievaluasi Wilayah III dengan target sebesar 51 Raperda dan realisasi sebesar 65 Raperda . (127 %)
 - Jumlah Raperda / Raperkada Kab / Kota yg difasilitasi Wilayah III dengan target sebesar 102 Raperda/Raperkada dan realisasi sebesar 154 Raperda/Raperkada. (151 %)
- 7) Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum** dengan anggaran sebesar Rp. 2.865.519.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.733.094.199,00 atau 95,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase Penanganan Masalah Hukum dengan target 85 % dan realisasi 100 %. (118 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Non Litigasi) dengan anggaran sebesar Rp. 1.372.758.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.355.477.880,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pemberian Saran / Pertimbangan Hukum dengan target sebesar 80 Masalah Hukum dan realisasi sebesar 95 Masalah Hukum. (119 %)
- Jumlah Pemberian Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan target sebesar 140 Dokumen dan realisasi sebesar 134 Dokumen. (89 %)
- 2. Penyelesaian Perkara di Pengadilan (Litigasi) dengan anggaran sebesar Rp. 848.130.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 739.823.831,00 atau 87,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Perkara yg ditangani dengan target sebesar 45 Perkara dan realisasi sebesar 45 Perkara. (100 %)
- 3. Pemajuan HAM di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 644.631.660,00 dan terealisasi sebesar Rp. 637.792.488,00 atau 98,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jatim dengan target sebesar 39 Laporan dan realisasi sebesar 39 Laporan. (100 %)
- 8) Program Dokumentasi dan Informasi Hukum** dengan anggaran sebesar Rp. 2.086.125.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.985.741.959,00 atau 95,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase Penyampaian Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Masyarakat dengan target 85 % dan realisasi 100 %. (118 %)Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
 1. Pengelolaan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 686.036.080,00 atau 98,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Upload Produk Hukum Provinsi yang tersusun dengan target sebesar 500 Produk Hukum dan realisasi sebesar 617 Produk Hukum. (123 %)
 2. Pengelolaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 104.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 100.781.000,00 atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Penambahan Koleksi Buku dengan target sebesar 125 Buku dan realisasi sebesar 354 Buku. (283 %)

- Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan dengan target sebesar 150 Tamu dan realisasi sebesar 160 Tamu. (107 %)
- 3. Penyuluhan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 1.282.125.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.198.924.879,00 atau 93,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada Masyarakat melalui Elektronik dengan target sebesar 26 Kegiatan dan realisasi sebesar 17 Kegiatan. (65 %)
 - Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hukum pada Masyarakat secara langsung dengan target sebesar 18 Kegiatan dan realisasi sebesar 21 Kegiatan. (117 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) masih banyak yang tidak sesuai dengan jadwal;
2. Permohonan Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Pusat banyak yang terlambat;
3. Pelaksanaan Penyuluhan belum optimal dikarenakan keterbatasan tersedianya anggaran.
4. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.
5. Belum maksimalnya Pelaporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodic.

Solusi :

1. Melakukan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) antara Eksekutif dan Legislatif;
2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pusat terkait Permohonan Hasil Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota;
3. Penyediaan anggaran yang memadai.
4. Melakukan pendampingan dan penguatan Kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) serta menginisiasi pendirian dan pengembangan Organisasi Bantuan Hukum (OBH);
5. Melakukan koordinasi dengan pelaksana RADHAM kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan monitoring sekaligus pendampingan

terhadap pelaksana di Kabupaten/Kota serta melakukan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan RADHAM dan Peduli HAM untuk Pejabat /Aparatur di Kabupaten/Kota

e. Penghargaan Nasional

1. Penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 September 2019 untuk Provinsi Jawa Timur sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III Tahun 2019 Tingkat Pemerintah Provinsi (Anggota JDIHN>30) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012
2. Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli HAM Tahun 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM di Bandung pada tanggal 10 Desember 2019 dalam acara Peringatan Hari HAM Se Dunia Ke-71.

3.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Tujuan

- Terwujudnya kebijakan bidang perekonomian di Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Administrasi Perekonomian Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang perekonomian	Jumlah kebijakan makro ekonomi, sarana perekonomian, perindustrian dan perdagangan	4 kebijakan	4 kebijakan	100
	Jumlah kebijakan pembinaan BUMD	3 kebijakan	3 kebijakan	100
	Jumlah kebijakan pembangunan ekonomi, koperasi, UKM, Ekonomi kreatif dan Penanaman Modal	4 kebijakan	4 kebijakan	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Perekonomian yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang perekonomian, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan makro ekonomi, sarana perekonomian, perindustrian dan perdagangan pada tahun 2019 dengan target sebesar 4 kebijakan dan terealisasi sebesar 4 kebijakan atau 100 persen; sudah memenuhi target
- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan pembinaan BUMD pada tahun 2019 dengan target sebesar 3 kebijakan dan terealisasi sebesar 3 kebijakan atau 100 persen; Sudah memenuhi target
- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan pembangunan ekonomi, koperasi, UKM, Ekonomi kreatif dan Penanaman Modal pada tahun 2019 dengan target sebesar 4 kebijakan dan terealisasi sebesar 4 kebijakan atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.805.061.612,00 atau 90,43 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.805.061,612,00 atau 90,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 737.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 392.445.793,00 atau 53,22 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 406.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 185.321.793,00 atau 45,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 13 Paket/Unit dan realisasi sebesar 13 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 331.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.124.000,00 atau 62,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 467 Paket/Unit dan realisasi sebesar 467 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 196.750.000, dan terealisasi sebesar Rp. 149.194.000,00 atau 75,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 196.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 149.194.000,00 atau 75,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 60 Orang dan realisasi sebesar 56 Orang. (93.3 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.501.300,00 atau 45,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.567.300,00 atau 19,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.934.000,00 atau 54,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

5) Program Sinkronisasi Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.937.376.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.990.035.886,00 atau 89,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan Kebijakan Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan dengan target 4 Rumusan Kebijakan dan realisasi 4 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 10 kegiatan.

1. Sinkronisasi Kebijakan dan Kinerja Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 890.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 474.095.144,00 atau 53,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang kinerja pembangunan ekonomi di Jawa Timur dengan target sebesar 4 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 4 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

2. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Perhubungan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 96.582.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.531.000,00 atau 45,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan tentang Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
3. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 293.965.365,00 dan terealisasi sebesar Rp. 175.734.019,00 atau 59,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan kebijakan tentang Pemendalian inflasi Daerah dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
4. Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 13.710.415.635,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.774.542.421,00 atau 93,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk unggulan Dalam dan Luar Negeri dengan target sebesar 3 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 3 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
5. Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 1.320.616.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.197.073.499,00 atau 90,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang monitoring produk hasil industri,tata niaga perdagangan,industri dan investasi dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
- 6.Sinkronisasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 137.332.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.167.804,00 atau 75,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentangKebijakan tentang pengembangan pasar tradisional di

jawa timur dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

7. Sinkronisasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 699.723.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 589.437.400,00 atau 84,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Kebijakan tentang pemberdayaan kelembagaan mikro dan informal di jawa timur dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (200 %)

8. Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 94.039.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.638.600,00 atau 35,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU) dalam bidang perekonomian dengan target sebesar 1 bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

9. Sinkronisasi Kebijakan Standardisasi Produk dan Jasa di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 269.689.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 214.760.099,00 atau 79,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk dan jasa dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

10. Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 425.014.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 383.055.900,00 atau 90,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang potensi industri dan perdagangan dalam rangka membuka peluang pasar dalam dan luar negeri dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

6) Program Pembinaan BUMD dengan anggaran sebesar Rp. 6.338.335.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.640.167.844,00 atau 88,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMD dengan target 3 Rumusan Kebijakan dan realisasi 3 . (Rumusan Kebijakan %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Sinkronisasi Pengembangan Pembiayaan dan Kemitraan BUMD dengan anggaran sebesar Rp. 1.787.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.535.414.021,00 atau 85,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang pengembangan pembiayaan dan kemitraan BUMD dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMD di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.363.555.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.239.321.398,00 atau 90,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang pengembangan kelembagaan BUMD di Jawa Timur dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

3. Evaluasi BUMD dengan anggaran sebesar Rp. 3.187.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.865.432.425,00 atau 89,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang evaluasi BUMD di Jawa Timur dengan target sebesar 1 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (200 %)

7) Program Pembangunan Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 14.866.408.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.101.029.562,00 atau 81,40 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Koperasi, UKM, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal dengan target 4 Rumusan Kebijakan dan realisasi 4 Rumusan Kebijakan. (100 %)
Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.
 1. Sinkronisasi Pengembangan dan Pembiayaan UKM di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.402.505.807,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.156.977.190,00 atau 82,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang pengembangan UKM di Jawa Timur dengan target sebesar 1 bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (200 %)
 2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK dengan anggaran sebesar Rp. 1.932.968.930,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.200.442.927,00 atau 62,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
 3. Sinkronisasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.215.257.263,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.032.010.326,00 atau 84,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)
 4. Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha Koperasi di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 321.282.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 193.940.800,00 atau 60,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Organisasi dan Usaha Koperasi di Jawa Timur dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

5. Sinkronisasi Penanaman Modal di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 4.994.394.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.432.421.177,00 atau 88,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang Penanaman Modal di Jawa Timur dengan target sebesar 2 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 4 Bahan Rumusan Kebijakan. (200 %)
6. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bi dang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.085.237.142,00 atau 81,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Telaahan / Bahan Rumusan Kebijakan tentang peraturan perundangan-undangan di bi dang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang dengan target sebesar 5 Bahan Rumusan Kebijakan dan realisasi sebesar 5 Bahan Rumusan Kebijakan. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Program/kegiatan di kab/kota yang seringkali tidak mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi-instansi terkait di daerah, kurangnya koordinasi antar instansi daerah, tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga itu membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan lambat.
2. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung mengingat masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
3. Sumber daya manusia yang berkurang setiap tahun baik karena purna tugas, mutasi maupun promosi tanpa disertai penambahan ASN dikarenakan kebijakan moratorium oleh Pemerintah Pusat

Solusi :

1. Perencanaan yang baik oleh pimpinan
2. Kerjasama yang baik di lingkungan Biro Administrasi Perekonomian
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya
4. Tersedianya sarana dan prasarana di Biro Administrasi Perekonomian

e. Penghargaan Nasional

-

3.5. BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

a. Tujuan

Tersusunnya Rumusan dan Evaluasi Kebijakan dibidang sumber daya alam

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Administrasi Sumber Daya Alam
Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jawa Timur	1. Jumlah kebijakan bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.	3 kebijakan	3 kebijakan	100
	2. Jumlah kebijakan bidang peternakan, kelautan dan perikanan	2 kebijakan	6 kebijakan	300
	3. Jumlah kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan.	3 kebijakan	3 kebijakan	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Sumber Daya Alam yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jawa Timur, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup pada tahun 2019 dengan target sebesar 3 kebijakan dan terealisasi sebesar 3 kebijakan atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan bidang peternakan, kelautan dan perikanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 2 kebijakan dan terealisasi sebesar 6 kebijakan atau 300 persen;
- Indikator Sasaran Jumlah kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 3 kebijakan dan terealisasi sebesar 3 kebijakan atau 100 persen

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.429.375.286,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.007.477.594,00 atau 70,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.429.375.286,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.007.477.594,00 atau 70,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 387.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 375.400.978,00 atau 97,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 212.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.750.680,00 atau 94,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah ASN yang mendapatkan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.650.298,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 172.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 155.163.919,00 atau 90,05 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.751.734,00 atau 84,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah ASN yang melaksanakan konsultasi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 87.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.412.185,00 atau 95,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 248.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.413.815,00 atau 70,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.944.915,00 atau 31,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.287.800,00 atau 35,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 139.201.600,00 atau 92,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 0 Paket. (___ %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.979.500,00 atau 74,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

5) Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Energi Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 2.512.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.376.071.453,00 atau 94,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan ESDM dan Lingkungan Hidup dengan target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 1.056.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.010.736.053,00 atau 95,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 0 Dokumen. (___ %)
2. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dengan anggaran sebesar Rp. 1.456.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.365.335.400,00 atau 93,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (300 %)

6) Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.555.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.524.440.735,00 atau 97,99 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan target 2 Dokumen dan realisasi 6 Dokumen. (300 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 777.887.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 762.499.110,00 atau 98,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (400 %)
2. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 777.887.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 761.941.625,00 atau 97,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Peternakan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (200 %)

7) Program Sinkronisasi, Sinergitas dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.614.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.549.752.735,00 atau 95,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dengan target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 807.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 774.234.120,00 atau 95,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Perkebunan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp. 807.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 775.518.615,00 atau 96,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Rumusan Kebijakan Bidang Perkebunan dan Kehutanan dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kurang adanya sinergi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang sumber daya alam
- Kurang adanya koordinasi antara OPD Pemerintah Provinsi dilingkup bidang sumber daya alam dengan OPD Pemerintah Kabupaten/Kota dilingkup bidang sumber daya alam
- Belum optimalnya rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam (pertanian dan ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup) yang ditindaklanjuti

Solusi :

- Perlunya meningkatkan sinergi program dan kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Perlu meningkatkan koordinasi antar OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota dibidang sumber daya alam

e. Penghargaan Nasional

-

3.6. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Kebijakan Bidang Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Yang Menjadi Kebijakan	100 %	100 %	100
	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Administrasi Pembangunan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kebijakan Bidang Pembangunan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Yang Menjadi Kebijakan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 3.808.926.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.476.952.786,00 atau 91,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 80,08 %. (80,08 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.808.926.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.476.952.786,00 atau 91,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 80,08 %. (80,08 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 702.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 660.451.418,00 atau 94,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 616.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 574.685.100,00 atau 93,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibeli dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 86.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.766.318,00 atau 99,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah peraltanan dan kelengkaapan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.670.931.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.436.411.427,00 atau 93,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.573.681.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.358.786.427,00 atau 93,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah konsultasi dengan target sebesar 1500 kali dan realisasi sebesar 1500 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 97.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.625.000,00 atau 79,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/pendidikan / pelatihan dengan target sebesar 97 orang dan realisasi sebesar 97 . (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 330.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 315.949.970,00 atau 95,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 50.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.989.720,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 44.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.018.250,00 atau 87,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 227.942.000,00 atau 97,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 4 paket dan realisasi sebesar 4 paket. (100 %)

5) **Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp. 4.894.695.875,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.767.743.790,00 atau 97,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD) dengan anggaran sebesar Rp. 886.095.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 861.183.897,00 atau 97,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBD dengan target sebesar 67 PD dan realisasi sebesar 93 PD. (100 %)

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN) dengan anggaran sebesar Rp. 2.945.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.876.046.313,00 atau 97,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah PD yang melakukan rekonsiliasi APBN dengan target sebesar 28 PD dan realisasi sebesar 28 PD. (100 %)

3. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.063.555.875,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.030.513.580,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pembangunan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

6) Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 15.610.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.122.866.247,00 atau 96,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 1.063.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.046.618.650,00 atau 98,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah paket lelang yang dilelang melalui LPSE dengan target sebesar 1300 paket dan realisasi sebesar 1300 paket. (100 %)
- Jumlah notulen rumusan LPSE dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)

2. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi, serta Rencana Umum Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp. 457.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 449.101.660,00 atau 98,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan pengendalian terhadap pengadaan barang / jasa dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

3. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis dengan anggaran sebesar Rp. 2.140.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.066.955.167,00 atau 96,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan program strategis dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 447.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 441.262.251,00 atau 98,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli dengan target sebesar 3 paket dan realisasi sebesar 3 paket. (100 %)

5. Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 7.645.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.419.181.137,00 atau 97,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah paket pengadaan yang selesai proses dengan target sebesar 900 paket dan realisasi sebesar 900 paket. (100 %)

6. Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 2.282.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.206.522.414,00 atau 96,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta Bimtek dan ujian yang lulus dengan target sebesar 35 orang dan realisasi sebesar 31 orang. (88,57 %)
- Jumlah peserta Bimtek dan ujian yang lulus dengan target sebesar 35 orang dan realisasi sebesar 31 orang. (88,57 %)

7. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.574.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.493.224.968,00 atau 94,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah advokasi PBJ dengan target sebesar 8 advokasi dan realisasi sebesar 8 advokasi. (100 %)

7) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 2.422.788.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.145.627.075,00 atau 88,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 665.831.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 448.504.965,00 atau 67,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK dan ujian sertifikasi keahlian PBJ dengan target sebesar 170 orang dan realisasi sebesar 170 orang. (100 %)
2. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan anggaran sebesar Rp. 1.369.360.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.318.876.220,00 atau 96,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah draft rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 387.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 378.245.890,00 atau 97,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan tugas pemprov Jatim dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan
- Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang kebinamargaan, perhubungan, proyek strategis dan proses pemilihan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU)
- Belum optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Marga

Solusi :

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi implementasinya dalam dokumen perencanaan serta percepatan penyerapan APBD dan APBN
- Melaksanakan Pembinaan, dan fasilitasi kebijakan pembangunan bidang kebinamargaan, infrastruktur proyek strategis, perhubungan, dan KPBU

- Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi

e. Penghargaan Nasional

-

3.7. BIRO ORGANISASI

a. Tujuan

Terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Organisasi Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat fungsi	100 %	100 %	100
	Persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran	100 %	100 %	100
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan analisis jabatan sebagai dasar penataan pegawai	42,55 %	42,55 %	100
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja	Persentase kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal BB	52,63 %	55,26 %	104,99
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A	100 %	85,45 %	85,45
Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai dengan ketentuan	79,56 %	79,56 %	100,00

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Organisasi yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat fungsi pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Capaian atas indikator persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang kelembagaannya tepat fungsi sebesar 100%. Seluruh perangkat daerah di Jawa Timur berdasarkan **susunan perangkat daerah, pewadahan dan perumpunan, tugas fungsi serta tata kerjanya** telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PP Nomor 18 Tahun 2016 namun tentunya perangkat daerah dimaksud harus senantiasa dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya. Sesuai amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah. Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 73,11 % atau 73,11 persen ;

Atas dasar itulah, pada tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi di beberapa perangkat daerah provinsi sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten/Kota di mana masing-masing Kabupaten/Kota melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerahnya dengan menyesuaikan visi misi kepala daerah yang didasarkan pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan Kabupaten/ Kota dimaksud kemudian dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membentuk kelembagaan yang tepat fungsi.

- Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Capaian atas indikator persentase perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang kelembagaannya tepat ukuran sebesar 100%. Seluruh perangkat daerah di Jawa Timur berdasarkan besaran organisasi sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PP Nomor 18 Tahun 2016 namun tentunya perangkat daerah dimaksud harus senantiasa dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya. Sesuai amanat Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah. Pada tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan di beberapa perangkat daerah provinsi sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota. Terkait UKPBJ, dari hasil penghitungan skor variabel Provinsi Jawa Timur dapat membentuk UKPBJ tipe A yaitu setingkat Biro di Sekretariat Daerah.

Atas dasar itu maka pada tahun 2019 dilakukan penataan kembali terhadap besaran organisasi UKPBJ dengan membentuk Biro Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah. Selain itu dilakukan pula penataan terhadap besaran organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur untuk mengakomodir fungsi pelayanan perijinan dimana yang semula terdiri dari 4 (empat) bidang menjadi 7 (tujuh) bidang.

Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten/Kota dengan melakukan evaluasi terhadap besaran organisasi perangkat daerah yang sudah dibentuk. Dikarenakan adanya perkembangan kondisi daerah maka dilakukan perubahan tipologi perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang diakomodir dengan melakukan perubahan perda yang harus dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu ke Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat. Hasil konsultasi tersebut menjadi dasar penataan untuk membentuk kelembagaan yang tepat ukuran.

- Indikator Sasaran Persentase perangkat daerah yang menggunakan analisis jabatan sebagai dasar penataan pegawai pada tahun 2019 dengan target sebesar 42,55 % dan terealisasi sebesar 42,55 % atau 100 persen;

Target pada indikator ini sebesar 42,55 % atau sebanyak 20 Perangkat Daerah Provinsi dan telah tercapai sebanyak 20 Perangkat Daerah atau sebesar 100%. Selama tahun 2019 Biro Organisasi telah melakukan fasilitasi maupun asistensi terhadap penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Timur.

- Hasil dari penyusunan analisis jabatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk analisa kebutuhan pegawai dan berzeting, menentukan standar kompetensi jabatan, syarat jabatan, indikator kinerja pegawai serta nilai dan peringkat jabatan. Dalam lingkup yang lebih sempit Analisis Jabatan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan formasi Pegawai, rekrutmen dan penempatan pegawai, penyusunan pola karier, penerapan manajemen kinerja, perencanaan kebutuhan diklat, penyusunan sistem remunerasi sesuai bobot jabatan dan kinerja sehingga bisa mempengaruhi jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai sesuai beban kerja, penempatan pegawai yang tepat, pengembangan karier sesuai kompetensi, sistem remunerasi yang adil dan layak, kinerja SDM aparatur yang lebih optimal;

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal BB pada tahun 2019 dengan target sebesar 52,63 % dan terealisasi sebesar 55,26 % atau 104,99 persen;
Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya tersebut, setiap tahun dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat 7 predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA.

Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Beberapa kendala dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja antara lain adalah masih rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah, pemahaman yang belum sepenuhnya mendukung upaya penerapan SAKIP, belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras dan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan target dimasa mendatang

- Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 70,14 % atau 70,14 persen;

Capaian atas indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat SAKIP minimal adalah sebesar 85,45%, dengan riancian sebagai berikut :

Predikat AA : 2 PD

Predikat A : 45 PD

Predikat BB : 8 PD

Adapun Pelaksanaan evaluasi Tahun 2019 hanya dilaksanakan terhadap 55 (lima puluh lima) Perangkat Daerah. Hal tersebut dikarenakan 12 (dua belas) UPT BLUD Dinas Kesehatan tidak lagi menyusun dokumen perencanaan. Sehingga evaluasi hanya dilaksanakan pada Dinas Kesehatan

Sasaran 3 : Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Pada tahun 2019 dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketatalaksanaan pemerintahan pada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/ kota di Jawa Timur. Dari hasil monev tersebut diketahui bahwa secara umum seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota telah melaksanakan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan.

Disamping itu Biro Organisasi juga telah melaksanakan sosialisasi Bidang Tatalaksana kepada seluruh UPTD serta Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur. Adapun sosialisasi tersebut bertujuan mewujudkan tertib administrasi terkait dengan tata naskah dinas dan kearsipan pada UPT dan Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur. Adapun salah satu peraturan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2019, Biro Organisasi juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Timur melalui Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 4 April 2019 perihal Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan. Monitoring ini dimaksudkan untuk menginventarisasi perubahan SOP Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Indikator Sasaran Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai dengan ketentuan pada tahun 2019 dengan target sebesar 79,56 % dan terealisasi sebesar 79,56 % atau 100,00 persen;

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan disebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis layanan. Hal inilah yang mendorong setiap unit pelayanan baik provinsi maupun kabupaten/ kota berusaha untuk menetapkan standar pelayanan.

Tujuan ditetapkannya standar pelayanan adalah adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Lebih jauh lagi, dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pemerintah daerah semakin bersemangat dalam memenuhi semua aspek dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian terhadap unit penyelenggara pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 840.524.260,00 dan terealisasi sebesar Rp. 703.926.639,00 atau 83,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 80 indeks. (80 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 859.924.260,00 dan terealisasi sebesar Rp. 703.926.639,00 atau 81,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 84 %. (84 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 526.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.707.680,00 atau 87,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 75 %. (75 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 496.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.707.680,00 atau 92,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 2 unit dan realisasi sebesar 2 unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 29.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 48 unit dan realisasi sebesar 0 unit. (0 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.311.395.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.227.457.764,00 atau 93,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 25 % dan realisasi 25 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 186.326.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 186.192.114,00 atau 99,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 20 kali dan realisasi sebesar 22 kali. (110 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.069.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.041.265.650,00 atau 92,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal dengan target sebesar 6 orang dan realisasi sebesar 5 . (83,33 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 650 orang dan realisasi sebesar 619 orang. (95,23 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 106.452.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.832.825,00 atau 46,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 76,47 %. (76,47 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 14.860.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.585.400,00 atau 64,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 75.827.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.822.425,00 atau 43,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 11.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.425.000,00 atau 62,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 4 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (25 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (75 %)
- 5) **Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan** dengan anggaran sebesar Rp. 3.370.185.172,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.715.135.879,00 atau 80,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Jumlah perangkat daerah Provinsi yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran dengan target 12 PD dan realisasi 12 PD. (100 %)
 - Indikator Program Jumlah Kab/Kota yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran dengan target 38 kab/kota dan realisasi 25 kab/ kota. (65,79 %)

- Indikator Program Jumlah perangkat daerah yang menggunakan Anjab sebagai dasar penataan pegawai dengan target 20 PD dan realisasi 20 PD. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.315.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.143.686.832,00 atau 86,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaannya dengan target sebesar 12 PD dan realisasi sebesar 4 PD. (33,33 %)
 - Jumlah UPT Prov. dan Cabang dinas prov yang ditata kelembagaannya dengan target sebesar 221 dan 31 UPT dan Cabdin dan realisasi sebesar 236 UPT dan Cabdin. (80 %)
 - Jumlah kab/ kota yang ditata kelembagaannya dengan target sebesar 38 Kab/ kota dan realisasi sebesar 38 Kab/ kota. (100 %)
2. Analisis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 391.257.540,00 dan terealisasi sebesar Rp. 303.612.810,00 atau 77,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisis organisasinya dengan target sebesar 12 PD dan realisasi sebesar 9 PD. (75 %)
 - Jumlah UPT Prov. yang dianalisis organisasinya dengan target sebesar 100 UPT dan realisasi sebesar 16 UPT. (16 %)
 - Jumlah Kab/ kota yang dianalisis kelembagaannya dengan target sebesar 38 Kab/ kota dan realisasi sebesar 20 Kab/ Kota. (78 %)
3. Penyusunan Analisis Jabatan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.663.726.632,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.267.636.237,00 atau 76,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov yang telah menyusun Analisis Jabatan sesuai pedoman dengan target sebesar 47 dan 221 PD dan UPT dan realisasi sebesar 30 PD dan UPT. (11 %)

- Jumlah Perangkat Daerah dan UPT Prov yang telah menyusun ABK sesuai pedoman dengan target sebesar 47 dan 221 PD dan UPT dan realisasi sebesar 21 PD dan UPT. (7,84 %)

6) Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 4.159.953.430,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.034.985.090,00 atau 72,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah perangkat daerah Prov dan kab/ kota yang telah menerapkan ketalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan dengan target 93 PD dan realisasi 61 PD. (65,59 %)
- Indikator Program Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pelayanan Prima (SKPD Prov dan Kab/ Kota) dengan target 90 PD dan realisasi 125 PD. (138,88 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan ketalaksanaan pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 1.085.901.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 702.708.691,00 atau 64,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah PD Prov. dan Kab/ kota yang dibina dan dievaluasi terkait tata naskah dinas dengan target sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/Kota dan realisasi sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota. (100 %)
 - Jumlah PD Prov. dan Kab/ kota yang dibina dan dievaluasi terkait Pakaian Dinas sesuai pedoman dengan target sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota dan realisasi sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/kota. (100 %)
 - Jumlah PD Prov. dan Kab/ kota yang melaksanakan tata hubungan kerja sesuai pedoman dengan target sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota dan realisasi sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota. (100 %)
 - Jumlah PD Prov. dan Kab/ kota yang melaksanakan standarisasi sarana prasarana kedinasan dengan target sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/kota dan realisasi sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota. (100 %)
 - Jumlah PD Prov. dan Kab/ kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP sesuai pedoman dengan target sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota dan realisasi sebesar 55 dan 38 PD dan Kab/ kota. (100 %)

2. Pembinaan dan evaluasi dalam rangka serta pelaksanaan standarisasi pelayanan dengan anggaran sebesar Rp. 345.977.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 324.026.489,00 atau 93,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah unit pelayanan prov dan kab/ kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPP dengan target sebesar 95 unit pelayanan prov dan kab dan realisasi sebesar 125 unit layanan prov dan kab/. (131,57 %)
- Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/ kota yang telah menyusun SKM sesuai pedoman dengan target sebesar 55 PD & Kab/ kota dan realisasi sebesar 41 PD & Kab/ kota. (74,54 %)

3. Replikasi inovasi pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp. 2.728.075.430,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.008.249.910,00 atau 73,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan target sebesar 90 unit pelayanan dan realisasi sebesar 125 unit pelayanan. (138,88 %)

7) Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.475.417.398,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.974.290.648,00 atau 85,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah kab/ kota Jatim dengan predikat AKIP minimal BB dengan target 20 Kab/Kota dan realisasi 21 kab/ kota. (105 %)
- Indikator Program Jumlah Perangkat Daerah Prov. Jatim dengan predikat AKIP minimal A dengan target 67 PD dan realisasi 47 PD. (70,14 %)
- Indikator Program umlah Kelompok Budaya Kinerja (KBK) aktif di Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/ kota se Jatim dengan target 220 KBK dan realisasi 192 KBK. (91,43 %)
- Indikator Program Persentase ASN Setda. Prov. Jatim yang meningkat kompetensinya dengan target 25 % dan realisasi 23 23. (92 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan :

1. Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.318.913.540,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.920.425.650,00 atau 82,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/ kota se Jatim yang diasistensi dalam implementasi Sistem AKIP dengan target sebesar 67 dan 38 PD dan Kab/Kota dan realisasi sebesar 67 dan 38 PD dan Kab/ kota. (100 %)
 - Jumlah Perangkat Daerah Prov dan Kab/ kota se Jatim yang dievaluasi dalam implementasi Sistem AKIP dengan target sebesar 67 dan 38 PD dan kab/ kota dan realisasi sebesar 67 dan 26 PD dan Kab/ kota. (88,57 %)
2. Budaya Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 888.574.258,00 dan terealisasi sebesar Rp. 834.915.957,00 atau 93,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah KBK Perangkat Daerah Prov dan Kab/ kota yang difasilitasi dalam pengembangan budaya kinerja dengan target sebesar 120 KBK dan realisasi sebesar 80 KBK. (66,66 %)
 - Jumlah unit kerja prov dan kab/ kota yang telah menerapkan budaya kinerja dengan target sebesar 180 unit kerja prov & kab/ kot dan realisasi sebesar 109 unit kerja prov dan kab/ k. (60,55 %)
3. Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian di lingkungan Setda dengan anggaran sebesar Rp. 267.929.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 213.349.041,00 atau 79,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah ASN Setda yang menyusun SKP sesuai pedoman dengan target sebesar 625 Orang dan realisasi sebesar 582 orang. (93,12 %)
 - Persentase ASN Setda yang puas terhadap pelayanan kepegawaian dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 79 %. (87,77 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Beberapa peraturan pemerintah pusat terbit di bulan-bulan akhir tahun 2019 sehingga menyebabkan keterbatasan waktu dalam implementasi peraturan dimaksud.

2. Kurangnya perhatian perangkat daerah terhadap penyelesaian penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerahnya masing-masing

Solusi :

1. Biro Organisasi mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat
2. Memberikan asistensi terhadap penyusunan analisis jabatan agar segera tersusun hasil analisis jabatan pada perangkat daerah

e. Penghargaan Nasional

-

3.8. BIRO UMUM

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Umum Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Administrasi Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Administrasi Keuangan	83 IKM	83 IKM	100
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Kerumahtanggaan	83 IKM	83 IKM	100
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Arsip dan Ekspedisi	Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Arsip dan Ekspedisi	83 IKM	83 IKM	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Umum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Administrasi Keuangan , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Administrasi Keuangan pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 IKM dan terealisasi sebesar 83 IKM atau 100 persen;

Sasaran 2 : 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Kerumahtanggaan , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Kerumahtanggaan pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 IKM dan terealisasi sebesar 83 IKM atau 100 persen;

Sasaran 3 : 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Di Bidang Arsip dan Ekspedisi, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Arsip dan Ekspedisi pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 IKM dan terealisasi sebesar 83 IKM atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 19.493.005.860,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.698.615.472,00 atau 95,92 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 95,92 . (95,92 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 18.424.810.860,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.644.203.972,00 atau 95,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100 %)

2. Penatausahaan Akutansi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 442.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 434.828.200,00 atau 98,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dengan target sebesar 20 dokumen dan realisasi sebesar 20 . (100 %)

3. Pengelolaan Administrasi Barang dengan anggaran sebesar Rp. 626.195.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 619.583.300,00 atau 98,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- persentase aset yang sesuai antara pencatatan dan kondisi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 120.632.706.517,00 dan terealisasi sebesar Rp. 110.095.812.641,00 atau 91,27 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 91,27 . (91,27 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 31.982.389.408,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.006.247.109,00 atau 90,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 500 Paket/Unit dan realisasi sebesar 643 . (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 44.969.879.168,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.801.651.237,00 atau 90,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 48 Paket/Unit dan realisasi sebesar 48 . (100 %)

3. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan dengan anggaran sebesar Rp. 43.680.437.941,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.287.914.295,00 atau 92,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- persentase pelayanan kerumahtanggaan dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 82 . (98 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 796.927.659,00 dan terealisasi sebesar Rp. 776.360.062,00 atau 97,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 97,42 . (97,42 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 279.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 273.682.500,00 atau 97,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- jumlah konsultasi dengan target sebesar 26 kali dan realisasi sebesar 26 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 517.427.659,00 dan terealisasi sebesar Rp. 502.677.562,00 atau 97,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM; Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 150 ; 10 pegawai dan realisasi sebesar 150 pegawai. (100 %)

4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 282.345.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 259.243.200,00 atau 91,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 91,82 . (91,82 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 221.060.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 208.949.300,00 atau 94,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 8 Dokumen dan realisasi sebesar 8 . (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 61.285.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.293.900,00 atau 82,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 . (100 %)

5) **Program Pelayanan Administrasi Umum, Pengelolaan Surat, Telekomunikasi dan Arsip** dengan anggaran sebesar Rp. 1.618.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.610.949.397,00 atau 99,54 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 83 % dan realisasi 83 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pengelolaan Surat Dinas dan Ekspedisi, Telekomunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 601.996.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 599.453.760,00 atau 99,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- persentase distribusi surat dan radiogram tepat waktu dan tepat sasaran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100 %)

2. Pengelolaan Kearsipan dilingkungan Setda dengan anggaran sebesar Rp. 428.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 425.158.490,00 atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah akuisisi arsip dan perekaman data arsip elektronik dengan target sebesar 12.000 berkas dan realisasi sebesar 12.000 berkas. (100 %)

3. Pelayanan Administrasi Umum dengan anggaran sebesar Rp. 588.133.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 586.337.147,00 atau 99,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- persentase tercukupinya kebutuhan kegiatan asisten, staf ahli dan staf khusus dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 . (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Jumlah Tamu Pimpinan Yang Sulit di prediksi
2. Kurang Maksimalnya Saranan Pendukung Kinerja Blro Umum
3. Tidak Adanya jabatan Fungsional Arsiparis

Solusi :

1. Koordinasi dengan Pihak-pihak pemangku kepentingan.
2. Perencanaan dan Penganggaran sarana pendukung kinerja yang lebih baik
3. Koordinasi dengan BKD dan Badan Arsip

e. Penghargaan Nasional

-

3.9. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

a. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%)	90 %	90 %	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	98 %	98 %	100
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	92 %	92 %	100
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	88 %	88 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan (%) pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 98 % dan terealisasi sebesar 98 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 92 % dan terealisasi sebesar 92 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 88 % dan terealisasi sebesar 88 % atau 100 persen.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.757.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.594.106.745,00 atau 90,70 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.757.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.594.106.670,00 atau 90,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 2300 . (100 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.132.500,00 atau 97,29 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.247.500,00 atau 93,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 15 . (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.885.000,00 atau 99,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 15 . (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 15.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.120.000,00 atau 79,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 15.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.120.000,00 atau 79,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 20 Orang dan realisasi sebesar 30 . (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 35.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.947.000,00 atau 89,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.585.000,00 atau 81,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 . (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.280.000,00 atau 98,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 . (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 4.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.940.000,00 atau 96,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 550 Paket dan realisasi sebesar 550 . (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.142.000,00 atau 81,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 6 Paket dan realisasi sebesar 6 . (100 %)
- 5) **Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 7.016.495.375,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.536.542.367,00 atau 93,16 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang di Monitoring dan Diolah dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan :

1. Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.580.357.851,00 atau 97,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 1.752 buku dan Dokumen dan realisasi sebesar 1752 . (100 %)

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.299.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.233.784.715,00 atau 94,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi Pendukung Kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan target sebesar 6.232 Data/Informasi dan realisasi sebesar 6.232 . (100 %)

3. Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 4.100.905.375,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.722.399.801,00 atau 90,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokolan dengan target sebesar 240 Orang dan realisasi sebesar 240 . (100 %)

6) Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 14.816.894.316,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.110.435.935,00 atau 95,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 525.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.553.388,00 atau 91,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyebarluasan Informasi Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan target sebesar 800 pers gathering- dan realisasi sebesar 800 . (100 %)

2. Pembinaan dan Keikutsertaan Lembaga Pers dengan anggaran sebesar Rp. 9.440.086.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.969.562.570,00 atau 95,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan dan keikutsertaan Lembaga Pers dengan target sebesar 40 publik expose dan realisasi sebesar 40 . (100 %)
3. Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia dengan anggaran sebesar Rp. 3.573.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.528.400.077,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 . (100 %)
4. Penerbitan dan Penyebarluasan Produk Informasi/ Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.278.028.316,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.129.919.900,00 atau 88,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penerbitan dan Penyebarluasan Produk Informasi/Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan target sebesar 9.600 eksemplar dan realisasi sebesar 9600 . (100 %)

7) Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp. 8.685.440.309,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.480.688.606,00 atau 74,62 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan :

1. Hubungan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 5.955.897.637,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.963.390.265,00 atau 66,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Hubungan Luar Negeri dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 . (100 %)
2. Hubungan Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 1.535.542.672,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.422.240.918,00 atau 92,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Hubungan Dalam Negeri dengan target sebesar 42 dokumen dan realisasi sebesar 42 . (100 %)
- 3. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp. 1.194.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.095.057.423,00 atau 91,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama dengan target sebesar 40 Dokumen dan realisasi sebesar 40 . (100 %)

8) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 12.767.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.807.574.497,00 atau 92,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan dengan target 100 % dan realisasi 100 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.279.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.406.069.536,00 atau 90,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan target sebesar 730 Kegiatan dan realisasi sebesar 730 . (100 %)
2. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara dengan anggaran sebesar Rp. 2.169.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.132.687.211,00 atau 98,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara dengan target sebesar 180 Kegiatan dan realisasi sebesar 180 . (100 %)
3. Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 1.318.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.268.817.750,00 atau 96,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan dengan target sebesar 850 Permintaan dan realisasi sebesar 850 . (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu :

- a. Terjadi perubahan nomenklatur dan struktur Organisasi Perangkat Daerah bidang kehumasan dan keprotokolan di tingkat Kabupaten/Kota (Implementasi UU 23/2014 dan PP 18/2016);
- b. Terbatasnya tools dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Media, sehingga Monitoring Media baru dapat dilakukan untuk Media Cetak saja;
- c. Belum semua media massa memuat siaran pers yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Protokol;
- d. Tingginya frekuensi kegiatan/acara di Jawa Timur terutama kedatangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara serta kegiatan nasional yang tidak seimbang dengan jumlah petugas protokol, sehingga kegiatan tidak dapat terlayani dengan optimal.

Solusi :

- a. Melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Biro Humas dan Protokol dengan Bagian Humas dan Protokol Kabupaten/Kota;
- b. Memanfaatkan teknologi informasi (Sistem Informasi Monitoring Media) dalam melakukan monitoring media;
- c. Mengintensifkan dan mengoptimalkan penyebaran informasi kepada media massa, termasuk portal berita online;

e. Penghargaan Nasional

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim dengan Nilai 'A' (Interpretasi Sangat Baik)

3.10. SEKRETARIAT DPRD

a. Tujuan

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	78.5 Indeks	80.79 Indeks	103

Pada Tahun 2019 kinerja Sekretariat DPRD yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya pada tahun 2019 dengan target sebesar 78.5 Indeks dan terealisasi sebesar 80.79 Indeks atau 103 persen;

Dengan target 78.5 dan realisasi 80.79 % menunjukkan nilai mutu pelayanan yang sudah baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 10.729.883.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.099.519.374,00 atau 84,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 74 Indeks dan realisasi 72 Indeks. (99 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 10.729.883.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.099.519.374,00 atau 84,81%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan pelaksanaan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 40.653.512.510,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.342.076.594,64 atau 89,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 24.676.893.751,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.021.397.180,64 atau 85,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 35 Paket/Unit dan realisasi sebesar 44 Paket/Unit. (125,71 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 15.976.618.759,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.320.679.414,00 atau 95,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 3/95 Gedung/Kendaraan dan realisasi sebesar 3/176 Gedung/Kendaraan. (182,65 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 11.970.977.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.637.470.447,00 atau 80,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 64 % dan realisasi 63 %. (98,44 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.597.473.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.707.993.147,00 atau 80,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.373.504.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.929.477.300,00 atau 80,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, dan jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 10/240 Orang dan realisasi sebesar 24/320 Orang. (137,6 %)

- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.708.418.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.371.650,00 atau 7,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.362.084.936,00 dan terealisasi sebesar Rp. 109.223.532,00 atau 8,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (120 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.346.334.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.148.118,00 atau 6,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (133,33 %)

- 5) Program Layanan Persidangan** dengan anggaran sebesar Rp. 115.210.197.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.274.535.150,00 atau 67,94 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi persidangan dengan target 78,5 % dan realisasi 80,86 %. (103 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan.

1. Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama dengan anggaran sebesar Rp. 62.088.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.187.908.288,00 atau 77,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama dengan target sebesar 85 Kali dan realisasi sebesar 235 Kali. (276,47 %)

2. Rapat-rapat dan hearing/dialog Alat Kelengkapan Dewan dengan anggaran sebesar Rp. 3.589.132.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.758.819.478,00 atau 76,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Hearing / Dialog Alat Kelengkapan Dewan dengan target sebesar 110 Kali dan realisasi sebesar 119 Kali. (108,18 %)
3. Rapat-rapat Paripurna dengan anggaran sebesar Rp. 5.457.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.871.020.052,00 atau 89,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna dengan target sebesar 90 Kali dan realisasi sebesar 92 Kali. (102,22 %)
4. Kegiatan Reses dengan anggaran sebesar Rp. 33.583.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.728.592.937,00 atau 61,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kegiatan Reses dengan target sebesar 2 Kali dan realisasi sebesar 2 Kali. (100 %)
5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 10.492.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.728.194.395,00 atau 16,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kunjungan kerja DPRD dengan target sebesar 80 Kali dan realisasi sebesar 120 Kali. (150 %)
- 6) Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** dengan anggaran sebesar Rp. 100.119.263.704,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.939.245.331,00 atau 55,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan perundang-undangan dengan target 78,5 % dan realisasi 79,72 %. (101,55 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.840.643.204,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.262.482.818,00 atau 41,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan target sebesar 60 Kali dan realisasi sebesar 22 Kali. (36,67 %)
2. Penguatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 34.128.210.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.740.308.588,00 atau 72,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD dengan target sebesar 50 Kali dan realisasi sebesar 42 Kali. (84 %)
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.921.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.342.743.872,00 atau 62,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan dengan target sebesar 16 Kali dan realisasi sebesar 26 Kali. (162,5 %)
 - Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan dengan target sebesar 16 Kali dan realisasi sebesar 26 Kali. (162,5 %)
4. Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.176.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.206.341.108,00 atau 37,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan publik hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan target sebesar 6 Kali dan realisasi sebesar 7 Kali. (116,67 %)

5. Publikasi Kegiatan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 4.354.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.968.000.903,00 atau 91,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah publikasi kegiatan DPRD dengan target sebesar 410 Kali dan realisasi sebesar 440 Kali. (107,32 %)

6. Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 698.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 419.368.042,00 atau 60,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD dan Jumlah literatur perpustakaan yang disediakan dan minat baca dengan target sebesar 36/200 Dokumen/Literatur dan realisasi sebesar 256/844 Dokumen/Literatur. (329,69 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Ruang anggota mohon untuk di perbaiki atau di rehab karena dinding-dindingnya sudah berjamur dan terlihat kusam
2. Perlu disiapkan kue dan minuman di ruang anggota DPR & dan di usulkan pendamping tiap anggota DPR
3. Akses internet wifi/website kurang maksimal
4. Tempat area parkir dan Jukir kurang memadai
5. Apabila ada aksi demonstrasi jalan menuju gedung DPRD agar tidak di tutup untuk anggota DPRD karena pada dasarnya korlap demonstrasi menginginkan bertemu dengan anggota
6. Faktor keamanan gedung perlu ditingkatkan
7. Karpet masjid agar ditambah
8. Bag.keuangan membuat pemberitahuan via online tentang penerimaan
9. Penerimaan tiap bulan dilaporkan secara rinci melalui email
10. Bimtek & pelatihan sering dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap aturan dan update
11. Pejabat struktural agar mudah ditemui

12. Makanan lebih bervariasi dan berkualitas
13. Kebersihan perlu ditingkatkan
14. Performa keamanan lebih ditingkatkan lagi terutama dalam pengaturan tamu
15. Kamar mandi sering tisu kosong
16. Pelayanan ganti BBM di tol sangat lambat.
17. Keamanan agar diperketat karena banyak pengemis di depan kantor dan fraksi

Solusi :

1. Peningkatan layanan perlengkapan dan pemeliharaan gedung.
2. Peningkatan layanan kerumahaan dan protokol.
3. Diupayakan melalui pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD dan perubahan Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Revitalisasi provider internet dan wifi
5. Kerja sama (MOU) dengan penyedia jasa layanan profesional pengamanan
6. Peningkatan layanan perlengkapan dan pemeliharaan (Pengadaan Barang/Jasa)
7. Pembuatan Aplikasi E - Kwitansi
8. Optimalisasi layanan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas dan fungsi DPRD
9. Forum komunikasi (media sosial)
10. Kerja sama (MOU) dengan penyedia jasa profesional layanan kebersihan

e. Penghargaan Nasional

SAKIP A TAHUN 2019

ISO 9001:2015 Certificate No QMS-003.Q-0119

4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. INSPEKTORAT PROPINSI

a. Tujuan

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Propinsi Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100 Persen	100 Persen	100,00
	Persentase Nilai Temuan Kerugian Daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI dalam LHA BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa Timur (dibawah nilai materialitas 3%)	0,5 Persen	0,5 Persen	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase tindak lanjut selesai BPK - RI	72 Persen	72 Persen	100
	Persentase tindak lanjut selesai ITJEN Kemendagri	88 %	88 %	100
	Persentase tindak lanjut selesai Inspektorat	95 %	88 %	92,6
	Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 BPK-RI	25 %	25 %	100
	Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 Itjen Kemendagri	25 %	25 %	100
	Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 Inspektorat	12 %	12 %	100
	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A	90 %	90 %	100
	Perluasan Zona Integritas bebas dari korupsi	20 OPD	54 OPD	270
	Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal Tinggi	100 %	90 %	90
Meningkatnya Ketaatan Pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melaporkan tepat waktu	Persentase ketaatan penyampaian laporan Unit Pengendali Gratifikasi OPD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim	20 %	20 %	100
	Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang melapor secara tepat waktu kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim	20 %	20 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Inspektorat Propinsi yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 Persen dan terealisasi sebesar 100 Persen atau 100,00 persen;

Indikator Sasaran Persentase Nilai Temuan Kerugian Daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI dalam LHA BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa Timur (dibawah nilai materialitas 3%) pada tahun 2019 dengan target sebesar 0,5 Persen dan terealisasi sebesar 0,4 Persen atau 0,8 persen;

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 8 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Persentase tindak lanjut selesai BPK - RI pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 Persen dan terealisasi sebesar 72 Persen atau 0,79 persen;

Realisasi masih cukup jauh dari target, dikarenakan terdapat kendala untuk penyelesaian tindak lanjut LHP BPK - RI sebelum tahun 2013, selain itu banyak temuan yang melibatkan pihak dari BUMD Prov. Jatim

Indikator Sasaran Persentase tindak lanjut selesai ITJEN Kemendagri pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 100% atau 105,26 persen;

Indikator Sasaran Persentase tindak lanjut selesai Inspektorat pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 88 % atau 92,6 persen;

Beberapa LHP masih dalam proses penyelesaian, sehingga belum bisa ditindaklanjuti

Indikator Sasaran Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 BPK-RI pada tahun 2019 dengan target sebesar 25 % dan terealisasi sebesar 24 % atau 96 persen;

Indikator Sasaran Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 Itjen Kemendagri pada tahun 2019 dengan target sebesar 25 % dan terealisasi sebesar 25 % atau 100 persen;

Indikator Sasaran Persentase penurunan jumlah temuan berulang kode 01 & 02 Inspektorat pada tahun 2019 dengan target sebesar 15 % dan terealisasi sebesar 12 % atau 80 persen;

Indikator Sasaran Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 90 persen;

Indikator Sasaran Perluasan Zona Integritas bebas dari korupsi pada tahun 2019 dengan target sebesar 20 OPD dan terealisasi sebesar 4 OPD atau 20 persen;

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Pemerintah Kab./Kota di Jawa Timur, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal Tinggi pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 90 % atau 90 persen;

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketaatan Pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melaporkan tepat waktu, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Persentase ketaatan penyampaian laporan Unit Pengendali Gratifikasi OPD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim pada tahun 2019 dengan target sebesar 20 % dan terealisasi sebesar 20 % atau 100 persen;

Indikator Sasaran Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang melapor secara tepat waktu kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim pada tahun 2019 dengan target sebesar 20 % dan terealisasi sebesar 20 % atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.060.683.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.972.047.490,00 atau 97,10 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 94 %. (94 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 3.060.683.125,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.972.047.490,00 atau 97,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 96 %. (96 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 8.749.109.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.352.339.625,00 atau 72,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 98 %. (98 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 6.836.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.453.142.443,00 atau 65,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.913.109.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.899.197.182,00 atau 99,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 115.274.012,00 atau 88,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 95 %. (95 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.244.512,00 atau 97,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 12 kali. (80 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.029.500,00 atau 86,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 200 pegawai dan realisasi sebesar 206 pegawai. (103 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 359.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.442.700,00 atau 98,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 97 %. (97 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.830.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.395.700,00 atau 49,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.388.000,00 atau 92,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 344.503.500,00 atau 99,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.155.500,00 atau 99,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan anggaran sebesar Rp. 4.354.608.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.287.681.066,00 atau 98,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan dengan target 75 % dan realisasi 72 %. (96 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 1.822.728.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.808.529.956,00 atau 99,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan target sebesar 36 dokumen dan realisasi sebesar 31 dokumen. (86,11 %)
- 2. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan anggaran sebesar Rp. 2.531.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.479.151.110,00 atau 97,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 832.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 817.583.923,00 atau 98,26 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS dengan target 100 orang dan realisasi 100 orang. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 832.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 817.583.923,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan target sebesar 11 kali dan realisasi sebesar 11 kali. (100 %)

7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 7.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Jumlah Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparat Pengawasan dengan target 1 buah dan realisasi 1 buah. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 7.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 0 dokumen. (0,00 %)

8) Program Pencegahan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp. 4.687.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.978.223.986,00 atau 84,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Penilaian WBK dan WBBM dengan target 10 PD dan realisasi 2 PD. (0.2 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan anggaran sebesar Rp. 4.687.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.978.223.986,00 atau 84,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan target sebesar 4 PD dan realisasi sebesar 4 PD. (100 %)

9) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 20.936.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.135.311.937,00 atau 96,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Prosentase Kerugian Daerah dengan target 1 % dan realisasi 0.5 %. (5 %)

Program tersebut didukung oleh 9 kegiatan.

1. Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT dengan anggaran sebesar Rp. 11.676.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.209.375.158,00 atau 96,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT dengan target sebesar 125 obrik dan realisasi sebesar 120 obrik. (96 %)
2. Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler dengan anggaran sebesar Rp. 5.342.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.280.922.441,00 atau 98,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler dengan target sebesar 116 obrik dan realisasi sebesar 111 obrik. (95,68 %)
3. pemeriksaan tujuan tertentu dengan anggaran sebesar Rp. 682.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 645.390.595,00 atau 94,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - pemeriksaan tujuan tertentu dengan target sebesar 10 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (100 %)
4. pemeriksaan khusus dengan anggaran sebesar Rp. 462.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 400.419.897,00 atau 86,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - pemeriksaan khusus dengan target sebesar 10 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (100 %)
5. pemeriksaan kasus dengan anggaran sebesar Rp. 1.106.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.090.744.888,00 atau 98,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- pemeriksaan kasus dengan target sebesar 10 kali dan realisasi sebesar 10 kali. (100 %)
- 6. review laporan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 424.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 379.775.000,00 atau 89,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - review laporan keuangan dengan target sebesar 55 PD dan realisasi sebesar 55 PD. (100 %)
- 7. evaluasi LPPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.053.048.759,00 atau 96,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - evaluasi LPPD dengan target sebesar 38 Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 Kab/Kota. (100 %)
- 8. evaluasi LAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 140.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.810.199,00 atau 51,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - evaluasi LAKIP dengan target sebesar 55 PD dan realisasi sebesar 55 PD. (100 %)
- 9. telaah sejawat hasil pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.825.000,00 atau 42,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - telaah sejawat hasil pengawasan dengan target sebesar 12 kali dan realisasi sebesar 12 kali. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Jumlah Sumber Daya Aparat Pengawasan yang masih terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir belum ada peningkatan jumlah SDM yang signifikan, sementara banyak tenaga pemeriksa yang telah memasuki masa purna tugas. Sedangkan SDM yang ada saat ini lebih banyak tenaga administratif, yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten di bidangnya.
- Auditor dituntut untuk menguasai berbagai bidang pemeriksaan seperti Bansos/hibah terkait bangunan dan pemeriksaan keuangan, sedangkan Jumlah Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan teknik sipil tidak banyak. Di samping itu, jumlah obyek pemeriksaan dari OPD dan UPT mencapai kurang lebih 250 sehingga diperlukan banyak tenaga auditor yang menguasai bidang keuangan dan teknik sipil.
- Proses penyelesaian LHP cenderung masih lamban. Terhadap permasalahan ini telah dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya. Lambannya proses

penyelesaian LHP ini juga mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami keterlambatan dalam penyusunannya karena menyesuaikan pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada awal tahun anggaran.

Solusi :

- Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan analisa kebutuhan pegawai dan telah mengajukan permintaan penambahan pegawai kepada Bapak Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi auditor, telah dilakukan pemerataan pengetahuan di bidang sipil dan keuangan melalui kegiatan sharing ilmu antar auditor, serta bimtek terkait bidang sipil dan keuangan, maupun tema-tema lainnya yang dibutuhkan auditor dengan mendatangkan Narasumber dari BPKP maupun tenaga ahli lainnya.
- Untuk mempercepat proses penyelesaian LHP, telah dilakukan review format penulisan laporan dan direvisi agar menjadi lebih ringkas, jelas, dan dapat dipahami oleh Obyek Pemeriksaan, sehingga diharapkan juga dapat membantu petugas dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya lain yang dilakukan adalah menambah petugas yang menangani proses penyelesaian LHP, serta membangun aplikasi terintegrasi untuk mempermudah penyusunan LHP.
- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuat dengan mendasarkan pada draf Jakwas Kementerian Dalam Negeri melalui upload di situs meskipun hasil belum diterbitkan secara resmi.

e. Penghargaan Nasional

- Peringkat III Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019 dari Menteri Dalam Negeri
- Provinsi yang menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

4.2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100 %	100 %	100
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	90 %	90,16 %	100
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	88 %	94 %	107

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala diantaranya Informasi yang berkaitan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan merupakan ujung bagian dari Tupoksi Bappeda sebagai penyusun dokumen perencanaan. Bappeda Provinsi Jawa Timur membagi dokumen wajib publikasi dalam website www.bappeda.jatimprov.go.id, diantaranya:

- a. Triwulan I dengan realisasi 30% telah dilaksanakan publikasi dokumen antara lain: RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2018.
- b. Triwulan II, dengan realisasi 10 % telah dilaksanakan publikasi dokumen antara lain: RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
- c. Triwulan III, dengan realisasi 50% telah dilaksanakan publikasi dokumen antara lain: Renja Bappeda Tahun 2020, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Renstra Bappeda Tahun 2019-2024, RKPD-Perubahan 2019 dan Renja-Perubahan Bappeda Tahun 2019.
- d. Triwulan IV, dengan realisasi akumulasi 100% yang berarti bahwa total 10 (sepuluh) Dokumen telah dipublikasikan semua, dengan tambahan dokumen antara lain: RKPD Provinsi Jawa Timur Perubahan I tahun 2020.

Secara teknis pencapaian indikator ini cukup terkendala dalam hal ketepatan waktu publikasi yang bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian dokumen tersebut. Sedangkan penyusunan dokumen Provinsi membutuhkan data dari dokumen perencanaan dan kelengkapan data Perangkat Daerah.

Sasaran 2 : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 90,16 % atau 100 persen;

Definisi operasional dari data sesuai lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri- dari 3 aspek, yaitu:

1. Aspek kesejahteraan masyarakat yang fokus pada: komponen kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan seni budaya dan olahraga;
2. Aspek pelayanan umum yang fokus pada: layanan urusan wajib dan pilihan;
3. Aspek daya saing daerah yang fokus pada: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Data-data tersebut disajikan dalam dokumen perencanaan, dokumen pendukung serta menjadi bagian ketersediaan data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- Indikator Sasaran Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% pada tahun 2019 dengan target sebesar 88 % dan terealisasi sebesar 94 % atau 107 persen;

Berdasarkan formulasi perhitungannya, indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah outcome program-program pembangunan dengan capaian di atas 75 persen dibanding dengan seluruh outcome program yang ada di RKPD tahun berkaitan.

Pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan setelah evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi di Triwulan IV atau akhir periode pelaksanaan Renja PD dengan format evaluasi seperti yang telah diatur dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Ketepatan waktu Perangkat Daerah (PD) menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Renja
2. Kualitas pengisian data pada formulir E.55 Evaluasi hasil Renja PD yang disampaikan kepada Bappeda kurang optimal (keterisian dan kevalidan data).

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.390.412.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.258.030.156,00 atau 90,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 98 %. (98 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.390.412.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.258.030.156,00 atau 90,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 98 %. (98 %)
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 18.396.814.305,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.191.932.770,00 atau 93,45 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 8.448.974.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.821.069.993,00 atau 92,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 9.947.840.105,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.370.862.777,00 atau 94,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)
- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 18.814.298.575,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.233.127.487,00 atau 75,65 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.699.392.075,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.920.215.480,00 atau 84,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah konsultasi dengan target sebesar 17 kali dan realisasi sebesar 17 kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.535.412.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.412.468.770,00 atau 91,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 200 pegawai dan realisasi sebesar 222 pegawai. (111 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 20 pegawai dan realisasi sebesar 29 pegawai. (145 %)
3. Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) dengan anggaran sebesar Rp. 5.144.975.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.484.708.288,00 atau 48,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa Timur dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
4. Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis dengan anggaran sebesar Rp. 434.519.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 415.734.949,00 atau 95,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 6.015.950.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.623.293.886,00 atau 93,47 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 84.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.644.500,00 atau 99,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 151.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 151.250.798,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.780.225.920,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.388.398.588,00 atau 93,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 5) **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 9.657.810.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.978.234.786,00 atau 92,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dengan target 40 % dan realisasi 52 %. (130 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.
1. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 4.649.133.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.980.129.152,00 atau 85,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.008.677.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.998.105.634,00 atau 99,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
- 6) **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** dengan anggaran sebesar **Rp. 8,850,000,000** dan terealisasi sebesar Rp. 8,394,569,684 atau 94,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dengan target 54 % dan realisasi 73 %. (135 %)

Program tersebut didukung oleh 12 kegiatan:

1. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran sebesar Rp. 1.144.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.113.581.555,00 atau 97,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 720.510.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 705.715.290,00 atau 97,95%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
3. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 825.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 814.530.540,00 atau 98,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
4. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 1.018.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 992.619.466,00 atau 97,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen (Inventarisasi permasalahan, strategi program, perencanaan) dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
5. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (80 %)
6. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (250 %)
7. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 825.000.000,00 atau 73,33%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (75 %)
8. Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 448.730.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 428.721.231,00 atau 95,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
9. Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) dengan anggaran sebesar Rp. 471.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 457.063.624,00 atau 97,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program) dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
10. Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 222.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 192.803.252,00 atau 86,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
11. Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 335.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 329.355.577,00 atau 98,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
12. Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 285.179.150,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
- 7) **Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah** dengan anggaran sebesar Rp. 15.457.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.275.356.023,00 atau 98,82 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan dengan target 40 % dan realisasi 45 %. (112% %)

Program tersebut didukung oleh 8 kegiatan:

1. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 2.186.396.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.164.853.177,00 atau 99,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
2. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya dengan anggaran sebesar Rp. 876.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 862.419.515,00 atau 98,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (125 %)
3. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 885.559.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 846.329.976,00 atau 95,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100%)
4. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.054.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.054.499.200,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (150 %)
5. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Cipta Karya dengan anggaran sebesar Rp. 1.968.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.961.358.800,00 atau 99,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (300 %)
6. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 1.557.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.556.394.800,00 atau 99,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (250 %)

7. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan anggaran sebesar Rp. 869.297.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 836.372.736,00 atau 96,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (133 %)
8. Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 6.059.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.993.127.819,00 atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- 8) **Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya** dengan anggaran sebesar Rp. 7.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.451.786.176,00 atau 96,78 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan dengan target 32 % dan realisasi 33 %. (103 %)

Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan:

1. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 1.243.568.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.233.781.842,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
2. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.780.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.740.481.030,00 atau 97,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
3. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 1.624.374.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.978.255,00 atau 95,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - jumlah dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

4. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.429.500,00 atau 99,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
5. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan, dan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 297.536.500,00 atau 99,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
6. Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.469.500,00 atau 99,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
7. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 2.151.362.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.109.549,00 atau 94,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
- 9) **Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 9.863.843.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.765.464.552,00 atau 99,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase kesesuaian program APBD Provinsi dengan RKPD Provinsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
 - Indikator Program Persentase Kabupaten/ Kota yang melapor dengan target 26 % dan realisasi 26 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 5 kegiatan:

 1. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 818.180.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 810.994.853,00 atau 99,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD dan hasil pelaksanaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
- 2. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 363.061.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 353.428.607,00 atau 97,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pengendalian konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan Perangkat daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 936.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 930.850.990,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Kab/Kota dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)
- 4. Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.555.409.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.538.984.550,00 atau 99,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase dokumen raperda RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang ditindaklanjuti melalui evaluasi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- 5. Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.190.618.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.131.205.552,00 atau 98,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dengan target sebesar 8 dokumen dan realisasi sebesar 11 dokumen. (138 %)
- 10) **Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial** dengan anggaran sebesar Rp. 1.914.882.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.398.197,00 atau 96,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase dukungan data/informasi tata ruang dan geospasial yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan dengan target 40 % dan realisasi 40 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 1.451.852.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.401.538.591,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (133 %)

2. Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial dengan anggaran sebesar Rp. 463.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 449.859.606,00 atau 97,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- 11) **Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan** dengan anggaran sebesar Rp. 3.035.229.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.831.298.666,00 atau 93,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks ketersediaan data perencanaan pembangunan dengan target 80 % dan realisasi 80 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN) dengan anggaran sebesar Rp. 1.305.693.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.173.202.310,00 atau 89,85%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.729.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.658.096.356,00 atau 95,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal

2. Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
3. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
4. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah belum integrasi antar sektor
5. Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah dan data/informasi perencanaan pembangunan belum optimal
6. Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

Solusi :

1. Pengoptimalan sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan
2. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang urusan
3. Penerapan kerangka belanja kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam sistem informasi perencanaan
4. Penerapan integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
5. Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah
6. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

e. Penghargaan Nasional

- Penghargaan Pembangunan Daerah kategori Provinsi Terbaik Kedua Nasional

4.3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

a. Tujuan

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan daerah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2,11 %	3,04 %	144,07
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86 %	88,39 %	102,77
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86 Nilai	88,32 Nilai	102,69
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52 %	53,16 %	102,23

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Pendapatan daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Presentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar 2,11 % dan terealisasi sebesar 3,04 % atau 144,07 persen;

Presentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 target ditetapkan sebesar 2,11% dan terealisasi sebesar 3,04% atau 144,07%. Kinerja positif penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah ini, tidak lepas dari upaya intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor antara lain: (1) penagihan pajak kendaraan secara *door to door*; (2) sosialisasi kebijakan Pajak Daerah untuk menumbuhkan kesadaran Pajak kepada masyarakat; (3) perluasan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran PKB bersama mitra jaringan retail nasional; (4) pengembangan administrasi pajak digital yaitu e-TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran elektronik) sebagai pelengkap layanan e-Samsat. Surplus penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), cenderung dipengaruhi oleh peralihan varian kendaraan bermotor dengan harga jual lebih tinggi seperti skuter matik dengan kubikasi besar untuk roda dua dan dominasi jenis *Multi Purpose Vehicle* (MPV) yang rentang harganya dalam kisaran

menengah keatas. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada akhir triwulan IV adalah efek psikologis rencana penyesuaian tarif BBNKB penyerahan pertama di Jawa Timur yang mulai berlaku pada tahun 2020, sehingga masyarakat cenderung untuk segera mendaftarkan kendaraan baru di tahun ini. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak mencapai target, meskipun volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Timur naik 4,81% atau 351 juta liter. Tidak tercapainya target penerimaan PBBKB disebabkan karena turunnya harga jual beberapa jenis BBM dengan nilai kumulatif hingga Rp 2.500 per liter. Kemudian turunnya harga jual BBM non subsidi (peta series) ternyata tidak cukup efektif karena konsumsi BBM jenis premium malah meningkat tajam hingga 300%. Kedua hal tersebut pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan penerimaan PBBKB relatif stagnan meskipun volume penyalurannya naik. Sektor Pajak Rokok belum mencapai target dikarenakan adanya pemotongan langsung Pajak Rokok bagian bulan Desember 2018 dan triwulan I tahun 2019 untuk Jaminan Kesehatan Nasional, faktor lain yang berpengaruh pada penerimaan di sektor ini adalah penerimaan Cukai Rokok Nasional yang tidak optimal. Tercatat sampai bulan November 2019 penerimaan cukai rokok masih mencapai 165,47 triliun atau 79,24% dari target APBN 2019 sebesar 208,82 triliun.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

Indikator Sasaran Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019 dengan target sebesar 86 % dan terealisasi sebesar 88,39 % atau 102,77 persen;

Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2019 dengan target sebesar 86% dan terealisasi sebesar 88,39% atau 102,77%. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memperluas/mempermudah akses pelayanan, kemudian memberikan apresiasi kepada wajib pajak patuh yang berhadiah tabungan umroh gratis yang diundi langsung oleh Gubernur Jawa Timur, berikutnya adalah pemberian insentif/pembebasan Pajak Daerah pada triwulan IV sangat efektif menarik masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan bermotor sesuai dengan kepemilikannya.

Indikator Sasaran Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2019 dengan target sebesar 86 Nilai dan terealisasi sebesar 88,32 Nilai atau 102,69 persen;

Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 dengan target sebesar 88 dan terealisasi sebesar 88,32 atau 102,69%, penilaian kepuasan masyarakat tersebut dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur. Kinerja positif penilaian SKM tersebut dapat tercapai karena adanya pengendalian intern secara rutin oleh aparaturnya Bapenda, untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan atau keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti. Kemudian Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas standar pelayanan standar seperti sertifikasi ISO 9001:2015 pada 46 KB. Samsat se-Jawa Timur. Komitmen peningkatan kualitas pelayanan tersebut bahkan diapresiasi lebih melalui Penghargaan Wilayah yang Bebas Korupsi (WBK) pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (KB. Samsat) Jombang. Indikator Sasaran Presentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan pada tahun 2019 dengan target sebesar 52 % dan terealisasi sebesar 53,16 % atau 102,23 persen;

Presentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan pada Tahun 2019 dengan target sebesar 52% dan terealisasi sebesar 53,16% atau 102,23 persen. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur senantiasa menciptakan inovasi pelayanan publik serta mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan hal serupa, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di daerah semakin mudah, cepat, pasti dan dekat, sehingga indikator kinerja ini mencapai target yang direncanakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada Samsat Unggulan juga terus dilakukan setiap tahun untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, terutama melalui pelayanan Samsat Unggulan yang dikenal memiliki kelebihan mudah, cepat, pasti dan dekat dengan masyarakat.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 55.125.107.531,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.387.593.818,00 atau 93,22 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 55.125.107.531,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.387.593.818,00 atau 93,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 44.518.014.042,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.286.349.587,00 atau 90,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 29.620.188.442,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.759.862.851,00 atau 93,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 257 Paket dan realisasi sebesar 111 Paket. (43,19 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 14.897.825.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.526.486.736,00 atau 84,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 241 Paket dan realisasi sebesar 288 Paket. (119,50 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 12.322.848.024,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.020.730.222,00 atau 81,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.355.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.325.672.970,00 atau 98,73%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 676 Kali dan realisasi sebesar 676 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.967.248.024,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.695.057.252,00 atau 77,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 7 Orang dan realisasi sebesar 7 Orang. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 1070 orang dan realisasi sebesar 1070 Orang. (100 %)

- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.190.317.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.013.932.062,00 atau 85,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 723.517.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 679.742.562,00 atau 93,95%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 191.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 185.318.000,00 atau 96,87%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 10,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 4 paket dan realisasi sebesar 4 paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 265.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 147.871.500,00 atau 55,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 13 Dokumen dan realisasi sebesar 13 Dokumen. (100 %)

5) Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.993.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.708.976.963,00 atau 85,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Rencana Target Pendapatan Asli Daerah dengan target 14.916.600.000.000,00 Rupiah dan realisasi 15.553.594.880.078,00 Rupiah. (104,27 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 928.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 901.466.413,00 atau 97,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil analisa potensi PAD dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.803.200,00 atau 88,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil penetapan dan distribusi target PAD dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

3. Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 48.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.749.850,00 atau 32,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil kegiatan rekonsiliasi dengan target sebesar 12 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (100 %)

4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 965.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 746.957.500,00 atau 77,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah software pendukung layanan dengan target sebesar 5 Paket dan realisasi sebesar 5 Paket. (100 %)

6) Program Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.836.890.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.723.618.030,00 atau 96,01 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan target 14.892.800.000.000,00 Rupiah dan realisasi 15.522.197.138.433,00 Rupiah. (104,23 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Intensifikasi Penerimaan PKB & BBNKB dengan anggaran sebesar Rp. 2.473.162.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.378.236.338,00 atau 96,16%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan PKB & BBNKB dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 10 dokumen. (100 %)

2. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 363.728.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 345.381.692,00 atau 94,96%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah lainnya dengan target sebesar 14 dokumen dan realisasi sebesar 12 dokumen. (85,71 %)

7) Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan

dengan anggaran sebesar Rp. 1.223.994.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.167.834.316,00 atau 95,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan dengan target 23.800.000.000 Rupiah dan realisasi 31.397.741.645 Rupiah. (106,52 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 481.894.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.923.622,00 atau 95,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen hasil penggalan potensi objek retribusi daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- Jumlah laporan monitoring lelang kayu hasil hutan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

2. Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak dengan anggaran sebesar Rp. 96.762.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 84.056.194,00 atau 86,87%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan monitoring bagi hasil pajak dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

3. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat dengan anggaran sebesar Rp. 79.242.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.897.740,00 atau 98,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil kegiatan sosialisasi teknis regulasi penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21 dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
4. Pelaksanaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 566.096.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 546.956.760,00 atau 96,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan kegiatan bagi hasil bukan pajak dan pendapatan daerah lainnya dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- 8) Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.221.049.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.168.358.652,00 atau 98,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Persentase Layanan yang Bersertifikat dengan target 92 % dan realisasi 92 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

 1. Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan dengan anggaran sebesar Rp. 56.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.020.000,00 atau 99,50%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi dengan target sebesar 2 dokumen/sertifikat dan realisasi sebesar 2 dokumen/sertifikat. (100 %)
 2. Sosialisasi Hasil Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.164.749.050,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.112.338.652,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi dengan target sebesar 10 dokumen dan realisasi sebesar 9 dokumen. (90 %)
- 9) Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.337.016.070,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.101.307.700,00 atau 89,91 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Persentase Penurunan Temuan SPI dengan target 5 % dan realisasi 9,93 %. (98,6 %)

Indikator Program Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan dengan anggaran sebesar Rp. 448.496.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 416.742.300,00 atau 92,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan evaluasi hasil kegiatan monitoring survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen laporan kinerja dengan target sebesar 70 dokumen dan realisasi sebesar 70 dokumen. (100 %)
2. Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 933.827.890,00 dan terealisasi sebesar Rp. 818.223.550,00 atau 87,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil pengendalian pendapatan daerah dengan target sebesar 70 dokumen dan realisasi sebesar 70 dokumen. (100 %)
3. Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dengan anggaran sebesar Rp. 954.692.180,00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.341.850,00 atau 90,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi dengan target sebesar 70 dokumen dan realisasi sebesar 70 dokumen. (100 %)

10) Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.891.688.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.535.435.359,00 atau 81,17 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Jawa Timur dengan target 36 jam/tahun dan realisasi 35 jam/tahun. (97,22 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Sinergitas Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal dengan anggaran sebesar Rp. 57.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.081.600,00 atau 95,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa teknologi informasi dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
2. Workshop Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 66.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.646.600,00 atau 83,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan hasil kegiatan bimtek sumberdaya aparatur bidang teknologi informasi dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
- 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.767.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.424.707.159,00 atau 80,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pemeliharaan jaringan dengan target sebesar 35 Paket dan realisasi sebesar 35 Paket. (100 %)
 - Jumlah pengadaan sarana pendukung dengan target sebesar 17 Paket dan realisasi sebesar 17 Paket. (100 %)

11) Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi

Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 64.116.252.205,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.978.443.361,00 atau 96,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur dengan target 3.120.999.000.000 Rupiah dan realisasi 2.801.280.984.040 Rupiah. (89,76 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan dengan target 2.963.555.000.000 Rupiah dan realisasi 3.024.835.854.995 Rupiah. (102,07 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat dengan target 634.166.000.000 Milyar Rupiah dan realisasi 702.025.795.465 Milyar Rupiah. (110,70 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara dengan target 632.191.000.000 Rupiah dan realisasi 680.678.383.241 Rupiah. (107,67 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto dengan target 348.741.000.000 Rupiah dan realisasi 386.746.849.260 Rupiah. (110,90 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo dengan target 957.131.000.000 Rupiah dan realisasi 1.046.597.490.828 Rupiah. (109,35 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik dengan target 411.311.000.000 Rupiah dan realisasi 452.068.617.530 Rupiah. (109,91 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang dengan target 249.753.000.000 Rupiah dan realisasi 277.656.576.255 Rupiah. (111,17 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro dengan target 198.541.000.000 Rupiah dan realisasi 221.419.128.900 Rupiah. (111,52 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban dengan target 209.908.500.000 Rupiah dan realisasi 230.606.132.678 Rupiah. (109,86 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan dengan target 224.598.500.000 Rupiah dan realisasi 249.681.755.120 Rupiah. (111,17 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi dengan target 136.841.500.000 Rupiah dan realisasi 150.422.503.315 Rupiah. (109,92 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun dengan target 222.690.000.000 Rupiah dan realisasi 245.870.052.905 Rupiah. (110,41 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan dengan target 138.254.000.000 Rupiah dan realisasi 151.936.059.440 Rupiah. (109,90 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo dengan target 179.152.000.000 Rupiah dan realisasi 196.075.884.650 Rupiah. (109,45 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan dengan target 58.781.000.000 Rupiah dan realisasi 63.766.169.240 Rupiah. (108,48 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri dengan target 468.713.500.000 Rupiah dan realisasi 506.021.043.180 Rupiah. (107,96 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung dengan target 283.591.000.000 Rupiah dan realisasi 308.185.456.468 Rupiah. (108,67 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek dengan target 112.817.000.000 Rupiah dan realisasi 124.012.516.020 Rupiah. (109,92 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk dengan target 198.035.500.000 Rupiah dan realisasi 221.617.203.820 Rupiah. (111,91 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota dengan target 436.134.000.000 Rupiah dan realisasi 473.541.114.150 Rupiah. (108,58 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan dengan target 280.692.500.000 Rupiah dan realisasi 312.640.156.335 Rupiah. (111,38 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota dengan target 293.714.000.000 Rupiah dan realisasi 324.923.951.170 Rupiah. (106,63 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar dengan target 316.182.500.000 Rupiah dan realisasi 349.754.629.355 Rupiah. (110,62 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo dengan target 209.948.000.000 Rupiah dan realisasi 234.632.801.836 Rupiah. (111,76 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang dengan target 141.152.500.000 Rupiah dan realisasi 156.258.872.855 Rupiah. (110,70 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan dengan target 341.901.000.000 Rupiah dan realisasi 374.932.367.658 Rupiah. (109,96 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo dengan target 81.196.000.000 Rupiah dan realisasi 93.308.423.790 Rupiah. (114,92 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember dengan target 324.514.000.000 Rupiah dan realisasi 361.038.338.475 Rupiah. (111,26 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso dengan target 77.271.500.000 Rupiah dan realisasi 89.707.101.540 Rupiah. (116,09 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi dengan target 337.249.000.000 Rupiah dan realisasi 369.645.731.736 Rupiah. (109,61 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan dengan target 93.384.500.000 Rupiah dan realisasi 107.510.185.850 Rupiah. (115,13 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan dengan target 95.796.500.000 Rupiah dan realisasi 105.617.387.565 Rupiah. (110,25 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang dengan target 55.300.000.000 Rupiah dan realisasi 64.448.993.815 Rupiah. (116,54 %)

Indikator Program Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep dengan target 82.393.500.000 Rupiah dan realisasi 94.076.884.860 Rupiah. (114,18 %)

Program tersebut didukung oleh 140 kegiatan.

1. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.153.065.753,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.001.049.762,00 atau 92,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 Sertifikat dan realisasi sebesar 1 Sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 9 Layanan dan realisasi sebesar 9 Layanan. (100 %)
2. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur dengan anggaran sebesar Rp. 44.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
3. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur dengan anggaran sebesar Rp. 75.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.475.000,00 atau 89,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 4. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur dengan anggaran sebesar Rp. 63.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 94,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 5. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.020.236.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.925.283.750,00 atau 95,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 7 layanan dan realisasi sebesar 7 layanan. (100 %)
- 6. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 77.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.225.000,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 7. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.552.500,00 atau 94,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
- 8. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 123.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 123.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

9. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp. 1.617.541.560,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.580.735.319,00 atau 97,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
10. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp. 81.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 77.880.450,00 atau 95,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
11. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp. 50.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.353.000,00 atau 99,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
12. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat dengan anggaran sebesar Rp. 134.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 134.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
13. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara dengan anggaran sebesar Rp. 2.102.831.816,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.037.406.345,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 7 layanan dan realisasi sebesar 7 layanan. (100 %)
14. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara dengan anggaran sebesar Rp. 48.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.634.000,00 atau 98,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
15. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara dengan anggaran sebesar Rp. 59.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.670.000,00 atau 86,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
16. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.600.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
17. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 2.353.744.195,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.256.891.947,00 atau 95,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 10 layanan dan realisasi sebesar 10 layanan. (100 %)
18. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 55.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.642.920,00 atau 98,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
19. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 54.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.843.000,00 atau 99,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

20. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp. 79.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
21. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 2.875.031.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.701.868.767,00 atau 93,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 10 layanan dan realisasi sebesar 10 layanan. (100 %)
22. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 56.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.731.000,00 atau 98,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
23. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 93.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.758.000,00 atau 99,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
24. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.400.000,00 atau 96,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
25. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 1.752.287.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.664.453.257,00 atau 94,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)

- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 10 layanan dan realisasi sebesar 10 layanan. (100 %)
26. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 53.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.615.400,00 atau 99,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
27. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 46.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.036.000,00 atau 98,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
28. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
29. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 1.594.093.505,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.532.058.794,00 atau 96,11%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 9 layanan dan realisasi sebesar 9 layanan. (100 %)
30. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 34.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.490.000,00 atau 95,82%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
31. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 67.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.665.000,00 atau 92,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
32. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang dengan anggaran sebesar Rp. 79.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.650.000,00 atau 99,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
33. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 1.499.546.810,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.425.085.611,00 atau 95,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 8 layanan dan realisasi sebesar 8 layanan. (100 %)
34. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 45.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.885.500,00 atau 97,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
35. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 50.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.325.500,00 atau 99,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
36. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro dengan anggaran sebesar Rp. 78.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.600.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

37. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 1.395.594.899,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.330.025.700,00 atau 95,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
38. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 49.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.588.000,00 atau 99,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
39. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 61.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.125.500,00 atau 99,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
40. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
41. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 1.259.847.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.210.171.764,00 atau 96,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 8 layanan dan realisasi sebesar 8 layanan. (100 %)
42. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 41.670.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.325.000,00 atau 99,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
43. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 50.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.467.000,00 atau 98,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
44. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
45. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 1.404.970.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.373.616.084,00 atau 97,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
46. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 62.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.215.900,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
47. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 104.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.090.000,00 atau 99,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

48. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 74.850.000,00 atau 99,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
49. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 1.905.092.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.881.986.844,00 atau 98,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 Sertifikat dan realisasi sebesar 2 Sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 11 layanan dan realisasi sebesar 11 layanan. (100 %)
50. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 69.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.160.000,00 atau 99,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
51. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 122.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.368.300,00 atau 98,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
52. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
53. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 1.451.044.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.427.176.460,00 atau 98,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)

- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 5 layanan dan realisasi sebesar 5 layanan. (100 %)
54. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 44.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.892.000,00 atau 99,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
55. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 58.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.290.000,00 atau 99,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
56. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.850.000,00 atau 99,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
57. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 1.346.902.696,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.305.515.353,00 atau 96,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
58. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 61.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 58.780.000,00 atau 96,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
59. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 46.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.021.000,00 atau 97,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
60. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo dengan anggaran sebesar Rp. 52.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.300.000,00 atau 95,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
61. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 1.211.860.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.171.972.512,00 atau 96,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 5 layanan dan realisasi sebesar 5 layanan. (100 %)
62. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 47.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.422.900,00 atau 90,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
63. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 48.262.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.855.000,00 atau 99,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
64. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan dengan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

65. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 2.325.160.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.262.925.287,00 atau 97,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 3 sertifikat dan realisasi sebesar 3 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 11 layanan dan realisasi sebesar 11 layanan. (100 %)
66. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 54.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.037.000,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
67. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 145.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 135.734.500,00 atau 93,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
68. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri dengan anggaran sebesar Rp. 107.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.900.000,00 atau 93,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
69. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 1.156.184.572,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.100.222.742,00 atau 95,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 7 layanan dan realisasi sebesar 7 layanan. (100 %)
70. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.011.000,00 atau 97,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
71. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 63.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.697.500,00 atau 97,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
72. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.250.000,00 atau 98,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
73. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 1.336.727.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.292.259.058,00 atau 96,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 7 layanan dan realisasi sebesar 7 layanan. (100 %)
74. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 64.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.726.000,00 atau 98,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
75. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 56.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.351.500,00 atau 98,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

76. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek dengan anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
77. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 1.359.031.308,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.313.760.935,00 atau 96,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
78. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 57.636.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.492.650,00 atau 99,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
79. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 62.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.545.500,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
80. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk dengan anggaran sebesar Rp. 67.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
81. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.532.809.228,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.487.617.687,00 atau 97,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)

- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 5 layanan dan realisasi sebesar 5 layanan. (100 %)
82. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota dengan anggaran sebesar Rp. 46.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.447.500,00 atau 99,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
83. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota dengan anggaran sebesar Rp. 47.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.550.500,00 atau 91,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
84. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
85. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.376.069.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.339.061.360,00 atau 97,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 7 layanan dan realisasi sebesar 7 layanan. (100 %)
86. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 35.744.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.724.000,00 atau 99,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
87. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 66.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.523.000,00 atau 98,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
88. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
89. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.697.956.256,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.657.279.238,00 atau 97,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 9 layanan dan realisasi sebesar 9 layanan. (100 %)
90. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota dengan anggaran sebesar Rp. 57.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.211.800,00 atau 99,89%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
91. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota dengan anggaran sebesar Rp. 109.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 108.181.000,00 atau 99,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
92. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota dengan anggaran sebesar Rp. 34.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

93. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 1.639.710.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.609.740.606,00 atau 98,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 11 layanan dan realisasi sebesar 11 layanan. (100 %)
94. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 30.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.390.000,00 atau 92,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
95. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.728.000,00 atau 96,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
96. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar dengan anggaran sebesar Rp. 68.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 68.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
97. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 1.932.277.295,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.878.629.889,00 atau 97,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 8 layanan dan realisasi sebesar 8 layanan. (100 %)
98. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 54.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.300.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
99. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 108.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.576.000,00 atau 99,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
100. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp. 52.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.800.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
101. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 1.400.809.157,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.352.884.630,00 atau 96,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
 - Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
102. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 79.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.800.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
103. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 52.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.909.500,00 atau 99,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

104. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang dengan anggaran sebesar Rp. 79.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 79.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
105. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 2.192.098.925,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.128.071.495,00 atau 97,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 10 layanan dan realisasi sebesar 10 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
106. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 39.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.267.600,00 atau 99,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
107. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 111.462.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.465.500,00 atau 96,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
108. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
109. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 1.237.522.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.215.023.092,00 atau 98,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 4 layanan dan realisasi sebesar 4 layanan. (100 %)

- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
110. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 33.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.187.000,00 atau 99,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
111. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 50.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.997.500,00 atau 99,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
112. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo dengan anggaran sebesar Rp. 82.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 82.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
113. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 2.107.787.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.966.882.923,00 atau 93,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 10 layanan dan realisasi sebesar 10 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
114. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 54.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 54.850.000,00 atau 99,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
115. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 151.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 140.825.000,00 atau 92,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
116. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember dengan anggaran sebesar Rp. 117.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 104.200.000,00 atau 88,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
117. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 1.174.194.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.134.331.491,00 atau 96,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 5 layanan dan realisasi sebesar 5 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
118. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 60.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.825.000,00 atau 99,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
119. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 58.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 57.997.500,00 atau 99,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
120. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso dengan anggaran sebesar Rp. 86.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

121. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 1.738.933.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.687.144.406,00 atau 97,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 11 layanan dan realisasi sebesar 11 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 2 sertifikat dan realisasi sebesar 2 sertifikat. (100 %)
122. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 34.800.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
123. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 111.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.867.400,00 atau 96,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
124. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 86.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
125. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 1.284.852.736,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.259.900.814,00 atau 98,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 5 layanan dan realisasi sebesar 5 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
126. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 22.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.987.000,00 atau 96,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
127. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 48.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.316.500,00 atau 99,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
128. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 63.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.450.000,00 atau 99,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
129. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 1.263.421.024,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.227.173.957,00 atau 97,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 6 layanan dan realisasi sebesar 6 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
130. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 45.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.618.000,00 atau 99,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
131. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 45.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.256.500,00 atau 99,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

132. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan dengan anggaran sebesar Rp. 69.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 68.850.000,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
133. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 1.036.971.739,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.024.324.502,00 atau 98,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 4 layanan dan realisasi sebesar 4 layanan. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
134. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 38.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.400.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
135. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 44.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.386.500,00 atau 99,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
136. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang dengan anggaran sebesar Rp. 55.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 55.200.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
137. Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 1.293.386.406,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.261.727.160,00 atau 97,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dengan target sebesar 4 sertifikat dan realisasi sebesar 4 sertifikat. (100 %)

- Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan dengan target sebesar 1 sertifikat dan realisasi sebesar 1 sertifikat. (100 %)
138. Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 64.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.475.300,00 atau 99,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
139. Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 47.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.441.700,00 atau 99,04%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
140. Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep dengan anggaran sebesar Rp. 118.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 118.800.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak optimal, sehingga tidak dapat memenuhi target pada APBD. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM), turun Rp 300/liter untuk jenis solar dan hampir Rp 2.500/liter untuk seluruh jenis BBM apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Berikutnya adalah melonjaknya konsumsi BBM jenis premium hingga 300%, sehingga pertumbuhan volume konsumsi BBM ada pada jenis dengan harga jual rendah dan tidak cukup optimal untuk meningkatkan penerimaan PBBKB.
- 2) Penerimaan Pajak Rokok belum mencapai target karena:
 - Pemotongan langsung bagian Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk bagian bulan Desember 2018 dan Triwulan I 2019.
 - Penerimaan Cukai Nasional yang cenderung turun pada tahun 2019, sehingga penerimaan Pajak Rokok bagian bulan Oktober, November 2019 jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2018

- 3) Belanja langsung yang terealisasi sebesar 92,83%, kurang optimalnya realisasi belanja tersebut disebabkan karena pembatalan beberapa paket kegiatan serta sisa mati anggaran pelaksanaan konstruksi yang tidak dapat digunakan kembali.

Solusi :

- 1) Mengevaluasi faktor-faktor yang mengakibatkan belum tercapainya penerimaan dari sektor PBBKB yang optimal dengan cara menghitung kembali penetapan target penerimaan dengan memperhatikan kondisi minyak dunia yang berpengaruh pada fluktuasi harga jual BBM yang terjadi pada tahun depan.
- 2) Menghitung kembali penetapan target sektor Pajak Rokok di tahun depan secara cermat, terukur dan rasional serta memperhatikan proyeksi penerimaan Cukai Nasional yang mempengaruhi penerimaan Pajak Rokok, hal ini karena pada tahun 2020 pemerintah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 21,56%.
- 3) Melakukan tinjauan atas pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak optimal serta melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa secara cermat, untuk dijadikan dasar dalam rencana penganggaran kebutuhan belanja kegiatan tahun berikutnya dan menghindari pembatalan pengadaan barang dan jasa.

e. Penghargaan Nasional

- 1) Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (KB. Samsat) Jombang.
- 2) Top 25 Samsat Srikandi Jember dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur tahun 2019.

4.4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. Tujuan

Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur	Rasio kemampuan keuangan daerah	55	57,77	105
	Persentase OPD yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual	90 %	94,68 %	105
	Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat	22,76 %	25 %	109,8
	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	98,92 %	98,74 %	99,8

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu :

- Indikator Sasaran Rasio kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar 55 dan terealisasi sebesar 57,77 atau 105 persen;
Rasio kemampuan keuangan daerah diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar Rp.19.330.207.614.556,13 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.33.458.291.457.136,77. Sehingga PAD dibanding Pendapatan Daerah sebesar 57,77. Pelampauan dari PAD berasal dari :
 - a. Pajak daerah terealisasi sebesar Rp.15.522.197.138.433,00 atau 104,23%;
 - b. Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.146.813.124.226,84 atau 105,02%;

- c. Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp.3.258.898.745.768,01 atau 117,75%. Terdiri dari :
- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp.1.020.872.250,00 atau 95,59% ;
 - 2) Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.53.269.095.212,61 atau 127,74% ;
 - 3) Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp.400.492.141.138,44 atau 187,72% ;
 - 4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terealisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau 100% ;
 - 5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp.4.405.835.231,17, awalnya tidak ditargetkan ;
 - 6) Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp.5.987.455.380,00, awalnya tidak ditargetkan ;
 - 7) Pendapatan Denda Retribusi terealisasi sebesar Rp.33.368.101,00, awalnya tidak ditargetkan ;
 - 8) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan terealisasi sebesar Rp.466.507.605,00, awalnya tidak ditargetkan;
 - 9) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp.78.159.257.123,22, awalnya tidak ditargetkan ;
 - 10) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp.3.493.251.739,94 atau 80,57% ;
 - 11) Pendapatan Sewa terealisasi sebesar Rp.7.339.149.668,50 atau 101,50% ;
 - 12) Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa terealisasi sebesar Rp.3.705.492,00, awalnya tidak ditargetkan ;
 - 13) Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.2.677.667.296.259,24 atau 107,99% ;
 - 14) Penerimaan Lain-Lain terealisasi sebesar Rp.26.558.810.566,89 atau 129,32%.
- Indikator Sasaran Persentase OPD yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 % dan terealisasi sebesar 94,68 % atau 105 persen;
Persentase OPD yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 88,68 persen dari

target 90 persen atau mencapai 98,5 persen. Pada dasarnya semua OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, hanya saja terdapat 5 (lima) OPD yang belum memenuhi pokok-pokok penilaian menerapkan akuntansi akrual. Pokok-pokok penilaian penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu :

- a. Saldo Awal yang bersumber dari Impor Database Tahun Lalu
- b. Rincian belanja E-Budgetting dari BLUD
- c. Pengecekan atas kesamaan nilai Kas pada BP/BPP dan BPn/BPnP dengan dokumen pendukung
- d. Pengecekan pengakuan Utang Belanja di neraca saldo dengan BP41
- e. Laporan Stock Opname Persediaan diterima oleh Fungsi Akuntansi SKPD setiap bulan
- f. Pengakuan Mutasi Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya dilakukan setiap bulan
- g. Beban Akumulasi Penyusutan Aset Tetap / Aset Lainnya dilakukan setiap bulan

Sehingga jumlah OPD yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) OPD dari 94 (sembilan puluh empat) OPD, sementara sisanya masih terdapat permasalahan dalam penerapannya.

- Indikator Sasaran Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat pada tahun 2019 dengan target sebesar 22,76 % dan terealisasi sebesar 25 % atau 109,8 persen; Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 25 persen dari target 22,76 persen atau mencapai 109,8 persen. Luas tanah yang bersertifikat sampai dengan Tahun Anggaran 2019 seluas 23.630.850 m² dari total tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 94.374.042 m² yang terdiri dari tanah matang, tanah jalan dan tanah saluran, sehingga masih terdapat selisih seluas 70.743.192 m², yang secara bertahap setelah dokumen persyaratannya lengkap akan dilakukan percepatan sertifikasi
- Indikator Sasaran Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan pada tahun 2019 dengan target

sebesar 98,92 % dan terealisasi sebesar 98,74 % atau 99,8 persen; Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan Tahun Anggaran 2019 untuk sewa, pinjam pakai untuk instansi lain dan digunakan oleh instansi pengelola sebesar 98,74 persen dari target 98,92 persen atau mencapai 99,8 persen. Secara keseluruhan jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan sebanyak 13.330 bidang dari total jumlah aset tetap tanah dan bangunan sebanyak 13.500 bidang atau 98,74 persen. Selisih pemanfaatan aset sebanyak 170 bidang atau 0,18 % dikarenakan merupakan aset mangkrak yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara optimal oleh OPD.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 9.655.696.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.833.841.716,00 atau 91,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 9.655.696.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.833.841.716,00 atau 91,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100%. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 14.355.711.850,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.175.814.478,00 atau 91,78 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 9.021.365.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.182.978.043,00 atau 90,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)
- 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.334.346.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.992.836.435,00 atau 93,60%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.857.133.184,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.718.647.320,00 atau 95,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.857.133.184,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.718.647.320,00 atau 95,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 125 Orang dan realisasi sebesar 125 Orang. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 5 Orang dan realisasi sebesar 55 Orang. (1100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.544.592.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.476.216.473,00 atau 97,31 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.998.213.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.957.954.931,00 atau 97,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 306.647.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 281.110.380,00 atau 91,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 239.732.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 237.151.162,00 atau 98,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 13 dokumen dan realisasi sebesar 13 dokumen. (100 %)

- 5) Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur** dengan anggaran sebesar Rp. 5.225.407.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.952.600.400,00 atau 94,78 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Penjabaran tentang APBD dan PAPBD dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran I dengan anggaran sebesar Rp. 1.072.339.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.062.412.500,00 atau 99,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran II dengan anggaran sebesar Rp. 2.078.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.043.292.400,00 atau 98,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Perubahan APBD dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100%)
3. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD Subbidang Anggaran III dengan anggaran sebesar Rp. 2.074.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.846.895.500,00 atau 89,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Raperda APBD dan P-APBD dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100%)

6) Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.285.399.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.110.159.192,00 atau 94,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD serta Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas (Dokumen) dengan target 10 Dokumen dan realisasi 10 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penataan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.144.682.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.080.485.007,00 atau 94,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah draft Laporan Posisi Kas, Saldo Kas dan Aliran Kas dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

2. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan II dengan anggaran sebesar Rp. 1.151.457.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.065.665.375,00 atau 92,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)

3. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD Sub Bidang Perbendaharaan III dengan anggaran sebesar Rp. 989.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 964.008.810,00 atau 97,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah draft Dokumen SP2D, Gaji, UP, GU, TU, LS, SKPP dan SPD dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100 %)

7) Program Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.310.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.869.884.065,00 atau 91,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Dokumen Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penyusunan Kebijakan / Pelaporan di Bidang Penerimaan Daerah dan PPK-BLUD dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 859.806.900,00 atau 85,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Kebijakan / Pelaporan terkait dengan PPK-BLUD dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
2. Penyelenggaraan dan Perumusan Kebijakan Akuntansi dengan anggaran sebesar Rp. 1.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.289.730.186,00 atau 94,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Kebijakan / Sistem Akuntansi / Pelaporan Berbasis Akrual Pemerintah Daerah dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 2.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.720.346.979,00 atau 92,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

8) Program Pengelolaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.735.427.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.440.104.500,00 atau 94,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah dokumen neraca aset daerah Provinsi Jawa Timur dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Sertifikasi Aset Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.064.303.940,00 atau 95,88%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sertipikat aset tetap tanah dengan target sebesar 100 Sertifikat dan realisasi sebesar 52 Sertifikat. (52 %)
2. Pendayagunaan Aset Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.077.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.025.718.300,00 atau 95,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah luas aset yang disewa dengan target sebesar 130.000 meter persegi dan realisasi sebesar 130.000 meter persegi. (100 %)

3. Penyelenggaraan Tata Kelola Aset / Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.548.427.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.350.082.260,00 atau 94,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

9) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.436.675.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.105.398.853,00 atau 95,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah sumber daya aparatur yang bersertifikat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah (sertifikat) dengan target 360 Orang dan realisasi 640 Orang. (177,78 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pelayanan Klinik Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 608.184.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 569.796.499,00 atau 93,69%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sumber daya manusia yang terlayani secara langsung dan tidak langsung (online) dengan target sebesar 200 orang dan realisasi sebesar 193 orang. (96,50 %)
2. Bimbingan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.310.634.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.294.344.017,00 atau 98,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah sumber daya aparatur sipil negara pemerintah daerah yang dilatih dan didampingi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan target sebesar 360 orang dan realisasi sebesar 640 orang. (177,78 %)
3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.517.857.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.241.258.337,00 atau 94,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase sarana dan prasarana Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah yang layak fungsi dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

10) Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.002.921.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.988.447.970,00 atau 99,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.002.921.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.988.447.970,00 atau 99,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi sistem informasi keuangan daerah dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

11) Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.878.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.877.996.045,00 atau 99,97 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Draft SK Gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim dengan target 114 Dokumen dan realisasi 114 Dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 941.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 940.847.605,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I dengan target sebesar 13 Kab/kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II dengan target sebesar 13 Kab/Kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan

Wilayah III dengan target sebesar 12 Kab/Kota dan realisasi sebesar 12 Kab/Kota. (100 %)

2. Analisa dan Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang APBD kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.193.237.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.193.132.580,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I dengan target sebesar 13 Kab/kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II dengan target sebesar 13 Kab/Kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III dengan target sebesar 12 Kab/Kota dan realisasi sebesar 12 Kab/Kota. (100 %)
3. Analisa dan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 744.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 744.015.860,00 atau 99,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan Perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I dengan target sebesar 13 Kab/kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan Perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II dengan target sebesar 13 Kab/Kota dan realisasi sebesar 13 Kab/Kota. (100 %)
 - Jumlah Kab/Kota yang rancangan Perubahan APBD nya telah di evaluasi Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III dengan target sebesar 12 Kab/Kota dan realisasi sebesar 12 Kab/Kota. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Sertifikasi aset tetap tanah tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Implementasi aplikasi penatausahaan keuangan yang belum optimal;

- 3) Implementasi penandatanganan digital pada aplikasi penatausahaan keuangan banyak mengalami perubahan akibat adanya mutasi pejabat yang disertifikasi;
- 4) Jadwal pelaksanaan bimtek yang tersusun selama 1 tahun anggaran tidak bisa dipastikan karena banyaknya peserta pelatihan yang mendaftar/mengundurkan diri;

Solusi :

- 1) Sebelum mengajukan usulan pensertifikatan, perlu dilakukan rekon data antara Bidang Aset dengan pihak-pihak terkait serta melakukan identifikasi dan penyempurnaan tata kelola aset
- 2) Untuk dilakukan sosialisasi dan bimtek yang berkesinambungan serta perlu adanya pendampingan kepada para pengguna/operator aplikasi penatausahaan keuangan
- 3) .Melakukan sertifikasi ulang tanda tangan digital pada aplikasi penatausahaan keuangan bagi pejabat yang mengalami mutasi jabatan
- 4) .Perlu disiapkan peserta alternatif dari SKPD sehingga jadwal yang sudah ada tetap dapat dilaksanakan

e. Penghargaan Nasional

Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



4.5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh Badan Kepegawaian Jawa Timur Provinsi Jawa Timur mengacu pada isu-isu dan analisis strategis terkait dengan misi yang ke 4 (empat) Gubernur Jawa Timur (percepatan reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik) , yaitu:

- 1) Mewujudkan penataan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan prilaku yang sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi;
- 3) Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur	Persentase pegawai ASN yang tertata sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	98 %	99,59 %	101,62
Meningkatnya Kuallitas Data Pegawai ASN yang Akurat	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian	100 %	99,4 %	99,4
Meningkatnya Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Mengikuti Uji Kompetensi dan Lulus	97 %	97,17 %	100,18
Meningkatnya Profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	100 %	99,35 %	99,35
	Indeks Profesionalitas Pegawai	89 Nilai	82 Nilai	92,13

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase pegawai ASN yang tertata sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi pada tahun 2019 dengan target sebesar 98 % dan terealisasi sebesar 99,59 % atau 101,62 persen;

Pada Tahun 2019 menargetkan 98% dari total seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan realisasinya sebesar 49.412 pegawai (terdiri dari Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas ,fungsional dan pelaksana) atau sebesar 99.59% dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhir Tahun 2019 dengan realisasi capaian sebesar 101,62% yang artinya melampaui target yang ditetapkan dikarenakan penempatan formasi jabatan sudah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Data Pegawai ASN yang Akurat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase tingkat akurasi database kepegawaian pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 99,4 % atau 99,4 persen;

Pada tahun 2019 dari target 100% terealisasi sebesar 99,4% dengan capaian 99,4% yang artinya belum memenuhi target dikarenakan belum keseluruhan pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan validasi data yang akurat dikarenakan masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran ASNn terhadap updating data kepegawaian

Sasaran 3 : Meningkatnya Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Mengikuti Uji Kompetensi dan Lulus pada tahun 2019 dengan target sebesar 97 % dan terealisasi sebesar 97.17 % atau 100.18 persen;

Pada Tahun 2019, ASN yang mengikuti Uji Kompetensi sebanyak 212 pegawai yaitu Uji Kompetensi Seleksi Pembina sebanyak 26 Pegawai, Uji Kompetensi Pindah Jabatan sebanyak 109 Pegawai dan Ujian Dinas Tingkat I sebanyak 75 Pegawai. Dari keseluruhan Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi tersebut, yang tidak lulus (tidak kompeten) sebanyak 6 pegawai, sehingga Pegawai yang lulus uji kompetensi sebanyak 206 pegawai atau sebesar 97,17% dengan capaian 100,18%, yang artinya melampaui target yang ditetapkan.

.

Sasaran 4 : Meningkatnya Profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Mempunyai nilai SKP (minimal) Baik pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 99,35 % atau 99,35 persen;
Pada tahun 2019 target sebesar 100%, adapun realisasinya adalah sebanyak 43.431 pegawai atau sebesar 99,35%. Dengan realisasi capaian sebesar 99,35% yang artinya belum memenuhi target dikarenakan masih terdapat Pegawai ASN belum melakukan update SKP sebanyak 6.424 pegawai (data rekap SKP e-Master 2019).
- Indikator Sasaran Indeks Profesionalitas Pegawai pada tahun 2019 dengan target sebesar 89 Nilai dan terealisasi sebesar 82 Nilai atau 92,13 persen;

Catatan nilai standar IPP adalah 76, jika kurang dari 76, dinyatakan belum profesional, jika lebih dari 76 dinyatakan profesional.

Pada Tahun 2019 nilai IP ASN sebesar 82, yang artinya ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinyatakan Profesional karena nilainya diatas 76. Adapun target yang belum terpenuhi dikarenakan pengembangan kompetensi ASN belum menyeluruh ke seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 4.016.274.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.808.735.537,00 atau 94,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.016.274.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.808.735.537,00 atau 94,83%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 7.267.665.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.208.383.719,00 atau 99,18 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.017.034.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.011.206.896,00 atau 99,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 135 Paket/Unit dan realisasi sebesar 135 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.250.631.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.197.176.823,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 135 Paket/Unit dan realisasi sebesar 135 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.492.937.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.454.932.580,00 atau 98,48 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.211.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.182.850.485,00 atau 97,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 65 kali dan realisasi sebesar 65 kali. (100 %)
- 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.281.277.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.272.082.095,00 atau 99,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 60 Orang dan realisasi sebesar 225 Orang. (375 %)
 - Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 155 Orang. (103,33 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 378.540.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 377.375.517,00 atau 99,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 122.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 121.985.725,00 atau 99,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 9 dokumen dan realisasi sebesar 9 dokumen. (100 %)
 2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 143.165.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.771.667,00 atau 99,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 112.985.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.618.125,00 atau 99,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun dengan target sebesar 14 dokumen dan realisasi sebesar 14 dokumen. (100 %)

5) Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.603.203.010,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.501.798.748,00 atau 93,67 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik dengan target 49142 pegawai dan realisasi 43431 pegawai. (88.4 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penegakan Disiplin dengan anggaran sebesar Rp. 549.263.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 529.973.316,00 atau 96,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan kegiatan Penegakan Disiplin dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
- Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai dalam 1 (satu) Tahun dengan target sebesar 5 % dan realisasi sebesar 0.03 %. (0.6 %)
- Persentase Kehadiran Pegawai tepat waktu selama 1 (satu) Tahun dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 95 %. (95 %)

2. Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 718.670.610,00 dan terealisasi sebesar Rp. 649.211.244,00 atau 90,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Kesejahteraan Aparatur dan Penilaian Kinerja dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
- Persentase Pemberian Penghargaan Tanda Jasa bagi Pegawai ASN dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

3. Pemberdayaan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 335.268.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 322.614.188,00 atau 96,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan ASN dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
- Jumlah Peserta Pembekalan bagi pegawai ASN menjelang masa purna tugas dengan target sebesar 40 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (250 %)

6) Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri dengan anggaran sebesar Rp. 6.494.376.990,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.263.108.788,00 atau 96,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri dengan target 90 % dan realisasi 89 %. (98,89 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penguatan Jiwa Korsa dengan anggaran sebesar Rp. 5.931.406.990,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.780.014.650,00 atau 97,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Laporan Rangkaian HUT KORPRI dengan target sebesar 5 laporan dan realisasi sebesar 5 laporan. (100 %)
- Jumlah Laporan Paduan Suara dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
- Jumlah Laporan Pelatihan PASKIBRAKA dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)

2. Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri dengan anggaran sebesar Rp. 562.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 483.094.138,00 atau 85,81%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Fasilitasi Penanganan Perkara Anggota KORPRI yang bermasalah hukum dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 0 %. (0 %)
- Jumlah Laporan Advokasi Hukum dan Penanganan Perkara Anggota KORPRI dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
- Jumlah Bantuan Peralatan Sekolah bagi Putra Putri Keluarga Anggota KORPRI dengan target sebesar 35 orang dan realisasi sebesar 50 orang. (142,86 %)

7) Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.820.912.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.125.699.978,00 atau 75,36 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi dengan target 98 % dan realisasi 99.59 %. (101.62 %)

- Indikator Program IKM Pelayanan Kepegawaian dengan target 86 % dan realisasi 86,5 . (100,58 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 1.445.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 962.964.928,00 atau 66,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase Rekomendasi Pejabat Struktural Hasil Evaluasi Tim Baperjakat dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
- Persentase Pengisian Jabatan Lowong Secara Terbuka dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 0 %. (0 %)
- Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2. Pelayanan kenaikan pangkat dengan anggaran sebesar Rp. 775.522.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 656.503.690,00 atau 84,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 84 % dan realisasi sebesar 83,5 %. (99,4 %)

3. Pelayanan pensiun dan perpindahan dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 506.231.360,00 atau 84,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi dengan target sebesar 90 % dan realisasi sebesar 86 %. (95,56 %)
- IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 84 % dan realisasi sebesar 90,9 %. (108,21 %)

- 8) **Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN** dengan anggaran sebesar Rp. 4.425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.304.775.814,00 atau 97,28 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dengan target 100 % dan realisasi 99,2 %. (99,20 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 480.454.968,00 atau 96,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase database kepegawaian yang lengkap dan akurat dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 99,2 . (99,2 %)
2. Perencanaan kepegawaian dan formasi dengan anggaran sebesar Rp. 533.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 527.824.459,00 atau 98,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)
3. Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN dengan anggaran sebesar Rp. 3.391.641.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.296.496.387,00 atau 97,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan non ASN dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
 - Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
 - Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)
 - Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai ASN dan Non ASN dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 94 %. (94 %)

- 9) **Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)** dengan anggaran sebesar Rp. 3.123.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.454.742.558,00 atau 78,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi dengan target 97 % dan realisasi 97,17 %. (100,18 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan.

1. Pembinaan Karir dengan anggaran sebesar Rp. 831.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 823.750.362,00 atau 99,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pengembangan karir dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)
 - Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir dengan target sebesar 85 % dan realisasi sebesar 95 %. (111,76 %)
 - Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)
2. Penilaian Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 1.764.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.105.666.450,00 atau 62,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penilaian Kompetensi dengan target sebesar 7 dokumen dan realisasi sebesar 7 dokumen. (100 %)
 - Jumlah dokumen kegiatan Pengembangan kompetensi dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 527.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 525.325.746,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan khususnya bagi Jabatan Pelaksana ;
- 2) Belum memiliki manajemen karir : perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh manajemen talenta ;
- 3) Belum optimalnya kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja ;
- 4) Belum optimalnya Reward and Punishment bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTimur ;
- 5) Belum optimalnya perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- 6) Belum terintegrasinya database kepegawaian (e-Master) dengan Kabupaten / Kota di Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;
- 7) Belum optimalnya fungsi sistem informasi kepegawaian dalam pemberian layanan yang efektif dan efisien ;

- 8) Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan publik (inovasi).
- 9) Pada Program Penataan dan Pelayanan Kegiatan terdapat sub kegiatan Pengisian Jabatan Lowong secara Terbuka yang persentase realisasinya adalah 0% karena sampai akhir Tahun 2019 belum dilaksanakan;
- 10) Pada Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya KORPRI terdapat sub kegiatan Fasilitasi Penanganan PERkara Anggota KORPRI yang bermasalah hukum dengan realisasi 0%, karena selama Tahun 2019 tidak ada anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bermasalah hukum

Solusi :

- 1) Menyusun standar kompetensi bagi jabatan pelaksana bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 2) Merencanakan penyusunan manajemen karir, pengembangan, pola karir di setiap masing-masing jenjang jabatan di masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 3) Pemberian Pengembangan Kompetensi kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan hasil penilaian kinerja.(diklat teknis dan diklat fungsional lainnya);
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 akan melaksanakan Remunerasi sehingga penerapan Reward and Punishment akan terlaksana dengan baik;
- 5) Menyusun perencanaan Formasi Kebutuhan di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan beban kerja di masing-masing Perangkat Daerah;
- 6) Melaksanakan rapat koordinasi dan kerjasama dengan BKD kab/kota se- Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara untuk mengintegrasikan database pegawai melalui sistem informasi kepegawaian.
- 7) Pengisian Jabatan Lowong Dilaksanakan pada tahun 2020.

e. Penghargaan Nasional

- 1) Penghargaan BKN Award Tahun 2019 sebagai Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan Dan Pensiun Kategori Provinsi;



- 2) Penilaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 oleh KASN yaitu memperoleh nilai 270,5 dan indeks 0,67 pada kategori III.



- 3) Juara Umum ke-II di Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI XV/2019 di Kota Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung dengan meraih 5 Medali Emas, 5 Medali Perak, dan 7 medali perunggu.



4.6. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

a. Tujuan

Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya kediklatan yang modern dan professional	Persentase peserta diklat kepemimpinan yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	95 %	98,46 %	103,64
	Persentase peserta diklat prajab/Latsar yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	95 %	99,37 %	104,6
	Persentase peserta diklat teknis yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	95 %	95 %	100
	Persentase peserta diklat fungsional yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	95 %	95 %	100
	Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat	59 %	61,14 %	103,63
	Persentase Alumni yang menerapkan sebagian besar hasil diklat di tempat kerjanya	88 %	97 %	110,23
	Persentase widyaiswara yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi memuaskan, dan sangat memuaskan	83 %	98,15 %	118,25
	Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
	Index kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur	83	79,86	96,22

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya kediklatan yang modern dan professional, ditetapkan 9 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase peserta diklat kepemimpinan yang memperoleh sertifikat kompetensi (*certificate of competence*) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 98,46 % atau 103,64 persen;
- Indikator Sasaran Persentase peserta diklat prajab/Latsar yang memperoleh sertifikat kompetensi (*certificate of competence*) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 99,37 % atau 104,6 persen;
- Indikator Sasaran Persentase peserta diklat teknis yang memperoleh sertifikat kompetensi (*certificate of competence*) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase peserta diklat fungsional yang memperoleh sertifikat kompetensi (*certificate of competence*) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Persentase perkembangan hasil belajar peserta diklat pada tahun 2019 dengan target sebesar 59 % dan terealisasi sebesar 61,14 % atau 103,63 persen;
- Indikator Sasaran Persentase Alumni yang menerapkan sebagian besar hasil diklat di tempat kerjanya pada tahun 2019 dengan target sebesar 88 % dan terealisasi sebesar 97 % atau 110,23 persen;
- Indikator Sasaran Persentase widyaiswara yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi memuaskan, dan sangat memuaskan pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 % dan terealisasi sebesar 98,15 % atau 118,25 persen;

- Indikator Sasaran Persentase hasil audit mutu internal dan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Indikator Sasaran Index kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur pada tahun 2019 dengan target sebesar 83 dan terealisasi sebesar 79,86 atau 96,22 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.167.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.751.554.480,00 atau 91,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 83 dan realisasi 79,86 . (96,22 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.167.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.751.554.480,00 atau 91,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 26.117.848.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.620.480.796,00 atau 90,44 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 15.291.930.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.302.799.964,00 atau 86,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 210 Paket/Unit dan realisasi sebesar 210 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 10.825.917.250,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.317.680.832,00 atau 95,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 320 Paket/Unit dan realisasi sebesar 320 Paket/Unit. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.060.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.855.311.927,00 atau 93,29 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 679.504.640,00 atau 97,07%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.360.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.175.807.287,00 atau 92,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 200 pegawai dan realisasi sebesar 200 pegawai. (100 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 812.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 713.575.494,00 atau 87,88 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 612.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 553.203.314,00 atau 90,39%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.407.380,00 atau 94,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- 3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 56.964.800,00 atau 63,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. (100 %)

5) Program Pengembangan Kompetensi Manajerial SDM Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 22.038.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.232.702.256,00 atau 78,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Manajerial dengan target 2124 Orang dan realisasi 2115 Orang. (99,58 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dengan anggaran sebesar Rp. 1.694.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.587.780.960,00 atau 93,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dengan target sebesar 80 Orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)
2. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pengawas dengan anggaran sebesar Rp. 2.276.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.010.766.600,00 atau 88,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Manajerial Pengawas dengan target sebesar 80 Orang dan realisasi sebesar 80 Orang. (100 %)
3. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Prajabatan dan Kader Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.068.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.634.154.696,00 atau 75,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Prajabatan dan Kader Pemerintah Daerah dengan target sebesar 1964 orang dan realisasi sebesar 1955 orang. (99,54 %)

6) Program Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 9.430.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.805.802.920,00 atau 93,38 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Teknis dengan target 330 Orang dan realisasi 328 Orang. (99,39 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan dengan anggaran sebesar Rp. 1.335.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.256.778.164,00 atau 94,14%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan dengan target sebesar 70 Orang dan realisasi sebesar 70 Orang. (100 %)

2. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 1.823.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.571.743.069,00 atau 86,22%. Dengan indikator kinerja yaitu:

- Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Teknis Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan target sebesar 120 Orang dan realisasi sebesar 120 Orang. (100 %)

3. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 6.272.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.977.281.687,00 atau 95,30%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Pemerintahan Umum dengan target sebesar 140 Orang dan realisasi sebesar 138 Orang. (98,57 %)

7) Program Pengembangan Kompetensi Fungsional SDM Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 3.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.659.968.671,00 atau 92,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah Alumni Diklat Kompetensi Fungsional dengan target 406 Orang dan realisasi 401 Orang. (98,77 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Jabatan Fungsional dengan anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.573.198.173,00 atau 93,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Jabatan Fungsional dengan target sebesar 165 Orang dan realisasi sebesar 160 Orang. (96,97 %)
 - 2. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Sosial Kultural dengan anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.157.662.108,00 atau 90,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Sosial Kultural dengan target sebesar 91 Orang dan realisasi sebesar 91 Orang. (100 %)
 - 3. Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Tenaga Kediklatan dengan anggaran sebesar Rp. 995.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 929.108.390,00 atau 93,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyelenggaraan Diklat Kompetensi Tenaga Kediklatan dengan target sebesar 150 Orang dan realisasi sebesar 150 Orang. (100 %)
- 8) Program Penilaian Kompetensi SDM Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 63.562.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.219.677.857,00 atau 80,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi dengan target 6755 Orang dan realisasi 6738 Orang. (99,75 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan.
1. Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan *Assessment Complex (Job Target)* Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 63.562.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.219.677.857,00 atau 80,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan *Assessment Complex (Job Target)* Aparatur dengan target sebesar 6755 Orang dan realisasi sebesar 6738 Orang. (99,75 %)
- 9) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Sertifikasi Kompetensi** dengan anggaran sebesar Rp. 4.197.282.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.729.110.985,00 atau 88,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Diklat dengan target 15 Dokumen dan realisasi 15 Dokumen. (100 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Evaluasi Diklat dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 985.688.120,00 atau 98,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Evaluasi Diklat dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
2. Pelaksanaan Pengelolaan Pengajaran, Sumber Belajar Diklat dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.671.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 970.740.108,00 atau 79,20%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Pengelolaan Pengajaran, Sumber Belajar Diklat dengan target sebesar 8 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (100 %)
3. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.132.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.048.760.200,00 atau 92,65%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 839.610.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 723.922.557,00 atau 86,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Aparatur dengan target sebesar 115 Orang dan realisasi sebesar 108 Orang. (93,91 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Sebagai organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi antara lain :

- 1) Penyelenggaran diklat aparatur belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kebutuhan yang nyata. Keberadaan Aparatur Sipil Negara di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi, dedikasi dan integritas yang dimiliki dan dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara;

- 2) Masih adanya Kab/kota yang belum memprioritaskan pengembangan kompetensi aparatur dibuktikan dengan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur yang terbatas;
- 3) Belum terstandarnya pelaksanaan pelatihan aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan pelatihan di kabupaten/kota;
- 4) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus pelatihan secara konsisten, terutama tahapan pra pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan;
- 5) Terbatasnya tenaga pengajar untuk pelatihan teknis dan fungsional;
- 6) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menyelenggarakan pelatihan utamanya dalam penyediaan sarana prasarana belum memadai.

Solusi :

- 1) Secara bertahap beberapa pelatihan aparatur sudah mengarah pada kebutuhan yang nyata dan berbasis kompetensi seperti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, III, IV dan Pelatihan Dasar, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional seperti : Pelatihan Fungsional Calon kepala Sekolah, Pelatihan Satpol PP;
- 2) Mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, dalam item 38 bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas

persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- 3) Melakukan evaluasi pengembangan kompetensi/pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola pelatihan Kab/kota melalui Management of Training (MOT) untuk pejabat struktural pengelola pelatihan kab/kota dan Training Officer Course (TOC) untuk petugas pelatihan serta pembinaan dalam pengelolaan pelatihan aparatur;
- 4) Melakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan program pelatihan yang lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka seluruh tahapan dalam pelatihan aparatur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi;
- 5) Memantapkan penyelenggaraan pelatihan dengan bekerjasama dengan instansi teknis untuk menyediakan tenaga pengajar/widyaiswara pelatihan dan melakukan pelatihan bagi aparatur kab/kota khususnya Training Of Trainer (TOT) untuk pelatihant teknis dan pelatihan fungsional;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan di kab/kota se Jawa Timur serta hanya memberikan ijin penyelenggaraan pelatihan yang memenuhi kriteria.

e. Penghargaan Nasional

Penghargaan "A" dari Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah Sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa (LPPBJ) Tahun 2019.

4.7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tujuan

1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
2. Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur

b. Sasaran

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	35 %	89 %	254
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan	40 %	100 %	250
Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Persentase OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	13 %	13,43 %	103
	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	36 %	42,11 %	117

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dengan target sebesar 35 % dan terealisasi sebesar 89 % atau 254 persen;
- Indikator Sasaran Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 40 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 250 persen;

Sasaran 2 : Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur pada tahun 2019

dengan target sebesar 13 % dan terealisasi sebesar 13,43 % atau 103 persen;

- Indikator Sasaran Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur pada tahun 2019 dengan target sebesar 36 % dan terealisasi sebesar 42,11 % atau 117 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.550.626.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.119.600,00 atau 96,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 96,74 %. (96,74 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.550.626.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.119.600,00 atau 96,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Prosentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kantor dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 96,74 . (96,74 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.925.134.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.759.042.840,00 atau 94,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 94,32 %. (94,32 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.867.276.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.731.918.683,00 atau 92,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 22 Paket dan realisasi sebesar 20 Paket. (90,91 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.057.858.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.027.124.157,00 atau 97,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket dan realisasi sebesar 5 Paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.052.034.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 990.895.312,00 atau 94,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 94,19 %. (94,19 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 592.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 564.343.112,00 atau 95,27%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 95 kali dan realisasi sebesar 91 kali. (95,27 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 459.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 426.552.200,00 atau 92,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 14 Orang dan realisasi sebesar 13 Orang. (93,13 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 100 Pegawai dan realisasi sebesar 93 Pegawai. (92,96 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 691.094.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 613.889.297,00 atau 88,83 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 520.499.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 476.632.078,00 atau 91,57%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 87.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 61.590.219,00 atau 70,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 55.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.401.000,00 atau 86,74%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 27.795.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.266.000,00 atau 98,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)
- 5) Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.247.027.000,00 atau 99,87 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Prosentase hasil penelitian pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan target 35 % dan realisasi 91 %. (260 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:
1. Penelitian Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.263.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.260.265.050,00 atau 99,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen penelitian pemerintahan yang dihasilkan dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
 2. Penelitian Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 987.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 986.761.950,00 atau 99,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen penelitian kemasyarakatan yang dihasilkan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

6) Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.208.154.551,00 atau 98,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase hasil penelitian ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh stakeholders dengan target 35 % dan realisasi 92 %. (262 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penelitian Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 1.165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.131.743.641,00 atau 97,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen penelitian ekonomi yang dihasilkan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)
2. Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 1.085.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.076.410.910,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen penelitian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dihasilkan dengan target sebesar 6 Dokumen dan realisasi sebesar 6 Dokumen. (100 %)

7) Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan dengan anggaran sebesar Rp. 4.716.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.533.030.845,00 atau 96,11 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase hasil penelitian dan teknologi terapan yang dapat dikembangkan dengan target 10 % dan realisasi 40 %. (400 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Diseminasi Hasil Penelitian dengan anggaran sebesar Rp. 1.946.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.888.224.748,00 atau 97,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 8 Dokumen. (266,67 %)
 - Jumlah hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan melalui media (website, buletin, jurnal cakrawala) dengan target sebesar 24 Dokumen dan realisasi sebesar 54 Dokumen. (225 %)

- Jumlah hasil litbang serta kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen (100 %).
2. Inovasi Teknologi Terapan dengan anggaran sebesar Rp. 2.770.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.644.806.097,00 atau 95,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi model dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah teknologi terapan yang dapat dikembangkan menjadi model dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 - Jumlah inovasi teknologi unggulan hasil penganugerahan dengan target sebesar 15 Inovasi dan realisasi sebesar 15 Inovasi. (100 %)

8) Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.950.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.776.744.951,00 atau 95,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase OPD Provinsi dan kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah dengan target 13 % dan realisasi 23,81 %. (183 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Kemitraan Kelitbangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.889.719.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.769.319.973,00 atau 93,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kesepakatan yang dihasilkan dengan target sebesar 2 Kesepakatan dan realisasi sebesar 3 Kesepakatan (150 %)
2. Sistem Inovasi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.060.280.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.007.424.978,00 atau 97,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kab/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur dengan target sebesar 12 Kab/Kota dan realisasi sebesar 16 Kab/Kota. (133 %)

- Jumlah OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur dengan target sebesar 4 Instansi dan realisasi sebesar 9 Instansi. (225 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Keterbatasan lingkup kepakaran Fungsional Peneliti sebagai pelaku utama produk Litbang, sehingga belum semua usulan dapat terakomodir
- 2) Belum pahamnya masyarakat maupun stakeholder terkait hasil litbang
- 3) Masih adanya ego sektoral perangkat daerah lain yang menyebabkan belum sinergisnya program antar stakeholder
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder maupun sebagai perencanaan dan kebijakan
- 5) Masih lemahnya implementasi dan pengembangan kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan inovasi daerah
- 6) Kurang sinerginya lembaga, institusi, dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi daerah

Solusi :

- 1) Perlu adanya penambahan formasi fungsional peneliti dengan jenis kepakaran baru dari yang telah ada sebelumnya, agar dapat mengcover kebutuhan penelitian secara lebih luas;
- 2) Membangun image kepada masyarakat dan stakeholder bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan melalui peningkatan dan perencanaan strategi diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kepada stakeholder dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat luas baik melalui website, jurnal dan bulletin dll;
- 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait baik dalam menentukan tema kegiatan litbang maupun dalam pemanfaatan hasil litbang, yakni dengan lebih mengoptimalkan lagi mekanisme penjangkaran usulan kelitbangan dengan stakeholder;
- 4) Untuk mengatasi kendala-kendala terkait pemanfaatan hasil kelitbangan, diperlukan upaya khusus terkait penentuan tema dan topik riset melalui pendekatan berbagai sisi, yaitu: a) Mengacu referensi secara top down, yaitu

dari berbagai sumber yaitu RPJMD, Dokumen Perencanaan, arahan-arahan Kepala Daerah, dan lain sebagainya; b) Memastikan kembali apakah usulan benar-benar bersumber dari Kebutuhan Perangkat Daerah atau hanya berdasarkan usulan perseorangan untuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban (Diketahui dan diusulkan oleh Kepala PD); c) Pemilihan kualitas kegiatan penelitian yang bersifat "terobosan", bersifat lintas sektor dan memiliki dampak meluas atau tidak bisa dilakukan Perangkat Daerah (tidak bersifat rutin dan bukan kegiatan yang sudah menjadi tupoksi PD pengusul terkait); d) Menyusun kembali jadwal/timeline kegiatan penelitian dan pengembangan, agar hasil kelitbangan dapat secara tepat termanfaatkan dan menjadi bahan acuan pada perencanaan periode berikutnya.

- 5) Perlu adanya pemetaan lanjutan atas potensi SIDa di Propinsi Jawa Timur yang mampu untuk mengatasi kelemahan dari segi perencanaan dan implementasi dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada.
- 6) Perlunya pendampingan, sosialisasi, serta pemberian arahan dan motivasi secara simultan dari pemerintah pusat (Provinsi) ke daerah-daerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan keterlibatan lembaga, institusi, dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi daerah

e. Penghargaan Nasional

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi memberikan penganugerahan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai **"BPPD (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi berkinerja utama dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2019"**. Apresiasi diberikan kepada BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai kinerja baik dalam mengimplementasikan pelaksanaan SIDa, dengan cara mengkoordinasikan pelaksanaannya bersama-sama dengan OPD terkait dan aktor-aktor SIDa, antara lain lembaga litbang, Perguruan Tinggi, lembaga pembiayaan inovasi, dan masyarakat pengguna inovasi di daerah. Penghargaan diserahkan pada rangkaian acara Apresiasi Lembaga Litbang 2019 di Auditorium BJ Habibie, Gedung II BPPT Lantai 3 Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

4.8. BADAN PENGHUBUNG

a. Tujuan

1. Meningkatkan fasilitasi promosi potensi daerah
2. Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Penghubung Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek	Persentase kegiatan promosi potensi daerah	100 %	100 %	100
Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah	Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Penghubung yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek , ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kegiatan promosi potensi daerah pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- 1) Terpenuhinya kegiatan pameran UKM PAWARTA Jawa Timur di Jabodetabek pada Tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan : Adanya jadwal kegiatan pameran yang dihapus oleh Pihak TMII karena event tersebut jatuh pada bulan Ramadhan yaitu Pameran Pekan Liburan Sekolah, sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur tidak bisa merealisasikan kegiatan dimaksud didirubah di Perubahan APBD untuk kegiatan pameran yang lain sehingga jumlah kegiatan pameran terpenuhi sesuai perencanaan.
 - 2) Terpenuhinya kegiatan pameran Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta pada Tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan akan tetapi ada sedikit kendala, hal tersebut dikarenakan : Pameran Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

didalam pelaksanaannya, apabila dilaksanakan pada Triwulan I pada bulan Januari dan bulan Februari, banyak kab/kota yang belum terealisasi APBD nya, sehingga kegiatan pada program tersebut baru dilaksanakan pada Triwulan I bulan Maret.

- 3) Terpenuhinya kebutuhan pentas seni budaya Jawa Timur di lingkungan TMII Jakarta pada tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan akan tetapi ada sedikit kendala, hal tersebut dikarenakan :
 - Dalam pelaksanaannya, apabila dilaksanakan pada Triwulan I pada bulan Januari dan bulan Februari, banyak kab/kota yang belum terealisasi APBD nya, sehingga kegiatan pada program tersebut baru dilaksanakan pada Triwulan I bulan Maret.
 - Jadwal kegiatan tersusun pada perencanaan dan dapat terealisasi tanpa hambatan waktu dan kesiapan Tim Kesenian yang pentas, sehingga bisa tercapai tingkat kemajuannya.
- 4) Terpenuhinya kebutuhan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek pada tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan : Semakin tingginya minat masyarakat JABODETABEK terhadap seni budaya Jawa Timur.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek pada tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan akan tetapi ada sedikit kendala, hal tersebut dikarenakan : Terdapat perencanaan perhitungan sewa lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pameran yaitu pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), sehingga anggaran tidak bisa terealisasi dengan maksimal.
- 6) Jumlah Pelatihan Ketrampilan kepada Paguyuban Warga Jakarta Asal Jawa Timur (PAWARTA JATIM) pada tahun 2019, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan : Tingginya minat anggota PAWARTA JATIM untuk mengikuti pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung

Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak ada hambatan yang berarti.

Sasaran 2 : Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;
- Pada prinsipnya tidak ada kendala yang berarti hanya saja pada saat-saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur terkadang tidak mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan, sehingga tidak bisa melayani secara optimal pada Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jawa Timur.

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.414.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.232.262.547,00 atau 96,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 5.414.196.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.232.262.547,00 atau 96,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 11.222.744.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.514.012.990,00 atau 93,68 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 9.589.474.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.930.202.961,00 atau 93,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 134 Paket/Unit dan realisasi sebesar 134 Paket/Unit. (100 %)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.633.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.583.810.029,00 atau 96,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 199 Paket/Unit dan realisasi sebesar 199 Paket/Unit. (100 %)
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 4.256.452.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.036.944.186,00 atau 94,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:
 1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.045.530.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.903.714.519,00 atau 95,34%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah konsultasi kelembagaan pemerintah daerah dengan target sebesar 240 Kali dan realisasi sebesar 240 Kali. (100 %)
 2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.210.922.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.133.229.667,00 atau 93,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan formal/non formal dengan target sebesar 20 orang dan realisasi sebesar 20 orang. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 60 orang dan realisasi sebesar 60 orang. (100 %)
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp.

907.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 778.446.081,00 atau 85,74 %.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 121.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.901.970,00 atau 71,35%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan dengan target sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 121.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 71.821.699,00 atau 58,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)
 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 547.517.884,00 atau 93,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah update database dan pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 2 Kali dan realisasi sebesar 2 Kali. (100 %)
 4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 79.305.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.204.528,00 atau 91,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

- 5) **Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 18.974.607.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.856.514.945,00 atau 88,84 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah promosi potensi daerah di Jabodetabek dengan target 138 kali dan realisasi 138 kali. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan.

1. Pameran UKM Pawarta Jawa Timur di Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 2.443.247.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.339.325.860,00 atau 95,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan UKM Pawarta Jawa Timur di Jabodetabek dengan target sebesar 25 kali dan realisasi sebesar 25 kali. (100 %)
 2. Pameran Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta dengan anggaran sebesar Rp. 306.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 286.320.000,00 atau 93,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pameran Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali. (100 %)
 3. Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Lingkungan TMII Jakarta dengan anggaran sebesar Rp. 11.432.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.173.544.785,00 atau 88,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Lingkungan TMII Jakarta dengan target sebesar 77 kali dan realisasi sebesar 77 kali. (100 %)
 4. Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 1.678.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.513.167.900,00 atau 90,13%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek dengan target sebesar 13 kali dan realisasi sebesar 13 kali. (100 %)
 5. Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek dengan anggaran sebesar Rp. 2.405.270.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.867.456.400,00 atau 77,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 4 kali. (100 %)
 6. Pelatihan Keterampilan yang diikuti Pawarta Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 708.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 676.700.000,00 atau 95,47%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pelatihan Keterampilan yang diikuti Pawarta Jatim dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 4 kali. (100 %)
- 6) **Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.082.941.529,00 atau 95,76 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Layanan lingkup Badan Penghubung dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan :

1. Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif Provinsi Jawa Timur, koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.082.941.529,00 atau 95,76%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah layanan lingkup Badan Penghubung dengan target sebesar 800 kali dan realisasi sebesar 800 kali. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Adanya jadwal kegiatan pameran yang dihapus oleh Pihak TMII karena event tersebut jatuh pada bulan Ramadhan yaitu Pameran Pekan Liburan Sekolah, sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur tidak bisa merealisasikan kegiatan dimaksud.
- 2) Terdapat perencanaan perhitungan sewa lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pameran yaitu pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), sehingga anggaran tidak bisa terealisasi dengan maksimal.
- 3) Dalam pelaksanaannya, apabila dilaksanakan pada Triwulan I pada bulan Januari dan bulan Februari, banyak kab/kota yang belum terealisasi APBD nya, sehingga kegiatan pada program tersebut baru dilaksanakan pada Triwulan I bulan Maret
- 4) Pada aspek pelayanan pada saat saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi seringkali tidak mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan.

Solusi :

- 1) Kedepan lebih intensif koordinasi dengan pihak TMII agar bisa menyesuaikan event pameran sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Didalam perencanaan anggaran sewa lahan dan lain-lain agar lebih teliti sehingga perhitungan angka didalam pelaksanaan tidak terdapat kelebihan anggaran.

- 3) Agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, maka dibuat Kalender Acara/Calendar of Events Tahun 2019, berdasarkan hasil koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
- 4) Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.

e. Penghargaan Nasional

Untuk saat ini Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur belum menerima penghargaan nasional yang terkait dengan program, hal tersebut dikarenakan TUPOKSI nya adalah sebagai fasilitator Provinsi Jawa Timur di Jakarta dengan Pemerintah Pusat/Departemen/Non Departemen/Lembaga/Swasta.

4.9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Tujuan

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jawa Timur yang Demokratis dan Kondusif

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Indeks Demokrasi dan Penghormatan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	72	72,86	101,19
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban di masyarakat	Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan	90 persen	100 persen	111,11

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Demokrasi dan Penghormatan HAM, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2019 dengan target sebesar 72 dan terealisasi sebesar 72,86 atau 101,19 persen;
IDI Jawa Timur 2018 mencapai angka 72,86 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI Jawa Timur 2017 yang sebesar 70,92. Capaian kinerja demokrasi Jawa Timur tersebut masih berada pada kategori Sedang. Angka IDI Jawa Timur adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Jawa Timur. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik - turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian IDI Jawa Timur dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Jawa Timur hanya sebesar 62,49. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada

tahun 2015 sebesar 76,9; selanjutnya kembali turun di tahun 2016 dan 2017, kemudian naik lagi menjadi 72,86 di tahun 2018. Angka IDI Jawa Timur 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 77,21, aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 67,45, dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 75,97. Pada tahun 2018, aspek Hak-hak Politik mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Sementara aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017.

Sasaran 2 : Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban di masyarakat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 90 persen dan terealisasi sebesar 100 persen atau 111,11 persen; Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur yang diselesaikan merupakan presentase perbandingan antara jumlah kejadian yang telah ditindaklanjuti berupa surat atau tindakan langsung dalam upaya penyelesaian kejadian tersebut dengan jumlah seluruh kejadian poleksosbud yang tercatat di Bakesbangpol Prov. Jatim. Keberhasilan capaian indikator ini membuktikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil membangun koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Jajaran Instansi terkait dalam melakukan pemantauan perkembangan situasi kondisi kamtibmas di wilayah Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil membangun sinergitas dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dari ancaman organisasi radikal, gangguan kamtibmas sebagai upaya pencegahan konflik sosial di daerah, setiap kejadian yang berpotensi menjadi konflik terbuka dapat ditindaklanjuti dengan cepat bersama aparat serta jajaran instansi terkait sehingga dapat dilakukan langkah langkah strategis dalam meredam kejadian tersebut, dan kondusifitas wilayah Jawa Timur dapat terjaga. Pemerintah Provinsi juga secara rutin melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran dari seluruh elemen masyarakat

di Jawa Timur dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 1.475.834.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.439.750.205,00 atau 97,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 dan realisasi 81,26 . (81,26 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.475.834.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.439.750.205,00 atau 97,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap Pelayanan Perkantoran dengan target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen. (100 %)

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 2.211.086.444,0 dan terealisasi sebesar Rp. 2.089.414.373,00 atau 94,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 94,5 %. (94,5 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.414.586.444,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.307.917.558,00 atau 92,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 12 Paket/Unit dan realisasi sebesar 12 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 796.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 781.496.815,00 atau 98,12%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.802.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.731.009.732,00 atau 96,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 96,02 %. (96,02 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.303.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.286.568.612,00 atau 98,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 119 kali dan realisasi sebesar 315 kali. (264,7 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 498.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 444.441.120,00 atau 89,08%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 85 Orang dan realisasi sebesar 86 Orang. (101,2 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal dengan target sebesar 6 orang dan realisasi sebesar 11 orang. (183,3 %)

- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 853.685.406,00 dan terealisasi sebesar Rp. 807.666.101,00 atau 94,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %).

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 307.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.541.136,00 atau 97,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 223.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 212.634.780,00 atau 95,35%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 204.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 184.385.734,00 atau 90,16%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 119.185.406,00 dan terealisasi sebesar Rp. 112.104.451,00 atau 94,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.548.728.783,00 atau 93,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Peserta yang paham tentang Wawasan Kebangsaan dengan target 90 Persen dan realisasi 84,28 Persen. (93,64 %)
 - Indikator Program Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan 4 Konsensus Nasional dengan target 35 lembaga dan realisasi 35 lembaga. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan:

1. Pengembangan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan anggaran sebesar Rp. 283.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 270.597.650,00 atau 95,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
2. Revitalisasi dan aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila dengan anggaran sebesar Rp. 783.192.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 774.564.651,00 atau 98,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi nilai-nilai Pancasila dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)
3. Penguatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 25.085.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.344.000,00 atau 29,28%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab./Kota dengan target sebesar 1 Kegiatan dan realisasi sebesar 0 Kegiatan. (0,0 %)
4. Pembentukan dan Penguatan Kesadaran Bela Negara dengan anggaran sebesar Rp. 306.613.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 297.392.037,00 atau 96,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah fasilitasi Pembentukan Kader Bela Negara dengan target sebesar 2 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (100 %)
5. Jambore generasi muda antar umat beragama dengan anggaran sebesar Rp. 176.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 148.625.910,00 atau 84,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pemuda lintas agama yang mengikuti Jambore dengan target sebesar 150 orang dan realisasi sebesar 150 orang. (100 %)
6. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp. 75.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.204.535,00 atau 66,53%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama dengan target sebesar 4 Kegiatan dan realisasi sebesar 2 Kegiatan. (50 %)
- 6) Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik** dengan anggaran sebesar Rp. 1.569.219.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.491.545.644,00 atau 95,05 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Peran serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik dengan target 0,058 % dan realisasi 0,067 %. (116,19 %)
 - Indikator Program Persentase Peserta yang paham tentang Etika dan Budaya Politik dengan target 90 % dan realisasi 94,79 %. (105,32 %)
- Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:
1. Pemantapan Etika Politik bagi Generasi Muda dengan anggaran sebesar Rp. 268.173.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 253.318.861,00 atau 94,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pelajar setingkat SMA yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik dengan target sebesar 210 pelajar dan realisasi sebesar 190 pelajar. (90,48 %)
 2. Pengembangan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 424.113.567,00 atau 94,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Ormas Kepemudaan yang mengikuti kegiatan Penguatan Karakter Pemenuhan Kesadaran HAM dengan target sebesar 200 ormas dan realisasi sebesar 174 ormas. (87 %)
 3. Pencapaian dan penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan anggaran sebesar Rp. 251.046.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 226.493.863,00 atau 90,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov Jatim dengan target sebesar 1 laporan dan realisasi sebesar 1 laporan. (100 %)
 - Jumlah Rapat Koordinasi Pencapaian dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali. (100 %)
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 587.619.353,00 atau 97,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Tokoh Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis dengan target sebesar 525 tokoh dan realisasi sebesar 515 tokoh. (98,1 %)
- 7) Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial** dengan anggaran sebesar Rp. 5.277.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.021.132.505,00 atau 76,19 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Jumlah Kejadian terkait Konflik Sosial dengan target 100 jumlah kejadian dan realisasi 214 jumlah kejadian. (214 %)
 - Indikator Program Jumlah laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik dengan target 13 laporan dan realisasi 25 laporan. (192,3 %)
 - Indikator Program Persentase Peserta yang Paham tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan target 75 Persen dan realisasi 80,5 Persen. (107,3 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan:

1. Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 585.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 506.240.450,00 atau 86,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jatim dengan target sebesar 2 Laporan dan realisasi sebesar 12 Laporan. (600 %)
2. Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 2.052.165.000, dan terealisasi sebesar Rp. 1.118.929.420,00 atau 54,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan target sebesar 3 Laporan dan realisasi sebesar 3 Laporan. (100 %)

3. Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 464.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 407.091.600,00 atau 87,61%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial di Masyarakat dengan target sebesar 7 Laporan dan realisasi sebesar 6 Laporan. (85,7 %)
4. Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan anggaran sebesar Rp. 416.465.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 314.095.980,00 atau 75,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pencegahan gangguan penyakit masyarakat khususnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi sebesar 4 kegiatan. (100 %)
5. Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 864.390.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 792.048.150,00 atau 91,63%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim dengan target sebesar 3 laporan dan realisasi sebesar 4 laporan. (133,3 %)
6. Penguatan Pemahaman Tentang Bahaya Radikalisme dan Terorisme dengan anggaran sebesar Rp. 894.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 882.726.905,00 atau 98,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah perwakilan elemen masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan target sebesar 340 Orang dan realisasi sebesar 348 Orang. (102,35 %)
- 8) **Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan** dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.173.282.277,00 atau 93,86 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan Pembauran Kebangsaan dengan target 30 lembaga dan realisasi 30 lembaga. (100 %)
 - Indikator Program Persentase Peserta yang paham tentang Pembauran Kebangsaan dengan target 90 Persen dan realisasi 86,32 Persen. (95,91 %)Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Pemantapan dan Pemberdayaan Pembauran Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 914.826.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 881.115.035,00 atau 96,32%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Pemantapan dan Pemberdayaan Pembauran Kebangsaan dengan target sebesar 6 kegiatan dan realisasi sebesar 6 kegiatan. (100 %)
2. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 134.926.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 130.748.014,00 atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
3. Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 67.146.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.008.398,00 atau 70,01%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan dengan target sebesar 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan. (100 %)
4. Penguatan Penganut Penghayat Kepercayaan dengan anggaran sebesar Rp. 133.102.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.410.830,00 atau 85,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah penganut penghayat kepercayaan yang mengikuti kegiatan penguatan dengan target sebesar 120 orang dan realisasi sebesar 120 orang. (100 %)
- 9) Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi** dengan anggaran sebesar Rp. 3.225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.886.912.425,00 atau 89,52 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase Peran Ormas/LSM dengan target 8 % dan realisasi 8,67 %. (108 %)
 - Indikator Program Jumlah Tersusunnya Peta Politik Jawa Timur dengan target 2 peta dan realisasi 2 peta. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 6 kegiatan:

1. Verifikasi Bantuan Dana Pada Partai Politik Se Jatim dengan anggaran sebesar Rp. 90.745.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.379.150,00 atau 57,72%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan target sebesar 10 parpol dan realisasi sebesar 10 parpol. (100 %)
- 2. Forum Silaturahmi Ormas/LSM di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 887.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 831.306.560,00 atau 93,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Ormas/LSM yang mengikuti Forum Silaturahmi dengan target sebesar 350 ormas/lsm dan realisasi sebesar 338 ormas/lsm. (96,57 %)
- 3. Pengembangan Demokratisasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan Infrastruktur Politik dengan anggaran sebesar Rp. 163.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.292.355,00 atau 60,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Infrastruktur Politik yang mengikuti kegiatan Penguatan Demokratisasi dengan target sebesar 60 lembaga dan realisasi sebesar 119 lembaga. (198,3 %)
- 4. Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 628.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 539.303.805,00 atau 85,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Kegiatan Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Jawa Timur dengan target sebesar 5 kegiatan dan realisasi sebesar 5 kegiatan. (100 %)
- 5. Pemberdayaan Ormas/LSM dan Elemen Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.036.345.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 986.904.810,00 atau 95,23%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Persentase Ormas/LSM yang mencairkan bantuan dengan target sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 74,75 persen. (74,75 %)
 - Jumlah laporan Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Keberadaan serta Bantuan Fasilitasi Ormas/LSM di Jatim dengan target sebesar 4 laporan dan realisasi sebesar 4 laporan. (100 %)
- 6. Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 419.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 377.725.745,00 atau 90,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Laporan Perkembangan Politik Kab/Kota di Jawa Timur dengan target sebesar 38 laporan Kab/Kota dan realisasi sebesar 38 laporan Kab/Kota. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Aktifitas Ormas/LSM belum semua melaporkan kepada Bakesbangpol Jawa Timur;
- 2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan budaya politik yang santun pada elemen masyarakat;
- 3) Belum optimalnya peran institusi-institusi demokrasi dalam peningkatan, pemajuan politik yang demokratis;
- 4) Masyarakat Jawa Timur sangat pluralistik sehingga mudah terjadi gesekan;
- 5) Kondisi masyarakat saat ini cenderung kritis dan emosional (irrasional);
- 6) Belum maksimalnya komunikasi untuk menyatukan pemahaman guna mewujudkan kerukunan umat beragama menuju kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Solusi :

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) secara berkala mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) terkait peraturan perundangan terbaru;
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama;
- 3) Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi suku, Agama, Ras dan antar golongan;
- 4) Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama;
- 5) Meningkatkan sinkronisasi dan kerjasama bersama aparat TNI , Polri, serta instansi vertikal lainnya. Serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam mendorong dalam melaksanakan kegiatan dan membentuk lembaga di daerah yang mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dalam mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

e. Penghargaan Nasional

1. Penghargaan Provinsi Terbaik Tim Terpadu tingkat Nasional dalam Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019
2. Penghargaan kategori Pemerintah Provinsi sebagai Pembina Ormas Terbaik Tahun 2019

4.10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Penanganan Bencana yang Preventif, Responsif dan Berkelanjutan

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	9,59 %	11,96 %	124,70
Meningkatnya responsifitas dalam penanganan darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100 %	100 %	100
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 %	100 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana pada tahun 2019 dengan target sebesar 9,59 % dan terealisasi sebesar 11,96 % atau 124,70 persen;
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sudah menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Pada tahun 2019 setelah melalui kajian risiko bencana terjadi perubahan jumlah desa/kelurahan rawan bencana, yang pada awalnya sebanyak 417 menjadi 2.742 desa/kelurahan rawan bencana. Untuk capaian pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana pada tahun 2019 sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa/kelurahan dengan capaian sebesar 11,96%. Total

desa/kelurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 612 (enam ratus dua belas) desa/kelurahan tangguh bencana dengan capaian sebesar 22,32% dari 2.742 desa/kelurahan rawan bencana di Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatnya responsifitas dalam penanganan darurat bencana, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Waktu tanggap (respond time) bencana adalah informasi bencana yang didapat dari BPBD Kab./kota yang terjadi bencana, atas dasar informasi tersebut melalui Pusdalops BPBD Prov. Jatim memberikan informasi kepada Kepala Pelaksana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi tentang kejadian bencana di daerah, selanjutnya TRC BPBD Provinsi berkoordinasi dengan TRC BPBD Kab./Kota untuk segera ke lokasi kejadian guna melakukan analisa secara menyeluruh dari dampak Bencana mulai dari luasan bencana, jumlah pengungsi, jumlah kerusakan dan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti makanan siap saji, air minum dan air bersih. Jumlah kejadian bencana yang ditangani BPBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2019 sebanyak 459 kejadian.

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Korban Terdampak
			(Jiwa)
1	ANGIN KENCANG	171	1.418
2	ANGIN PUTING BELIUNG	38	5
3	BANJIR	115	881
4	BANJIR BANDANG	2	-
5	BANJIR & TANAH LONGSOR	4	-
6	TANAH LONGSOR	34	1
7	GERAKAN TANAH	1	-
8	GELOMBANG TINGGI	1	-
9	GEMPA BUMI	5	3
10	KEBAKARAN HUTAN	85	2
11	KEBAKARAN LAHAN	2	-
12	LAKA LAUT	1	3
	JUMLAH	459	2.313

Sasaran 3 : Meningkatnya pemulihan pasca bencana, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan pada tahun 2019 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 persen;

Pada Tahun 2019 rencana pemulihan pasca bencana sebanyak 11 (sebelas) dokumen, usulan rencana pemulihan yang direalisasikan sebanyak 11 (sebelas) dokumen dengan capaian 100%.

No	SKPD / Kabupaten / Kota	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1.	Kab. Ponorogo	444.114.248,-	APBD (2 Lokasi)
2.	Kab. Trenggalek	437.301.700,-	APBD (2 Lokasi)
3.	Kab. Banyuwangi	443.505.704,-	APBD (2 Lokasi)
4.	Kab. Situbondo	445.856.564,-	APBD (2 Lokasi)
5.	Kab. Magetan	441.821.600,-	APBD (2 Lokasi)
6.	Kab. Pacitan	137.034.326.196,-	APBN

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 4.017.361.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.936.890.140,00 atau 98,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 4.017.361.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.932.923.640,00 atau 97,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 6.803.535.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.689.710.568,00 atau 98,33 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 5.187.112.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.085.001.799,00 atau 98,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.616.423.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.592.548.769,00 atau 98,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)

3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 857.060.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 841.903.257,00 atau 98,23 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 104.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.194.408,00 atau 97,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 12 kali dan realisasi sebesar 12 kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 752.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 739.708.849,00 atau 98,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan/pendidikan/pelatihan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 100 orang dan realisasi sebesar 100 orang. (100 %)

4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 844.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 841.756.389,00 atau 99,69 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 569.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 568.076.826,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.061.762,00 atau 99,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 149.617.801,00 atau 99,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp. 21.792.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 21.055.672.869,00 atau 96,62 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:
 1. Pelatihan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.934.235.552,00 atau 92,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah peserta yang terampil dalam penyusunan data terpilah pada saat tanggap darurat dengan target sebesar 76 Orang dan realisasi sebesar 76 Orang. (100 %)
 2. Pelaksanaan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 3.450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.091.725.861,00 atau 89,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen kesepahaman rencana operasi (renops) tanggap darurat bencana dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
 3. Pembinaan Percepatan Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 13.467.600.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 13.372.422.623,00 atau 99,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang terampil dalam kaji cepat pada saat tanggap darurat bencana dengan target sebesar 76 Orang dan realisasi sebesar 76 Orang. (100 %)

4. Pembinaan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.657.288.833,00 atau 97,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang terampil dalam penanganan tanggap darurat bencana dengan target sebesar 50 Orang dan realisasi sebesar 50 Orang. (100 %)

6) **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp. 6.372.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.290.517.229,00 atau 98,71 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 5.172.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.105.395.286,00 atau 98,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana sektor sarana dan prasarana dengan target sebesar 85 Orang dan realisasi sebesar 85 Orang. (100 %)

2. Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 299.519.753,00 atau 99,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana sektor sosial dan ekonomi dengan target sebesar 85 Orang dan realisasi sebesar 85 Orang. (100 %)

3. Pelatihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 390.148.475,00 atau 97,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peserta yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana berbasis IT dengan target sebesar 85 Orang dan realisasi sebesar 85 Orang. (100 %)

4. Monitoring Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 494.903.715,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target sebesar 5 Dokumen dan realisasi sebesar 5 Dokumen. (100 %)

7) **Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp. 16.831.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.597.310.997,00 atau 98,61 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana dengan target 10 % dan realisasi 10 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 6.820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.687.096.632,00 atau 98,05%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen rencana kontinjensi (renkon) ancaman bencana dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

2. Pembinaan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.193.700.191,00 atau 98,27%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Sistem Peringatan Dini / EWS yang terpasang dengan target sebesar 4 Unit dan realisasi sebesar 12 Unit. (100 %)

3. Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.861.597.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.808.404.824,00 atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana dengan target sebesar 40 Desa dan realisasi sebesar 40 Desa. (100 %)

4. Pembinaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.854.089.350,00 atau 97,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pengembangan sekolah/madrasah aman bencana dengan target sebesar 4 Lokasi dan realisasi sebesar 4 Lokasi. (100 %)

8) **Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana** dengan anggaran sebesar Rp. 222.810.600,00

dan terealisasi sebesar Rp. 181.566.800,00 atau 81,49 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Monitoring dan Evaluasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 222.810.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 181.566.800,00 atau 81,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana dengan target sebesar 38 Kab./Kota dan realisasi sebesar 38 Kab./Kota. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana yang kurang memadai
- Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana yang kurang memadai
- Kurangnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
- Kurang optimalnya penanganan darurat
- Lambatnya pemulihan pasca bencana

Solusi :

- Meningkatkan bimbingan teknis, pelatihan dan sertifikasi pelaku kebencanaan
- Melengkapi sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan
- Pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

e. Penghargaan Nasional

-

**4.11. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI
JATIM I MADIUN**

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang ditindaklanjuti	95 %	100 %	105.26

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 105.26 persen;

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 574.707.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 508.406.552,00 atau 88,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 574.707.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 508.406.552,00 atau 88,46%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 4.691.908.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.195.435.967,00 atau 89,42 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.623.567.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.195.231.351,00 atau 88,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket/Unit.(100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.068.341.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.000.204.616,00 atau 93,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 5 Paket/Unit dan realisasi sebesar 5 Paket/Unit. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.636.370.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.507.916.412,00 atau 92,15 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan

target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.826.043.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 755.137.617,00 atau 91,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 15 Kali dan realisasi sebesar 15 Kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 810.327.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 752.778.795,00 atau 92,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 64 Orang dan realisasi sebesar 64 Orang. (100 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 173.515.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 151.838.398,00 atau 87,51 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.55.158.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.980.419,00 atau 88,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 53.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.659.272,00 atau 95,49%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 9 Dokumen dan realisasi sebesar 9 Dokumen. (100%)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 19.416.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.918.300,00 atau 76,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 4 Paket dan realisasi sebesar 4 Paket. (100 %)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 45.891.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.280.407,00 atau 81,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)
- 5) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 610.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 599.705.737,00 atau 98,31 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105.26 %)
- Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:
1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 337.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.331.251.905,00 atau 98,15%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 3 Sub Bidang Pemerintahan I dan realisasi sebesar 3 Sub Bidang Pemerintahan I. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 272.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 268.453.832,00 atau 98,52%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 3 Sub Bidang Pemerintahan II dan realisasi sebesar 3 Sub Bidang Pemerintahan II. (100 %)
- 6) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi**

dengan anggaran sebesar Rp.660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.443.449,00 atau 95,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105.26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 377.975.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 364.298.310,00 atau 96,38%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 2 Sub Bidang Pemb. Ekonomi I dan realisasi sebesar 2 Sub Bidang Pemb. Ekonomi I. (100 %)

2 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan – Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 282.024.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.265.145.139,00 atau 94,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 2 Sub Bidang Pemb. Ekonomi II dan realisasi sebesar 2 Sub Bidang Pemb. Ekonomi II. (100 %)

7) **Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp. 660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.416.090,00 atau 95,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105.26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 407.500.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 384.714.657,00 atau 94,41%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 3 Sub Bidang Kemasyarakatan I dan realisasi sebesar 3 Sub Bidang Kemasyarakatan. (100%)

2 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 252.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.701.433,00 atau 96,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 3 Sub Bidang Kemasyarakatan II dan realisasi sebesar 3 Sub Bidang Kemasyarakatan II. (100 %)

8) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana** dengan anggaran sebesar Rp. 610.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 595.792.363,00 atau 97,67 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105.26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 257.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.252.291.424,00 atau 97,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas

Pembantuan dengan target sebesar 4 Sub Bid.
Sarana&Prasarana I dan realisasi sebesar 4 Sub Bid.
Sarana&Prasarana I (100%)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan – Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 352.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.343.500.939,00 atau 97,45%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan - Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Sub Bid. Sarana&Prasarana II dan realisasi sebesar 4 Sub Bid. Sarana&Prasarana II. (100 %)

9) **Program pengembangan Data Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 327.922.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 255.785.233,00 atau 78,00 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan target 65 % dan realisasi 65 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 171.549.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.868.144,00 atau 85,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp. 57.257.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.879.719,00 atau 83,62%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

3. Kegiatan Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 99.115.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.037.370,00 atau 62,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Kegiatan Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi :

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, yaitu membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota, maka ditemukan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut yaitu:

- a. Penjabaran fungsi pengawasan dan supervisi yang belum secara jelas dan terdefinisi dengan baik dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 134 Tahun 2016, sehingga Bidang-bidang di Bakorwil belum dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan supervisi dengan baik, dan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja pengawasan dan supervisi;
- b. Terbatasnya sumber daya aparatur secara kualitatif maupun kuantitatif dan kompetensi aparatur yang belum proporsional dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakorwil dengan paradigma yang baru terutama dalam fungsi pengawasan dan supervisi.

Solusi :

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama dan monitoring serta evaluasi dengan stakeholder terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar kinerjanya dapat meningkat;
2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar tertib administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta dokumen pelaporan maupun evaluasi;
3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bakorwil I Madiun agar memiliki kompetensi yang memadai.

e. Penghargaan Nasional

- Tidak Ada

4.12. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JATIM II BOJONEGORO

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95 %	95 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 100 persen:

Laporan Kinerja BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2019 ini telah menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kepala BAKORWIL Bojonegoro pada tahun anggaran 2019;

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kepala BAKORWIL Bojonegoro pada tahun 2019 dapat memenuhi target (**capaian 100 %**) karena setiap kegiatan telah menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti;

Capaian realisasi anggaran dalam mendukung kinerja Kepala Bidang Pemerintahan BAKORWIL Bojonegoro tahun 2019 sebesar **91,88 %** sehingga ada efisiensi penggunaan anggaran.

c. Program dan Kegiatan

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp.1.063.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.026.978.524,00 atau 96,59 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.063.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.026.978.524,00 atau 96,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang puas terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 66 Orang dan realisasi sebesar 66 Orang. (100 %)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 4.537.186.048,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.984.270.178,00 atau 87,81 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.875.546.948,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.351.870.148,00 atau 81,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia dengan target sebesar 125 Paket/Unit dan realisasi sebesar 125 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 1.661.639.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.632.400.030,00 atau 98,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara dengan target sebesar 2 Paket/Unit dan realisasi sebesar 2 Paket/Unit. (100 %)

3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 2.005.855.089,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.736.170.383,00 atau 86,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.391.845.389,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.160.344.652,00 atau 83,37%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 325 Kali dan realisasi sebesar 325 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 614.009.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 575.825.731,00 atau 93,78%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal / non formal dalam peningkatan SDM dengan target sebesar 66 pegawai dan realisasi sebesar 66 pegawai. (100 %)

4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 229.574.863,00 dan terealisasi sebesar Rp. 219.866.881,00 atau 95,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 86.866.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.583.580,00 atau 96,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun dengan target sebesar 2 Dokumen dan realisasi sebesar 2 Dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 47.604.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.197.350,00 atau 94,94%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 95.104.863,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91.085.951,00 atau 95,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

5) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 575.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 531.928.664,00 atau 92,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 95 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 193.428.075,00 atau 96,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 375.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 338.500.589,00 atau 90,06%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II dengan target sebesar 3 Rekomendasi dan realisasi sebesar 3 Rekomendasi. (100 %)

6) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 429.582.558,00 atau 95,46 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 95 . (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 265.489.560,00 atau 96,54%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 164.092.998,00 atau 93,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)
- 7) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 444.355.042,00 atau 98,75 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Indikator Program Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 95 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

 1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 221.817.303,00 atau 98,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Kemasyarakatan I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)
 2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.537.739,00 atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Kemasyarakatan II dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

8) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana** dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 443.884.970,00 atau 98,64 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 95 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 172.459.070,00 atau 98,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 271.425.900,00 atau 98,70%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana II dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

9) **Program pengembangan Data Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.084.850,00 atau 56,89 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan target 75 % dan realisasi 60 %. (80 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 29.800.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 6.842.700,00 atau 22,96%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah Dokumen dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten/Kota. dengan anggaran sebesar Rp. 51.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.242.150,00 atau 76,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kewenangan Bakorwil belum cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
2. Kurangnya pemahaman Stakeholder di Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro terkait tugas dan fungsi Bakorwil yang dapat menghambat peran Bakorwil Bojonegoro;
3. Kurangnya Kapasitas Kelembagaan Bakorwil Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan.

Solusi :

1. Mengusulkan tambahan kewenangan, agar tugas dan fungsi Bakorwil tidak hanya sebatas Koordinasi dan Fasilitasi;
2. Melaksanakan Sosialisasi yang lebih intensif terkait tugas dan fungsi serta peran Bakorwil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait;
3. Mengisi Kelas Jabatan yang masih kosong dan mengadakan pelatihan terkait SDM Aparatur.

e. Penghargaan Nasional

- Nihil

4.13. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JATIM III MALANG

a. Tujuan

Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya hasil koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang ditindaklanjuti.	95 %	100 %	105,26

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya hasil koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Malang., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti. pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 105,26 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar

Rp.1.234.407.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.194.890.400,00 atau 96,80 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.234.407.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.194.890.400,00 atau 96,80%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %. (100%)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 4.338.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.233.014.347,00 atau 97,56 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.440.434.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.380.072.267,00 atau 98,25%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 1.350 Paket/Unit dan realisasi sebesar 1350 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 898.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.852.942.080,00 atau 94,93%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 420 Paket/Unit dan realisasi sebesar 420 Paket/Unit. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.823.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.779.500.843,00 atau 97,60 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.184.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.183.694.881,00 atau 99,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 650 Kali dan realisasi sebesar 650 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 639.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 595.805.962,00 atau 93,22%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 8 Orang dan realisasi sebesar 8 Orang. (100 %)
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM dengan target sebesar 63 Orang dan realisasi sebesar 63 Orang. (100 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 125.055.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.907.113,00 atau 91,09 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100%)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.45.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.348.400,00 atau 99,67%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100%)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp.52.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.447.900,00 atau 94,73%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target

sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)

3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.27.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.110.813,00 atau 69,86%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

- 5) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp.521.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 486.943.211,00 atau 93,34 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100%. (105,26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 254.087.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 237.412.551,00 atau 93,44%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan I dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 267.623.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.249.530.660,00 atau 93,24%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pemerintahan II dengan target sebesar 5 Rekomendasi dan realisasi sebesar 5 Rekomendasi. (100 %)

- 6) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp.692.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 654.384.873,00 atau 94,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 523.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.497.139.174,00 atau 94,99% Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pembangunan ekonomi I dengan target sebesar 6 Rekomendasi dan realisasi sebesar 6 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.168.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 157.245.699,00 atau 93,18%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang pembangunan ekonomi II dengan target sebesar 3 Rekomendasi dan realisasi sebesar 3 Rekomendasi. (100 %)

7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 949.973.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 927.024.048,00 atau 97,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 412.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.395.353.570,00 atau 95,76%. Dengan indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang kemasyarakatan I dengan target sebesar 5 Rekomendasi dan realisasi sebesar 5 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 537.123.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 531.670.478,00 atau 98,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi su bidang kemasyarakatan II dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

8) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana** dengan anggaran sebesar Rp. 477.413.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 460.726.121,00 atau 96,50 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,26 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.175.098.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 167.540.020,00 atau 95,68%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang sarana dan prasarana I dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 302.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 293.186.101,00 atau 96,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi sub bidang sarana dan prasarana II dengan target sebesar 5 Rekomendasi dan realisasi sebesar 5 Rekomendasi. (100 %)

9) **Program pengembangan Data Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 104.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.635.800,00 atau 99,55 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan target 71 % dan realisasi 70 %. (98,59 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 104.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.635.800,00 atau 99,55%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi ke Kab/Kota terkait tindak lanjut hasil Rapat Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAKORPEMBANG III Malang;
- Minimnya SDM di BAKORPEMBANG III Malang;
- Belum optimalnya penanganan terhadap Bencana Alam di Wilayah Kerja BAKORPEMBANG III Malang;
- Masih banyaknya pertambangan liar atau tidak berijin di Wilayah Kerja BAKORPEMBANG III Malang;
- Masih ada data kependudukan dan tenaga kerja asing yang tidak valid.

Solusi :

- BAKORPEMBANG III Malang perlu meningkatkan dan mengoptimalkan Monev ke Kab/Kota sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- Perlu adanya penambahan Pegawai;
- Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, BAKORPEMBANG III Malang terus melakukan

koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kab/Kota yang rawan terhadap bencana alam;

- BAKORPEMBANG III Malang beserta OPD Teknis terkait perlu meningkatkan koordinasi dan mengadakan sidak ke area pertambangan liar untuk menertibkan;
- Perlu adanya kroscek data dan meningkatkan koordinasi dengan OPD Teknis terkait data kependudukan dan tenaga kerja asing.

e. Penghargaan Nasional

-

4.14. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JATIM IV PAMEKASAN

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	95 %	95 %	100

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu: Indikator Sasaran Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 95 % atau 100 persen;

c. Program dan Kegiatan

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar

Rp.1.974.252.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.712.866,00 atau 93,79 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 98,50 %. (98,50 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.974.252.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.851.712.866,00 atau 93,79%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 98,5 %. (98,5%)

- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 3.559.537.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.182.627.448,00 atau 89,41 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 96,67 %. (96,67 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 2.876.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.639.542.199,00 atau 91,75%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target sebesar 35 Paket/Unit dan realisasi sebesar 35 Paket/Unit. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp.682.637.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 543.085.249,00 atau 79,56%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan target sebesar 20 Paket/Unit dan realisasi sebesar 20 Paket/Unit. (100 %)

- 3) **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.335.432.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.266.715.325,00 atau 94,85 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- › Indikator Program Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 99,35 % dan realisasi 99,35 %. (99,35 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.136.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.087.403.525,00 atau 95,72%. Dengan indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah Konsultasi dengan target sebesar 210 kali dan realisasi sebesar 210 kali. (100 %)
2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 199.402.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 179.311.800,00 atau 89,92%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dengan target sebesar 5 orang dan realisasi sebesar 5 orang. (100 %)
 - Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kapasitas SDM dengan target sebesar 45 pegawai dan realisasi sebesar 45 pegawai. (100 %)

- 4) **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 113.722.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.029.952,00 atau 99,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 99,80 %. (99,80 %)

Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 45.713.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.582.423,00 atau 99,71%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan target sebesar 7 Dokumen dan realisasi sebesar 7 Dokumen. (100%)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 36.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.134.450,00 atau 98,66%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 4 Dokumen dan realisasi sebesar 4 Dokumen. (100 %)
3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 31.384.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.313.079,00 atau

99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100%)

5) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan** dengan anggaran sebesar Rp. 513.577.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 484.577.324,00 atau 94,35 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 91,83 %. (96,66 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 128.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.313.655,00 atau 96,97%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

2 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 385.377.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.360.263.669,00 atau 93,48%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II dengan target sebesar 3 Rekomendasi dan realisasi sebesar 3 Rekomendasi. (100 %)

6) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp. 583.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 508.576.265,00 atau 87,14 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 91,88 %. (96,72 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 364.905.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 306.880.835,00 atau 84,10%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I dengan target sebesar 3 Rekomendasi dan realisasi sebesar 3 Rekomendasi. (100 %)
 2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 218.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 201.695.430,00 atau 92,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II dengan target sebesar 3 Rekomendasi dan realisasi sebesar 3 Rekomendasi. (100 %)
- 7) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan** dengan anggaran sebesar Rp. 2.055.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.022.088.558,00 atau 98,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 94,75 %. (99,74 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 502.330.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 492.378.212,00 atau 98,02%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I dengan target sebesar 7 Rekomendasi dan realisasi sebesar 6 Rekomendasi. (85,71 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 1.552.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.529.710.346,00 atau 98,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan II dengan target sebesar 5 Rekomendasi dan realisasi sebesar 5 Rekomendasi. (100 %)

8) **Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana** dengan anggaran sebesar Rp. 322.147.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 304.003.941,00 atau 94,37 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 91,55 %. (96,37 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 170.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 165.100.041,00 atau 97,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 151.947.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 138.903.900,00 atau 91,42%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II dengan target sebesar 2 Rekomendasi dan realisasi sebesar 2 Rekomendasi. (100 %)

9) **Program pengembangan Data Informasi** dengan anggaran sebesar Rp. 109.996.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.297.501,00 atau 93,91 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten dengan target 85 % dan realisasi

88,50 %. (93,16 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 109.996.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.297.501,00 atau 93,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Jumlah laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan target sebesar 3 Dokumen dan realisasi sebesar 3 Dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Program perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum sinkron dan terintegrasi khususnya dalam menunjang kinerja utama pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat;
- Pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia), khususnya di 4 Kabupaten di Madura;
- Lahan pertanian produktif semakin berkurang karena dijadikan lahan perumahan, serta pengelolaan Sumber Daya Alam yang kurang memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya alam dan potensi pasar khususnya di wilayah Madura, diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam upaya pemanfaatan SDA yang melimpah;
- Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana masih belum ditangani secara optimal, sehingga dijumpai beberapa permasalahan pengembangan wilayah.

Solusi :

- Peningkatan kualitas rekomendasi yang ditindaklanjuti atas hasil koordinasi, monitoring, sinkronisasi dan evaluasi ke Kabupaten se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan;
- Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

terkait penyelarasan dukungan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten;

- Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi dan infrastruktur sarana prasarana.

e. Penghargaan Nasional

-

4.15 BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JATIM V JEMBER

a. Tujuan

- Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Jember.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	95 %	100 %	105,3%

Pada Tahun 2019 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Jember., ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Indikator Sasaran Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan target sebesar 95 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 105,3% persen;

c. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.112.413.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.096.665.200,00 atau 98,58 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.1.112.413.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.096.665.200,00 atau 98,58%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 95 % dan realisasi sebesar 95 %. (100 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 3.785.955.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.697.497.975,00 atau 97,66 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 3.415.815.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.327.933.145,00 atau 97,43%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket. (100 %)

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 370.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 369.564.830,00 atau 99,84%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan target sebesar 3 Paket/Unit dan realisasi sebesar 3 Paket. (100 %)

3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.192.843.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

2.191.806.522,00 atau 99,95 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.813.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.813.010.904,00 atau 99,99%. Dengan indikator kinerja yaitu:

- Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target sebesar 2.084 Kali dan realisasi sebesar 2.084 Kali. (100 %)

2. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 379.665.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 378.795.618,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan target sebesar 36 pegawai dan realisasi sebesar 39 pegawai. (108,3 %)

4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 179.119.764,00 atau 98,08 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % dan realisasi 100 %. (100 %)

Program tersebut didukung oleh 4 kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 31.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.425.264,00 atau 97,42%.

Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 53.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.871.000,00 atau 97,17%. Dengan indikator kinerja yaitu :

:

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan target sebesar 3 dokumen dan realisasi sebesar 3 dokumen. (100 %)

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp. 44.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.303.500,00 atau 97,31%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data dengan target sebesar 1 Paket dan realisasi sebesar 1 Paket. (100 %)

4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 53.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 53.520.000,00 atau 100,00%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan target sebesar 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen. (100 %)

5) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan Rp. 817.211.106,00 atau 98,32 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,3 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 529.923.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 524.138.851,00 atau 98,91%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 301.251.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.293.072.255,00 atau 97,29%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 rekomendasi dan realisasi

sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

6) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 743.479.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 734.129.835,00 atau 98,74 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,3 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan.

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 496.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.489.366.895,00 atau 98,51%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 246.709.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 244.762.940,00 atau 99,21%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

7) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 898.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 880.480.694,00 atau 97,96 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,3 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan :

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 451.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.435.085.994,00 atau 96,36%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp. 447.244.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 445.394.700,00 atau 99,59%. Dengan indikator kinerja yaitu :
 - Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)

8) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 525.168.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 521.948.290,00 atau 99,39 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Indikator Program Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dengan target 95 % dan realisasi 100 %. (105,3 %)

Program tersebut didukung oleh 2 kegiatan:

1. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.251.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 249.319.190,00 atau 99,19%. Dengan indikator kinerja yaitu :

- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)
2. Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan anggaran sebesar Rp.273.809.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 272.629.100,00 atau 99,57%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan dengan target sebesar 4 Rekomendasi dan realisasi sebesar 4 Rekomendasi. (100 %)
- 9) Program pengembangan Data Informasi** dengan anggaran sebesar Rp.280.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 280.091.500,00 atau 99,77 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Indikator Program Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan target 71 % dan realisasi 70 %. (98,59 %)
- Program tersebut didukung oleh 1 kegiatan:
1. Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 280.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 280.091.500,00 atau 99,77%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan target sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen. (100 %)

d. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

Minimnya pemahaman Stakeholder terkait terhadap tugas dan fungsi Bakorwil Jember.

Solusi :

Melaksanakan Sosialisasi yang lebih intensif terkait tugas dan fungsi serta peran Bakorwil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

baik kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait.

e. Penghargaan Nasional

-



BAB V

PENYELENGGARAAN

TUGAS

PEMBANTUAN

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya dapat mencerminkan adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan. Oleh karenanya, besarnya kontribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai dari APBN. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

A. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2019 Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kementerian Pekerjaan Umum; dan
2. Kementerian Pertanian.

B. INSTANSI PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

Instansi atau Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan fungsi tugas pembantuan tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
4. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
5. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tabel 5.1
Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Tugas Pembantuan
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	16.013.311.000,00	15.164.569.617,00	94,70
2	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	91.908.647.000,00	86.517.275.509,00	94,13
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	208.631.262.000,00	193.104.970.974,00	92,56
4	DINAS PERKEBUNAN	39.044.430.000,00	37.238.073.163,00	95,37
5	DINAS PETERNAKAN	143.869.441.000,00	137.599.751.180,00	95,64
	JUMLAH TOTAL	499.467.091.000,00	469.624.640.443,00	94,03

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diolah.

Total pagu dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp **499.467.091.000,00** dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp **469.624.640.443,00** atau **94,03%**.

I. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.2

Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	16.013.311.000,00	15.164.569.617,00	94,70
JUMLAH		16.013.311.000,00	15.164.569.617,00	94,70

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang–Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Undang–Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang–Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2001 tentan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penyelenggaraan Jalan :

- a) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.559.266.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.559.266.000,00 atau 100,00 dengan hasil kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 112,33 Km.
- b) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 594,6865,000 terealisasi sebesar Rp. 5,101,999,450 atau 85,79 dengan hasil kegiatan Rehabilitasi Jalan sepanjang 0,95 Km dan Rekonstruksi Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 827 m' .
- c) Preservasi Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.355.000,00 terealisasi sebesar Rp. 223.355.000,00 atau 100,00 dengan hasil kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 852.6 m'
- d) Preservasi Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,805,539,000 terealisasi sebesar Rp. 1,805,539,000 atau 100,00 dengan hasil kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan sepanjang 185,50 m' dan Pemeliharaan Rehabilitasi Jembatan sepanjang 45,50 m' .
- e) Layanan Dukungan Administrasi Satker, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.478.286.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1474.410.167,00 atau 99,74 dengan hasil kegiatan Layanan Internal (Overload) sebanyak 12 laporan .

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdapat permasalahan cuaca musim penghujan yang cukup panjang serta beban lalu lintas berlebih, sehingga banyak kerusakan jalan yang harus segera ditangani.

Solusi :

- a. Dukungan dan partisipasi masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk mempunyai rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan khususnya jalan dan jembatan.

- b. Dukungan dari instansi terkait dan pengguna jalan agar dapat membatasi beban lalu lintas sehingga tidak terjadi muatan berlebih.

2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.3

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Tahun 2019**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	91.908.647.000,00	86.517.275.509,00	94,13
JUMLAH		91.908.647.000,00	86.517.275.509,00	94,13

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 11) Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33 /PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- a) Kegiatan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.946.784.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.690.029.066,00 atau 94,09 dengan hasil kegiatan Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (irigasi permukaan).
- b) Kegiatan Layanan Internal (Overhead), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.961.863.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.828.282.979,00 atau 95,49 dengan hasil kegiatan Jumlah bulan layanan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- 1) Ada 2 paket pekerjaan pemeliharaan berkala yang tidak terlaksana
 - a) HPPA Daerah Irigasi menturus karena tidak memiliki badan hukum.
 - b) Pemeliharaan berkala "pemel. sek. balekambang; di asin bawah; ds.sidorejo, kec.kebonsari, Kab. Madiun, Jawa Timur" overlap dengan rehab BBWS Bengawan Solo
- 2) Sisa dari kegiatan berkala tidak dapat digunakan
- 3) Semua kegiatan berkala sisanya tidak digunakan lagi, jika digunakan (revisi) harus persetujuan Eselon I, memerlukan waktu lama
- 4) Kegiatan swakelola banyak yang sisa, karena :
 - a) Swakelola GHIPPA tidak berbadan hukum
 - b) Swakelola tidak dapat dilakukan karena upah tenaga terlalu tinggi, upah jauh di atas harga standart Gubernur
 - c) Kegiatan swakelola lokasinya bersebelahan dengan kegiatan berkala

- 5) Banyak sisa honor juru karena menghadapi purna atau meninggal, kabupaten tidak mengajukan penggantian juru

Solusi :

- 1) Mohon untuk sisa dari berkala agar dapat digunakan lagi (Amandemen) sesuai dengan peraturan yang ada
- 2) Akan dilakukan kaji ulang terkait masalah kegiatan swakelola
- 3) Jika ada yang purna atau pensiun utamanya tenaga juru, akan kami usulkan korlap baru, agar pusat memiliki tenaga juru yang dari pusat, agar koordinasinya dapat dengan mudah dilaksanakan.

3. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.4

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	42.608.175.000,00	36.604.260.868,00	85,91
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	71.029.817.000,00	66.421.379.000,00	93,51
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	94.993.270.000,00	90.079.331.100,00	94,83
	JUMLAH	208.631.262.000,00	193.104.970.974,00	92,56

A. DASAR HUKUM

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.04.4.059179/2019;
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.03.4.059178/2019;
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor Surat Pengesahan: 018.08.4.059185/2019.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - a. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 394.467.300,00 atau 98,62 dengan hasil kegiatan Pelayanan sertifikasi benih sebanyak 40 unit (sayuran dan buah); Analisa uji standar mutu benih sebanyak 10 unit; Pembinaan produsen pedagang benih dan moitoring peredaran benih .
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.158.688.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.954.184.225,00 atau 90,53 dengan hasil kegiatan Pelayanan sertifikasi benih sebanyak 5000 unit ; Analisa uji standar mutu benih sebanyak 200 unit; Pembinaan produsen pedagang benih dan moitoring peredaran benih Analisa pengujian metode khusus 20 unit; Ui profisiensi sebanyak 3 unit; Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan (6 unit) Petak Pembanding Tanaman Pangan (6 unit) Pengawasan peredaran dan pengecekan mutu benih 110 unit, insentif Pengawas mutu benih, sosialisasi peraturan perundangan dan Pembinaan produsen/pengedar benih .
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.388.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.896.211.900,00 atau 97,90 dengan hasil kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi 12.250 Ha telah terealisasi di 29 kab/kota Irigasi perpompaan besar di wilayah barat sebanyak 47 unit, terealisasi 44 unit dan tidak teralisasi 1 unit pompa besar dan 2 unit pompa menengah di Kab. Lamongan Embung Pertanian telah terealisasi 34 unit di 17 lokasi Irigasi perpipaan sebanyak 6 unit, di Kab. Banyuwangi, Nganjuk, Trenggalek dan Malang.
 - b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 399.862.000,00 atau 79,97 dengan hasil kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) adalah upaya promosi / sosialisasi panganekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat. Kegiatan OPAL di 10 lokasi, tidak terealisasi di Kota Surabaya dan Kab. Pasuruan .

- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.033.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10497153700,00 atau 87,23 dengan hasil kegiatan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan terealisasi pengadaan hibah traktor R2 (189 unit), Pompa air 162 unit Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura dengan realisasi pengadaan hibah Cultivator 60 unit Fasilitas Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian berupa pelaporan 12 bulan; Monev kegiatan ALSINTAN bagi TNI di 32 kodim/korem; Layanan operasional mendukung penyediaan ALSINTAN Jawa Timur di 38 kab/kota .
- d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.181.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45127791805,00 atau 97,72 dengan hasil kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I selama 12 layanan Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan melalui : Penyusunan Rencana Anggaran Pemantauan dan monev kegiatan UPSUS pajale oleh TNI 45 lokasi di Jawa Timur Pengelolaan keuangan Kegiatan pengelolaan administrasi PSP Jawa Timur di 38 kab/kota .
- e. Fasilitas Pupuk dan Pestisida, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.135.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7366050235,00 atau 90,54 dengan hasil kegiatan Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani berupa 12 layanan Pengawasan verifikasi dan penyaluran pupuk di Jawa Timur.
- f. Fasilitas Pembiayaan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.754.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3792261460,00 atau 79,76 dengan hasil kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian merupakan Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian berupa 12 layanan untuk : Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan KUR di 24 lokasi (23 kab dan 1 kota), tidak terealisasi di Kab Jember; dan b) Layanan Operasional Mendukung Asuransi Pertanian di 22 kabupaten

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah : Adanya proses revisi yang berulang kali pada pertengahan tahun menyebabkan

pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat dan sebagian tidak terserap. Demikian pula dengan terbitnya Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kegiatan yang lambat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga program kegiatan tidak bisa langsung dilaksanakan;

2. Sistem pelaporan Model Pelaporan Online (MPO) juga butuh waktu karena semua nota kuitansi harus di scan terlebih dahulu setelah itu bisa upload dalam MPO sehingga membutuhkan waktu dan SDM yang khusus mengerjakan pelaporan Sistem MPO

Solusi :

1. Upaya pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten untuk melakukan percepatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM penyusun MPO

4. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.5

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
Dinas Perkebunan Tahun 2019**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	36.829.330.000,00	35.089.094.625,00	95,27
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.215.100.000,00	2.149.128.388,00	97,02
	JUMLAH	39.044.430.000,00	37.238.073.163,00	95,37

A. DASAR HUKUM

- 1) SP DIPA-018.05.4.059180/2019 Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian-Ditjen Perkebunan
- 2) SP.DIPA-018.08.4.059187/2019 Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian - Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.229.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.190.689.580,00 atau 98,27 dengan hasil kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.229.250.000,-, terealisasi sebesar Rp. 2.190.689.580,- atau 98,27%, dengan hasil kegiatan terlaksana Administrasi kegiatan dekonsentrasi selama 1 tahun, Perencanaan Pembangunan Perkebunan, Pengendalian Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Eks Proyek UPP Perkebunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan Perkebunan, Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Pembangunan Perkebunan, Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan Rekomendasi Pembangunan Perkebunan, Fasilitasi Permohonan Rekomendasi Teknis Perkebunan, Insentif Mantri Statistik Perkebunan dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.263.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.247.780.000,00 atau 98,79 dengan hasil kegiatan.
 - b. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 952.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 901.348.388,00 atau 94,67 dengan hasil kegiatan .
 - c. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.263.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.247.780.000,00 atau 98,79 dengan hasil kegiatan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.263.000.000,- terealisasi sebesar Rp 1.247.780.000,- atau 98.79% dengan hasil terlaksananya Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpompaan 9 unit di Kabupaten Lumajang 2 unit, Kabupaten Malang 1 unit, Kabupaten Mojokerto 1 unit, Kabupaten Ngawi 1 unit, Kabupaten Situbondo 1 unit, Kabupaten Tuban 1 unit, Kabupaten Tulungagung 2 unit dan 1 unit Embung di Kabupaten Malang.
 - d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 952.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 901.348.388,00 atau 94,67 dengan hasil kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tersealisasi sebesar Rp 952.100.000 atau Rp 901.348.388 atau 94.67% dengan hasil kegiatan adalah terlaksananya administrasi tugas pembantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- 1) OPAL (Obor Pangan Lestari) tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan:
 - a) izin penggunaan lahan perkantoran
 - b) hibah tanaman yang butuh perawatan secara berkelanjutan, sehingga terdapat tumpang tindih penganggaran
- 2) Kebun Entres tidak bisa dilaksanakan karena, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kebun dinas yang bisa dimanfaatkan untuk kebun entres
- 3) Kegiatan BEKERJA tidak dapat dilaksanakan karena bantuan yang diberikan tidak cocok dengan persyaratan agroklimat

Solusi :

- 1) OPAL agar diarahkan kepada kelompok tani perkebunan dan menggunakan anggaran APBD Provinsi/Kab/Kota
- 2) Kebun Entres agar di tahun berikutnya dialihkan ke kegiatan lainnya yang dapat mengoptimalkan sumber daya kebun dinas yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
- 3) Kegiatan BEKERJA agar mempertimbangkan asas kebermanfaatan dan ketepatan sasaran.

5. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tabel 5.6

**Rincian pagu dan realisasi keuangan pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
Dinas Peternakan Tahun 2019**

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	141.785.211.000,00	136.484.337.580,00	96,26
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.084.230.000,00	1.115.413.600,00	53,52
JUMLAH		143.869.441.000,00	137.599.751.180,00	95,64

A. DASAR HUKUM

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019;
- 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2019 NOMOR : SP DIPA-018.06.4.059181/2019 Tanggal 29 November 2019;
- 5) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2019 NOMOR : SP DIPA-018.08.4.059186/2019 Tanggal 29 November 2019.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat :
 - a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.581.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.278.726.265,00 atau 88,28 dengan hasil kegiatan penambahan luas tanam hijauan pakan ternak sebesar 20 ha; bantuan pakan olahan dan bahan pakan sebesar 201 ton (162 ton untuk ternak ruminasia dan 39 untuk ternak unggas); Uji mutu dan keamanan pakan sebesar 200 sampel .
 - b. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.661.930.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.603.322.000,00 atau 97,80 dengan hasil kegiatan vaksinasi untuk pencegahan dan pengamanan penyakit hewan sebesar 445.400 dosis (terdiri dari vaksinasi Avian Influenza sebesar 400.000 dosis, brucellosis sebesar 15.400 dosis dan Anthrax sebesar 30.000 dosis) .
 - c. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.795.325.000,00 terealisasi sebesar Rp. 129.241.373.865,00 atau 96,60 dengan hasil kegiatan asektor inseminasi buatan sebesar 1.726.000 ekor sapi; pengembangan ternak ruminansia perah sebesar 64 ekor; dan pengembangan unggas dan aneka ternak berupa bimbingan teknis .
 - d. Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 723.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 688.543.350,00 atau 95,23 dengan hasil kegiatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH pada unit usaha sebesar 13 unit usaha; pengawasan mutu dan keamanan Produk sebesar 240 sampel; dan pengendalian pemotongan betina produktif di 6 lokasi RPH .

- e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 967.506.000,00 terealisasi sebesar Rp. 843.693.700,00 atau 87,20 dengan hasil kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 1 layanan.
 - f. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.056.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 830.926.150,00 atau 78,67 dengan hasil kegiatan Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan sebesar 2 unit; Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebesar 1 dokumen .
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian :
- a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.235.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 747.175.000,00 atau 60,50 dengan hasil kegiatan Irigasi Perpompaan sebesar 8 unit .
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.230.000,00 terealisasi sebesar Rp. 328.417.900,00 atau 41,09 dengan hasil kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sebesar 12 layanan
 - c. Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.120.400,00 atau 80,24 dengan hasil kegiatan Fasilitas Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian sebesar 12 layanan .

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

- 1) Kegiatan Pakan Olahan baru muncul di revisi DIPA Oktober 2019;
- 2) Jumlah akseptor IB di lapangan melebihi alokasi anggaran layanan IB;
- 3) Pelaksanaan monitoring harus menunggu dropping ternak dari UPT Pusat;
- 4) Dinas kabupaten maupun kelompok yang didorong untuk menjadi korporasi peternakan kurang aktif;
- 5) Sesuai revisi DIPA ke -5 tanggal 16 Oktober 2019 Ditjen PSP terdapat penambahan alokasi sebanyak 5 unit senilai Rp 475.000.000 sedangkan lokasi baru belum ada di eproposal;
- 6) Ada kelebihan layanan dukungan manajemen untuk 5 lokasi baru yang tidak bisa dilaksanakan;

- 7) Sistem aplikasi data klaim asuransi ternak ada yang tidak match sehingga menghambat proses pencairan dana klaim asuransi.

Solusi :

- 1) Memaksimalkan segala sumber daya (terutama SDM) yang ada;
- 2) Mengusulkan anggaran pendampingan melalui APBD;
- 3) Koordinasi dengan UPT Pusat;
- 4) Koordinasi dengan kabupaten/kota dan kelompok korporasi;
- 5) Konsultasi dan koordinasi dengan tim Pusat (Ditjen PSP) dan kabupaten lokasi kegiatan;
- 6) Satker Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berusaha mengembalikan anggaran berlebih namun tidak ada tindak lanjut dari Ditjen PSP;
- 7) Koordinasi dengan pihak asuransi dan Ditjen PSP.



BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM

PEMERINTAHAN

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XVI Pasal 363 sampai dengan Pasal 372 menekankan bahwa pentingnya kerja sama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lainnya atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan.

Selanjutnya sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, disebutkan dalam PP tersebut bahwa kerja sama daerah meliputi : Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan menyinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerja sama termaksud, maka kebijakan KSDD diarahkan pada peningkatan kerja sama untuk menciptakan sinergitas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

KSDD dan Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk memperhatikan esensi penyelenggaraan kerja sama dimaksud, maka kebijakan KSDD dan KSDPL, KSDLL diarahkan pada peningkatan kerja sama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara provinsi, kabupaten

dan kota baik di dalam maupun di luar negeri dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kerja sama Dalam Negeri dengan pagu anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 1.535.542.672,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.422.240.918,- Manfaat dari Kegiatan ini adalah perkembangan kerja sama Jawa Timur antar provinsi, kabupaten/kota secara kuantitas dan kualitas meningkat. Pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Kerja Sama Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Lainnya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalin kerja sama dengan 19 provinsi di Indonesia, untuk tahun 2019 kerja sama antara provinsi mencapai 8 (delapan) naskah kerja sama yang terdiri dari 4 (empat) naskah Kesepakatan Bersama (KSB) dan 4 (empat) naskah Perjanjian Kerja Sama antara lain Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Bidang yang dikerjasamakan yaitu tentang Pembangunan Daerah yang diimplemtasikan dalam Perjanjian Kerja Sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Penanaman Modal dan Perikanan dan Kelautan. Substansi kerja sama tersebut, antara lain :

- Kerja Sama Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah, pada prinsipnya adalah mengenai kerja sama pembangunan daerah, yang bertujuan menyinergikan program-program daerah dan mengoptimalkan pengelolaan dan sumber untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Perjanjian Kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kalimantan Selatan, bidang industri di perdaganga tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian regional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan SDM khususnya para pengusaha industri kecil menengah.
- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPN PTSP) Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang kerja sama penanaman modal, tujuannya dalam rangka

optimalisasi potensi dan peluang penanaman modal promosi serta peningkatan SDM.

- Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan DI Yogyakarta, tentang kerjasama bidang perikanan dan kelautan, tujuannya mengoptimalkan pengelolaan dan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.

b. Kerja Sama Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten/kota di Jawa Timur

Kerja Sama dengan kabupaten/kota telah dilaksanakn dengan 31 kabupaten/kota, dengan naskah kerja sama terdiri : 33 Kesepakatan Bersama dan 52 Perjanjian Kerja Sama. Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang kesehatan serta ketenteraman dan ketertiban umum. Sustansi kerjasama tersebut antara lain :

- Kesepatan Kerja Sama antara Provinsi Jawa Timur dengan 33 kabupaten/kota, tentang pembangunan daerah, yang bertujuan menyinergikan program-program daerah dan mengoptimalkan pengelolaan dan sumber untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Perjanjian Kerja Sama, antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan 31 Dinas Kesehatan kabupaten/kota, tentang peningkatan program Puskesmas Tahun 2019, tujuannya optimalisasi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui ketersediaan tenaga dokter umum dan perawat pada Puskesmas.

c. Kerja Sama Kewilayahan

Kerja sama kewilayah pada tahun 2019, difokuskan untuk menindaklanjuti naskah kerja sama baik Kesepakatan Bersama Maupun Perjanjian Kerja Sama, melalui *Focus Group Discussion* (FGD)

- **Kerja Sama Madura Raya**

Sebagai kawasan strategis provinsi, kawasan Madura didorong percepatan persetujuannya, dan melalui Biro Humas dan Protokol Prov. Jatim difasilitasi kerja sama regional 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Tanggal 20 November 2017 ditindaklanjuti naskah Kesepakatan Bersama (KSB) pembangunan daerah di wilayah Madura, dan pembentukan Sekber melalui keputusan Bupati.

Bidang Pariwisata menjadi bidang awal untuk dikerja samakan, dan saat ini proses penyelesaian naskah Perjanjian Kerja sama (PKS) Pariwisata dengan muatan Pariwisata berbasis syariah. Hasil FGD, antara lain

pembuatan paket wisata keliling Madura, ketentuan wajib visit untuk kunjungan pariwisata di masing-masing kabupaten, pengembangan UMKM.

- **Kerja Sama Selingkar Wilis**

Kerja Sama Selingkar Wilis, telah ditandatangani oleh 6 kabupaten yang berada di selingkar gunung wilis pada tahun 2014, yaitu kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Madiun, Ponorogo dan Nganjuk. Kerja Sama ini tentang Pembangunan Daerah yang ditingkatkan dengan Perjanjian Kerja Sama bidang infrastruktur, dan bidang pariwisata. Selanjutnya untuk implementasi program telah dilakukan FGD, dengan hasil yaitu pembangunan infrastruktur jalan terus dilanjutkan sesuai dengan masing-masing kabupaten dan juga provinsi, serta pemerintah pusat untuk jalan nasional, diusulkan untuk menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), diusulkan ada penyelenggaraan agro festival selingkar wilis.

- **Kerja Sama Ratubangnegoro**

Kerja sama Kewilayahan Ratubangnegoro, merupakan kerja sama perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, dengan 4 kabupaten yaitu Blora, Tuban, Rembang, dan Bojonegoro. Kesepakatan Bersama telah ditandatangani pada tahun 2018. Bidang Kerja Sama yaitu Pembangunan Daerah, dengan Perjanjian Kerja sama 16 bidang. Pada Tahun 2019, difokuskan untuk tindak lanjut dari KSB dan PKS, melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dengan hasil : pembentukan shelter untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khusus gelandangan dan pengemis serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di daerah perbatasan di masing-masing kabupaten, penanganan galian c.

- **Kerja Sama Karismapawirogo**

Kerja sama Kewilayahan Karismapawirogo, merupakan kerja sama perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, dengan 7 kabupaten yaitu Karanganyar, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo. Naskah kerja sama ini tersebut telah ditandatangani oleh 7 bupati pada tahun 2008. Bidang kerja sama yang telah dilaksanakan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum, bidang sosial dan pariwisata. Pada tahun 2019 menindaklanjuti kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan hasil : pembentukan *shelter* untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khusus gelandangan dan

pengemis serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di daerah perbatasan di masing-masing kabupaten, penanganan galian c dan kerusakan lingkungan hidup.

- **Kerja Sama Selingkar Ijen**

Kerja sama Kewilayahan Selingkar Ijen, telah ditandatangani oleh 4 bupati pada tahun 2018, tentang pembangunan daerah. Bidang kerja sama yang telah dilaksanakan bidang Infrastruktur dan pariwisata. Pada tahun 2019 menindaklanjuti kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan hasil diusulkan pembangunan aksesibilitas jalan Situbondo – Bondowoso (Arjasa-Kayumas-Pedati-Belawan) sebagian melewati lahan Perum Perhutani, untuk pemanfaatan lahan guna pembangunan infrastruktur agar difasilitasi Bakorwil Jember; Diusulkan menaikkan status jalan dari Kabupaten Bondowoso menjadi jalan provinsi; dan mendorong terwujudnya jalan selingkar ijen dalam mendukung pengembangan pariwisata dan memperjelas trase selingkar ijen; menyusun paket wisata selingkar ijen, pemberdayaan masyarakat melalui eco wisata.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah tidak dapat mengikat semua Kementerian, Lembaga Negara maupun TNI, POLRI dalam pembuatan draft kerja sama, seperti istilah Kesepakatan Bersama (KSB), ada yang menyebut Nota Kesepahaman, dsb, kadang-kadang ini menghambat proses pembahasan kerja sama, karena semua pihak mempunyai dasar peraturan perundang-undangan masing-masing.
- 2) Belum adanya sinergitas perencanaan dan kebutuhan kerja sama dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- 3) Kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah maupun pihak ketiga.
- 4) Belum semua Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memahami tentang legal drafting Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja sama (PKS).

b. Solusi

- 1) Kementerian Dalam Negeri sebagai inisiator lahirnya PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mengusulkan melalui surat agar semua

Kementerian, Lembaga Negera maupun TNI POLRI patuh dan taat kepada PP tersebut tentang istilah naskah kerja sama.

- 2) Dilaksanakan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah khususnya terkait dengan Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain.
- 3) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerja sama.
- 4) Rapat teknis tentang pembuatan draft legal drafting mengenai Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja sama (PKS).

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) merupakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan perseorangan, badan usaha berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga ini mengacu pad Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Pada Bab III Pasal 13. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga ini meliputi : Kerja Sama dalam pelayanan penyediaan pelayanan publik; kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; dan kerja sama investasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama dengan Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain : Kerja Sama dengan PT. Angkasa Pura, PT. Gudang Garam, Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi, Perusahaan yang berada di aliran sungai berantas; PT. Shopee Internasional Indonesia; PT. Global Digital Niaga; PT. Toko Pedia; PT. Dompot Anak Bangsa dan PT. Aplikasi Anak Bangsa.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

a) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi :

- 1) Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 16 Perguruan Tinggi Negeri, tentang pendidikan, latihan, penelitian, pengaduan kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah IV, tentang program peningkatan kualifikasi akademik guru madrasah Diniyah di Jawa Jawa Timur.

b) Kerja Sama dengan Lembaga Non Kementerian/ Kementerian/ Badan Usaha/Organisasi Kemasyarakatan :

- 1) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TNI Angkatan Darat, tentang Peningkatan Kualitas SDM bidang Pendidikan Menengah di Jawa Timur;
- 2) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan POLRI tentang Peningkatan Kualitas SDM bidang Pendidikan Menengah di Jawa Timur;
- 3) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencanangan Gerakan Jawa Timur Menabung (*One Student On Account*);
- 4) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, tentang Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jawa Timur.
- 5) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Legiun Veteran Republik Indonesia, tentang Pelestarian, Pewarisan, Penanaman Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kekuasaan 1945 melalui Pendidikan dan Pelatihan Karakter bagi Generasi Muda di Provinsi Jawa Timur;
- 6) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 7 Organisasi Perempuan (IWAPI, BKOW, PKK, Aisyah, Fatayat, Muslimat, Wanita Katolik) tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Keluarga untuk mendukung pembangunan daerah.
- 7) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Pos Indonesia tentang Fasilitas Kerja Sama PT. Pos Indonesia dengan BUMDes untuk pelayanan pada masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya memberikan kemudahan dan percepatan masyarakat dalam menerima pelayanan publik melalui BUMDes dan PT. Pos Indonesia di Provinsi Jawa Timur.
- 8) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Angkasa Pura I Persero tentang kerjasama pengembangan dan promosi potensi Jawa Timur, tujuannya terwujudnya pengembangan dan promosi potensi Jawa Timur di wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Persero untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur.
- 9) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, tentang kerja sama pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka mendukung industri pariwisata, tujuannya peningkatan mutu pendidikan vokasi sektor pariwisata; pengembangan industri pariwisata di Jawa Timur dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 10) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Kesehatan RI, tentang penyelenggaraan rumah

sakit bergerak (kapal laut) di Provinsi Jawa Timur, tujuannya untuk menjalin kerja sama dan sinergitas dalam rangka mengoptimalkan fungsi kapal rede sebagai kapal rumah sakit bergerak di kepulauan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan prinsip kemanusiaan, keadilan dan pemerataan pembangunan.

- 11) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang, tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, tujuannya untuk menjalin kemitraan strategis dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak.
- 12) Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Pariwisata, tentang Pengembangan Pariwisata Halal di Provinsi Jawa Timur, tujuannya sebagai landasan para pihak dalam pengembangan pariwisata halal di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Perangkat Daerah sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama kadang-kadang kurang respon terhadap implementasinya.
- 2) Kerja sama di Perangkat Daerah belum menjadi program prioritas;
- 3) Perangkat Daerah belum memahami tentang pentingnya kerja sama, baik terhadap manfaat maupun dari dasar hukumnya.
- 4) Terjadinya perbedaan dasar hukum terhadap *legal drafting* dan istilah dalam naskah kerja sama.
- 5) Belum adanya pemetaan potensi kerja sama di masing-masing Perangkat Daerah.
- 6) Perangkat Daerah tidak segera menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur.

b. Solusi

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- 2) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya kerja sama, baik manfaat, dasar hukum maupun sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan.

- 3) Melakukan rapat pembahasan naskah kerjasama dengan kompromi terhadap istilah dan legal drafting yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan rakor koordinasi tentang perencanaan dan pemetaan potensi kerjasama daerah;
- 5) Membuat surat kepada Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur.

C. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah maka Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri, meliputi :

- KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerja Sama luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerja sama didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dalam Bab IV Pasal 23 – Pasal 43.

Selanjutnya lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kerja sama Luar Negeri dengan pagu anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 5.955.897.637,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.963.390.265,- Manfaat dari kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan antara lain:

a. Kerja Sama Sister Province Jawa Timur dengan Australia Barat

Kerjasama *sister province* antara Jawa Timur dengan Australia Barat telah terjalin sejak tahun 1990. Telah banyak capaian program yang terlaksana seperti pengiriman santri ke Australia Barat untuk belajar tentang pertanian dan peternakan sekaligus menjadi duta Islam moderat, kerjasama peningkatan kapasitas layanan autisme, ketunarunguan, dan pendidikan inklusi.

Kegiatan kerja sama Jawa Timur – Australia Barat Tahun 2019, yaitu adanya kegiatan *Joint Working Group* yang dihadiri beberapa Dinas Pendidikan, Dinas Olah Raga dan Kepemudaan serta Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur telah, disepakati beberapa hal yaitu;

1) Kolaborasi seni dan budaya. Beberapa poin kesepakatan pertemuan yaitu:

- Kolaborasi kreatifitas seni akan dilakukan oleh para pemuda dari STKW Surabaya dan *Western Australia Academy of Performing Arts* (WAAPA) dan STKWS, dan masing-masing didampingi oleh dosen dan konsultan seni pertunjukan
- Disepakati kedatangan Director Seni dari Australia Barat guna membicarakan detail skenario dan bagian dari performa kolaborasi. Kunjungan dilakukan pada bulan September 2020.
- Kolaborasi seni akan dilakukan selama 3 kali di Jawa Timur pada bulan Oktober 2020, dengan melibatkan masing-masing 20 seniman dari kedua provinsi.
- Kolaborasi seni akan dilakukan selama 3 kali di Perth pada bulan November dengan melibatkan masing-masing 20 seniman dari kedua provinsi
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menganggarkan biaya PDLN untuk 20 seniman dan 3 pendamping.
- Peluang pengiriman pengajar gamelan dari Jawa Timur ke Australia Barat

2) **Kerjasama bidang olahraga**

- Diselenggarakan pertukaran atlet pelajar, dengan skema pengiriman atlet beberapa cabang ke Jawa Timur untuk berlatih tanding, dan sebaliknya pengiriman atlet pelajar Jawa Timur ke Australia Barat
- Skema pembiayaan untuk *internasional flight* ditanggung masing-masing pihak sedang akomodasi dan konsumsi ditanggung pihak yang menerima delegasi (tuan rumah)

3) **Pertukaran pemuda**

- Tema pertukaran antara lain *leadership, entrepreneurship, art and culture, serta innovation*

- Waktu pelaksanaan di Jawa Timur pada bulan Oktober 2020 melalui penerimaan delegasi Australia Barat, serta pada bulan Februari / Maret 2021 melalui pengiriman delegasi Jawa Timur ke Australia Barat
- Jumlah delegasi masing-masing pihak sebanyak 12 pemuda dan 2 pendamping pemuda dari pemerintah, terbagi kedalam tiga dinas teknis Jawa Timur
- Pembagian anggaran, kedua pihak sepakat menanggung akomodasi selama *hosting* program dan tiket pesawat masing-masing delegasi
- Pemuda dari Jawa Timur nantinya akan belajar pada komunitas pemuda dan inkubasi startup yang berfokus pada entrepreneur muda dan *socialpreneur* (mampu mengatasi masalah sosial di masyarakat serta mendukung program kerja pemerintah)

4) Kerjasama pendidikan SMA dan pertukaran guru.

- Program pengiriman guru Bahasa Indonesia Jawa Timur ke Australia Barat. Departemen Pendidikan Australia Barat pertahun siap menerima pengiriman dua guru Bahasa Indonesia dari Jawa Timur, dengan lama tugas masing-masing selama di Perth 4 minggu (1 bulan). Saat berada di sekolah-sekolah Australia Barat nanti, posisi kedua guru Bahasa Indonesia dari Jawa Timur tersebut bukan sebagai pengajar utama, melainkan sebagai pengajar pendamping (*teacher assistant*) yang akan membantu penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Indonesia oleh guru utama Australia Barat. Biaya akan dibicarakan lebih lanjut. Harapannya program ini bisa dimulai pada September 2020.
- Pendampingan desain dan implementasi kurikulum vokasi khususnya dan sekaligus inklusi umumnya untuk SMA di Jawa Timur oleh Departemen Pendidikan Australia Barat, telah disepakati dalam forum bersama bahwa pendampingan untuk mendesain dan mengimplementasikan kurikulum dimaksud diprogramkan selama 5 tahun. Program ini akan dibicarakan teknisnya pada Maret 2020 di Surabaya, dan bisa dimulai pelaksanaannya pada pertengahan 2020.

Selain itu juga terdapat inisiasi dan fasilitasi yang kami lakukan kepada Walikota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Malang terkait replikasi sistem pendidikan inklusi dan kampanye keselamatan di lalu lintas, serta kepada Walikota Mojokerto terkait Kampanye Edukasi Kesehatan.

b. Kerja Sama Sister Province Jawa Timur dengan Gyeongnam Korea Selatan

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Gyeongnam merupakan mitra kerjasama sister province sejak tahun 1996. Melalui kerjasama ini telah

dilaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan bahasa dan budaya Indonesia/Korea, kerjasama bidang kesehatan, promosi ekonomi, pariwisata dan beberapa hal lainnya.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang dikenal karena kemajuan ekonomi, teknologi, serta kekayaan budaya dan pariwisatanya.

Hubungan *sister province* yang dimiliki Jawa Timur dengan salah satu provinsi di Korea Selatan merupakan salah satu kesempatan yang besar untuk mempelajari banyak hal, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hubungan kerjasama ini merupakan media strategis untuk ikut mempromosikan potensi dan keunggulan Jawa Timur.

Menjelang 25 tahun hubungan *sister province* ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud merevitalisasi kerjasama ini dengan menjajaki peluang kerjasama bidang pariwisata dan e-government. Revitalisasi kerjasama ini diharapkan dapat kembali mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat di kedua wilayah dengan mewujudkan program dan kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Revitalisasi kerjasama, antara lain :

1) Bidang Pariwisata

Korea Selatan memiliki keunggulan dalam pengembangan pariwisatanya. Berdasarkan kunjungan delegasi Pemprov Jawa Timur ke Provinsi Gyeongnam, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor majunya pariwisata di Korea Selatan, yaitu ;

- Unggul dalam menentukan konsep kawasan wisata. Keunggulannya dapat menggabungkan wisata sejarah dengan wisata alam/permainan. Penggabungan ini bertujuan agar suatu tempat wisata dapat dinikmati semua kalangan, mulai anak-anak sampai orang dewasa, sehingga dapat menarik minat lebih banyak wisatawan. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata Danghangpo di Goseong dan pelaksanaan Jinju Lantern Festival.
- Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pariwisata dan promosinya.

2) E-Government

Dengan adanya payung kerjasama *Sister Province* antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Gyeongnam, serta keunggulan Korea Selatan dalam bidang *e-governance* yang telah diakui dunia, bahkan pernah menduduki peringkat 1 dalam survei *e-governance* PBB, dan kemampuan Pemerintah Korea Selatan dalam mengelola situs-situs pariwisata air yang dapat

menarik wisatawan lokal dan mancanegara, maka diharapkan beberapa hal tersebut tersebut dapat dimanfaatkan sebagai potensi kerjasama antar kedua daerah yang perlu masuk dalam program.

c. Kerja Sama dengan Belanda

- Pertemuan dengan stakeholders di Belanda serta kunjungan lapangan pada 5 – 11 November 2019

- a) Penerimaan Resmi oleh Bapak Duta Besar RI di Den Haag, Y.M. Bapak I Gusti Agung Wesaka Puja beserta jajaran pejabat KBRI di Den Haag. Agenda kunjungan adalah penyampaian progress terkait rencana kerjasama bidang manajemen sumber daya air dan sirkular ekonomi utamanya pengelolaan sampah dengan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan SDA Belanda. Lebih lanjut, Bapak Duta Besar juga menyampaikan beberapa peluang yang dapat dikerjasama, antara lain kerjasama ekonomi dan penyelenggaraan event-event promosi produk komoditi unggulan, investasi, pariwisata dan sumber daya manusia (pendidikan vokasional), ketenagakerjaan melalui kebutuhan tenaga perawat di Belanda serta peluang kerjasama teknis seperti *Training of Trainer* (ToT) serta bentuk *transfer of knowledge* lainnya.
- b) *Launching Giant Screen The Great Bubble Barrier* di Westerdoksplein, Amsterdam. *The Great Bubble Barrier* merupakan *start-up* dari Amsterdam yang didirikan oleh trio Francis Zoet – Saskia Studer – Anne Marieke Eveleens, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Amsterdam dalam upaya mengurangi sampah yang masuk ke laut. Inovasi pencegahan dan penanggulangan sampah yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pemasangan pipa di bawah/dasar sungai melalui teknologi semburan udara sehingga mencegah masuknya sampah plastik ke laut. Delegasi melihat langsung peluncuran program tersebut yang dibuka oleh perwakilan Pemerintah Kota Amsterdam dan Dewan Kota dalam skala nasional serta berkesempatan untuk berdiskusi dengan Account Manager *The Great Bubble Barrier* Ibu Sonja Fortuin tentang kemungkinan penerapan teknologi ini di Jawa Timur.
- c) Kunjungan lapangan ke industri pengolahan popok (diapers) di Kota Nijmegen. Elsinga adalah sebuah perusahaan *start-up* satu-satunya di dunia yang mampu berinovasi dalam pengolahan limbah popok (diapers) menjadi bijih plastik, energi listrik serta pupuk kompos.

Dalam pengolahan *renewable energy* ini, Elsinga bekerjasama dengan perusahaan BUMD Belanda bernama ARN sebagai pengelola instalasi pengolahan limbah popok menjadi sumber energi tersebut (skema pengolahan terlampir).

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan yang diterima langsung oleh CEO Elsinga, Jouke Elsinga ini, delegasi berkesempatan untuk berdiskusi dan membahas peluang investasi reaktor pengolahan limbah popok (diapers) tersebut di Jawa Timur. Kunjungan ini bermanfaat bagi Jawa Timur sebagai opsi penanganan melalui kebijakan strategis karena limbah popok (diapers) telah menjadi permasalahan yang timbul khususnya Jawa Timur.

- d) Pertemuan dengan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan SDA Belanda. Diterima oleh Arnoud Passenieur, Patricia Groelle (urusan pengelolaan air), Martin Van Nieuwenhowen (urusan pengelolaan sampah) serta tim. Pembahasan difokuskan pada *action plan* yang diusulkan dari Jawa Timur yang merupakan tindak lanjut serangkaian pertemuan sebelumnya pada 2018 – medio 2019. Secara prinsip, tim Infrastruktur Belanda mendukung rencana dan *action plan* yang diajukan, serta akan melakukan berbagai pertemuan lanjutan baik internal di kementerian maupun dengan stakeholder di Jawa Timur. Secara terpisah, Pak Martin menyampaikan akan melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada 18 – 21 November 2019 guna menindaklanjuti rencana aksi dimaksud dengan pilot project di Kali Welang, Kab. Pasuruan, melalui diskusi intens dalam *Forum Group Discussion* yang difasilitasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur.

- Hasil dan tindaklanjut Kegiatan

- a) Terkait bantuan kerjasama teknis, telah disampaikan usulan kerjasama kolaboratif antara lain riset lapangan banjir, kualitas air, sampah dan sedimen di Daerah Aliran Kali Welang, penyusunan kebijakan pengelolaan sampah di Kali Welang dan manajemen sampah plastik dan popok (diapers) di Kali Welang.
- b) Tim Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Sumber Daya Air Belanda melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada 18 – 21 November 2019 guna menindaklanjuti rencana aksi dimaksud dengan pilot project di Kali Welang, Kab. Pasuruan, melalui diskusi intens dalam

Forum Group Discussion yang difasilitasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur

- c) Terdapat rencana 3 (tiga) tema program yang akan dibahas oleh instansi yang berwenang di Jawa Timur, diantaranya:
- replikasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - langkah pengumpulan dan pemisahan sampah plastik di tingkat rumah tangga serta dari sektor informal
 - pengambilan sampah dari Kali Welang serta pengelolaan yang baik
- d) Untuk pelaksanaan kerjasama, draf MoU di level provinsi serta *implementing arrangement* yang akan dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Perangkat Daerah sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama kadang-kadang kurang respon terhadap implementasinya.
- Kerja sama di Perangkat Daerah belum menjadi program prioritas;
- Perangkat Daerah belum memahami tentang pentingnya kerja sama, baik terhadap manfaat maupun dari dasar hukumnya.
- Terjadinya perbedaan dasar hukum terhadap *legal drafting* dan istilah dalam naskah kerja sama.
- Belum adanya pemetaan potensi kerja sama di masing-masing Perangkat Daerah.

b. Solusi

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- Perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya kerja sama, baik manfaat, dasar hukum maupun sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan.
- Melakukan rapat pembahasan naskah kerjasama dengan kompromi terhadap istilah dan legal drafting yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan rakor koordinasi tentang perencanaan dan pemetaan potensi kerjasama daerah;

- Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

1. Kebijakan dan Kegiatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mengamanatkan dalam Bab IV Pasal 23 – Pasal 43. Selanjutnya disebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut meliputi : pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; dan promosi potensi daerah. Kegiatan kerja sama daerah dengan Lembaga di luar negeri, antara lain : 1) *Singapore International Fund*; 2) *Peace Corp*; 3) *ADB Kinerja*; 4) *USAID Mitra Kunci*; dan 5) *Nutrition International*, 6) *KOMPAK*, dan 7) *USAID APIK* .

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

a. Peace Corps

Peace Corps (PC) adalah badan independen Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berdiri sejak tahun 1961. Misionya adalah meningkatkan perdamaian dan persahabatan internasional melalui penugasan relawan Amerika Serikat ke negara lain. PC pertama kali menjalankan programnya di Indonesia pada tahun 1963-1965, kerjasama ini sempat terhenti dan kemudian dimulai kembali ketika Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia pada Februari 2009. Rencana kerjasama ini ditindaklanjuti pada Desember 2009 dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Pemerintah AS yang diwakili oleh Menteri Urusan Politik AS dan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaannya, PC berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Intelejen Negara, Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa kementerian lain yang tergabung dalam *steering committee*. Sedangkan di Jawa Timur pemangku kepentingan yang terlibat pelaksanaan program PC adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Biro Humas Protokol Setda. Provinsi Jawa Timur.

Implementasi kegiatan PC di Indonesia dimulai pada tahun 2010 dengan pengiriman relawan yang bertugas sebagai **pendamping guru Bahasa Inggris** di SMA, SMK, MAN, SMP, MTS di Kab/Kota di Jawa Timur selama 2 tahun. Relawan PC tersebut akan bekerja berdampingan dengan guru bahasa Inggris dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris di sekolah.

Pada September 2019 telah dikirimkan calon relawan Peace Corps Batch 10, sejumlah 68 orang. Calon relawan ini akan bertugas di 3 provinsi di Indonesia dengan komposisi sebagai berikut : 31 orang di Jawa Timur, 29 orang di Jawa Barat dan 8 orang di NTT. Untuk relawan yang bertugas di Jawa Timur akan ditempatkan di 5 MAN, 8 MtsN, 13 SMA, 4 SMK dan 1 SMP.

b. ADB Kinerja

Program ADB KINERJA – Open Government Partnership (KINERJA-OGP) merupakan program bantuan teknis yang diluncurkan oleh Asian Development Bank dengan fokus penguatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil bagi keterbukaan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik (*Strengthening Government and Civil Society Cooperation in Open Government for Public Service Delivery*).

Tujuan utama dari KINERJA-OGP adalah : meningkatkan akses dan penggunaan data pada perencanaan dan penganggaran daerah yang inovatif dalam upaya pengakhiran pernikahan dini /pernikahan anak di kabupaten mitra.

Kegiatan bantuan teknis difokuskan pada :

- pengembangan dashboard pengakhiran pernikahan anak dan pelaksanaan survey pernikahan anak di Kab. Lumajang dan Kab. Pacitan.
- intervensi guna mendorong masyarakat dan multi stakeholder untuk mengakhiri pernikahan anak.
- penguatan masyarakat dalam melaksanakan survey pengaduan pelayanan publik bidang kesehatan dengan 2 (dua) distrik replikasi di Kabupaten Blitar dan Kota Batu.
- Pengembangan dashboard pengakhiran pernikahan anak dan pelaksanaan survey pernikahan anak di Kab. Lumajang dan Kab. Pacitan

c. USAID Mitra Kunci

Kegiatan USAID Mitra Kunci ini, antara lain :

- **Ayo Inklusif** :
menguatkan kapasitas pemimpin muda dan wartawan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengembangan tenaga kerja yang inklusif. Target 260 orang lokasi Kabupaten Malang Raya dan Kota Surabaya.
- **Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI)**
Membentuk pengusaha muda melalui pelatihan akses terhadap pelatih dan mentor bisnis, menghubungkan mereka dengan institusi yang membantu

penerima manfaat untuk memulai bisnis. Target 300 orang, lokasi Kabupaten Blitar, Pacitan, Sampang, Percontohan Kabupaten Trenggalek.

- **Youthwin through Economic Partisipation (YEP)**

Memberikan pelatihan yang memperkuat literasi keuangan peserta, dan keterampilan non teknis (komunikasi, kerja tim, keahlian itu bila dikuasai dapat membantu pemuda dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik, memperkuat kesiapan kerja dan meningkatkan taraf hidup. Target 1600 orang, lokasi kabupaten Tuban, Madiun dan Malang.

d. Singapore International Foundation (SIF)

Program SIP meliputi 2 hal yaitu Kegawatdaruratan Pediatri dan Perawatan Neonatal. Tujuan kerjasama ini untuk memperkuat kapasitas dokter dan perawat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Program kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, sehingga perlu melibatkan semua instansi kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga Rumah Sakit tipe A.

Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan workshop dan simposium dengan narasumber dari Singapura dengan pembiayaan dari SIF di wilayah, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, dan Gresik.

e. Nutrition International (NI)

Bentuk kontribusi yang diberikan oleh **NI** melalui kerjasama ini adalah menyelenggarakan kampanye, pelatihan, lokakarya, pendampingan, dan *on-the job training* bagi pemerintah daerah dan Siswa Menengah Atas (SMA) yang terkait dengan program-program sebagai berikut ;

- Mengatasi Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan mempercepat Konsumsi Garam Beriodium untuk Semua (KGBS):
- Suplementasi Zat Gizi Mikro untuk Mengurangi Angka Kematian dan Kesakitan di Indonesia (MITRA);
- Program Suplementasi Tablet Tambah Darah Mingguan untuk Mencegah dan Mengurangi Anemia pada Remaja Putri di Sekolah (MITRA YOUTH). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo.

f. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Menuju Kesejahteraan (KOMPAK), yang didukung oleh Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Tujuan kegiatan adalah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan melalui perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar, serta kesempatan peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan dengan kegiatan meliputi :

- Perbaikan sistem pemerintah daerah yang lebih responsif serta akuntabel dalam rangka perluasan dan perbaikan akses layanan dasar, dan peningkatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin serta rentan;
- Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dasar dan kesempatan ekonomi;
- Pembangunan struktur masyarakat yang aktif dalam mendukung terlaksananya. Lokasi kegiatan di Kab. Bondowoso, Kab. Lumajang, Kab. Trenggalek dan Kab. Pacitan.

g. USAID APIK

Program USAID – APIK ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menanggulangi dan mengelola risiko iklim dan bencana melalui :

- Pengintegrasian Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kebijakan dan koordinasi nasional.
- Peningkatan ketahanan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Penguatan layanan informasi iklim untuk ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat.
- Peningkatan kesadaran dan kapasitas sektor swasta

Program ini dilaksanakan di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jombang.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Peluang Kerja sama dengan Lembaga Internasional belum banyak dimanfaatkan secara merata oleh kabupaten/kota;
- 2) Kurangnya pemahaman tentang arti penting kerja sama dengan Lembaga Internasional;
- 3) Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian, sehingga banyak daerah yang telah membuat naskah perjanjian dengan Lembaga

Internasional dengan banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun pasal-pasal wajib seperti hak dan kewajiban, Unit Pelaksana, Working Group, perselisihan, dan lain-lain

- 4) Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
- 5) Dengan dasar otonomi daerah, masih ada kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

b. Solusi

- 1) Pembahasan Perjanjian Kerja sama dijadwalkan 3 (tiga) bulan setelah penanta tanganan Kesepakatan Bersama;
- 2) Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerja sama (*Technical Arrangement*) ke Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Timur dengan tujuan :
 - Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional mampu mendukung program pembangunan daerah, dengan npembiayaan pembangunan diluar APBD
 - Daerah memahami tata cara penyusunan *Technical Arrangement* dengan pihak Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa merugikan daerah dapat dihindari;
- 3) Sosialisasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah , dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerja sama yang dilakukan antara daerah dengan Lembaga Internasional;
- 4) Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian terkait), bahwa karena tempat implementasi program Lembaga Internasional ada di daerah, maka dalam menentukan tempat implementasi program, daerah harus diikut sertakan dalam penentuan program dan *locus*-nya.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah merupakan program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah, yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Penataan Batas Antar Daerah, Perselisihan, Kode dan Data Administrasi Wilayah
Pemerintahan Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun

desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan batas Daerah.

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa batas daerah itu penting dan strategis, namun pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik.

Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Kerjasama antar daerah mutlak diperlukan untuk mencapai kesepakatan guna menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Batas daerah yang sudah pasti dapat dilakukan perapatan pilar, pemeliharaan pilar, dan pembangunan kembali pilar yang hilang dan/atau rusak dan dapat difasilitasi oleh Gubernur. Untuk Pendanaan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Jawa Timur melaksanakan pembangunan perapatan pilar batas di 6 (enam) kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Rembang.
- 2) Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora.
- 3) Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten Sragen.
- 4) Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar.
- 5) Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Wonogiri.
- 6) Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Wonogiri.

sesuai perjanjian kerjasama Provinsi Jateng dengan Jawa Timur No. 120/1184 dan No. 120/107/012/2012

Adapun untuk percepatan penegasan batas di wilayah Jawa Timur, Biro Adm. Pemerintahan dan Otoda pada Tahun 2019 melaksanakan kegiatan Penataan Batas Antar Daerah dan Penyusunan Toponimi /Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang berisikan sub kegiatan rapat koordinasi maupun fasilitasi dengan target sebanyak 3 kegiatan.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2019 pagu kegiatan Penataan Batas Antar Daerah dan Penyusunan Toponimi/Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 508,150,000.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 493,019,379.00,- atau (97,02%). Dari pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, telah terbit lima Permendagri yaitu:

- 1) Permendagri No. 47 Tahun 2019 tentang Batas daerah Kab. Jember dengan Kab. Bondowoso;
- 2) Permendagri No. 48 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk;
- 3) Permendagri No. 57 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kab. Blitar dengan Kab. Kediri
- 4) Permendagri No. 97 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kab. Situbondo dengan Kab. Bondowoso;
- 5) Permendagri No. 98 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kab. Sidoarjo dengan Kab. Mojokerto.

Dengan ditetapkan 5 permendagri diatas, maka capaian segmen batas yang sudah clear diwilayah Jawa Timur menjadi sebesar 68,11 %.

3. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- a. Karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan

mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- b. Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).
- c. Secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas, di lapangan yang belum tegas, artinya belum sepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan.

Solusi :

- a. Dengan batas yang jelas, diyakini permasalahan ataupun konflik antar daerah tidak akan terjadi.
- b. Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan Kabupaten/ Kota.
- c. Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan daerahnya.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Jawa Timur selama Tahun 2019 :

a) Angin Kencang

Selama tahun 2019 ada 171 kejadian Bencana Angin Kencang di Jawa Timur yang meliputi 33 Kabupaten / Kota.

Penanganan Bencana Angin kencang di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.1 Kejadian Bencana Angin Kencang Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Malang	17
2	Kabupaten Jember	14
3	Kabupaten Sidoarjo	10
4	Kabupaten Bojonegoro	10
5	Kabupaten Nganjuk	10
6	Kabupaten Trenggalek	9
7	Kabupaten Mojokerto	7
8	Kabupaten Kediri	7

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

9	Kabupaten Lumajang	7
10	Kabupaten Bangkalan	7
11	Kabupaten Probolinggo	6
12	Kabupaten Jombang	6
13	Kabupaten Pacitan	6
14	Kabupaten Ponorogo	5
15	Kabupaten Ngawi	5
16	Kabupaten Pamekasan	5
17	Kabupaten Bondowoso	4
18	Kota Malang	4
19	Kabupaten Blitar	3
20	Batu Kota	3
21	Kota Batu	3
22	Kabupaten Lamongan	3
23	Kabupaten Madiun	3
24	Kabupaten Banyuwangi	2
25	Kabupaten Tulungagung	2
26	Kabupaten Situbondo	2
27	Kota Madiun	2
28	Kabupaten Sampang	2
29	Kabupaten Pasuruan	2
30	Kabupaten Magetan	2
31	Kabupaten Sumenep	1
32	Kabupaten Tuban	1
33	Kota Blitar	1
TOTAL		171

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

b) Angin Puting Beliung

Selama tahun 2019 ada 38 kejadian Bencana Puting Beliung di Jawa Timur yang meliputi 15 Kabupaten / Kota.

Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.2 Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Malang	1
2	Kabupaten Jember	8
3	Kabupaten Sidoarjo	3
4	Kabupaten Nganjuk	1
5	Kabupaten Lumajang	1
6	Kabupaten Bondowoso	1
7	Kabupaten Blitar	1
8	Kota Batu	2

9	Kabupaten Lamongan	3
10	Kabupaten Madiun	2
11	Kabupaten Banyuwangi	2
12	Kabupaten Tulungagung	6
13	Kabupaten Situbondo	2
14	Kabupaten Sumenep	4
15	Kabupaten Tuban	1
TOTAL		38

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

c) Gempa Bumi

Selama tahun 2019 ada 5 kejadian Bencana Gempa Bumi di Jawa Timur yang meliputi 5 Kabupaten.

Penanganan Bencana Gempa Bumi selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.3 Kejadian Bencana Gempa Bumi Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Malang	1
2	Kabupaten Jember	1
3	Kabupaten Lumajang	1
4	Kabupaten Banyuwangi	1
5	Kabupaten Sumenep	1
TOTAL		5

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

d) Banjir

Selama tahun 2019 ada 115 kejadian Bencana Banjir di Jawa Timur yang meliputi 29 Kabupaten / Kota.

Penanganan Bencana Banjir di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.4 Kejadian Bencana Banjir Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Malang	1
2	Kabupaten Jember	5
3	Kabupaten Sidoarjo	4
4	Kabupaten Bojonegoro	6
5	Kabupaten Nganjuk	3
6	Kabupaten Trenggalek	4
7	Kabupaten Mojokerto	13
8	Kabupaten Kediri	2
9	Kabupaten Lumajang	9

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

10	Kabupaten Bangkalan	4
11	Kabupaten Probolinggo	1
12	Kabupaten Jombang	5
13	Kabupaten Pacitan	3
14	Kabupaten Ponorogo	4
15	Kabupaten Ngawi	1
16	Kabupaten Pamekasan	1
17	Kota Malang	3
18	Kabupaten Blitar	2
19	Kota Batu	7
20	Kabupaten Lamongan	6
21	Kabupaten Madiun	4
22	Kabupaten Banyuwangi	3
23	Kabupaten Tulungagung	1
24	Kabupaten Sampang	3
25	Kabupaten Pasuruan	15
26	Kabupaten Magetan	1
27	Kabupaten Tuban	2
28	Kota Pasuruan	1
29	Kota Surabaya	1
TOTAL		115

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

e) Banjir Bandang

Selama tahun 2019 ada 2 kejadian Bencana Angin Kencang di Jawa Timur yang meliputi 2 Kabupaten.

Penanganan bencana banjir bandang selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.5 Kejadian Bencana Banjir Bandang Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bojonegoro	1
2	Kab. Mojokerto	1
TOTAL		2

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

f) Banjir dan Tanah Longsor

Selama tahun 2019 ada 4 kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Timur yang meliputi 3 Kabupaten / Kota.

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.6 Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Nganjuk	2
2	Kota Malang	1
3	Kab. Pacitan	1
TOTAL		4

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

g) Gelombang Pasang

Selama tahun 2019 ada 1 kejadian Bencana Gelombang Pasang di Jawa Timur yang meliputi 1 Kabupaten / Kota.

Penanganan bencana Gelombang Pasang selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.7 Kejadian Bencana Banjir Rob Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Lumajang	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

h) Gerakan Tanah

Selama tahun 2019 ada 1 kejadian Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur yang meliputi 1 Kabupaten.

Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.8 Kejadian Bencana Gerakan Tanah Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Lamongan	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

i) Kebakaran Lahan

Selama tahun 2019 ada 2 kejadian Bencana Kebakaran Lahan di Jawa Timur yang meliputi 2 Kabupaten.

Penanganan Bencana Kebakaran Lahan di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.9 Kejadian Bencana Kebakaran Lahan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Probolinggo	1

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

2	Kab. Situbondo	1
TOTAL		2

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

j) Kebakaran Hutan

Selama tahun 2019 ada 85 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang meliputi 20 Kabupaten.

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.10 Kejadian Bencana Kebakaran Hutan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Malang	5
2	Kabupaten Jember	7
3	Kabupaten Bojonegoro	4
4	Kabupaten Nganjuk	9
5	Kabupaten Trenggalek	1
6	Kabupaten Mojokerto	15
7	Kabupaten Kediri	2
8	Kabupaten Lumajang	6
9	Kabupaten Probolinggo	2
10	Kabupaten Jombang	1
11	Kabupaten Pacitan	1
12	Kabupaten Ponorogo	5
13	Kabupaten Ngawi	1
14	Kabupaten Bondowoso	2
15	Kabupaten Blitar	1
16	Batu Kota	3
17	Kabupaten Banyuwangi	2
18	Kabupaten Situbondo	8
19	Kabupaten Pasuruan	5
20	Kabupaten Magetan	5
TOTAL		85

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

k) Tanah Longsor

Selama tahun 2019 ada 34 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang meliputi 19 Kabupaten / Kota.

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Jawa Timur selama tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.11 Kejadian Bencana Kebakaran Hutan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Jember	2
2	Kabupaten Bojonegoro	1
3	Kabupaten Trenggalek	9
4	Kabupaten Mojokerto	2
5	Kabupaten Lumajang	2
6	Kabupaten Probolinggo	2
7	Kabupaten Pacitan	3
8	Kabupaten Ponorogo	3
9	Kota Malang	3
10	Kabupaten Blitar	3
11	Batu Kota	2
12	Kota Batu	1
13	Kabupaten Magetan	1
TOTAL		34

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur (Kejadian Bencana Tahun 2019)

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten / Kota)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "Status Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB / BPBD. "Status Bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan sesuai dengan peran dan fungsi dibidang kebencanaan, pada tahun 2019 BPBD Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.610.580.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 yang terdiri atas :

Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 11.868.605.000,00

Belanja Langsung (BL) Rp. 57.741.975.000,00

Realisasi s/d Desember 2019 Rp. 67.554.187.731,00

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2019 Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan Bencana Banjir,

Tanah Longsor, KLB Wabah Penyakit, Kebakaran Hutan dan Lahan Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 43.720.080.300,00 yang dipergunakan untuk :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Penanganan Kekeringan | Rp. 4.223.000.000,00 |
| 2) Penanganan Banjir | Rp. 19.977.666.100,00 |
| 3) Penanganan Wabah Penyakit (KLB) | Rp. 18.606.614.200,00 |
| 4) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan | Rp. 912.800.000,00 |

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a) Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
- b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);
- d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI / POLRI / SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi di Jawa Timur pada tahun 2020 :

a. Potensi Bencana Kekeringan

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

- **Kering Langka Terbatas**, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter / hari / orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter);
- **Kering Langka**, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer);
- **Kering Kritis**, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.

b. Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa, yang mempunyai luas 47.995

Km² meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur mempunyai **7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu :**

- Gunung Semeru
- Gunung Kelud
- Gunung Raung
- Gunung Ijen
- Gunung Bromo
- Gunung Lamongan
- Gunung Welirang

c. Potensi Bencana Sungai Besar

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sungai Besar, yaitu :

- **Sungai Bengawan Solo**, yang melintasi di 5 Kabupaten
Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik
- **Sungai Brantas** yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota
Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kota Surabaya

d. Potensi Bencana Tsunami

Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

e. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhnya batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut.

Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

f. Bencana Banjir

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan / daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan *bottleneck* Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai

dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

g. Bencana Tanah Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 21 Kabupaten yang merupakan daerah rawan Longsor, yaitu : Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Kota Batu.

h. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo merupakan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yakni penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Tahura R. Soerjo memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan di sekitarnya, yakni sebagai :

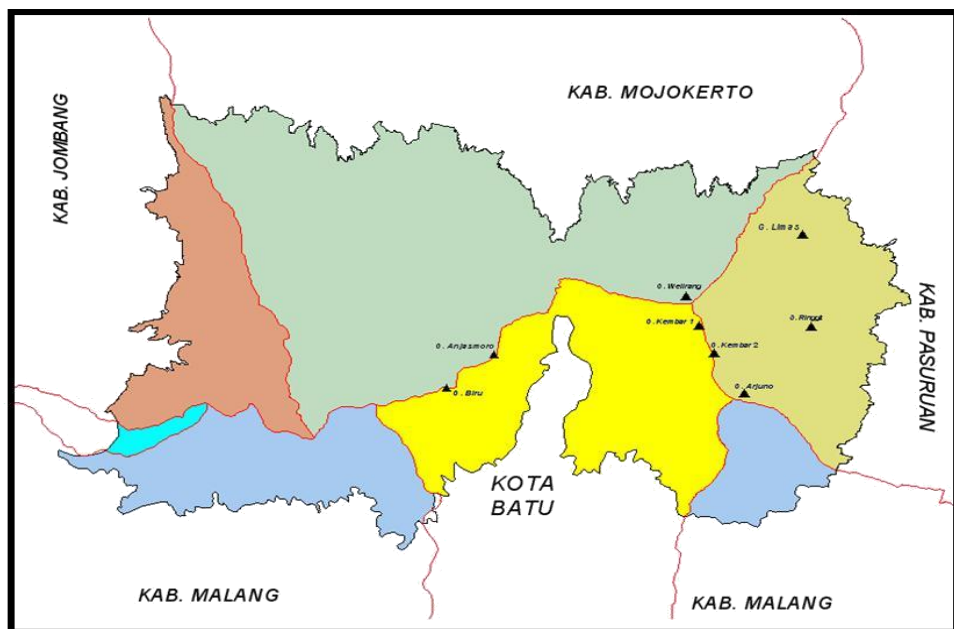
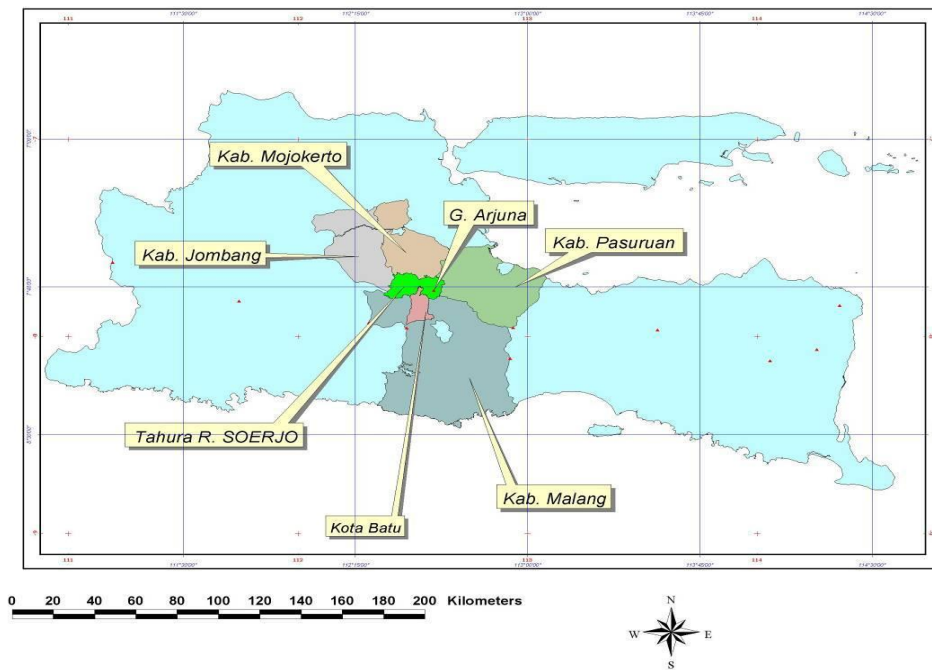
1. daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi sumber-sumber air maupun daerah-daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Konto, dan DAS-DAS yang lain.
2. ekosistem yang menyediakan ruang bagi keberlangsungan kehutanan flora dan fauna endemik/ non endemik.
3. obyek wisata alam dengan “bermodalkan” keunikan lansekap yang mampu menjadi pendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Tahura R. Soerjo terletak pada posisi 7° 40' 10" - 7° 49' 31" LS dan 112° 22' 13" - 112° 46' 30" BT. Luas wilayah mencapai 27.868,30 Ha. (didasarkan pada Kepmenhut Nomor 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, jo Nomor 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002). Kawasan Tahura R. Soerjo berbatasan (sekaligus masuk kedalam) wilayah administrasi kabupaten di sekitarnya, yaitu :

- Di sebelah utara, dengan : Kabupaten Mojokerto.
- Di sebelah timur, dengan : Kabupaten Pasuruan.
- Di sebelah selatan, dengan : Kabupaten Malang dan Kota Batu.
- Di sebelah barat, dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.

Gambar 6.1 Peta Situasi Taman Hutan Raya R. Soerjo

Peta Situasi Tahura R. SOERJO



Secara administratif, kawasan Tahura R. Soerjo yang termasuk dalam kelompok Hutan Arjuno lalijiwo terletak di enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kota Batu. Kawasan Tahura R Soerjo ini juga merupakan wilayah eks kawasan pemangkuan hutan dari KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Malang, KPH Pasuruan, dan KPH Jombang (ketiganya merupakan bekas kawasan hutan lindung), serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jatim yang merupakan eks cagar alam. Berikut ini adalah rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah :

Tabel 6.12 Rincian Kawasan Taman Hutan Raya R. Soerjo

NO	Eks KAWASAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	KPH Malang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Malang dan Kota Batu	14.091,40
2	KPH Pasuruan (Eks Hutan Lindung)	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto	5.952,20
3	KPH Jombang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Jombang dan Kab. Kediri	2.864,70
4	Balai Besar KSDA Jatim (Eks Cagar Alam)	Kab. Malang, Kab. Pasuruan, dan Kota Batu	4.960,00
JUMLAH			27.868,30

Kawasan hutan Tahura R. Soerjo merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 Ha dan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 Ha (seperti tersebut pada tabel di atas) yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu :

- Blok Perlindungan*, (dengan luas 7.490 Ha atau 26,88 %) adalah merupakan bagian Tahura yang memiliki kelerengan sangat curam, perwakilan ekosistem, tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perjanjian khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas, terdapat beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
 - Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas.
 - Penelitian ilmiah.
- Blok Koleksi Tumbuhan (Flora) dan Satwa (Fauna)*, (dengan luas 18.686,30 Ha atau 67,05 %) adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar, dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :

- Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna.
 - Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa.
 - Penelitian flora dan fauna.
- c. *Blok Pemanfaatan Intensif*, (dengan luas 258,1 Ha atau 0,93 %) adalah daerah di dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata bebas serta potensi pemanfaatan lainnya yang sesuai fungsi Tahura. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
- Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah.
 - Rehabilitasi satwa.
 - Pengembangan pengusaha pariwisata alam.
 - Pembinaan cinta alam.
 - Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.
- Adapun jenis pemanfaatan pada blok ini berupa :
- Cangar/ Arboretum, Jogging Track, Gua Jepang (Kota Batu).
 - Bumi Perkemahan Pacet, Watu Ondo, Watu Lumpang Putuk Puyang, Candi Pari, Air Terjun Widodari (Mojokerto).
 - Pait/ Coban Slimping, Madiredo/ Coban Supit Urang, Madiredo/ Coban Sriti (Malang).
 - Obyek Wisata Alam (OWA) Air Terjun Tretes, Prigen, Tambaksari (Pasuruan).
- d. *Blok Pemanfaatan Tradisional*, (dengan luas 201,25 Ha atau 0,72 %) adalah merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meredam tekanan masyarakat terhadap kawasan Tahura, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wanafarma atau wanatani dengan tetap mempertikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini adalah :
- Hutan cadangan pangan.
 - Wanafarma dan wanatani.
 - Penanaman tanaman semusim.
 - Penanaman tanaman buah-buahan oleh masyarakat.
 - Penanaman atau pengayaan tanaman hutan.
- e. *Blok Rehabilitasi*, (dengan luas 1.232,65 Ha atau 4,42 %) adalah blok yang diperuntukkan untuk merehabilitasi lokasi-lokasi yang terdegradasi seperti bekas

kebakaran dan lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman dan persemaian bibit tanaman.

Potensi TAHURA R. Soerjo

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi wilayah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam cukup besar. Disamping itu, kawasan hutan tersebut dapat mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura R. Soerjo yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Malang (30 titik), Kabupaten Pasuruan (15 titik), Kabupaten Mojokerto (69 titik), Kabupaten Jombang (14 titik) dan Kota Batu (35 titik).

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang dikelompokkan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu :

- a. Hutan Alam Cemara, terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon (kisaran) 80-156 pohon/ Ha.
- b. Padang Rumput, terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas sekitar 200 Ha.
- c. Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah, terdapat di ketinggian 2.000-2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.

Disamping dipergunakan sebagai tempat persemaian untuk kegiatan rehabilitasi, pada kawasan Tahura R. Soerjo juga dilakukan upaya pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Obyek Wisata Alam (OWA) di kawasan Tahura R Soerjo.

Obyek Wisata Alam seperti Permandian Air Panas Cangar, Air Terjun Watuondo, Air Terjun Tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya menjadi prioritas untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan kepada pengunjung.

Disekitar kawasan Tahura R. Soerjo terdapat 44 Desa penyangga yang tersebar di 6 Kabupaten/ Kota serta 43 Kelompok Tani Tahura (KTT). Berikut adalah tabel tentang lokasi Desa Penyangga dan KTT yang berada di Desa Penyangga Tersebut.

Tabel 6.13 lokasi Desa Penyangga dan KTT Desa Penyangga Potensi R. Soerjo

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
1	Kab. Malang : 1) Kec. Lawang 2) Kec. Singosari 3) Kec. Karangploso 4) Kec. Pujon 5) Kec. Ngantang 6) Kec. Kasembon	1) Wonorejo 2) Toyomarto 3) Gunungrejo 4) Klampak 5) Tawangargo 6) Madirejo 7) Wiyurejo 8) Tawangsari 9) Ngabab 10) Jombok 11) Pait	1) KTT Wono Agung 2) KTT Lestari 3) KTT Sukomulyo 4) KTT Wono Lestari 5) KTT Alam Lestari 6) KTT Harapan Makmur 7) KTT Mawar Mekar 8) KTT Kebon Garung 9) KTT Tani Lestari 10) KTT Budi Lestari 11) KTT Sumber Rejeki
2	Kab. Mojokerto : 1) Kec. Pacet 2) Kec. Trawas 3) Kec. Gondong 4) Kec. Jatirejo	1) Padusan 2) Pacet 3) Cembar 4) Claket 5) Kemiri 6) Sajen 7) Wiyu 8) Ketapan Rame 9) Trawas 10) Ngembat 11) Begagan Limo 12) Dilem 13) Gumeng 14) Tawang Rejo 15) Rejosari 16) Jembul	1) KTT Alam Lestari 2) KTT Budidaya 3) KTT Wonoagung 4) KTT Agung 5) KTT Rukun Makmur 6) KTT Sumber Gading 7) KTT Sidodadi Makmur 8) KTT Sumber Bejo 9) KTT Pringgondani 10) KTT Sumber Galuh 11) KTT Sentono Sari Rejo 12) KTT Nambi Agung 13) KTT Sumber Gading 14) KTT Watu Jengger 15) KTT Tirto Wening 16) KTT Dadapan
3	Kab. Pasuruan : 1) Kec. Purwosari 2) Kec. Purwodadi 3) Kec. Prigen	1) Cendono 2) Tambaksari 3) Prigen 4) Pencalukan 5) Ledug 6) Jatiarjo 7) Dayurejo 8) Lumbangrejo	1) KTT Lembu Lestari 2) KTT Wana Surya Lestari 3) KTT Sobowono 4) KTT Pelestari 5) KTT Sumber Makmur 6) KTT Arjuna Lestari 7) KTT Seruwo Rejo Makmur 8) KTT Gemah Ripah
4	Kabupaten Jombang : 1) Kec. Wonosalam	1) Carang wulung 2) Galengdowo 3) Panglungan 4) Jarak 5) Wonosalam	1) KTT Sumber Makmur 2) KTT Argowayang Lestari 3) KTT Ngudi Lestari 4) KTT Sadar Utama 5) KTT Wono Lestari
5	Kota Batu : 1) Kec. Bumiaji	1) Sumber Brantas 2) Tulungrejo 3) Giripurno	1) KTT Sumber Brantas 2) KTT Tahura Lestari
6	Kediri 1) Kec. Kandangan	1) Medowo	1) KTT Mulyolestari
	JUMLAH	44 desa	KTT

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Optimalisasi kawasan Tahura R. Soerjo, dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan kawasan yang memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut, strategi pengelolaan diarahkan kepada :

- a. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura termasuk siswa sekolah terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura R. Soerjo.
- b. Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan.
- c. Penggalan dan pengembangan potensi masyarakat desa penyangga.
- d. Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait baik instansi daerah maupun pusat dalam rangka konsolidasi dan penguatan kerjasama.
- f. Pengenalan tentang Tahura R. Soerjo, mengenai lokasi, potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.

2. Sumber Anggaran

Untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi. Pada Tahun 2019, UPT Tahura R. Soerjo mendapatkan dana Rp. 5.001.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.647.975.683 (92,92%) untuk mendukung Program Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Tahura R Soerjo yang terdiri atas 3 (tiga) kegiatan:

- a. Pemanfaatan Potensi Kawasan Tahura R Soerjo berupa perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana Tahura R. Soerjo
- b. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Tahura R Soerjo berupa pencegahan, penanggulangan dan penanganan gangguan keamanan hutan, dan penyuluhan terhadap generasi muda dan masyarakat penyangga Tahura R. Soerjo serta penguatan kelembagaan Kelompok Tani Tahura (KTT).
- c. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) (DAK) berupa pembangunan sarana prasaran OWA

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

Permasalahan

- Angka gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soerjo relatif masih tinggi seperti pencurian kayu yang disebabkan minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan yang melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 44 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soerjo sebagai daerah resapan air.
- Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal

Solusi:

- Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/ merekrut Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan.
- Meningkatkan fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan.
- Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangkau menggunakan teknik reboisasi yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara manual.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur

Beberapa jenis pelanggaran Peraturan Daerah diantaranya adalah penambangan pasir secara liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemakaian tanah tanpa izin dan atau pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan, Reklamasi Pantai, Peredaran minuman beralkohol, Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berupa operasi barung remang-remang, penyalagunaan perizinan dan bangunan di atas irigasi. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur di tangani oleh :

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman,

serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa Satpol PP juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta pengawasan Perlindungan Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat dikarenakan urgennya urusan ini, maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan ayat (2). Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Prov. Jatim dalam menjalankan tupoksinya antara lain :

1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan di jabarkan melalui 4 (empat) kegiatan :

- a. Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting.

Tabel 6.14 Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 451.100.000	Rp. 446.733.271	99,03%
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100%
Outcome: Jumlah kegiatan	kali	150	266	177%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pengawalan pejabat-pejabat penting dengan target 150 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi 266 kali dengan tingkat capaian 177%.

b. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Tabel 6.15 Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 276.500.000	Rp.269.812.000	93,23%
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100%
Outcome: Jumlah kegiatan	kali	44	31	70%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pengamanan unjuk rasa dengan target 44 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi 31 kegiatan dengan tingkat capaian 70%.

c. Patroli Wilayah Trantibum

Tabel 6.16 Patroli Wilayah Trantibum

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 1.191.400.000	Rp. 1.153.196.381	96,79 %
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100%
Outcome: Jumlah kegiatan	kali	100	102	102%

Jumlah patroli wilayah dengan target 100 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi terhadap target 102 kali tercapai 102% dengan sasaran permasalahan kasus pelanggaran berupa Operasi Tempat Hiburan karaoke, Penambangan galian c tanpa izin, minuman berakohol, PGOT dan lokalisasi yang salah satunya dilakukan dengan kegiatan operasi bersama patroli wilayah perbatasan dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Satpol PP Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan.

d. Penyelenggaraan Tibum dan Tramas

Tabel 6.17 Penyelenggaraan Tibum dan Tramas

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 759.000.000	Rp. 723.844.118	95.37%
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100%
Outcome: Jumlah kegiatan	kali	6	10	167%

Jumlah kegiatan pelaksanaan hubungan kerjasama di daerah perbatasan yang dikerjasamakan dengan target 6 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi 10 kali dengan capaian 167%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan di jabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan :

a. Pelatihan dan Koordinasi potensi anggota linmas dalam penanggulangan bencana.

Tabel 6.18 Pelatihan dan Koordinasi Potensi Anggota Linmas

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 469.866.000	Rp. 462.653.824	98,47 %
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100 %
Outcome: Jumlah peserta	orang	200	300	150 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah peserta kegiatan Pelatihan dan Koordinasi Potensi Anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dalam Rangka Penanganan Bencana di targetkan 200 orang dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 2 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi terhadap target sebanyak 300 orang dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 3 kali kegiatan dengan capaian 150% dengan hasil kegiatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam tanggap darurat bencana Tahun 2019, dan Simulasi Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam tanggap darurat bencana Tahun 2019.

- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing).

Tabel 6.19 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 1.000.700.000	Rp. 979.981.084	97,93 %
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100 %
Outcome: Jumlah peserta	orang	200	450	225 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa (Community Policing) dengan target 200 orang dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 2 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi 450 orang dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 3 kali kegiatan dengan capaian 225% berupa kegiatan Rapat koordinasi dan simulasi pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam penyelenggaraan PAM Swakarsa di Jawa Timur Tahun 2019.

- c. Pemberdayaan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran

Tabel 6.20 Pemberdayaan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp.250.000.000	Rp. 244.149.687	97,66%
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100%
Outcome: Jumlah peserta	orang	200	100	50%

Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Satlinmas, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran dengan target 200 orang dalam pelaksanaan sebanyak 1 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi sebanyak 100 orang dengan capaian 50% berupa kegiatan rapat koordinasi dan simulasi pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan dan pencegahan dini pada kebakaran.

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Penegakan Perda.

Untuk melaksanakan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Penegakan Perda dalam upaya penurunan kasus pelanggaran perda dititik beratkan pada kegiatan Penegakan Perda berupa : penertiban terhadap Kegiatan Masyarakat / Badan usaha terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) termasuk Galian C, Asset Prov, Jatim, Minuman beralkohol, prostitusi dan penggunaan sempadan jalan, serta sungai yang berimbas pada kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Perda selama Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 33 kali kegiatan terdapat 2922 kasus pelanggaran dengan penyelesaian sejumlah 137 kasus, dengan persentase capaian 46,92%. Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda yang di jabarkan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 6.21 Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Perda

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 784.200.000	Rp. 768.002.890	97,93 %
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100 %

Outcome: Jumlah kegiatan	kali	5	6	120 %
-----------------------------	------	---	---	-------

Jumlah kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah dengan target 5 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi 6 kali dengan realisasi capaian 120% dengan kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada pelajar SMU/SMK yang bertujuan memberikan pemahaman kepada kalangan masyarakat dan pelajar terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga nantinya bisa menjadi kader penegak Peraturan daerah sehingga bisa membantu meminimalisir pelanggaran Perda dan Perkada, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah

Tabel 6.22 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input: Dana	Rp	Rp 1.186.900.000	Rp. 1.120.985.890	96 %
Output: Waktu penyelenggaraan	bulan	12	12	100 %
Outcome: Jumlah kegiatan	kali	10	33	330 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah jumlah Penegakan Peraturan Daerah dengan terget 10 kali kegiatan selama 12 bulan terealisasi terhadap target sebanyak 33 kali dengan capaian 330%.

Untuk melaksanakan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan penegakan Perda, dalam upaya penurunan kasus pelanggaran perda dimana dititik beratkan pada kegiatan berupa : penertiban terhadap Kegiatan Masyarakat / Badan usaha terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) termasuk Galian C, Asset Prov, Jatim, pemakaian tanah tanpa izin, Minuman beralkohol, prostitusi dan penggunaan sempadan jalan oleh PKL, serta patroli air sidak susur sungai yang berimbas pada kerusakan lingkungan. kegiatan penegakan Perda yang dilakukan tidak hanya pada kegiatan yang ada pada rencana kerja bidang penegakan perda, tapi

juga pada kegiatan bersama dengan instansi samping terkait dan juga Satpol PP Kabupaten/Kota.

4. Program Pengembangan Dan Pelatihan Sumber Daya Anggota

Dalam pelaksanaan program Pengembangan Dan Pelatihan Sumber Daya Anggota selama Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 3 kegiatan dengan target peserta sejumlah 910 orang terealisasi sejumlah 944 orang dengan persentase capaian 103,74%. Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Penegakan Perda yang di jabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan :

1. Pelatihan Kesamaptaan Anggota Satpol PP Se Jatim
2. Bimbingan Teknis Aparat Satpol PP
3. Pelatihan SDM dan Performance PPNS Se Jatim serta Jabatan Fungsional Satpol PP.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

Setiap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melibatkan Instansi atau Lembaga lain antara lain :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota;
- b. Bakesbang Linmas Kab/Kota;
- c. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,;
- d. SKPD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Perda Bersanksi Pidana serta Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP);

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2019 memiliki personil sebanyak 223 orang dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 154 orang dan (PTT-PK) sebanyak 67 pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi :

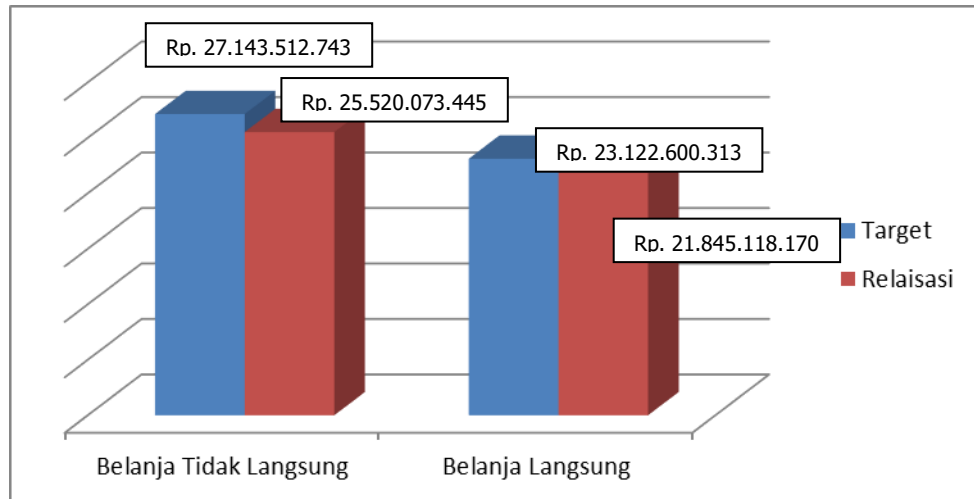
1. Pejabat Struktural : 16 Orang
2. Staf Administrasi : 69 Orang
3. Operasional Lapangan PNS dan PTT : 136 Orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Realisasi Anggaran Satpol PP Prov. Jatim

Tahun 2019

Gambar 6.2 Diagram Realisasi Anggaran Satpol PP Tahun 2019



Pada Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mendapatkan Anggaran sampai dengan saat P-APBD sebesar Rp. 50.266.113.056,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.365.191.615,- atau 94,23% yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung setelah P-APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 27.143.512.743 dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 25.520.073.445 atau 94,02 %.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung setelah P-APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 23.122.600.313,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 21.845.118.170,- atau 94,48 % dengan penyerapannya melalui 8 (delapan) Program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu melakukan koordinasi dengan Instansi/ Badan Dinas lain yang dapat mendukung dan memberikan bantuan tenaga maupun pikiran dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota di Jawa Timur, unsur dari TNI maupun POLRI serta dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota (Dinas Sosial, Dinas ESDM, Dinas PU Pengairan,

Dinas PU Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup). Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya Penertiban Penambang Pasir Galian C yang dilakukan dengan Satpol PP Kabupaten/Kopta dengan melibatkan satuan dari POLRI sebagai penguatan pengamanan operasi.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan – permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

- 1) Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi;
- 2) Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah;
- 3) Kurangnya dukungan lembaga sosial – politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.
- 4) Belum optimalnya sekretariat bersama PPNS di lingkungan Satpol PP Prov.Jatim dengan PPNS yang ada di lingkungan SKPD Prov. Jatim.

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang telah diuraikan diatas, jumlah Satpol PP dan PPNS di Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP dan PPNS perlu adanya peningkatan dan perubahan *performance* baik kuantitas maupun kualitasnya.

Solusi :

- 1) Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap berbagai pihak terkait permasalahan Ketentraman dan ketrtibam umum terhadap pemangku Perda;
- 2) Penyelenggaran ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah;
- 3) Keterbukaan pelayanan publik terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan

- 4) Penerapan *reward and punishment system* dalam organisasi secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas.
- 5) Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan masyarakat dan gangguan kamtibmas serta bencana.
- 7) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dilingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, melalui Bidang Hubungan Antar Lembaga dengan Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, melalui Bidang Budaya Politik dengan Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik, serta didukung pula oleh Bidang Integrasi Bangsa melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pemantapan Pembauran Kebangsaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suasana aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung proses pembangunan di segala sektor, serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Dalam mewujudkan Jawa Timur yang kondusif juga perlu meningkatkan/memantapkan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antara pemerintah dengan aparat pemerintah daerah (TNI, POLRI, Instansi/Lembaga), organisasi masyarakat/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda serta elemen masyarakat lainnya. Karena itu berikut disampaikan gangguan yang terjadi, Perangkat Daerah terkait yang menangani, jumlah SDM yang menanganinya, penanggulangan serta kendalanya, serta keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan sebagai berikut :

1. Gangguan yang terjadi :

a. Konflik berlatar belakang Politik

Pada tahun 2019 telah diselenggarakan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden secara serentak

pada tanggal 17 April 2019, yang secara umum berjalan lancar, tertib, aman, dan kondusif. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, antara lain adanya beberapa petugas penyelenggara tahapan pemilu di daerah mengalami kelelahan/kendala kesehatan, dan juga ada kejadian di lapangan seperti konflik antar pendukung Paslon di daerah, dan perseteruan personal, yang dapat diantisipasi dengan baik oleh aparat keamanan. Secara umum Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dilaksanakan dengan baik dan dapat dijadikan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.

b. Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA)

Pertengahan tahun 2019 telah terjadi perseteruan antara kelompok mahasiswa Papua (Aliansi Mahasiswa Papua) dengan masyarakat di wilayah Kota Surabaya dan Kota Malang. Peristiwa tersebut menjadi besar karena ada perkataan yang kurang pantas dari beberapa oknum yang didokumentasikan di media sosial, kemudian berkembang menjadi berita hoax, sehingga menjadi pemicu aksi intoleransi/kesukuan di Jawa Timur dan di wilayah Papua/Papua Barat. Perseteruan/permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, antara Forkopimda Jawa Timur dengan Forkopimda Papua/Papua Barat. Dengan adanya kegiatan tersebut, telah disepakati antara pemerintah (BIN, Kementerian PUPR) dengan Pemprov Jawa Timur akan membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Kota Surabaya dan Kota Malang dengan pembiayaan oleh anggaran APBN.

c. Konflik berlatar belakang pertanahan/ Sumber Daya Alam (SDA) :

Pada tahun 2019 masih terdapat konflik berlatar belakang sumber daya alam, antara lain konflik pembebasan lahan pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dan perseteruan antara masyarakat dengan pengelola PT. Bumi Sekses Indo (PT.BSI) di Banyuwangi. Untuk pembebasan lahan pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban telah berjalan sesuai dengan rencana program pembebasan lahan dan relatif kondusif, sedangkan untuk perseteruan antara PT. BSI dengan masyarakat di Banyuwangi, sampai saat ini masih dalam proses mediasi.

d. Konflik berlatar belakang ekonomi/industri :

Terdapat gejolak antara buruh dengan perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik dan Mojokerto, serta konflik antara

petani garam dengan pengusaha garam di wilayah Madura. Selain itu secara periodik telah dilaksanakan aksi buruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kab/Kota (UMK/UMSK), dan aksi May Day. Namun semua permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik antara pemerintah, pemda, pengusaha dan asosiasi pekerja/buruh.

e. Konflik berlatar belakang sosial budaya :

Telah terjadi konflik internal Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2018, namun dampak perseteruan tersebut masih dirasakan dan memicu timbulnya perselisihan – perselisihan kecil di berbagai wilayah Jawa Timur tahun 2019, antara lain di Banyuwangi, Nganjuk, Tulungagung, Magetan, dan berbagai wilayah lainnya. Telah dilakukan upaya-upaya mediasi tahun 2019 antara kedua belah pihak, namun belum ada titik temu karena ego dari masing-masing pihak serta saling klaim bahwa kelompoknya yang sah. Sampai saat ini terus dilakukan upaya mediasi penyelesaian.

Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah berhasil dalam meredam berbagai potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam mendukung pencegahan dan penyelesaian konflik di wilayah Jawa Timur, kami juga mendorong FKDM, FKUB, FPK tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota untuk ikut serta memberikan analisa, langkah-langkah dan upaya penyelesaian. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat secara aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik terbuka terutama berlatar belakang sosial budaya.

2. Perangkat Daerah yang menangani :

- a. Kepolisian, TNI, BIN, dan Bakesbangpol untuk deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
- b. Bakesbangpol, Kepolisian, TNI, BPN, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas ESDM, Dinas Sosial, serta berbagai Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di wilayah Jawa Timur untuk pengawasan dan penanganan konflik sosial.
- c. Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Bakesbangpol sebagai aparatur untuk menangkal radikalisme, meningkatkan wawasan kebangsaan dan Nasionalisme.

- 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan** pada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, pada 31 Desember 2019 sebanyak 74 orang yang terdiri dari :

Pendidikan :

- a. S 2 : 18 orang
- b. S 1 : 28 orang
- c. D III : 2 orang
- d. SMA : 22 orang
- e. SMP : 1 orang
- f. SD : 3 orang

Golongan :

- a. Golongan I : 2 orang
- a. Golongan II : 22 orang
- b. Golongan III : 36 orang
- c. Golongan IV : 14 orang

- 4. Sumber dan Jumlah Anggaran :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa memiliki sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Timur dengan jumlah anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 36.981.019.000,00 (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan belas ribu rupiah)

- 5. Penanggulangan dan Kendalanya :**

Penanggulangan :

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan / kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengimplementasikan regulasi daerah antara lain : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State Of Iraq And Syria* di Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jatim, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pelaturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing, menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, dan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

- b. Memantapkan Tim Terpadu serta Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menangani konflik sosial serta *hate speech* (ujaran kebencian), guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif serta mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengaktifkan kembali posko terpadu pemantauan perkembangan situasi kamtibmas di daerah.
- d. Mendorong optimalisasi kinerja forum-forum di daerah antara lain Forpimda, Kominda, FKDM, FKPM, FKUB, FKPT, dll.
- e. Mendorong sinergitas trisula di daerah yaitu TNI, POLRI dan pemda. Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan LSM untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melalui pengaktifan poskamling di daerah.

Kendala :

Kendala – kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya aparatur pemerintah daerah (kuantitas dan kualitas), khususnya tenaga lapangan yang melaksanakan fungsi intelijen.
- b. Masih adanya ego sektoral pada instansi/lembaga dan OPD terkait dalam pelaksanaan.
- c. Kurangnya payung hukum yang dapat memberikan akses kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan deteksi dini dan mencegah potensi konflik di masyarakat terutama berlatar belakang sosial dan budaya.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan :

Setiap melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik sosial maupun gangguan keamanan dalam negeri Bakesbangpol selalu melibatkan dan bersinergi dengan aparat keamanan terkait antara lain pihak TNI (Kodam V Brawijaya, ARMATIM, LANTAMAL, Kodim dan jajaran komando TNI lainnya), POLRI (Polda, Polres dan

jajarannya), BNNP/BNNK, serta koordinasi dan sinergi dengan Kominda Jatim dibawah Komando BIN daerah Jatim, untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri tersebut.

Melalui upaya sinergitas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), maka pelaksanaan tugas deteksi dini dan cegah dini diharapkan mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan Forkopimda.



BAB VII

P E N U T U P

BAB VII

P E N U T U P

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang mencakup seluruh penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecahan masalah setiap urusan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain LKPJ ini, masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada DPRD Provinsi Jawa Timur secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 patut disyukuri. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur tersebut semata-mata karena atas dukungan, kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh komponen masyarakat Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan damai. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan saran, kritik, dan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.